

**RENCANA KERJA  
PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN TANAH LAUT**



**RKPD  
TAHUN 2021**



**BAPPEDA KABUPATEN TANAH LAUT  
TAHUN 2020**



**SALINAN**

BUPATI TANAH LAUT

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT  
NOMOR 95 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)  
KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Paragraf 8 Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana

- Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  14. Peraturan Daerah Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 7);
  15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 10);
  16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Laut 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 Nomor 11);
  17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
  18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Laut 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 33);

**Memperhatikan** : Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 13 Juli 2020;



## M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2021.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten Tanah Laut.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
9. Rencana Kerja SKPD yang selanjutnya disingkat Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA SKPD adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasari untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.
12. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

13. Indikatif adalah sesuatu yang masih bersifat dapat dilakukan penyesuaian berdasarkan hasil analisa, perhitungan, dan pembahasan serta tidak bersifat kaku.
14. Keadaan Darurat adalah Suatu keadaan tidak normal/tidak diinginkan yang terjadi pada suatu tempat/kegiatan, yang cenderung membahayakan bagi manusia, merusak peralatan/harta-benda atau merusak lingkungan sekitarnya. Suatu kejadian yang di dalam daerah unit itu sendiri yang disebabkan oleh sesuatu dari dalam/luar.

## BAB II RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

### Pasal 2

- (1) RKPD dan Matrik Program Prioritas Tahun 2021 serta rumusan program kegiatan sub kegiatan per SKPD hasil pemetaan adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2021 yang terhitung mulai Tanggal 1 Januari 2021 dan berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021.
- (2) RKPD Tahun 2021 memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja, dan pendanaan, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong Partisipasi masyarakat.
- (3) RKPD Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi :
  - a. pedoman perumusan penyempurnaan rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah; dan
  - b. pedoman penyusunan Rancangan kebijakan umum APBD Tahun 2021 serta rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara.

### Pasal 3

RKPD Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 4

- (1) Matrik Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 merupakan rencana indikatif program/kegiatan beserta pendanaannya yang akan dilaksanakan pada Tahun 2021.
- (2) Program/kegiatan/sub kegiatan yang belum tercantum dalam RKPD ini dapat dilaksanakan sepanjang apabila :
  - a. pelaksanaan program/kegiatan karena adanya kebijakan Pemerintah Provinsi dan Pusat terkait dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) ataupun dana pusat lainnya yang informasinya diperoleh setelah disahkannya Peraturan Bupati tentang RKPD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 ini.
  - b. petunjuk teknis dari kementerian dan/atau lembaga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari RKPD ini; dan
  - c. keadaan mendesak dan atau darurat yang tidak bisa diprediksi sebelum disahkannya RKPD ini.

- d. Hasil pemutakhiran terhadap program/kegiatan/sub kegiatan oleh Kementrian Dalam Negeri dalam rangka tindak lanjut hasil pemetaan terhadap klasifikasi, kodefikasi, nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.
- (3) Tahapan selanjutnya dari penetapan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah verifikasi terhadap Renja SKPD yang meliputi kegiatan antara lain :
- a. pembahasan kesesuaian antara program dan kegiatan SKPD dengan program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD;
  - b. pembahasan untuk menentukan keluaran/*output* dan hasil/*outcome* setiap program/kegiatan;
  - c. pembahasan untuk menghitung alokasi pagu dari setiap *output* kegiatan untuk setiap program;
  - d. menghitung alokasi pagu setiap program setelah *output* kegiatan pada setiap program diverifikasi kebenarannya; dan
  - e. menghitung alokasi pagu SKPD berdasarkan program yang menjadi tanggung jawab SKPD.
- (4) Kepala SKPD menetapkan Renja SKPD paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Bupati ini ditetapkan oleh Bupati.

### BAB III KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH



ALFIRIAL, S.H. M.H.  
NIP.19750203 199903 2 008

Ditetapkan di Pelaihari  
pada tanggal 15 Juli 2020

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

Diundangkan di Pelaihari  
pada tanggal 15 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANAH LAUT,

Ttd

H. DAHNIAL KIFLI

## DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI .....	i
DAFTAR TABEL .....	ii
DAFTAR GAMBAR .....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang .....	I-1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan .....	I-4
1.3. Hubungan antar Dokumen .....	I-5
1.4. Maksud dan Tujuan.....	I-6
1.5. Sistematika Dokumen RKPD .....	I-7
<b>BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH</b>	
2.1. Kondisi Umum Kondisi Daerah .....	II-1
2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD dan Realisasi RPJMD sampai dengan Tahun 2019 .....	II-115
2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah .....	II-119
<b>BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH</b>	
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah .....	III-1
3.2. Arah kebijakan Keuangan Daerah .....	III-4
<b>BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	
4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan .....	IV-1
4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2021 .....	IV-4
<b>BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH</b>	V-1
<b>BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH</b>	VI-1
<b>BAB VII P E N U T U P</b>	VII-1
<b>LAMPIRAN</b>	



## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Luas Wilayah Daratan Kabupaten Tanah Laut Menurut Kecamatan .....	II-2
Tabel 2.2 Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Tanah Laut, 2019 .....	II-3
Tabel 2.3 Luas Wilayah Menurut Kondisi Kelerengan, 2019 .....	II-4
Tabel 2.4 Pembagian Satuan Wilayah Sungai di Kabupaten Tanah Laut, 2019 .....	II-8
Tabel 2.5 Suhu Udara Minimum, Maksimum dan Rerata di Kabupaten Tanah Laut (°C), 2019 .....	II-9
Tabel 2.6 Kelembaban Udara Minimum, Maksimum dan Rerata di Kabupaten Tanah Laut (°C), 2019 .....	II-10
Tabel 2.7 Kecepatan Angin Maksimum dan Rerata di Kabupaten Tanah Laut (knot), 2019 .....	II-10
Tabel 2.8 Rerata Penyiaran Matahari di Kabupaten Tanah Laut (%), 2019 .....	II-11
Tabel 2.9 Banyaknya Curah Hujan Menurut Bulan (mm), 2019 .....	II-11
Tabel 2.10 Tahapan Pelaksanaan Pembangunan dan Pengembangan Kabupaten Tanah Laut .....	II-16
Tabel 2.11 Sejarah Kejadian Bencana di Kabupaten Tanah Laut, 2000-2019 .....	II-23
Tabel 2.12 Potensi Ancaman Bencana di Kabupaten Tanah Laut .....	II-25
Tabel 2.13 Data Kejadian Bencana di Kabupaten Tanah Laut .....	II-25
Tabel 2.14 Potensi Penduduk Terpapar Bencana di Kabupaten Tanah Laut .....	II-26
Tabel 2.15 Potensi Ancaman Bencana di Kabupaten Tanah Laut .....	II-26
Tabel 2.16 Kapasitas Daerah dalam Menghadapi Bencana di Kabupaten Tanah Laut .....	II-27
Tabel 2.17 Tingkat Risiko Bencana di Kabupaten Tanah Laut .....	II-28

Tabel 2.18	Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Tanah Laut, 2010-2019 .....	II-32
Tabel 2.19	Distribusi dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Tanah Laut, 2019 .....	II-32
Tabel 2.20	Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin di Kabupaten Tanah Laut, 2019 .....	II-33
Tabel 2.21	Pertumbuhan Ekonomi Kab. Tanah Laut Menurut Lapangan Usaha (%), 2015-2019 .....	II-37
Tabel 2.22	Kontribusi PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha di Kab. Tanah Laut (%), 2019 .....	II-38
Tabel 2.23	PDRB Per kapita ADH dan ADHK Kabupaten Tanah Laut, 2015-2019 .....	II-42
Tabel 2.24	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Kabupaten Tanah Laut, 2015-2019 .....	II-47
Tabel 2.25	Angka Rata-Rata Lama Sekolah di Kabupaten Tanah Laut, 2013-2019 .....	II-51
Tabel 2.26	Angka Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Tanah Laut, 2013-2019 .....	II-52
Tabel 2.27	Angka Harapan Hidup di Kabupaten Tanah Laut, 2013-2019 .....	II-53
Tabel 2.28	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Tanah Laut, 2019 .....	II-56
Tabel 2.29	Angka Partisipasi Sekolah di Kabupaten Tanah Laut, 2014-2019 .....	II-56
Tabel 2.30	Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Tanah Laut, 2019 .....	II-58
Tabel 2.31	Fasilitas Pendidikan dan Tenaga Pendidik Jenjang TK di Kabupaten Tanah Laut, 2019 .....	II-59
Tabel 2.32	Fasilitas Pendidikan dan Tenaga Pendidik Jenjang SD/MI di Kab. Tanah Laut, 2019 .....	II-60
Tabel 2.33	Fasilitas Pendidikan dan Tenaga Pendidik Jenjang	

	SMP/MTs di Kab. Tanah Laut, 2019 .....	II-61
Tabel 2.34	Pencapaian SPM Bidang Pendidikan Tahun 2019 .....	II-61
Tabel 2.35	Jumlah Fasilitas Kesehatan Menurut Kecamatan di Kabupaten Tanah Laut, 2019 .....	II-63
Tabel 2.36	Jumlah Tenaga Kesehatan Menurut Kecamatan di Kabupaten Tanah Laut, 2019 .....	II-64
Tabel 2.37	Jumlah Tenaga Medis di Kabupaten Tanah Laut .....	II-64
Tabel 2.38	Persentase Perempuan Pernah Kawin Berumur 15-49 Tahun yang Melahirkan Anak Lahir Hidup Menurut Klasifikasi Desa dan Penolong Proses Kelahiran di Kab. Tanah Laut, 2019 .....	II-65
Tabel 2.39	Persentase Balita yang Pernah Mendapat Imunisasi Menurut Jenis di Kab. Tanah Laut, 2015-2019 .....	II-66
Tabel 2.40	Jumlah Kasus 10 Penyakit Terbanyak di Kabupaten Tanah Laut, 2019 .....	II-67
Tabel 2.41	Jumlah Kasus HIV/AIDS dan DBD di Kabupaten Tanah Laut, 2019 .....	II-67
Tabel 2.42	Jumlah Bayi Lahir, Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR), BBLR Dirujuk, dan Bergizi Buruk di Kabupaten Tanah Laut, 2016-2019 .....	II-68
Tabel 2.43	Jumlah Ibu Hamil, Melakukan Kunjungan K1 dan K4, Kurang Energi Kronis, dan Mendapat Tablet Zat Besi (Fe) di Kab. Tanah Laut, 2016-2019 .....	II-68
Tabel 2.44	Jumlah Ibu Hamil, Melakukan Kunjungan K1 dan K4, Kurang Energi Kronis, dan Mendapat Tablet Zat Besi (Fe) di Kab. Tanah Laut, 2013-2019 .....	II-69
Tabel 2.45	Pencapaian SPM Bidang Kesehatan Tahun 2019 .....	II-70
Tabel 2.46	Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan di Kabupaten Tanah Laut (km), 2019 .....	II-71
Tabel 2.47	Panjang Jalan Menurut Kecamatan di Kabupaten Tanah Laut (km), 2019 .....	II-72
Tabel 2.48	Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan Jalan dan Kecamatan di Kabupaten Tanah Laut (km), 2019 .....	II-72

Tabel 2.49	Pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2019 ...	II-75
Tabel 2.50	Pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Tahun 2019 .....	II-75
Tabel 2.51	Pencapaian SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat Tahun 2019 .....	II-76
Tabel 2.52	Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Perlindungan Sosial yang Diterima di Kabupaten Tanah Laut, 2019 .....	II-77
Tabel 2.53	Persentase Rumah Tangga dengan Jaminan Sosial Menurut Jenis dan Tempat Tinggal di Kabupaten Tanah Laut, 2019 .....	II-77
Tabel 2.54	Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Kabupaten Tanah Laut, 2019	II-78
Tabel 2.55	Tingkat Pengangguran Terbuka .....	II-78
Tabel 2.56	Data Pengangguran pada bulan April 2020 diakibatkan karena Pandemi Covid .....	II-79
Tabel 2.57	Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama di Kabupaten Tanah Laut, 2019 .....	II-79
Tabel 2.58	Jumlah Akta Kelahiran di Kabupaten Tanah Laut, 2019 ....	II-81
Tabel 2.59	Persentase Penduduk Berumur 0-17 Tahun yang Memiliki Akta Kelahiran di Kabupaten Tanah Laut, 2018 .....	II-82
Tabel 2.60	Jaringan Jalan Kabupaten Tanah Laut, 2019 .....	II-82
Tabel 2.61	Jumlah Koperasi Berdasarkan Jenisnya di Kabupaten Tanah Laut, 2014-2019 .....	II-84
Tabel 2.62	Jumlah Koperasi Menurut Jenis Koperasi dan Kecamatan di Kab. Tanah Laut, 2019 .....	II-84
Tabel 2.63	Jumlah KUD dan Non KUD (unit), Anggota (orang), dan Simpanan (Rp Juta), 2018 .....	II-85
Tabel 2.64	Hasil Kinerja Urusan Statistik Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, 2014-2019 .....	II-86
Tabel 2.65	Nama Obyek Wisata Budaya di Kabupaten Tanah Laut, 2019 .....	II-89
Tabel 2.66	Jumlah dan Nilai Produksi Perikanan Tangkat Laut di Kabupaten Tanah Laut, 2019 .....	II-91



Tabel 2.67	Jumlah dan Nilai Produksi Perikanan Tangkat Perairan Umum di Kab. Tanah Laut .....	II-92
Tabel 2.68	Produksi Perikanan Budidaya Menurut Kecamatan dan Subsektor di Kabupaten Tanah Laut (tn), 2019 .....	II-93
Tabel 2.69	Produksi Perikanan Budidaya Menurut Jenis Ikan dan Jenis Budidaya di Kabupaten Tanah Laut (ton), 2019 .....	II-94
Tabel 2.70	Jumlah Rumah Tangga Perikanan Budidaya Menurut Kecamatan dan Subsektor di Kabupaten Tanah .....	II-94
Tabel 2.71	Nama Obyek Wisata di Kabupaten Tanah Laut, 2019 .....	II-96
Tabel 2.72	Jumlah Wisatawan Asing dan Wisatawan Domestik Menurut Bulan di Kabupaten Tanah Laut, 2019 .....	II-97
Tabel 2.73	Jumlah Wisatawan Kabupaten Tanah Laut .....	II-97
Tabel 2.74	Luas Lahan Sawah Menurut Kecamatan dan Jenis Pengairan di Kabupaten Tanah Laut (ha), 2019 .....	II-99
Tabel 2.75	Luas Lahan Tegal/Kebun, Ladang/Huma, dan Lahan yang Sementara Tidak Diusahakan Menurut Kecamatan di Kabupaten Tanah Laut, 2019 .....	II-100
Tabel 2.76	Perkembangan Luas Panen dan Produksi Padi Ladang dan Padi Sawah di Kabupaten Tanah Laut, 2014-2019 .....	II-101
Tabel 2.77	Luas Panen dan Produksi Padi Ladang dan Padi Sawah Menurut Kecamatan di Kabupaten Tanah Laut, 2019 .....	II-101
Tabel 2.78	Luas Panen dan Produksi Jagung Menurut Kecamatan di Kab. Tanah Laut, 2019 .....	II-102
Tabel 2.79	Perkembangan Luas Areal dan Produksi Karet, Kelapa dan Kelapa Sawit di Kabupaten Tanah Laut, 2014-2019 .....	II-103
Tabel 2.80	Perkembangan Populasi Ternak dan Unggas di Kab. Tanah Laut (ekor), 2014-2019 .....	II-104
Tabel 2.81	Jumlah Pedagang Menurut Kecamatan di Kabupaten Tanah Laut, 2019 .....	II-105
Tabel 2.82	Jumlah Bank di Kabupaten Tanah Laut, 2018 .....	II-112
Tabel 2.83	Jumlah Hotel dan Rumah Makan Menurut Kecamatan di Kab. Tanah Laut, 2019 .....	II-113

Tabel 2.84	Jenis dan Lama Proses Perizinan di Kabupaten Tanah Laut, 2019 .....	II-114
Tabel 2.85	Realisasi Belanja Langsung APBD Tahun 2019 per Perangkat Daerah .....	II-115
Tabel 3.1	Proyeksi Pendapatan Kabupaten Tanah Laut .....	III-10
Tabel 3.2	Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 .....	III-15
Tabel 3.3	Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 .....	III-16
Tabel 4.1	Penyelarasan sasaran daerah dengan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2021 .....	IV-8
Tabel 4.2	Hubungan Tujuan, Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut .....	IV-8
Tabel 4.3	Keselarasan antara Estándar Pelayanan Minimal dan Prioritas Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 .....	IV-9
Tabel 6.1	Target Indikator Makro Tahun 2021 .....	VI-3
Tabel 6.2	Target Indikator Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2021 .....	VI-5

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Wilayah Administratif Kabupaten Tanah Laut .....	II-2
Gambar 2.2 Peta Jaringan Sungai di Kabupaten Tanah Laut, 2019 ....	II-8
Gambar 2.3 Persentase Luas Wilayah Menurut Tekstur Tanah, 2019 .....	II-13
Gambar 2.4 Piramida Penduduk Kabupaten Tanah Laut, 2019 .....	II-34
Gambar 2.5 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tanah Laut dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan, 2019 .....	II-36
Gambar 2.6 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tanah Laut Menurut Sektor, 2019 .....	II-38
Gambar 2.7 Kontribusi PDRB Menurut Sektor di Kabupaten Tanah Laut (%), 2019 .....	II-40
Gambar 2.8 Laju Inflasi Kota Banjarmasin, 2015-2019 .....	II-41
Gambar 2.9 Angka Gini Rasio Kabupaten Tanah Laut, 2019 .....	II-43
Gambar 2.10 Indeks Gini di Provinsi Kalimantan Selatan Menurut Kabupaten/Kota, 2019 .....	II-44
Gambar 2.11 Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Tanah Laut, 2015-2019 .....	II-45
Gambar 2.12 Persentase Angka Kemiskinan Menurut Kab/Kota di Prov. Kalimantan Selatan, 2019 .....	II-46
Gambar 2.13 Perkembangan IPM Kabupaten Tanah Laut, 2015-2019..	II-48
Gambar 2.14 Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Kalimantan Selatan Menurut Kab/Kota, 2019 .....	II-49
Gambar 2.15 Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Minum, 2019 .....	II-74
Gambar 2.16 Peta Resiko Bencana Banjir di Kab. Tanah Laut .....	II-109
Gambar 2.17 Peta Resiko Bencana Banjir Bandang di Kab. Tanah Laut .....	II-109
Gambar 2.18 Peta Resiko Bencana Kekeringan di Kabupaten Tanah Laut .....	II-110

Gambar 4.1	Penyelarasan Prioritas RKP dengan RKPD Kabupaten Tanah Laut .....	IV-8
Gambar 4.2	Penyelarasan Prioritas RKPD Provinsi Kalimantan Selatan dengan RKPD Kabupaten Tanah Laut .....	IV-9



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

(II.A.11 = 0.1)

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Sesuai dengan amanat tersebut, maka setiap pemerintah daerah diharuskan menyusun rencana pembangunan yang sistematis, terarah, terpadu dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan keunggulan komparatif wilayah dan kemampuan sumberdaya keuangan daerah. Perencanaan pembangunan daerah tersebut salah satunya adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang terdiri dari RKPD, Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rencana Kerja Anggaran (RKA) Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

RKPD memuat gambaran umum kondisi daerah, rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari APBD maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 disusun dengan menggunakan pendekatan penganggaran berbasis program (*money follow program*) melalui penganggaran berbasis kinerja dan dengan pendekatan perencanaan partisipatif yang melibatkan peran serta masyarakat sebagai

*stakeholders* dengan proses yang partisipatif, memungkinkan masyarakat menyalurkan aspirasinya dan mampu memantau kinerja pemerintah, sehingga semakin meningkatkan transparansi dan akuntabilitas aparat pemerintah dalam mengakomodasi berbagai kepentingan masyarakat.

RKPD disusun dengan tahapan sebagai berikut:

a. Persiapan penyusunan RKPD

Pada tahap persiapan ini dilakukan beberapa proses yaitu:

1. penyusunan rancangan keputusan kepala daerah tentang pembentukan tim penyusun RKPD;
2. orientasi mengenai RKPD oleh tim penyusun RKPD;
3. penyusunan agenda tim kerja tim penyusun RKPD; dan
4. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan SIPD.

b. Penyusunan rancangan awal RKPD

Pada tahap penyusunan rancangan awal RKPD aktivitas yang dilakukan adalah menganalisis, merumuskan dan menelaah hal - hal sebagai berikut:

1. analisis gambaran umum kondisi daerah;
2. analisis rancangan kerangka ekonomi daerah;
3. analisis kapasitas riil keuangan daerah;
4. penelaahan rancangan awal renja perangkat daerah;
5. perumusan permasalahan pembangunan daerah;
6. penelaahan terhadap sasaran RPJMD;
7. penelaahan terhadap arah kebijakan RPJMD;
8. penelaahan terhadap kebijakan pemerintah pada RKP dan program strategis nasional;
9. penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD;
10. perumusan prioritas pembangunan daerah; dan
11. perumusan rencana kerja program dan pendanaan.

Adapun penyajian rancangan awal RKPD disajikan dengan sistematika paling sedikit sebagai berikut:

1. Pendahuluan.
2. Gambaran Umum Kondisi Daerah.
3. Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah.

4. Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah.
5. Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah.
6. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
7. Penutup.

Rancangan awal dikonsultasi publikasi untuk mendapat masukan dan saran guna penyempurnaan Rancangan Awal RKPD, yang mana Rancangan Awal yang disempurnakan tersebut menjadi pedoman penyempurnaan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah.

c. Penyusunan rancangan RKPD

Penyusunan rancangan RKPD merupakan proses penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD berdasarkan hasil verifikasi renja perangkat daerah yang telah disempurnakan dan berdasarkan hasil penelaahan terhadap rancangan RKPD provinsi, RKP dan program strategis nasional. Verifikasi dimaksud adalah mengintegrasikan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif pada setiap rancangan renja perangkat daerah sesuai dengan rencana program prioritas pada rancangan awal RKPD Kabupaten Tanah Laut dan penyelarasan dengan tema pembangunan, prioritas dan arah kebijakan pemerintah maupun provinsi.

d. Pelaksanaan musrenbang RKPD

Musrenbang RKPD merupakan forum pemangku kepentingan guna membahas rancangan RKPD. Pelaksanaan musrenbang RKPD dimulai dari musrenbang kecamatan, Forum Perangkat Daerah dan musrenbang kabupaten.

e. Perumusan Rancangan Akhir RKPD

Perumusan Rancangan Akhir RKPD merupakan proses penyempurnaan rancangan RKPD menjadi Rancangan RKPD berdasarkan berita acara kesepakatan hasil musrenbang RKPD Kabupaten. Rancangan akhir RKPD yang sudah disempurnakan disampaikan ke Sekretaris Daerah agar dibahas oleh seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk memastikan program dan kegiatan perangkat daerah telah diakomodir dalam rancangan akhir RKPD.

f. Penetapan RKPD

RKPD ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah RKP dan RKPD Provinsi Kalimantan Selatan ditetapkan. Hal tersebut bertujuan agar ada keselarasan antara perencanaan di tingkat pusat, provinsi dan daerah.

## **1.2 Dasar Hukum Penyusunan**

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD Tahun 2020 adalah:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
7. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD).
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) di Lingkup Pemerintah Daerah.



14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Propinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 Nomor 3).
15. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 80 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021.
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 9 tahun 2008 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Pelaksana Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Laut 2005 – 2025.
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 - 2036.
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023.

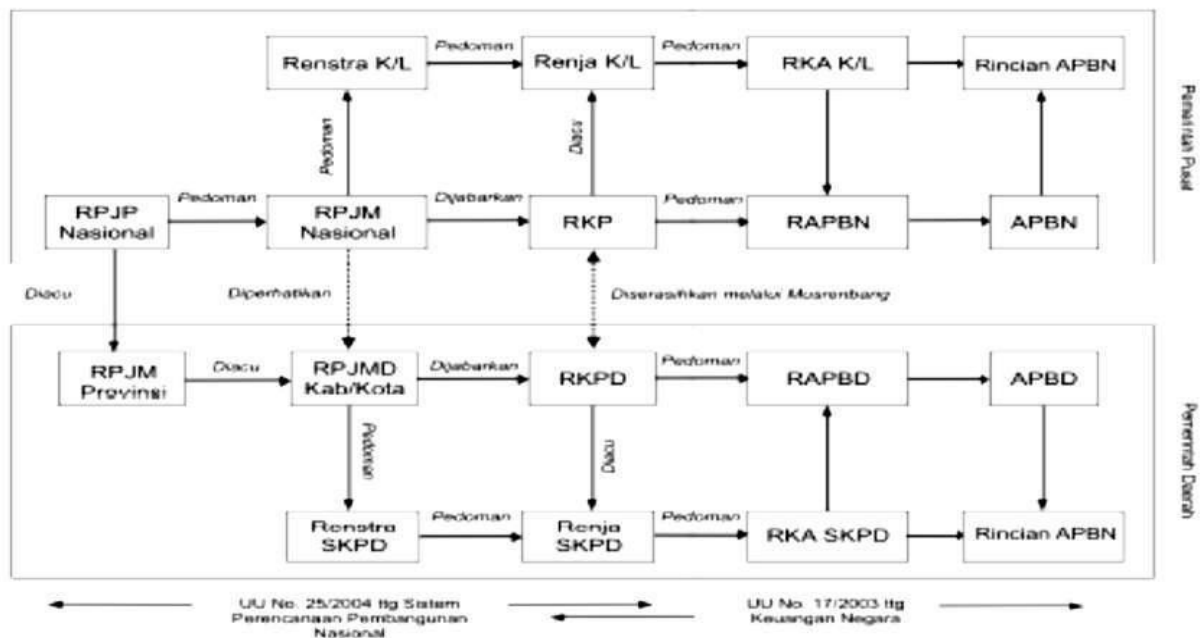
### **1.3 Hubungan Antar Dokumen**

Dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, maka keberadaan RKPD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 merupakan satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut khususnya bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

Selanjutnya dalam kaitan dengan sistem keuangan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, maka RKPD Kabupaten Tanah Laut akan dijadikan landasan bagi penyusunan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021 dalam rangka penyusunan

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021.

Gambaran tentang hubungan antara RKPD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 dengan dokumen perencanaan lainnya baik dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan maupun dengan sistem keuangan adalah sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1.1.



Gambar 1.1 Sistem Perencanaan Pembangunan

#### 1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya RKPD Tahun 2021 adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta mengoptimalkan dan mewujudkan efisiensi pemanfaatan berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Adapun tujuan disusunnya RKPD tahun 2021 adalah untuk:

1. Menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021 yang akan disampaikan kepada DPRD untuk dibahas, disepakati dan dituangkan dalam Nota Kesepakatan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021 antara DPRD Kabupaten Tanah Laut dengan Bupati Tanah Laut yang

selanjutnya akan dijabarkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2021;

2. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional;
3. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan daerah;
4. Menjadi pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) PD;
5. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah melalui capaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan;
6. Menjadi acuan dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah kepada DPRD;
7. Menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi.

## **1.5 Sistematika Dokumen RKPD**

RKPD ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

### **I. Pendahuluan**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3. Hubungan antar Dokumen
- 1.4. Maksud dan Tujuan
- 1.5. Sistematika Dokumen RKPD

### **II. Gambaran Umum Kondisi Daerah**

- 2.1. Kondisi Umum Kondisi Daerah
  - 2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi
  - 2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
  - 2.1.3. Aspek Pelayanan Umum
  - 2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah
- 2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan, dan Realisasi RPJMD
- 2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

2.3.1. Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah.

2.3.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

**III. Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah**

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

**IV. Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah**

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2021

**V. Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah**

**VI. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**

**VII. Penutup**

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**

#### **2.1 KONDISI UMUM KONDISI DAERAH**

Kabupaten Tanah Laut merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan yang terletak di bagian Selatan. Kabupaten Tanah Laut tidak berbatasan langsung dengan Kota Banjarmasin dan harus menempuh jarak kurang lebih 65 km untuk mencapainya. Kabupaten Tanah Laut terdiri dari 11 kecamatan, setiap kecamatan memiliki kondisi yang berbeda-beda baik kondisi fisik maupun non fisik. Uraian kondisi umum kondisi daerah akan lebih rinci dijelaskan dalam sub-sub bab selanjutnya.

##### **2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi**

Aspek geografi dan demografi memberikan gambaran dan hasil analisis terhadap kondisi geografis daerah mencakup karakteristik fisik dan potensi pengembangan wilayah, kerentanan wilayah terhadap bencana, serta luas wilayah menurut batas administrasi pemerintah kabupaten. Aspek geografi dan demografi merupakan informasi dasar untuk mengidentifikasi potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia untuk memetakan pengembangan wilayah dalam menunjang kemajuan pembangunan daerah.

##### **2.1.1.1 Kondisi Geografi Daerah**

###### **2.1.1.1.1 Letak Geografis, Luas dan Batas Wilayah Administrasi**

Secara geografis, Kabupaten Tanah Laut terletak di titik koordinat 114°30'54,663"-115°22'38,535" Bujur Timur dan 3°30'37,586"-4°10'41,134" Lintang Selatan. Berdasarkan RTRW Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016-2036, luas wilayah daratan Kabupaten Tanah Laut adalah 384.852 ha dengan ibukota kabupaten berada di Kecamatan Pelaihari. Ruang lingkup wilayah administrasi wilayah Kabupaten Tanah Laut meliputi 11 kecamatan dan 130 desa dan 5 kelurahan. Secara rinci nama kecamatan dan luas wilayahnya dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Adapun batas wilayah Kabupaten Tanah Laut adalah sebagai berikut.

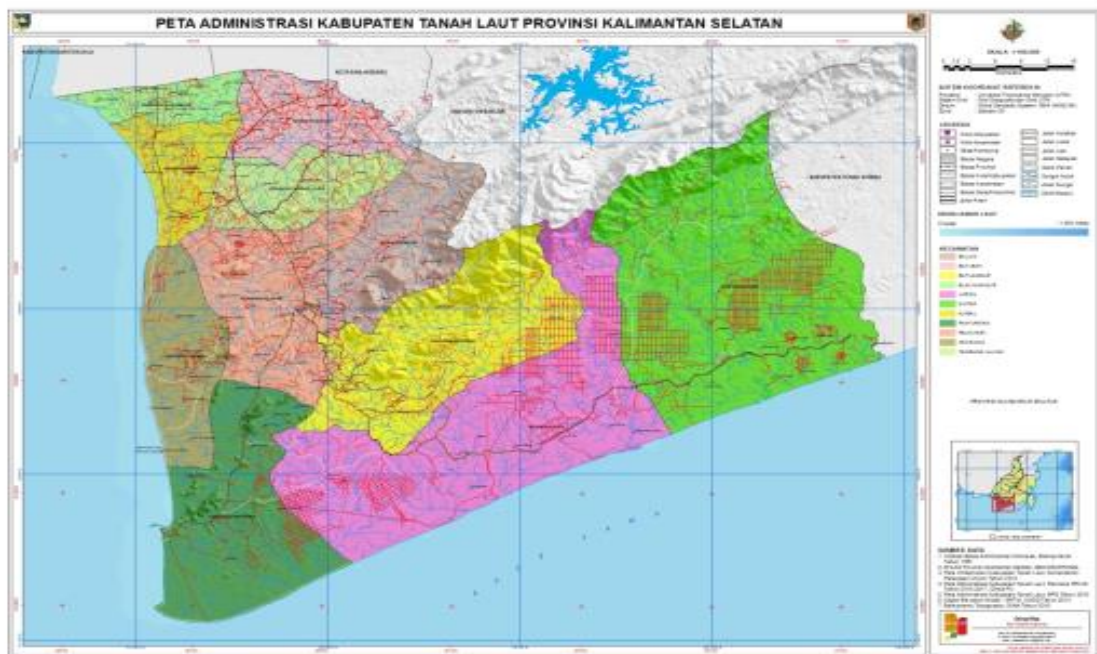
1. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Banjar dan Kota Banjarbaru.

2. Sebelah selatan berbatasan dengan Laut Jawa.
3. Sebelah timur berbatasan dengan Laut Jawa dan Kabupaten Tanah Bumbu.
4. Sebelah barat berbatasan dengan Laut Jawa.

Tabel 2.1 Luas Wilayah Daratan Kabupaten Tanah Laut Menurut Kecamatan

No.	Kecamatan	Luas (Hektar)	Persentase (%)
1.	Jorong	628,00	17,29
2.	Kintap	537,00	14,79
3.	Batu Ampar	548,10	15,09
4.	Panyipatan	336,00	9,25
5.	Pelaihari	379,45	10,45
6.	Bajuin	196,30	5,41
7.	Takisung	343,00	9,45
8.	Bati-bati	234,75	6,46
9.	Tambang Ulang	160,75	4,43
10.	Kurau	127,00	3,50
11.	Bumi Makmur	141,00	3,88
<b>Kabupaten Tanah Laut</b>		<b>3.631.35</b>	<b>100,0%</b>

Sumber: BPS KDA Tala 2020



Sumber: RTRW Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016-2036

Gambar 2.1 Wilayah Administratif Kabupaten Tanah Laut

Dari 11kecamatan yang ada, secara keseluruhan Kabupaten Tanah Laut memiliki 135desa dan kelurahan. Wilayah yang memiliki jumlah desa dan kelurahan terbanyak adalah Kecamatan Pelaihari (15 desa dan 5 kelurahan), sedangkan kecamatan yang memiliki jumlah desa sedikit adalah Kecamatan Bajuin dengan 9 desa. Rincian jumlah desa/kelurahanmenurut kecamatan di Kabupaten Tanah Laut ditampilkan pada Tabel 2.2.

**Tabel 2.2 Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Tanah Laut, 2019**

No.	Kecamatan	Ibukota	Desa/Kelurahan	
			Desa	Kelurahan
1.	Panyipatan	Panyipatan	10	-
2.	Takisung	Gunung Makmur	12	-
3.	Kurau	Padang Luas	11	-
4.	Bumi Makmur	Handil Babirik	11	-
5.	Bati-Bati	Padang	14	-
6.	Tambang Ulang	Tambang Ulang	9	-
7.	Pelaihari	Pelaihari	15	5
8.	Bajuin	Bajuin	9	-
9.	Batu Ampar	Batu Ampar	14	-
10.	Jorong	Jorong	11	-
11.	Kintap	Kintapura	14	-
<b>Kabupaten Tanah Laut</b>			<b>130</b>	<b>5</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2020

Berdasarkan karakteristik geografis,kecamatan di Kabupaten Tanah Laut dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori, antara lain.

1. Kecamatan yang berada di tepi laut yakni Kecamatan Bumi Makmur, Kecamatan Kurau,Kecamatan Takisung, Kecamatan Panyipatan, Kecamatan Jorong, dan Kecamatan Kintap.
2. Kecamatan yang tidak memiliki wilayah laut yakni Kecamatan Bati-bati, Kecamatan Tambang Ulang, Kecamatan Pelaihari, Kecamatan Bajuin dan Kecamatan Batu Ampar.

#### 2.1.1.1.2 Kondisi Topografi

Ditinjau dari segi topografinya, wilayah Kabupaten Tanah Laut didominasi oleh dataran rendah yang landai, yang membentang dari Barat ke Timur,mulai dari arah Selatan (Pantai Laut Jawa) kearah Utara (pedalaman), dan bergelombang hingga

bergunung di daerah pedalaman yang berbatasan dengan Kabupaten Banjar. Secara umum dapat dikatakan bahwa topografi wilayah Kabupaten Tanah Laut dapat dibagi atas 2 bagian besar, yaitu: (1) Bagian selatan merupakan dataran rendah yang landai hingga berombak. Bentangan daerah ini memanjang dari Timur ke Barat dengan lebih melebar di bagian Barat yang terdiri dari rawa-rawa dan daerah aliran sungai, muara sungai dan Pantai Laut Jawa. (2) Bagian utara, merupakan daerah yang bergelombang, berbukit dan bergunung sampai ke perbatasan dengan Kabupaten Banjar. Pada wilayah ini terdapat beberapa puncak, yaitu: Puncak Gunung Kemuning (750 m dpl), Puncak Gunung Batu Karo (621 m dpl), Puncak Gunung Batu Balerang (921 m dpl), Puncak Gunung Kematian (951 m dpl), Puncak Gunung Batu Mandi (901 m dpl), Puncak Gunung Sekupang (1.051 m dpl), Puncak Gunung Haur Bonak (744 m dpl), Puncak Gunung Aur Bunek (1.150 m dpl), dan Puncak Gunung Condong (553 m dpl).

Ditinjau dari sudut ketinggian tempat (elevasi), wilayah Kabupaten Tanah Laut dibagi 6 (enam) kelas elevasi, yaitu kelas 0-7 meter, 7-25 meter, 25-100 meter, 100-500 meter, 500-1000 meter dan di atas 1000 meter. Kelas ketinggian (elevasi) lahan yang paling luas adalah kelas elevasi 0-7 meter dpl, yaitu mencapai 58.240 Ha (15.6 % dari luas daratan). Sedangkan kelas ketinggian yang paling kecil luasnya adalah kelas elevasi di atas 1.000 meter dpl, yaitu 13.661 Ha (3,7% dari luas daratan). Kelas elevasi ketinggian 0-7 meter dpl terdapat di seluruh kecamatan, kecuali Kecamatan Batu Ampar dan Kecamatan Tambang Ulang sedangkan kelas elevasi ketinggian di atas 500 meter terdapat di Kecamatan Kintap, Jorong, Pelaihari dan Bati-Bati.

Jika dirinci menurut kecamatan, terdapat beberapa wilayah di Kabupaten Tanah Laut yang tidak memiliki wilayah pantai yaitu Kecamatan Bati-Bati, Tambang Ulang, Pelaihari, Bajuin, dan Batu Ampar. Berdasarkan data yang ada, diketahui bahwa wilayah tertinggi di Kabupaten Tanah Laut berada di Kecamatan Kintap, Jorong, Pelaihari, dan Bati-bati. Wilayah dengan dataran rendah cukup luas tersebar di seluruh kecamatan kecuali Kecamatan Batu Ampar dan Kecamatan Tambang Ulang. Sementara itu daerah dengan ketinggian lebih dari 500 mdpl terdapat di Kecamatan Kintap, Jorong, Pelaihari dan Bati-Bati.

**Tabel 2.3 Luas Wilayah Menurut Kondisi Kelerengan, 2019**

Kelas Lereng (%)	Deskripsi	Luas (Ha)
< 3	Datar	250.460
3 – 8	Bergelombang/agak landau	44.830
8 – 15	Bergelombang/landau	31.600



Kelas Lereng (%)	Deskripsi	Luas (Ha)
15 – 25	Berbukit	21.805
25 – 40	Bergunung	10.690
40 – 60	Bergunung curam	13.545
> 60	Bergunung sangat curam	-

Sumber: RTRW Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016-2036

Kemiringan/kelerengan suatu lahan berkaitan dengan kepekaan tanah terhadap erosi tanah, Semakin tinggi/terjal lerengnya maka tanah semakin peka terhadap erosi. Bila dilihat dari kemiringan tanahnya, wilayah Kabupaten Tanah Laut dapat dibedakan dalam 6 (enam) kelompok, yaitu sebagai berikut:

1. 0– 3%, sebagian besar tersebar di wilayah Timur membentang dari bagian Barat hingga Timur, mulai dari Selatan (pantai) ke Utara (pedalaman) dengan luas 250.460 Ha (67,16 % dari luas total daratan).
2. 3 – 8%, sebagian besar tersebar di wilayah bagian Tengah, membentang dari bagian Barat hingga Timur, dengan luas 44.830 Ha (12,02 % dari luas total daratan).
3. 8–15%, sebagian besar tersebar di wilayah bagian Tengah, membentang dari bagian Barat hingga Timur, dengan luas 31.600 Ha (8,47% dari luas total daratan).
4. 15 – 25%, sebagian besar tersebar di wilayah bagian Tengah, membentang dari bagian Barat hingga Timur, dengan luas 21.805 Ha (5,85% dari luas total daratan).
5. 25– 40%, sebagian besar tersebar di wilayah bagian Tengah dan Utara, membentang dari bagian Barat hingga Timur, dengan luas 10.690 Ha (2,87% dari luas total daratan).
6. 40%, sebagian besar tersebar di wilayah bagian Tengah dan Utara, membentang dari bagian Barat hingga Timurdengan luas 13.545 Ha (3,63% dari luas total daratan).

Berdasarkan paparan diatas, terlihat bahwa wilayah Kabupaten Tanah Laut didominasi oleh kelas lereng 0 – 3% yaitu sebesar 77,80% dari luas total wilayah daratan. Kelas lereng tersebut selain potensial untuk tanaman pangan lahan basah (padi sawah) berpotensi juga untuk perikanan tambak bagi wilayah yang ada di sepanjang pantai.

#### 2.1.1.1.3 Kondisi Geologi

Pada dasarnya Pulau Kalimantan merupakan pulau terbesar yang menjadi bagian dari Lempeng Mikro Sunda. Menurut Tapponnir (1982) Lempeng Asia Tenggara ditafsirkan sebagai fragmen dari lempeng Eurasia yang melejit ke Tenggara sebagai akibat dari tumbukan kerak Benua India dengan kerak Benua Asia, yang terjadi kira-kira 40 – 50 juta tahun yang lalu. Fragmen dari lempeng Eurasia ini kemudian dikenal sebagai lempeng mikro Sunda yang meliputi Semenanjung Malaya, Sumatera, Jawa, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Adapun batas-batas tektonik yang paling penting disebelah timur adalah: (1) Komplek subduksi Kapur Tersier Awal yang berarah Timur laut, dimulai dari Pulau Jawa dan membentuk pegunungan Meratus sekarang, (2) Sesar mendatar utama di Kalimantan Timur dan Utara, dan (3) Jalur subduksi di Kalimantan Utara, Serawak, dan Laut Natuna, Jalur ini dikenal dengan jalur Lupar. Secara fisiografis Kabupaten Tanah Laut terletak di bagian ujung Barat Daya Pegunungan Meratus dan di bagian Selatan Cekungan Barito dan Anak Cekungan Asam-Asam. Pegunungan Meratus terutama ditempati oleh batuan pra tersier, sedangkan Cekungan Barito dan Anak Cekungan Asam-Asam ditempati oleh batuan sediment tersier.

#### 2.1.1.1.4 Kondisi Hidrologi

Kabupaten Tanah Laut memiliki banyak sungai yang terdiri dari sungai-sungai kecil dan besar. Sungai-sungai besar tersebut merupakan induk dari beberapa sungai kecil. Kapasitas air di sungai-sungai besar relatif terjaga sehingga tidak mengalami kekeringan pada saat musim kemarau. Secara umum, apabila ditinjau dari kondisi fisik, sungai yang terdapat di Kabupaten Tanah Laut masih menunjukkan kondisi fisik air sungai yang alami. Kondisi ini sangat ditunjang dengan adanya vegetasi yang tumbuh di sepanjang aliran sungai sebagai daerah tangkapan air hujan. Tinjauan terhadap sumberdaya air sangat *urgent* sifatnya dilakukan guna memahami potensi, bentuk penguasaan, penggunaan, dan kesesuaian pemanfaatan sumberdaya air. Keberadaan sungai yang wilayah alirannya (DAS) di lebih dari satu wilayah administratif menjadikan sungai harus diatur dengan sistem yang spesifik. Di Kabupaten Tanah Laut keadaan hidrologi atau sumber daya air dapat dikelompokkan atas 3 (tiga) bagian, yaitu:

### 1. Sungai atau Danau

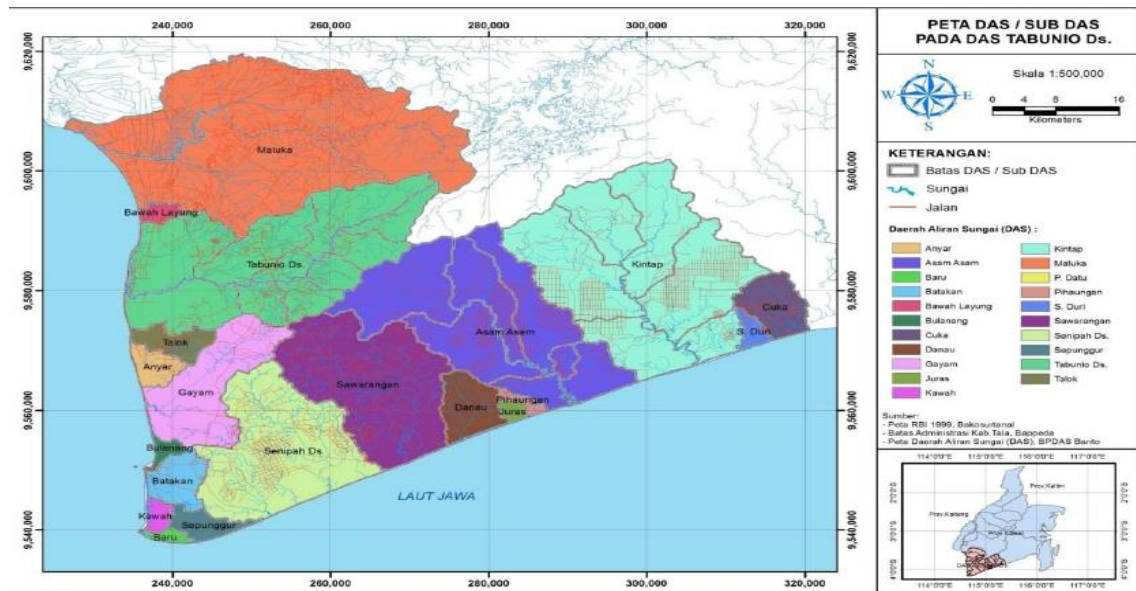
Keadaan hidrologi sungai dan danau sebagai sumber daya air permukaan di Kabupaten Tanah Laut atas sungai-sungai besar dan kecil yang bermuara di Laut Jawa. Sungai-sungai besar antara lain Sungai Maluka (640 Km<sup>2</sup>), Sungai Tabanio (770 Km<sup>2</sup>), Sungai Sabulur (190 Km<sup>2</sup>), Sungai Sawarangan (580 Km<sup>2</sup>). Adapun fungsi sungai tersebut adalah untuk sumber air minum, pengairan, usaha perikanan dan sebagai sarana transportasi antara daerah-daerah timur dengan daerah-daerah Barat di Kabupaten Tanah Laut. Adapun danau-danau (rawa) yang terdapat di Kabupaten Tanah Laut yaitu Rawa Benua Raya (6.600 Ha), Rawa Panjaratan (2.500 Ha) dan Rawa Sanipah (5.600 Ha). Pada musiman hujan terdapat wilayah yang terkena banjir, baik terus menerus tergenang maupun tergenang secara periode. Wilayah yang selalu tergenang adalah daerah Benua Raya dan Panjaratan.

### 2. Air Tanah

Kedalaman air tanah di suatu wilayah antara lain ditentukan oleh tinggi wilayah dari permukaan laut, jenis batuan induk dan sebagainya. Wilayah Kabupaten Tanah Laut tersusun dari batuan induk yang bervariasi dan terletak pada ketinggian 0 – 1000 m dpl. Oleh sebab itu kedalaman air tanahnya bervariasi, dari dangkal (daerah pantai hingga perbukitan dan pegunungan).

### 3. Curah Hujan

Curah hujan sebagai faktor fisik bersifat dinamis karena dipengaruhi oleh waktu. Curah hujan dimasukkan sebagai faktor fisik karena besar kecilnya curah hujan akan mempengaruhi faktor fisik yang lain, seperti menyebabkan terjadinya erosi, adanya genangan air pada daerah-daerah tertentu. Dengan pengaruh kedua faktor fisik tersebut sekaligus akan mempengaruhi tindakan budidaya baik terhadap teknik pengolahan tanah maupun pemilihan jenis komoditi yang akan dibudidayakan dalam bidang pertanian.



Sumber: RTRW Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016-2036

**Gambar 2.2 Peta Jaringan Sungai di Kabupaten Tanah Laut, 2019**

Kabupaten Tanah Laut memiliki beberapa sungai yang membentuk beberapa Daerah Aliran Sungai (DAS). Rincian DAS-DAS bisa dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.4 Pembagian Satuan Wilayah Sungaidi Kabupaten Tanah Laut, 2019**

No.	Nama DAS	Cakupan Sub DAS	Cakupan Wilayah	Luas (Ha)
1.	DAS Kintap	Sungai Pudak, Haruan, Rantau, dan Kintap	Kecamatan Batu Ampar, Jorong dan Kintap	71.656,29
2.	DAS Tabanio	Sungai Bakar dan Tabanio	Kecamatan Bajuin, Pelaihari, Tambang Ulang, Bajuin, Kurau, dan Takisung	62.480,20
3.	DAS Asam-asam	Sungai Kaldan, Rangkan, dan asam-asam	Kecamatan Bajuin, Batu Ampar, Kintap dan Jorong	57.346,92
4.	DAS Maluka	Sungai Rangka dan Maluka	Kecamatan Bati-bati, kurau, Tambang Ulang, Bajuin, Pelaihari, dan Bumi Makmur	55.556,25
5.	DAS Sawarangan	Sungai Sawarangan	Kecamatan Pelaihari, Panyipatan, Batu Ampar dan Jorong	37.201,34
6.	DAS P. Datu		Kecamatan Panyipatan	2,57
7.	DAS Gayam	Sungai Batanggayam	Kecamatan Pelaihari, Panyipatan, dan Takisung	19.581,65
8.	DAS Pihaungan	Sungai Pihaungan	Kecamatan Jorong	1.052,23
9.	DAS Sepunggur	Sungai Sepunggur	Kecamatan Panyipatan	3.507,71
10.	DAS Danau	Sungai Danau	Kecamatan Jorong	7.036,77
11.	DAS Anyar	Sungai Anyar	Kecamatan Takisung	3.336,00
12.	DAS Juras	Sungai Juras	Kecamatan Jorong	983,92
13.	DAS Cuka	Sungai Cuka	Kecamatan Kintap	6.990,78
14.	DAS Duri	Sungai Duri	Kecamatan Kintap	1.666,41
15.	DAS Talok	Sungai Talok	Kecamatan Pelaihari,	4.141,28

No.	Nama DAS	Cakupan Sub DAS	Cakupan Wilayah	Luas (Ha)
16.	DAS Sanipah	Sungai Sanipah	Panyipatan, dan Takisung Kecamatan Panyipatan, Batu Ampar, Pelaihari dan Jorong	36.314,07
17.	DAS Bawah Layung	Sungai Bawah Layung	Kecamatan Kurau	1.522,20
18.	DAS Baru	Sungai Baru	Kecamatan Panyipatan	981,69
19.	DAS Bulanang	Sungai Bulanang	Kecamatan Panyipatan	1.307,49
20.	DAS Batakan	Sungai Batakan	Kecamatan Panyipatan	5.492,72
21.	DAS Kawah	Sungai Kawah	Kecamatan Panyipatan	1.604,19

Sumber: RTRW Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016-2036

#### 2.1.1.1.5 Kondisi Klimatologi

Kabupaten Tanah Laut termasuk daerah beriklim tropis basah karena tidak terdapat perbedaan musim yang jelas. Hujan turun merata sepanjang tahun dengan bulan-bulan relatif basah antara Bulan Desember – Februari dan bulan-bulan relatif kering antara bulan Juni – Agustus. Curah hujan berkisar antara 2.500 – 3.000 mm/tahun dan di wilayah Timur berkisar antara 2.000–2.500 mm/tahun. Berdasarkan data curah hujan rata-rata bulanan dan perhitungan evapotranspirasi bulanan, maka Kabupaten Tanah Laut setiap bulannya tidak mengalami kekurangan air. Tanaman tahunan tidak memerlukan adanya air irigasi pada bulan-bulan yang *water balance*-nya kurang dari 100 mm akan mengalami kekurangan air. Pada musim kemarau angin bertiup dari benua Australia, keadaan angin saat itu bisa juga kencang. Pada tahun 2019, suhu udara rerata di Kabupaten Tanah Laut cenderung stabil yaitu berkisar antara 27-28,4°C. Suhu udara maksimum di Kabupaten Tanah Laut selama periode tersebut terjadi pada bulan Oktober dan November yang mencapai 36,2°C, sementara itu, untuk suhu udara minimum terendah tercatat sebesar 21°C pada bulan Juli-Agustus 2019.

**Tabel 2.5 Suhu Udara Minimum, Maksimum, dan Rerata di Kabupaten Tanah Laut (°C), 2019**

Bulan	Suhu Minimum	Suhu Maksimum	Suhu Rerata
Januari	21,8	36,0	26,8
Februari	24,0	35,6	27,4
Maret	24,8	35,4	28,4
April	23,2	35,1	27,0
Mei	25,0	35,6	27,9
Juni	24,8	35,5	27,9
Juli	21,0	36,0	27,1
Agustus	21,0	36,0	27,1
September	21,0	36,0	27,1
Oktober	23,3	36,2	27,3
November	23,0	36,2	27,9
Desember	21,8	36,0	27,2

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2020

Kelembaban udara di Kabupaten Tanah Laut memiliki kecenderungan tidak menentu. Hal tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.6 yang menunjukkan bahwa secara umum rata-rata kelembaban udara di wilayah ini berkisar antara 83,6-88,2%. Kelembaban udara tertinggi terjadi selama 9 bulan yang mencapai 98%, sedangkan kelembaban terendah terjadi pada bulan Januari yaitu sebesar 52,0%. Kecepatan angin rerata di Kabupaten Tanah Laut dalam periode tahun 2019 cukup bervariasi yaitu diantara 1,8 hingga 2,4 knot. Jika dirinci menurut bulan pada tahun 2019, kecepatan angin rerata tertinggi terjadi pada bulan November yaitu sebesar 2,4 knot dan kecepatan angin rerata terendah terjadi pada bulan Mei dan Desember yaitu sebesar 1,8 knot.

**Tabel 2.6 Kelembaban Udara Minimum, Maksimum, dan Rerata di Kab. Tanah Laut (%), 2019**

Bulan	Kelembaban Minimum	Kelembaban Maksimum	Kelembaban Rerata
Januari	52,0	98,0	83,6
Februari	67,0	98,0	87,3
Maret	70,0	97,0	88,2
April	67,0	95,0	85,7
Mei	76,0	98,0	87,4
Juni	68,0	98,0	86,3
Juli	70,0	97,0	87,1
Agustus	70,0	98,0	87,2
September	72,0	98,0	88,0
Oktober	67,0	98,0	87,1
November	58,0	98,0	84,2
Desember	60,0	98,0	85,3

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2020

**Tabel 2.7 Kecepatan Angin Maksimum dan Rerata di Kabupaten Tanah Laut (knot), 2019**

Bulan	Kecepatan Rata-rata
Januari	2,3
Februari	2,2
Maret	2,0
April	1,9
Mei	1,8
Juni	2,0
Juli	2,1
Agustus	2,1
September	2,1
Oktober	1,9
November	2,4
Desember	1,8

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2020

Berdasarkan penyinaran matahari, durasi penyinaran matahari dengan presentase terendah berada di bulan Desember, yaitu hanya sekitar 21% per 12 jam. Sementara itu durasi penyinaran matahari yang paling tinggi terjadi pada bulan Mei yaitu 37,8% per 12 jam. Rincian mengenai rata-rata penyinaran matahari menurut bulan di Kabupaten Tanah Laut selama tahun 2019 ditampilkan pada tabel berikut.

**Tabel 2.8 Rerata Penyinaran Matahari di Kabupaten Tanah Laut (%), 2019**

Bulan	Kecepatan Rata-rata
Januari	27,9
Februari	26,6
Maret	34,2
April	29,6
Mei	37,8
Juni	23,6
Juli	27,5
Agustus	27,5
September	33,9
Oktober	34,1
November	24,3
Desember	21,0

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2020

Dalam periode tahun 2019, curah hujan setiap bulan di Kabupaten Tanah Laut cukup bervariasi. Jika dirinci menurut bulan pada tahun 2019, curah hujan bulanan tertinggi di Kabupaten Tanah Laut terjadi pada bulan Januari yaitu sebesar 4.381 mm, sedangkan curah hujan terendah terjadi pada bulan Agustus yang hanya sebesar 3 mm. Sementara itu, jumlah hari hujan tertinggi di tahun 2019 terjadi pada bulan Desember yakni mencapai 214 hari hujan. Secara rinci, jumlah curah hujan dan hari hujan menurut bulan di Kabupaten Tanah Laut tahun 2019 tampak pada tabel berikut;

**Tabel 2.9 Banyaknya Curah Hujan Menurut Bulan (mm), 2019**

Bulan	Curah hujan (mm)	Hari Hujan
Januari	4.381	214
Februari	2.583	155
Maret	3.257	157
April	2.102	171
Mei	1.111	96
Juni	3.145	142
Juli	640	33
Agustus	3	2
September	118	13
Oktober	255	45
November	1.213	77
Desember	3.161	170

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2020

#### 2.1.1.1.6 Karakteristik Tanah

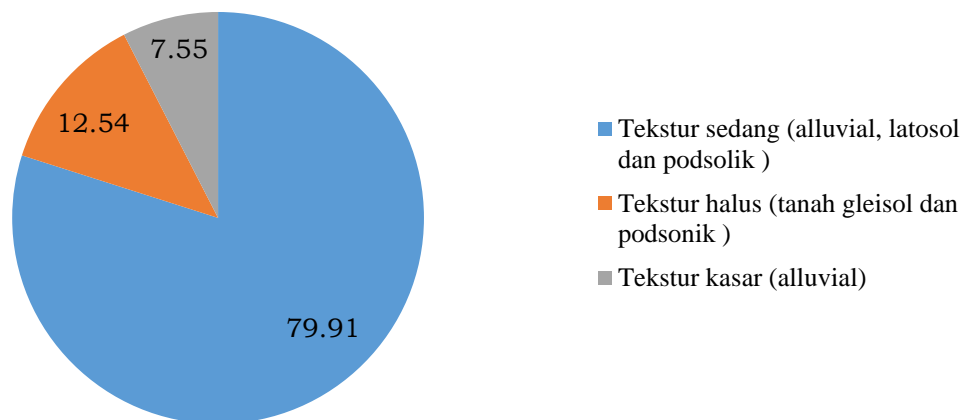
Jenis Tanah yang ada di wilayah Kabupaten Tanah Laut adalah jenis tanah podsolik, latosol, alluvial dan gleisol. Jenis tanah yang mendominasi wilayah Kabupaten Tanah Laut adalah jenis tanah Alluvial, Podsolik dan Laotosol. Sedangkan jenis tanah Gleisol hanya sebagian kecil saja, dan tersebar di 6 (enam) kecamatan, yaitu Kecamatan Kurau, Bati-Bati, Takisung, Tambang Ulang, Pelaihari dan Panyipatan.

- Jenis tanah latosol memiliki solum tanah tebal sampai sangat tebal, kandungan bahan organik 3 – 9 %, pH tanah antara 4,5 – 6,5 yaitu dari masam sampai agak masam, struktur tanahnya lemah dan konsistennya gembur. Secara keseluruhan tanah ini mempunyai sifat fisika dan sifat kimia yang baik, sehingga produktivitas lahannya sedang sampai tinggi, menempati areal seluas 108.780 Ha (29,17 % dari luas daratan seluruhnya).
- Jenis tanah Alluvial disebut juga sebagai tubuh tanah endapan, kandungan bahan organiknya rendah, reaksi tanahnya masam sampai netral, struktur tanahnya pejal atau tanpa struktur dan konsistensinya keras waktu kering, teguh waktu lembab, kandungan unsur haranya relatif kaya dan banyak tergantung pada bahan induknya. Secara keseluruhan tanah alluvial mempunyai sifat fisika kurang baik sampai sedang, sifat kimia sedang sampai baik, sehingga produktivitas tanahnya sedang sampai tinggi, menempati areal seluas 120.290 Ha (32,26 % dari luas lautan).
- Jenis tanah podsolik memiliki solum tanah yang paling tebal yaitu 90 – 180 cm, tekstur tanahnya lempung berliat hingga liat, konsistensinya gembur di bagian atas dan teguh di lapisan bawah, kandungan bahan organiknya kurang dari 5 %, kandungan unsur hara tanaman rendah, reaksi tanah (pH) sangat masam sampai sangat masam yaitu 4 – 5,5. Secara keseluruhan tanah ini memiliki sifat kimia kurang baik, sifat fisika tidak mantap karena sifat agregatnya kurang baik, sehingga mudah terkena erosi. Produktivitasnya adalah rendah sampai sedang, menempati areal satuan 123.010 Ha (32,98 % dari luas total daratan).

Tekstur tanah merupakan salah satu sifat fisik tanah yang digunakan secara praktis untuk memprediksi potensi penggunaan tanah. Tanah bertekstur halus (dominan liat) memiliki permukaan yang lebih halus dibanding dengan tanah bertekstur kasar (dominan pasir) sehingga tanah yang bertekstur halus memiliki kapasitas adsorpsi unsur-unsur hara yang lebih besar dan umumnya lebih subur dibandingkan dengan tanah bertekstur kasar. Tanah bertekstur kasar lebih porus dan laju infiltrasinya lebih



cepat. Walaupun demikian tanah bertekstur halus memiliki kapasitas memegang air lebih besar dari pada tanah pasir karna memiliki permukaan yang lebih luas. Sementara itu tekstur tanah di wilayah Kabupaten Tanah Laut diklasifikasikan menjadi 3 (tiga), yaitu tekstur halus (lempung berliat hingga liat), tekstur sedang (lempung sampai lempung liat berdebu) dan tekstur kasar (lempung berpasir sampai berkerikil). Tekstur tanah akan berpengaruh terhadap kesuburan fisik tanah, kemampuan menyerap dan menyimpan air dan kepekaan terhadap erosi.



Sumber: RTRW Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016-2036

**Gambar 2.3 Persentase Luas Wilayah Menurut Tekstur Tanah, 2019**

Sifat tanah yang bertekstur halus baik untuk budidaya maupun non budidaya. Pada tanah yang bertekstur halus semua tanaman dapat tumbuh dengan baik dan tahan terhadap erosi. Sedangkan pada tanah yang bertekstur sedang tanaman masih dapat tumbuh dengan baik, tetapi harus dengan perlakuan khusus untuk mencegah erosi, karena bertekstur sedang lebih peka terhadap erosi. Tanah dengan tekstur kasar memerlukan air sangat tinggi, sehingga daya simpan airnya sangat rendah, akibatnya kurang cocok untuk tanaman pangan lahan kering. Pada umumnya tanah di Kabupaten Tanah Laut ini bertekstur sedang yang meliputi jenis tanah alluvial, latosol dan podsolik yaitu 297.285 Ha (79,91%), tanah bertekstur halus meliputi jenis tanah gleisol dan podsonik seluas 46.750 Ha (12,54%) dan tanah yang bertekstur kasar meliputi jenis tanah alluvial seluas 28.915 Ha (7,55%). Dengan demikian, di Kabupaten Tanah Laut sedikitnya terdapat 28.915 Ha (7,55%) mempunyai kendala dalam pengembangan kawasan budidaya dengan faktor pembatas tekstur tanah yang kasar.

#### 2.1.1.1.7 Penggunaan Lahan

Ketersediaan tanah (lahan) memberikan gambaran potensi lahan dan arahan bagi kawasan yang dapat dikembangkan/dibudidayakan atau karena limitasinya tidak dapat dikembangkan sama sekali berdasarkan faktor-faktor fisik dasar. Penggunaan lahan sekarang memberi gambaran sejauh mana jenis dan tingkat pemanfaatan lahan yang telah dilakukan baik yang bersifat budidaya maupun bukan budidaya. Ketersediaan tanah pada dasarnya tidak dilepaskan dengan status atau penguasaannya sekarang. Status tanah sekarang pada dasarnya sangat menentukan mudah dan dapat tidaknya suatu bidang tanah dikuasai atau dialihkan penguasaannya oleh pihak ketiga untuk kegiatan tertentu.

Melihat dari luas wilayah yang ada dengan penggunaan lahan seluas 92.814 ha (24,6%) merupakan kawasan hutan, 71.288 ha (19,2%) merupakan lahan perkebunan, 51.122 ha (13,7%) merupakan lahan sawah dan tegalan serta sisanya 4.157 ha (1,11%) untuk kawasan pemukiman dan lain-lain, maka Kabupaten Tanah Laut telah menyiapkan beragam potensi yang masih dan dapat dikelola untuk kepentingan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, Kabupaten Tanah Laut melalui kebijakan penataan ruang wilayahnya telah memprioritaskan 5 (lima) kawasan dengan masing-masing fungsi strategisnya yaitu: (1) Kawasan industri dipusatkan di Kecamatan Bati-Bati dan Jorong, (2) Pertanian di Kecamatan Kurau dan Bumi Makmur, (3) Perikanan laut di Kecamatan Kurau, Takisung, Panyipatan, Jorong dan Kintap, (4) Pertambangan di Kecamatan Jorong dan Kintap, dan (5) Wisata di Kecamatan Takisung, Panyipatan, Jorong dan Pelaihari.

Kebijakan penataan ruang wilayah ini dimaksudkan tidak lain untuk mengantisipasi adanya pengembangan perlintasan 2 kawasan di Kabupaten Tanah Laut, yaitu sebelah utara pengembangan dengan Banjarmasin-Banjar/Banjarmasin dan sebelah timur dengan Kabupaten Tanah Bumbu. Kebijakan yang tertuang dalam program pengembangan wilayah diharapkan dapat mendukung pengembangan 2 wilayah, sehingga dalam pelaksanaan pembangunan dapat lebih terarah, terkendali yang pada akhirnya dapat tercapai hasil pembangunan yang maksimal. Penataan ruang wilayah yang tersebar dimaksudkan juga untuk membuka peluang bagi investor menanamkan modalnya di Kabupaten Tanah Laut.

Selanjutnya, mengenai kawasan peruntukan permukiman, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang RTRW Kabupaten Tanah Laut 2016-2036 Pasal

38, kawasan permukiman terdiri atas: (a) kawasan permukiman perkotaan; dan (b) Kawasan permukiman perdesaan. Kawasan peruntukan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud yaitu kawasan yang mempunyai kegiatan utama non pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, industri, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi. kawasan permukiman perkotaan diimbangi dengan tersedianya pusat pelayanan yang terkonsentrasi di sekitar Perkotaan Pelaihari, Perkotaan Bati-Bati, Perkotaan Jorong, Perkotaan Kintap, dan Perkotaan Takisung, serta masing-masing perkotaan menyediakan RTH minimum 30%. Kawasan peruntukan permukiman perdesaan yaitu kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa sosial, dan kegiatan ekonomi. Kawasan permukiman perdesaan meliputi kawasan permukiman perdesaan yang menyebar di sekitar daerah pertanian di seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Tanah Laut; dan rencana pengembangan kawasan permukiman di wilayah Kabupaten Tanah Laut memiliki luas sebesar kurang lebih 37.062,48 hektar.

#### 2.1.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah

Dalam rangka mendukung pertumbuhan daya saing daerah, penataan ruang menjadi salah satu hal penting dalam perencanaan pembangunan ke depan, mengingat kondisi geografis, potensi sektor pertanian secara keseluruhan, potensi pariwisata, dan potensi sumberdaya alam Kabupaten Tanah Laut. Pembangunan harus memanfaatkan berbagai sumberdaya potensial yang tersedia dimana nantinya perencanaan pembangunan harus lebih menekankan pada sektor-sektor unggulan tersebut.

Hal yang harus diupayakan dalam pengembangan wilayah adalah pengembangan dan pemerataan infrastruktur serta peningkatan kapasitas ekonomi di beberapa wilayah prioritas mengingat masih ada daerah di Kabupaten Tanah Laut yang belum terlalu maju. Pengembangan dan pemerataan infrastruktur di wilayah ini mutlak diutamakan. Hal ini karena masih rendahnya tingkat pelayanan infrastruktur dasar di semua wilayah yang akan berdampak pada terbatasnya kemampuan penduduk setempat dalam mengembangkan potensi sumberdaya yang dimiliki. Implementasi pembangunan pada masa mendatang diharapkan mampu berkembang guna meningkatkan taraf hidup dan tingkat kesejahteraan masyarakat sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Berikut

ini merupakan Tahapan Pelaksanaan Pembangunan yang direncanakan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Laut berdasarkan RTRW Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016-2036:

**Tabel 2.10 Tahapan Pelaksanaan Pembangunan dan Pengembangan Kabupaten Tanah Laut**

No.	Rencana	Kebijakan	Kebutuhan Pengembangan	Program Utama
<b>A. Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten</b>				
1.	Sistem Perdesaan	Pengembangan Kawasan Perdesaan	Pengembangan kawasan perdesaan berbasis hasil pertanian dan perkebunan	Pengembangan pusat produksi tanaman pangan sentra padi di Kecamatan Bumi Makmur, Kurau, dan Panyipatan
			Pengembangan Kawasan Perkampungan/ Desa-Desa Nelayan	Pengembangan Tanaman Perkebunan di Kintap, dan Jorong
			Pengembangan Kawasan Peternakan	Pengembangan Kawasan Peternakan di Bati-Bati
		Pengembangan Kawasan Agropolitan	Mendorong pengembangan sentra produksi jagung di Batu Ampar, Pelaihari dan Panyipatan	Perwujudan Penguatan Desa Pusat Pelayanan (DPP) di kawasan. Penciptaan dan Peningkatan Pelayanan Pusat Kawasan (pasar, dll)
				Penyediaan lahan untuk komoditas tanaman jagung. Membatasi pergantian ke komoditas lain
2.	Sistem Perkotaan	Pengembangan orde perkotaan	Pengembangan ibukota kabupaten sebagai perkotaan PKL Kota Pelaihari dan PLKp Bati-Bati	Peningkatan akses ke arah pusat
				Peningkatan fasilitas-2 pelayanan
		Pengembangan perkotaan utama sebagai perkotaan PPK dan PKL	Pengembangan perkotaan PPK Bati Bati, Kintap, Jorong dan Takisung serta PPL Kurau, tambang Ulang, Bumi makmur, Batu Ampar, Bajuin dan Panyipatan	Pengembangan pelabuhan perikanan
				Pengembangan kawasan industri
				Pengembangan permukiman
		Hirarki (besaran) perkotaan	Pengembangan Perkotaan Bati Bati sebagai Pendukung sistem Kawasan metropolitan Banjar Bakula	Rencana Pengembangan pelabuhan umum
				Rencana Pembangunan jalan lingkaran utara Pelaihari – Tambang Ulang – Batu Ampar, Tanah Laut
				Peningkatan sarana-prasarana penunjang perkotaan skala regional dan nasional

No.	Rencana	Kebijakan	Kebutuhan Pengembangan	Program Utama		
		Sistem dan fungsi perwilayahan	Mendorong pembentukan pusat pelayanan	Peningkatan akses ke arah pusat Pelayanan		
		Fasilitas perkotaan	Pengembangan Pusat-Pusat Perkotaan Pelaihari, Bati Bati dan Kintap	Pengembangan Infrastruktur Kawasan Perkotaan PKL, PPK dan PPL		
			Pengembangan Pusat-Pusat Ibukota Kecamatan	Pengembangan Infrastruktur IKK		
		Prasarana wilayah	Mewujudkan jalan internal provinsi melalui pengembangan jalan tembus	Pembangunan Jalan Lintas Utara		
				Pengembangan Jalan Lingkar Selatan Kota Banjarmasin – Jalan Pesisir Barat Kabupaten Tanah Laut. Rencana Kolektor Primer Gambut-Pulosari		
		Permukiman Perkotaan	Pengembangan Kawasan Permukiman Perkotaan	Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dan Padat		
				Perencanaan Kawasan Pengembangan Baru Perkotaan untuk Lahan Perumahan (Permukiman Tertata)		
		<b>B. Penetapan Fungsi Kawasan Perdesaan dan Kawasan Perkotaan</b>				
		1.	Penetapan Fungsi Kawasan Perdesaan	Pengembangan produk unggulan	Mendorong eksporhasil pertanian unggulan daerah	Pengembangan sentra produksi-pemasaran pada pusat kegiatan ekonomi di Kawasan Agropolitan
				Pengembangan Sistem Agropolitan	Pengembangan produk unggulan, pengolahan dan perluasan jaringan di Kecamatan Batu Ampar, Panyipatan dan Pelaihari	Pengembangan Pasar Hewan Pengembangan Terminal Agrobisnis
2.	Penetapan Fungsi Kawasan Perkotaan	Pelayanan Sosial Ekonomi	Pengembangan Perkotaan Sebagai Pusat Pelayanan Sosial – Ekonomi	Kota Pelaihari sebagai ibukota Kabupaten Tanah Laut		
				Kota Panyipatan sbg kota Pelabuhan		
				Kota Bati Bati dan Jorong sebagai Kota Industri		
				Perkotaan Pelaihari sbg kota perdagangan regional		
				Perkotaan Takisung, Batu Ampar dan Bajuin sebagai Penyangga Perkembangan Perkotaan Pelaihari-		

No.	Rencana	Kebijakan	Kebutuhan Pengembangan	Program Utama
		Pengembangan Perkotaan IKK	Pemenuhan fasilitas perkotaan dan peningkatan interaksi kawasan	Ibu Kota Kabupaten Penyediaan sarana penunjang
<b>C. Pengembangan Prasarana Wilayah</b>				
1.	Transportasi Jalan Raya	Membuka Wilayah Terisolir	Pengembangan jalan penghubung dan jalan tembus/sirip utara antar wilayah	Pengembangan Simpang Tiga Nusa Indah Bati Bati menjadi interkoneksi untuk kegiatan Terminal Agrobisnis, Pengembangan Simpang Tiga Nusa Indah Bati Bati ke arah Jalan Lingkar Utara menelusuri sisi Tahura melewati beberapa titik kawasan lindung di Bajuin, Batu Ampar, Jorong dan Kintap
		Mengantisipasi Permintaan Transportasi Akan Datang dan Mengatasi Permasalahan Transportasi	Penyediaan Sistem Jaringan dan Prasarana Transportasi	Pengembangan Jalan Arteri Primer sebagai Jalan Bebas Hambatan Peningkatan beberapa Fungsi Jalan Kabupaten menjadi Kolektor Primer Pengembangan Terminal Tipe B Ambungan Pengembangan Sub Terminal di Bati Bati, Kintap Peningkatan Jalan Ambungan Tajau Pecah, Kab. Tanah Laut Pembangunan jalan akses kawasan pariwisata Takisung – Batakan, Tanah Laut
		Mendukung Ekonomi Regional dan Lokal	Pengembangan Sistem Jaringan Jalan untuk menunjang Kepelabuhanan	Jalur Alternatif 1 Banjarmasin – Tanjung Dewa Jalur Alternatif 2 Banjarmasin – Tanjung Dewa Jalur Alternatif 1 Kintap – Tanjung Dewa Jalur Alternatif 2 Kintap – Tanjung Dewa Pembangunan Jalan Akses Pelabuhan

No.	Rencana	Kebijakan	Kebutuhan Pengembangan	Program Utama
2.	Transportasi Udara	Studi Alternatif Tahap Awal	Penjajakan kemungkinan pengembangan bandara udara	Trisakti dan Pelabuhan Pelaihari
				Studi Kelayakan Lokasi
				Studi Kebutuhan Pasar
3.	Transportasi Sungai dan Laut	Pengembangan Sistem Transportasi Berbasis Air	Pengembangan Alur Sungai Sebagai Pelayaran/ Rute Sungai	Pengembangan Alur di DAS Tabanio
				Pengembangan Alur di DAS Kintap
				Pengembangan Alur di DAS Swarangan
				Pengembangan Alur di DAS Asam-Asam
			Pengembangan Pelabuhan Laut Alternatif	Pengembangan Pelabuhan Umum Alternatif di Pulau Datu - Tanjung Dewa
			Pengembangan Pelabuhan Perikanan dan Tempat Pelelangan Ikan (PP-TPI)	Pembangunan, peningkatan dan pengembangan prasarana Pelabuhan Kintap, Tanah Laut
4.	Prasarana Telematika	Optimalisasi pelayanan	Pengembangan prasarana penunjang	Pemantapan dan Peningkatan PP TPI di Kintap, Jorong, Swarangan, Tanjung Desa dan Tabanio
				Penyiapan lahan dan infrastruktur penunjang pelabuhan
			Peningkatan jumlah dan mutu telematika	Menyiapkan lembaga pengelola Kawasan pelabuhan Tanjung Dewa
5.	Prasarana Pengairan	Optimalisasi pelayanan	Peningkatan sarana dan prasarana pendukung	Penyediaan tower BTS ( <i>Base Transceiver Station</i> ) secara bersama
				Pengadaan sistem internet, 3G dan GPS
5.	Prasarana Pengairan	Optimalisasi pelayanan	Peningkatan sarana dan prasarana pendukung	Penerapan teknologi telematika berbasis teknologi modern
				Pembangunan teknologi telematika pada wilayah - wilayah pusat pertumbuhan seperti di kota Pelaihari dan Bati Bati
				Pengembangan pengelolaan DAS Tabanio, Kintap,

No.	Rencana	Kebijakan	Kebutuhan Pengembangan	Program Utama
				<p>Jorong</p> <p>Penanaman pohon pencegah longsor</p> <p>Pembangunan dan perbaikan pintu air</p> <p>Pengelolaan mata air melalui Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA)</p> <p>Pengendalian banjir, Jorong, Asam-Asam dan Kontap</p> <p>Pembangunan Pengamanan Pantai Takisung</p>
6.	Prasarana Energi/ Listrik	Optimalisasi pelayanan	Peningkatan kapasitas listrik	<p>Penambahan dan perbaikan jaringan</p> <p>Peningkatan infrastruktur pendukung</p> <p>Pengembangan sumber listrik (PLTD dan PLTU)</p> <p>Pengembangan Gardu Induk Pelaihari (30 MVA)</p>
7.	Prasarana Lingkungan	Peningkatan cakupan pelayanan dan peningkatan sarana prasarana lingkungan	Peningkatan Pelayanan Sanitasi Dasar	<p>Peningkatan Prasarana dan Sarana Persampahan</p> <p>1. Pewadahan (bin kapasitas 50 l)</p> <p>2. Pengangkutan (gerobak, container dan truk pengangkut)</p> <p>3. Pembangunan TPS (landasan/transfer depo)</p> <p>Pembangunan TPST</p> <p>Penyediaan Komposter Aerob</p> <p>Peningkatan Kualitas Pengelolaan Persampahan di TPA</p> <p>1. Metode Sanitary Landfill</p> <p>2. Peningkatan Sarana dan Prasarana di TPA sesuai standar</p> <p>Peningkatan operasional dan pemeliharaan sarana dan prasana persampahan</p> <p>Kegiatan Sosialisasi pengelolaan sampah mandiri</p>



No.	Rencana	Kebijakan	Kebutuhan Pengembangan	Program Utama
				Peningkatan SDM pegawai pengelola persampahan
<b>D.</b>	<b>Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten</b>			
1.	Kawasan Lindung	Pemantapan Kawasan Lindung	Pemantapan kawasan lindung bernilai strategis dalam penyediaan air	Pengembalian fungsi lindung dgn reboisasi Penanganan secara teknis Pengembangan hutan dan tanaman tegakan tinggi
			Pemantapan Kawasan Perlindungan setempat	Perlindungan setempat sepanjang sungai dibatasi untuk kepentingan pariwisata dan mengupayakan sungai sebagai latar belakang kawasan fungsional; Pengelolaan DAS Tabanio untuk air baku Waduk dan mata air, dibatasi untuk pariwisata dan menghindari bangunan radius pengamanan kawasan dan mengutamakan vegetasi yang memberikan perlindungan waduk dan mata air Mempertahankan ekosistem pantai : hutan mangrove, terumbu karang, rumput laut dan estuaria. Penggunaan fungsional seperti pariwisata, pelabuhan, hankam, permukiman harus memperhatikan kaidah lingkungan dan ekosistem pesisir Pemanfaatan sumber air dan waduk untuk irigasi
			Pemantapan kawasan Cagar Budaya	Memelihara nilai dan fungsinya sebagai peninggalan sejarah, objek penelitian dan pariwisata, Benteng Tabanio, dll Pelaksanaan kerjasama

No.	Rencana	Kebijakan	Kebutuhan Pengembangan	Program Utama
2.	Kawasan budidaya	Pengembangan Kawasan Budidaya	Peningkatan Kualitas Lingkungan	pengelolaan kawasan Memelihara habitat dan keaslian ekosistem
			Pengembangan Hutan Produksi Bernilai Ekonomi Tinggi Dengan Fungsi Lindung	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Reboisasi tanaman untuk menahan tanah.</li> <li>➤ Pengembangan aneka produk olahan</li> <li>➤ Mengembangkan hutan rakyat</li> </ul>
			Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pertanian dan Pengolahan Hasil Produksi Berorientasi Peningkatan Nilai Ekonomi dan Ekspor	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Pengembangan Kawasan Agropolitan Jagung Pelaihari-Batu Ampar-Panyipatan.</li> <li>➤ Pengembangan Pertanian Lahan Basah di Bumi Makmur, Kurau, dan Panyipatan.</li> <li>➤ Pengembangan Perikanan di Kintap, Swarangan, dan Tabanio serta Industri Pengolahannya di Bati-bati</li> </ul>
			Pengembangan kawasan pertambangan berwawasan lingkungan	Pengembangan Pertambangan mineral dan batubara di 9 kecamatan
			Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri	Pengembangan kawasan industri pengolahan hasil Bati Bati Pengembangan Industri Berbasis Sumberdaya Alam Jorong
			Pengembangan Kawasan Parwisata	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Pengembangan DTW Prioritas sesuai RIPPPDA</li> <li>➤ Pengembangan Potensi Obyek</li> <li>➤ Mengkaitkan kalender wisata provinsi dan nasional</li> <li>➤ Peningkatan Promosi wisata.</li> <li>➤ Pengadaan kegiatan festival wisata atau gelar</li> </ul>

No.	Rencana	Kebijakan	Kebutuhan Pengembangan	Program Utama
				seni budaya

Sumber: RTRW Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016-2036

### 2.1.1.3 Wilayah Rawan Bencana

Berdasarkan kondisi wilayahnya dilihat dari karakteristik ekoregionnya, Kabupaten Tanah Laut memiliki kerawanan terhadap kebakaran hutan, kekeringan, banjir dan pendangkalan sungai, erosi permukaan dan degradasi lahan karena penambangan batubara, tanah longsor. Berdasarkan Data dan Informasi Bencana Indonesia (DIBI), dalam rentang tahun 2000–2019 di Kabupaten Tanah Laut terdapat (tujuh) jenis bencana yang telah terjadi yaitu bencana banjir, banjir bandang, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, cuaca ekstrim, gelombang ekstrim dan abrasi dan tanah longsor. Bencana yang terjadi menimbulkan dampak berupa korban jiwa, kerugian fisik, materil, kerusakan lingkungan, dan kondisi psikologis. Jumlah kejadian bencana tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.11 Sejarah Kejadian Bencana di Kabupaten Tanah Laut, 2000-2019**

No	Jenis Bencana	Jumlah Kejadian	Meninggal dan Hilang	Luka	Menderita dan Mengungsi	Rumah Rusak Berat	Rumah Rusak Sedang	Rumah Rusak Ringan	Rumah Terendam
1.	Banjir	135	7	-	42.928	1	1	2	3.597
2.	Banjir Bandang	2	2	-	1.384	8	9	-	-
3.	Kekeringan	6	-	-	-	-	-	-	-
4.	Kebakaran Hutan dan Lahan	517	-	-	-	9	-	-	-
5.	Cuaca Ekstrim	27	-	1	553	105	24	43	-
6.	Gelombang Ekstrim dan Abrasi	1	-	-	954	23	-	39	-
7.	Tanah Longsor	3	-	-	-	3	-	-	-
Jumlah		691	9	1	45.819	149	34	84	3.597

Sumber: Data dan Informasi Bencana Indonesia (DIBI) dan Data Rekap Bencana BPBD Kab. Tanah Laut 2000-2019

Berdasarkan Tabel 2.11, terlihat bahwa pada rentang waktu 17 tahun yaitu dari tahun 2000 - 2019, secara keseluruhan jumlah kejadian bencana di Kabupaten Tanah Laut yaitu 691 (enam ratus sembilan puluh satu). Dari 691 kejadian bencana tersebut

bencana kebakaran hutan dan lahan merupakan jenis bencana yang paling sering terjadi yaitu sebanyak 517 (lima ratus tujuh belas) kali kejadian. Sedangkan bencana yang mempunyai jumlah kejadian paling sedikit yaitu gelombang ekstrim dan abrasi dengan 1 (satu) kali kejadian. Dilihat dari dampak yang ditimbulkan, bencana yang paling menimbulkan dampak terbesar adalah bencana banjir. Namun untuk korban per masing-masing bencana terlihat bahwa bencana banjir yang menimbulkan korban paling banyak yaitu 42,935 jiwa, selanjutnya bencana banjir bandang sebanyak 1,386 jiwa, gelombang ekstrim dan abrasi sebanyak 954 jiwa, cuaca ekstrim sebanyak 554 jiwa dan untuk bencana kekeringan, kebakaran hutan dan lahan dan tanah longsor tidak menimbulkan korban jiwa.

Bencana akan terjadi dan menimbulkan dampak kerugian bila skala dari ancaman terlalu tinggi, kerentanan terlalu besar, dan kapasitas serta kesiapan yang dimiliki masyarakat atau pemerintah tidak cukup memadai untuk mengatasinya. Ancaman atau bahaya tidak akan menjadi bencana apabila kejadian tersebut tidak menimbulkan kerugian baik fisik maupun korban jiwa. Secara teknis, bencana terjadi karena adanya ancaman dan kerentanan yang bekerjasama secara sistematis serta dipicu oleh faktor-faktor luar sehingga menjadikan potensi ancaman yang tersembunyi muncul ke permukaan sebagai ancaman nyata. Risiko bencana daerah dilihat melalui pengkajian risiko bencana yang dilakukan dengan menganalisis nilai-nilai ancaman atau bahaya, kerentanan, dan nilai kapasitas suatu daerah. Risiko bencana sendiri merupakan sesuatu yang dapat menyebabkan ancaman atau membahayakan jiwa, harta benda, mata pencaharian, dan lingkungan tempat mereka bergantung.

Penilaian ancaman bencana (bahaya) merupakan dasar penentuan peta dan tingkat bahaya di Kabupaten Tanah Laut. Penilaian tersebut diperoleh dari besaran luas wilayah terpapar dari setiap jenis potensi bahaya. Potensi luas bahaya tersebut dihitung berdasarkan pada parameter-parameter yang berbeda untuk setiap bahaya. Parameter tersebut mengacu kepada Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2012 dan referensi pedoman lainnya dari kementerian/lembaga di tingkat nasional. Tabel 2.12 menunjukkan luas bahaya dan tingkat bahaya seluruh potensi bahaya di Kabupaten Tanah Laut. Secara keseluruhan potensi bahaya di Kabupaten Tanah Laut hanya memiliki kelas sedang dan tinggi.

**Tabel 2.12 Potensi Ancaman Bencana di Kabupaten Tanah Laut**

No.	JenisBencana	Luas (ha)	Kelas
1.	Banjir	182.755	Tinggi
2.	Banjir Bandang	6.949	Tinggi
3.	Cuaca Ekstrim	212.073	Tinggi
4.	Gelombang Ekstrim dan Abrasi	3.326	Tinggi
5.	Kebakaran Hutan dan Lahan	175.785	Tinggi
6.	Kekeringan	363.135	Sedang
7.	Tanah Longsor	26.298	Sedang
<b>Jumlah</b>		<b>970.321</b>	<b>Tinggi</b>

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanah Laut, 2019

Potensi kejadian bencana yang besar terjadi pada kebakaran lahan sebanyak 187 kejadian, sedangkan yang paling sedikit terjadi pada kejadian kebakaran dan pasang air laut

**Tabel 2.13 Data Kejadian Bencana di Kabupaten Tanah Laut**

No	Jenis Bencana	Total
1	Angin putting beliung	6
2	Banjir	5
3	Kebakaran	1
4	Kebakaran dapur harang	19
5.	Kebakaran Lahan	187
6.	Kebakaran mobil	2
7.	Kebakaran rumah	24
8.	Pasang air laut	1
9.	Penemuan mayat	2
10.	Pohon tumbang	2

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanah Laut, 2019

Kajian kerentanan merupakan penggabungan dari indeks penduduk terpapar dan indeks kerugian. Indeks penduduk terpapar mengkaji potensi penduduk terpapar dan indeks kerugian mengkaji potensi kerugian (dalam bentuk rupiah dan hektar lingkungan yang rusak). Melihat potensi penduduk yang terpapar, bencana kekeringan, cuaca ekstrim, dan banjir merupakan hal yang harus diwaspadai mengingat jumlah penduduk yang terpapar bencana-bencana tersebut mencapai ratusan ribu jiwa. Jumlah penduduk yang terpapar bencana kekeringan mencapai 338.291 jiwa, bencana cuaca ekstrim sebanyak 336.286 jiwa, dan banjir sebanyak 242.312 jiwa.

**Tabel 2.14 Potensi Penduduk Terpapar Bencana di Kabupaten Tanah Laut**

No.	Jenis Bencana	Penduduk Terpapar (jiwa)	Kelompok Rentan			Kelas
			Kelompok Umur Rentan	Penduduk Miskin	Penduduk Cacat	
1.	Banjir	242.312	17.739	44.761	569	Tinggi
2.	Banjir Bandang	4.355	176	559	7	Tinggi
3.	Cuaca Ekstrem	336.286	23.652	59.333	798	Tinggi
4.	Gelombang Ekstrem dan Abrasi	8.148	764	1.952	26	Tinggi
5.	Kekeringan	338.291	23.809	59.698	802	Sedang
6.	Tanah Longsor	1.713	128	285	15	Sedang

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanah Laut, 2019

Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, kerugian fisik terbesar bencana di Kabupaten Tanah Laut berasal dari bencana cuaca ekstrem yang mencapai Rp 1,88 triliun, sedangkan bencana banjir dapat menimbulkan kerugian fisik sebesar Rp 842,70 miliar. Untuk kerugian ekonomi, dampak kerugian terbesar ditimbulkan oleh bencana cuaca ekstrem yang mencapai Rp 553,35 miliar dan bencana banjir bandang dapat menimbulkan kerugian sebesar Rp 106,72 miliar. Jika dilihat dari potensi kerusakan lingkungan, bencana kekeringan menimbulkan dampak kerugian terbesar dimana luas areal yang terdampak dapat mencapai 66.583 ha, disusul bencana kebakaran lahan dan hutan yang seluas 50.189 ha, dan bencana banjir seluas 42.463 ha.

**Tabel 2.15 Potensi Ancaman Bencana di Kabupaten Tanah Laut**

No.	Jenis Bencana	Potensi Kerugian (Rp juta)			Potensi Kerusakan Lingkungan		
		Kerugian Fisik	Kerugian Ekonomi	Total Kerugian	Kelas	Luas	Kelas
1.	Banjir	182.755	82.135	924.837	Tinggi	42.463	Tinggi
2.	Banjir Bandang	6.949	106.716	122.774	Tinggi	3.623	Tinggi
3.	Cuaca Ekstrem	212.073	553.348	2.432.266	Tinggi	-	Tinggi
4.	Gelombang Ekstrem dan Abrasi	3.326	10.003	40.532	Tinggi	2.271	Tinggi
5.	Kebakaran Hutan dan Lahan	175.785	38.367	38.367	Tinggi	50.189	Tinggi
6.	Kekeringan	363.135	2.120	2.120	Sedang	66.583	Tinggi
7.	Tanah Longsor	26.298	53.149	59.711	Tinggi	12.771	Tinggi

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanah Laut, 2019

Kapasitas merupakan kemampuan individu maupun kelompok dalam rangka menghadapi bahaya atau ancaman bencana. Penilaian kemampuan dilakukan pada sumberdaya orang per orang, rumah tangga, dan kelompok untuk mengatasi suatu ancaman atau bertahan atas dampak dari ancaman bencana. Aspek kemampuan antara lain kebijakan, kesiapsiagaan, dan partisipasi masyarakat. Penilaian kapasitas daerah ditentukan berdasarkan 2 (dua) komponen, yaitu ketahanan daerah dan kesiapsiagaan desa/kelurahan. Tabel 2.15 menunjukkan bahwa kapasitas Kabupaten Tanah Laut dalam menghadapi seluruh bencana yang berpotensi berada pada tingkat rendah. Dengan kapasitas rendah, maka Pemerintah Kabupaten Tanah Laut perlu meningkatkan kapasitasnya guna mengurangi dampak risiko yang akan timbul apabila terjadi bencana yang sudah berpotensi terjadi.

**Tabel 2.16 Kapasitas Daerah dalam Menghadapi Bencana di Kabupaten Tanah Laut**

No.	Jenis Bencana	Kelas Ketahanan Daerah	Kelas Kesiapsiagaan	Kelas Kapasitas
1.	Banjir	Sedang	Rendah	Rendah
2.	Banjir Bandang	Sedang	Rendah	Rendah
3.	Cuaca Ekstrem	Sedang	Rendah	Rendah
4.	Gelombang Ekstrem dan Abrasi	Sedang	Rendah	Rendah
5.	Kebakaran Hutan dan Lahan	Sedang	Rendah	Rendah
6.	Kekeringan	Sedang	Rendah	Rendah
7.	Tanah Longsor	Sedang	Rendah	Rendah

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanah Laut, 2019

Tingkat risiko bencana merupakan gabungan dari tingkat bahaya, tingkat kerentanan dan tingkat kapasitas yang telah dihasilkan sebelumnya. Hasil rangkuman dalam menghasilkan tingkat risiko untuk potensi bencana di Kabupaten Tanah Laut dapat dilihat pada Tabel 2.16. Dari hasil penggabungan tingkat bahaya, kerentanan, dan kapasitas dapat ditentukan tingkat risiko bencana Kabupaten Tanah Laut. Tingkat risiko untuk 7 (tujuh) jenis bencana di Kabupaten Tanah Laut memiliki potensi dengan tingkat risiko tinggi. Hal ini gambaran bagi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dan pihak terkait untuk menyusun upaya-upaya untuk pengurangan risiko bencana guna mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Tanah Laut.

**Tabel 2.17 Tingkat Risiko Bencana di Kabupaten Tanah Laut**

No.	Jenis Bencana	Tingkat Bahaya	Tingkat Kerentanan	Tingkat Kapasitas	Tingkat Risiko
1.	Banjir	Tinggi	Sedang	Rendah	Sedang
2.	Banjir Bandang	Tinggi	Sedang	Rendah	Sedang
3.	Cuaca Ekstrem	Tinggi	Sedang	Rendah	Sedang
4.	Gelombang Ekstrem dan Abrasi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sedang
5.	Kebakaran Hutan dan Lahan	Tinggi	Tinggi	Rendah	Tinggi
6.	Kekeringan	Sedang	Rendah	Rendah	Sedang
7.	Tanah Longsor	Sedang	Sedang	Rendah	Sedang

Sumber: BPBD Kabupaten Tanah Laut (KRB Kab. Tanah Laut Tahun 2018 – 2023)

Berdasarkan RTRW Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016-2036, telah dipaparkan berbagai kemungkinan bencana yang terjadi di Kabupaten Tanah Laut. Berdasarkan hal tersebut, telah diatur beberapa hal mengenai bencana yang kerap terjadi di Kabupaten Tanah Laut. Hal yang pertama adalah mengenai kawasan rawan bencana yang tercantum pada RTRW Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016-2036:

1. Kawasan rawan bencana alam meliputi (a) kawasan rawan banjir; (b) kawasan rawan kebakaran lahan/hutan dan permukiman; (c) kawasan rawan tanah longsor; (d) kawasan rawan angin puting beliung; dan (e) kawasan rawan gelombang pasang(rob) dan abrasi.
2. Kawasan potensi rawan banjir adalah daerah dengan tingkat kerawanan tinggi meliputi: (a) Kecamatan Pelaihariterdapat di Desa Panjaratan; (b) Hampir semua desa di Kecamatan Kurau; (c) Kecamatan Bati-Bati di Desa Benua Raya dan Desa Bati-Bati; (d) Kecamatan Takisung di Desa Tabanio, Desa Kuala Tambangan, Desa Takisung, Desa Gunung Makmur, Desa Benua Tengah, dan Desa Pagatan Besar; (e) Kecamatan Jorong di Desa Sabuhur, Desa Jorong, Desa Asam-Asam, Desa Swarangan, dan Desa Muara Asam-Asam; (f) Kecamatan Panyipatandi Desa Kuringkit, Desa Batu Mulya dan Desa Bumi Asih; (g) Kecamatan Kintap di Desa Kintap, Desa Kintapura, Desa Riam Adungan, Desa Muara Kintap, Desa Salaman, Desa Kintap Kecil, dan Desa Pasir Putih; (h) Kecamatan Tambang Ulang di Desa Tambang Ulang; (i) Kecamatan Batu Ampar; (j) Kecamatan Bajuin di Desa Bajuin, Desa Kunyit, dan Desa Sungai Bakar; dan (k) Hampir semua desa di Kecamatan Bumi Makmur.
3. Kawasan rawan kebakaran terdiri atas: (a) kawasan rawan kebakaran lahan/hutan; dan (b) kawasan rawan kebakaran permukiman.



4. Kawasan rawan kebakaran lahan/hutan adalah daerah dengan tingkat kerawanan tinggi meliputi: (a) Daerah gambut di Kecamatan Bati-Bati; (b) Kecamatan Kintap di Desa Riam Adungan; dan (c) Kecamatan Batu Ampar di Desa Bluru.
5. Kawasan rawan kebakaran permukiman: tidak ada daerah yang tingkat kerawanannya tinggi.
6. Kawasan rawan tanah longsor meliputi: (a) Kecamatan Pelaihari dengan tingkat kerawanan rendah, yakni: Desa Ujung Batu; dan (b) Kecamatan Kintap dengan tingkat kerawanan rendah, yakni : Desa Kintap.
7. Kawasan rawan angin puting beliung meliputi sebagian besar kecamatan akan tetapi dengan tingkat kerawanan sebagian besar rendah.
8. Kawasan rawan abrasi/ gelombang pasang terdapat pada daerah pesisir pantai, meliputi:
  - a. Empat (4) lokasi desa dari 11 desa di Kecamatan Kurau dengan tingkat kerawanan sedang sampai dengan tinggi, yakni Desa Sungai Bakau, Desa Padang Luas, Desa Bawah Layung, dan Desa Kurau.
  - b. Lima (5) lokasi desa dari 12 desa di Kecamatan Takisung dengan tingkat kerawanan rendah sampai dengan sedang, yakni: Desa Tabanio, Desa Kuala Tambangan, Desa Takisung, dan Desa Telaga Langsat.
  - c. Satu (1) lokasi desa dari 11 desa di Kecamatan Jorong dengan tingkat kerawanan rendah, yakni : Desa Simpang Empat Sungai Baru.
  - d. Enam (6) lokasi desa dari 10 desa di Kecamatan Panyipatan dengan tingkat kerawanan rendah sampai dengan sedang, yakni: Desa Panyipatan, Desa Kandangan Baru, Desa Kandangan Lama, Desa Batakan, Desa Tanjung Dewa, dan Desa Batu Mulya.
  - e. Delapan (8) lokasi desa dari 14 desa di Kecamatan Kintap dengan tingkat kerawanan rendah sampai dengan sedang, yakni: Desa Pandan Sari, Desa Kintap, Desa Kintapura, Desa Muara Kintap, Desa Sumber Jaya, Desa Kebun Raya, Desa Mekar Sari dan Desa Sebamban Baru.
  - f. Sepuluh (10) lokasi desa dari 11 desa di Kecamatan Bumi Makmur dengan tingkat kerawanan sedang, yakni: Desa Sungai Rasau, Desa Handil Labuan Amas, Desa Handil Maluka, Desa Handil Suruk, Desa Handil Gayam, Desa Handil Birayang Atas, Desa Handil Birayang B

Selain hal-hal tersebut, diatur juga mengenai jalur evakuasi bencana di Kabupaten Tanah Laut. Rencana jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 Perda RTRW Kabupaten Tanah Laut ayat (1) huruf e meliputi:

- a. Jalur utama dari lokasi bencana banjir di Desa Nusa Indah dan Bati-bati melalui Jalan Ahmad Yani ke Kecamatan Tambang Ulang;
- b. Jalur utama dari lokasi kebakaran di daerah lahan kritis pada lahan gambut melalui jalan lokal dan kolektor sekunder ke kantor kecamatan dan fasilitas umum yang dapat digunakan untuk pengungsian sementara, yang ada pada setiap kecamatan;
- c. Jalur utama dari lokasi tanah longsor di Kecamatan Batu Ampar, Jorong, dan Kintap melalui jalan lokal dan kolektor sekunder ke kantor kecamatan dan fasilitas umum yang dapat digunakan untuk pengungsian sementara, yang ada pada setiap kecamatan; dan
- d. Jalur utama dari lokasi abrasi di sepanjang garis pantai kabupaten melalui jalan lokal dan kolektor sekunder ke kantor kecamatan dan fasilitas umum yang dapat digunakan untuk pengungsian sementara, yang ada pada setiap kecamatan.

Berbagai program dan rencana mitigasi bencana sebagaimana yang dimaksud diatas dilakukan secara terpadu oleh instansi terkait dan masyarakat melalui suatu badan koordinasi penanggulangan bencana pada tingkat nasional, provinsi dan Kabupaten. Ketentuan mengenai pencegahan kerusakan, penanggulangan dan bencana akibat daya rusak air diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati. Sementara itu, mengenai Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Peraturan daerah RTRW Kabupaten Tanah Laut 2016-2036 Pasal 65 huruf p ditetapkan sebagai berikut:

- a. Pengembangan kawasan permukiman yang sudah terbangun di dalam kawasan rawan bencana alam harus dibatasi dan diterapkan peraturan bangunan (*building code*) sesuai dengan potensi bahaya/bencana alam, serta dilengkapi jalur evakuasi;
- b. Penentuan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk;
- c. Kegiatan-kegiatan vital/strategis diarahkan untuk tidak dibangun pada kawasan rawan bencana;
- d. Dalam kawasan rawan bencana masih dapat dilakukan pembangunan prasarana penunjang untuk mengurangi resiko bencana alam dan pemasangan sistem peringatan dini; dan

- e. Diizinkan melakukan kegiatan budidaya lain, seperti pertanian, perkebunan, dan kehutanan, serta bangunan yang berfungsi untuk mengurangi risiko yang timbul akibat bencana alam.
- f. Pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis dan ancaman bencana;
- g. Pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum;
- h. Penetapan batas dataran banjir;
- i. Pemanfaatan dataran banjir bagi ruang terbuka hijau dan pembangunan fasilitas umum dengan kepadatan rendah; dan
- j. Dilarang pemanfaatan ruang bagi kegiatan permukiman dan fasilitas umum penting lainnya.

#### 2.1.1.4 Kondisi Demografi

Penduduk sebagai faktor utama pembangunan merupakan modal dasar keberhasilan pembangunan suatu wilayah. Besaran, komposisi, dan distribusi penduduk akan mempengaruhi struktur ruang dan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat. Seluruh aspek pembangunan memiliki korelasi dan interaksi dengan kondisi kependudukan yang ada, sehingga informasi tentang demografi memiliki posisi strategis dalam penentuan kebijakan. Penduduk dibagi atas kelompok-kelompok tertentu, atau dapat dikatakan atas komposisi penduduk tertentu. Susunan penduduk tersebut menggambarkan pengelompokan penduduk menurut karakteristik yang sama seperti jenis kelamin, umur, tingkat pendidikan, dan mata pencaharian. Jumlah penduduk Kabupaten Tanah Laut berdasarkan Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2019 adalah sebanyak 350.007 jiwa. Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Tanah Laut selama periode 2018-2019 adalah -0,37 %.

Kecamatan yang memiliki jumlah penduduk tertinggi di Kabupaten Tanah Laut adalah Kecamatan Pelaihari yaitu sebanyak 65.248 jiwa (22,31%). Meskipun memiliki jumlah penduduk tertinggi Kecamatan Pelaihari karena memiliki pertumbuhan positif 1,22 % sedangkan laju pertumbuhan penduduk di Kecamatan Batu Ampar merupakan yang terendah yaitu sebesar -8,15%. Wilayah yang memiliki penduduk tertinggi kedua adalah Kecamatan Bati-Bati yaitu sebanyak 44.768 jiwa (12,79%), disusul Kecamatan Kintap sebanyak 42.711 jiwa (12,20%), dan Kecamatan Jorong sebanyak 33.493 jiwa

(9,57%). Sementara itu, kecamatan dengan jumlah penduduk terkecil adalah Kecamatan Bumi Makmur yaitu 13.779 jiwa (3,94%). Jika dilihat dari kepadatan penduduk, wilayah yang memiliki kepadatan penduduk tertinggi adalah Kecamatan Pelaihari yaitu sebesar 205 jiwa per km<sup>2</sup>, disusul oleh Kecamatan Bati-Bati sebesar 190 jiwa per km<sup>2</sup>, dan Kecamatan Tambang Ulang sebesar 112 jiwa per km<sup>2</sup>. Sedangkan wilayah dengan kepadatan penduduk terendah diurutkan dari yang paling kecil adalah Kecamatan Batu Ampar yaitu sebesar 50 jiwa per km<sup>2</sup>, Kecamatan Jorong sebesar 53 jiwa per km<sup>2</sup>, dan Kecamatan Panyipatan sebesar 75 jiwa per km<sup>2</sup>.

**Tabel 2.18 Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Tanah Laut, 2010-2019**

No.	Kecamatan	2010	2016	2017	2018	2019	Laju Pertumbuhan 2018-2019
1.	Panyipatan	21.151	21.562	22.489	23051	25.301	-0,69
2.	Takisung	27.998	28.583	29.064	29413	32.859	0.07
3.	Kurau	11.578	11.713	11.831	12097	13.494	-0.12
4.	Bumi Makmur	11.831	13.310	13.786	14214	13.779	-1.94
5.	Bati-Bati	38.645	39.496	39.537	39889	44.768	0,26
6.	Tambang Ulang	14.925	16.549	16.703	17065	18.079	-0,42
7.	Pelaihari	63.895	64.678	65.248	65727	78.100	1,22
8.	Bajuin	15.957	16.452	17.404	18025	19.441	0,85
9.	Batu Ampar	23.233	25.883	26.740	27311	27.527	-8,15
10.	Jorong	29.002	39.880	40.198	40616	33.493	-0,13
11.	Kintap	38.118	51.180	51.328	51787	42.711	1,15
<b>Kabupaten Tanah Laut</b>		<b>296.333</b>	<b>329.286</b>	<b>334.328</b>	<b>339195</b>	<b>350.007</b>	

Sumber: SIPD *cit.* Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2020

**Tabel 2.19 Distribusi dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Tanah Laut, 2019**

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)	Presentase Penduduk (%)	Kepadatan Penduduk per km <sup>2</sup>
1.	Panyipatan	25.301	7,23	75
2.	Takisung	32.859	9,39	95
3.	Kurau	13.494	3,99	109
4.	Bumi Makmur	13.779	3,94	97
5.	Bati-Bati	44.768	12,79	190
6.	Tambang Ulang	18.079	5,17	112
7.	Pelaihari	78.100	22,31	205
8.	Bajuin	19.441	5,55	99
9.	Batu Ampar	27.527	7,86	50
10.	Jorong	33.493	9,57	53
11.	Kintap	42.711	12,20	79
<b>Kabupaten Tanah Laut</b>		<b>350.007</b>	<b>350.007</b>	<b>96</b>

Sumber: SIPD *cit.* Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2020

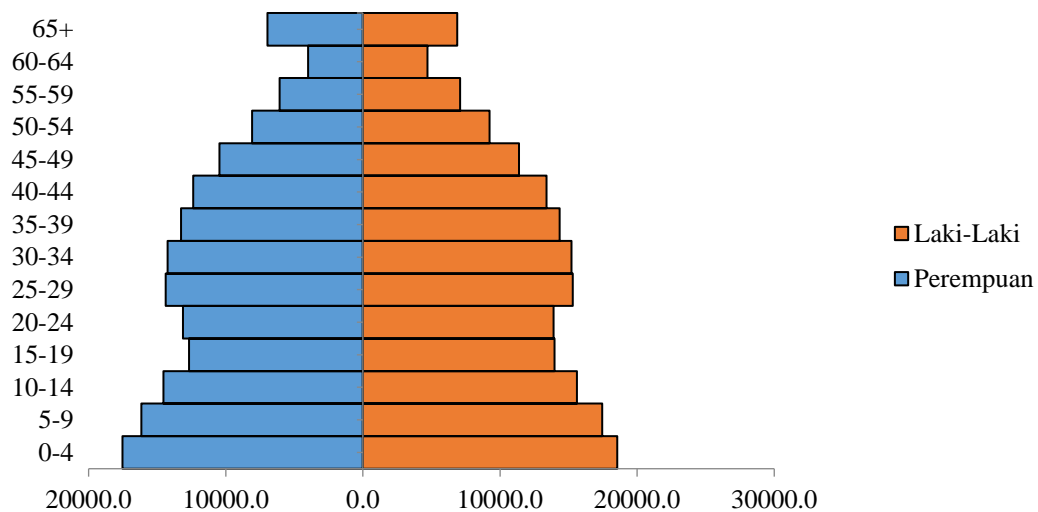
Karakteristik penduduk yang penting adalah struktur umur dan jenis kelamin. Karakteristik penduduk tersebut berpengaruh penting terhadap proses demografi dan tingkah laku sosial ekonomi penduduk. Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, jumlah penduduk yang berjenis kelamin laki-laki di Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2019 adalah sebanyak 176.319 jiwa, sedangkan jumlah penduduk perempuan sebanyak 167.571 jiwa. Rasio jenis kelamin di Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2019 adalah sebesar 105,30 yang berarti bahwa dalam 100 penduduk perempuan di Kabupaten Tanah Laut terdapat 105 penduduk laki-laki.

**Tabel 2.20 Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin di Kab. Tanah Laut, 2019**

No.	Kecamatan	Rasio Jenis Kelamin
1.	Panyipatan	103,27
2.	Takisung	103,77
3.	Kurau	102,59
4.	Bumi Makmur	104,66
5.	Bati-Bati	104,26
6.	Tambang Ulang	104,99
7.	Pelaihari	103,61
8.	Bajuin	105,25
9.	Batu Ampar	106,40
10.	Jorong	107,31
11.	Kintap	108,42
<b>Kabupaten Tanah Laut</b>		<b>106,40</b>

Sumber: SIPD *cit.* Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2020

Selanjutnya, berdasarkan kelompok umur pada tahun 2019, jumlah penduduk Kabupaten Tanah Laut paling banyak berada pada kelompok umur 0-4 tahun yaitu sebanyak 33.901 jiwa, diikuti kelompok umur 5-9 tahun sebanyak 33.873 jiwa, dan kelompok umur 10-14 tahun sebanyak 30.627 jiwa. Terkait dengan struktur penduduk, piramida penduduk Kabupaten Tanah Laut termasuk dalam kategori *expansive* dimana sebagian besar penduduknya berada dalam kelompok umur muda. Dasar piramida yang cukup lebar menunjukkan penduduk Kabupaten Tanah Laut memiliki angka rasio ketergantungan penduduk muda yang cukup tinggi, sementara puncak piramida yang menciut menunjukkan rendahnya angka rasio ketergantungan penduduk tua.



Sumber: SIPD *cit.* Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2020

**Gambar 2.4 Piramida Penduduk Kabupaten Tanah Laut, 2019**

Implikasi dari struktur penduduk muda adalah besarnya persentase penduduk yang bersiap memasuki batas penduduk usia kerja (*economically active population*) dan besarnya rasio ketergantungan (*dependency ratio*). Kondisi ini juga sering disebut sebagai *population boom*. Kondisi tersebut pada masa yang akan datang akan memiliki dua implikasi, jika dapat penduduk dikelola dengan baik sehingga menjadi SDM produktif akan sangat potensial untuk menjadi penggerak ekonomi wilayah dan sebaliknya jika tidak dapat terkelola dengan baik maka akan menjadi penyebab berbagai problem ekonomi dan sosial wilayah.

Batas bawah usia kerja di Indonesia adalah umur 15 tahun. Setelah memasuki usia tersebut maka mereka disebut sebagai penduduk usia kerja. Bila penduduk usia kerja tidak melakukan salah satu aktivitas dalam kelompok bukan angkatan kerja maka termasuk ke dalam kriteria angkatan kerja. Dan bila dalam angkatan kerja tidak melakukan aktivitas kerja maka kelompok ini termasuk ke dalam kriteria pengangguran (*unemployment*). Dengan jumlah penduduk muda yang besar tentu potensi jumlah penduduk yang akan terjun ke dalam angkatan kerja juga besar, untuk itu pemerintah harus bersiap untuk menyediakan lapangan kerja untuk menampung jumlah angkatan kerja yang besar ini. Hal yang akan terjadi bila permintaan akan tenaga kerja lebih kecil dari jumlah pencari kerja adalah terciptanya pengangguran.

## 2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

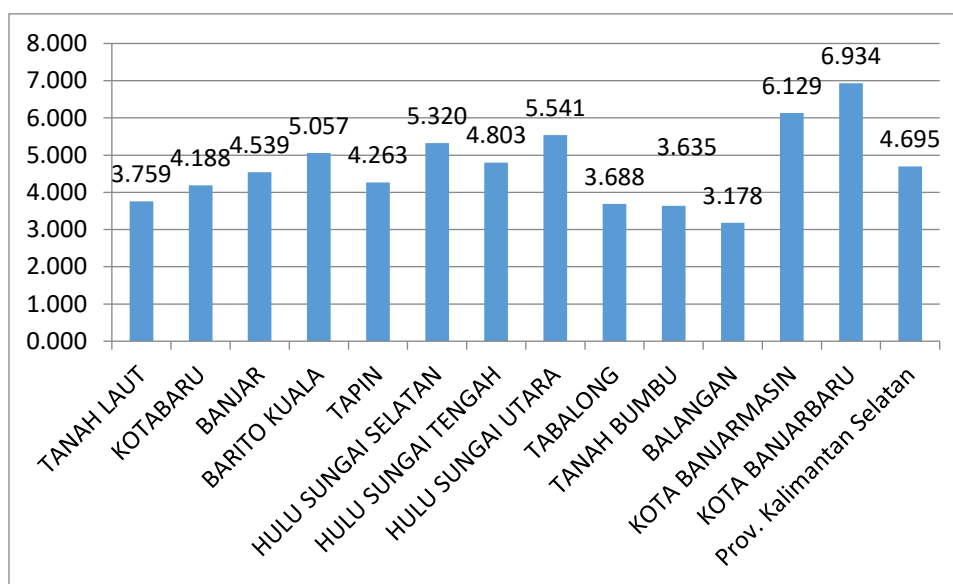
### 2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

#### 2.1.2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan jumlah nilai tambah yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah. PDRB merupakan salah satu indikator penting yang digunakan untuk mengetahui gambaran kondisi ekonomi di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu. PDRB dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu PDRB atas dasar harga berlaku dan PDRB atas dasar harga konstan. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar, yakni menggunakan perhitungan tahun dasar 2010. PDRB menurut harga berlaku digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi suatu daerah. Sementara itu, PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga. Laju pertumbuhan ekonomi merupakan suatu indikator ekonomi makro yang menggambarkan seberapa jauh keberhasilan pembangunan suatu wilayah dalam periode waktu tertentu. Untuk mengukur besarnya laju pertumbuhan tersebut dapat dihitung dari data PDRB atas dasar harga konstan.

Selama periode 2013-2019, tren PDRB atas dasar harga berlaku di Kabupaten Tanah Laut mengalami peningkatan setiap tahunnya dari sebesar Rp 9,41 triliun pada tahun 2013 menjadi sebesar Rp 12,36 triliun pada tahun 2017 dan tahun 2018 sebesar Rp. 13,24 triliun dan tahun 2019 menjadi 13,92 triliun. Tren serupa juga ditunjukkan pada PDRB atas dasar harga konstan yang terus meningkat setiap tahunnya dari Rp 8,33 triliun pada tahun 2013 menjadi sebesar Rp 9,55 triliun pada tahun //dan tahun 2018 sebesar Rp. 9,99 triliun dan tahun 2019 menjadi 10,37 triliun. Dengan adanya peningkatan PDRB atas dasar konstan, maka perekonomian Kabupaten Tanah Laut terus mengalami pertumbuhan setiap tahunnya 3,76%, meskipun pertumbuhannya cenderung mengalami perlambatan dari tahun sebelumnya 4,65%. Rata-rata pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tanah Laut tahun 2013-2019 adalah sebesar 4,09% per tahun, dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2013 sebesar 5,49% dan pertumbuhan ekonomi terendah terjadi pada tahun 2015 sebesar 2,87%. Pada tahun

2015 merupakan titik balik pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanah Laut, dimana pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2016 mulai menunjukkan peningkatan menjadi 3,25% dan pada tahun 2017 tumbuh kembali sebesar 4,64%. Apabila pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanah Laut dibandingkan dengan kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2017, maka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanah Laut berada di peringkat 10 dari 13 kabupaten/kota. Jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Selatan, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanah Laut masih berada di bawahnya dimana pertumbuhan ekonomi provinsi pada tahun 2017 mencapai 5,29%. Pertumbuhan tertinggi pada tahun 2019 di Provinsi Kalimantan Selatan ditempati Kota Banjarmasin 6,12% dan Kota Banjarbaru 6,93% (Gambar 2.6).



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan, 2020

**Gambar 2.5 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tanah Laut dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan, 2018-2019**

**Tabel 2.21 Pertumbuhan Ekonomi Kab. Tanah Laut Menurut Lapangan Usaha (%), 2015-2019**

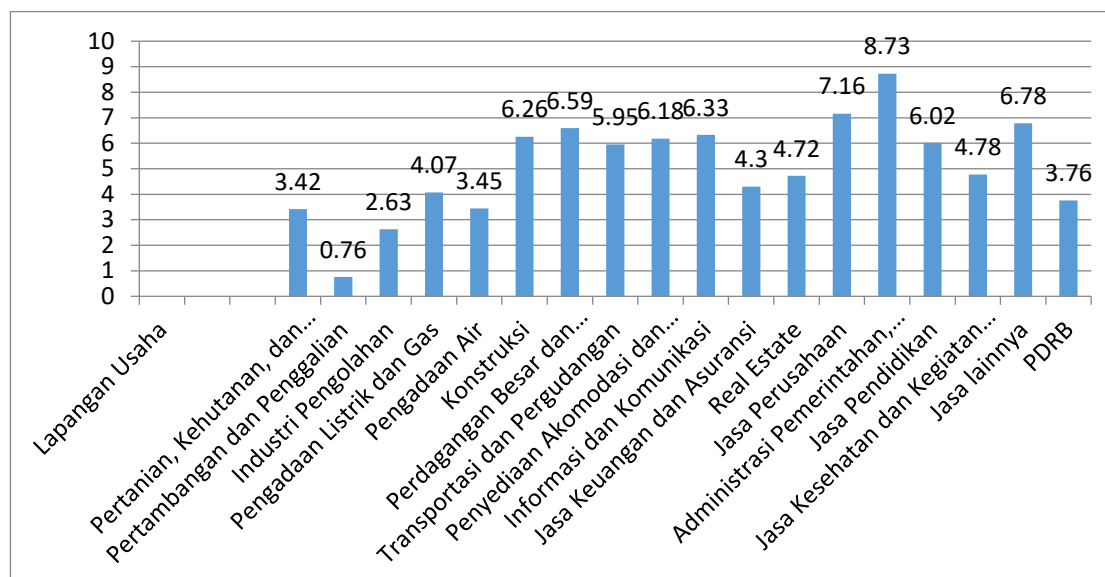
Lapangan Usaha	Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha (Persen)					Rerata
	Atas Dasar Harga Konstan 2010					
	2015	2016	2017	2018	2019	



Lapangan Usaha	Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha (Persen)					Rerata
	Atas Dasar Harga Konstan 2010					
	2015	2016	2017	2018	2019	
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.22	3.84	3.5	3.64	3.42	3.32
Pertambangan dan Penggalian	-2.22	-2.14	1.81	2.36	0.76	0.11
Industri Pengolahan	4.33	7.57	7.56	5.79	2.63	5.58
Pengadaan Listrik dan Gas	31.67	5	4.56	7.5	4.07	10.56
Pengadaan Air	5.64	7.43	7.58	6.66	3.45	6.15
Konstruksi	6.68	5.23	7.64	6.95	6.26	6.55
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8.15	7.85	7.95	7.21	6.59	7.55
Transportasi dan Pergudangan	6.97	6.5	6.86	6.92	5.95	6.64
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6.2	6.34	6.63	7.73	6.18	6.62
Informasi dan Komunikasi	8.37	8.75	6.97	7.19	6.33	7.52
Jasa Keuangan dan Asuransi	4.92	4.44	6.08	4.39	4.3	4.83
Real Estate	5.65	6.47	4.91	4.93	4.72	5.34
Jasa Perusahaan	6.58	8.05	7.02	7.25	7.16	7.21
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	8.74	2.03	2.53	3.84	8.73	5.17
Jasa Pendidikan	8.76	7.87	6.78	7.22	6.02	7.33
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7.53	9.05	5.23	5.18	4.78	6.35
Jasa lainnya	6.12	7.68	6.48	7.02	6.78	6.82
PDRB	2.87	3.25	4.64	4.65	3.76	3.83

Sumber: SIPD cit. Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2020

Pada tahun 2019, sektor yang memiliki pertumbuhan tertinggi adalah sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib 8,73 % dan jasa perusahaan 7,16%. Sedangkan sektor yang memiliki posisi terendah memiliki pertumbuhan yang rendah 0,76% adalah sektor pertambangan dan 263% sedangkan sektor lainnya mengalami pertumbuhan di atas rata-rata sektoral yaitu di atas 3,83%



Sumber: SIPD cit. Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2020

**Gambar 2.6 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tanah Laut Menurut Sektor, 2019**

#### 2.1.2.1.2 Struktur Ekonomi

Beragamnya potensi sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) yang tersedia di suatu wilayah memberikan warna pada struktur ekonomi pada wilayah tersebut. Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk menggambarkan struktur ekonomi suatu wilayah adalah distribusi persentase sektoral. Distribusi persentase PDRB secara sektoral menunjukkan peranan masing-masing sektor dalam kontribusinya terhadap PDRB secara keseluruhan. Semakin besar persentase suatu sektor, maka semakin besar pula pengaruh sektor tersebut dalam perkembangan ekonomi wilayah tersebut. Struktur ekonomi yang dinyatakan dalam persentase menunjukkan besarnya peran masing-masing sektor ekonomi dalam kemampuan menciptakan nilai tambah. Hal tersebut menggambarkan ketergantungan daerah terhadap kemampuan produksi dari masing-masing sektor ekonominya.

**Tabel 2.22 Kontribusi PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha di Kab.Tanah Laut (%), 2015-2019**

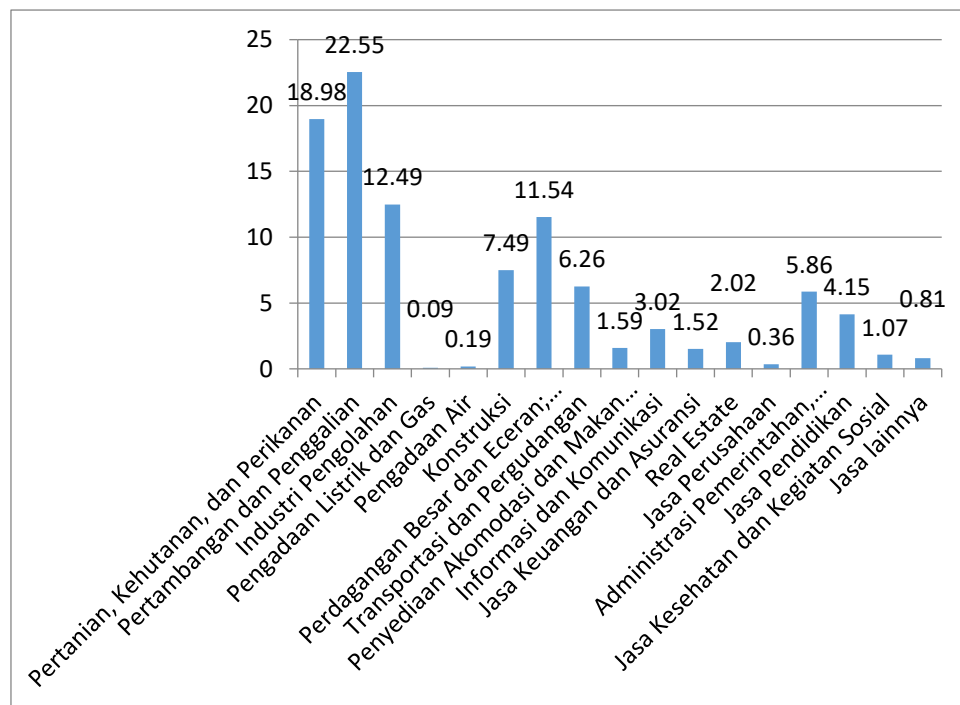
Lapangan Usaha	Distribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha (Persen)					Rerata
	Atas Dasar Harga Berlaku					
	2015	2016	2017	2018	2019	
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	19.37	19.65	19.23	18.92	18.98	19.23
Pertambangan dan	28.08	25.13	24.47	23.85	22.55	24.816

Lapangan Usaha	Distribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha (Persen)					Rerata
	Atas Dasar Harga Berlaku					
	2015	2016	2017	2018	2019	
Penggalian						
Industri Pengolahan	11.38	12.24	12.89	12.79	12.49	12.358
Pengadaan Listrik dan Gas	0.07	0.08	0.09	0.09	0.09	0.084
Pengadaan Air	0.17	0.18	0.18	0.18	0.19	0.18
Konstruksi	6.83	7.02	7.13	7.26	7.49	7.146
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9.74	10.41	10.74	11.2	11.54	10.726
Transportasi dan Pergudangan	5.65	5.88	5.94	6.08	6.26	5.962
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.43	1.48	1.49	1.54	1.59	1.506
Informasi dan Komunikasi	2.71	2.84	2.91	2.96	3.02	2.888
Jasa Keuangan dan Asuransi	1.39	1.44	1.46	1.48	1.52	1.458
Real Estate	1.94	2.01	1.98	1.97	2.02	1.984
Jasa Perusahaan	0.31	0.32	0.33	0.34	0.36	0.332
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5.63	5.58	5.42	5.44	5.86	5.586
Jasa Pendidikan	3.65	3.97	3.96	4.06	4.15	3.958
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0.97	1.04	1.03	1.04	1.07	1.03
Jasa lainnya	0.7	0.74	0.76	0.78	0.81	0.758
PDRB	100	100	100	100	100	

Sumber: SIPD cit. Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2020

Selama periode 2015-2019, perekonomian Kabupaten Tanah Laut didominasi oleh sektor pertambangan dan penggalian dengan rata-rata kontribusi yang mencapai 24,16% per tahun. Pada sektor ini kontribusi terbesar diberikan oleh produksi batu bara, kemudian produksi bijih besi, mangan, bijih nikel, dan batu kromit. Walaupun kontribusi sektor ini mengalami penurunan selama periode 2015-2019, sektor ini tetap menjadi sektor andalan di Kabupaten Tanah Laut. Kemudian sektor andalan kedua di Kabupaten Tanah Laut adalah sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Pada tahun 2015-2016, tren sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan cenderung meningkat dari tahun ke tahun, tahun 2015 sektor ini sebesar 19,57% dan pada tahun 2016 mencapai 19,65%. Namun pada tahun 2017-2019, kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan

perikanan mengalami penurunan menjadi hanya 18,98% tahun 2019. Industri lainnya yang perlu diperhitungkan karena kontribusinya terhadap PDRB adalah sektor industri pengolahan. Selama lima tahun terakhir industri ini mengalami peningkatan dari 11,38% pada tahun 2015 menjadi sebesar 12,49% pada tahun 2019, dengan rata-rata kontribusi mencapai 12,39%. Kekayaan sumber daya alam pada sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan yang mendorong tumbuhnya sektor industri, baik formal maupun non formal.



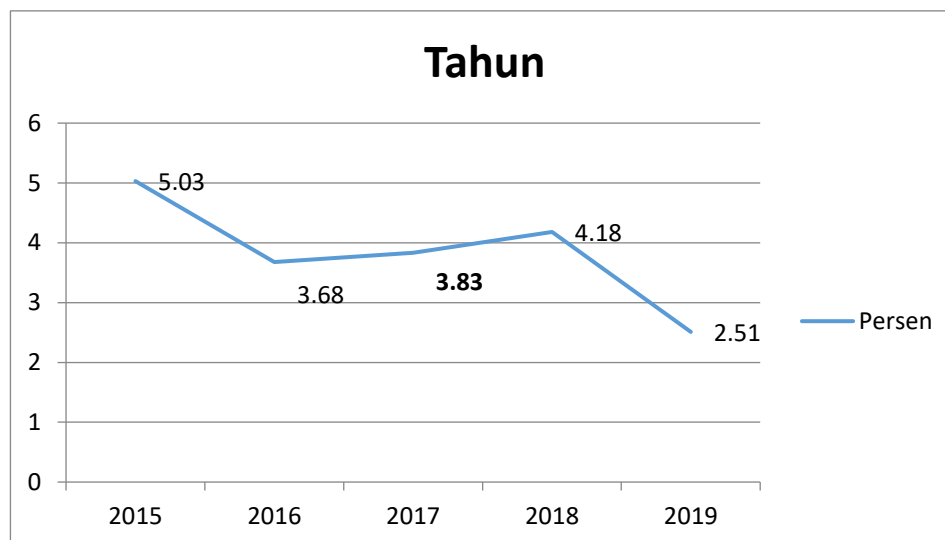
Sumber: SIPD cit. Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2020

**Gambar 2.7 Kontribusi PDRB Menurut Sektor di Kabupaten Tanah Laut(%), 2019**

#### 2.1.2.1.3 Inflasi

Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dimana barang dan jasa tersebut merupakan kebutuhan pokok masyarakat atau turunnya daya jual mata uang suatu negara. Menurut Bank Indonesia (2020), inflasi timbul karena adanya tekanan dari sisi penawaran (*cost push inflation*), dari sisi permintaan (*demand pull inflation*), dan dari ekspektasi inflasi. Faktor penyebab terjadi *demand pull inflation* adalah tingginya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Dalam konteks makroekonomi, kondisi ini digambarkan oleh output riil yang melebihi output potensialnya atau permintaan total (*aggregate demand*) lebih besar dari pada kapasitas perekonomian. Sementara itu, faktor ekspektasi inflasi dipengaruhi oleh perilaku

masyarakat dan pelaku ekonomi dalam menggunakan ekspektasi angka inflasi dalam keputusan kegiatan ekonominya. Ekspektasi inflasi tersebut apakah lebih cenderung bersifat adaptif atau *forward looking*. Hal ini tercermin dari perilaku pembentukan harga di tingkat produsen dan pedagang terutama pada saat menjelang hari-hari besar keagamaan (lebaran, natal, dan tahun baru) dan penentuan upah minimum regional (UMR). Meskipun ketersediaan barang secara umum diperkirakan mencukupi dalam mendukung kenaikan permintaan, namun harga barang dan jasa pada saat-saat hari raya keagamaan meningkat lebih tinggi dari kondisi *supply-demand* tersebut. Demikian halnya pada saat penentuan UMR, pedagang ikut pula meningkatkan harga barang meski kenaikan upah tersebut tidak terlalu signifikan dalam mendorong peningkatan permintaan.



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan, 2020

**Gambar 2.8 Laju Inflasi Kota Banjarmasin, 2015-2019**

Menurut tingkat keparahannya, inflasi dibagi menjadi 4 kategori yaitu inflasi ringan ( $< 10$  persen per tahun), inflasi sedang (10-30 persen per tahun), inflasi berat (30-100 persen per tahun), dan inflasi sangat berat/hiperinflasi ( $> 100$  persen per tahun). Pengukuran inflasi hanya dilakukan di 66 kota di Indonesia dan salah satunya di Kota Banjarmasin. Kota Banjarmasin dijadikan sebagai salah satu rujukan angka inflasi di wilayah Kalimantan Selatan, termasuk di Kabupaten Tanah Laut. Sehingga dapat diasumsikan bahwa inflasi di Kabupaten Tanah Laut akan sama dengan inflasi di Kota Banjarmasin. Pada periode 2012-2014 tingkat inflasi di Kota Banjarmasin mengalami peningkatan dari 5,96% menjadi 7,16%, kemudian menurun hingga tahun 2016 menjadi 3,68% dan pada tahun 2017 meningkat kembali menjadi 3,82% dan tahun 2018 naik

4,18 dan tahun 2019 turun menjadi 2,51%. Secara umum inflasi Kota Banjarmasin masih tergolong inflasi ringan.

#### 2.1.2.1.4 Pendapatan Perkapita

PDRB per kapita merupakan gambaran dan rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk selama satu tahun di suatu wilayah atau daerah. Data statistik ini merupakan suatu indikator yang digunakan untuk menggambarkan tingkat kemakmuran masyarakat secara makro adalah pendapatan perkapita atau *per capita income*. Semakin tinggi pendapatan yang diterima penduduk di suatu wilayah, maka tingkat kesejahteraan di wilayah yang bersangkutan dapat dikatakan bertambah baik. Angka ini diperoleh dengan cara membagi PDRB dengan jumlah penduduk. PDRB per kapita merupakan besaran kasar yang dapat menunjukkan tingkat kesejahteraan penduduk di suatu wilayah pada suatu waktu tertentu.

**Tabel 2.23 PDRB perkapita ADH dan ADHK Kabupaten Tanah Laut, 2015-2019**

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
PDRB ADHB (Rp Ribu)	33.310,03	34.602,41	36.976,39	39.036,14	39.799,16
PDRB ADHK (Rp Ribu)	27.262,34	27.719,86	28.567,48	29,466.21	29,629.28
Pertumbuhan PDRB ADHK (%)	1,22	1,68	3,06	3,15	0,55

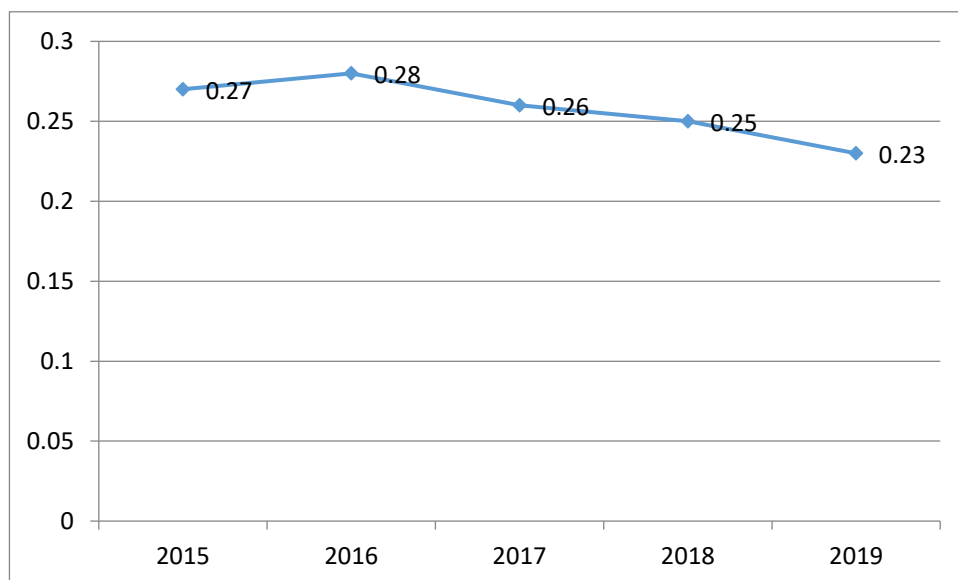
Sumber: SIPD cit. Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018 (diolah)

PDRB perkapita Kabupaten Tanah Laut pada Tabel 2.22 memiliki tren yang cenderung positif, yang artinya meningkat dari tahun ke tahun, baik untuk PDRB ADHB dan PDRB ADHK. Pada tahun 2015 PDRB perkapita ADHB Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp 33,310 juta dan pada tahun 2019 meningkat menjadi sebesar Rp 39,799 juta. Sementara itu, nilai PDRB perkapita ADHK tahun 2015 terus meningkat dari Rp 27,762 juta dan pada tahun 2019 meningkat menjadi sebesar Rp 29,629 juta. Dari sisi pertumbuhan, nilai PDRB ADHK terus tumbuh setiap tahun dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2018 yang mencapai 3,15%. Peningkatan dari PDRB per kapita Kabupaten Tanah Laut pada setiap tahunnya merupakan satu indikasi membaiknya kondisi perekonomian di Kabupaten Tanah Laut. Peningkatan PDRB per kapita tersebut disebabkan pertumbuhan PDRB ADHK lebih tinggi dibandingkan

dengan pertumbuhan jumlah penduduknya sehingga cukup dapat disimpulkan bahwa penduduk Kabupaten Tanah Laut lebih produktif.

#### 2.1.2.1.5 Indeks Gini

Pengukuran tingkat pemerataan dapat dilakukan dengan pendekatan koefisien gini. Koefisien gini atau rasio gini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi pendapatan dengan kumulatif penduduk. Nilai rasio gini antara 0 hingga 1. Apabila nilai rasio Gini mendekati 0, maka kesenjangan distribusi pendapatan dianggap rendah. Sebaliknya, apabila rasio Gini mendekati angka 1, maka kesenjangan distribusi makin tinggi. Rasio Gini dibagi dalam tiga kategori: (a) *Gini Ratio* > 0,5 yang menggambarkan distribusi pendapatan dengan tingkat ketidakmerataan tinggi, (b) *Gini Ratio* 0,3–0,5 yang menggambarkan distribusi pendapatan dengan tingkat ketidakmerataan sedang, dan (c) *Gini Ratio* < 0,3 yang menggambarkan distribusi pendapatan dengan tingkat ketidakmerataan rendah.

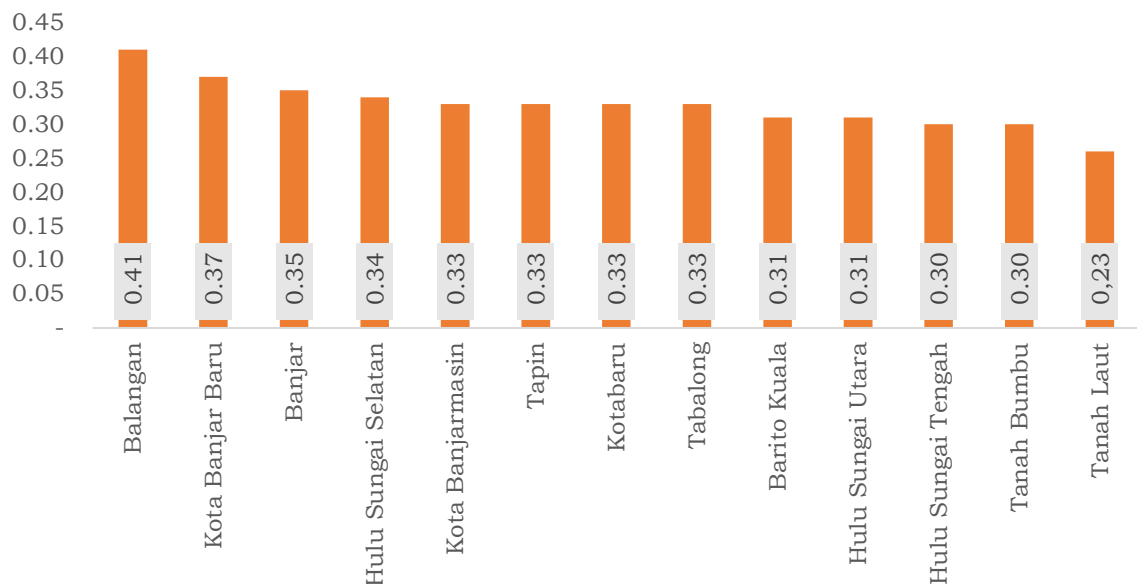


Sumber: SIPD cit. Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan, 2020

**Gambar 2.9 Angka Gini Rasio Kabupaten Tanah Laut, 2015-2019**

Berdasarkan Gambar 2.10, terlihat bahwa sepanjang periode 2015-2019, nilai rasio gini Kabupaten Tanah Laut cenderung fluktuatif. Pada tahun 2015, nilai rasio gini adalah sebesar 0,27, kemudian nilai rasio gini meningkat kembali menjadi 0,28 pada tahun 2016, selanjuta tahun 2017 nilainya kembali mengalami penurunan menjadi 0,26. Penurunan menjadi lebih kecil tahun 2019 sebesar 0,23 . Selama periode 2015-2019,

dapat disimpulkan bahwa nilai rasio gini di Kabupaten Tanah Laut termasuk dalam kategori rendah yang menggambarkan bahwa distribusi pendapatan penduduk di Kabupaten Tanah Laut tingkat ketidak merataannya rendah. Apabila dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Tanah Laut merupakan satu-satunya wilayah di Provinsi Kalimantan Selatan yang distribusi pendapatannya dengan ketidak merataan yang rendah pada tahun 2019. Wilayah dengan nilai rasio gini tertinggi adalah Kabupaten Balangan yaitu sebesar 0,41, disusul Kota Banjar Baru sebesar 0,37, dan Kabupaten Banjar sebesar 0,35.



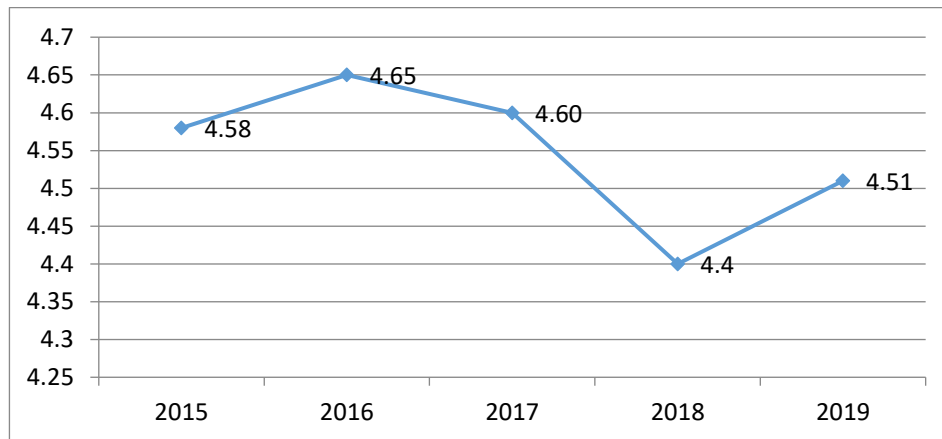
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan, 2020 (diolah)

**Gambar 2.10 Indeks Gini di Provinsi Kalimantan Selatan Menurut Kabupaten/Kota, 2019**

#### 2.1.2.1.6 Persentase Penduduk Miskin

Salah satu indikator sosial ekonomi yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk adalah perkembangan jumlah penduduk miskin. Kemiskinan menjadi salah satu permasalahan utama yang dihadapi tidak hanya di Kabupaten Tanah Laut, namun telah menjadi permasalahan dunia. Penduduk dikatakan termasuk dalam kategori miskin jika rata-rata pengeluaran per bulannya di bawah garis kemiskinan. Pada tahun 2015-2019, garis kemiskinan di Kabupaten Tanah Laut mengalami kenaikan setiap tahunnya.

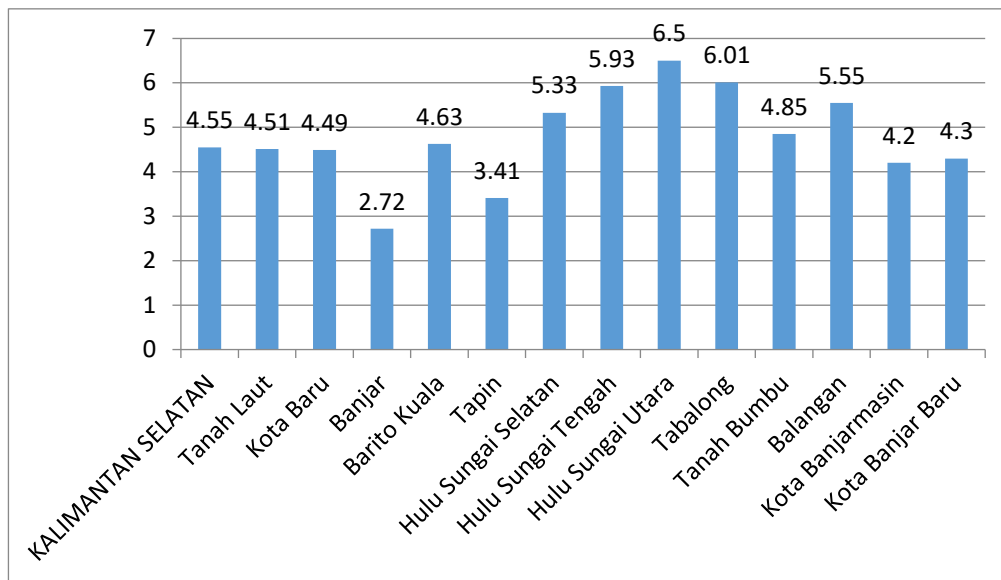




Sumber: SIPD cit. Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan, 2020 (diolah)

**Gambar 2.11 Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Tanah Laut, 2015-2019**

Persentase penduduk miskin di Kabupaten Tanah Laut juga turut mengalami peningkatan. Pada tahun 2015-2019, persentase penduduk miskin menurun dari sebesar 4,58% menjadi sebesar 4,51%. Pada tahun 2019, terdapat hasil yang cukup menggembirakan dimana persentase penduduk miskin sedikit mengalami penurunan menjadi sebesar 4,51%. Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2019, persentase penduduk miskin di Kabupaten Tanah Laut menempati peringkat ke-5 terkecil di Provinsi Kalimantan Selatan yaitu sebesar 4,51%. Angka tersebut lebih rendah jika dibandingkan dengan persentase penduduk miskin di Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2019 yang mencapai 4,55%. Wilayah dengan persentase penduduk miskin tertinggi di Provinsi Kalimantan Selatan ditempati oleh Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan persentase sebesar 6,5%, disusul Kabupaten Tabalong sebesar 6,01%, dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebesar 5,93%. Sementara itu, wilayah dengan persentase penduduk miskin terendah ditempati oleh Kabupaten Banjar dengan persentase sebesar 2,72%.



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan, 2020

**Gambar 2.12 Persentase Angka Kemiskinan Menurut Kab/Kota di Prov. Kalimantan Selatan, 2019**

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi kemiskinan yang juga sangat penting untuk diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan, yang diukur dengan Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap-P1*) dan Indeks Keparahannya (*Poverty Severity Index-P2*). Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index-P1*), merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Sedangkan Indeks keparahan kemiskinan (*Poverty Severity Index-P2*) digunakan untuk melihat masalah ketimpangan di antara penduduk miskin. Indeks ini menyatakan sebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks berarti semakin parah tingkat kemiskinan karena semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

Pada tahun 2013-2017 Indeks Kedalaman Kemiskinan di Kabupaten Tanah Laut menunjukkan tren yang cenderung fluktuatif. Pada tahun 2016 terjadi penurunan indeks kedalaman kemiskinan dari 0,76 menjadi 0,64, kemudian meningkat menjadi 0,71 pada tahun 2017. Kemudian kembali turun pada tahun 2018 menjadi 0,55 dan meningkat kembali menjadi 0,58 pada tahun 2019. Hal ini menandakan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung semakin jauh pada garis kemiskinan. Hasil yang berbeda ditunjukkan pada indeks keparahan kemiskinan di Kabupaten Tanah Laut

pada tahun 2015-2019 terjadi penurunan indeks dari 0,18 menjadi 0,16. Kemudian pada tahun 2018 terjadi penurunan menjadi 0,14 dan pada tahun 2019 menurun kembali menjadi 0,11, yang menandakan bahwa keparahan kemiskinan di Kabupaten Tanah Laut memiliki kecenderungan untuk menurun.

**Tabel 2.24 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2) di Kabupaten Tanah Laut, 2015-2019**

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	0,76	0,64	0,71	0,55	0,58
Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2)	0,18	0,16	0,15	0,14	0,11

Sumber: SIPD cit. Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2020

### 2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

Peningkatan kesejahteraan masyarakat merupakan inti dan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara umum. Dalam perspektif perkembangan pemikiran pembangunan, peningkatan kesejahteraan masyarakat tertuang dalam pemikiran paradigma pembangunan manusia. Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan fokus kesejahteraan sosial dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut:

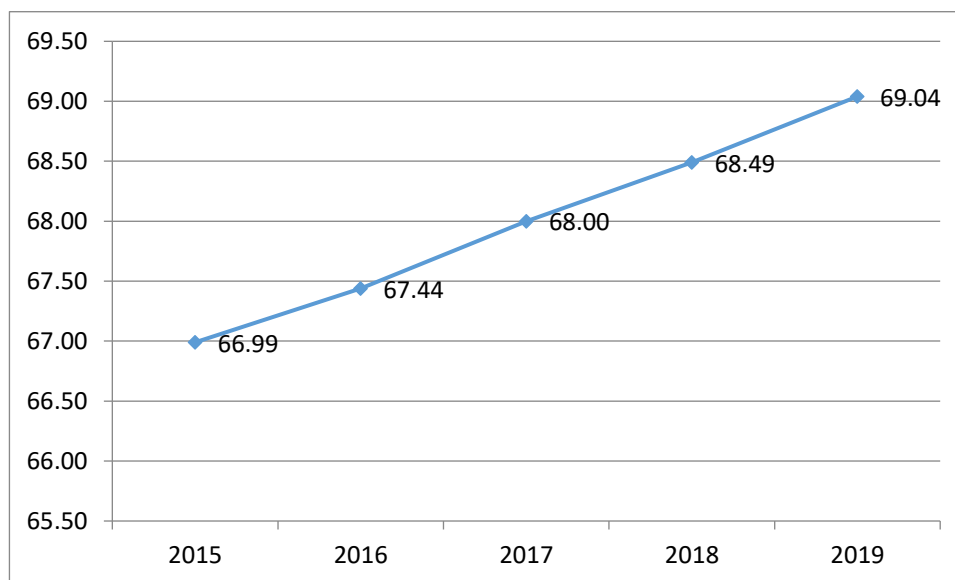
#### 2.1.2.2.1 Indeks Pembangunan Manusia

Dalam perencanaan pembangunan, pembangunan manusia senantiasa berada di baris terdepan. Peningkatan kesejahteraan masyarakat merupakan inti dan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara umum. Dalam perspektif perkembangan pemikiran pembangunan, peningkatan kesejahteraan masyarakat tertuang dalam pemikiran paradigma pembangunan manusia. Paradigma pembangunan manusia dikaitkan dengan upaya untuk memanusiakan masyarakat dalam jati diri pembangunan (*people-centered development*). Di sini, penduduk ditempatkan sebagai tujuan akhir (*the ultimated end*), sedangkan upaya pembangunan dipandang sebagai sarana (*principal means*) untuk mencapai tujuan pembangunan itu sendiri. Secara praktikal, pembangunan manusia dapat diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Perhitungan IPM terdiri atas tiga aspek mendasar pembangunan manusia. Aspek kesehatan yang diwakili oleh indikator harapan hidup, aspek pendidikan yang direpresentasikan oleh indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah, serta

aspek perekonomian yang digambarkan dengan pengeluaran per kapita disesuaikan. Ketiga aspek tersebut dianggap mampu untuk merepresentasikan pembangunan manusia sehingga sampai saat ini penghitungan IPM masih menjadi rujukan negara-negara di dunia dalam mengukur perkembangan pembangunan manusia.

Sebagai Indeks komposit, IPM merupakan gambaran komprehensif mengenai tingkat pencapaian pembangunan manusia di suatu daerah, sebagai dampak dari kegiatan pembangunan yang dilakukan di daerah tersebut. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. Perkembangan angka IPM memberikan indikasi peningkatan atau penurunan kinerja pembangunan manusia pada suatu daerah pada kurun waktu tertentu. IPM suatu daerah/wilayah dapat dikelompokkan menjadi empat kategori menurut UNDP, yaitu (1)  $IPM \geq 80$  termasuk kategori sangat tinggi; (2)  $70 \leq IPM < 80$  termasuk kategori tinggi; (3)  $60 \leq IPM < 70$  termasuk kategori sedang; dan (4)  $IPM < 60$  termasuk kategori rendah.

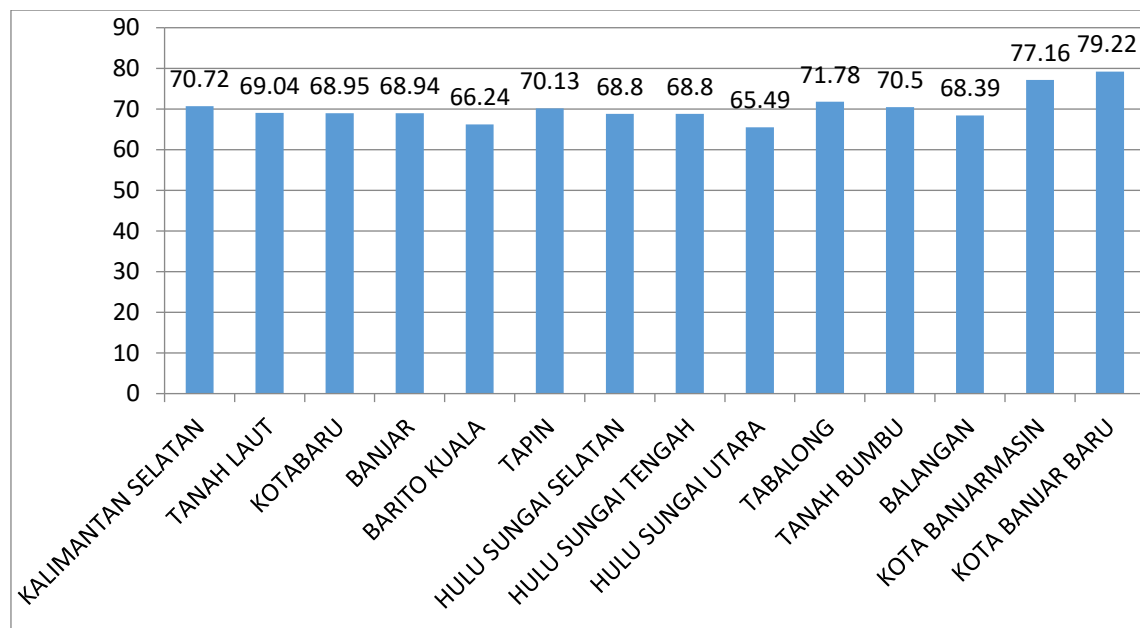


Sumber: SIPD cit. Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2020

**Gambar 2.13 Perkembangan IPM Kabupaten Tanah Laut, 2015-2019**

Selama periode 2015-2019, perkembangan IPM Kabupaten Tanah Laut menunjukkan tren yang positif yaitu selalu mengalami kenaikan setiap tahun. Pada tahun 2015, IPM Kabupaten Tanah Laut adalah sebesar 66,99, dan kinerja IPM pada tahun 2017 adalah sebesar 68,00, tahun 2018 sebesar 68,49 dan tahun 2019 sebesar

69,04 .Di tingkat Provinsi Kalimantan Selatan, IPM Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2017 berada pada posisi 6 dari 13 kabupaten/kota yang ada. Dengan posisi yang berada di kategori sedang, maka Pemerintah Kabupaten Tanah Laut harus bekerja keras untuk meningkatkan nilai IPM tersebut melalui berbagai kebijakan pembangunan baik di bidang pendidikan, kesehatan, maupun sektor ekonomi lainnya agar masyarakat dapat merasakan manfaat yang maksimal dalam pembangunan tersebut. Di Provinsi Kalimantan Selatan sendiri, posisi pertama ditempati oleh Kota Banjar Baru dengan nilai sebesar 78,32, diikuti Kota Banjarmasin sebesar 76,46, dan Kabupaten Tabalong sebesar 70,76. Hanya ketiga wilayah tersebut di Provinsi Kalimantan Selatan yang memiliki IPM dalam kategori tinggi. Kabupaten Tanah Laut sendiri bersama dengan wilayah lainnya termasuk dalam kategori IPM sedang.



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan, 2020

**Gambar 2.14 Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Kalimantan Selatan Menurut Kab/Kota, 2019**

#### 2.1.2.2.2 Angka Melek Huruf

Salah satu indikator keberhasilan pemerintah dalam pembangunan pendidikan adalah berkurangnya penduduk yang buta huruf. Angka melek huruf (*literacy rate*) adalah persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis huruf latin dan atau huruf lainnya. Angka melek huruf dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan program-program pemberantasan buta huruf, menunjukkan

kemampuan penduduk di suatu wilayah dalam menyerap informasi dari berbagai media, dan menunjukkan kemampuan untuk berkomunikasi secara lisan dan tertulis. Selama periode 2010-2013, perkembangan penduduk yang melek huruf menunjukkan hasil yang menggemberikan dengan adanya persentase peningkatan penduduk yang melek huruf dari 93,89% pada tahun 2010 menjadi 96,77% pada tahun 2013. Hal tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2013 terdapat sekitar 3,23% penduduk Kabupaten Tanah Laut yang berumur 15 tahun ke atas yang masih belum/tidak dapat membaca dan menulis. Penduduk yang buta huruf diduga didominasi oleh kelompok tersulit dalam masyarakat untuk diberikan pelayanan pendidikan keaksaraan. Kelompok tersulit tersebut antara lain adalah penduduk usia tua (45 tahun ke atas), penduduk yang tinggal di daerah terpencil, komunitas-komunitas khusus, dan penyandang cacat. Kelompok penduduk ini sulit untuk dijangkau pelayanan pendidikan disebabkan baik oleh faktor internal seperti kemampuan dan keinginan belajar yang sudah menurun dan faktor eksternal seperti terbatasnya ketersediaan pelayanan pendidikan keaksaraan bagi mereka.

Pada tahun 2017, angka melek huruf di Kabupaten Tanah Laut untuk penduduk usia 15 tahun ke atas adalah sebesar 96,07% dan tahun 2019 sebesar 98,57%. Angka melek huruf menurut agregasi jenis kelamin menunjukkan bahwa penduduk berjenis kelamin laki-laki lebih melek huruf dibandingkan dengan penduduk berjenis kelamin perempuan, yaitu 99,52% untuk laki-laki dan 97,57% untuk perempuan. Lebih tingginya persentase penduduk berjenis kelamin laki-laki yang melek huruf dibandingkan penduduk berjenis kelamin perempuan menunjukkan bahwa masih terdapat relatif sedikit ketimpangan antara penduduk berjenis kelamin perempuan dan laki-laki dalam kemampuan literasi aksara atau membaca dan menulis yang dapat disebabkan oleh berbagai hal. Namun demikian pemerintah tetap akan terus menggalakkan pemberantasan buta huruf di seluruh wilayah sesuai dengan target SDGs yaitu mencapai pemerataan kualitas pendidikan.

#### 2.1.2.2.3 Angka Rata-rata Lama Sekolah

Salah satu indikator pendidikan yang digunakan sebagai alat ukur keberhasilan pembangunan manusia di bidang pendidikan adalah rata-rata lama sekolah (RLS). RLS pada metode lama menunjukkan jenjang pendidikan yang telah dicapai oleh penduduk umur 15 tahun ke atas. Pada penghitungan metode baru menurut BPS, RLS adalah rata-

rata jumlah yang dihabiskan oleh penduduk berumur 25 tahun atau lebih untuk menempuh suatu jenjang pendidikan formal yang pernah dijalani. RLS dihitung untuk usia 25 tahun ke atas dengan asumsi bahwa pada umur 25 tahun proses pendidikan sudah berakhir. Selama periode 2013-2017, RLS Kabupaten Tanah Laut mengalami peningkatan setiap tahun walaupun tidak signifikan. RLS Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2013 adalah sebesar 7,26 tahun, kemudian meningkat menjadi 7,27 tahun pada tahun 2014, dan meningkat kembali menjadi 7,29 pada tahun 2015. Pada tahun 2017, RLS Kabupaten Tanah Laut adalah sebesar 7,37 tahun, tahun 2018 sebesar 7,38 tahun dan tahun 2019 sebesar 7,64 tahun yang berarti bahwa rata-rata penduduk di Kabupaten Tanah Laut baru mampu menempuh pendidikan hingga kelas 1 SMP atau putus sekolah pada kelas 2 SMP. Angka RLS Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2019 sebesar 7,64 tahun lebih rendah jika dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Selatan yang sebesar 8,2 tahun. Angka RLS Kabupaten Tanah Laut lebih rendah jika dibandingkan angka RLS Provinsi Kalimantan Selatan, sehingga dalam rangka peningkatan rata-rata lama sekolah, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut harus terus menyediakan fasilitas pendidikan yang memadai bagi masyarakatnya dan memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai manfaat pendidikan formal.

**Tabel 2.25 Angka Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Tanah Laut, 2013-2019**

Uraian	Tahun						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
RLS (tahun)	7,26	7,27	7,29	7,30	7,37	7,38	7,64

Sumber: SIPD cit. Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2020

#### 2.1.2.2.4 Angka Harapan Lama Sekolah

Kemampuan bertahan seorang anak dalam dunia pendidikan dapat menjadi salah satu indikator keberhasilan pembangunan pendidikan di suatu wilayah. Semakin lama seorang anak mampu bertahan untuk terus bersekolah, maka sistem pendidikan yang terbangun di daerah tersebut akan semakin baik. Angka harapan lama sekolah diharapkan mampu memotret fenomena tersebut pada tiap wilayah. Sesuai dengan publikasi terbaru BPS, angka melek huruf (AMH) yang biasanya digunakan sebagai salah satu komponen dalam menghitung Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dianggap sudah tidak relevan sehingga indikator untuk menghitung dimensi pendidikan penduduk

salah satunya menggunakan angka harapan lama Sekolah (HLS). HLS didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang, dengan asumsi kemungkinan anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan rasio penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Tujuan penghitungan HLS adalah untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

**Tabel 2.26 Angka Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Tanah Laut, 2013-2019**

Uraian	Tahun						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
HLS (tahun)	10,83	11,09	11,25	11,50	11,82	11,95	11,96

Sumber: SIPD cit. Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018

Angka HLS Kabupaten Tanah Laut selama periode 2013-2019 selalu mengalami peningkatan setiap tahun. Pada tahun 2013, angka HLS Kabupaten Tanah Laut hanya sebesar 10,83 tahun, kemudian meningkat menjadi 11,09 tahun pada tahun 2014. Angka HLS tersebut mengalami peningkatan kembali sehingga menjadi 11,96 pada tahun 2019. HLS sebesar 11,96 pada tahun 2019 berarti bahwa lamanya sekolah yang akan dicapai oleh anak umur tertentu di masa yang akan datang adalah 11,96 tahun atau telah mencapai pendidikan di kelas 2 SMA. Angka HLS Kabupaten Tanah Laut lebih rendah jika dibandingkan HLS Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2019 yang mencapai 12,52 tahun. Di Provinsi Kalimantan Selatan sendiri, angka HLS tertinggi ditempati Kota Banjar Baru yaitu sebesar 14,80 tahun. HLS di Kabupaten Tanah Laut masih berada jauh di bawah HLS ideal yaitu sebesar 18 tahun sehingga pemerintah Kabupaten Tanah Laut harus memberikan prioritas dan pemantauan secara terus menerus terhadap program pembangunan pendidikan serta perbaikan sistem pendidikan di Kabupaten Tanah Laut.

#### 2.1.2.2.5 Angka Harapan Hidup

Angka harapan hidup adalah perkiraan banyaknya tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup (secara rata-rata). Indikator ini dapat digunakan untuk



mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal kesejahteraan masyarakat di bidang kesehatan. Semakin tinggi AHH, memberikan indikasi bahwa semakin tinggi kualitas fisik penduduk suatu daerah. Angka harapan hidup (AHH) Kabupaten Tanah Laut juga mengalami peningkatan setiap tahun. Pada tahun 2013, AHH di Kabupaten Tanah Laut adalah sebesar 68,19 tahun, kemudian meningkat menjadi sebesar 68,22 tahun pada tahun 2014, pada tahun 2015 menjadi 68,62 tahun, dan pada tahun 2018 dan 2019 kembali mengalami peningkatan menjadi sebesar 69,08 dan 69,31 tahun. AHH sebesar 69,31 tahun berarti bahwa rata-rata penduduk Kabupaten Tanah Laut dapat menjaani hidup selama 69 tahun lebih lebih tinggi dari AHH Provinsi sebesar 68,49 tahun dan yang tertinggi Kota Banjarbaru sebesar 71,87 tahun dan Kota Banjarmasin 70,98 tahun. Dengan kisaran idealnya usia 25-85 tahun, maka dapat disimpulkan bahwa umur panjang dan sehat penduduk Kabupaten Tanah Laut masih belum mencapai umur maksimal 85 tahun.

Perkembangan AHH setiap tahun di Kabupaten Tanah Laut tercatat tidak melebihi satu dalam satu periode jangka waktu satu tahun. Hal tersebut berarti bahwa kondisi angka kematian bayi (*infant mortality rate*) di Kabupaten Tanah Laut termasuk dalam kategori *hardrock* yang artinya dalam waktu satu tahun penurunan angka kematian bayi yang tajam sulit terjadi. Implikasinya adalah bahwa AHH yang dihitung berdasarkan harapan hidup waktu lahir menjadi lambat untuk kemajuan. Kondisi tersebut juga terjadi untuk tingkat nasional dimana penurunan angka kematian bayi terjadi secara gradual bahkan mengarah melambat. Angka AHH Kabupaten Tanah Laut lebih tinggi dibandingkan AHH Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2019 yaitu sebesar 69,31 tahun.

**Tabel 2.27 Angka Harapan Hidup di Kabupaten Tanah Laut, 2013-2019**

Uraian	Tahun						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
HLS (tahun)	68,19	68,22	68,62	68,76	68,89	69,08	69,31

Sumber: SIPD cit. Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2020

#### 2.1.2.2.6 Tingkat Pengangguran Terbuka

Pengangguran terbuka (*open unemployment*) didefinisikan sebagai penduduk usia kerja yang tidak bekerja dan sementara tidakbekerja, terdiri dari: (a) mereka yang

mencari pekerjaan, (b) mereka yang mempersiapkan usaha, (c) mereka yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan (d) mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja. Pengertian pengangguran tidak dapat disamakan dengan pencari kerja, karena sering kali terjadi di antara pencari kerja terdapat mereka yang tergolong bekerja namun karena berbagai alasan mencari pekerjaan lain, untuk kasus tersebut, kelompok tersebut akan tergolong sebagai bekerja. Tingkat pengangguran terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Nilai TPT berkaitan dengan tolok ukur keberhasilan pemerintah dalam mengatasi masalah pengangguran. Semakin rendah angka TPT mengindikasikan bahwa daya serap lapangan pekerjaan terhadap pencari kerja semakin baik. Jika melihat data TPT pada tahun 2018 yang sebesar 3,42%, maka pada tahun 2019 terjadi penurunan persentase pengangguran yang cukup baik hingga TPT hanya menjadi sebesar 3,41%.

**Tabel 2.28 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Tanah Laut, 2019**

Kegiatan Utama	Jumlah
Angkatan Kerja (%)	3,41

Sumber: SIPD cit. Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2019

### 2.1.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Kabupaten Tanah Laut memiliki kekayaan alam dan kekayaan budaya yang cukup besar dengan potensi budaya dan nilai-nilai tradisi yang telah mengakar. Kebijakan pembangunan seni dan kebudayaan diarahkan dalam rangka memperkuat, mengembangkan, dan melestarikan potensi budaya lokal dalam rangka membentuk karakteristik masyarakat daerah, mencegah masuknya budaya lain yang negatif atau tidak sesuai dengan budaya lokal. Namun keterbatasan fasilitas, sarana prasarana penunjang masih menjadi kendala pengembangan seni budaya. Peran pemerintah di bidang kebudayaan adalah sebagai pelaksana pembangunan yang nantinya diharapkan menciptakan iklim yang nyaman agar pelaku usaha di bidang kebudayaan dapat berkembang secara efektif dan efisien. Terkait dengan sektor pariwisata secara khusus, sektor tersebut diharapkan dapat menggerakkan ekonomi masyarakat karena memiliki *multiplier effect* yang tinggi. Untuk menunjang hal tersebut, pemerintah daerah harus

menyediakan sarana dan prasarana penunjang yang memadai untuk menarik minat pengunjung. Pembangunan bidang seni dan budaya sangat terkait erat dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat. Hal ini sesuai dengan 2 (dua) sasaran pencapaian pembangunan bidang sosial budaya dan keagamaan yaitu (i) untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab serta (ii) mewujudkan bangsa yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera.

Di bidang kepemudaan dan olah raga, pemerintah terus melakukan peningkatan fasilitas dan pembinaan terhadap pemuda dan cabang olah raga, mulai dari pembinaan pelatih dan fasilitasi kegiatan olah raga hingga pengembangan kapasitas SDM pemuda. Keterbatasan fasilitas, sarana prasarana penunjang masih menjadi kendala bagi pengembangan seni budaya dan olah raga, misalnya belum ada gedung gedung kesenian dan olah raga yang representatif. Jadi, peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur, fasilitas serta sarana prasarana di bidang kepemudaan dan olah raga menjadi sesuatu yang tidak bisa dikesampingkan di masa mendatang.

### 2.1.3 Aspek Pelayanan Umum

#### 2.1.3.1 Fokus Layanan Urusan Pemerintah Wajib

##### 2.1.3.1.1 Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu indikator pembangunan suatu wilayah. Dalam buku III RPJMN 2015-2019, dijelaskan bahwa dalam upaya mengurangi kesenjangan antarwilayah dan memperluas pembangunan maka dapat dilakukan transformasi dan akselerasi pembangunan. Untuk itu, salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan ilmu pengetahuan melalui pendidikan yang lebih baik dan merata. Pembangunan sektor pendidikan mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam menentukan tingkat kualitas sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang diharapkan yaitu yang mampu melakukan inovasi, kreasi serta memiliki karakter dan budi pekerti. Berhasil atau tidaknya pembangunan suatu bangsa/daerah banyak dipengaruhi oleh tingkat pendidikan penduduknya. Makin maju pendidikan berarti akan membawa berbagai pengaruh positif bagi masa depan berbagai bidang kehidupan. Demikian pentingnya peranan pendidikan, tidaklah mengherankan kalau pendidikan senantiasa banyak mendapat perhatian dari pemerintah maupun masyarakat.

### Angka Partisipasi Sekolah

Angka partisipasi sekolah (APS) dapat digunakan untuk mengetahui berapa banyak penduduk usia sekolah yang telah memanfaatkan fasilitas pendidikan. Partisipasi sekolah menggambarkan banyaknya penduduk usia sekolah yang masih sekolah, sehingga terkait dengan pengentasan program wajib belajar. Indikator inilah yang digunakan sebagai petunjuk berhasil tidaknya program tersebut. Sebagai standar program wajib belajar dikatakan berhasil jika nilai APS SD sebesar 100% dan APS SMP sebesar 100% atau dengan kata lain semua anak usia sekolah 7-12 tahun dan 13-15 tahun bersekolah. Peningkatan APS menunjukkan adanya keberhasilan dalam memperluas jangkauan layanan pendidikan. Ada dua aspek yang mempengaruhi tingginya tingkat partisipasi sekolah yaitu pemerintah dan masyarakat. Pemerintah sebagai penyedia sarana pendidikan yang memadai, serta masyarakat yang dituntut pengertian dan kesadarannya akan arti pentingnya pendidikan.

**Tabel 2.29 Angka Partisipasi Sekolah di Kabupaten Tanah Laut, 2014-2019**

Kelompok Usia	2014	2015	2016	2017	2018	2019
SD/MI [7-12]	98,70	99,37	99,68	99,40	99,83	99,76
SMP/MTs [13-15]	96,33	96,05	92,16	91,59	91,13	92,09
SMA/MA/SMK [16-18]	68,01	57,89	56,88	62,84	68,47	67,46

Sumber: SIPD cit. Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2019

Angka Partisipasi Sekolah (APS) menunjukan proporsi dari anak sekolah pada usia di jenjang pendidikan tertentu yang termasuk dalam kelompok usia yang sesuai dengan jenjang pendidikan. Selama periode 2014-2019, APS untuk kelompok umur 7-12 tahun (usia SD) dapat dikatakan cenderung fluktuatif walaupun secara umum mengalami peningkatan. Pada tahun 2013, APS kelompok umur 7-12 tahun adalah sebesar 98,51%, kemudian terus mengalami peningkatan hingga pada tahun 2016 menjadi 99,68%. Untuk tahun 2017, APS kelompok umur 7-12 mengalami penurunan menjadi sebesar 99,40%, dan pada tahun 2018 meningkat kembali meningkat hingga mencapai level tertingginya yaitu sebesar 99,83%. Untuk tahun 2019, APS kelompok umur 7-12 mengalami penurunan menjadi sebesar 99,76%

Hal yang sama juga ditemui pada APS kelompok umur 13-15 tahun (usia SMP) yang nilainya cenderung fluktuatif. Pada tahun 2013, APS kelompok umur 13-15 tahun adalah sebesar 88,57%, kemudian meningkat signifikan menjadi sebesar 96,33% pada

tahun 2014, pada tahun 2017, APS kelompok umur 13-15 tahun mengalami penurunan hingga menjadi sebesar 91,13%. Peningkatan nilai APS khususnya pada kelompok usia 13-15 tahun menunjukkan bahwa pembangunan pendidikan di Kabupaten Tanah Laut telah sesuai dengan target program wajib belajar (wajib) 9 tahun yang dicanangkan pemerintah Republik Indonesia. Namun demikian capaian APS Kabupaten Tanah Laut masih belum memenuhi target wajib 9 tahun, sehingga ke depannya program pendidikan ini harus lebih ditingkatkan lagi. Peningkatan partisipasi tersebut mengindikasikan bahwa penduduk di Kabupaten Tanah Laut telah menyadari pentingnya arti pendidikan.

### **Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni**

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah rasio jumlah siswa berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. Misalnya, APK SD sama dengan jumlah siswa yang duduk di bangku SD dibagi dengan jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun. APK menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. Partisipasi sekolah menggambarkan banyaknya penduduk usia sekolah yang masih sekolah, sehingga terkait dengan pengentasan program wajib belajar. Peningkatan APK menunjukkan adanya keberhasilan dalam memperluas jangkauan layanan pendidikan. Ada dua aspek yang mempengaruhi tingginya tingkat partisipasi sekolah yaitu pemerintah dan masyarakat. Pemerintah sebagai penyedia sarana pendidikan yang memadai, serta masyarakat yang dituntut pengertian dan kesadarannya akan arti pentingnya pendidikan. Peningkatan partisipasi tersebut mengindikasikan bahwa penduduk di Kabupaten Tanah Laut telah menyadari pentingnya arti pendidikan.

APK untuk jenjang pendidikan SD pada tahun 2019 adalah sebesar 108,69%. Hal tersebut berarti terdapat penduduk di luar usia sekolah SD (7-12 tahun) yang masih bersekolah SD dimana terlihat dari angka APK SD yang nilainya lebih besar dari 100%. Untuk jenjang pendidikan SMP, APK pada tahun 2019 adalah sebesar 83,02%. Hal tersebut menunjukkan bahwa persentase penduduk yang sedang bersekolah di SMP berapapun usianya di antara penduduk berumur 13-15 tahun hanya sebesar 83,02%. APK untuk jenjang pendidikan SMA adalah sebesar 86,21% yang artinya persentase penduduk yang sedang bersekolah di SMA berapapun usianya di antara penduduk berumur 16-18 tahun sebesar 86,21%.

**Tabel 2.30 Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Tanah Laut, 2019**

Jenjang Pendidikan	APK	APM
SD/MI	108,69	98,51
SMP/MTs	83,02	73,83
SMA/SMK/MA	86,21	52,98

Sumber: SIPD cit. Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2020

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah indikator pendidikan yang digunakan untuk mendeteksi partisipasi penduduk yang bersekolah tepat pada waktunya. APM adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama. APM juga menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu. APM di suatu jenjang pendidikan didapat dengan cara membagi jumlah siswa atau penduduk usia sekolah yang sedang bersekolah dengan jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang sekolah tersebut. Misalnya APM SD merupakan jumlah penduduk usia 7-12 tahun yang sedang bersekolah di tingkat SD dibagi dengan jumlah penduduk usia 7-12 tahun. APM jenjang pendidikan SD di Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2019 adalah sebesar 98,51%. Hal tersebut dapat diartikan bahwa dari 100 orang yang berusia 7-12 tahun, terdapat sekitar 99 orang bersekolah pada jenjang pendidikan SD. APM jenjang pendidikan SMP pada tahun 2019 adalah sebesar 73,83% dimana hal tersebut berarti bahwa dari 100 orang yang berusia 13-15 tahun, terdapat sekitar 73 orang bersekolah pada jenjang pendidikan SMP. Sedangkan APM jenjang pendidikan SMA pada tahun 2019 adalah sebesar 52,98%, yang berarti bahwa setiap 100 orang yang berusia 16-18 tahun, terdapat sekitar 53 orang bersekolah pada jenjang pendidikan SMA.

### **Fasilitas Pendidikan dan Tenaga Pendidik**

Pendidikan merupakan salah satu pilar terpenting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, oleh karena itu pembangunan di bidang pendidikan harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu yang relevan dengan kondisi dan dinamika yang ada, untuk mewujudkan efisiensi manajemen pendidikan. Pendidikan menjadi salah satu isu strategis dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia yang akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tanah Laut. Hal ini disadari karena pendidikan dipandang sebagai unsur utama dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang pada akhirnya

akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan pembangunan sumber daya manusia tidak terlepas dari tingkat ketersediaan fasilitas pendidikan.

Pada jenjang pendidikan TK, jumlah unit TK pada tahun 2019 adalah sebanyak 221 unit dengan jumlah TK terbanyak berada di Kecamatan Pelaihari yaitu sebanyak 50 unit. Jumlah siswa yang mengikuti pendidikan TK adalah sebanyak 10.913 orang dengan guru yang mendampingi sebanyak 1.119 orang. Dari 221 unit TK tersebut, jumlah ruang kelas yang tersedia adalah sebanyak 520 ruang kelas. Dilihat dari rasio antara murid dan guru pada tahun 2019, rasionya adalah sebesar 1 : 10, yang berarti bahwa 1 orang guru TK di Kabupaten Tanah Laut mengampu sebanyak 10 murid. Sementara itu, rasio murid dan ruang kelas adalah sebesar 1 : 23, yang berarti bahwa 1 ruang kelas TK di Kabupaten Tanah Laut berisi 23 murid. Secara rinci, jumlah unit, murid, dan guru pada masing-masing kecamatan di Kabupaten Tanah Laut ditampilkan pada tabel berikut:

**Tabel 2.31 Fasilitas Pendidikan dan Tenaga Pendidik Jenjang TK di Kabupaten Tanah Laut, 2019**

No.	Kecamatan	Sekolah	Guru	Murid	Ruang Kelas	Rasio Murid-Guru	Rasio Murid-Ruang Kelas
1.	Panyipatan	17	69	854	36	12	24
2.	Takisung	18	97	889	46	9	19
3.	Kurau	10	39	360	14	9	26
4.	Bumi Makmur	12	37	421	19	11	22
5.	Bati-bati	24	153	1384	65	9	21
6.	Tambang Ulang	11	41	493	14	12	35
7.	Pelaihari	50	315	2492	136	8	18
8.	Bajuin	16	69	577	34	8	17
9.	Batu Ampar	21	95	917	37	10	25
10.	Jorong	17	99	1085	47	11	23
11.	Kintap	25	105	1441	72	14	20
<b>Jumlah</b>		<b>221</b>	<b>1.119</b>	<b>10.913</b>	<b>520</b>	<b>10</b>	<b>23</b>

Sumber: SIPD cit. Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2020

Pada jenjang pendidikan dasar, jumlah SD/MI di Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2019 adalah sebanyak 263 unit. Kecamatan yang memiliki jumlah SD/MI terbanyak adalah Kecamatan Pelaihari yaitu sebanyak 46 unit, diikuti Kecamatan Kintap dan Bati-bati masing-masing sebanyak 33 unit dan 27 unit, dan Kecamatan Takisung sebanyak 25 unit. Dari 263 unit SD/MI, jumlah ruang kelas yang tersedia

adalah sebanyak 2.006 unit ruang kelas. Jumlah murid yang menempuh pendidikan SD/MI pada tahun 2019 adalah sebanyak orang, dengan jumlah guru yang mengampu sebanyak 2.748 orang. Dilihat dari rasio antara murid dan guru, rasionya pada tahun 2019 adalah sebesar 1 : 14, yang berarti bahwa 1 guru SD di Kabupaten Tanah Laut mengampu sebanyak 15 murid, sedangkan rasio murid dan ruang kelas adalah sebesar 1 : 20, yang berarti bahwa 1 ruang kelas SD di Kabupaten Tanah Laut berisi murid sebanyak 20 orang. Melihat data pada jenjang pendidikan SD/MI, terlihat bahwa fasilitas pendidikan SD/MI di Kabupaten Tanah Laut cukup memadai dimana persebarannya berada di seluruh wilayah kecamatan dan ditunjang dengan ketersediaan guru dan ruang kelas yang cukup memadai.

**Tabel 2.32 Fasilitas Pendidikan dan Tenaga Pendidik Jenjang SD/MI di Kab. Tanah Laut, 2019**

No.	Kecamatan	Sekolah	Guru	Murid	Ruang Kelas	Rasio Murid-Guru	Rasio Murid-Ruang Kelas
1.	Panyipatan	20	202	2,724	145	13	19
2.	Takisung	25	231	3,634	181	16	20
3.	Kurau	15	127	1,475	104	12	14
4.	Bumi Makmur	17	193	1,680	122	9	14
5.	Bati-bati	27	336	5,174	232	15	22
6.	Tambang Ulang	13	123	1,818	86	15	21
7.	Pelaihari	46	573	8,339	398	15	21
8.	Bajuin	20	202	2,279	130	11	18
9.	Batu Ampar	23	243	3,247	167	13	19
10.	Jorong	24	219	4,318	183	20	24
11.	Kintap	33	299	5,875	258	20	23
<b>Jumlah</b>		<b>263</b>	<b>2,748</b>	<b>40,563</b>	<b>2.006</b>	<b>14</b>	<b>20</b>

Sumber: SIPD cit. Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2020

Untuk jenjang pendidikan SMP/MTs, jumlah unit sekolah pada tahun 2019 adalah sebanyak 79 unit. Dari 79 unit SMP/MTs di Kabupaten Tanah Laut tersebut, jumlah ruang kelas yang tersedia adalah sebanyak 560 unit ruang kelas. Wilayah dengan jumlah unit SMP/MTs terbanyak adalah Kecamatan Pelaihari yaitu sebanyak 15 unit, diikuti Kecamatan Bati-Bati sebanyak 10 unit, dan Kecamatan Jorong sebanyak 10 unit. Siswa yang sedang menempuh pendidikan SMP/MTs di Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2019 adalah sebanyak 13.804 orang, dengan guru yang mengampu sebanyak 1.147 orang. Rasio murid dan guru pada jenjang pendidikan SMP/MTs adalah sebesar 1



: 12, yang berarti bahwa 1 guru SMP/MTs di Kabupaten Tanah Laut mengampu sebanyak 12 orang murid, sedangkan rasio antara murid dan ruang kelas adalah sebesar 1 : 24, yang berarti bahwa 1 unit ruang kelas menampung sebanyak 24 murid.

**Tabel 2.33 Fasilitas Pendidikan dan Tenaga Pendidik Jenjang SMP/MTs di Kab. Tanah Laut, 2019**

No.	Kecamatan	Sekolah	Guru	Murid	Ruang Kelas	Rasio Murid-Guru	Rasio Murid-Ruang Kelas
1.	Panyipatan	8	136	1,096	30	8	37
2.	Takisung	6	87	948	50	11	19
3.	Kurau	4	77	526	29	7	18
4.	Bumi Makmur	3	28	431	22	15	20
5.	Bati-bati	10	163	2,130	76	13	28
6.	Tambang Ulang	4	36	472	18	13	26
7.	Pelaihari	15	255	3,261	123	13	27
8.	Bajuin	4	52	609	33	12	18
9.	Batu Ampar	7	101	1,304	64	13	20
10.	Jorong	10	97	1,174	52	12	23
11.	Kintap	8	115	1,853	63	16	29
<b>Jumlah</b>		<b>79</b>	<b>1,147</b>	<b>13,804</b>	<b>560</b>	<b>12</b>	<b>24</b>

Sumber: SIPD cit. Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2020

**Tabel 2.34 Pencapaian SPM Bidang Pendidikan Tahun 2019**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target	Capaian
1.	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD, Mi, SMP/ Mts)	57.725 (100%)	46.740 (80.97%)
2.	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan.	74.821 (100%)	2.645 (3.56%)
3.	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD.	12.842 (100%)	9.026 (70.29%)

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tanah Laut, 2020

Angka Pencapaian SPM dalam bidang Pendidikan di Kabupaten Tanah Laut untuk Pendidikan Dasar yang ditargetnya sebesar 57.725 tercapai sebesar 46.740. Untuk Pendidikan Kesetaraan pencapaian SPM ditargetkan sebesar 74.821 dan tercapai sebesar 2.645. Sementara pada Pendidikan Anak Usia Dini SPM yang ditargetkan 12.842 tercapai sebesar 9.026.

#### 2.1.3.1.2 Kesehatan

Dalam perspektif pembangunan manusia ada 3 (tiga) domain utama yang menjadi fokus pembangunan, yaitu: kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Meskipun sesungguhnya ketiga domain tersebut saling berinteraksi dan berinter-relasi satu dengan yang lainnya. Dapat dimengerti bahwa, tanpa kesehatan yang baik, pendidikan tidak mungkin dapat berjalan dengan baik, tanpa kesehatan yang baik dan pendidikan yang baik mustahil ekonomi keluarga masyarakat dapat membaik pula. Tanpa kesehatan dan pendidikan yang baik/prima, ekonomi yang layak sulit untuk dicapai. Namun sebaliknya, tanpa ekonomi yang kuat, kesehatan dan pendidikan keluarga/masyarakat pun tidak mungkin dapat membaik. Kesehatan merupakan bentuk investasi pada kualitas sumberdaya manusia. Dengan kondisi kesehatan masyarakat yang baik maka diharapkan kualitas manusia juga semakin baik, yakni masyarakat dapat semakin produktif. Berikut merupakan beberapa indikator yang menunjukkan kondisi kesehatan di Kabupaten Tanah Laut:

#### **Fasilitas Kesehatan**

Salah satu upaya pemerintah untuk menyehatkan masyarakat adalah dengan membangun sarana dan prasarana kesehatan. Dengan demikian akses masyarakat ke sarana dan prasarana kesehatan lebih mudah terutama lapisan masyarakat yang paling bawah dan terpencil. Bimbingan dan penyuluhan kesehatan kepada masyarakatpun tidak henti-hentinya dilaksanakan. Salah satu cara adalah dengan mengaktifkan kembali fungsi posyandu. Tidak ketinggalan juga dengan menambah tenaga medis dan meningkatkan profesionalisme tenaga medis yang ada. Sebagai contoh langkah yang ditempuh adalah memperbanyak penerimaan pegawai khususnya tenaga kesehatan. Upaya meningkatkan pemerataan kesehatan masyarakat antara lain ditempuh dengan jalan menyediakan fasilitas kesehatan yang bisa dijangkau oleh semua lapisan masyarakat. Sebab tanpa sarana yang memadai, derajat kesehatan penduduk yang baik akan sulit tercapai. Ketersediaan fasilitas kesehatan yang menunjang bagi masyarakat merupakan suatu hal yang dibutuhkan dan dapat menjadi faktor utama keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan.

**Tabel 2.35 Jumlah Fasilitas Kesehatan Menurut Kecamatan di Kabupaten Tanah Laut, 2019**

No.	Kecamatan	Rumah Sakit	Rumah Bersalin	Puskesmas	Posyandu	Klinik/ Balai Kesehatan	Pustu
1.	Panyipatan	-	-	2	23	-	3
2.	Takisung	-	-	3	27	1	10
3.	Kurau	-	-	2	12	-	3
4.	Bumi Makmur	-	-	1	9	-	4
5.	Bati-bati	-	-	2	10	2	4
6.	Tambang Ulang	-	-	1	20	-	2
7.	Pelaihari	1	1	3	52	2	7
8.	Bajuin	-	-	2	23	1	4
9.	Batu Ampar	-	-	1	25	-	7
10.	Jorong	-	-	2	29	1	6
11.	Kintap	1	-	2	20	2	4
<b>Jumlah</b>		<b>2</b>	<b>1</b>	<b>21</b>	<b>250</b>	<b>9</b>	<b>54</b>

Sumber: SIPD cit. Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2019

Keberadaan fasilitas kesehatan di Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2019 dapat dikatakan telah memadai. Seluruh jenis fasilitas kesehatan dasar telah tersedia di Kabupaten Tanah Laut dari rumah sakit sampai dengan Polindes. Sebagai ibukota kabupaten, Kecamatan Pelaihari memiliki fasilitas kesehatan yang paling lengkap yaitu 2 unit rumah sakit, 1 unit rumah bersalin, 21 unit Puskesmas, 250 unit Posyandu, 9 unit klinik balai kesehatan, dan 54 unit Polindes. Jumlah Puskesmas di Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2019 tersebar merata di seluruh kecamatan dengan jumlah keseluruhan Puskesmas sebanyak 21 unit. Sementara itu, terdapat 11 kecamatan yang memiliki Posyandu.

### **Tenaga Kesehatan**

Selain fasilitas kesehatan, tersedianya tenaga kesehatan juga berperan dalam peningkatan kualitas kesehatan di suatu wilayah. Tenaga kesehatan di Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2019 terbagi ke dalam 5 kelompok yaitu tenaga medis, tenaga keperawatan, tenaga kebidanan, tenaga kefarmasian, dan tenaga kesehatan lainnya. Secara rinci, jumlah tenaga kesehatan di Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2019 ditampilkan pada tabel berikut:

**Tabel 2.36 Jumlah Tenaga Kesehatan Menurut Kecamatan di Kabupaten Tanah Laut, 2019**

No.	Kecamatan	Tenaga Medis	Tenaga Keperawatan	Tenaga Kebidanan	Tenaga Kefarmasian	Lainnya
1.	Panyipatan	4	15	19	2	2
2.	Takisung	3	16	16	2	3
3.	Kurau	7	21	16	4	4
4.	Bumi Makmur	3	10	16	1	2
5.	Bati-bati	8	29	30	4	7
6.	Tambang Ulang	2	10	13	1	0
7.	Pelaihari	87	351	209	50	23
8.	Bajuin	5	14	23	4	4
9.	Batu Ampar	3	21	22	3	3
10.	Jorong	5	21	23	2	4
11.	Kintap	4	27	28	4	5
<b>Jumlah</b>		<b>131</b>	<b>535</b>	<b>415</b>	<b>77</b>	<b>57</b>

Sumber: SIPD cit. Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2020

Terkait dengan jumlah tenaga medis pada tahun 2019, tenaga medis di Kabupaten Tanah Laut terdiri dari dokter spesialis, dokter umum, dan dokter gigi. Jumlah dokter spesialis pada tahun 2019 adalah sebanyak 50 orang yang berada di Kecamatan Pelaihari dan sebagian besar ditempatkan di RSUD H. Boejasin Pelaihari. Untuk dokter umum, jumlahnya pada tahun 2019 adalah sebanyak 70 orang yang tersebar di seluruh kecamatan, sedangkan jumlah dokter gigi adalah sebanyak 11 orang yang tersebar di 6 kecamatan.

**Tabel 2.37 Jumlah Tenaga Medis di Kabupaten Tanah Laut, 2019**

No.	Kecamatan	Dokter Spesialis	Dokter Umum	Dokter Gigi
1.	Panyipatan	0	4	0
2.	Takisung	0	3	0
3.	Kurau	0	7	0
4.	Bumi Makmur	0	2	1
5.	Bati-bati	0	7	1
6.	Tambang Ulang	0	2	0
7.	Pelaihari	50	33	4
8.	Bajuin	0	4	1
9.	Batu Ampar	0	3	0
10.	Jorong	0	3	2
11.	Kintap	0	2	2
<b>Jumlah</b>		<b>50</b>	<b>70</b>	<b>11</b>

Sumber: SIPD cit. Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2020

### Penolong Kelahiran

Kesehatan balita merupakan salah satu indikator kesejahteraan bangsa. Artinya bahwa, suatu bangsa akan dikatakan memiliki tingkat kesejahteraan yang baik apabila tingkat kesehatan balita memiliki angka yang baik pula. Kesehatan balita selain dipengaruhi oleh kesehatan ibu, juga dipengaruhi oleh faktor lain di antaranya adalah penolong kelahiran. Data penolong kelahiran bayi dapat dijadikan salah satu indikator kesehatan terutama dalam hubungannya dengan tingkat kesehatan ibu dan anak serta pelayanan kesehatan secara umum. Dilihat dari kesehatan ibu dan anak, persalinan yang ditolong oleh tenaga medis seperti dokter dan bidan dianggap lebih baik dibandingkan yang ditolong oleh dukun, keluarga atau lainnya. Penolong kelahiran tidak hanya terkait dengan angka kematian bayi saja, namun juga angka kematian ibu sebagai risiko proses kelahiran. Dalam proses kelahiran bayi tidak dapat dipisahkan antara kemungkinan keselamatan ibu atau anak yang dilahirkan. Keduanya harus diselamatkan dalam risiko besar sebuah kelahiran. Jika dilihat dari klasifikasi wilayah, baik desa yang berada di wilayah perdesaan dan perkotaan, seluruh proses persalinannya menggunakan jasa tenaga kesehatan. Wilayah perdesaan, kelahiran yang dibantu oleh dokter adalah sebesar 21,01%, sedang yang dibantu bidan sebesar 78,99%. Untuk wilayah perkotaan, penolong kelahiran yang dibantu dokter sebesar 49,83% dan yang dibantu bidang sebesar 50,17%.

**Tabel 2.38 Persentase Perempuan Pernah Kawin Berumur 15-49 Tahun yang Melahirkan Anak Lahir Hidup Menurut Klasifikasi Desa dan Penolong Proses Kelahirandi Kab. Tanah Laut, 2019**

No.	Klasifikasi Desa	Nakes	Non Nakes	Jumlah
1.	Perdesaan	99,5	0,5	100,00
2.	Perkotaan	99,5	0,5	100,00

Sumber: SIPD cit. Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2020

### Imunisasi Balita

Imunisasi balita merupakan pemberian imunisasi kepada balita yang bertujuan untuk meningkatkan kekebalan tubuh balita dari berbagai penyakit. Hal ini dilakukan juga sebagai salah satu upaya peningkatan kualitas kesehatan. Beberapa jenis imunisasi bagi balita antara lain imunisasi BCG, Campak, DPT, Polio, dan Hepatitis B. Pada tahun 2016, persentase balita yang telah mendapat imunisasi terbesar pada jenis imunisasi di Kabupaten Tanah Laut yaitu 95,4% balita telah mendapat imunisasi BCG, 79,2% balita

telah mendapatkan imunisasi campak, 89,8% balita telah mendapat imunisasi DPT 1, 96,7% balita telah mendapat imunisasi polio 1, dan 85% balita telah mendapat imunisasi hepatitis B 3. Secara keseluruhan, imunisasi BCG merupakan imunisasi yang paling banyak didapat oleh balita dan imunisasi Hepatitis B 3 merupakan imunisasi yang paling sedikit didapat oleh balita di Kabupaten Tanah Laut. Jika dibandingkan dengan tahun 2017, maka persentase balita yang mendapatkan imunisasi mengalami peningkatan yang signifikan dimana dari 12 jenis imunisasi yang diberikan, terdapat 11 jenis imunisasi yang persentasenya lebih dari 90%, sedangkan imunisasi campak merupakan jenis imunisasi dengan persentase terendah yaitu sebesar 76,92%.

**Tabel 2.39 Persentase Balita yang Pernah Mendapat Imunisasi Menurut Jenis di Kabupaten Tanah Laut, 2015-2019**

No.	Jenis Imunisasi	2015	2016	2017	2018	2019
1.	BCG	95,37	96,45	95,40	95,23	88,3
2.	Campak	79,33	87,58	79,20	76,92	90,5
3.	DPT 1	91,29	88,03	89,80	93,18	90,6
4.	DPT 2	87,79	81,02	88,20	93,18	90,3
5.	DPT 3	85,86	52,16	81,20	93,18	87,0
6.	Polio 1	91,02	97,80	96,70	95,86	91,5
7.	Polio 2	79,77	92,44	89,40	95,86	90,3
8.	Polio 3	77,12	65,76	84,00	95,86	89,9
9.	Polio 4	-	-	78,40	95,86	88,6
10.	Hepatitis B1	88,42	83,98	85,00	93,55	89,3
11.	Hepatitis B2	67,82	73,10	81,70	93,55	88,3
12.	Hepatitis B3	63,56	52,48	71,10	93,55	90,5

Sumber: SIPD cit. Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018

### Jumlah Kasus Penyakit

Kualitas kesehatan dapat dilihat pula melalui kasus penyakit yang pernah terjadi di wilayah tersebut. Hal ini merupakan indikator eksternal selain indikator internal seperti fasilitas kesehatan dan tenaga medis. Terdapat 10 kasus penyakit terbanyak yang terjadi di Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2019, yaitu hipertensi primer, ISPA, Dyspepsia, Nasopharingitis Akut, Demam, Penyakit Pulpa & Jaringan Periapikal, Gastritis, Cephalgia, Penyakit Gusi dan Jaringan Periodental, dan Myalgia. Pada tahun 2017, jenis penyakit yang paling banyak diderita adalah hipertensi primer yaitu

sebanyak 34.876 kasus, disusul ISPA sebanyak 26.227 kasus, dan dyspepsia sebanyak 13.382 kasus.

**Tabel 2.40 Jumlah Kasus 10 Penyakit Terbanyak di Kabupaten Tanah Laut, 2019**

No.	Jenis Penyakit	Jumlah Kasus
1.	Hipertensi Primer	26 227
2.	ISPA	17 902
3.	Dyspepsia	13 382
4.	Nasopharingitis Akut	8 671
5.	Demam	8 643
6.	Penyakit Pulpa dan Jaringan Periapikal	7 848
7.	Gastritis	4 462
8.	Cepalgia	4 306
9.	Penyakit Gusi dan Jaringan Periodental	3 903
10.	Myalgia	3 611

Sumber: SIPD cit. Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2020

Selain itu, penyakit lain yang perlu diperhatikan oleh pemerintah adalah HIV/AIDS, IMS, DBD, Diare, TB, dan Malaria. Pada tahun 2019, kasus penyakit diare tercatat mencapai 5.572 kasus, disusul penyakit DBD dengan 397 kasus, TB 333 kasus, malaria 75 kasus, HIV 5 kasus dan AIDS 3 kasus, serta tidak terdapat kasus IMS di Kabupaten Tanah Laut. Untuk tahun 2019, jumlah kasus HIV/AIDS di Kabupaten Tanah Laut adalah sebanyak 29 kasus dan kasus DBD sebanyak 267 kasus. Untuk tahun 2019 sendiri, tidak terdapat kasus IMS, diare, TB, dan malaria.

**Tabel 2.41 Jumlah Kasus HIV/AIDS dan DBD di Kabupaten Tanah Laut, 2019**

No.	Kecamatan	HIV/AIDS	DBD
1.	Panyipatan	1	11
2.	Takisung	0	3
3.	Kurau	0	4
4.	Bumi Makmur	2	0
5.	Bati-bati	2	16
6.	Tambang Ulang	1	5
7.	Pelaihari	6	150
8.	Bajuin	8	54
9.	Batu Ampar	1	10
10.	Jorong	2	4
11.	Kintap	6	10
<b>Jumlah</b>		<b>29</b>	<b>267</b>

Sumber: SIPD cit. Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2020

### Bayi Gizi Buruk

Jumlah kelahiran bayi di Kabupaten Tanah Laut dalam kurun waktu 2016-2019 berada di kisaran 6.000an bayi lahir. Pada tahun 2019, jumlah bayi lahir adalah sebanyak 6.491 bayi dengan bayi berat badan lahir rendah (BBLR) sebanyak 409 bayi dan bayi gizi buruk sebanyak 1 bayi.

**Tabel 2.42 Jumlah Bayi Lahir, Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR), BBLR Dirujuk, dan Bergizi Buruk di Kabupaten Tanah Laut, 2016-2019**

Tahun	Bayi Lahir	BBLR	BBLR Dirujuk	Gizi Buruk
2016	6 094	357	158	2
2017	6 367	390	49	2
2018	6 400	432	133	2
2019	6 491	409	125	1

Sumber: SIPD cit. Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2020

### Kunjungan Ibu Hamil

Jumlah ibu hamil di Kabupaten Tanah Laut dalam kurun waktu 2016-2019 menunjukkan peningkatan dari sebanyak 6.608ibu hamil menjadi sebanyak 7.489. Pada tahun 2019, dari 7.489 ibu hamil, yang melakukan kunjungan K1 adalah sebanyak 7.231 ibu hamil dan yang melakukan kunjungan K4 sebanyak 5.922 ibu hamil. Ibu hamil yang mengalami kurang energi kronis (KEK) sebanyak 1.071 ibu hamil dan yang mendapatkan zat besi sebanyak 6.889 ibu hamil.

**Tabel 2.43 Jumlah Ibu Hamil, Melakukan Kunjungan K1 dan K4, Kurang Energi Kronis, dan Mendapat Tabler Zat Besi (Fe) di Kabupaten Tanah Laut, 2016-2019**

Tahun	Jumlah Ibu Hamil	Kunjungan K1	Kunjungan K4	Kurang Energi Kronis (KEK)	Mendapat Zat Besi
2016	6 608	6 742	5 431	-	5.625
2017	7 728	7 045	5 966	1 204	5 561
2018	7 728	7 080	6 065	1 175	5 612
2019	7 489	7 231	5 922	1 071	6 889

Sumber: SIPD cit. Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2020

### Kematian Ibu dan Bayi

Kasus kematian ibu di Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2019 berjumlah sebanyak 1 kasus yaitu di Kecamatan Panyipatan. Sementara itu, jumlah bayi lahir



hidup di Kabupaten Tanah Laut adalah sebanyak 6.367 bayi lahir hidup dan bayi lahir mati sebanyak 56 kasus. Jumlah kasus kematian bayi terbanyak berada di Kecamatan Pelayihari yaitu sebanyak 10 kasus, disusul Kecamatan Bati-bati sebanyak 9 kasus, dan Kecamatan Kintap sebanyak 7 kasus. Pada bayi berumur 0-6 hari, kematian yang disebabkan oleh asfiksia sebanyak 12 kasus, BBLR dan premature sebanyak 34 kasus, dan penyebab lainnya sebanyak 19 kasus. Untuk bayi berumur 7-28 hari, terdapat kematian yang disebabkan oleh BBLR dan premature sebanyak 4 kasus penyebab lainnya sebanyak 9 kasus, sedangkan jumlah kematian bayi berumur 29 hari – 1 tahun sebanyak 11 kasus.

**Tabel 2.44 Jumlah Ibu Hamil, Melakukan Kunjungan K1 dan K4, Kurang Energi Kronis, dan Mendapat Tabler Zat Besi (Fe) di Kabupaten Tanah Laut, 2013-2019**

No.	Kecamatan	Ibu Hamil	Kunjungan K1	Kunjungan K4	KEK	Fe
1.	2013	6 341	6 887	5 583	-	5 821
2.	2014	6 609	6 899	5 561	-	5 625
3.	2015	6 425	6 833	5 668	1 033	5 611
4.	2016	6 608	6 742	5 431	1 204	5 561
5.	2017	7 728	7 045	5 966	1 175	5 612
6.	2018	7 728	7 080	6 065	1 071	6 889
7.	2019	7 489	7 231	5 922	1 064	6 255

Sumber: SIPD cit. Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2020

Tabel 2.45 Pencapaian SPM Bidang Kesehatan Tahun 2019

NO	KECAMATAN	PUSKESMAS	Target	CAPAIAN SPM BIDANG KESEHATAN																	
				PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN RISIKO TERINFEKSI HIV			PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN TB			PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA BERAT			PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA DIABETES MELITUS			PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA HIPERTENSI			PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA LANJUT		
				Sasaran	Capaian	%	Sasaran	Capaian	%	Sasaran	Capaian	%	Sasaran	Capaian	%	Sasaran	Capaian	%	Sasaran	Capaian	%
1	PANYIPATAN	PANYIPATAN	100%	-	-	0	140	25	17,9	16	15	93,8	559	455	81,4	1.245	1.005	80,7	695	636	91,5
2		BATAKAN	100%	-	-	0	148	13	8,8	17	3	17,6	825	234	28,4	1.285	713	55,5	717	715	99,7
3	JORONG	JORONG	100%	307	267	87,0	5	5	100,0	18	18	100,0	635	595	93,7	1.414	1.395	98,7	789	780	98,9
4		ASAM -ASAM	100%	463	334	72,1	313	333	106,4	28	17	60,7	1.339	273	20,4	2.181	935	42,9	1.217	1.065	87,5
5	BATU AMPAR	TAJAU PECAH	100%	660	437	66,2	64	43	67,2	41	37	90,2	1.423	693	48,7	3.167	3.150	99,5	1.767	1.750	99,0
6	K I N T A P	K I N T A P	100%	675	457	67,7	444	347	78,2	31	27	87,1	2.014	324	16,1	3.137	1.015	32,4	1.754	1.274	72,6
7		SEI CUKA	100%	361	422	116,9	221	135	61,1	21	22	104,8	719	389	54,1	1.599	370	23,1	893	2.357	263,9
8	PELAIHARI	PELAIHARI	100%	1.536	594	38,7	465	222	47,7	159	135	84,9	2.754	335	12,2	4.292	1.625	37,9	2.162	1.792	82,9
9		SEI RIAM	100%	137	134	97,8	29	5	17,2	9	9	100,0	296	254	85,8	658	491	74,6	367	382	104,1
10		ANGSAU	100%	970	419	43,2	309	205	66,3	42	33	78,6	1.812	168	9,3	2.823	504	17,9	1.576	1.118	70,9
11	BAJUIN	TANJUNG HABULU	100%	162	107	66,0	15	5	33,3	11	6	54,5	556	155	27,9	857	477	55,7	484	481	99,4
12		TIRTA JAYA	100%	330	136	41,2	29	6	20,7	21	21	100,0	787	300	38,1	2.163	1.573	72,7	808	627	77,6
13	TAKISUNG	TAKISUNG	100%	1.061	290	27,3	379	194	51,2	68	68	100,0	2.219	954	43,0	3.258	2.582	79,3	1.818	1.623	89,3
14	BATI - BATI	BATI - BATI	100%	1.159	1.000	86,3	417	368	88,2	70	60	85,7	1.628	484	29,7	3.624	1.665	45,9	2.022	1.711	84,6
15		KAIT - KAIT	100%	189	177	93,7	17	14	82,4	8	7	87,5	538	155	28,8	838	687	82,0	468	313	66,9
16	TAMBANG ULANG	TAMBANG ULANG	100%	416	317	76,2	40	21	52,5	23	6	26,1	1.148	442	38,5	1.789	1.093	61,1	999	886	88,7
17	KURAU	KURAU	100%	1	1	100,0	8	5	62,5	6	6	100,0	254	175	68,9	391	327	83,6	221	203	91,9
18		PADANG LUAS	100%	240	197	82,1	108	91	84,3	13	20	153,8	433	173	40,0	964	1.284	133,2	538	294	54,6
19	BUMI MAKMUR	BUMI MAKMUR	100%	379	165	43,5	178	135	75,8	20	20	100,0	1.075	186	17,3	1.675	894	53,4	875	600	68,6
		<b>SPM Bidang Kesehatan</b>	<b>100%</b>	<b>9.046</b>	<b>5.454</b>	<b>60,3</b>	<b>3329</b>	<b>2.172</b>	<b>65,2</b>	<b>622</b>	<b>530</b>	<b>85,2</b>	<b>21.014</b>	<b>6.744</b>	<b>32,1</b>	<b>37.360</b>	<b>21.785</b>	<b>58,3</b>	<b>20.170</b>	<b>18.607</b>	<b>92,3</b>

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Tanah Laut, 2020

### 2.1.3.1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Secara umum, kondisi dari suatu daerah yang terkait dengan pekerjaan umum dan penataan ruang dapat digambarkan melalui indikator kondisi jalan serta kondisi infrastruktur pendukung lainnya. Dengan kondisi jalan yang baik, berperan mendukung pertumbuhan ekonomi maupun kondisi sosial budaya melalui kemudahan akses antarwilayah. Kondisi infrastruktur pendukung lainnya juga menjadi modal dalam meningkatkan kondisi perekonomian, sehingga pertumbuhan ekonomi akan dicapai apabila didukung oleh kondisi jalan dan infrastruktur yang baik dan memadai.

#### Kondisi Jalan

Pembangunan jalan menjadi hal penting dalam upaya peningkatan akses antarwilayah. Dengan kondisi jalan yang baik, maka akan mendorong peningkatan perekonomian penduduk di Kabupaten Tanah Laut. Pada tahun 2019, panjang jalan di Kabupaten Tanah Laut yang berada pada kondisi baik yakni sepanjang 700,49 km, dalam kondisi sedang yakni sepanjang 268,58km, dalam kondisi rusak yakni sepanjang 349,28 km, dan dalam kondisi rusak berat yakni sepanjang 508,29 km. secara keseluruhan, Panjang jalan yang dikelola oleh Kabupaten Tanah Laut adalah sepanjang 1826,64 km.

**Tabel 2.46 Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan di Kabupaten Tanah Laut (km), 2019**

Kondisi Jalan			
Baik	Sedang	Rusak	Rusak Berat
700,49	268,58	349,28	508,29

Sumber: Dinas PUPRP Kabupaten Tanah Laut, 2019

Apabila dilihat per kecamatan, Kecamatan Pelaihari merupakan kecamatan yang memiliki kondisi jalan baik terpanjang di Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2019 yakni sepanjang 166,1280 km. Kecamatan Pelaihari memiliki kondisi jalan rusak terpanjang di Kabupaten Tanah Laut yakni sepanjang 60,5370 km. Untuk kondisi jalan rusak berat, Kecamatan Kintap merupakan kecamatan yang memiliki kondisi jalan rusak berat terpanjang di Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2019 yakni sebesar 152,8480 km.

**Tabel 2.47 Panjang Jalan Menurut Kecamatan di Kabupaten Tanah Laut (km), 2019**

No.	Kecamatan	Kondisi Jalan			
		Baik	Sedang	Rusak	Rusak Berat
1.	Panyipatan	75,15	36,79	63,45	22,77
2.	Takisung	88,6700	0,0000	7,3000	58,9500
3.	Kurau	10,1000	0,0000	3,9500	27,4500
4.	Bumi Makmur	14,5000	0,0000	9,3000	29,1800
5.	Bati-Bati	52,4720	39,3280	34,9360	11,4540
6.	Tambang Ulang	27,0900	22,3000	35,6600	36,4600
7.	Pelaihari	166,1280	112,8530	60,5370	62,6780
8.	Bajuin	41,1410	8,7360	38,7430	30,3800
9.	Batu Ampar	136,0140	1,6560	18,1390	25,9180
10.	Jorong	55,3470	12,5000	58,6130	50,2000
11.	Kintap	33,8730	34,4190	18,6500	152,8480
<b>Jumlah</b>		<b>700,4850</b>	<b>268,5820</b>	<b>349,2780</b>	<b>508,2880</b>

Sumber: Dinas PUPRP Kabupaten Tanah Laut, 2019

Dilihat berdasarkan jenis permukaan, sepanjang 1428,48km jalan di Kabupaten Tanah Laut memiliki permukaan aspal, sepanjang 347,22km jalan memiliki permukaan kerikil, dan sepanjang 50,93km memiliki permukaan tanah. Apabila dirinci per kecamatan pada tahun 2019, Kecamatan Pelaihari memiliki jalan dengan permukaan aspal terpanjang yakni sepanjang 360,45 km dan Kecamatan Kurau memiliki jalan dengan permukaan aspal terpendek yakni sebesar 27,53 km. Kemudian, Kecamatan Kintap memiliki jalan dengan permukaan kerikil terpanjang yakni sepanjang 89,28 km dan Kecamatan Batu Ampar memiliki jalan dengan permukaan kerikil terpendek yakni sepanjang 2,00 km. Kecamatan Panyipatan juga menjadi kecamatan yang memiliki jalan dengan permukaan tanah terpanjang yakni sepanjang 16,54 km.

**Tabel 2.48 Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan Jalan dan Kecamatan di Kabupaten Tanah Laut (km), 2019**

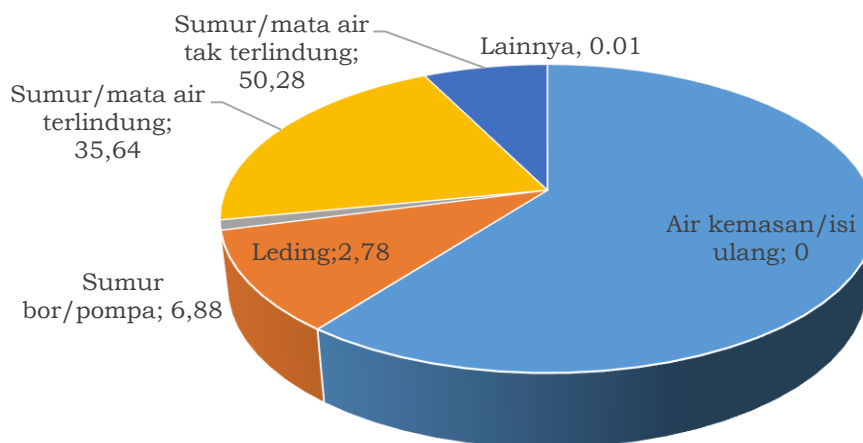
No.	Kecamatan	Jenis Permukaan		
		Aspal	Kerikil	Tanah
1.	Panyipatan	153,13	28,50	16,54
2.	Takisung	133,77	12,04	9,11
3.	Kurau	27,53	5,86	8,11
4.	Bumi Makmur	30,91	22,08	0,00
5.	Bati-Bati	106,32	31,87	0,00
6.	Tambang Ulang	72,85	42,27	6,40
7.	Pelaihari	360,45	38,40	3,35
8.	Bajuin	72,36	46,64	0,00
9.	Batu Ampar	179,72	2,00	0,00
10.	Jorong	148,36	28,30	0,00
11.	Kintap	143,08	89,28	7,42
<b>Jumlah</b>		<b>1428,48</b>	<b>347,22</b>	<b>50,93</b>

Sumber: Dinas PUPRP Kabupaten Tanah Laut, 2019

### **Sumber Air Minum**

Air merupakan salah satu kebutuhan hidup utama bagi makhluk hidup. Kebutuhan air minum, tidak hanya dilihat dari kuantitasnya tetapi juga dari kualitas air minum. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/Menkes/Per/IV/2010 tentang persyaratan kualitas air minum, air minum dikatakan aman untuk kesehatan apabila memenuhi persyaratan fisika, mikrobiologis, kimiawi dan radioaktif yang dimuat dalam parameter wajib dan parameter tambahan. Kualitas air minum dapat dilihat dari hasil uji laboratorium terkait kandungan air minum. Sementara itu, pemenuhan kebutuhan air minum di rumah tangga dapat diukur dari akses ke air minum layak. Beberapa faktor yang berpengaruh terhadap akses adalah jenis sumber air utama yang digunakan untuk minum, sumber air utama yang digunakan untuk memasak dan mandi/cuci, serta jarak sumber air ke penampungan limbah (BPS Kabupaten Tanah Laut, 2018).

Pada tahun 2019 mayoritas rumah tangga di Kabupaten Tanah Laut menggunakan air kemasan atau air isi ulang sebagai sumber air minum utama, yaitu sebanyak 60,41%. Selanjutnya adalah air sumur atau mata air terlindung sebanyak 20,74%, menurun dari tahun 2018. Penurunan angka persentase penggunaan sumur pada rumah tangga ini kemungkinan karena rumah tangga mulai beralih ke sumber air minum air kemasan bermerek atau air isi ulang dan sumber air minum lainnya seperti mata air. Kondisi ini sangat terlihat dari fenomena yang cukup menarik, dimana tahun 2016 pengguna air sumur atau mata air terlindung di Kabupaten Tanah Laut ada sebanyak 68,87% sedangkan pengguna air kemasan atau air isi ulang ada sebanyak 20,64%. Kondisi tersebut berkebalikan dengan kondisi di tahun 2019. Pada Tahun 2019 air minum layak pada Kabupaten Tanah Laut sebesar 48,17%.



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2019

**Gambar 2.15 Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Minum, 2019**

Selanjutnya berdasarkan jenisnya sumber air minum dapat dikelompokkan menjadi sumber air minum bersih dan tidak bersih. Sumber air minum bersih terdiri dari air minum yang bersumber dari air minum kemasan, air ledeng, sumur bor, sumur terlindung, atau mata air terlindung. Khusus untuk air minum yang bersumber dari sumur bor/pompa, sumur terlindung dan mata air terlindung harus memenuhi jarak lebih dari sama 10 meter dari penampungan akhir tinja terdekat. Pada tahun 2017, sebanyak 1 dari 2 rumah tangga di Kabupaten Tanah Laut sudah menggunakan sumber air minum berupa air bersih. Persentase yang menggunakan air tidak bersih masih tergolong cukup tinggi yaitu mencapai 52,55% rumah tangga. Jika dilihat dari kuintil pengeluaran rumah tangga, persentase rumah tangga yang menggunakan air bersih ada sebanyak 28,58% untuk kuintil 1, berbeda jauh dengan kuintil teratas yaitu sebanyak 61,51%. Penggunaan air minum tidak bersih banyak digunakan oleh rumah tangga dengan pengeluaran rumah tangga yang rendah ditunjukkan dari pembagian akses air minum berdasarkan kuintil. Hal tersebut tentu seharusnya menjadi perhatian pemerintah karena air minum bersih berkaitan erat dengan kualitas kehidupan rumah tangga terkait.

Pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum pada tahun 2019 di Kabupaten Tanah Laut dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.49 Pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2019**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target	Capaian
1.	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	343.890 (100%)	112.074 (32,59%)
2.	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	343.890 (100%)	2.645 (3.56%)

Sumber: Dinas PUPRP Kab. Tanah Laut, 2020

#### 2.1.3.1.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Kebutuhan akan papan yang ditunjukkan melalui perumahan diperlukan dalam menunjang kehidupan manusia. Hal ini sebagai salah satu bentuk upaya pembangunan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman perlu menjadi perhatian bagi pemerintah. Kualitas dari perumahan menunjukkan tingkat kesejahteraan rumah tangga di suatu wilayah. Semakin baik kualitas dari perumahan masyarakat maka semakin baik pula tingkat kesejahtraannya. Kesejahteraan rumah tangga dapat diukur melalui beberapa indikator. Beberapa indikator tersebut dijadikan sebagai dasar dalam target pencapaian SPM.

Adapun pencapaian SPM di Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman pada Kabupaten Tanah Laut tahun 2019 adalah sebagai berikut.

**Tabel 2.50 Pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Tahun 2019**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target	Capaian
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	120 unit (100%)	110 unit (91.66%)
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah kabupaten yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni.	-	-

Sumber: Dinas PRKPLH Kab. Tanah Laut, 2020

#### 2.1.3.1.5 Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat

Dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan ketentraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat merupakan hal yang dapat membantu proses pembangunan suatu wilayah. Untuk itu, perlu adanya pemantauan mengenai tindak pidana kriminalitas yang terjadi pada wilayah tersebut dengan tujuan mendukung proses pencapaian ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.

**Tabel 2.51 Pencapaian SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat Tahun 2019**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target	Capaian
1	Pelayanan dan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum dan perkara	100 orang (100%)	100 orang (100%)

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tanah Laut, 2020

#### 2.1.3.1.6 Sosial

##### **Program Perlindungan dan Jaminan Sosial**

Dalam rangka memfasilitasi penduduk miskin, Pemerintah mencanangkan berbagai program perlindungan sosial mulai dari bantuan beras hingga bantuan melalui Program Keluarga Harapan (PKH). Di Kabupaten Tanah Laut, persentase rumah tangga yang menerima bantuan berupa Raskin/Rastra/BPNT pada tahun 2019 adalah sebesar 14,74%, Program Indonesia Pintar sebesar 6,38%, Kartu Perlindungan Sosial (KPS)/Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) sebesar 11,06%, dan Program Keluarga Harapan sebesar 5,5%.

Jaminan sosial merupakan salah satu bentuk perlindungan yang diberikan kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar yang layak. Program jaminan sosial berupa jaminan pensiun/veteran, jaminan hari tua, asuransi kecelakaan kerja, jaminan/asuransi kematian, pesangon pemutusan hubungan kerja (PHK). Pada tahun 2019 persentase rumah tangga yang memiliki maupun menerima jaminan sosial di Kabupaten Tanah Laut adalah sebanyak 11,37%.



**Tabel 2.52 Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Perlindungan Sosial yang Diterima di Kabupaten Tanah Laut, 2019**

Jenis Program	Persentase (%)
Raskin/Rastra/BPNT	14,74
Program Indonesia Pintar	6,38
Kartu Perlindungan Sosial (KPS)/Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)	11,06
Program Keluarga Harapan	5,5

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2019

**Tabel 2.53 Persentase Rumah Tangga dengan Jaminan Sosial Menurut Jenis dan Tempat Tinggal di Kabupaten Tanah Laut, 2019**

Maksud Utama	Jumlah
Jaminan Pensiun/Veteran Hari tua	11,37
Asuransi/PHK	11,37

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2019

#### 2.1.3.1.7 Tenaga Kerja

Aspek ketenagakerjaan merupakan salah satu aspek yang berpengaruh terhadap kesejahteraan penduduk. Pemerintah sebagai pengambil kebijakan dapat mengkaji berbagai permasalahan mengenai ketenagakerjaan dalam upaya mencari solusinya. Salah satu permasalahan ketenagakerjaan yang masih dapat ditemui hingga saat ini adalah pengangguran. Pengangguran terjadi ketika pertumbuhan angkatan kerja lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan tenaga kerja. Dengan menggunakan berbagai data yang tersedia, maka pemerintah dapat menyusun serta merumuskan kebijakan sebagai upaya penyelesaian masalah. Oleh karena itu, pembahasan mengenai ketenagakerjaan perlu menjadi perhatian bagi pemerintah.

#### Tingkat Pengangguran dan Tingkat Pendidikan

Setiap orang selalu berharap dirinya akan mudah mendapatkan pekerjaan layak yang sesuai dengan keahlian yang dia miliki serta tingkat pendidikan yang ditamatkan. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang akan berdampak pada semakin tinggi pula harapan dan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan tingkat pendidikannya. Namun, keterbatasan lapangan kerja yang tersedia bagi mereka yang mempunyai ijazah tinggi menyebabkan mereka tidak terserap pada lapangan usaha tersebut. Sebagian besar dari mereka yang merupakan lulusan pendidikan tinggi enggan menerima pekerjaan yang tidak sesuai dengan jenis keahlian dan jenjang pendidikan

yang telah ia tamatkan. Sehingga sebagian besar dari mereka yang tidak mendapatkan pekerjaan dan menjadi penganggur (BPS Kabupaten Tanah Laut, 2018).

**Tabel 2.54 Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Kabupaten Tanah Laut, 2019**

Pendidikan Tertinggi	2019
SD	29,84
SMP	19,04
SMA ke Atas	43,23
Perguruan Tinggi	7,89

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2019

Berdasarkan jenjang pendidikan, pada tahun 2019 pengangguran dengan pendidikan tidak pernah bersekolah atau tidak tamat SD sebesar 29,84, pengangguran di Kabupaten Tanah Laut dengan pendidikan terakhir SMP dengan 19,04.

**Tabel 2.55 Tingkat Pengangguran Terbuka**

Kegiatan Utama	2015	2016	2017	2018	2019
TPT	4,53	-	3,7	3,42	3,41
Angkatan Kerja	157.649	-	160.165	162.348	171.565

Sumber : BPS Kab. Tanah Laut, 2020

Pengangguran terbuka (*open unemployment*) didefinisikan sebagai penduduk usia kerja yang tidak bekerja dan sementara tidakbekerja, terdiri dari: (a) mereka yang mencari pekerjaan, (b) mereka yang mempersiapkan usaha, (c) mereka yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidakmungkin mendapatkan pekerjaan, dan (d) mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulaibekerja. Pengertian pengangguran tidak dapat disamakan dengan pencari kerja, karena sering kali terjadi di antara pencari kerja terdapat mereka yang tergolong bekerja namun karena berbagai alasan mencari pekerjaan lain, untuk kasus tersebut, kelompok tersebut akan tergolong sebagai bekerja. Tingkat pengangguran terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Nilai TPT berkaitandengan tolok ukur keberhasilan pemerintah dalam mengatasimasalah pengangguran. Semakin rendah angka TPT mengindikasikan bahwa daya serap lapangan pekerjaan terhadap pencari kerja semakin baik. Jika melihat data TPT pada tahun 2018

yang sebesar 3,42%, maka pada tahun 2019 terjadi penurunan persentase pengangguran yang cukup baik hingga TPT hanya menjadi sebesar 3,41%.

**Tabel 2.56 Data pengangguran pada bulan April 2020 diakibatkan karena pandemi Covid**

Data	Jumlah
Pengangguran	826 orang
Pekerja ter PHK	206 orang
Pekerja IKM ter PHK	197 orang

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut (2020)

### **Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha**

Informasi sektoral biasanya berguna untuk mengidentifikasi pergeseran yang besar dalam ketenagakerjaan dan tingkat pembangunan. Dalam buku teks pembangunan ekonomi, tenaga kerja bergeser dari pertanian dan aktivitas tenaga kerja intensif lainnya ke sektor industri dan akhirnya menuju ke sektor jasa-jasa, dalam prosesnya, penduduk yang bekerja berpindah dari desa ke kota. Dapat diketahui bahwa lapangan pekerjaan di Kabupaten Tanah Laut dari tahun ke tahun tidak banyak mengalami perubahan.

**Tabel 2.57 Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama di Kabupaten Tanah Laut 2019**

Lapangan Pekerjaan	2019
Pertanian	41,21
Pertambangan dan Penggalian	2,292
Industri	Wilayah 7,01
Listrik, Gas, dan Air	0,63
Konstruksi	6,03
Perdagangan, Rumah Makan, dan Hotel	22,51
Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi	3,8
Asuransi, Real Estate, Tanah, dan Jasa Perusahaan	1,33
Jasa Kemasyarakatan	14,56

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2019

Pertanian masih menjadi penyerap tenaga kerja terbesar karena pemerintah memberikan perhatian yang besar pada upaya peningkatan produksi beberapa komoditas pangan utama. Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, komoditas pangan utama yang ditetapkan sebagai sasaran pembangunan prioritas nasional ketahanan pangan adalah padi, jagung, kedelai, gula, dan daging sapi.

Sedangkan di Kabupaten Tanah Laut sendiri, komoditas jagung digadang-gadang menjadi komoditas yang seharusnya diunggulkan dari Kabupaten Tanah Laut (BPS Kabupaten Tanah Laut, 2019).

#### 2.1.3.1.8 Lingkungan Hidup

Kualitas lingkungan hidup merupakan hal yang perlu menjadi perhatian bagi setiap daerah di Indonesia. Hal ini dilakukan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan yang salah satunya memperhitungkan aspek lingkungan hidup dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kualitas lingkungan hidup dapat diukur melalui beberapa indikator seperti Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Tutupan Lahan, Pengelolaan Limbah, dan sebagainya. Selain didukung dengan data dan penjelasan dari beberapa indikator tersebut, perlu adanya dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) yang disusun pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Sebagaimana dijelaskan pada Undang-undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, RPPLH merupakan perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolannya dalam kurun waktu tertentu. Penyusunan RPPLH perlu memperhatikan keragaman karakter dan fungsi ekologis, sebaran penduduk, sebaran potensi sumber daya alam, kearifan lokal, aspirasi masyarakat, dan perubahan iklim. Selain itu, RPPLH juga memuat rencana mengenai pemanfaatan dana atau pencadangan sumber daya alam, pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan atau fungsi lingkungan hidup, pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam, serta adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim. Dokumen ini diperlukan untuk penyusunan rencana pembangunan jangka menengah dan rencana pembangunan jangka panjang.

Dalam perencanaan pembangunan, aspek kualitas lingkungan hidup menjadi perhatian utama dimana dokumen kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) menjadi persyaratan dalam pengesahan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Layanan yang diberikan oleh dinas yang mengurus kewenangan lingkungan hidup diantaranya adalah izin lingkungan. Pada tahun 2018, izin lingkungan diberikan kepada Rumah Sakit Ammariz, PT Charoen Pokphand Jaya, PT Megah Mulia Jaya Persada, dan beberapa perusahaan lainnya. Pada tahun 2017, izin lingkungan diberikan diantaranya

kepada PT Akbar Mitra Jaya, PT Gawi Makmur Kalimantan, PT Berkas Panyipatan Jaya, Endik Medical Clinic, dan perusahaan lainnya.

#### 2.1.3.1.9 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Arsip kependudukan seperti KTP, akte kelahiran, akte nikah, atau akte kematian merupakan dokumen penting yang perlu dimiliki oleh setiap penduduk. Dokumen tersebut digunakan untuk berbagai macam keperluan serta menjadi syarat administrasi mulai dari pendaftaran sekolah, mendaftar pekerjaan, administrasi perbankan, pembuatan paspor, dan sebagainya. Oleh karena itu, pengadministrasian serta pencatatan dokumen tersebut perlu menjadi fokus bagi pemerintah sehingga dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memenuhi syarat administrasi.

#### Akta Kelahiran

Akta kelahiran merupakan salah satu arsip kependudukan mengenai pencatatan kelahiran yang penting dimiliki oleh setiap penduduk. Pembuatan aktakelahiran ini diatur dalam UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Akta kelahiran merupakan suatu dokumen negara yang berisi identitas anak, tanggal lahir, jenis kelamin, nama orang tua, serta tanda tangan pejabat yang berwenang dalam mengesahkan dokumen tersebut. Beberapa fungsi dari kepemilikan akta kelahiran adalah sebagai bukti sah hubungan anak dengan orang tua, identitas diri anak, syarat administrasi sekolah, syarat pembuatan KTP, SIM dan paspor, hingga melamar pekerjaan. Data menunjukkan pada Tahun 2019 jumlah akta kelahiran keseluruhan sebesar 63,52% dimana jumlah yang memiliki akta kelahiran sebanyak 222.192 dari jumlah kelahiran yang terjadi sebanyak 305.007 orang.

**Tabel 2.58 Jumlah Akta Kelahiran di Kabupaten Tanah Laut, 2019**

Tahun	Jumlah Akta Kelahiran (jiwa)
2019	222.192

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, 2019

Pada tahun 2019, persentase penduduk berumur 0-17 tahun yang memiliki akta kelahiran di Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2019 sebesar 119.795 sedangkan jumlah anak sebanyak 10.376

**Tabel 2.59 Persentase Penduduk Berumur 0-17 Tahun yang Memiliki Akta Kelahiran di Kabupaten Tanah Laut, 2018**

Tahun	Penduduk 0-17 Tahun
2019	119.795

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, 2018

#### 2.1.3.1.10 Perhubungan

Kabupaten Tanah Laut merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Kalimantan Selatan yang sedang giat melaksanakan pembangunan di semua sektor ekonomi. Untuk itu, sarana dan prasarana transportasi yang bagus merupakan syarat mutlak yang diperlukan dan menjadi salah satu fokus utama dari pembangunan. Dengan adanya sarana dan prasarana yang baik akan mempermudah masyarakat dalam mobilitas antar kecamatan, ibukota kabupaten maupun ibukota provinsi. Pengembangan sistem jaringan transportasi yang ada di Kabupaten Tanah Laut terdiri atas sistem jaringan transportasi darat, sistem jaringan transportasi laut, sistem jaringan perkeretaapian, dan sistem jaringan transportasi udara. Sistem jaringan transportasi darat dibagi menjadi jaringan jalan nasional, jaringan jalan provinsi, jaringan jalan kabupaten, jaringan jalan khusus angkutan komoditas sumber daya mineral dan perkebunan, terminal penumpang, dan jaringan pelayanan angkutan umum. Pada Tabel 2.82 berikut dipaparkan jenis jalan yang menghubungkan berbagai tempat di Kabupaten Tanah Laut tahun 2019:

**Tabel 2.60 Jaringan Jalan Kabupaten Tanah Laut, 2019**

Jenis	Keterangan
Sistem jaringan jalan nasional	a. jaringan jalan kolektor primer K-1, meliputi :
	1. sp. Liang Anggang – Desa Liang Anggang (Batas Kabupaten Tanah Laut);
	2. Ds. Liang Anggang (Batas Kabupaten Tanah Laut) – Bati Bati;
	3. Bati Bati – Batas Kota Pelaihari;
	4. Batas Kota Pelaihari – KP. Asam Asam;
	5. KP. Asam Asam – Kintap;
	6. Kintap – Desa Sungai Cuka (Batas Kabupaten Tanah Bumbu);
	7. Jalan Gunung Kayangan;
	8. Jalan KH. Mansyur;
	9. Jalan Muslimin (Pelaihari);
	10. Jalan Kemakmuran (Pelaihari);
	11. Jalan Sarang Halang (Pelaihari);
	12. Jalan Perkantoran Gagas (Pelaihari).

Jenis	Keterangan
	13. jaringan jalan bebas hambatan (jalan tol), meliputi :
	14. Lianggang-Pelaihari dan
	15. Pelaihari-Pagatan.
	b. jaringan jalan strategis nasional rencana(Arteri Primer), meliputi :
	1. rencana pengembangan infrastruktur pendukung kawasan strategis Jorong,
	2. Jalan akses menuju pelabuhan Pelaihari :
	3. Jalan akses pelabuhan pelaihari 4 km(bagian dari rencana pembangunan jalan missing link 1000 km),
	4. Jalan Kurau Pulau sari,
	5. Jalan Ambungan – Tajau Pecah dan Tajau Pecah – pelabuhan Swarangan,
	6. Jalan Gunung Kayangan (Pelaihari). Untuk akses Utara : Pelabuhan Swarangan – Salaman – Riam Adungan – utara( Kab. Banjar).
Sistem jaringan jalan provinsi	a. jaringan jalan kolektor primer K-2, meliputi:
	1. Banjarbaru – Bati-bati,
	2. Gambut – Pulau Sari,
	3. Pelaihari – Takisung, dan
	4. Pelaihari – Batakan;
	b. jaringan jalan kolektor primer K-3, meliputi:
	1. Jalan Antasari (Pelaihari),
	2. Jalan arah Takisung dan
	3. Jalan arah Batakan.
Sistem jaringan jalan Kabupaten	Jaringan jalan lokal primer, meliputi : seluruh ruas jalan lokal di Pelaihari

Sumber: RTRW Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016-2036

#### 2.1.3.1.11 Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Pada dasarnya, Koperasi merupakan salah satu usaha dalam rangka pemberdayaan rakyat masyarakat. Secara defimisi Koperasi juga dapat diartikan sebagai salah satu bentuk lembaga profit sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya melalui berbagai bentuk usaha. Keberadaan Koperasi di Kabupaten Tanah Laut jumlahnya cukup banyak dan tersebar di seluruh kecamatan. Semakin banyaknya koperasi yang aktif diharapkan dapat memberdayakan ekonomi berbasis kerakyatan, guna menurunkan angka kemiskinan dan menurunkan jumlah pengangguran. Melihat potensi koperasi yang tersebar di seluruh kecamatan ini, dan sesuai dengan asas ekonomi kerakyatan yang dewasa ini mendapat perhatian serius dari

pemerintah, maka keberadaan koperasi harus terus dikembangkan dengan meningkatkan profesionalitas manajemen para pengurus koperasi. Di Kabupaten Tanah Laut terdapat beberapa jenis koperasi seperti Koperasi Unit desa (KUD), Koperasi Pegawai Negeri (KPN), dan jenis-jenis koperasi lainnya.

**Tabel 2.61 Jumlah Koperasi Berdasarkan Jenisnya di Kabupaten Tanah Laut, 2014-2019**

Tahun	KUD	KPR	KPN	Lainnya	Jumlah
2014	53	-	23	91	167
2015	52	-	23	84	159
2016	53	-	22	87	162
2017	38	-	16	107	161
2018	38	14	16	78	146
2019	38	15	17	80	150

Sumber: SIPD cit. Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018

Pada tahun 2018, total koperasi di Kabupaten Tanah Laut berjumlah 146 koperasi. Jumlah tersebut terdiri dari 38 Koperasi Unit Desa, 16 Koperasi Pegawai Negeri., 14 KPR dan 78 Koperasi jenis lainnya. Pada tahun 2019 jumlah total naik menjadi 150 koperasi karena penambahan koperasi lainnya sebanyak 4 koperasi, sementara KUD jumlahnya tetap sedangkan KPN dan KPR terjadi penambahan. Secara mendetail, komposisi jumlah koperasi per kecamatan pada tahun 2019 tampak pada Tabel 2.92 berikut ini:

**Tabel 2.62 Jumlah Koperasi Menurut Jenis Koperasi dan Kecamatan di Kab.Tanah Laut, 2019**

No.	Kecamatan	Jenis Koperasi				Jumlah
		KUD	KPR	KPN	Lainnya	
1.	Panyipatan	3	-	-	5	8
2.	Takisung	4	-	2	4	10
3.	Kurau	1	-	-	2	3
4.	Bumi Makmur	3	-	-	1	3
5.	Bati-Bati	3	3	1	2	9
6.	Tambang Ulang	2	1	1	5	9
7.	Pelaihari	4	3	12	30	49
8.	Bajuin	5	-	-	-	5
9.	Batu Ampar	3	3	1	7	14
10.	Jorong	5	2	-	12	19
11.	Kintap	5	3	-	12	20
<b>Jumlah</b>		<b>38</b>	<b>15</b>	<b>17</b>	<b>80</b>	<b>149</b>

Sumber: SIPD cit. Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2019



Dari jumlah KUD sebanyak 38 unit pada tahun 2019, wilayah yang memiliki jumlah KUD terbanyak adalah Kecamatan Bajuin, Jorong, dan Kintap yang masing-masing memiliki 5 unit KUD. Jumlah keseluruhan anggota KUD pada tahun 2019 adalah 12.482 anggota dimana jumlah anggota KUD tebranyak berasal dari Kecamatan Pelaihari yaitu 2.518 anggota. Secara keseluruhan jumlah simpanan anggota KUD adalah sebesar Rp 5,2 miliar dimana simpanan terbesar berada di Kecamatan Kintap yaitu sebesar Rp 721 juta. Sementara itu, dari jumlah koperasi Non KUD sebanyak 112 unit, sebagian besar koperasi berada di Kecamatan Pelaihari yaitu sebanyak 48 unit. Jumlah anggota koperasi Non KUD di Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2019 adalah sebanyak 15.919 anggota dengan jumlah simpanan sebesar Rp 49,913 miliar.

**Tabel 2.63 Jumlah KUD dan Non KUD (unit), Anggota (orang), dan Simpanan (Rp Juta), 2018**

No.	Kecamatan	KUD			Non KUD		
		Jumlah	Anggota	Simpanan	Jumlah	Anggota	Simpanan
1.	Panyipatan	3	614	592,139	5	889	9,738,830
2.	Takisung	4	1.039	601,992	6	562	4.372.348
3.	Kurau	1	48	61,1109	2	71	-8,491
4.	Bumi Makmur	3	534	27,751	1	32	6,750
5.	Bati-Bati	3	309	145,398	6	1.622	7,455,922
6.	Tambang Ulang	2	1.223	45,364	7	306	162.698
7.	Pelaihari	4	2.518	469,903	45	6.072	12.886.925
8.	Bajuin	5	1.300	147,747	-	-	-
9.	Batu Ampar	3	1.612	2116,778	11	2671	2.,077,823
10.	Jorong	5	1.891	283,535	14	500	17,883,675
11.	Kintap	5	1.394	721,877	15	3191	4,102,325
<b>Jumlah</b>		<b>38</b>	<b>12.482</b>	<b>5.213.593</b>	<b>112</b>	<b>15.919</b>	<b>49.913.855</b>

Sumber: SIPD cit. Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2019

#### 2.1.3.1.12 Statistik

Dalam pencatatan statistik, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut bekerjasama dengan BPS Kabupaten Tanah Laut telah merangkum berbagai statistik Kabupaten Tanah Laut. Urusan statistik yang dimaksud merupakan indikator atau tolak ukur yang digunakan untuk menggambarkan kelengkapan urusan statistik yang tersedia oleh Kabupaten Tanah Laut. Jenis dokumen yang dapat menjadi indikator urusan statistik antara lain (1) Buku Kabupaten dalam angka; (2) Buku Statistik Daerah; dan (3) Buku PDRB Kabupaten. Penyusunan ketiga buku tersebut penting kaitannya dengan keberadaan data yang digunakan dalam merancang kebijakan, dan penyusunan program

kegiatan. Berdasarkan ketersediaan ketiga buku tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.98. Kabupaten Tanah Laut telah menunjukkan kemajuan pesatnya dengan hasil selama periode 2012-2019 rangkuman statistik buku-buku tersebut selalu tersedia.

Buku Kabupaten Tanah Laut dalam angka pada dasarnya setiap tahunnya berisi dengan rangkuman statistik mengenai geografi dan iklim, pemerintahan, penduduk dan tenaga kerja, sosial, pertanian, perindustrian, pertambangan, energi, perdagangan, transportasi, komunikasi, pariwisata, keuangan daerah, dan pendapatan regional. Buku Kabupaten Tanah Laut dalam angka tersebut merupakan sumber data dan informasi terkait Kabupaten Tanah Laut dan dapat digunakan baik oleh pemerintah maupun swasta dan masyarakat umum sebagai bahan informasi yang akurat dan acuan dalam perencanaan pembangunan.

**Tabel 2.64 Hasil Kinerja Urusan Statistik Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, 2014-2019**

No.	Capaian Pembangunan	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Buku Kabupaten Dalam Angka	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2.	Buku Statistik Daerah	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3.	Buku PDRB Kabupaten	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
4.	Buku Indikator Kesejahteraan Rakyat	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2019

Dalam versi yang lebih ringkas, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut juga menyediakan Buku Statistik Daerah sebagai bahan acuan perencanaan pembangunan. Publikasi Buku Statistik Daerah Kabupaten Tanah Laut tiap tahunnya diterbitkan oleh BPS Kabupaten Tanah Laut berisi berbagai data dan informasi terpilih seputar Kabupaten Tanah Laut yang dianalisis secara sederhana untuk membantu pengguna data memahami pembangunan serta potensi yang ada di Kabupaten Tanah Laut. Publikasi ini mengemas kondisi terkini, perkembangan pembangunan yang ditampilkan dalam bentuk yang lebih informatif, dan bersifat analisis. Materi yang disajikan dalam Buku Statistik Daerah Kabupaten Tanah Laut memuat berbagai indikator terpilih yang terkait dengan pembangunan di berbagai sektor di Kabupaten Tanah Laut dan diharapkan dapat menjadi bahan rujukan/kajian dalam perencanaan dan evaluasi kegiatan pembangunan.

Terkait dengan aktivitas ekonomi, pemerintah Kabupaten Tanah Laut juga menyediakan buku PDRB Kabupaten Tanah Laut baik menurut lapangan usaha maupun

pengeluaran. Selama Periode 2014-2019, buku-buku tersebut selalu tersedia dan dapat diakses melalui situs BPS Kabupaten Tanah Laut. Publikasi ini secara khusus membahas mengenai PDRB menurut pendekatan pengeluaran/permintaan akhir. Pendekatan ini dirinci menjadi beberapa komponen, yaitu: Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non-profit yang melayani Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Pemerintah, Investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto dan Perubahan Inventori), Ekspor Luar negeri, Impor Luar Negeri, serta Ekspor neto antar daerah (ekspor antar daerah dikurangi dengan impor antar daerah). Data PDRB dalam publikasi terbaru telah menggunakan tahun dasar 2010 serta sudah menerapkan *konsep System of national Accounts* 2008 seperti yang telah direkomendasikan oleh *United Nations*. Tidak hanya data statistik yang bersumber dari Publikasi BPS, langkah ke depan yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Laut adalah pengembangan Sistem Informasi Pembangunan Daerah yang memuat seluruh data hasil pembangunan yang telah dilakukan pemerintah daerah. Selain itu, diperlukan juga adanya Tanah Laut Integrasi Data dimana hasil pencapaian indikator kinerja yang telah dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah berdasarkan target indikator kinerja pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dapat terkumpul dalam satu data integratif sehingga memudahkan dalam perencanaan di masa yang akan datang.

#### 2.1.3.1.13 Persandian

Salah satu urusan wajib diluar pelayanan dasar yang perlu diatur oleh Perangkat Daerah adalah bidang persandian. Kewenangan daerah terkait dengan urusan persandian telah dijabarkan dalam Pemetaan Urusan Persandian dalam rangka Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Bidang Persandian Sesuai Arah UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam lampiran Undang-Undang Pemerintahan Daerah telah dijelaskan terkait pembagian urusan pemerintahan untuk bidang persandian.

Kewenangan pertama adalah penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi, yaitu dengan melaksanakan tata kelola Jaminan Keamanan Informasi (JKI) yang meliputi aspek kerahasiaan, ketersediaan, keutuhan, keaslian dan/atau nir-sangkal. Indikator keberhasilan dari layanan ini dapat dilihat dari jumlah informasi dan juga jumlah konten informasi yang wajib diamankan dengan persandian sesuai peraturan

perundang-undangan. Selain itu layanan yang juga perlu dilaksanakan yaitu dukungan kegiatan pengamanan informasi, indikatornya dilihat dari jumlah aset atau fasilitas yang harus diamankan serta jumlah rata-rata kegiatan penting yang membutuhkan dukungan pengamanan informasi per-bulannya.

Kewenangan kedua yaitu terkait penetapan pola hubungan komunikasi sandi yaitu dengan layanan berupa pelaksanaan pola hubungan komunikasi sandi, indikatornya dilihat dari jumlah organisasi pemerintah daerah yang menggunakan persandian untuk mengamankan setiap jenis informasi yang wajib diamankan atau rasio dari jumlah perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi antar perangkat daerah dengan jumlah total perangkat daerah (Majalah Info Singkat Permendagri Vol. VIII, 2016). Untuk mengaplikasikan indikator tersebut perlu adanya kerjasama antara urusan komunikasi dan informatika dengan Persandian dan Telekomunikasi di Kabupaten Tanah Laut.

#### 2.1.3.1.14 Kebudayaan

Walaupun mayoritas penduduk Kabupaten Tanah Laut didominasi oleh Suku Banjar dan Suku Jawa, namun terdapat beberapa suku bangsa lainnya seperti Suku Madura, Sunda, Bukit, Bakumpai, Mandar, dll. Suku Dayak yaitu suku bangsa asli di Kalimantan yang tersebar di beberapa lokasi. Salah satu lokasinya berada di Kabupaten Tanah Laut. Suku Dayak atau sering disebut Suku Dayak Maratus yang berada di Kabupaten Tanah Laut adalah Dayak Bukit. Penduduk Suku Dayak yang tinggal di pedalaman biasanya memiliki kebiasaan dan tradisi yang khas, seperti pola huniannya. Pola hunian utama Suku Dayak yaitu pola rumah tunggal berbentuk rumah panggung yang mengelompok dan pola hunian di balai dengan tata ruang seragam. Dengan berbagai suku yang tinggal di wilayah Kabupaten Tanah Laut, maka berbagai budaya yang dimiliki oleh masing-masing suku tersebut menjadi sebuah kekayaan yang bernilai bagi perkembangan seni budaya di Kabupaten Tanah Laut.

Kabupaten Tanah Laut juga memiliki tarian khas yaitu Tari Batatungkal, tarian ini diangkat dari upacara adat Suku Biaju dari Bajuin, upacara ini dilakukan untuk mengusir roh jahat yang mengganggu dan untuk memperoleh semangat batu agar mendapatkan hasil panen yang lebih berkah. Selain itu terdapat pula upacara adat Balian, upacara adat ini merupakan kegiatan tradisi yang menggambarkan aturan-aturan dari nenek moyang Suku Dayak Maratus dan bertujuan untuk meminta kepada Yang

Maha Kuasa agar kampungnya terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Pelaksanaan upacara adat ini dikelola oleh pemilik Belian yaitu meliputi Masni (Kepala Pimpinan Balian), Anang Idar, Nayan, Jainuddin sebagai penerjemahsaat penari belian dimasuki roh-roh nenek moyang Suku Dayak Maratus. Lokasi pelaksanaan acara adat Balian dilaksanakan di dalam balai kampung Desa Riam Adungan Kecamatan Kintap (kalsel.kemenag.go.id).

Pada Tabel 2.99 dapat dilihat bahwa terdapat empat obyek wisata budaya di Kabupaten Tanah Laut yang tersebar di beberapa kecamatan. Kawasan cagar budaya Desa Riam Adungan yang berlokasi di Kecamatan Kintap, situs sejarah di Desa Tabanio Kecamatan Takisung, dan juga Bunker Jepang terletak di Desa Sungai Bakar Kecamatan Bajuin (Peraturan Daerah RTRW Kabupaten Tanah Laut 2016-2036).

**Tabel 2.65 Nama Obyek Wisata Budaya di Kabupaten Tanah Laut, 2019**

No.	Nama Obyek Wisata	Lokasi
1.	Benteng Belanda Tabanio	Tabanio, Takisung
2.	Cagar Budaya Desa Riam Adungan	Riam Adungan, Kintap
3.	Bunker Jepang	Sungai Bakar, Bajuin

Sumber: RTRW Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016-2036

#### 2.1.3.1.15 Perpustakaan

Perpustakaan merupakan wadah bahan pustaka yang disediakan untuk masyarakat, yang disusun menurut sistim tertentu. Tujuan dari perpustakaan sendiri yaitu untuk meningkatkan angka melek huruf, meningkatkan peran budaya baca dalam menyerap pengetahuan, meningkatkan mutu kehidupan masyarakat, dan juga sebagai salah satu penunjang keberlangsungan pendidikan. Kabupaten Tanah Laut memiliki satu unit perpustakaan umum yaitu Perpustakaan Daerah Kabupaten Tanah Laut yang berlokasi di Angsau, Kecamatan Pelaihari.

#### 2.1.3.1.16 Kearsipan

Berbagai macam kegiatan operasional maupun program kerja yang dijalankan oleh pemerintah perlu didukung oleh sistem pengarsipan yang baik agar dapat menyajikan informasi perkembangan penyelenggaraan pemerintahan dari tahun ke tahun. Terlebih untuk menciptakan tata kelola administrasi yang baik juga diperlukan pemeliharaan dan pelestarian arsip daerah yang merupakan bahan kerja dalam mencapai tujuan pemerintahan. Oleh karena itu, seluruh jajaran pemerintah perlu menyadari

pentingnya arsip, sehingga akan mempermudah dalam penyelenggaraan program kearsipan.

Dalam menjalankan program-program tersebut pengalokasian anggaran dari pemerintah menjadi hal yang penting. Pada umumnya alokasi dana untuk bidang kearsipan menjadi satu dengan urusan perpustakaan, sehingga sulit untuk membedakan pos dana untuk kearsipan atau perpustakaan. Program-program yang ada di urusan perpustakaan antara lain program pengumpulan data kearsipan, program pemeliharaan jaringan informasi kearsipan, dan program penyelamatan dan pelestarian dokumen. Sedangkan indikator pencapaian bidang kearsipan dilihat dari persentase Perangkat Daerah yang telah menerapkan arsip secara baku dan juga dari peningkatan SDM pengelola kearsipan yaitu dengan menunjukkan jumlah kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan.

#### 2.1.3.2. Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Pilihan

##### 2.1.3.2.1 Kelautan dan Perikanan

Garis pantai Kabupaten Tanah Laut yang berbatasan dengan Laut Jawa menunjukkan bahwa wilayah ini memiliki potensi sumber daya perikanan dan kelautan yang cukup potensial, yang meliputi sektor perikanan, wisata, perhubungan laut, dan konservasi. Akan tetapi, potensi di bidang kelautan dan perikanan tersebut belum dimanfaatkan secara optimal, sehingga di masa mendatang melalui pengelolaan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan dapat dimanfaatkan sebagai sumber devisa, pemenuh kebutuhan konsumsi masyarakat, dan pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tanah Laut. Walaupun demikian kondisi perairan juga dipengaruhi oleh perubahan musim yaitu musim dari barat ke timur atau sebaliknya yang akan menyebabkan perubahan kondisi fisik seperti perubahan suhu, salinitas, gelombang, dan lain-lain.

Selain mengembangkan potensi yang ada pemerintah baik pusat maupun daerah bertanggung jawab atas kelestarian sumberdaya perairan sesuai dengan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, dan perubahannya Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009, serta Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 yang mengamanatkan kepada pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan. Di dalam suatu ekosistem pesisir yang terdiri dari komponen hayati dan nirhayati saling berhubungan saling

berhubungan dan saling berinteraksi satu sama lain, sehingga ketika terjadi perubahan pada salah satu dari komponen tersebut akan berdampak pada keseluruhan baik dalam kesatuan struktur fungsional maupun dalam keseimbangannya. Oleh karena itu dalam menjamin kelestarian sumber daya alam juga perlu memperhatikan hubungan ekologis yang berlangsung diantara komponen-komponen sumber daya alam yang menyusun suatu sistem. Program utama pemerintah Kabupaten Tanah Laut dalam rangka menjaga kelestarian sumber daya perairan yaitu dengan mempertahankan ekosistem pantai seperti hutan mangrove, terumbu karang, rumput laut, dan estuaria.

Kawasan konservasi atau lindung laut berdasarkan RTRW Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016-2036 yaitu meliputi kawasan konservasi tanaman bakau pesisir pantai dan Kawasan Suaka Margasatwa Batakan. Kawasan konservasi pesisir pantai ini berada di Kecamatan Bumi Makmur dengan luas lahan kurang lebih 267,97 Ha. Sedangkan Kawasan Suaka Margasatwa Batakan merupakan kawasan suaka alam Kabupaten Tanah Laut. Berdasarkan RTRW Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016-2036, luas Kawasan Suaka Margasatwa Batakan kurang lebih 3.068,38 hektar, yang terdiri dari kawasan konservasi pesisir dan kawasan permukiman. Kawasan konservasi pesisir menurut peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan memiliki luas kurang lebih 443,8685 Ha. Selain kawasan suaka margasatwa Desa batakan Kecamatan Panyipatan juga memiliki kawasan taman wisata alam Pantai Batakan dengan luas 1.368,02 hektar.

Melihat produksi per jenis ikan pada perikanan tangkap laut, terdapat 4 jenis komoditas ikan yang paling banyak ditangkap nelayan adalah udang lainnya dengan produksi sebesar 9.030 ton, diikuti udang putih sebesar 5.6790 ton, manyung sebesar 5.717 ton dan ikan lainnya 5.571. Data tersebut menunjukkan bahwa ada berragam jenis komoditas perikanan tangkap laut di Kabupaten Tanah Laut yang memiliki nilai produksi tinggi terutama jenis udang-udangan, ikan demersal, dan ikan pelagis besar.

**Tabel 2.66 Jumlah dan Nilai Produksi Perikanan Tangkap Laut di Kabupaten Tanah Laut, 2019**

No.	Jenis Ikan	Produksi (ton)	Nilai Produksi (Rp Ribu)
1.	Peperek	2.534	17.738.000
2.	Manyung	5.717	85.775.000
3.	Bambangan	755,0	22.650.000
4.	Kakap Putih	1.522,0	38.050.000
5.	Gulamah	2.710	40.650.000

No.	Jenis Ikan	Produksi (ton)	Nilai Produksi (Rp Ribu)
6.	Pari	2.684	26.840.000
7.	Bawal Putih	0,0	52.710.000
8.	Selar	2.231,0	22.310.000
9.	Belanak	40,0	20.677.351
10.	Kuro/Senangin	85,0	2.125.000
11.	Teri	684,0	2.125.000
12.	Tembang	55,0	385.000
13.	Tenggiri Papan	2.306	138.360.000
14.	Tongkol	2.329	58.225.000
15.	Tenggiri	2.720	272.000.000
16.	Udang Windu	2.439	317.070.000
17.	Udang Putih	5.790	463.200.000
18.	Udang Lain	9.030	541.800.000
19.	Cumi-cumi	2.815	70.375.000
20.	Kembung	675	15.525.000
21.	Ikan Lainnya	5.571	55.710.000
22.	Rajungan	1.152,3	92.184.000
<b>Jumlah</b>		<b>55.614,3</b>	<b>2.343.160.000</b>

Sumber: SIPD cit. Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2020

Jika dilihat dari sisi produksi per jenis ikan pada perairan umum, produksi ikan terbesar adalah komoditas betok/papuyu yaitu sebesar 758,7ton, disusul oleh gabus sebesar 703,9 ton, sepat siam sebesar 590,7 ton, sepat rawa sebesar 560,8 ton, dan tawes sebesar 396,6 ton. Nilai produksi keseluruhan perikanan tangkap perairan umum pada tahun 2019 adalah sebesar Rp 85,19 miliar. Secara rinci, jumlah dan nilai produksi perikanan tangkap perairan umum pada tahun 2019 ditampilkan pada tabel berikut:

**Tabel 2.67 Jumlah & Nilai Produksi Perikanan Tangkap Perairan Umum di Kab. Tanah Laut**

No.	Jenis Ikan	Produksi (ton)	Nilai Produksi (Rp Ribu)
1.	Betok/Papuyu	758,7	18.967.500
2.	Baung	324	5.508.000
3.	Sepat Rawa	560,8	5.608.000
4.	Sepat Siam	590,7	7.088.400
5.	Gabus	703,9	17.597.500
6.	Lele	60,8	912.000
7.	Tawes	396,6	5.949.000
8.	Lais	37,1	742.000
9.	Patin Jambal	81,8	1.799.600
10.	Ikan Lainnya	249,3	1.745.100
11.	Udang Galah	394,6	15.7480.00
12.	Udang Lainnya	174,7	3.494.000
<b>Jumlah</b>		<b>4.333,0</b>	<b>85.195.100</b>

Sumber: SIPD cit. Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2019



Selain perikanan tangkap laut dan perikanan tangkap perairan umum Kabupaten Tanah Laut juga memiliki produksi perikanan yang berasal dari perikanan budidaya. Jenis budidaya yang dikembangkan di Kabupaten Tanah Laut adalah tambak, kolam, keramba, dan jaring apung. Pada tahun 2019 produksi tambak adalah sebesar 933,76 ton dimana produksi berasal dari Kecamatan Bumi Makmur, Kurau, dan Kintap. Untuk kolam, produksinya berasal dari seluruh kecamatan dengan produksi total mencapai 171,3 ton. Produksi kolam terbesar berasal dari Kecamatan Pelaihari yang mencapai 94,5 ton, diikuti Kecamatan Jorong sebesar 23,83 ton, dan Kecamatan Bati-bati sebesar 19,03 ton. Pada budidaya keramba, produksinya sebesar 30,50 ton dan berasal dari Kecamatan Bati-bati, sedang produksi jaring apung sebesar 21,90 ton berasal dari Kecamatan Pelaihari.

**Tabel 2.68 Produksi Perikanan Budidaya Menurut Kecamatan dan Subsektor di Kabupaten Tanah Laut (tn), 2019**

No.	Kecamatan	Tambak	Kolam	Keramba	Jaring Apung
1.	Panyipatan	-	3,88	-	-
2.	Takisung	-	7,34	-	-
3.	Kurau	43,04	2,00	-	-
4.	Bumi Makmur	592,96	2,30	-	-
5.	Bati-Bati	-	19,03	30,50	-
6.	Tambang Ulang	-	10,34	-	-
7.	Pelaihari	-	94,50	-	21,90
8.	Bajuin	-	1,65	-	-
9.	Batu Ampar	-	5,43	-	-
10.	Jorong	-	23,83	-	-
11.	Kintap	297,76	1,00	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>933,76</b>	<b>171,30</b>	<b>30,50</b>	<b>21,90</b>

Sumber: SIPD cit. Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2020

Pada budidaya tambak, jenis ikan yang diproduksi adalah bandeng yaitu sebesar 583,60 ton, disusul udang windu sebesar 291,80 ton, dan udang putih sebesar 58,36 ton. Untuk budidaya kolam, jenis ikan yang diproduksi adalah lele (114 ton), patin (46 ton), nila (9 ton), dan ikan mas (1,10 ton). Pada budidaya keramba, komoditas yang dikembangkan adalah ikan mas dan nila dengan produksi masing-masing sebesar 23,10 dan 7,40 ton, sedangkan ikan yang dikembangkan pada budidaya jaring apung adalah nila dengan produksi sebesar 21,90 ton. Nilai produksi budidaya tambak pada tahun 2019 adalah sebesar Rp 24,98 miliar, kolam sebesar Rp 2,78 miliar, keramba sebesar Rp 831,80 juta, dan jaring apung sebesar Rp 547,50 juta.

**Tabel 2.69 Produksi Perikanan Budidaya Menurut Jenis Ikan dan Jenis Budidaya di Kabupaten Tanah Laut (ton), 2019**

No.	Kecamatan	Tambak	Kolam	Keramba	Jaring Apung
1.	Bandeng	583,60	-	-	-
2.	Udang Windu	291,80	-	-	-
3.	Udang Putih	58,36	-	-	-
4.	Ikan Mas	-	1,10	23,10	-
5.	Nila	-	9,00	7,40	21,90
6.	Lele	-	114,00	-	-
7.	Patin	-	46,00	-	-
8.	Lainnya	-	1,20	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>933,76</b>	<b>171,30</b>	<b>30,50</b>	<b>21,90</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2019

Rumah tangga perikanan yang terlibat dalam kegiatan perikanan budidaya pada tahun 2019 adalah sebanyak 861 unit. Kecamatan yang paling banyak memiliki rumah tangga perikanan budidaya adalah Kecamatan Pelaihari yaitu sebanyak 130 unit, disusul Kecamatan Kintap sebanyak 121 unit, dan Kecamatan Takisung sebanyak 94 unit. Dari sisi jenis budidaya, jumlah rumah tangga perikanan terbanyak adalah rumah tangga perikanan budidaya kolam yaitu sebanyak 676 unit, disusul rumah tangga perikanan budidaya tambak sebesar 137 unit, rumah tangga perikanan budidaya jaring apung sebanyak 30 unit, dan rumah tangga perikanan budidaya keramba sebanyak 18 unit.

**Tabel 2.70 Jumlah Rumah Tangga Perikanan Budidaya Menurut Kecamatan dan Subsektor di Kabupaten Tanah Laut (ton), 2019**

No.	Kecamatan	Tambak	Kolam	Keramba	Jaring Apung
1.	Panyipatan	-	21,86	-	-
2.	Takisung	-	25,01	-	-
3.	Kurau	-	24,80	-	-
4.	Bumi Makmur	-	25,70	-	-
5.	Bati-Bati	-	35,58	32,87	-
6.	Tambang Ulang	-	10,20	-	-
7.	Pelaihari	-	50,83	-	33
8.	Bajuin	-	4,24	-	-
9.	Batu Ampar	-	40,66	-	-
10.	Jorong	-	15,76	-	-
11.	Kintap	-	5,08	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>-</b>	<b>259,72</b>	<b>32,87</b>	<b>33</b>

Sumber: SIPD cit. Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2020

#### 2.1.3.2.2 Pariwisata

Secara makro optimalisasi sektor pariwisata diharapkan dapat menjadi salah satu industri yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penyediaan kesempatan kerja, peningkatan pendapatan dan taraf hidup, yang pada akhirnya secara simultan dapat menggerakkan sektor-sektor produksi lain. Sementara itu menurut Bappenas (2015), arah kebijakan pengembangan sektor pariwisata nasional meliputi pemasaran pariwisata nasional dengan mendatangkan wisatawan baik domestik maupun mancanegara, pembangunan destinasi pariwisata dengan meningkatkan daya tarik daerah tujuan agar mampu bersaing di dalam maupun luar negeri, pembangunan industri pariwisata nasional dengan meningkatkan partisipasi usaha lokal serta meningkatkan keragaman dan daya saing produk maupun jasa pariwisata nasional di setiap lokasi pariwisata yang ingin dipasarkan, dan pembangunan kelembagaan pariwisata yaitu melalui pembangunan sumberdaya manusia dan organisasi kepariwisataan nasional.

Keindahan alam yang dimiliki Kabupaten Tanah Laut merupakan potensi yang cukup besar untuk dijadikan tujuan wisata, terlebih terdapat berbagai jenis obyek wisata yang dapat dikunjungi seperti wisata pantai, wisata sejarah dan budaya, wisata alam, dan wisata taman. Berdasarkan data BPS Kabupaten Tanah Laut (2018), hingga saat ini terdapat 25 obyek wisata yang ada di Kabupaten Tanah Laut. Walaupun demikian masih ada beberapa obyek wisata yang belum dikunjungi para wisatawan yang mungkin disebabkan oleh kurangnya promosi dan juga kurang memadainya sarana dan prasarana yang mendukung.

Hampir di setiap kecamatan memiliki tempat wisata yang memiliki daya tarik tersendiri. Oleh karena itu, alangkah lebih baik bila destinasi pariwisata tersebut dipasarkan secara bersama-sama terutama destinasi-destinasi wisata unggulan seperti Pantai Takisung dan Pantai Batakan. Selain pemasaran juga perlu dilakukan beberapa upaya seperti membangun akses menuju kawasan wisata, sarana pendukung wisata misalnya hotel dan restoran, serta mempersiapkan tenaga kerja pariwisata yang berkualitas. Sehingga harapannya dengan pengembangan ekonomi kreatif dibidang pariwisata akan meningkatkan daya tarik wisatawan untuk berkunjung ke obyek wisata di Kabupaten Tanah Laut. Berikut adalah daftar obyek wisata yang ada di Kabupaten Tanah Laut.

**Tabel 2.71 Nama Obyek Wisata di Kabupaten Tanah Laut, 2019**

No.	Nama	Lokasi	Jenis	Aksesibilitas (dari Kota Pelaihari)
1.	Pantai Takisung	Takisung, Takisung	Alam	22 km
2.	Pantai Batakan	Batakan, Panyipatab	Alam	40 km
3.	Pantai Swarangan	Swarangan, Jorong	Alam	41 km
4.	Pantai Batu Lima	Kuala Tambangan, Takisung	Alam	42 km
5.	Pantai Turki	Swarangan, Jorong	Alam	45 km
6.	Pantai Asmara	Muara Asam-asam, Jorong	Alam	50 km
5.	Air Terjun Bajuin	Sungai Bakar, Pelaihari	Alam	10 km
6.	Air Terjun Balangdaras	Tanjung, Pelaihari	Alam	25 km
7.	Air Terjun Hamindrai	Tanjung, Pelaihari	Alam	17 km
8.	Air Terjun Habulu	Tanjung, Pelaihari	Alam	18 km
9.	Gunung Kayangan	Ambungan, Pelaihari	Alam	6 km
10.	Kawasan Goa Marmer	Sungai Bakar, Pelaihari	Alam	10 km
11.	Goa Macan/Liang Babau	Tanjung, Pelaihari	Alam	19 km
12.	Mina Tirta	Pusat Kota Pelaihari	Alam	1 km
13.	Tanjung Dewa	Tanjung Dewa, Panyipatan	Alam	40 km
14.	Kerbau Rawa	Benua Raya, Bati-bati	Alam	26 km
15.	Air Terjun Lalaran	Pamalongan, Bajuin	Alam	14 km
16.	Bekantan	Swarangan, Jorong	Alam	39 km
17.	Bekantan	Panjaratan, Pelaihari	Alam	15 km
18.	Benteng Belanda Tabanio	Tabanio, Takisung	Sejarah	25 km
19.	Pulau Datu Pamulutan	Tanjung Dewa, Panyipatan	Religius	38 km
20.	Datu Insad	Sambangan, Bati-bati	Religius	33 km
21.	Makam Keramat Istana	Karang Taruna, Pelaihari	Religius	6 km
22.	Tanam Mina Tirta	Angsau, Pelaihari	Buatan	1 km
23.	Taman Hutan Kota	Pelaihari, Pelaihari	Buatan	1 km
24.	Taman Kijang Kencana	Pelaihari, Pelaihari	Buatan	1 km
25.	Bumi Perkemahan	Sungai Jelai, Tambang Ulang	Buatan	9 km

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2020

Pada tahun 2019, obyek wisata yang diminati di Kabupaten Tanah Laut adalah pantai. Jumlah kunjungan tertinggi wisatawan di Kabupaten Tanah Laut adalah di Pantai Turki yang dikunjungi 114.500 wisatawan. Obyek wisata selanjutnya yang menjadi favorit adalah Pantai Takisung yaitu sebanyak 92.450 wisatawan, dan Pantai Asmara sebanyak 65.500 wisatawan.

Data wisatawan asing dan domestik di tahun 2019 menunjukkan bahwa hanya ada 15 orang wisatawan asing berkunjung di Kabupaten Tanah Laut yakni 15 orang di bulan Juni oktober. Sedangkan wisatawan domestik sepanjang tahun cukup berfluktuatif. Pengunjung domestik tertinggi di tahun 2019 pada bulan Januari yaitu sebanyak 77.485 wisatawan, disusul pada bulan Juni sebanyak 41.612 wisatawan, dan Desember sebanyak 41.545 wisatawan. Sedangkan pengunjung terendah pada bulan Maret yang hanya sebanyak 8.959 wisatawan. Dari segi fasilitas pendukung pariwisata,

berdasarkan data Statistik Daerah Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2019 dipaparkan bahwa terdapat 27 hotel dengan 225 kamar yang tersebar di Kecamatan Pelayhari dan Jorong.

**Tabel 2.72 Jumlah Wisatawan Asing dan Wisatawan Domestik Menurut Bulan di Kabupaten Tanah Laut, 2019**

No.	Bulan	Wisatawan Domestik	Wisatawan Asing
1.	Januari	77.485	-
2.	Februari	38.039	-
3.	Maret	8959	-
4.	April	17412	-
5.	Mei	23892	-
6.	Juni	41612	-
7.	Juli	28065	-
8.	Agustus	18370	-
9.	September	15835	-
10.	Oktober	14904	15
11.	November	20248	-
12.	Desember	41545	-
<b>Jumlah</b>		<b>346366</b>	<b>15</b>

Sumber: SIPD cit. Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2020

**Tabel 2.73 Jumlah Wisatawan Kabupaten Tanah Laut**

NO	NAMA OBJEK WISATA	JUMLAH
1	Gunung Kayangan	5,457
2	Air Terjun Bajuin	3,618
3	Taman Mina Tirta	
	- Sepeda Air	2,504
	- Kereta Wisata	1,465
4	Pantai Takisung	92,450
5	Pantai Batu Lima	0
6	Pantai Batakan	26,258
7	Pantai Swarangan	264
8	Pantai Kintap	468
9	Pantai Turki	114,500
10	Pantai Asmara	65,500
11	Pantai Cemara Satu	3,990

NO	NAMA OBJEK WISATA	JUMLAH
12	Pantai Cemara Dua	4,342
13	Pantai Tanjung Dewa	6,800
14	Pantai R.Piungan	
15	Pulau Datu	6,285
16	Gunung Birah	1,589
17	Dewa Katar	2,255
18	Taman Bunga Meysa	256
19	Wisata Mangrov	1,800
20	Kerbau Rawa	652
21	Taman Hijau Rindang	1,977
22	Danau Sari Ambun	691
23	Bukit Teletubies	845
	<b>TOTAL JUMLAH</b>	<b>346,366</b>

Sumber: Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut 2019

#### 2.1.3.2.3 Pertanian

Pertanian merupakan salah satu sektor penting karena memiliki hubungan langsung dengan kebutuhan pokok atau primer bagi kehidupan manusia di dunia, termasuk masyarakat Kabupaten Tanah Laut. Dalam arti luas sektor pertanian tidak hanya mencakup kegiatan dalam hal tanaman pangan seperti jagung dan padi, tetapi juga hortikultura (sayur dan buah), perkebunan, dan peternakan. Pemanfaatan sumber daya hayati untuk menghasilkan tanaman pangan memiliki peranan penting dalam perekonomian Kabupaten Tanah Laut. Lebih lagi, dengan terus meningkatnya jumlah penduduk, maka kebutuhan pangan juga akan terus meningkat.

#### Tanaman Pangan

Perkembangan sektor pertanian tidak bisa dipisahkan dengan aspek luas lahan karena suatu kegiatan pertanian pastilah membutuhkan sejumlah lahan untuk memproduksi hasil pertanian dari kegiatan tersebut. Luas lahan sawah di Kabupaten Tanah Laut dibagi menjadi dua kelompok, yaitu sawah irigasi dan non irigasi (tadah hujan). Secara keseluruhan, luas lahan sawah di Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2019 mencapai 214,270 ha yang terdiri dari sawah irigasi seluas 6.658 ha dan sawah non irigasi seluas 66.852 ha. Sawah non irigasi di Kabupaten Tanah Laut tersebar di

seluruh kecamatan, sedangkan sawah irigasi hanya terdapat di 7 kecamatan. Luas lahan sawah terbesar berada di Kecamatan Pelaihari yang mencapai 1.936 ha, sedangkan sawah non irigasi terluas berada di Kecamatan Bati-bati yaitu seluas 11.500 ha. Berdasarkan data luas sawah pada tabel dibawah maka dapat dikatakan bahwa sawah non irigasi mempunyai wilayah yang sangat luas dibandingkan sawah irigasi. Hal tersebut mengindikasikan bahwa infrastruktur pengairan sangat diperlukan, sehingga pengairan sawah tidak akan hanya bergantung pada air dari alam yang nantinya dapat digunakan untuk mendorong peningkatan produksi tanaman pangan dan kemandirian pangan.

**Tabel 2.74 Luas Lahan Sawah Menurut Kecamatan dan Jenis Pengairan di Kabupaten Tanah Laut (ha), 2019**

No.	Kecamatan	Jenis Pengairan		Jumlah
		Irigasi	Non Irigasi	
1.	Panyipatan	1.389	8130	9.519
2.	Takisung	1.625	5646	7.271
3.	Kurau	-	8257	8.257
4.	Bumi Makmur	-	13014	13014
5.	Bati-Bati	-	11500	11.500
6.	Tambang Ulang	-	6530	6.530
7.	Pelaihari	1.936	11051	12.987
8.	Bajuin	1.249	17020	18.269
9.	Batu Ampar	122	6939	7.061
10.	Jorong	227	1192	1.419
11.	Kintap	110	1173	1.283
<b>Jumlah</b>		<b>6658</b>	<b>66.852</b>	<b>214.270</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2019

Selain lahan sawah, Kabupaten Tanah Laut juga memiliki lahan tegal/kebun, ladang/huma, dan lahan yang sementara tidak diusahakan. Berdasarkan data luas lahan yang ada, lahan yang ada di Kabupaten Tanah Laut sebagian besar sudah dimanfaatkan. Hal ini terlihat pada luas lahan yang sementara tidak digunakan mempunyai luas yang kecil yaitu sebesar 8.940 ha dibandingkan jumlah lahan tegal dan ladang yaitu sebesar 8.002 ha. Secara keseluruhan, luas lahan tegal/kebun di Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2019 sebesar 36.715 ha. Kecamatan dengan luas lahan tegal/kebun terbesar berturut-turut adalah Kecamatan Takisung dengan luas 7.585 ha, disusul Kecamatan Panyipatan dengan luas 6.597 ha, dan Kecamatan Jorong dengan

luas 5.972 ha. Sementara itu, luas ladang/huma di Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2019 adalah sebesar 8.002 ha. Luasan ladang/huma terbesar berada di Kecamatan Pelaihari yaitu sebesar 1.813 ha, diikuti oleh Kecamatan Bajuin sebesar 1.297 ha, dan Kecamatan Tambang Ulang sebesar 1.295 ha.

**Tabel 2.75 Luas Lahan Tegal/Kebun, Ladang/huma, dan Lahan yang Sementara Tidak Diusahakan Menurut Kecamatan di Kabupaten Tanah Laut, 2019**

No.	Kecamatan	Jenis Lahan		
		Tegal/Kebun	Ladang/huma	Sementara Tidak Diusahakan
1.	Panyipatan	6.597	650	200
2.	Takisung	7.585	-	2.335
3.	Kurau	450	-	-
4.	Bumi Makmur	-	-	-
5.	Bati-Bati	1.500	1.120	1.542
6.	Tambang Ulang	1.904	1.295	1.445
7.	Pelaihari	3.329	1.813	205
8.	Bajuin	1.289	1.297	6372
9.	Batu Ampar	5.939	350	181
10.	Jorong	5.972	692	2229
11.	Kintap	2.150	785	576
<b>Jumlah</b>		<b>36.715</b>	<b>8002</b>	<b>8940</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2020

Menurut jenis tanaman pangan yang dihasilkan, tanaman pangan yang dibudidayakan penduduk Kabupaten Tanah Laut diantaranya adalah padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu, dan ubi jalar. Padi merupakan salah satu bahan makanan terpenting yang dihasilkan oleh masyarakat di Kabupaten Tanah Laut. Padi, terutama padi sawah merupakan salah satu komoditi unggulan di Kabupaten Tanah Laut. Luas panen padi sawah pada tahun 2015 adalah seluas 55.232 ha, kemudian pada tahun 2019 menjadi seluas 55.714 ha. Dari sisi produksi, dengan peningkatan luas panen, maka produksi padi sawah juga meningkat signifikan hingga mencapai 100%. Produksi padi sawah pada tahun 2018 adalah sebesar 293.608 ton dan pada 2019 menjadi sebesar 271.941 ton. Luas panen padi ladang juga meningkat dimana luas panen pada tahun 2018 adalah seluas 2.071 ha dan pada tahun 2019 meningkat menjadi seluas 5.469 ha.



**Tabel 2.76 Perkembangan Luas Panen dan Produksi Padi Ladang dan Padi Sawah di Kabupaten Tanah Laut, 2014-2019**

Tahun	Padi Sawah		Padi Ladang	
	Luas Panen (ha)	Produksi (ton)	Luas Panen (ha)	Produksi (ton)
2014	42.011	151.860	2.717	7.526
2015	45.513	167.041	1.852	5.315
2016	48.613	190.927	2.651	10.336
2017	53.869	300.819	2.967	11.169
2018	55.232	293.608	2.071	7.231
2019	55.714	271.941	5.469	20.941

Sumber: SIPD *cit.* Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2020

Jika dirinci menurut kecamatan, luas panen padi sawah terbesar berada di Kecamatan Kurau yang mencapai 10.471 ha, disusul Kecamatan Panyipatan seluas 7.290 ha, dan Kecamatan Bumi Makmur seluas 7.187 ha. Dari sisi produksi, produsen padi sawah terbesar justru berasal dari Kecamatan Bumi Makmur yang mencapai 43.611 ton. Hal tersebut mengindikasikan bahwa tingkat produktivitas padi sawah di Kecamatan Bumi Makmur lebih baik dibandingkan Kecamatan Kurau. Posisi kedua penghasil padi sawah terbesar adalah Kecamatan Panyipatan yaitu sebesar 48.274 ton, dan Kecamatan Kurau sebesar 43.476 ton. Untuk padi ladang, terdapat 2 kecamatan yang tidak memiliki luasan padi ladang yaitu Kecamatan Bumi Makmur dan Kurau. Luas panen padi ladang terbesar berada di Kecamatan Panyipatan yaitu seluas 1.175 ha dengan produksi mencapau 4.934 ton.

**Tabel 2.77 Luas Panen dan Produksi Padi Ladang dan Padi Sawah Menurut Kecamatan di Kabupaten Tanah Laut, 2019**

No.	Kecamatan	Padi Sawah		Padi Ladang	
		Luas Panen (ha)	Produksi (ton)	Luas Panen (ha)	Produksi (ton)
1.	Panyipatan	7.290	36.327	1.175	4.934
2.	Takisung	3.213	17.574	514	1.578
3.	Kurau	10.471	43.476	-	-
4.	Bumi Makmur	7.187	43.611	-	-
5.	Bati-bati	4.359	19.530	65	196
6.	Tambang Ulang	4.092	16.666	245	745
7.	Pelaihari	5.257	28.457	523	2.027
8.	Bajuin	2.886	2.886	200	803
9.	Batu Ampar	2.586	2.586	1.275	5.354
10.	Jorong	1.481	1.481	870	3.132
11.	Kintap	1.423	1.423	602	2.173
<b>Jumlah</b>		<b>50.245</b>	<b>251.000</b>	<b>5.469</b>	<b>20.941</b>

Sumber: SIPD *cit.* Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2020

Salah satu tanaman pangan lain yang dibudidayakan masyarakat Kabupaten Tanah Laut adalah jagung. Sama seperti padi sawah, jagung juga menjadi salah satu komoditi unggulan yang ada di Kabupaten Tanah Laut. Jagung merupakan salah satu jenis tanaman pangan yang memiliki luas panen terbanyak di Kabupaten Tanah Laut setelah padi.

Produksi jagung pada tahun 2019 sebesar 238.792 ton. Luas panen jagung seluas 36.020 ha. Kecamatan dengan luas panen jagung tertinggi adalah Kecamatan Panyipatan yaitu seluas 12.829 ha. Dengan tingginya luas panen, maka produksi jagung tertinggi juga berada di Kecamatan Panyipatan yaitu sebesar 103.915 ton.

**Tabel 2.78 Luas Panen dan Produksi Jagung Menurut Kecamatan di Kab. Tanah Laut, 2019**

No.	Kecamatan	Jagung	
		Luas Panen (ha)	Produksi (ton)
1.	Panyipatan	12.829	103.915
2.	Takisung	2.031	15.715
3.	Kurau	227	1.634
4.	Bumi Makmur	-	-
5.	Bati-bati	1.386	10.112
6.	Tambang Ulang	2.766	20.468
7.	Pelaihari	4.798	21.111
8.	Bajuin	1.091	7.543
9.	Batu Ampar	4.508	23.592
10.	Jorong	4.484	26.456
11.	Kintap	1.922	8.245
<b>Jumlah</b>		<b>36.020</b>	<b>238.792</b>

Sumber: SIPD *cit.* Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2020

### Tanaman Perkebunan

Jenis tanaman perkebunan yang potensial menjadi tanaman andalan adalah tanaman kelapa sawit dan karet. Luas areal tanaman karet, termasuk luas area yang belum menghasilkan dan rusak, mengalami peningkatan setiap tahunnya selama periode 2014-2019. Luas areal perkebunan karet pada tahun 2018 adalah seluas 9.678 ha dan meningkat tahun 2019 menjadi seluas 14.966 ha.. Pada tahun 2018, produksi karet adalah sebesar 7.250,82 ton dan pada tahun 2019 meningkat menjadi 7.619 ton. Produksi dan luas areal yang ditunjukkan pada tabel-tabel perkembangan luas areal dan produksi tanaman perkebunan di bawah tidak termasuk luas dan produksi perkebunan besar negara dan perkebunan besar swasta.

**Tabel 2.79 Perkembangan Luas Areal dan Produksi Karet, Kelapa, dan Kelapa Sawit di Kabupaten Tanah Laut, 2014-2019**

Tahun	Karet		Kelapa		Kelapa Sawit	
	Luas Areal (ha)	Produksi (ton)	Luas Areal (ha)	Produksi (ton)	Luas Areal (ha)	Produksi (ton)
2014	14.433	-	1.146	-	11.651	14.383,0
2015	14.746	6.437,2	1.011	336,54	11.822	15.191,4
2016	18.652	6.407,8	844	327,04	11.823	15.339,3
2017	14.746	6.437,2	1.034	883,96	11.821	17.109,7
2018	9.678	7.250,82	902	889,19	18.953,05	18.953,05
2019	14.966	7.619	911	822,44	21.975,3	121.975,3

Sumber: SIPD *cit.* Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2020

Komoditi lainnya seperti kelapa sawit merupakan salah satu jenis tanaman perkebunan potensial di Kabupaten Tanah Laut. Luas areal maupun produksi kelapa sawit selama periode 2014-2019 mengalami peningkatan. Luas maupun produksi terus mengalami peningkatan hingga pada tahun 2019 luas areal kelapa sawit mencapai 21.975,3 ha dengan produksi 121.975,3 ton.

Berbeda dengan luas dan produksi kelapa sawit yang terus meningkat, luas areal dan produksi komoditi kelapa cenderung berfluktuasi. Pada tahun 2018, luas areal komoditi kelapa adalah seluas 902ha dengan produksi sebesar 889,19 ton. Pada tahun 2019 produksi kelapa meningkat mencapai 911 ton.

### **Peternakan**

Kabupaten Tanah Laut dikenal sebagai salah satu pusat peternakan di Provinsi Kalimantan Selatan. Jenis ternak yang dibudidayakan penduduk di Kabupaten Tanah Laut meliputi jenis ternak besar (sapi dan kerbau), ternak kecil (kambing, domba, dan babi), dan ternak unggas (ayam buras, ayam ras, dan itik). Selama periode 2014-2019, populasi ternak besar, ternak kecil, maupun ternak unggas cenderung berfluktuatif. Populasi sapi perah di Kabupaten Tanah Laut terus mengalami penurunan selama periode 2018 hingga 2019. Populasi sapi perah pada tahun 2018 adalah sebanyak 35 ekor, selanjutnya menurun menjadi 34 ekor pada tahun berikutnya. Populasi sapi potong pada tahun 2018 adalah sebanyak 85.086 ekor dan mengalami penurunan hingga pada tahun 2019 populasi sapi potong menjadi 90.064 ekor. Selama periode 2014-2019, populasi kerbau terbanyak terjadi pada tahun 2019 dengan populasi sebanyak 4.166

ekor. Pada tahun 2018, populasi kerbau menjadi 4.072 ekor. Pada tahun 2019, populasi kerbau di Kabupaten Tanah Laut adalah sebanyak 4.166 ekor.

**Tabel 2.80 Perkembangan Populasi Ternak dan Unggas di Kab. Tanah Laut (ekor), 2014-2019**

Jenis Ternak	Populasi (ekor)					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Ternak Besar						
Sapi Perah	13	11	14	24	35	34
Sapi Potong	56.571	61.225	65.155	75.641	85.086	90.064
Kerbau	3.265	3.280	3.078	3.692	4.072	4.166
Ternak Kecil						
Kambing	14.829	14.797	14.784	20.808	25.776	7.453
Domba	292	244	202	178	137	95
Babi	15	-	-	-	-	-
Ternak Unggas						
Ayam Buras	1.686.487	2.210.147	2.733.807	2.426.741	2.584.797	2.734.522
Ayam Petelur	4.023.256	5.244.362	6.473.994	6.729.689	7.394.025	7.783.193
Ayam Pedaging	26.438.945	49.061.691	50.693.299	51.375.593	48.342.321	71.115.644
Itik	267.505	256.511	232.959	192.333	198.282	208.235

Sumber: SIPD *cit.* Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018

Pada tahun 2018, populasi ternak kecil seperti kambing mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Populasi kambing terbesar terjadi pada tahun 2018 yaitu sebanyak 25.776 ekor, sementara untuk domba populasinya cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2012, populasi domba adalah sebanyak 137 ekor dan pada tahun 2019 berkurang menjadi sebanyak 95 ekor. Berbeda dengan ternak besar dan kecil yang rata-rata mengalami kenaikan dan penurunan pada populasinya, populasi jenis unggas cenderung mengalami peningkatan selama periode 2014-2019. Pada tahun 2019 populasi ayam buras dan ayam ras adalah 2.734.522 ekor ayam buras, 7.783.193 ekor ayam petelur, dan 71.115.644 ekor ayam pedaging. Sementara itu, populasi itik di Kabupaten Tanah Laut mengalami peningkatan pada tahun 2018 dan 2019.

#### 2.1.3.2.4 Perdagangan

Unit usaha perdagangan di Kabupaten Tanah Laut dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu pedagang besar, pedagang menengah, dan pedagang kecil. Jumlah pedagang besar pada tahun 2019 adalah sebanyak 9 unit usaha yang tersebar di 3 kecamatan. Sebagai pusat perekonomian di Kabupaten Tanah Laut, Kecamatan

Pelaihari memiliki unit pedagang besar terbanyak yaitu sebanyak 2 unit. Kecamatan lain yang memiliki unit pedagang besar adalah Kecamatan Bati-bati sebanyak 1 unit dan Kintap yang masing-masing memiliki 6 unit. Untuk pedagang menengah, jumlahnya pada tahun 2019 adalah sebanyak 290 unit yang tersebar di seluruh kecamatan. Sama seperti pada pedagang besar, Kecamatan Pelaihari juga memiliki jumlah unit pedagang menengah terbesar yaitu sebanyak 21 unit, disusul Kecamatan Bati-Bati sebanyak 9 unit, dan Kecamatan Jorong sebanyak 5 unit. Untuk pedagang kecil, jumlahnya pada tahun 2019 adalah sebanyak 624 unit. Sama seperti pada pedagang menengah, unitnya tersebar di seluruh kecamatan dengan kecamatan yang paling banyak memiliki unit pedagang kecil adalah Kecamatan Pelaihari (2.99 unit).

**Tabel 2.81 Jumlah Pedagang Menurut Kecamatan di Kabupaten Tanah Laut, 2019**

No.	Kecamatan	Pedagang Besar	Pedagang Menengah	Pedagang Kecil
1.	Panyipatan	-	2	41
2.	Takisung	-	-	40
3.	Kurau	-	-	22
4.	Bumi Makmur	-	-	5
5.	Bati-bati	1	9	41
6.	Tambang Ulang	-	1	23
7.	Pelaihari	2	21	299
8.	Bajuin	-	-	18
9.	Batu Ampar	-	1	34
10.	Jorong	-	5	56
11.	Kintap	6	1	45
<b>Jumlah</b>		<b>9</b>	<b>39</b>	<b>624</b>

Sumber: SIPD *cit.* Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2020

#### 2.1.3.2.5 Transmigrasi

Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka pemerataan penduduk yaitu dengan perpindahan penduduk dari kawasan padat penduduk ke kawasan yang jarang penduduknya melalui program transmigrasi. Transmigrasi lokal yaitu transmigrasi yang dilakukan masih dalam satu provinsi dan biasanya dilakukan secara massal. Transmigrasi swakarya adalah jenis transmigrasi yang bertujuan untuk memberikan pekerjaan dan jaminan hidup selama beberapa bulan kepada transmigran. Sedangkan transmigrasi bedol desa adalah transmigrasi yang dilakukan bersama-sama oleh penduduk satu desa beserta aparatur pemerintahan dari desa tersebut. Tujuan dari transmigrasi selain untuk pemerataan penduduk adalah untuk

penyediaan lapangan pekerjaan dan meningkatkan taraf hidup para transmigran, serta pemerataan pembangunan. Transmigrasi di Kabupaten Tanah Laut terakhir berjalan pada tahun 2008 dengan jumlah transmigran sebesar 100 KK.

#### 2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah

##### 2.1.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Infrastruktur adalah salah satu faktor penting yang diperlukan untuk meningkatkan daya saing daerah, karena dengan infrastruktur yang baik akan mempermudah kehidupan suatu wilayah. Lebih dari itu, pembangunan infrastruktur juga pada akhirnya akan mendorong perekonomian daerah karena adanya kemudahan aksesibilitas.

##### 2.1.4.2.1 Luas Wilayah Produktif

Luas wilayah yang dimiliki Kabupaten Tanah Laut seluas 3.631,35 km<sup>2</sup>. Rencana Kawasan budidaya yang telah ditetapkan di dalam dokumen RTRW Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016-2036 terdiri dari kawasan peruntukan hutan produksi, kawasan peruntukan permukiman, kawasan peruntukan industri, kawasan peruntukan pertanian, kawasan peruntukan perikanan, kawasan peruntukan pertambangan, kawasan peruntukan pariwisata, dan kawasan peruntukan lainnya. Kawasan peruntukan hutan produksi terdiri atas hutan produksi terbatas seluas 5.204,96 ha di Kecamatan Kintap, hutan produksi tetap seluas 68.764,87 ha, dan hutan produksi konversi seluas 9.739,52 ha. Untuk kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Tanah Laut meliputi kawasan pertanian tanaman pangan yang terdiri dari kawasan pertanian lahan basah seluas 42.322,38 ha, kawasan pertanian lahan kering seluas 44.904,74 ha, kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan seluas 39.425,54 ha, dan proyeksi untuk cadangan lahan pertanian pangan berkelanjutan seluas 2.680,82 ha. Kawasan hortikultura di Kabupaten Tanah Laut tersebar di 10 kecamatan dengan luasan keseluruhan sebesar 786 ha. Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut telah menetapkan pusat agropolitan di Kecamatan Pelaihari, Batu Ampar, Panyipatan, dan Kurau. Kawasan perkebunan yang dikembangkan di Kabupaten Tanah Laut seluas 106.233,30 ha yang tersebar di seluruh kecamatan termasuk Kawasan agropolitan. Kawasan peternakan yang dikembangkan merupakan pengembangan komoditas sapi, sapi perah, kerbau rawa, dan kerbau darat.

Kawasan peruntukan budidaya perikanan sebesar kurang lebih 3.969,35 ha, termasuk didalamnya kawasan Minapolitan seluas kurang lebih 530,95 ha terdiri atas: (1) perikanan budidaya air tawar meliputi jenis ikan introduksi dan jenis ikan lokal tersebar di setiap kecamatan; (2) perikanan budidaya air laut meliputi ikan, udang, kepiting, kerang-kerang, serta rumput laut di Kecamatan Kintap, Jorong, Panyipatan, Takisung, Kurau, dan Bumi Makmur; dan (3) perikanan budidaya air payau meliputi udang, bandeng dan kepiting terdapat di Kecamatan Panyipatan, Kecamatan Takisung, Kecamatan Jorong, Kecamatan Kurau, Kecamatan Bumi Makmur dan Kecamatan Kintap. Kawasan pengolahan hasil perikanan meliputi industri kecil rumah tangga berbasis minapolitan terdapat di Kecamatan Bati-Bati, Kecamatan Kintap, Kecamatan Jorong, Kecamatan Kurau, Kecamatan Takisung, Kecamatan Panyipatan; dan Kawasan konservasi seluas kurang lebih 3.080,09 ha terdapat di Kecamatan Kintap, Kecamatan Jorong, Kecamatan Takisung, dan Kecamatan Kurau.

#### 2.1.4.2.2 Luas Wilayah Industri

Berdasarkan RTRW Kabupaten Tanah Laut 2016-2036 kawasan industri atau pusat kawasan ekonomi khusus di Kabupaten Tanah Laut berlokasi di Kecamatan Jorong. Selain berfungsi sebagai kawasan industri, Kecamatan Jorong juga berfungsi sebagai pusat kawasan industri berat dan pusat kawasan pertambangan. Kawasan ekonomi khusus ini dibentuk untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi aktivitas investasi, ekspor, impor, dan perdagangan dalam rangka mendorong perekonomian suatu wilayah. Lebih dari itu kawasan ekonomi khusus juga bertujuan untuk mempercepat pembangunan dan mengurangi kesenjangan dalam masyarakat melalui aktivitas-aktivitas ekonomi yang memberikan nilai tambah, dan juga membangun daya saing dengan memanfaatkan potensi wilayah yang dimiliki. Sedangkan kawasan industri bertujuan untuk mengendalikan tata ruang, meningkatkan upaya industri yang berwawasan lingkungan, mempercepat pertumbuhan industri di daerah, meningkatkan daya saing industri dan investasi, serta memberikan kepastian lokasi dalam perencanaan dan pembangunan infrastruktur yang terkoordinasi antar sektor terkait. Komoditi unggulan industri pengolahan adalah industri pengolahan makanan yang memiliki jumlah perusahaan, tenaga kerja, dan nilai produksi terbanyak di Kabupaten Tanah Laut. Walaupun jumlah investasi dan nilai produksi terbesar berada di Kecamatan Bati-Bati lalu setelah itu disusul oleh kecamatan Jorong. Namun

demikian, dengan adanya penetapan Kecamatan Jorong sebagai kawasan industri diharapkan kedepannya mampu bersaing dengan Kecamatan Bati-Bati.

Kawasan peruntukan industri seluas kurang lebih 10.878,50 ha yang terdiri atas kawasan peruntukan industri besar, kawasan peruntukan industri menengah, dan kawasan peruntukan industri kecil atau industri rumah tangga. Rencana kawasan peruntukan industri besar meliputi industri pertambangan dan perkebunan di Kecamatan Jorong dan Kecamatan Kintap. Rencana kawasan peruntukan industri menengah terdiri dari pengembangan industri pengolahan dan industri pertanian di Kecamatan Bati-Bati dan Kecamatan Tambang Ulang dan pengembangan industri pengolahan hasil laut sebagai penunjang minapolitan di Kecamatan Bati-Bati dan Kecamatan Tambang Ulang. Rencana kawasan peruntukan industri kecil atau industri rumah tangga tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Tanah Laut.

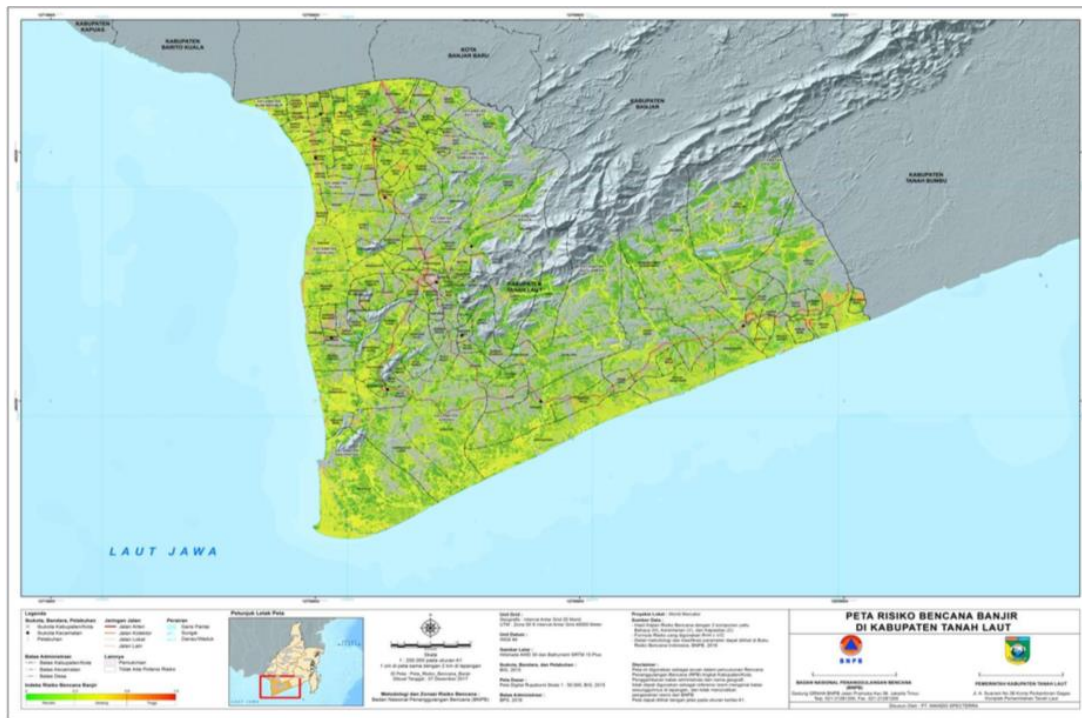
#### 2.1.4.2.3 Luas Wilayah Kebanjiran dan Kekeringan

Kawasan potensi rawan banjir adalah daerah dengan tingkat kerawanan tinggi meliputi (a) Kecamatan Pelaihari terdapat di Desa Panjaratan; (b) hampir semua desa di Kecamatan Kurau; (c) Kecamatan Bati-Bati di Desa Benua Raya dan Bati-Bati; (d) Kecamatan Takisung di Desa Tabanio, Kuala Tambangan, Takisung, Gunung Makmur, Benua Tengah, dan Pagatan Besar; (e) Kecamatan Jorong di Desa Sabuhur, Jorong, Asam-Asam, Swarangan, dan Muara Asam-Asam; (f) Kecamatan Panyipat di Desa Kuringkit, Batu Mulya dan Bumi Asih; (g) Kecamatan Kintap di Desa Kintap, Kintapura, Riam Adungan, Muara Kintap, Salaman, Kintap Kecil, dan Pasir Putih; (h) Kecamatan Tambang Ulang di Desa Tambang Ulang; (i) Kecamatan Batu Ampar; (j) Kecamatan Bajuin di Desa Bajuin, Kunyit, dan Sungai Bakar; dan (k) hampir semua desa di Kecamatan Bumi Makmur. Ancaman bahaya banjir di Kabupaten Tanah Laut termasuk pada kelas tinggi dengan areal yang terdampak bisa mencapai 182.755 ha.

Untuk bencana kekeringan, potensi bahayanya termasuk dalam kategori sedang dengan luasan terdampak dapat mencapai 363.135 ha. Potensi penduduk yang terpapar kekeringan adalah sebanyak 338.291 jiwa dimana kelompok umur rentan yang terpapar mencapai 23.809 jiwa, penduduk miskin sebanyak 56.698 jiwa, dan penduduk cacat sebanyak 802 jiwa. Potensi kerugian akibat kekeringan di Kabupaten Tanah Laut dapat mencapai Rp 2,12 miliar dengan potensi kerusakan lingkungan seluas 66.583 ha. Di satu sisi, kelas ketahanan daerah dalam menghadapi kekeringan masih dalam kategori

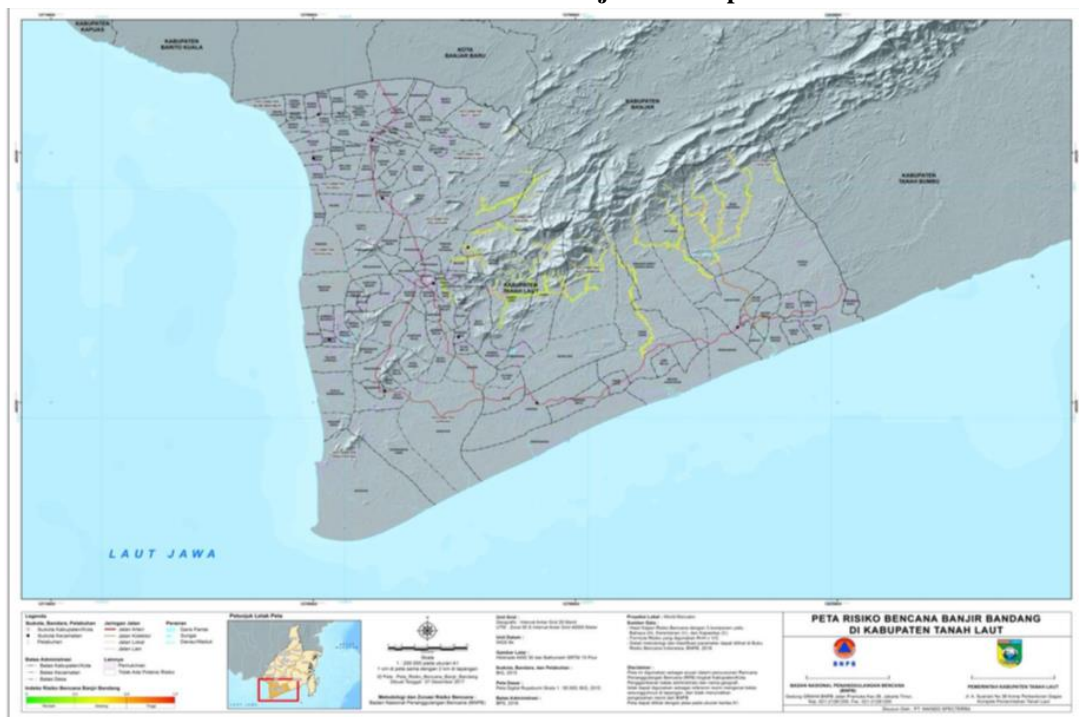


sedang dengan kelas kesiapsiagaan yang rendah sehingga kelas kapasitas daerah masih dalam kategori rendah.



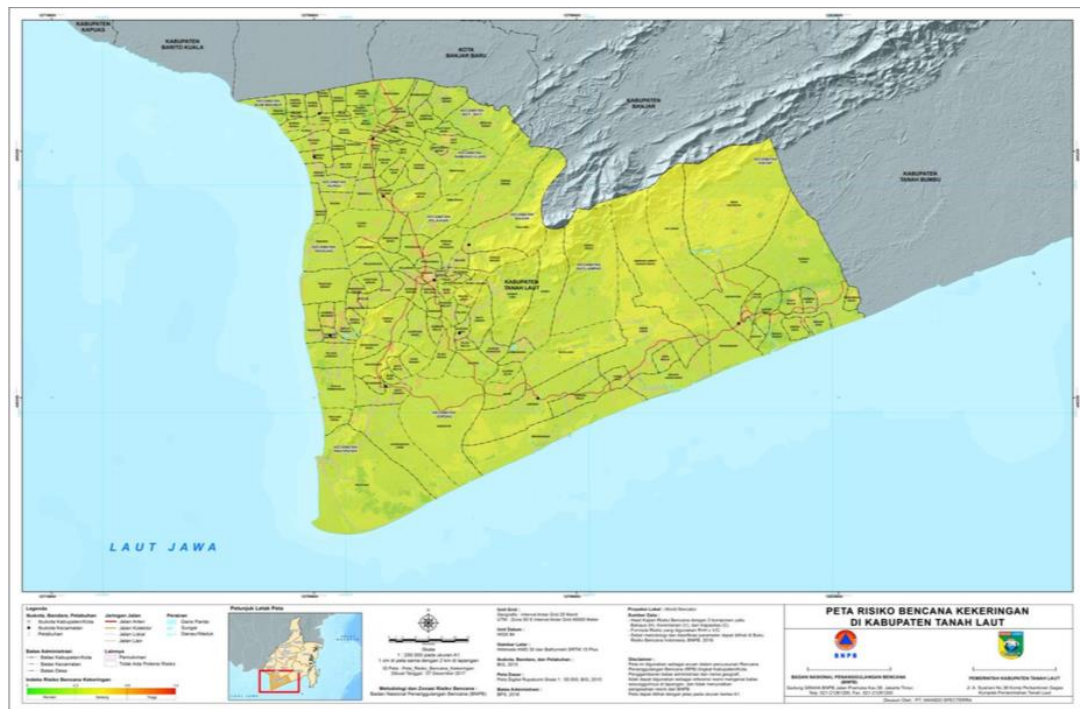
Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut, 2018

**Gambar 2.16 Peta Risiko Bencana Banjir di Kabupaten Tanah Laut**



Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut, 2018

**Gambar 2.17 Peta Risiko Bencana Banjir Bandang di Kabupaten Tanah Laut**



Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut, 2018

**Gambar 2.18 Peta Risiko Bencana Kekeringan di Kabupaten Tanah Laut**

#### 2.1.4.2.4 Luas Wilayah Perkotaan

Pemerintah Kabupaten telah menyusun Rencana Tata Ruang Tata Wilayah (RTRW) Kabupaten Tanah Laut 2016-2036. Di dalam dokumen tersebut disebutkan bahwa kawasan perkotaan adalah wilayah yang kegiatan utamanya bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi. Sistem perkotaan terdiri dari Pusat kegiatan Lokal (PKL), Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp), Pusat Pelayanan Kawasan (PPK), dan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL).

Pusat kegiatan Lokal (PKL) berada di Perkotaan Pelaihari yaitu sebagai Ibukota Kabupaten Tanah Laut dengan luas daerah perkotaan sekitar 60 km<sup>2</sup>. Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp) yakni Perkotaan Bati-Bati sebagai salah satu Kota Satelit Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Perkotaan Banjar Bakula dengan luas perkotaan kurang lebih 28 km<sup>2</sup>, dan Perkotaan Jorong sebagai Kawasan Strategis Nasional Jorong sebagai kawasan industri, luas Perkotaan Jorong kurang lebih 76 km<sup>2</sup>. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) terdiri dari Perkotaan Takisung dan Kintap. Perkotaan Takisung

berfungsi sebagai pusat pelayanan pemerintahan skala kecamatan, pusat kegiatan baik itu pertanian, perkebunan, perdagangan maupun jasa dalam skala kecamatan, dan juga sebagai pelayanan kegiatan pariwisata di beberapa desa untuk skala lokal dan provinsi. Luas kawasan perkotaan takisung sekitar 45 km<sup>2</sup>. Sedangkan Perkotaan Kintap berfungsi sebagai pusat kegiatan industri, permukiman, perdagangan dan jasa skala kabupaten dan beberapa kecamatan, luas Perkotaan Kintap sekitar 48 km<sup>2</sup>. Kabupaten Tanah Laut juga menetapkan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) yaitu pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa. PPL menurut RTRW Kabupaten Tanah Laut terdiri dari Desa Kurau Kecamatan Kurau, Desa Handil Babirik Kecamatan Bumi Makmur, Desa Tambang Kecamatan Tambang Ulang, Desa Batu Ampar Kecamatan Batu Ampar, Desa Panyipatan Kecamatan Panyipatan. Dan Desa Bajuin Kecamatan Bajuin.

#### 2.1.4.2.5 Fasilitas Jasa Perbankan

Fasilitas jasa perbankan merupakan hal yang penting dalam mendukung aspek daya saing daerah. Perbankan memiliki peran penting yakni memberikan kemudahan kepada masyarakat terkait dengan transaksi keuangan. Selain itu, bank juga memberikan fasilitas penyimpanan dana serta penyaluran dana kepada masyarakat. Sehingga bank dapat menjadi salah satu pihak yang membantu perputaran roda perekonomian suatu daerah. Di Kabupaten Tanah Laut, terdapat 8 bank nasional yang beroperasi yaitu Bank BNI, Bank BRI, Bank BTN, Bank BTPN, Bank Danamon, Bank Kalsel, Bank Mandiri, dan Bank Mandiri Syariah baik berupa bank cabang, cabang pembantu, atau bank unit.

**Tabel 2.82 Jumlah Bank di Kabupaten Tanah Laut, 2018**

No.	Nama Bank	Jumlah (unit)	Jenis dan Lokasi
1.	BNI	2	Kantor Kas BNI KK Asam-Asam Kantor Bank BNI KCP Pelaihari
2.	BRI	16	Kantor Kas BRI Teras Pasar Batu Ampar Kantor Kas BRI Teras Sarang Halang Kantor Kas BRI Teras Angsau Kantor Kas BRI Teras Nusa Indah Kantor Kas BRI Teras Pasar Pelaihari Kantor Kas BRI Teras RSUD H. Boedjasin BRI Teras Keliling KCP Bank BRI Unit Sungai Cuka KCP Bank BRI Unit Kintap KCP Bank BRI Unit Bati-Bati KCP Bank BRI Unit Gagasan

No.	Nama Bank	Jumlah (unit)	Jenis dan Lokasi
			KCP Bank BRI Unit Pelaihari Kota
			KCP Bank BRI Unit Takisung
			KCP Bank BRI Unit Jorong
			KCP Bank BRI Unit Asam-Asam
			Kantor Cabang BRI Pelaihari
3.	BTN	7	Kantor Kas BTN Pelaihari
			Kantor Kas BTN Takisung
			Kantor Kas BTN Kurau
			Kantor Kas BTN Kintap
			Kantor Kas BTN Tajau Pecah
			Kantor Kas BTN Batu Tungku
			Kantor Kas BTN Bat-Bati
4.	Bank Mandiri	2	Kantor Fungsional Bank Mandiri Pasar Pelaihari
			KCP Bank Mandiri Pelaihari
5.	Bank Mandiri Syariah	1	KCP Bank Mandiri Syariah Pelaihari
6.	Bank Kalsel	8	KCP Bank Kalsel Unit Asam-Asam
			KCP Bank Kalsel Unit Bati-Bati
			KCP Bank Kalsel Pemerintah Kabupaten Tanah Laut
			Bank Kalsel Keliling
			Layanan Syariah Bank Kalsel KCP Pemkab Tanah Laut
			Layanan Syariah Bank Kalsel LS Unit Asam-Asam
			Layanan Syariah Bank Kalsel LS Cabang Pelaihari
7.	Bank BTPN	1	Kantor Cabang Bank Kalsel Pelaihari
			KCP BTPN Pelaihari
8.	Bank Danamon	1	KCP Bank Danamon Tapandang Berseri Pelaihari

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018

#### 2.1.4.2.6 Fasilitas Hotel dan Rumah Makan

Pengembangan sektor pariwisata perlu didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana penunjang seperti hotel dan penginapan. Perkembangan jumlah penginapan sendiri dapat menunjukkan perkembangan perekonomian suatu daerah dan peluang-peluang yang ditimbulkannya. Jumlah hotel di Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2019 adalah sebanyak 15 hotel yang berada di dua kecamatan yaitu Kecamatan Pelaihari sebanyak 12 unit dan Kecamatan Jorong sebanyak 3 unit. Ketersediaan kamar pada hotel-hotel tersebut adalah sebanyak 291 kamar dengan tempat tidur sebanyak 167 unit. Sedangkan jumlah rumah makan/restoran tahun 2019 yaitu sebanyak 28 unit, dengan lokasi restoran terbanyak berada di Kecamatan Pelaihari yaitu sejumlah 22 unit.

**Tabel 2.83 Jumlah Hotel dan Rumah Makan Menurut Kecamatan di Kab. Tanah Laut, 2019**

No.	Kecamatan	Hotel			Rumah Makan
		Jumlah Hotel	Kamar	Tempat Tidur	
1.	Panyipatan	-	-	-	-
2.	Takisung	-	-	-	1
3.	Kurau	-	-	-	-
4.	Bumi Makmur	-	-	-	-
5.	Bati-bati	-	-	-	-
6.	Tambang Ulang	-	-	-	2
7.	Pelaihari	12	247	134	22
8.	Bajuin	-	-	-	-
9.	Batu Ampar	-	-	-	1
10.	Jorong	3	44	33	1
11.	Kintap	-	-	-	1
<b>Jumlah</b>		<b>15</b>	<b>291</b>	<b>167</b>	<b>28</b>

Sumber: SIPD *cit.* Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2020

#### 2.1.4.2 Fokus Iklim Berinvestasi

Penanaman modal memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan, karena selain dapat memberikan keuntungan kepada penanam modal, penanaman modal juga berfungsi untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif dan pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu pemerintah perlu untuk menyusun kebijakan yang mendorong penguatan daya saing perekonomian nasional. Investasi asing dan domestik yang akan masuk ke suatu wilayah/daerah bergantung kepada daya saing investasi yang dimiliki oleh wilayah/daerah yang bersangkutan, salah satu caranya adalah dengan memberikan kemudahan perizinan dalam proses pembuatan administrasi investasi.

##### 2.1.4.2.1 Lama Proses Perizinan

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut telah menetapkan panduan terkait proses perizinan di Kabupaten Tanah Laut. Panduan pelayanan tersebut ditujukan untuk kemudahan akses dan kepastian perizinan bagi kegiatan Penanaman modal di Kabupaten Tanah Laut yang pada akhirnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Dalam Peraturan Bupati Tanah Laut tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Atas Penerbitan Dan Kewenangan Penandatanganan Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Kabupaten Tanah Laut, telah ditetapkan berbagai perizinan dalam memulai usaha di

Kabupaten Tanah Laut. Proses perizinan tersebut telah ditampilkan pada situs resmi Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Tanah Laut di alamat [http://dpmptsp.tanahlautkab.go.id/website/web/page/40/informasi\\_izin](http://dpmptsp.tanahlautkab.go.id/website/web/page/40/informasi_izin). Rincian dan lama proses perizinan yang ada di Kabupaten Tanah Laut ditampilkan pada tabel berikut.

**Tabel 2.84 Jenis dan Lama Proses Perizinan di Kabupaten Tanah Laut, 2019**

No.	Jenis Perizinan	Persyaratan	Lama Proses Perizinan	Biaya (Rp)
1.	Izin Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Diketahui	3	Tanpa Biaya
2.	Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	Diketahui	3	Tanpa Biaya
3.	Izin Usaha Industri (IUI)	Diketahui	5	Tanpa Biaya
4.	Izin Tanda Daftar Industri (TDI)	Diketahui	3	Tanpa Biaya
5.	Izin Gangguan (HO)	Diketahui	-	Sesuai Perda
6.	Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUIJK)	Diketahui	5	Tanpa Biaya
7.	Izin Mendirikan/Membongkar Bangunan (IMB)	Diketahui	7	Sesuai Perda
8.	Izin Usaha Perkebunan	Diketahui	15	Tanpa Biaya
9.	Izin Usaha Hiburan Umum	Diketahui	3	Tanpa Biaya
10.	Izin Usaha Perhotelan/Penginapan	Diketahui	5	Tanpa Biaya
11.	Izin Usaha Rumah Makan	Diketahui	5	Tanpa Biaya
12.	Izin Reklame	Diketahui	3	Sesuai Perda
13.	Izin Pemanfaatan/Pemungutan Sarang Burung Walet	Diketahui	7	Tanpa Biaya
14.	Surat Izin Tempat Usaha (SITU)	Diketahui	3	Sesuai Perda
15.	Izin Usaha Peternakan	Diketahui	7	Tanpa Biaya
16.	Izin Pendaftaran Peternakan Rakyat	Diketahui	7	Tanpa Biaya
17.	Izin Penggilingan Padi	Diketahui	7	Tanpa Biaya
18.	Izin Usaha Perbengkelan	Diketahui	3	Tanpa Biaya
19.	Izin Penumpukan Bahan Bakar Minyak (BBM)	Diketahui	5	Tanpa Biaya
20.	Izin Praktek Dokter Hewan	Diketahui	4	Tanpa Biaya
21.	Izin Penyelenggaraan Kursus	Diketahui	3	Tanpa Biaya
22.	Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi	Diketahui	7	Sesuai Perda
23.	Izin Usaha Kepariwisata	Diketahui	5	Tanpa Biaya
24.	Izin Rumah Sakit dan Rumah Sakit Bersalin Swasta	Diketahui	12	Tanpa Biaya
25.	Izin Klinik Swasta	Diketahui	6	Tanpa Biaya
26.	Izin Klinik Perusahaan	Diketahui	6	Tanpa Biaya
27.	Izin Apotek	Diketahui	12	Tanpa Biaya
28.	Izin Toko Obat	Diketahui	12	Tanpa Biaya
29.	Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T)	Diketahui	12	Tanpa Biaya
30.	Izin Usaha Pusat Perbelanjaan	Diketahui	12	Tanpa Biaya
31.	Izin Usaha Toko Modern (IUTM)	Diketahui	7	Tanpa Biaya
32.	Izin Penangkapan Ikan (SIPI)	Diketahui	7	Tanpa Biaya
33.	Izin Prinsip Penanaman Modal	Diketahui	-	-
34.	Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal	Diketahui	-	-
35.	Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal	Diketahui	-	-
36.	Izin Prinsip Penggabungan Penanaman Modal (Merger)	Diketahui	-	-



No.	Jenis Perizinan	Persyaratan	Lama Proses Perizinan	Biaya (Rp)
37.	Izin Usaha Penanaman Modal	Diketahui	-	-
38.	Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal	Diketahui	-	-
39.	Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal	Diketahui	-	-
40.	Izin Usaha Penggabungan Penanaman Modal (Merger)	Diketahui	-	-
41.	Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Asing (IMTA) yang lokasi kerjanya dalam satu wilayah Kabupaten Tanah Laut	Diketahui	-	-

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Tanah Laut, 2020

#### 2.1.4.3 Fokus Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah aspek penting dalam pembangunan daerah maupun nasional, karena manusia merupakan obyek dan subyek pembangunan. Oleh karena itu, harapannya pembangunan SDM dapat meningkatkan etos kerja yang produktif, terampil, kreatif, disiplin, profesional, dan mampu memanfaatkan serta mengembangkan ilmu dan teknologi yang inovatif yang berguna untuk mendorong pembangunan nasional. Aspek daya saing SDM Kabupaten Tanah Laut dapat dilihat dari kualitas tenaga kerja dan ratio ketergantungannya.

## 2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD dan Realisasi RPJMD sampai dengan Tahun 2019

### 2.2.1. Capaian Kinerja RKPD Tahun 2019

Adapun capaian realisasi fisik dan keuangan belanja langsung per perangkat daerah dapat di lihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.85 Realisasi Belanja Langsung APBD Tahun 2019 per perangkat daerah**

No	SKPD	Pagu (Rp)	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik (%)
1	2	3	4	5
1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	9,579,717,912	6,658,233,926	69.5%
2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2,415,587,632	2,070,835,892	85.7%
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2,603,169,167	2,396,187,371	92.0%
4	Badan Pendapatan Daerah	4,887,612,990	2,673,819,975	54.7%
5	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	6,717,863,645	5,478,499,061	81.6%
6	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5,609,194,450	3,792,124,587	67.6%

No	SKPD	Pagu (Rp)	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik (%)
1	2	3	4	5
7	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	10,206,741,983	8,306,381,103	81.4%
8	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4,494,936,295	4,167,651,704	92.7%
9	Dinas Kesehatan	74,661,318,830	52,717,062,607	70.6%
10	Dinas Kesehatan Balai Laboratorium Kesehatan	300,627,240	270,435,204	90.0%
11	Dinas Kesehatan Instalasi Farmasi	433,154,800	380,497,770	87.8%
12	Dinas Kesehatan RSUD H. Boejasin Pelaihari	106,039,668,189	73,016,321,116	68.9%
13	Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Angsau	2,051,386,900	1,508,891,436	73.6%
14	Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Asam Asam	2,082,545,005	1,237,136,754	59.4%
15	Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Batakan	1,448,498,250	854,593,693	59.0%
16	Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Bati-Bati	2,955,221,660	2,158,025,090	73.0%
17	Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Bumi Makmur	1,384,111,232	1,096,555,957	79.2%
18	Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Jorong	1,406,277,120	1,384,425,520	98.4%
19	Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Kait-Kait	1,021,756,858	1,021,756,858	100.0%
20	Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Kintap	2,991,994,955	1,449,973,866	48.5%
21	Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Kurau	1,271,263,939	660,471,634	52.0%
22	Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Padang Luas	1,237,041,971	899,456,144	72.7%
23	Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Panyipatan	1,369,361,511	1,106,514,791	80.8%
24	Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Pelaihari	3,289,839,356	3,289,839,356	100.0%
25	Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Sungai Cuka	1,356,085,500	952,792,743	70.3%
26	Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Sungai Riam	817,422,850	526,713,998	64.4%
27	Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Tajau Pecah	2,280,799,675	1,566,431,329	68.7%
28	Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Takisung	2,702,932,937	2,282,223,952	84.4%
29	Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Tambang Ulang	1,689,981,595	1,018,437,877	60.3%
30	Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Tanjung Habulu	1,080,936,267	684,520,717	63.3%
31	Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Tirta Jaya	1,044,030,064	879,641,777	84.3%
32	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	3,479,046,102	3,125,722,834	89.8%
33	Dinas Komunikasi dan Informatika	3,437,925,460	2,992,782,867	87.1%
34	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan	8,072,153,685	7,038,762,517	87.2%
35	Dinas Pariwisata	8,561,708,188	8,256,491,634	96.4%
36	Dinas Pariwisata UPT. Obyek Wisata Pantai Takisung	73,273,150	59,056,531	80.6%
	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang	191,979,523,256	178,287,905,854	92.9%



No	SKPD	Pagu (Rp)	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik (%)
1	2	3	4	5
37	dan Pertanahan			
38	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan UPT Laboratorium Dinas Pekerjaan Umum	223,058,300	141,967,950	63.6%
39	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan UPT Peralatan Dinas Pekerjaan Umum	402,374,650	229,778,294	57.1%
40	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	8,908,611,305	6,670,262,501	74.9%
41	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2,062,524,539	1,839,090,532	89.2%
42	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	102,119,726,137	90,709,591,140	88.8%
43	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	6,252,942,792	5,669,476,392	90.7%
44	Dinas Perhubungan	6,341,223,746	5,922,658,046	93.4%
45	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1,811,630,448	1,542,495,808	85.1%
46	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	38,071,952,156	30,206,157,872	79.3%
47	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	3,542,800,825	3,032,522,776	85.6%
48	Dinas Sosial	3,763,334,820	2,925,671,562	77.7%
49	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	18,055,359,912	16,168,593,787	89.6%
50	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	6,789,455,669	5,340,665,774	78.7%
51	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian UPT Balai Latihan Kerja	1,439,049,626	735,214,915	51.1%
52	Inspektorat Kabupaten	4,471,960,050	2,334,425,683	52.2%
53	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	6,770,338,387	6,182,772,476	91.3%
54	Sekretariat Daerah Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	828,639,450	760,374,164	91.8%
55	Sekretariat Daerah Bagian Perekonomian Pembangunan	1,087,098,200	818,795,778	75.3%
56	Sekretariat Daerah Bagian Tata Usaha dan Keuangan	10,447,569,094	9,642,078,549	92.3%
57	Sekretariat Daerah Bagian Tata Pemerintahan	1,392,580,500	797,482,336	57.3%
58	Sekretariat Daerah Bagian Hukum	1,030,656,300	768,824,310	74.6%
59	Sekretariat Daerah Bagian Organisasi	580,831,600	372,409,800	64.1%
60	Sekretariat Daerah Bagian Kesejahteraan Rakyat	21,918,206,100	20,564,766,354	93.8%
61	Sekretariat Daerah Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol	3,532,554,988	3,360,796,810	95.1%
62	Sekretariat Daerah Bagian Umum	17,962,982,471	14,699,940,134	81.8%
63	Sekretariat DPRD	47,543,286,200	37,257,400,641	78.4%
64	Kec Kurau Kantor Kurau	934,282,873	820,081,921	87.8%

No	SKPD	Pagu (Rp)	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik (%)
1	2	3	4	5
65	Kec Bati-Bati Kantor Bati-Bati	1,020,401,795	865,330,710	84.8%
66	Kec Tambang Ulang Kantor Tambang Ulang	975,317,200	939,357,099	96.3%
67	Kec Pelaihari	1,383,387,340	1,064,775,368	77.0%
68	Kec Bajuin Kantor Bajuin	940,470,592	869,485,759	92.5%
69	Kec Batu Ampar Kantor Batu Ampar	1,027,086,051	935,497,197	91.1%
70	Kec Panyipatan Kantor Panyipatan	1,905,544,468	1,770,316,083	92.9%
71	Kec Takisung Kantor Takisung	995,576,000	549,007,269	55.1%
72	Kec Jorong Kantor Jorong	902,874,408	821,573,918	91.0%
73	Kec Kintap Kantor Kintap	914,589,160	852,417,326	93.2%
74	Kec Bumi Makmur	1,072,076,721	965,161,039	90.0%
75	Pabahanan	239,698,350	98,353,405	41.0%
76	Angsau	1,130,651,865	1,003,993,793	88.8%
77	Pelaihari	1,129,807,000	928,304,195	82.2%
78	Karang Taruna	1,128,180,840	970,220,673	86.0%
79	Sarang Halang	1,121,989,778	975,059,232	86.9%
<b>JUMLAH</b>		<b>811,207,393,325</b>	<b>669,390,325,416</b>	<b>82,5%</b>

### 2.2.2 Faktor Penghambat, Faktor Pendorong dan Rekomendasi

Faktor penghambat dalam pencapaian kinerja Tahun 2019 antara lain :

1. Ada beberapa kegiatan yang keuangannya tidak terserap 100% dikarenakan adanya efisiensi.

Sedangkan faktor pendorong dalam pencapaian kinerja antara lain :

1. Adanya dokumen perencanaan dengan indikator kinerja yang terukur.
2. Tingginya komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan kinerja.

Rekomendasi untuk tindak lanjut perbaikan dan peningkatan kinerja selanjutnya antara lain :

1. Koordinasi pengendalian, monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan kegiatan lebih intensif dan dilaksanakan secara berkala.
2. Proses pengadaan barang/jasa agar dilakukan seawal mungkin
3. Meningkatkan kualitas pada tahapan perencanaan selanjutnya, baik pada saat survey harga pengadaan barang, pada penentuan dan perumusan output, maupun pada penyusunan aliran kas keuangan dan kinerja

### 2.2.3. Evaluasi terhadap hasil RKPD Kabupaten Tanah Laut tahun 2019

Hasil evaluasi terhadap hasil RKPD Kabupaten Tanah Laut tahun 2019 disajikan dalam lampiran tentang Evaluasi terhadap hasil RKPD Kabupaten Tanah Laut tahun 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam dokumen ini.

## 2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah

### 2.3.1 Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah

Pembangunan tahun 2021 yang merupakan tahun ketiga pelaksanaan RPJMD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023 dan akan menjabarkan strategi kebijakan maupun menjawab tantangan/ataupun permasalahan yang akan dihadapi. Isu dan permasalahan mendesak yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2021 yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah antara lain sebagai berikut.

1. Prioritas peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan sasaran daerah:
  - a. meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat, permasalahan yang dihadapi meliputi:
    - 1) belum optimalnya partisipasi pendidikan anak usia dini pada usia 0 – 6 tahun;
    - 2) Rata-rata lama sekolah dan Harapan Lama Sekolah Kabupaten Tanah Laut masih di bawah rata-rata lama sekolah propinsi Kalimantan Selatan dan Nasional;
    - 3) belum optimalnya partisipasi pendidikan dasar (pada SD dan SMP).
    - 4) meningkatkan muatan pendidikan dengan system online/daring
    - 5) meningkatkan akses pendidikan melalui system online/daring
  - b. meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, permasalahan yang dihadapi meliputi:
    - 1) Pelayanan kesehatan belum optimal;
    - 2) perlunya penguatan peran keluarga dan komunitas masyarakat untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia;
    - 3) perlunya peningkatan kesejahteraan dan ketahanan keluarga;
    - 4) masih adanya kasus kekerasan pada perempuan dan anak;

- 5) optimalisasi penyediaan sarana dan prasarana kesehatan bagi masyarakat
- 6) pembinaan bagi masyarakat agar menerapkan PHBS
- c. meningkatnya pelestarian/pengembangan budaya dan prestasi generasi muda, permasalahan yang dihadapi meliputi:
  - 1) belum optimalnya pelestarian nilai-nilai luhur budaya, adat dan tradisi, kehidupan seni, bahasa dan sastra;
  - 2) belum optimalnya perawatan peninggalan warisan budaya fisik (*tangible*) dan kelestariannya;
  - 3) belum optimalnya pengelolaan dan pengembangan keragaman seni dan budaya;
  - 4) belum optimalnya pembinaan cabang olahraga prestasi, cabang olahraga unggulan, dan kegiatan kepemudaan;
  - 5) sarana dan prasarana olahraga yang masih minim dan belum merata di seluruh wilayah Kabupaten Tanah Laut.
  - 6) sinergitas dalam hal pendanaan dan pembinaan pemuda dan olah raga
2. Prioritas Peningkatan Daya Saing Ekonomi dan Perlindungan Sosial dengan sasaran daerah:
  - a. Meningkatnya pendapatan masyarakat, permasalahan yang dihadapi meliputi
    - 1) Belum optimalnya produktivitas tenaga kerja
    - 2) Masih lambatnya progress Kawasan Industri Jorong
    - 3) Kurangnya pemberdayaan KUMKM;
    - 4) Belum optimalnya kualitas dan peran BUMD;
    - 5) Keterbatasan sarana prasarana dan belum adanya fasilitas rekreatif di obyek wisata yang mampu menjadi magnet kunjungan wisata;
    - 6) Lemahnya motivasi usaha dan jiwa kewirausahaan;
    - 7) Kemampuan dan kapasitas pengrajin pelaku usaha industri relatif masih rendah;
    - 8) Konsumsi pangan masyarakat masih kurang beragam, bergizi, seimbang.
    - 9) Peran masyarakat dan kelembagaannya dalam pembangunan pertanian, dan perikanan masih rendah.
    - 10) Sarana prasarana pertanian yang belum memadai. Sarana prasarana (alat mesin pertanian, benih/bibit, pupuk, pakan) yang belum memadai menyebabkan penerapan teknologi belum sesuai rekomendasi.

- 11) Keterbatasan kemampuan manajerial dan ketrampilan nelayan, pembudidaya ikan, pengolah dan pemasaran produk perikanan.
  - 12) Optimalisasi kawasan ekonomi terpadu
  - 13) Upaya pemberdayaan ekonomi desa melalui BUMDes
  - 14) Optimalisasi dan professional manajemen BUMD agar bisa memberikan pelayanan public dan peningkatan PAD bagi Daerah
  - 15) Menghidupkan dan mendorong berkembangnya ekonomi kreatif dan UMKM
3. Prioritas penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik untuk peningkatan pelayanan publik dengan sasaran daerah:
- a. Meningkatnya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel, permasalahan yang dihadapi meliputi:
    - 1) Belum optimalnya penegakan peraturan perundangan-undangan di daerah;
    - 2) Belum optimalnya sistem pengawasan dan evaluasi kinerja instansi pemerintah;
    - 3) Belum optimalnya kapasitas sumber daya aparatur;
    - 4) Sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan urusan komunikasi dan informatika kurang memadai;
    - 5) Kemampuan pengelolaan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintah di masing masing OPD belum merata.

**Efisiensi penggunaan anggaran keuangan daerah dan mendorong peningkatan pendapatan asli daerah**

- b. Meningkatnya kedisiplinan, ketertiban, dan kehidupan bermasyarakat yang kondusif, permasalahan yang dihadapi meliputi:
  - 1) Belum optimalnya pemberantasan penyakit masyarakat sehingga tindak pidana yang terjadi masih cukup tinggi.
  - 2) Adanya ancaman budaya dari luar yang menggerogoti ketentraman dan kenyamanan masyarakat.
  - 3) Kesadaran masyarakat dan pelaku usaha dalam mentaati Peraturan Daerah masih belum optimal.

4. Prioritas peningkatan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dengan sasaran daerah:
  - a. meningkatnya pelayanan infrastruktur yang berkualitas, permasalahan yang dihadapi:
    - 1) Belum optimal dan terbangunnya infrastruktur pendukung penopang Kawasan Industri Jorong;
    - 2) Masih terdapat jalan kabupaten di Kabupaten Tanah Laut dalam kondisi rusak.
    - 3) Belum optimalnya pengelolaan jaringan irigasi dan drainase;
    - 4) Masih tingginya rumah tangga di Kabupaten Tanah Laut yang belum memperoleh sanitasi layak.
    - 5) Perlengkapan jalan berupa APILL, rambu, marka, guardrail dan LPJU belum dapat mencapai target Standar Pelayanan Minimum.
  - b. meningkatnya pengelolaan kualitas lingkungan hidup, permasalahan yang dihadapi:
    - 1) Kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat serta pelaku usaha dalam pengelolaan lingkungan hidup;
    - 2) Menurunnya kualitas air sungai dan tutupan lahan;
    - 3) Belum tercapainya RTH sebesar 30 dari luas wilayah kota.
  - c. meningkatnya pengendalian pemanfaatan ruang, permasalahan yang dihadapi:
    - 1) Belum seluruh Kecamatan memiliki Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan belum seluruh Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) selesai disusun;
    - 2) Belum optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang.
    - 3) Belum memadainya pemahaman pelaku pembangunan daerah terhadap perencanaan yang berbasis pada perspektif tata ruang di wilayah Kabupaten Tanah Laut;

#### 2.3.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Dengan mempertimbangkan sumber daya, kondisi aktual, dan kemampuan keuangan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran, maka arah pembangunan selama satu tahun diupayakan untuk dapat memecahkan isu dan masalah mendesak sesuai

kewenangan urusan pemerintah daerah yang dihadapi saat ini dan diperkirakan akan dihadapi pada tahun 2021 serta solusi dari permasalahan tersebut. Permasalahan pada bagian ini merupakan permasalahan pembangunan yang dibuat tiap urusan yang menyangkut layanan dasar dan tugas/fungsi tiap Perangkat Daerah.

## I. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

---

### 1. Pendidikan

- a. Angka melek huruf di Kabupaten Tanah Laut menunjukkan bahwa masih ada penduduk Kabupaten Tanah Laut yang berumur 15 tahun ke atas belum/tidak dapat membaca dan menulis;
- b. Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Tanah Laut baru mampu menempuh pendidikan hingga kelas 1 SMP atau putus sekolah pada kelas 2 SMP.
- c. Angka Harapan Lama Sekolah pada akan dicapai anak umur tertentu di masa yang akan datang hanya pada pendidikan kelas 2 SMA.
- d. Tidak ada konsep bersama antara provinsi dan kabupaten terkait kerangka besar pendidikan sehingga tidak tercipta sinergitas dalam memajukan pendidikan di Provinsi Kalimantan Selatan. Hal tersebut ditunjukkan dengan masih tingginya disparitas kualitas pendidikan antar Kabupaten/Kota;
- e. Belum optimalnya pengembangan database tenaga pendidik yang telah memperoleh sertifikasi sehingga kualitas tenaga pengajar yang kurang baik akan mempengaruhi output siswa;

### 2. Kesehatan

- a. Masih terjadi kasus kematian Anak di Kabupaten Tanah Laut;
- b. Fasilitas pelayanan kesehatan terutama rumah sakit di Kabupaten Tanah Laut masih terpusat di Kecamatan Pelaihari (ibukota kabupaten). Selain itu, fasilitas RSUD yang ada kondisinya belum memadai terutama dalam hal daya tampung jumlah pasien. Pengembangan RSUD Kintap diharapkan dapat menjadi salah satu alternatif layanan fasilitas kesehatan selain di Kecamatan Pelaihari;
- c. Pembangunan RSUD di Kabupaten Pelaihari secara fisik yang selesai dikerjakan pada tahun 2018. Untuk optimalisasi pelayanan RSUD, diperlukan pengadaan sarana dan prasarana terutama alat kesehatan sehingga pelayanan kesehatan masyarakat di RSUD menjadi prima;
- d. Perlu adanya kejelasan pengelolaan RSUD eksisting setelah adanya

perpindahan layanan di gedung baru sehingga bangunan yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Pemerintah Daerah;

- e. Ketersediaan tenaga medis terutama dokter belum merata antar kecamatan dan sebagian besar masih berada di Kecamatan Pelaihari;
- f. Fasilitas pelayanan kesehatan yang belum terakreditasi di Kabupaten Tanah Laut masih cukup tinggi yaitu sebesar 29. Selain itu, fasilitas pelayanan kesehatan yang berada dalam kondisi baik dan berfungsi hanya sebesar 49;
- g. Belum terpenuhinya target SPM pelayanan bidang kesehatan di Kabupaten Tanah Laut sesuai standar Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
- h. Masih banyak masyarakat belum menerapkan pola hidup bersih dan sehat dimana persentasenya hanya sebesar 40. Hal tersebut menjadi indikasi penyebab masih tingginya kasus diare di masyarakat.
- i. Terjadinya covid 19 secara global yang berdampak pada Kabupaten Tanah Laut dimana setiap hari terjadi progress penularan secara cepat. Hal ini menjadi perhatian serius untuk pemulihan kesehatan.

### 3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- a. Masih terdapat jalan kabupaten di Kabupaten Tanah Laut dalam kondisi rusak.
- b. Masih banyak jalan yang menjadi kewenangan kabupaten perlu ditingkatkan kualitas permukaan jalannya dari kerikil dan tanah menjadi aspal.
- c. Belum optimalnya pemeliharaan saluran irigasi yang menjadi kewenangan kabupaten;
- d. Tingginya egosektoral dalam pelaksanaan program pembangunan di samping kurang diperhatikannya perspektif ruang dan perencanaan tata ruang daerah yang telah ditetapkan;
- e. Belum optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang sehingga pencapaian SPM penataan ruang tidak tercapai. Pembangunan kota seringkali dihadapkan pada masalah keterbatasan lahan, sementara kebutuhan pembangunan terus meningkat. Pemanfaatan ruang kota juga terkadang melebihi kapasitas daya dukungnya dan tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang ada;



- f. Belum memadainya pemahaman pelaku pembangunan daerah terhadap perencanaan yang berbasis pada perspektif tata ruang di wilayah Kabupaten Tanah Laut;
- 4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
  - a. Masih tingginya kawasan permukiman di Kabupaten Tanah Laut yang termasuk dalam kawasan kumuh;
  - b. Masih tingginya jumlah rumah tidak layak huni di Kabupaten Tanah Laut;
  - c. Belum tersedianya legislasi daerah terkait bidang perumahan dan kawasan permukiman seperti penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, kawasan siap bangun dan lingkungan siap bangun, norma kebijakan bidang perumahan, dan penanganan kawasan kumuh permukiman;
- 5. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat
  - a. Kesadaran masyarakat dan pelaku usaha dalam mentaati Peraturan Daerah masih belum optimal;
  - b. Masih belum optimalnya penegakan Perda;
  - c. Merebaknya lokasi dan populasi penyandang penyakit sosial kemasyarakatan, terutama di wilayah perkotaan maupun di pesisir;
  - d. Masih belum optimalnya tingkat partisipasi politik masyarakat dalam Pemilu dan Pilukada;
  - e. Adanya ancaman budaya dari luar yang menggerogoti ketenteraman dan kenyamanan masyarakat;
  - f. Perlunya peningkatan religiusitas masyarakat melalui berbagai kegiatan keagamaan dalam upaya mencegah terjadinya kejahatan;
- 6. Sosial
  - a. Masih kurangnya jumlah tenaga yang terdidik/terlatih dalam menangani masalah kesejahteraan sosial;
  - b. Belum optimalnya pemberian bantuan dan pemberdayaan sosial pada masyarakat;
  - c. Belum optimalnya kelembagaan dan partisipasi penanganan masalah kesejahteraan sosial;
  - d. Belum tersedianya data yang valid tentang warga komunitas adat terpencil (KAT), karena belum adanya pemetaan sosial;

- e. Belum menguatnya perhatian akan pentingnya pengembangan modal sosial, kesetiakawanan sosial, kearifan lokal, dan semangat kegotongroyongan di masyarakat;
- f. Belum optimalnya kapasitas aparatur daerah dalam penanggulangan bencana;
- g. Belum memadainya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung dalam menghadapi berbagai ancaman bencana alam dan bencana sosial;
- h. Masih rendahnya kesadaran terhadap risiko bencana dan pemahaman terhadap kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana;
- i. Terjadinya covid 19 secara global yang berdampak pada Kabupaten Tanah Laut dimana setiap hari terjadi progress penularan secara cepat. Hal ini menjadi perhatian serius untuk pemulihan sosial.

## II. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

### 1. Tenaga Kerja

- a. Pencari kerja di Kabupaten Tanah Laut didominasi oleh lulusan SMA;
- b. Belum terealisasinya pemetaan/data dukung kebutuhan tenaga kerja yang ada di perusahaan-perusahaan yang berinvestasi di Kabupaten Tanah Laut sehingga belum dapat direncanakan secara baik kebutuhan tenaga kerja yang berasal dari Kabupaten Tanah Laut;

### 2. Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak

- a. Belum optimalnya pemenuhan hak anak/rendahnya pencapaian Kabupaten/Kota Layak Anak dimana kelas Kabupaten Tanah Laut termasuk dalam kelas pratama;
- b. Jika dilihat dari jenis pekerjaannya, maka pekerjaan di sektor informal yang paling banyak ditemukan tenaga kerja anak. Faktor pendidikan dan ekonomi keluarga menjadi salah satu penyebab tingginya angka tenaga kerja di bawah umur di Kabupaten Tanah Laut;
- c. Belum optimalnya pemahaman tentang Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan berbagai bidang pembangunan daerah di Kabupaten Tanah Laut. Banyak kegiatan yang diarahkan untuk pengarusutamaan gender diidentikan hanya untuk keterlibatan perempuan saja. Munculnya dikotomi dasar tentang arti pengarusutamaan gender ini secara tidak langsung justru membuat program pemberdayaan dan pengarusutamaan gender tidak dapat berjalan dengan optimal;

- d. Masih kurangnya peranan organisasi perempuan dan lembaga terhadap perlindungan perempuan dan anak;
  - e. Belum optimalnya SKPD dalam Penyusunan Penganggaran Responsif Gender (PPRG);
  - f. Masih belum optimalnya partisipasi perempuan dalam legislative.
3. Pangan
- a. Peningkatan akses pangan masyarakat mensyaratkan akses terhadap inovasi dan teknologi pengolahan pangan berbasis sumberdaya lokal masih terbatas;
  - b. Masih rendahnya kapasitas SDM pelaku/petani pengolah pangan sebagai salah satu penentu kapasitas supply bahan pangan;
  - c. Masih terbatasnya jumlah dan kapasitas petugas penyuluh/pendamping pengolahan pangan dan gizi untuk mendorong peningkatan kapasitas pelaku usaha pengolahan pangan;
  - d. Masih kurangnya promosi olahan pangan lokal dan kampanye diversifikasi pangan sebagai salah satu kunci dalam pencapaian diversifikasi pangan dan ketahanan pangan daerah;
  - e. Belum optimalnya fungsi cadangan pemerintah dalam mengendalikan inflasi terutama berkaitan dengan inflasi pangan;
4. Pertanian
- a. Belum optimalnya kinerja penyediaan lahan kawasan industri untuk pengembangan industri terpadu di Kecamatan Jorong;
  - b. Masih cukup tingginya konflik pertanahan di Kabupaten Tanah Laut;
  - c. Belum optimalnya pemetaan tanah hak milik di Kabupaten Tanah Laut;
  - d. Belum optimalnya pelayanan administrasi pertanahan;
  - e. Masih cukup tingginya tanah di Kabupaten Tanah Laut yang belum bersertifikat;
5. Lingkungan Hidup
- a. Rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat maupun aparatur terhadap peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup sehingga berdampak pada kurangnya penegakan aturan di bidang lingkungan hidup;
  - b. Belum optimalnya pelayanan penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan;

- c. Belum optimalnya pelayanan penerbitan izin lingkungan, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
  - d. Belum tersusunnya dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) dan dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup (IKPLHD);
  - e. Belum optimalnya penegakan pelanggaran lingkungan hidup;
  - f. Belum optimalnya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup baik pencemaran air dan udara;
  - g. Masih terbatasnya prasarana utilitas berupa penerangan jalan umum dan masih banyak jaringan penerangan jalan umum yang liar;
  - h. Terbatasnya kapasitas TPA Bakunci dan belum tersedianya Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) di Kabupaten Tanah Laut;
  - i. Belum optimalnya pemeliharaan sarana dan prasarana taman dan ruang terbuka hijau (RTH);
  - j. Belum tercapainya RTH sebesar 30 dari luas wilayah kota;
  - k. Masih terdapat usaha/kegiatan yang belum mempunyai dokumen lingkungan dan usaha yang telah memiliki dokumen lingkungan belum membuat laporan pemantauan;
  - l. Masih terdapat usaha/kegiatan yang belum memenuhi persyaratan administratif;
  - m. Kurangnya apresiasi masyarakat terhadap keberadaan taman sebagai wahana terbuka hijau kota dan belum adanya standar baku pengelolaan taman kota;
6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- a. Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya dokumen kependudukan relatif masih kurang.
  - b. Belum optimalnya data kependudukan di Kabupaten Tanah Laut sehingga masih terdapat perbedaan antara data yang berasal dari perangkat daerah dengan BPS;
  - c. Kepemilikan e-KTP dan akta kelahiran di Kabupaten Tanah Laut belum optimal.
7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- a. Masih belum optimalnya pengelolaan keuangan dan aset desa. Masih

rendahnya kualitas aparatur di tingkat desa dalam menjalankan fungsi dan pelayanan kepada masyarakat;

- b. Pendapatan desa masih rendah karena belum terbentuk serta dimanfaatkannya BUMDES sebagai sumber pendapatan desa. Belum optimalnya penggunaan dana desa sebagai penggerak perekonomian di masing-masing desa;
  - c. Belum optimalnya pemetaan potensi desa sehingga usaha ekonomi yang dikembangkan masyarakat desa berjalan di tempat. Kapasitas masyarakat dalam melakukan usaha-usaha produktif masih rendah;
  - d. Sebagian besar desa di Kabupaten Tanah Laut belum memiliki RPJMD Desa dan RKP Desa;
  - e. Belum optimalnya pembinaan lembaga pemberdayaan masyarakat desa dan kelompok masyarakat pembangunan desa;
  - f. Belum optimalnya kegiatan pembinaan adat budaya desa. Alokasi dana desa sebagian besar diperuntukan untuk pembangunan fisik desa;
8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- a. Masih cukup tingginya laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Tanah Laut.;
  - b. Rendahnya tingkat kesadaran untuk menjadi akseptor KB.;
  - d. Belum optimalnya upaya pendewasaan usia perkawinan sehingga pelayanan keluarga berencana dan kesejahteraan keluarga tidak optimal;
  - e. Masih rendahnya jumlah kader KB berkualitas;
9. Perhubungan
- a. Belum terkoneksi akses jalan dari Pelabuhan Laut Tanjung Dewa menuju sentra produksi;
  - b. Belum optimalnya fungsi Terminal Tanah Habang Pelaihari. Hal tersebut terjadi karena banyak angkutan umum yang enggan melakukan aktivitas bongkar muat barang dan menaikkan/menurunkan penumpang di terminal;
  - c. Belum selesainya proyek pembangunan Pelabuhan Swarangan sehingga memperlambat arus barang masuk dan keluar di Kabupaten Tanah Laut;
  - d. Sarana dan prasarana transportasi umum di Kabupaten Tanah Laut dirasakan kurang memadai sehingga minat masyarakat menggunakan angkutan

menjadi rendah. Selain itu, hal tersebut juga disebabkan banyaknya masyarakat yang menggunakan kendaraan pribadi untuk mobilitasnya;

- e. Belum optimalnya penerimaan PAD dari bidang perhubungan;
- f. Masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap keselamatan di jalan raya;
- g. Masih kurangnya rambu petunjuk sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan raya;
- h. Fasilitas sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor masih kurang memadai;

10. Komunikasi dan Informatika

- a. Banyak wilayah yang masih terbatas untuk mendapatkan akses terhadap pelayanan informasi dan komunikasi bagi masyarakat. Beberapa kecamatan di Kabupaten Tanah Laut belum memiliki sambungan jaringan internet mobile;
- b. Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi komunikasi (TIK) untuk mendukung di berbagai bidang pembangunan daerah. Informasi pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah belum tersosialisasi dengan baik di masyarakat;
- c. Belum adanya ruang informasi publik yang memadai untuk akses informasi bagi masyarakat;
- d. Masih terbatasnya sumber daya manusia yang mumpuni di bidang komunikasi dan informatika;
- e. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagai sarana peningkatan usaha yang produktif;

11. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

- a. Persentase koperasi aktif di Kabupaten Tanah Laut masih rendah;
- b. Sebagian besar koperasi di Kabupaten Tanah Laut masih bergerak pada kegiatan simpan pinjam;
- c. Belum optimalnya pendampingan penyediaan permodalan dan pembiayaan bagi usaha kecil dan promosi produk UKM masih terbatas;
- d. Kualitas produk UKM di Kabupaten Tanah Laut belum memenuhi standar nasional karena rendahnya penerapan teknologi dan inovasi produk;
- e. Terjadinya covid 19 secara global yang berdampak pada Kabupaten Tanah Laut dimana setiap hari terjadi progress penularan secara cepat. Hal ini

menjadi perhatian serius untuk pemulihan ekonomi.

12. Penanaman Modal

- a. Daya saing Kabupaten Tanah Laut dalam hal PMA antar kabupaten/kota masih tertinggal dibandingkan wilayah lain di Kalimantan Selatan. Posisi Kabupaten Tanah Laut dalam hal PMA berada di posisi 5;
- b. Daya saing Kabupaten Tanah Laut dalam hal PMDN antar kabupaten/kota masih tertinggal dibandingkan wilayah lain di Kalimantan Selatan. Posisi Kabupaten Tanah Laut dalam hal PMDN berada di posisi 6;
- c. Belum adanya regulasi terkait tentang penanaman modal di Kabupaten Tanah Laut, serta regulasi tentang pemberian insentif dan kemudahan berinvestasi di Kabupaten Tanah Laut;
- d. Pelayanan perizinan di Kabupaten Tanah Laut yang tertera dalam website masih menggunakan acuan peraturan daerah yang tidak berlaku lagi;

13. Kepemudaan dan Olahraga

- a. Belum meratanya ketersediaan sarana dan prasarana olahraga antar kecamatan di Kabupaten Tanah Laut;
- b. Minimnya kompetisi olahraga dalam daerah karena keterbatasan SDM perangkat pertandingan;
- c. Belum optimalnya pembinaan prestasi olahraga di Kabupaten Tanah Laut sehingga belum muncul atlet unggulan Kabupaten Tanah Laut di tingkat provinsi maupun nasional;
- d. Belum optimalnya peran Pemuda Penggerak Pembangunan dan Perdesaan di Kabupaten Tanah Laut;
- e. Belum terbentuknya Forum Pemuda Tanah Laut (FPTL);
- f. Masih rendahnya kepeloporan dan kepemimpinan di lingkungan pemuda;
- g. Pemuda Kabupaten Tanah Laut yang berprestasi lebih memilih berkarir di luar Kabupaten Tanah Laut;

14. Statistik

- a. Belum optimalnya ketersediaan data-data statistik sektoral untuk perencanaan pembangunan daerah;
- b. Belum adanya Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Kabupaten

Tanah Laut yang berisi seluruh data pada setiap aspek pembangunan;

- c. Kurangnya kordinasi berbagai pihak dalam penyediaan data statistik pembangunan daerah;
- d. Belum memadainya kapasitas sumber daya manusia dalam pendataan dan statistik daerah;

15. Persandian

- a. Belum optimalnya sarana dan prasarana jejaring persandian daerah;
- b. Kurangnya sumberdaya manusia di bidang pengelolaan persandian daerah;
- c. Belum optimalnya perangkat daerah yang menggunakan persandian untuk mengamankan setiap jenis informasi yang wajib diamankan;

16. Kebudayaan

- a. Belum optimalnya pembinaan pegiat seni dan budaya di Kabupaten Tanah Laut;
- b. Belum terlaksananya festival tahunan Tanah Laut yang menampilkan kebudayaan Tanah Laut;
- c. Belum optimalnya pengelolaan cagar budaya di Kabupaten Tanah Laut. Selain itu, cagar budaya yang ada di Kabupaten Tanah Laut seperti Benteng Belanda Tabanio, Cagar Budaya Desa Riam Andungan, dan Bunker Jepang belum dikelola secara terpadu;
- d. Promosi budaya lokal Kabupaten Tanah Laut belum optimal;
- e. Sarana dan prasarana pagelaran seni dan budaya belum representatif;

17. Perpustakaan

- a. Belum optimalnya pelayanan perpustakaan daerah;
- b. Keterbatasan jumlah perpustakaan keliling.
- c. Sistem perpustakaan digital di Kabupaten Tanah Laut belum terlaksana. Selain itu, pelayanan perpustakaan masih dilakukan secara manual;
- d. Masih kurangnya masyarakat terhadap pentingnya perpustakaan sebagai salah satu sumber ilmu pengetahuan;
- f. Kemampuan SDM pengelolaan perpustakaan belum optimal;

18. Kearsipan

- a. Belum semua SKPD/Pemerintah Desa/BUMD memiliki unit pengelola arsip tersendiri sehingga keberadaan arsip baik dinamis dan statis belum mendapatkan penanganan secara khusus;



- b. Kualitas dan kuantitas tenaga kearsipan di Kabupaten Tanah Laut masih rendah. Pengadaan formasi pegawai belum mengacu kebutuhan personil sesuai disiplin ilmu yang dibutuhkan;
- c. Sosialisasi tentang kearsipan belum terlaksana secara maksimal;
- d. Fasilitas-fasilitas pendukung kearsipan belum sesuai standar kearsipan baik di depo arsip dan unit kearsipan;
- e. Kemampuan SDM pengelolaan kearsipan belum optimal;

### III. Urusan Pilihan

#### 1. Kelautan dan Perikanan

- a. Kabupaten Tanah Laut memiliki potensi yang tinggi di bidang perikanan tangkap laut karena wilayahnya berbatasan langsung dengan Laut Jawa. Namun dengan adanya Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut untuk mengelola sumber daya tersebut mengalami keterbatasan;
- b. Masih kurangnya pemanfaatan dan pengolahan hasil produksi perikanan, baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya.;
- c. Hasil perikanan masih dipasarkan dalam bentuk segar atau belum ditangani dengan baik untuk proses penanganan dan pengolahan lebih lanjut. Karena itu, pengembangan industri pascapanen (pengolahan) menjadi kegiatan bisnis yang perlu dikembangkan;
- d. Masih terbatasnya SDM, permodalan, dan infrastruktur di bidang perikanan dan industri perikanan;
- e. Belum adanya pengembangan industri pengolahan terpadu di bidang perikanan. Usaha pengolahan ikan memiliki prospek yang baik untuk dikembangkan sebagai sumber PAD, penyerap tenaga kerja yang banyak. Oleh karena itu pengembangan industri pengolahan perlu dilakukan secara terpadu dalam satu klaster yang saling terkait (sistem minabisnis);
- f. Masih rendahnya mutu bahan baku industri perikanan;
- g. Masih terbatasnya penerapan teknologi tepat guna untuk mengembangkan produk dengan daya saing tinggi berbasis usaha rakyat (masyarakat lokal) di Kabupaten Tanah Laut;
- h. Masih terbatasnya akses terhadap pasar produksi. Kebijakan nasional

pelarangan alat tangkap menyebabkan banyak kapal yang tidak beroperasi apabila menggunakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan dan eks asing;

- i. Masih banyaknya produk usaha perikanan terutama hasil olahan tanpa label, sehingga mengurangi traceability produk dan nilai tambah yang akan diperoleh daerah/negara;
- j. Masih sulitnya pengembangan budidaya perikanan rumput laut dan unggulan lain seperti ikan kerapu terutama berkaitan karena kesulitan pemasaran produk dan ketersediaan benih dan indukan berkualitas;
- k. Masih terbatasnya pakan ikan untuk budidaya perikanan. Salah satu masalah budidaya perikanan rakyat adalah masalah pakan;
- l. Produk khas Kabupaten Tanah Laut yang berasal komoditas perikanan belum berkembang dan daya saingnya kalah dibandingkan kabupaten/kota lain di Provinsi Kalimantan Selatan;

## 2. Pariwisata

- a. Daya tarik objek wisata di Kabupaten Tanah Laut perlu dikembangkan sebagai destinasi wisata unggulan di Provinsi Kalimantan Selatan. Selain mempercantik objek wisata, hal lain yang diperlukan adalah peningkatan akses jalan menuju kawasan wisata, sarana pendukung seperti hotel dan restoran, dan mempersiapkan tenaga kerja pariwisata yang berkualitas;
- b. Belum optimalnya promosi dan pemasaran pariwisata di Kabupaten Tanah Laut;
- c. Belum optimalnya PAD yang diperoleh dari pengembangan sektor pariwisata. Sesungguhnya, dengan cukup banyak kunjungan wisatawan, Pemerintah Daerah dapat memaksimalkan potensi PAD melalui penarikan berbagai jenis retribusi
- d. Belum sepenuhnya diterapkan prinsip-prinsip pengembangan yang dipakai dalam pembangunan kepariwisataan Kabupaten Tanah Laut yang mencakup prinsip pembangunan pariwisata berkelanjutan (sustainable tourism development) dan pembangunan pariwisata berbasis masyarakat (community based tourism development);
- e. Kurang optimalnya kerjasama antara pemerintah daerah dan pihak swasta dalam rangka memajukan sektor pariwisata di Kabupaten Tanah Laut;

### 3. Pertanian

- a. Sebagian besar lahan sawah di Kabupaten Tanah Laut mengandalkan jaringan non irigasi;
- b. Masih terdapat lahan yang belum dimanfaatkan sebagai lahan budidaya;
- c. Produksi dan produktivitas komoditas pertanian pangan dan hortikultura belum optimal;
- d. Keterbatasan akses pasar produk pangan;
- e. Tidak tersedia gudang penyimpanan produk pertanian;
- f. Keterbatasan petani dalam mengakses pupuk bersubsidi;
- g. Masih rendahnya kapasitas SDM petani dalam meningkatkan produksi;
- h. Kegiatan layanan pelatihan dan pendampingan oleh penyuluh sangat terbatas;
- i. Keterbatasan pengetahuan dan keterampilan petani pekebun untuk mengaplikasikan pupuk yang baik serta perawatan tanaman perkebunan dengan baik;
- j. Ketersediaan sumber bibit perkebunan yang berkualitas sangat terbatas (tidak ada kebun induk tanaman perkebunan);
- k. Jumlah petugas penyuluh perkebunan sangat kurang dan terjadinyapenurunan mutu genetik ternak;
- l. Usaha peternakan belum dilakukan dengan intensif (masih menggunakan cara tradisional dan ternak tidak dikandangkan). Selain itu, lahan penggembalaan peternakan rakyat mengalami penurunan luasan;
- m. Belum tersedia lahan untuk penanaman tanaman pakan ternak;
- n. Harga pakan ternak mahal/tidak terjangkau petani/peternak; Bahan baku sumber pakan ternak kurang (utamanya jagung);
- o. Jumlah dokter hewan sangat terbatas dan tidak dapat menjangkau seluruh kabupaten. Hal tersebut mengakibatkan masih terjadinya kematian hewan ternak di masyarakat;
- p. Distribusi petugas penyuluh sangat tidak merata dan kurang. Selain itu, kapasitas petugas penyuluh masih relatif rendah;
- q. Hasil usaha peternakan belum optimal sehingga menurunkan produksi ternak. Selain itu, belum adanya pemetaan potensi agribisnis peternakan

sehingga belum menjadi daya tarik bagi investor;

- r. Terjadinya pemotongan betina produktif. Belum semua pelaku usaha di rumah potong hewan mengetahui larangan pemotongan betina produktif yang diatur dalam UU Nomor 41 tentang peternakan dan kesehatan hewan;
- s. Saat ini sarana dan prasarana yang ada di RPH Sarang Halang belum memenuhi standar baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya, sehingga diperlukan penambahan sarana dan prasarana agar target pangan asal hewan yang dihasilkan RPH dapat tercapai. Selain itu, daya tampung pasar hewan terbatas;

#### 4. Perdagangan

- a. Ekspor unggulan di Kabupaten Tanah Laut masih didominasi komoditas tambang;
- b. Belum terealisasinya revitalisasi pasar rakyat di berbagai kecamatan. Perlu adanya perbaikan fasilitas pasar rakyat seperti jalan lingkungan, toilet, dan fasilitas lainnya;
- c. Bangunan yang ada di pasar lama belum dimanfaatkan secara optimal;
- d. Belum optimalnya penerimaan PAD di sektor perdagangan. Salah satu sumber PAD yang menjadi kewenangan kabupaten di bidang perdagangan adalah retribusi tera ulang pedagang;
- e. Belum adanya jaminan ketersediaan barang dalam jumlah yang cukup dan harga yang terjangkau serta terhindar dari praktik-praktik perdagangan yang tidak sehat. Selain itu, hal yang mendorong terjadinya praktik yang tidak sehat tersebut adalah belum maksimalnya tingkat kesadaran konsumen dalam menggunakan haknya sebagai konsumen;
- f. Pelaporan arus barang keluar masuk, yang merupakan kewajiban pelaku usaha belum terlaksana dengan baik;

#### 5. Perindustrian

- a. Belum terbangunnya kawasan industri Jorong karena masalah pembebasan lahan;
- b. Belum terbangunnya sentra IKM terpadu di Kabupaten Tanah Laut seperti yang tertuang dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015 – 2035 bahwa di setiap wilayah Kabupaten terutama di luar Pulau Jawa memiliki minimal satu sentra IKM, yang dapat berada di dalam atau di luar

**Kawasan Industri;**

- c. Lemahnya akses permodalan untuk industri kecil dan menengah;
  - d. Masih banyak potensi hasil-hasil pertanian dan perikanan kelautan yang belum diolah secara maksimal dalam skala industri. Selain itu, kualitas SDM dalam pengolahan produk dan peningkatan kualitas/mutu masih lemah;
  - e. Kewajiban perusahaan pemegang izin usaha industri baik skala menengah dan besar di Kabupaten Tanah Laut sampai saat ini belum menyampaikan laporan yang terkait dengan nilai investasi, kapasitas terpasang, realisasi produk dan penjualan hasil produk yang dihasilkan;
6. Transmigrasi
- a. Belum optimalnya pengelolaan transmigrasi lokal antar kecamatan dan masih kurangnya penataan lokasi transmigrasi menjadi kawasan transmigrasi terpadu
  - b. Program transmigrasi yang direncanakan pada tidak bisa berjalan dengan optimal karena terkendala pembebasan lahan seluas 446 hektar di Desa Padang Luas dan Desa Kurau Kematan Kurau yang kepemilikan tanahnya diakui oleh penduduk
  - c. Kurangnya motivasi dan rendahnya minat masyarakat untuk mengikuti program transmigrasi;
- IV. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan
1. Administrasi Pemerintahan Umum
- a. Belum adanya penegasan batas wilayah antara Kabupaten Tanah Laut dengan Kabupaten Banjar, Kota Banjarbaru, dan Kabupaten Tanah Bumbu;
  - b. Jalanan kerjasama yang dilakukan masih terbatas pada wilayah regional;
  - c. Sarana dan prasarana kecamatan masih belum optimal dalam pelayanan kepada masyarakat;
  - d. Pemilihan kepala desa belum dilakukan secara serentak sehingga visi dan misi RPJM Desa terkadang tidak selaras dengan visi dan misi dalam RPJMD;
  - e. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan selama ini belum sepenuhnya melibatkan civil society;
  - f. Nilai dan budaya kerja yang profesional, jujur, dan bersih perlu direvitalisasi di setiap jenjang birokrasi (Pembentukan kelompok budaya kerja sebagai

wadah diskusi untuk memecahkan permasalahan pekerjaan);

- g. Belum lancarnya pelaksanaan system informasi manajemen pemerintah daerah;
- h. Belum maksimalnya penerapan SOP pelayanan kepada masyarakat;
- i. Prinsip money follow function, money follow organization harus mulai ditinggalkan, menjadi money follow programme;
- j. Masih adanya permasalahan pada kelembagaan seperti tumpang tindih kewenangan yang mengakibatkan kinerja menjadi kurang maksimal;
- k. Belum optimalnya ketersediaan data yang akurat dan komprehensif untuk pembangunan daerah;
- l. Belum optimalnya koordinasi dan kerjasama antar-unit kerja serta antar-instansi;
- m. Belum optimalnya penataan ketatalaksanaan dan kelembagaan perangkat daerah;
- n. Belum optimalnya koordinasi dan kerjasama antar-unit kerja serta antar-instansi;
- o. Belum terbentuknya BUMD yang mengelola Kawasan Industri Jorong;
- p. Belum dimulainya penerapan pelaporan kegiatan LPUK berbasis online menggunakan sistem aplikasi;
- q. Belum terciptanya pemerataan dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR);
- r. Belum optimalnya kinerja TPID dalam mengendalikan inflasi daerah;
- s. Kurangnya pembinaan tenaga pengelola pengadaan barang/jasa pemerintah agar menjadi tenaga profesional sehingga pelaksanaan pengadaan dapat berjalan sesuai dengan prinsip pengadaan yaitu efektif, efisien, terbuka, bersaing, transparan, tidak diskriminatif dan akuntabel;
- t. Belum optimalnya kinerja legislatif dalam proses legislasi daerah;

## 2. Perencanaan Pembangunan

- a. Belum terciptanya satu sistem perencanaan pembangunan daerah yang komprehensif dan integratif antar wilayah serta sektor perekonomian daerah;
- b. Belum optimalnya kualitas penyusunan dokumen perencanaan baik pada

tingkat daerah maupun SKPD;

- c. Belum optimalnya kordinasi antar pelaku pembangunan daerah, baik pada tataran horizontal dengan SKPD-SKPD, maupun dengan pemerintah Pusat dan Provinsi;
- d. Kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah
- e. Belum optimalnya ketersediaan data dan informasi yang digunakan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Tanah Laut yang berkualitas;
- f. Masih belum optimalnya pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pengendalian pembangunan;
- g. Belum optimalnya kuantitas dan kualitas sumber daya perencanaan pembangunan;

### 3. Keuangan

- a. Belum terintegrasi antara SIMDA Keuangan dengan SIMDA BMD dan SIMDA Pendapatan;
- b. Belum ada fakta integritas mulai pimpinan daerah sampai dengan pimpinan SKPD dalam mempertahankan opini WTP;
- c. Masih terjadinya perbedaan akun anggaran dengan akun pertanggungjawaban yang masih harus diperbaharui dengan konversi akun;
- d. Perbaiki sistem pengendalian internal terkait pengelolaan Barang Milik Daerah yang selanjutnya disertai peningkatan dan pengembangan pengelolaan pemanfaatn BMD;
- e. Belum ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah berdasarkan PP nomor 27 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016;
- f. Belum adanya pemanfaatan teknologi informasi untuk percepatan pelaporan dana desa ;
- g. Belum adanya pemahaman yang sama terkait mekanisme pemberian Hibah dan Bantuan Sosial;
- h. Belum optimalnya pengelolaan Aset Daerah;
- i. Masih rendahnya kontribusi unit usaha BUMD dalam pengelolaan potensi unggulan daerah terhadap PAD;

- j. Belum akuratnya database pajak dan retribusi daerah;
- k. Belum optimalnya penggalan potensi dan pemetaan potensi pendapatan daerah;
- 4. Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan
  - a. Belum memadainya kapasitas sumber daya manusia aparatur dalam menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan;
  - b. Masih rendahnya profesionalisme birokrasi;
  - c. Belum berkembangnya sistem reward dan punishment dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Tanah Laut;
  - d. Masih kurangnya kesesuaian penempatan dan promosi jabatan dalam jabatan dengan kompetensi dan prestasi kerja;
  - e. Pengembangan pegawai belum sepenuhnya berdasarkan kebutuhan kompetensi;
- 5. Penelitian dan Pengembangan
  - a. Belum optimalnya inovasi pembangunan daerah untuk peningkatan pelayanan bagi masyarakat;
  - b. Terbatasnya sumber daya aparatur dalam bidang penelitian dan pengembangan daerah;
  - c. Belum dimanfaatkannya hasil penelitian sebagai bahan pengambilan kebijakan daerah;
  - d. Belum optimalnya kuantitas dan kualitas sumber daya penelitian dan pengembangan;
- 6. Pengawasan Pembangunan
  - a. Belum terlaksananya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di jajaran satuan kerja perangkat daerah
  - b. Belum optimalnya tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh satuan kerja perangkat daerah
  - c. Masih kurangnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah



### **BAB III**

## **RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH**

### **3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah**

Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah merupakan kerangka implementatif Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021, yang memuat gambaran kondisi ekonomi makro, proyeksi Tahun 2021 serta kebutuhan dan sumber pembiayaan pembangunan yang diperlukan Tahun 2021. Gambaran kerangka ekonomi daerah tersebut dicapai dengan menyusun berbagai prioritas pembangunan serta mengambil langkah kebijakan yang disusun untuk menghadapi tantangan dan penyelesaian masalah pembangunan agar arah pembangunan daerah tahun 2021 dapat dicapai sesuai dengan sasaran program dan kegiatan yang diharapkan.

Menyikapi kondisi perekonomian daerah dengan adanya covid 19 maka indikator makro termasuk indikator pertumbuhan ekonomi dalam RKPD 2021 ditargetkan menjadi 3,50% dan angka pengangguran terbuka ditargetkan sebesar 4,0%.

#### **3.1.1 Tantangan dan Prospek Perekonomian Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021**

Analisis atas kondisi internal (kekuatan dan kelemahan) dan kondisi eksternal (peluang dan ancaman) terhadap pencapaian tujuan pembangunan berdasarkan hasil analisis gambaran umum kondisi daerah meliputi :

##### **1. Kondisi internal**

##### **a. Faktor kekuatan**

##### **1) Potensi sumber daya alam**

Potensi sumber daya alam yang sangat besar di Kabupaten Tanah Laut didominasi pada sektor pertanian, pertambangan, dan pariwisata terutama wisata alam dan wisata edukasi.

##### **2) Aspek demografi**

Aspek demografi di Kabupaten Tanah Laut cenderung mengalami penambahan pada setiap tahunnya. Dengan didukung oleh sumber daya manusia, usia angkatan kerja yang cukup besar maka diharapkan menjadi

kekuatan untuk menggerakkan roda perekonomian pembangunan Kabupaten Tanah Laut.

3) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita Kabupaten Tanah Laut cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya dengan demikian tingkat kesejahteraan penduduk Kabupaten Tanah Laut diharapkan semakin baik yang dapat menjadi modal untuk menumbuhkan perekonomian Kabupaten Tanah Laut.

4) Investasi

Investasi Kabupaten Tanah Laut cenderung meningkat khususnya PMDN. Hal ini didukung oleh ketersediaan sumber daya alam dan infrastruktur yang memadai, kondisi keamanan dan ketertiban yang relatif kondusif, dimulainya pembangunan bandara internasional, dan adanya kawasan peruntukan industri menjadi daya tarik tersendiri bagi investor. Adanya regulasi tentang kemudahan berinvestasi dan pemberian insentif bagi investor.

5) Komitmen pemerintah daerah

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah daerah berkomitmen untuk memberikan peningkatan pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Hal tersebut diwujudkan dengan berbagai inovasi daerah yang mengoptimalkan potensi lokal yang mensejahterakan masyarakat.

b. Faktor kelemahan

1) Pemanfaatan sumber daya alam Pemanfaatan sumber daya alam yang belum optimal.

2) Nilai tambah produk pertanian

Nilai tambah produk-produk pertanian di Kabupaten Tanah Laut masih belum di manfaatkan secara optimal menjadi bahan-bahan olahan, sehingga keragaman hasil produk pertanian belum memungkinkan memiliki nilai tambah (*added values*).

## 2. Kondisi eksternal

### a. Faktor peluang

#### 1) Posisi *geostrategic*

Dengan telah ditetapkannya Kawasan Industri Jorong dan Kawasan Perkotaan Banjarbakula (Kecamatan Bati-bati dan Tambang Ulang) nantinya akan menjadi suatu koridor pertumbuhan ekonomi baru di Tanah Laut. Hal ini juga akan mendorong pertumbuhan investasi dan menjadi fokus dari paket kebijakan ekonomi melalui beberapa strategi antara lain kemudahan perijinan, insentif investasi dan percepatan infrastruktur pendukung.

#### 2) Pasar bebas ASEAN

Kondisi pasar bebas ASEAN membuka peluang bagi produk-produk lokal baik dari segi tenaga kerja, produksi maupun pemasaran.

### b. Faktor ancaman.

#### 1) Pasar bebas ASEAN.

Pasar bebas ASEAN menjadi ancaman yang serius bagi pelaku ekonomi di Kabupaten Tanah Laut sebab persaingan akan semakin tajam. Ketidaksiapan daerah dalam menghadapi persaingan tersebut akan menyebabkan Kabupaten Tanah Laut menjadi tujuan bagi pemasaran produk dan tenaga kerja terlatih.

#### 2) Perubahan iklim.

Perubahan iklim akibat pengaruh pemanasan global memberikan dampak pada dunia. Kecenderungan perubahan iklim yang tidak menentu mengganggu pola tanam petani, perkembangan dan penyebaran organisme pengganggu tanaman, sehingga berpotensi mengakibatkan kerugian finansial.

Adapun strategi yang dapat berkontribusi pada pembangunan ekonomi daerah yaitu:

1. Pengoptimalan dan pengembangan pemanfaatan sumber daya alam
2. Peningkatan kualitas tenaga kerja
3. Peningkatan infrastruktur untuk mendukung pusat pertumbuhan ekonomi
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas produk lokal
5. Menciptakan stabilitas keamanan dan ketertiban

Langkah-langkah yang dapat ditempuh untuk mewujudkan strategi di atas antara lain : (1) pengelolaan perencanaan untuk meningkatkan efektivitas tugas pokok pemerintah daerah dalam penyediaan pelayanan publik, (2) pengembangan potensi wilayah, (3) Peningkatan komoditas produksi unggulan, (4) pemberdayaan masyarakat, (5) Peningkatan ketrampilan bagi tenaga usia kerja dan (6) pengembangan infrastruktur wilayah.

### 3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam siklus APBD. Pada dasarnya APBD memuat rencana keuangan yang diperoleh dan digunakan dalam rangka melaksanakan kewenangan dalam satu tahun anggaran. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disusun berdasarkan *money follow program*, dimana pendekatan penganggaran lebih fokus pada program atau kegiatan yang terkait langsung dengan prioritas daerah, prioritas nasional dan dapat memberikan dampak langsung bagi masyarakat dengan pendekatan tugas fungsi.

Dalam penyusunan anggaran harus memperhatikan (a) keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran, (b) konsistensi dan sinkronisasi program baik vertikal maupun horisontal, dan (c) program dan kegiatan yang disusun harus mempunyai relevansi dengan permasalahan dan peluang yang dihadapi. Selain hal tersebut diatas juga harus berpedoman pada norma dan prinsip anggaran sebagai pedoman dan kerangka acuan dalam penyusunannya. Sejumlah norma dan prinsip tersebut, meliputi:

#### (1) Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran Daerah

Sebagai persyaratan utama untuk mewujudkan pemerintah yang baik, bersih dan bertanggung jawab. Sebagai instrumen evaluasi pencapaian kinerja dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam mensejahterakan rakyat, maka APBD harus dapat menyajikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan atau yang dianggarkan.

**(2) Disiplin Anggaran**

Adanya program yang harus disusun dengan berorientasi pada kebutuhan masyarakat tanpa meninggalkan keseimbangan antara pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Oleh karena itu, penyusunan dilakukan berlandaskan azas efisiensi, tepat guna, tepat waktu pada pelaksanaan dan penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan.

**(3) Keadilan Anggaran**

Pendapatan daerah pada hakekatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau beban lainnya yang ditanggung oleh segenap lapisan masyarakat. Untuk itu pemerintah wajib mengalokasikan penggunaannya secara adil dan merata berdasarkan pertimbangan yang obyektif agar dapat dinikmati seluruh kelompok masyarakat, tanpa adanya diskriminasi dalam pemberian pelayanan.

**(4) Efisiensi dan Efektivitas Anggaran**

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan secara optimal, guna kepentingan bagi masyarakat. Perencanaan perlu ditetapkan secara jelas dan terarah, baik itu tujuan, sasaran dan hasil serta pemanfaatan yang diperoleh masyarakat dari sesuatu kegiatan yang diprogramkan.

**3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah**

Pendapatan daerah pada hakekatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau pungutan lainnya yang dibebankan pada seluruh masyarakat. Pendapatan daerah meliputi semua rekening kas daerah yang menambah ekuitas dana, sebagai hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayarkan kembali oleh daerah.

Dalam hal usaha meningkatkan pendapatan daerah sampai saat ini masih banyak kendala dan permasalahan yang dihadapi terutama dalam peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), adapun permasalahannya adalah :

1. Regulasi yang berlaku saat ini sudah jauh ketinggalan dibanding dengan peningkatan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat. Contohnya beberapa peraturan daerah yang mengatur masalah tarif atau besarnya pajak/retribusi daerah terlalu kecil dibanding dengan keadaan perekonomian saat ini.

2. Tingkat kesadaran Wajib Pajak/Retribusi yang masih rendah, disisi lain masih adanya upaya dari wajib pajak/retribusi untuk menghindar dari kewajiban membayar pajak/retribusi daerah.
3. Belum adanya mekanisme khusus untuk mengetahui data obyek pajak, yang menyebabkan data obyek pajak tidak sesuai dengan fakta/keadaan.
4. Fasilitas obyek retribusi belum memadai khususnya pada obyek wisata, menyebabkan sangat sedikitnya kunjungan ulang yang dilakukan oleh wisatawan.
5. Kurangnya data dan penatausahaan perpajakan/retribusi daerah.
6. Masih lemahnya Sumber daya manusia yang menangani pungutan pendapatan daerah.
7. Belum optimalnya kinerja BUMD.

Melihat analisis kondisi perkembangan perekonomian yang ada, mengamati perkembangan pembangunan dan melihat permasalahan yang ada, maka strategi yang ditempuh dalam peningkatan pendapatan daerah ialah:

1. Peninjauan dan penetapan regulasi yang berkaitan dengan pendapatan asli daerah.
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan manajemen/pengelolaan potensi pendapatan asli daerah.
3. Peningkatan investasidi daerah

Dengan strategi tersebut diatas maka kebijakan daerah yang ditempuh dalam meningkatkan pendapatan daerah antara lain sebagai berikut.

1. Peninjauan dan penyusunan regulasi yang berkaitan dengan pendapatan daerah,
2. Meningkatkan kualitas BUMD,
3. Meningkatkan inovasi peningkatan pendapatan,
4. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan pada obyek pajak/retribusi,
5. Meningkatkan kualitas SDM,
6. Meningkatkan pelayanan perijinan,
7. Mempercepat pembangunan infrastruktur.

Kemudian upaya-upaya yang dilakukan dalam pemenuhan target pendapatan daerah antara lain:

- a. Melakukan reviu atas peraturan daerah (Perda) yang berkaitan dengan pajak dan retribusi daerah.
- b. Melakukan penelitian potensi pendapatan asli daerah (PAD).
- c. Peningkatan pembinaan, pengendalian dan pengawasan pada BUMD.

- d. Menambah penyertaan modal kepada BUMD.
- e. Ekstensifikasi dan intensifikasi terhadap sumber-sumber pendapatan.
- f. Memperbaiki fasilitas obyek retribusi.
- g. Peningkatan pendayagunaan kekayaan daerah sebagai sumber pendapatan daerah,
- h. Penegakan peraturan daerah,
- i. Mengintensifkan penagihan pajak dan retribusi daerah,
- j. Melaksanakan sosialisasi guna memberikan pemahaman kepada masyarakat kaitannya dengan keajiban pembayaran pajak daerah,
- k. Melakukan bimbingan teknis untuk pengelola pendapatan pajak/retribusi daerah,
- l. Melakukan penyederhanaan dan transparansi pelayanan perijinan,
- m. Meningkatkan pelayanan terhadap wajib pajak/retribusi daerah menuju pelayanan prima,
- n. Meningkatkan pembangunan infrastruktur di kawasan pertumbuhan ekonomi dengan harapan berkembangnya kegiatan ekonomi masyarakat.

Pendapatan Daerah terdiri atas: (a). pendapatan asli daerah; (b). pendapatan transfer; dan (c). lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

1. Pendapatan Asli Daerah, terdiri dari:
  - a. Pajak Daerah terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Mineral Bukan Logam, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
  - b. Retribusi Daerah terdiri dari Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu.
  - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan merupakan Penerimaan Daerah atas hasil penyertaan modal daerah.
  - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah terdiri atas: (1). hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan; (2). hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan; (3). hasil kerja sama daerah; (4). jasa giro; (5). hasil pengelolaan dana bergulir; (6). pendapatan bunga; (7). penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah; (8). penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang

daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah; (9). penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; (10). pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan; (11). pendapatan denda pajak daerah; (12). pendapatan denda retribusi daerah; (13). pendapatan hasil eksekusi atas jaminan; (14). pendapatan dari pengembalian; (15). pendapatan dari BLUD; dan (16). pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Pendapatan Transfer meliputi: a. transfer Pemerintah Pusat; dan b. transfer antar-daerah.

- a. Transfer Pemerintah Pusat terdiri atas: (1). dana perimbangan; (2). dana insentif daerah; (3). dana otonomi khusus; (4). dana keistimewaan; dan (5). dana desa.
- b. Transfer antar-daerah terdiri atas: (1). pendapatan bagi hasil; dan (2). bantuan keuangan.
- c. Dana perimbangan terdiri atas: (1). Dana Transfer Umum; dan (2). Dana Transfer Khusus.
- d. Dana Transfer Umum terdiri atas: (1). DBH; dan (2). DAU.
- e. Dana Transfer Khusus terdiri atas: (1). DAK Fisik; dan (2). DAK Non Fisik.
- f. DBH bersumber dari: (1). pajak; dan (2). sumber daya alam.
- g. DBH yang bersumber dari pajak terdiri atas: (1). pajak bumi dan bangunan sektor perkebunan, pertambangan, dan perhutanan; (2) pajak penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21; dan (3). cukai hasil tembakau; sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- h. DBH yang bersumber dari sumber daya alam berasal dari: (1). penerimaan kehutanan yang berasal dari iuran Uin usaha pemanfaatan hutan, provisi sumber daya hutan, dan dana reboisasi yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan; (2). penerimaan pertambangan mineral dan batubara yang berasal dari penerimaan iuran tetap dan penerimaan iuran eksplorasi dan iuran eksploitasi yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan; (3). penerimaan negara dari sumber daya alam pertambangan minyak bumi yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan; (4). penerimaan negara dari sumber daya alam pertambangan gas bumi yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan; (5). penerimaan dari panas bumi yang berasal dari



penerimaan setoran bagian Pemerintah Pusat, iuran tetap, dan iuran produksi yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan; dan (6). penerimaan perikanan yang berasal dari pungutan pengusaha perikanan dan pungutan hasil perikanan yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan.

- i. Dana Transfer Khusus bersumber dari APBN yang dialokasikan pada Daerah untuk mendanai Kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- j. Dana insentif daerah sebagaimana bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/ atau pencapaian Kinerja tertentu.
- k. Dana otonomi khusus dialokasikan kepada Daerah yang memiliki otonomi khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- l. Dana keistimewaan dialokasikan kepada Daerah istimewa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- m. Dana desa sebagaimana bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- n. Pendapatan bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari Pendapatan Daerah yang dialokasikan kepada Daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- o. Bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari Daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.
- p. Bantuan keuangan terdiri atas: (1). bantuan keuangan dari Daerah provinsi; dan (2). bantuan keuangan dari Daerah kabupaten/kota.
- q. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah meliputi: (1). hibah; (2). dana darurat; dan/atau (3). lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- r. Hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan

penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- s. Dana darurat merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada Daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh Daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Gambaran pendapatan daerah dituangkan dalam tabel sebagai berikut :

**Tabel 3.1**  
**Proyeksi Pendapatan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021**

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)
	<b>Pendapatan Daerah</b>	<b>1,315,711,600,000,000,00</b>
1.1	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>143.155.130.000,00</b>
	Pajak Daerah	31.127.750.000,00
	Retribusi Daerah	7.548.980.000,00
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.000.000.000,00
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	94.478.400.000,000
	BLUD dan JKN	0,00
1.2	<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>1,172,556,470,000,00</b>
1.2.1	<b>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat</b>	<b>1,067,556,470,000,00</b>
1.2.1.1	<b>Dana Perimbangan- Dana Transfer Umum</b>	<b>919.594.570.000,00</b>
	Dana Bagi Hasil	352.494.270.000,00
	Dana Alokasi Umum	567.100.300.000,00
	• DAU Formula	558.663.764.000,00
	• DAU Bantuan Pendanaan Kelurahan	1.830.000.000,00
	• DAU Pendanaan Penggajian PPPK	6.606.536.000,00
1.2.1.2	<b>Dana Perimbangan- Dana Transfer Khusus</b>	<b>0,00</b>
	Dana Alokasi Khusus	0,00
1.2.1.5	<b>Dana Desa</b>	<b>111.509.100.000,00</b>
	Dana Desa	111.509.100.000,00
1.2.2	<b>Pendapatan Transfer Antar – Daerah</b>	<b>105.000.000.000,00</b>
	Pendapatan Bagi hasil	105.000.000.000,00
1.2.3	<b>Lain- Lain Pendapatan Daerah Yang Sah</b>	<b>0,00</b>

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)
	Hibah	0,00
	• Hibah Dana BOS Regular	36,452,800,000.00

Sumber :Badan Pendapatan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, 2020

### 3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan maka kebijakan pendanaan pembangunan dituntut lebih transparan, efisien, efektif, dan akuntabel serta berorientasi *money follow program* berbasis *money follow function* dimana pendekatan penganggaran lebih fokus pada program atau kegiatan yang terkait langsung dengan prioritas daerah serta memberikan dampak langsung bagi masyarakat dengan pendekatan pada tugas dan fungsi pokok SKPD.

Belanja Daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar. Kemudian Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.

Belanja Daerah dialokasikan dengan memprioritaskan pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal. Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait dengan Pelayanan Dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah. Kemudian Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Pilihan dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki Daerah. Belanja Daerah harus berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja Daerah harus dirinci menurut Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, Program, Kegiatan, jenis, obyek, dan rincian obyek Belanja Daerah. Urusan Pemerintahan daerah harus diselaraskan dan dipadukan dengan belanja negara yang diklasifikasikan menurut fungsi yang antara lain terdiri atas: (1). pelayanan umum; (2). ketertiban dan keamanan; (3). ekonomi; (4). perlindungan lingkungan hidup;

(5). perumahan dan fasilitas umum; (6). kesehatan; (7). pariwisata; (8). pendidikan; dan (9). Perlindungan sosial.

Kemudian Belanja Daerah menurut organisasi harus disesuaikan dengan susunan organisasi yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja Daerah menurut Program dan Kegiatan harus disesuaikan dengan Urusan Pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Program dan Kegiatan rinciannya paling sedikit mencakup: (1). target dan Sasaran; (2). indikator capaian Keluaran; dan (3). indikator capaian Hasil.

Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas:

- 1) Belanja operasi yaitu merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.
- 2) Belanja modal yaitu pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.
- 3) Belanja tidak terduga yaitu merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
- 4) Belanja transfer yaitu merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

Belanja operasi dirinci atas jenis: (1). belanja pegawai; (2). belanja barang dan jasa; (3). belanja bunga; (4). belanja subsidi; (5). belanja hibah; dan (6). belanja bantuan sosial. Belanja modal dirinci atas jenis belanja modal. Belanja tidak terduga dirinci atas jenis belanja tidak terduga. Belanja transfer dirinci atas jenis: (1). belanja bagi hasil; dan (2). belanja bantuan keuangan.

Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kompensasi diberikan kepada Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah, pimpinan / anggota DPRD, dan Pegawai ASN. Belanja Pegawai ASN dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tambahan penghasilan diberikan berdasarkan pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi

kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya. Pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN daerah ditetapkan dengan Perkada dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

Dalam hal belum adanya Peraturan Pemerintah Kepala Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan bagi Pegawai ASN setelah mendapat persetujuan Menteri. Persetujuan Menteri ditetapkan setelah memperoleh pertimbangan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. Dalam hal Kepala Daerah menetapkan pemberian tambahan penghasilan bagi Pegawai ASN tidak sesuai dengan ketentuan maka menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum atas usulan Menteri.

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga. Pengadaan barang jasa dalam rangka melaksanakan Program dan Kegiatan Pemerintahan Daerah.

Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok Utang berdasarkan perjanjian pinjaman.

Belanja subsidi digunakan agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.

Badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta merupakan badan yang menghasilkan produk atau jasa Pelayanan Dasar masyarakat. Badan usaha milik negara, BUMD, badan usaha milik swasta, dan/atau badan hukum lain yang akan diberikan subsidi terlebih dahulu dilakukan audit keuangan oleh kantor akuntan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang

pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap memenuhi kriteria: (1). mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan; (2). digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan (3). batas minimal kapitalisasi aset.

Belanja bagi hasil dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja bantuan keuangan diberikan kepada Daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan /atau tujuan tertentu lainnya. Bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bantuan keuangan terdiri atas: (a). bantuan keuangan antar-Daerah provinsi; (b). bantuan keuangan antar-Daerah kabupaten/kota; (c). bantuan Keuangan Daerah provinsi ke Daerah kabupaten / kota di wilayahnya dan/atau Daerah kabupaten/kota di luar wilayahnya; (d). bantuan Keuangan Daerah kabupaten/kota ke Daerah provinsinya dan/atau Daerah provinsi lainnya; dan/atau (e). bantuan Keuangan Daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya. Dalam hal belanja tidak dimaksud tidak mencukupi, menggunakan: (a). dana terduga sebagaimana dari hasil penjadwalan ulang capaian Program dan Kegiatan lainnya serta pengeluaran

Pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau (b). memanfaatkan kas yang tersedia.

Proyeksi belanja daerah Kabupaten Tanah Laut 2021 sebesar Rp.1,701,504,489,441.49

selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.4 berikut.

**Tabel 3.2.**  
**Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut**  
**Tahun 2021**

NO	Uraian	Anggaran (Rp)
<b>2</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	
<b>2.1</b>	<b>Belanja Operasi</b>	<b>1,230,609,111,605.49</b>
	<b>Belanja Pegawai</b>	794,350,585,291.49
	• Belanja Gaji dan Tunjangan, Belanja Pegawai	438.697.511.687,90
	• Iuran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan	30.779.062.987,00
	• Belanja Tambahan Penghasilan	300.000.000.000,00
	• Belanja Pegawai Pendanaan Kelurahan dari APBD dan APBN, Belanja Pegawai BLUD, honorarium Tim dll	19.669.487.316,59
	• Belanja Pegawai Dana Bos	5,204,523,300.00
	<b>Belanja Barang dan jasa</b>	<b>399.793.827.764,00</b>
	• Belanja Barang dan jasa BLUD, BOS	27,787,173,864.00
	• Belanja Gaji PTT, Iuran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan	
	• Belanja Barang dan jasa Bantuan Pendanaan Kelurahan dari APBN dan APBD	
	• Belanja Barang dan jasa	
	<b>Belanja Hibah</b>	<b>26.464.698.550,00</b>
	• Belanja Hibah 11 Kecamatan	11.000.000.000,00
	• Belanja Hibah Kepada Parpol	1.464.698.550,00
	• Belanja Hibah Lainnya	14.000.000.000,00
	<b>Belanja Bantuan Sosial</b>	<b>10.000.000.000,00</b>
	• Belanja Bansos Terencana dan Tidak Terencana	
	• Belanja Bansos Lainnya	
<b>2.2</b>	<b>Belanja Modal</b>	206,234,253,586
	<b>Belanja Modal</b>	<b>202.773.150.750,00</b>
	• Belanja Modal Dana BOS	3,461,102,836.00
	• Belanja Modal Bantuan Pendanaan Kelurahan dari APBN dan APBD	
	• Belanja Modal Lainnya	
<b>2.3.</b>	<b>Belanja Tidak Terduga</b>	<b>10.000.000.000,00</b>
	Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000,00

NO	Uraian	Anggaran (Rp)
<b>2.4.</b>	<b>Belanja Transfer</b>	<b>254.661.124.250,00</b>
	<b>Belanja Bagi Hasil</b>	<b>3.816.266.200,00</b>
	• Belanja Bagi Hasil Pajak kepada Pemdes	3.014.850.298,00
	• Belanja Bagi Hasil Retribusi kepada Pemdes	801.415.902,00
	<b>Belanja Bantuan Keuangan</b>	<b>250.844.858.050,00</b>
	• Belanja Bantuan Keuangan ADD kepada Pemdes	250.844.858.050,00
	• Belanja Bantuan Keuangan kepada Parpol	0,00
	<b>Jumlah Belanja Daerah</b>	<b>1,701,504,489,441.49</b>

Sumber: BPKADPemerintah Kabupaten Tanah Laut, 2020

### 3.2.3 Arah Kebijakan Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah terdiri atas: (a). penerimaan Pembiayaan; dan (b). pengeluaran Pembiayaan. Pembiayaan daerah dirinci menurut Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, jenis, obyek, dan rincian obyek Pembiayaan daerah.

Penerimaan Pembiayaan daerah bersumber dari: (1). SiLPA; (2). pencairan Dana Cadangan; (3). hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; (4). penerimaan Pinjaman Daerah; (5). penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau (6). penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengeluaran Pembiayaan dapat digunakan untuk Pembiayaan: (1). pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo; (2). penyertaan modal daerah; (3). pembentukan Dana Cadangan; (4). Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau (5). pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembiayaan neto merupakan selisih penerimaan Pembiayaan terhadap pengeluaran Pembiayaan. Pembiayaan neto digunakan untuk menutup defisit anggaran. Proyeksi pembiayaan Kabupaten Tanah Laut tahun 2021 sebesar Rp.385.792.889.441,49 (tabel 3.5).

**Tabel 3.3.**

### **Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021**

NO	Uraian	Anggaran (Rp)
<b>3.</b>	<b>Pembiayaan Daerah</b>	
<b>3.1</b>	<b>Penerimaan Pembiayaan Daerah</b>	
	Sisa Lebih Perhitungan anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya	455.792.889.441,49
	<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>455.792.889.441,49</b>



<b>NO</b>	<b>Uraian</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>
<b>3.2</b>	<b>Pengeluaran Pembiayaan Daerah</b>	
	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	35.000.000.000,00
	• Penyertaan Modal	
	• BPR	0,00
	• Bank Kalsel	15.000.000.000,00
	• BUMD Tala Menuntung	10.000.000.000,00
	• BUMD Baratala	10.000.000.000,00
	Pemberian Pinjaman Daerah	35.000.000.000,00
	• Investasi Langsung Kepada Lembaga Bank/Non Bank	35.000.000.000,00
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>70.000.000.000,00</b>
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>385.792.889.441,49</b>
	<b>SILPA Tahun Anggaran Berkenaan</b>	<b>0,00</b>

Sumber: BPKAD Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, 2020

## BAB IV

### PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Perencanaan pembangunan tahun 2021 ini merupakan tahun kedua dari tahapan ke-3 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang telah ditetapkan dengan Perda Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tanah Laut Tahun 2018-2023, perencanaan tahun 2021 dirumuskan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023, kebijakan penataan ruang yang tertuang dalam Perda Nomor 3 Tahun 2016, hasil evaluasi RKPD tahun 2019 dan capaian kinerja RPJMD tahun 2019, identifikasi isu strategis, serta permasalahan-permasalahan yang mendesak. Penentuan sasaran dan prioritas pembangunan nasional memperhatikan sasaran pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN dan RPJMD Propinsi Kalimantan Selatan, juga memperhatikan prioritas nasional dalam RKP dan RKPD Provinsi Kalimantan Selatan.

#### 4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Dalam upaya mewujudkan visi, misi dan tujuan seperti yang diamanatkan oleh Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018 – 2023 maka sasaran daerah harus dijabarkan secara lebih rinci dan terukur untuk mempermudah operasional pencapaian tujuan pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Adapun tujuan dan sasaran pembangunan daerah Tahun 2021 disajikan di Tabel 4.1 berikut:

**Tabel 4.1 Hubungan Tujuan, Sasaran Pembangunan Daerah  
Kabupaten Tanah Laut**

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
Peningkatan layanan bidang pendidikan dan pelatihan yang berkualitas, merata dan terjangkau bagi seluruh masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan bidang pendidikan	Angka rata-rata lama sekolah
		Meningkatnya kompetensi pencari kerja melalui pelatihan kerja berbasis kompetensi	Harapan lama sekolah Jumlah Tenaga Kerja Siap Kerja
Peningkatan layanan bidang kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau bagi seluruh masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan bidang kesehatan	Angka Harapan Hidup
			Cakupan Kinerja Pelayanan Kesehatan <i>On Call</i>

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
Peningkatan kualitas layanan masyarakat lainnya secara merata dan terjangkau untuk mendukung pembangunan ekonomi, sosial dan budaya	Indeks Kepuasan Masyarakat	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan masyarakat lainnya	Angka Kelahiran Total ( <i>Total Fertility Rate</i> )
			Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Catatan Sipil (%)
			Cakupan Kinerja Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) (%)
		Meningkatnya pelestarian/pengembangan budaya dan prestasi generasi muda dan olah raga	Cakupan Pelestarian dan Pengembangan Budaya daerah (%)
			Indeks Pembangunan Pemuda
		Meningkatnya pelayanan masyarakat berbasis teknologi informasi	Jumlah Atlet yang berprestasi
			Persentase permohonan pelayanan publik berbasis teknologi informasi yang ditindaklanjuti oleh SKPD (%)
Peningkatan Inovasi dalam Pelayanan Publik	Jumlah penghargaan <i>inovasi public</i>	Meningkatnya inovasi pelayanan publik	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik yang didaftarkan
Peningkatan Inovasi di masyarakat dan Pengembangan Industri Kreatif	Jumlah Industri Kreatif yang memberi nilai tambah terhadap perekonomian	Meningkatnya penerapan teknologi inovatif di Masyarakat	Jumlah usaha dan kelompok masyarakat pengguna teknologi inovatif yang berkembang (unit)
		Meningkatnya Kontribusi Industri Kreatif dalam perekonomian	Jumlah Industri Kreatif yang tumbuh dan berkembang (unit)
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan dan reformasi pelayanan publik	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Daerah (kategori)
			Opini Pengawas Eksternal (BPK) terhadap Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah (opini)
		Meningkatnya transparansi penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks keterbukaan informasi publik
		Meningkatnya penggunaan sistem informasi daerah dan kompetensi aparatur	Perangkat daerah yang memiliki layanan Pengelola Informasi dan Dokumentasi (SKPD)
Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia	Persentase tingkat kerukunan antar umat beragama	Meningkatnya toleransi dan kepedulian sosial antar umat beragama	Jumlah konflik intern dan antarumat beragama (kasus)

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
		Meningkatnya wawasan kebangsaan	Jumlah konflik sosial (kasus)
		Meningkatnya aksi sosial keagamaan	Cakupan Kinerja Program Aksi Keagamaan dan Sosial lingkup Kecamatan
Meningkatkan kesejahteraan sosial	Angka Kemiskinan	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi
			Indeks Gini (skor)
			PDRB per kapita
		Meningkatnya peranan perempuan dalam pembangunan daerah	Indeks Pembangunan Gender (skor)
		Menurunnya tingkat pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)
		Meningkatnya perlindungan masyarakat	Indeks Resiko Bencana Daerah (skor)
			Persentase Penyelesaian Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (%)
Terwujudnya pembangunan Infrastruktur Sosial dan Ekonomi yang berkualitas	Indeks Pembangunan Infrastruktur	Meningkatnya Infrastruktur Sosial dan Ekonomi yang berkualitas	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik
			Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik (%)
			Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak (%)
			Cakupan penduduk berakses air minum sehat (%)
Peningkatan kinerja sektor unggulan daerah	Persentase Pertumbuhan sektor unggulan daerah	Meningkatnya kinerja unit usaha sektor unggulan daerah	Jumlah pelaku usaha dan kelompok tani/ nelayan yang terfasilitasi pelayanan kredit tanpa agunan dan bunga 0%
			Pertumbuhan sektor Pertanian
			Pertumbuhan sektor Industri olahan
			Jumlah kunjungan wisatawan di objek wisata yang dikembangkan pemerintah (orang)
		Meningkatnya ketahanan pangan	Skor PPH Ketersediaan (nilai)
			Desa Berketahanan Pangan (%)

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (skor)
			Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW Kabupaten (%)
Peningkatan Upaya Membina Desa dan Menata Kota	Indeks Desa Membangun	Meningkatnya Pembinaan Desa	Cakupan desa yang tata kelola pemerintahan baik (%)
			Cakupan Kinerja Pengelolaan ADD untuk Desa Membangun (%)
			Cakupan Kinerja Program Aksi Membangun Bersama Masyarakat (Program Unggulan #7) (desa)
			Jumlah Desa di bina berciri khas
		Meningkatnya Cakupan Penataan Perkotaan	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan (%)
			Persentase Penataan Pasar Pelaihari (%)

#### 4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2021

Pembangunan yang direncanakan pada tahun 2021 merupakan tahun ketigadari pelaksanaan pembangunan lima tahunan RPJMD Kabupaten Tanah Laut. Dalam merencanakan pembangunan tidak terlepas dari target yang sudah ditetapkan yang dapat dilihat pada Bab VI tentang Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah.

##### 4.2.1 Keselarasan Tema dan Prioritas RKP, RKPD Provinsi Kalimantan Selatan dan RKPD Tanah Laut Tahun 2021

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021 (RKP 2021) adalah terdiri dari 7 (tujuh) prioritas utama yaitu:

- SDM berkualitas dan berdaya saing.
- Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.
- Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan.
- Pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan.
- Infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar.
- Lingkungan hidup, ketahanan bencana dan perubahan iklim.
- Stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 dengan 5 (lima) prioritas utama yang ditetapkan meliputi :

- a. Peningkatan Kualitas dan Daya Saing SDM
- b. Transformasi Struktur Ekonomi ke Sektor Industri, Pertanian dan Pariwisata
- c. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup untuk memperkuat ketahanan Bencana
- d. Perkuatan Sarana Prasarana Dasar dan Perekonomian
- e. Peningkatan Tata kelola pemerintahan.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 dengan 4 (empat) prioritas sebagai berikut:

- a. Peningkatan kualitas sumber daya manusia.
- b. Pengurangan kemiskinan dan transformasi ekonomi.
- c. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berkualitas.
- d. Tata kelola birokrasi pemerintahan

Indikasi Tema Pembangunan Tanah Laut dalam RPJMD 2018-2023 untuk tahun 2021 adalah Memacu Kebijakan Berinteraksi dalam Membina Desa dan Menata Kota untuk Pemerataan dan Pertumbuhan yang Berkualitas. Mendasari pada tema pembangunan RKP, RKPD Provinsi Kalimantan Selatan, indikatif tema Kabupaten Tanah Laut dalam RPJMD, maka tema Pembangunan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut tahun 2021 adalah “Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Sosial untuk Pemantapan Kebijakan BERINTERAKSI dalam Membina Desa dan Menata Kota”. Sesuai dengan prioritas pembangunan tersebut ditetapkan 4 (empat) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 sebagai berikut.

#### 1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

Prioritas ini terdiri dari:

- a) Pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan. Fokus prioritas yaitu: (1). Terwujudnya pemerataan dan perluasan akses pelayanan pendidikan yang berkualitas disemua jenjang, (2). Terwujudnya kualitas pendidikan yang berdaya saing. (3). Terwujudnya Adat dan Budaya yang Lestari.
- b) Pembangunan Kesehatan. Fokus prioritas yaitu: (1). Meningkatkan Status Kesehatan Masyarakat, dan (2). Meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan

- c) Pembangunan Kesejahteraan Sosial. Fokus prioritas yaitu: (1).Meningkatkan Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi PMKS,(2). Meningkatkan Partisipasi Sosial Masyarakat dalam Penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

## 2. Pengurangan kemiskinan dan transformasi ekonomi

Prioritas ini terdiri dari:

- a) Memperkuat sektor pertanian, industri pengolahan dan pariwisata. Fokus prioritas yaitu: (1).Upaya peningkatan produksi hasil pertanian, (2).Penataan Kluster Industri , (3).Percepatan pembangunan kawasan industri Jorong yang merupakan salah satu PSN, (4).Peningkatan konektivitas sentra produksi produk unggulan, (5).Operasional dan optimalisasi fungsi pelabuhan Swarangan, (6).Memaksimalkan potensi objek wisata yang telah ada seperti wisatagunung khayangan dengan pemagaran dan pembangunan kebun raya mini (taman rusa), (7).Pengembangan destinasi objek wisata dan memunculkan destinasi wisata baru seperti wisata kerbau rawa, wisata susur sungai pantai Sabuhur.
- b) Dukungan terhadap pertumbuhan dan pengembangan investasi di Kabupaten Tanah Laut.
- c) Menekan dan mengurangi angka pengangguran dengan menumbuhkan lapangan kerja baru dan pelatihan berbasis vokasi.
- d) Pembangunan Kesejahteraan Sosial. Fokus prioritasnya yaitu: (1).Meningkatkan Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi PMKS, (2).Meningkatkan Partisipasi Sosial Masyarakat dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

## 3. Pembangunan infrastruktur yang berkualitas

Prioritas ini terdiri dari:

- a) Peningkatan Kualitas jalan menjadi prioritas karena termasuk dalam 7 program unggulan.
- b) Standar Pelayanan Minimal yang harus disediakan oleh pemerintah daerah diantaranya melalui (1). Program Kotaku ( Kawasan Kumuh ) (2). Program Pamsimas, (3). Program yang didanai oleh ADD, didanai oleh CSR, didanai oleh Pusat.
- c) Koordinasi yang lebih intensif terhadap tutupan hutan ( wewenang provinsi).

- d) Keberlanjutan program- program penanganan kawasan kumuh.
4. Tata kelola birokrasi pemerintahan.

Prioritas ini terdiri dari:

- a) Penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
- b) Penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
- c) Penguatan Reformasi Birokrasi (RB)
- d) Penguatan Sistem Layanan Publik berbasis Elektronik.

#### 4.2.2 Keselarasan Prioritas Pembangunan dengan Sasaran Daerah

Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam hal pencapaian Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021, maka diperlukan keselarasan antara sasaran daerah dengan prioritas pembangunan Kabupaten Tanah Laut yang telah ditetapkan. Gambaran tentang keselarasan sasaran daerah 2021 dengan prioritas pembangunan tahun 2021 dapat dilihat pada Gambar 4.1 berikut ini

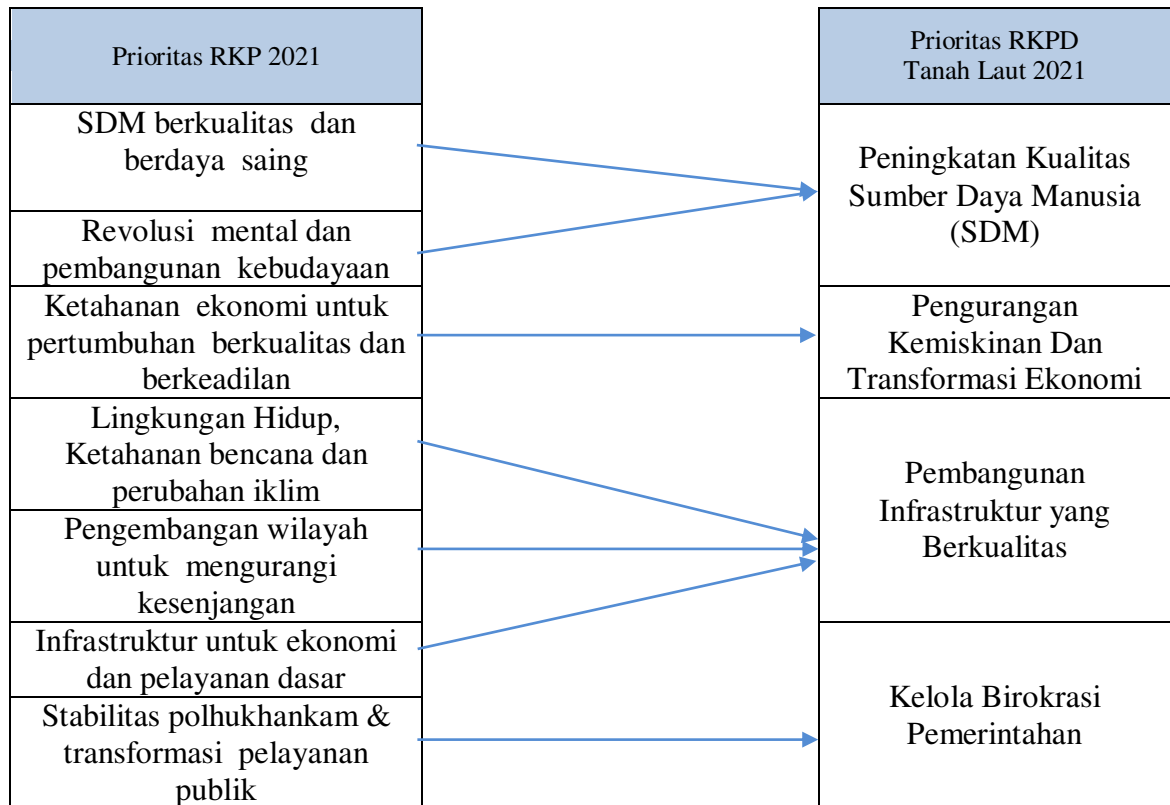
Sasaran Daerah 2021	Prioritas Daerah 2021
(1).Meningkatnya pemerataan dan perluasan akses pelayanan pendidikan yang berkualitas disemua jenjang, (2). Meningkatkan kualitas pendidikan yang berdaya saing. (3). Meningkatkan pelestarian adat dan budaya.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)
(1).Meningkatnya status kesehatan masyarakat, dan (2). Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan	
(1).Meningkatnya pelayanan kesejahteraan sosial bagi PMKS, (2). Meningkatkan partisipasi sosial masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.	
(1).Meningkatnya produksi hasil pertanian, (2). Tertatanya Kluster Industri, (3). Meningkatkan pembangunan kawasan industri Jorong yang merupakan salah satu PSN, (4). Meningkatkan konektivitas sentra produksi produk unggulan, (5). Meningkatkan fungsi pelabuhan Swarangan, (6). Meningkatkan objek wisata yang telah ada seperti wisatagunung khayangan dengan pemagaran dan pembangunan kebun raya mini (taman rusa), (7). Berkembangnya destinasi objek wisata dan memunculkan destinasi wisata baru seperti wisata kerbau rawa, wisata susur sungai pantai Sabuhur. (8). Berkurangnya angka pengangguran, (9). Berkurangnya angka	Pengurangan Kemiskinan Dan Transformasi Ekonomi



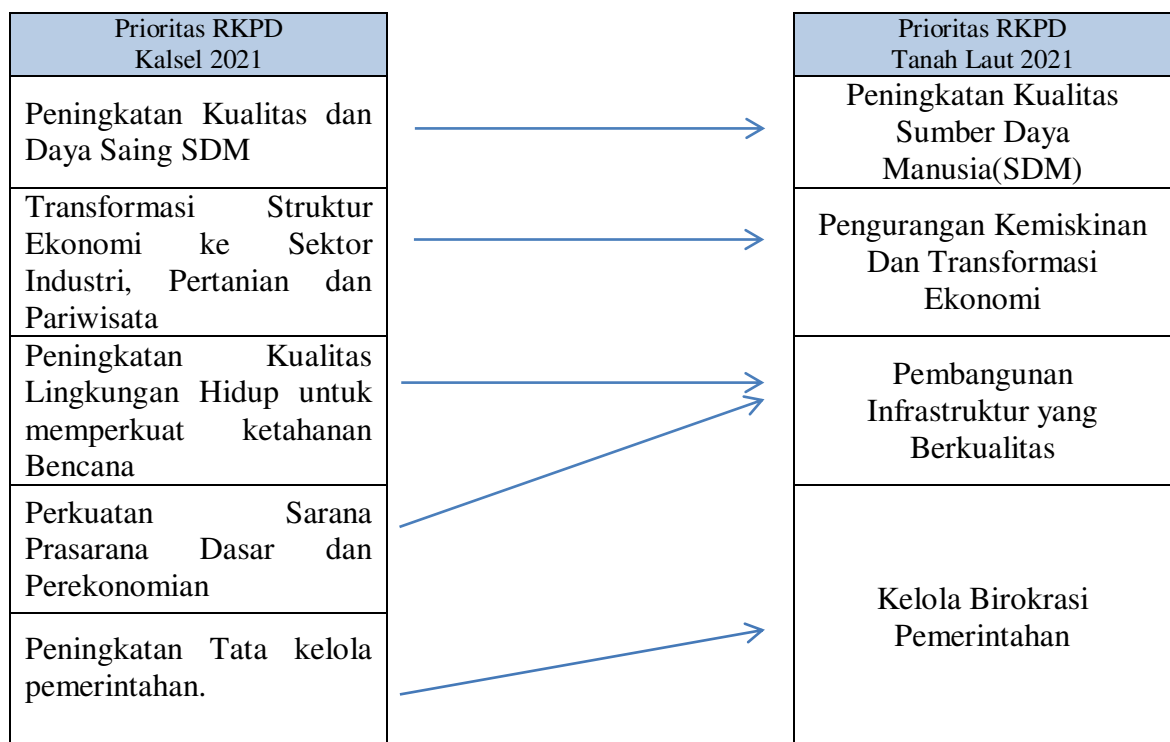
kemiskinan,(10).Meningkatnya pertumbuhan investasi disemua sektor.	
Meningkatnya Kualitas jalan menjadi prioritas karena termasuk dalam 7 program unggulan.	Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas
Meningkatnya pengelolaan kualitas lingkungan hidup, dan meningkatnya pengendalian pemanfaatan ruang.	
Meningkatnya penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).	Tata Kelola Birokrasi Pemerintahan
Meningkatnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	
Menguatnya Reformasi Birokrasi (RB) dan Sistem Layanan Publik berbasis Elektronik	

**Gambar 4.1****Penyelarasan sasaran daerah dengan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2021****4.2.3 Sinkronisasi prioritas RKP, RKPD Provinsi Kalimantan Selatan dengan RKPD Tanah Laut**

Penyelarasan prioritas pembangunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2021 dengan RKPD Kabupaten Tanah Laut tahun 2021 dan RKPD Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2021 dengan RKPD Kabupaten Tanah Laut tahun 2021, dapat diselaraskan dan disinkronkan dengan gambar berikut.



**Gambar 4.2** Penyelarasan prioritas RKP dengan RKPD Kabupaten Tanah Laut



**Gambar 4.3** Penyelarasan prioritas RKPD Provinsi Kalimantan Selatan dengan RKPD Kabupaten Tanah Laut

#### 4.2.4 Sinkronisasi Prioritas Daerah dengan Standar Pelayanan Minimal

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) mengamanatkan 6 (enam) urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang terdiri dari pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan sosial. Dalam RKPD ini SPM yang berkaitan dengan 6 (enam) urusan wajib tersebut dilaksanakan dan sudah disinkronkan dengan prioritas daerah tahun 2021 (lihat tabel 4.2).

**Tabel 4.2 Keselarasan antara Standar Pelayanan Minimal dan Prioritas Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021**

Bidang SPM	Jenis Pelayanan Dasar	Prioritas Daerah
Pendidikan	Pendidikan Anak Usia Dini	Pembangunan sumber daya manusia (SDM)
	Pendidikan Dasar	
	Pendidikan Kesetaraan	
Kesehatan	Pelayanan kesehatan ibu hamil;	Pembangunan sumber daya manusia (SDM)
	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	
	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir;	
	Pelayanan kesehatan balita;	
	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;	
	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	
	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	
	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	
	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;	
	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;	
	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; dan	
	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (human immunodeficiency virus), yang bersifat peningkatan/promotif dan pencegahan/preventif	
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari;	Pengurangan kemiskinan dan transformasi ekonomi.
	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.	
Perumahan dan Kawasan Permukiman	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Pembangunan infrastruktur yang berkualitas
	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota.	
Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	Pengurangan kemiskinan dan transformasi ekonomi.
	Pelayanan informasi rawan bencana	
	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan	

Bidang SPM	Jenis Pelayanan Dasar	Prioritas Daerah
Sosial	terhadap bencana	Tata kelola birokrasi pemerintahan
	Pelayanan penyelamatan bencana dan evakuasi korban bencana	
	Pelayanan penyelamatan bencana dan evakuasi korban kebakaran	
	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti;	
	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti;	
	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti;	
	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan	
	perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	

#### 4.2.5 Strategi dan Kebijakan Pencapaian Prioritas

Strategi dan arah kebijakan dalam pencapaian prioritas pembangunan yang ditetapkan tahun 2021 seperti pada uraian berikut ini.

##### 1. Pembangunan sumber daya manusia

- Strategi :
1. Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan jenjang TK, SD dan SMP.
  2. Meningkatkan pembinaan olah raga prestasi dan pembinaan pemuda
  3. Meningkatkan kualitas pengelolaan perpustakaan
  4. Meningkatkan upaya promotif, preventif dan kuratif dan rehabilitatif kesehatan masyarakat
  5. Meningkatkan pelayanan, advokasi dan KIE keluarga berencana
  6. Meningkatkan pelestarian/pengembangan seni dan budaya
  7. Meningkatkan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja
  8. Meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan jenjang TK, SD dan SMP.
  9. Meningkatkan pelaksanaan pendidikan informal (Paket A, B dan C)
  10. Meningkatkan jumlah Guru yang tersedia

11. Meningkatkan pengelolaan dan pemeliharaan terhadap seni, budaya dan destinasi wisata.

- Kebijakan :
1. Pengintegrasian pendidikan karakter dalam kurikulum muatan lokal dan meningkatkan peran masyarakat dalam pendidikan karakter
  2. Peningkatan pembinaan olahraga dan generasi muda
  3. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia perpustakaan
  4. Peningkatan pembinaan pelaku seni budaya dan pengelolaan cagar/warisan budaya
  5. Peningkatan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan kerja berbasis kompetensi untuk penyiapan tenaga kerja yang tangguh baik sebagai entrepreneur maupun pegawai
  6. Peningkatan promosi kesehatan, kesehatan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat
  7. Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit
  8. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya kesehatan
  9. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan
  10. Peningkatan pelayanan dan mengembangkan metode advokasi dan KIE keluarga berencana
  11. Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan jenjang TK, SD dan SMP.
  12. Peningkatan pelaksanaan pendidikan informal (Paket A, B, C)  
Peningkatan jumlah Guru yang tersedia
  13. Peningkatan pengelolaan dan pemeliharaan terhadap
  14. seni, budaya dan destinasi wisata.

## 2. Pengurangan kemiskinan dan transformasi ekonomi

- Strategi :
1. Meningkatkan produksi hasil pertanian
  2. Melakukan Penataan Klaster Industri
  3. Mempercepat pembangunan kawasan industri Jorong yang merupakan salah satu PSN
  4. Meningkatkan konektivitas sentra produksi produk unggulan

5. Melakukan Operasional dan optimalisasi fungsi pelabuhan Swarangan
6. Memaksimalkan potensi objek wisata yang telah ada seperti wisatagunung khayangan dengan pemagaran dan pembangunan kebun raya mini (taman rusa).
7. Mengembangkan destinasi objek wisata dan memunculkan destinasi wisata baru seperti wisata kerbau rawa, wisata susur sungai pantai Sabuhur.
8. Meningkatkan usaha perdagangan, industri, KUMKM yang kompetitif berbasis kemandirian dan potensi lokal
9. Meningkatkan daya saing komoditas unggulan pertanian dan perikanan
10. Meningkatkan investasi yang mendorong perekonomian rakyat dan kesempatan kerja
11. Meningkatkan perlindungan sosial.

- Kebijakan :
1. Peningkatan produksi hasil pertanian
  2. Penataan Klaster Industri
  3. Percepatan pembangunan kawasan industri Jorong yang merupakan salah satu PSN
  4. Peningkatan konektivitas sentra produksi produk unggulan
  5. Pelaksanaan operasional dan optimalisasi fungsi pelabuhan Swarangan
  6. Peningkatan potensi objek wisata yang telah ada seperti wisatagunung khayangan dengan pemagaran dan pembangunan kebun raya mini (taman rusa).
  7. Peningkatan destinasi objek wisata dan memunculkan destinasi wisata baru seperti wisata kerbau rawa, wisata susur sungai pantai Sabuhur.
  8. Peningkatan usaha perdagangan, industri, KUMKM yang kompetitif berbasis kemandirian dan potensi lokal
  9. Peningkatan daya saing komoditas unggulan pertanian dan perikanan

10. Peningkatan investasi yang mendorong perekonomian rakyat dan kesempatan kerja
11. Peningkatan perlindungan sosial.

### 3. Pembangunan infrastruktur yang berkualitas

- Strategi : 1. Meningkatkan infrastruktur berbasis kawasan
2. Meningkatkan pengelolaan lingkungan
3. Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang dan pertanahan
4. Meningkatkan penanganan bencana alam
- Kebijakan : 1. Percepatan pembangunan infrastruktur meliputi infrastruktur jalan, jembatan, pariwisata, pendidikan, kesehatan, perdagangan, dan perkantoran baru
2. Peningkatan manajemen dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan
3. Peningkatan manajemen dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan tata ruang dan pertanahan
4. Peningkatan peran masyarakat dalam penanganan bencana

### 4. Tata kelola birokrasi pemerintahan

- Strategi : 1. Membangun sistem penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif
2. Meningkatkan sistem pelayanan publik
3. Meningkatkan upaya pencegahan dalam memelihara ketertiban dan keamanan lingkungan
- Kebijakan : 1. Peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
2. Peningkatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
3. Peningkatan Reformasi Birokrasi (RB)
4. Peningkatan Sistem Layanan Publik berbasis Elektronik

**4.2.6. Program unggulan Kabupaten Tanah Laut pada Tahun 2021**

1. Kredit Tanpa Agunan dan Bunga 0% untuk Pertanian, Nelayan, Perikanan, UMKM sebesar 100M.
2. Peningkatan Alokasi Dana Pembangunan Desa sebesar 50%.
3. Kegiatan Keagamaan dan Sosial di Setiap Kecamatan dialokasikan minimal 1 M.
4. Pelatihan Tenaga Kerja “Siap Kerja” minimal 500 Orang per Tahun.
5. Pelayanan Kesehatan oleh Dokter / Paramedis Langsung ke Rumah secara Gratis.
6. Peningkatan/Pengaspalan minimal 85% Jalan Kabupaten.
7. Menginap dan Bersama Masyarakat di 135 Desa / Kelurahan selama Masa Jabatan.



## **BAB V**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH**

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Laut tahun 2021 merupakan dokumen rencana tahunan memuat program dan kegiatan yang merupakan penjabaran RPJMD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023, dalam rangka untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun dengan memperhatikan evaluasi pembangunan tahunan dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, isu strategis yang berkembang, aspirasi masyarakat serta pokok-pokok pikiran DPRD.

Penyusunan RKPD 2021 tetap berpedoman pada RPJMD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023 dengan lampiran hasil pemetaan sesuai Permendagri 90 Tahun 2019, kemudian terkait hasil pemetaan dan adanya pemutakhiran akan menjadi bahan untuk penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021.

Dalam usaha mencapai sasaran prioritas pembangunan, maka dirumuskan program dan kegiatan prioritas RKPD tahun 2021 untuk mendukung terwujudnya capaian visi, misi dan tujuan pembangunan jangka menengah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023. Program dan Kegiatan Prioritas Pemerintah Kabupaten Tanah Laut pada RKPD Kabupaten Tanah Laut tahun 2021 yang telah disinkronkan dengan prioritas pembangunan nasional dan prioritas pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut.

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2021**  
**KABUPATEN TANAH LAUT**

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			-								
	Tata kelola birokrasi Pemerintahan	Meningkatnya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Nilai IKM	3 Nilai					Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
			Penyediaan jasa surat menyurat	SKPD			Terlaksananya Administrasi Umum Kantor 12 Bulan	12 Bulan	231.731.034	-	
			Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	SKPD			Terlaksananya Administrasi Umum Kantor 12 Bulan	12 Bulan	9.250.000	-	
			Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	SKPD			Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional 12 Bulan	12 Bulan	44.150.000	-	
			Penyediaan jasa kebersihan kantor	SKPD			Terlaksananya pembelian sarana kebersihan kantor 12 Bulan	12 Bulan	13.697.474	-	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	SKPD			Terlaksananya perbaikan Komputer/laptop; Terlaksananya perbaikan perabot kantor; Terlaksananya perbaikan Ac; Terlaksananya perbaikan Printer 12 Bulan	12 Bulan	45.250.000	-	
			Penyediaan alat tulis kantor	SKPD			Terlaksananya pembelian ATK 12 Bulan	12 Bulan	59.483.200	-	
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	SKPD			Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 12 Bulan	12 Bulan	38.714.600	-	
			Penyediaan peralatan rumah tangga	SKPD			Terlaksananya Adminstrasi Umum Kantor 12 Bulan	12 Bulan	16.232.500	-	
			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	SKPD			Terlaksananya Administrasi Umum Kantor 12 Bulan	12 Bulan	3.960.000	-	
			Penyediaan bahan logistik kantor	SKPD			Terlaksananya Administrasi Umum Kantor 12 Bulan	12 Bulan	81.450.000	-	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penyediaan makanan dan minuman	SKPD			Terpenuhinya Penyediaan Administrasi Perkantoran 12 Bulan	12 Bulan	40.000.000	-	
			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	SKPD			Terlaksananya Pembayaran Rekening Telpon, Listrik, Air dan Internet 12 Bulan	12 Bulan	193.000.000	-	
			Penyediaan rapat-rapat, konsultasi, dan koordinasi	SKPD			Jumlah SPPD 230 SPPD	230 SPPD	404.549.348	-	
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	SKPD			Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN 12 Bulan	12 Bulan	11.677.558.612	-	
			Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan dan Pelayanan SKPD		Nilai IKM	3 Nilai					Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
			Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	Kabupaten			Jumlah Pameran 2 Kegiatan Pameran	2 Kegiatan Pameran	30.026.000	-	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		IKM	85 Baik					Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penyediaan jasa surat menyurat	SKPD			Jumlah Honorarium Petugas Front Office Pelayanan Satu Pintu 48 Orang / Bulan	48 Orang / Bulan	93.565.344	-	
			Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	SKPD			Jumlah Honorarium Petugas Jaga Malam Kantor BKPSDM 24 Orang / Bulan Jumlah Honorarium Petugas Jaga Malam Kantor Pelayanan Satu Pintu BKPSDM 24 Orang / Bulan Jumlah Honorarium Petugas Jaga Malam Diklat Loka Bina Praja 12 Orang / Bulan	24 Orang / Bulan 24 Orang / Bulan 12 Orang / Bulan	115.456.680	-	
			Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	SKPD			Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional Roda 4 Yang Dipelihara 3 Buah Jumlah Kendaraan	3 Buah 9 Buah	50.030.000	-	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Dinas / Operasional Roda 2 Yang Dipelihara 9 Buah				
			Penyediaan jasa kebersihan kantor	SKPD			Jumlah Honorarium Petugas Kebersihan Kantor BKPSDM 24 Orang / Bulan Jumlah Honorarium Petugas Kebersihan Halaman / Pekarangan Kantor BKPSDM 12 Orang / Bulan Jumlah Honorarium Petugas Kebersihan Halaman / Pekarangan Diklat Loka Blna Praja 24 Orang / Bulan Jumlah Honorarium Petugas	24 Orang / Bulan 12 Orang / Bulan 24 Orang / Bulan 12 Orang / Bulan 23 Jenis 12 Jenis	152.947.616	-	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Kebersihan Gedung Diklat Loka Bina Praja 12 Orang / Bulan Jumlah Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih 23 Jenis Jumlah Bibit Tanaman 12 Jenis				
			Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	SKPD			Jumlah Peralatan Kerja Yang Diperbaiki 20 Jenis	20 Jenis	48.474.000	-	
			Penyediaan alat tulis kantor	SKPD			Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor 53 Jenis	53 Jenis	21.430.600	-	
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	SKPD			Jumlah Jenis Dokuemn Yang Dicitak 23 Jenis	23 Jenis	38.047.700	-	
			Penyediaan peralatan rumah tangga	SKPD			Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga 13 Jenis	13 Jenis	4.150.000	-	
			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	SKPD			Jumlah Surat Kabar Harian 36 Eksemplar / Bulan	36 Eksemplar / Bulan	3.600.000	-	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penyediaan makanan dan minuman	SKPD			Jumlah Makanan dan Minuman Tamu 100 Orang Jumlah Makanan dan Minuman Rapat 12 Kali	100 Orang 12 Kali	31.300.000	-	
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	SKPD			Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi 12 Bulan Perjalanan Dinas Dalam Daerah 12 Bulan Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi 12 Bulan	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	750.000.000	-	
			Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	SKPD			Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor 13 Jenis	13 Jenis	585.956.490	-	
			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	SKPD			Jumlah Jenis Alat Listrik dan Elektronik 16 Jenis	16 Jenis	9.072.000	-	
			Penyediaan jasa administrasi keuangan	SKPD			Jumlah Jasa Transaksi Keuangan 12 bulan	12 bulan	3.250.000	-	



No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	SKPD			Jumlah Rekening Telepon, Air, dan Listrik Yang Terbayar 36 Rekening / Bulan	36 Rekening / Bulan	175.118.000	-	
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	SKPD			Jumlah ASN BKPSDM 35 Orang Jumlah Calon ASN 200 Orang Jumlah P3K 58 Orang	35 Orang 200 Orang 58 Orang	38.145.492.394	-	
			Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan dan Pelayanan SKPD		IKM	0 Baik					Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
			Pelaksanaan kegiatan Pameran Pembangunan	SKPD			Jumlah Event 2 Event	2 Event	25.000.000	25.000.000	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		IKM	3 Nilai					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penyediaan jasa surat menyurat	SKPD			Tersedianya jasa operator komputer selaku resepsionis & administrasi umum serta kepegawiaan untuk mendukung peningkatan pelayanan kesekretariatan 12 Bulan	12 Bulan	46.353.600	46.353.600	
			Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	SKPD			Terbayarnya honorarium Penjaga Barang Milik Daerah pada Bappeda 1 Tahun	1 Tahun	46.387.200	46.387.200	
			Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	SKPD			Terlaksananya pembayaran pajak dan STNK kendaraan bermotor roda 2 di tahun 2021 15 Unit Terlaksananya pembayaran pajak dan STNK kendaraan bermotor roda 4 di tahun 2021 4 Unit Terbayarnya honorarium Supir Dinas 1	15 Unit 4 Unit 1 Tahun	36.693.600	36.693.600	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Tahun				
			Penyediaan jasa kebersihan kantor	SKPD			Terlaksananya penyediaan jasa/petugas kebersihan kantor serta peralatan kebersihan dan bahan pembersih untuk peningkatan kebersihan dan kenyamanan kantor 12 Bulan	12 Bulan	76.010.500	76.010.500	
			Penyediaan alat tulis kantor	SKPD			Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor untuk lingkup Sekretariat Bappeda 12 Bulan	12 Bulan	29.424.300	29.424.300	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	SKPD			Terlaksananya pengadaan barang cetakan dan penyediaan penggandaan berkas/dokumen 12 Bulan	12 Bulan	32.900.000	32.900.000	
			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	SKPD			Tersedianya gaji dan tunjangan ASN pada lingkup Bappeda Kab. Tanah Laut 12 Bulan	12 Bulan	3.480.000	3.480.000	
			Penyediaan makanan dan minuman	SKPD			Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman rapat, makanan dan minuman tamu 12 Bulan	12 Bulan	56.000.000	56.000.000	
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	SKPD			Terlaksananya koordinasi ke luar daerah (dalam dan luar provinsi) 12 Bulan	12 Bulan	525.000.000	525.000.000	
			Penyediaan jasa penunjang kinerja SKPD	SKPD			Jumlah Orang 0 Orang	0 Orang	-	370.000.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	SKPD			Terlaksananya penyediaan kelengkapan komputer, spanduk, bendera, peralatan penunjang kinerja dan kelengkapannya 12 Bulan	12 Bulan	141.444.800	141.444.800	
			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	SKPD			Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 12 Bulan	12 Bulan	6.728.400	6.728.400	
			Penyediaan jasa administrasi keuangan	SKPD			Tersedianya jasa operator komputer untuk mendukung peningkatan pelayanan kesekretariatan pada subbag keuangan 12 Bulan	12 Bulan	25.876.800	25.876.800	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	SKPD			Jumlah jasa Komunikasi yang terbayar 12 Bulan Jumlah rekening jasa telpon yang terbayar 12 Bulan Jumlah jasa rekening listrik yang terbayar 12 Bulan Jumlah rekening jasa air yang terbayar 12 Bulan	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	219.000.000	219.000.000	
			Penyediaan jasa, bahan, peralatan dan perlengkapan perkantoran	SKPD			Jumlah Jenis 0 Jenis	0 Jenis	-	522.444.000	
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	SKPD			Terbayarnya gaji dan tunjangan bulanan, Gaji ke 13 & Gaji THR ASN 14 Kali Tambahan penghasilan pegawaiian berbasis kinerja pada lingkup Bappeda Kab. Tanah Laut 14 Kali	14 Kali 14 Kali	7.432.965.593	7.432.965.593	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan dan Pelayanan SKPD		IKM	0 Nilai					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Pelaksanaan kegiatan Pameran Pembangunan	SKPD			Jumlah Kegiatan (Pameran Hari Jadi dan Pameran Anggrek) 2 Kegiatan	2 Kegiatan	42.750.000	42.750.000	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Nilai IKM	78,28					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Penyediaan jasa surat menyurat	Luar Daerah, Kabupaten			Jumlah Surat Terkirim 12 bulan	12 bulan	1.104.460	-	
			Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	SKPD			Terbayarnya honor PTT,Asuransi Kesehatan,JKK dan JKM 2 orang 12 bulan	2 orang 12 bulan	46.183.152	-	
			Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	SKPD			Terbayarnya Honor PTT,Asuransi Kesehatan,JKK,J KM dan terpeliharanya kendaraan dinas /operasional 12 bulan	12 bulan	29.841.576	-	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penyediaan jasa kebersihan kantor	SKPD			Terbayarnya honor PTT,asuransi kesehatan,JKK,J KM dan tersedianya alat dan bahan kebersihan 4 orang 23 Macam 12 Bulan	4 orang 23 Macam 12 Bulan	131.434.080	-	
			Penyediaan alat tulis kantor				Jumlah Barang 40 Jenis 12 Bulan	40 Jenis 12 Bulan	49.394.700	-	
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan				Jumlah Barang 5 Macam 12 Bulan	5 Macam 12 Bulan	121.440.000	-	
			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan				Jumlah bahan bacaan 5 exemplar	5 exemplar	6.204.000	-	
			Penyediaan makanan dan minuman				Jumlah makan dan minum 2 Macam 12 Bulan	2 Macam 12 Bulan	37.780.000	-	
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah				Jumlah rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi 12 Bulan	12 Bulan	150.000.000	-	
			Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor				Jumlah Jenis 11 Macam 12 Bulan	11 Macam 12 Bulan	566.817.800	-	



No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD	
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)					
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				Jumlah jenis 11 macam 12 bulan	11 macam 12 bulan	8.039.000	-		
			Penyediaan jasa administrasi keuangan	SKPD			Terbayarnya honor PTT,asuransi kesehatan,JKK, dan JKM 2 orang 12 bulan	2 orang 12 bulan	67.783.152	-		
			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				Jumlah rekening 5 jenis 12 bulan	5 jenis 12 bulan	277.320.000	-		
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	SKPD			Jumlah PNS yang menerima gaji dan tunjangan 31 orang	31 orang	4.342.186.776	-		
			Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan dan Pelayanan SKPD		Nilai IKM	78,28					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
			Pelaksanaan kegiatan Pameran Pembangunan	Kabupaten			Kegiatan Pameran yang diikuti 1 kali	1 kali	24.014.500	20.000.000		
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Nilai IKM	2 Nilai					Dinas Perhubungan	
			Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	SKPD				Jumlah Kendaraan Dinas 31 Unit	31 Unit	18.100.000	20.000.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penyediaan jasa kebersihan kantor	SKPD			Jumlah Jenis 19 Jenis	19 Jenis	50.970.200	60.000.000	
			Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	SKPD			Jumlah Alat yang diperbaiki 76 Unit	76 Unit	34.500.000	36.000.000	
			Penyediaan alat tulis kantor	SKPD			Jumlah Jenis 42 Jenis	42 Jenis	42.606.580	47.000.000	
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	SKPD			Jumlah Jenis Barang Cetakan 12 Jenis	12 Jenis	25.240.000	27.000.000	
			Penyediaan peralatan dan perlengkapan	SKPD			Jumlah Peralatan & Perlengkapan Kantor 5 Unit	5 Unit	61.000.000	65.000.000	
			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	SKPD			Jumlah bahan bacaan 2 Surat Kabar	2 Surat Kabar	2.400.000	3.000.000	
			Penyediaan bahan logistik kantor	SKPD			Junlah jenis logistik 8 Jenis	8 Jenis	82.000.000	85.000.000	
			Penyediaan makanan dan minuman	SKPD			Jumlah tersedianya makanan dan minuman rapat dan tamu 280 Buah	280 Buah	9.000.000	1.000.000	
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	SKPD			Jumlah Perjalanan Dinas 148 Kali	148 Kali	195.000.000	225.000.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	SKPD			Jumlah Komponen Listrik 7 Jenis	7 Jenis	5.040.000	6.000.000	
			Penyediaan jasa administrasi keuangan	SKPD			Jumlah Orang 6 Orang	6 Orang	123.400.000	125.000.000	
			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	SKPD			Jumlah terbayarnya Rekening Listrik,air dan internet 12 Bulan	12 Bulan	199.595.408	226.000.000	
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	SKPD			Jumlah Gaji dan tunjangan ASN 14 Bulan	14 Bulan	6.564.045.331	6.700.000.000	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Indeks Kepuasan Masyarakat	0 Nilai					Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
			Penyediaan jasa surat menyurat	SKPD			Jumlah jenis 1 jenis	1 jenis	28.300.000	-	
			Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	SKPD			Jumlah unit 5 unit	5 unit	406.250.000	-	
			Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	SKPD			Jumlah unit 2 unit	2 unit	30.000.000	-	
			Penyediaan jasa kebersihan kantor	SKPD			Jumlah unit 1 unit	1 unit	348.275.000	-	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	SKPD			Jumlah unit 2 unit	2 unit	-	-	
			Penyediaan alat tulis kantor	SKPD			Jumlah jenis 1 jenis	1 jenis	175.155.000	-	
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	SKPD			Jumlah jenis 1 jenis	1 jenis	180.000.000	-	
			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	SKPD			Jumlah jenis 2 jenis	2 jenis	38.400.000	-	
			Penyediaan makanan dan minuman	SKPD			Jumlah orang 220 orang	220 orang	550.000.000	-	
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	SKPD			Jumlah orang 220 orang	220 orang	849.220.000	-	
			Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	SKPD			Jumlah jenis 10 Jenis	10 Jenis	520.780.000	-	
			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	SKPD			Jumlah jenis 1 jenis	1 jenis	48.175.000	-	
			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	SKPD			Jumlah jenis 1 jenis	1 jenis	250.000.000	-	
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten			Jumlah orang 137 orang	137 orang	41.593.491.653	-	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan dan Pelayanan SKPD		Indeks Kepuasan Masyarakat	0 Nilai					Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
			Pelaksanaan kegiatan Pameran Pembangunan	Kabupaten			Jumlah event 2 Event	2 Event	98.811.800	30.250.000	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Prosentase Tingkat Kepuasan Layanan Adminitrasi Perkantoran	75 %					Inspektorat Kabupaten
			Penyediaan jasa surat menyurat	SKPD			Jumlah penyediaan perangko, materai dan benda pos lainnya 1 Tahun	1 Tahun	4.300.000	4.400.000	
			Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	SKPD			Jumlah pembayaran PTT Petugas jaga malam 12 bulan	12 bulan	22.554.000	26.857.200	
			Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	SKPD			Jumlah pembayaran pajak kendaraan Dinas 10 buah	10 buah	9.000.000	9.000.000	
			Penyediaan jasa kebersihan kantor	SKPD			Jumlah penyediaan alat dan bahan kebersihan kantor dan PTT tenaga kebersihan 17	17 item	32.915.000	34.560.750	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							item				
			Penyediaan alat tulis kantor	SKPD			Jumlah penyediaan alat tulis kantor 37 item/macam	37 item/macam	50.143.800	52.143.800	
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	SKPD			jumlah penyediaan barang cetak dan penggandaan 3 Jenis 12 Bulan	12 Bulan	36.378.800	38.378.800	
			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	SKPD			Jumlah penyediaan surat kabar harian daerah 12 bulan	12 bulan	16.830.000	17.671.500	
			Penyediaan makanan dan minuman	SKPD			Jumlah penyediaan makanan dan minuman rapat dan tamu 12 bulan	12 bulan	36.000.000	36.000.000	
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	SKPD			Terlaksananya pembayaran perjalanan dinas untuk koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 12 bulan	12 bulan	490.000.000	490.000.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam daerah	SKPD			Terlaksananya pembayaran perjalanan dinas ke kecamatan di wilayah Kabupaten Tanah Laut 11 kecamatan	11 kecamatan	32.000.000	32.000.000	
			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	SKPD			Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 8 Jenis	8 Jenis	11.996.000	12.595.800	
			Penyediaan jasa administrasi keuangan	SKPD			Terlaksanya penyediaan pembayaran jasa transaksi keuangan 12 Bulan	12 Bulan	2.500.000	2.625.000	
			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	SKPD			Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya dan listrik 1 Tahun	1 Tahun	97.800.000	102.690.000	
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	SKPD			Jumlah pembayaran gaji dan Tunjangan ASN 50 Orang	50 Orang	11.660.809.754	11.660.809.754	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan dan Pelayanan SKPD		Prosentase penyampaian kegiatan dan pesan-pesan terkait dengan kegiatan pengawasan	80 %					Inspektorat Kabupaten
			Pelaksanaan kegiatan Pameran Pembangunan	SKPD			Terselenggaranya Kegiatan Pameran Pembangunan dan kegiatan mobil hias 2 event	2 event	27.250.000	27.250.000	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Indek Kepuasan Masyarakat	80,25 Baik					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	SKPD			Jumlah Jenis penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli 8 Jenis	8 Jenis	29.980.000	30.000.000	
			Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	SKPD			Jumlah PTT yang terbayar honoranya 1 orang/Tahun	1 orang/Tahun	23.134.200	24.000.000	



No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	SKPD			Jumlah Unit Kendaraan Roda 4 yang dipelihara dan perizinannya 3 Unit Jumlah Unit Kendaraan Roda 2 yang dipelihara dan perizinannya 7 Unit	3 Unit 7 Unit	87.645.000	88.000.000	
			Penyediaan jasa kebersihan kantor	SKPD			Jumlah Jenis alat Kebersihan Kantor 27 Jenis Jumlah Orang PTT yang terbayar honorinya 2 Orang/Tahun	27 Jenis 2 Orang/Tahun	53.192.000	53.500.000	
			Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	SKPD			Jumlah Jenis Peralatan Kantor yang dipelihara 12 Jenis	12 Jenis	29.375.000	30.000.000	
			Penyediaan alat tulis kantor	SKPD			Jumlah Jenis alat tulis kantor yang terbeli 45 Jenis	45 Jenis	39.949.000	40.000.000	
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	SKPD			Jumlah Jenis Barang Cetakan dan Penggandaan 14 Jenis	14 Jenis	45.765.000	46.000.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	SKPD			Jumlah eksemplar Surat Kabat 24 Eks Jumlah Majalah/Buku Bacaan/Pemerintahan 10 Buah	24 Eks 10 Buah	7.000.000	7.000.000	
			Penyediaan makanan dan minuman	SKPD			Terlaksananya penyediaan bahan makanan dan minuman rapat, tamu pemohon izin 1 Tahun	1 Tahun	25.824.000	26.000.000	
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	SKPD			Terbayarnya biaya keperluan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 1 Tahun	1 Tahun	385.744.860	400.000.000	
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam daerah	SKPD			Jumlah SPPD dalam Daerah 1 Tahun	1 Tahun	60.000.000	70.000.000	
			Penyediaan jasa penunjang kinerja SKPD	SKPD					-	-	
			Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	SKPD			Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang terbeli 5 Jenis	5 Jenis	30.900.000	50.000.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	SKPD			Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan yang terbeli 6 Jenis	6 Jenis	4.957.000	5.000.000	
			Penyediaan jasa administrasi keuangan	SKPD			Tersedianya Perangkat dan Maaterai 1 Tahun Jumlah Orang PTT yang terbayar Honorinya 6 Orang/Tahun	1 Tahun 6 Orang/Tahun	143.755.440	144.000.000	
			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	SKPD			Jumlah rekening Telepon, air dan listrik yang dibayar 36 Rekening Jumlah jenis berlangganan internet dan TV Kabel 2 Jenis Jumlah Jenis Secure Soket Layer (SSL) Domain DPMPTSP 1 Tahun	36 Rekening 2 Jenis 1 Tahun	148.000.000	150.000.000	
			Penyediaan jasa, bahan, peralatan dan perlengkapan perkantoran	SKPD						-	-

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penyediaan rapat-rapat, konsultasi, dan koordinasi	SKPD					-	-	
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	SKPD					4.729.069.994	4.965.523.494	
			Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan dan Pelayanan SKPD		Indek Kepuasan Masyarakat	80,25 Baik					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Pelaksanaan kegiatan Pameran Pembangunan	SKPD			1. Terikutinya Pameran Pembangunan 2 kali	2 kali	25.000.000	25.000.000	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		IKM	1 Baik					Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	SKPD			Jumlah jenis 2 buah	2 buah	20.725.800	22.798.380	
			Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	SKPD			Jumlah unit 18 buah	18 buah	225.975.000	248.572.500	
			Penyediaan jasa kebersihan kantor	SKPD			jumlah jenis 46 buah	46 buah	71.991.992	79.191.191	
			Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	SKPD			jumlah jenis 19 buah	19 buah	21.300.000	23.430.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penyediaan alat tulis kantor	SKPD			Jumlah Jenis 336 buah	336 buah	21.910.400	24.101.440	
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	SKPD			jumlah jenis 0 bulan	0 bulan	10.845.400	11.929.940	
			Penyediaan makanan dan minuman	SKPD			Jumlah Rapat 442 Kali	442 Kali	19.890.000	21.879.000	
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Luar Daerah, Kabupaten , Kintap Kantor Kintap, Kurau Kantor Kurau, Panyipatan Kantor Panyipatan , Takisung Kantor Takisung, Bajuin Kantor Bajuin, Bati-Bati Kantor Bati-Bati, Tambang Ulang Kantor Tambang Ulang, Batu Ampar			Jumlah orang 51 orang	51 orang	444.000.000	488.400.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Kantor Batu Ampar, Bumi Makmur, Jorong Kantor Jorong							
			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	SKPD			jumlah Jenis 56 buah	56 buah	3.347.300	3.682.030	
			Penyediaan jasa administrasi keuangan	SKPD			jumlah materai 120 lembar	120 lembar	75.499.192	83.049.111	
			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	SKPD			Jumlah Jenis 3 Jenis	3 Jenis	74.200.000	81.620.000	
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	SKPD			Jumlah PNS 15 orang	15 orang	2.366.344.777	2.602.979.254	
			Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan dan Pelayanan SKPD		Jumlah Pameran	1 kali					Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			Pelaksanaan kegiatan Pameran Pembangunan	Kabupaten			Jumlah Pameran 2	2	20.004.700	21.780.000	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Nilai IKM	3 Baik					Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			Penyediaan jasa								

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			surat menyurat						-	-	
			Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	SKPD			Jumlah Jasa Perizinan dan perlengkapangan kantor 43 unit	43 unit	22.600.000	-	
			Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	SKPD			Jumlah Jasa Jminan Barang Milik Daerah 1 orang	1 orang	23.153.028	-	
			Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	SKPD			Jumlah Jenis yang diadakan 13 Kendaraan Dinas	13 Kendaraan Dinas	8.700.000	-	
			Penyediaan jasa kebersihan kantor	SKPD			Jumlah Jasa Kebersihan Kantor 3 orang	3 orang	69.459.084	-	
			Penyediaan alat tulis kantor	SKPD			Jumlah jenis yang diadakan 8 Jenis	8 Jenis	22.416.700	-	
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	SKPD			Jumlah jenis yang diadakan 8 Jenis	8 Jenis	8.950.000	-	
			Penyediaan peralatan rumah tangga	SKPD			Jumlah Jenis yang Diadakan 4 Jenis	4 Jenis	11.928.200	-	
			Penyediaan makanan dan minuman	SKPD			Jumlah Jenis yang diadakan 2 Jenis	2 Jenis	44.000.000	-	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD	
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)					
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	SKPD			Jumlah Jenis yang diadakan 1 Tahun	1 Tahun	626.405.268	-		
			Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor				Jumlah Jenis yang diadakan 4 Jenis	4 Jenis	35.258.400	-		
			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	SKPD			Jumlah Jenis yang diadakan 8 jenis	8 jenis	7.499.000	-		
			Penyediaan jasa administrasi keuangan				Jumlah Terbayarnya Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan dan Jumlah Materai 2 orang	2 orang	51.806.056	-		
			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	SKPD			Jumlah Pembayaran Rekening Telepon, Internet, Air dan Listrik 0 Bulan	0 Bulan	96.840.000	-		
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				Jumlah Orang ASN 38 orang ASN	38 orang ASN	6.545.261.242	-		
			Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan dan Pelayanan SKPD			Cakupan Ketersediaan Capaian Kinerja Perangkat Daerah Dalam SIPD	0 %					Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa



No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pelaksanaan kegiatan Pameran Pembangunan	SKPD			Jumlah Jenis yang yang diadakan 6 jenis	6 jenis	32.299.400	-	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	3 Nilai					Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Penyediaan jasa surat menyurat	SKPD			Jumlah jasa pengiriman surat menyurat 20 kali	20 kali	1.000.000	1.000.000	
			Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	SKPD			Jumlah honorarium PTT yang terbayar 2 orang	2 orang	46.680.000	46.680.000	
			Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	SKPD			Terbayarnya legalitas pajak perizinan kendaraan roda 2 dan roda 4 8 8 buah roda 4, 75 buah roda 2	8 8 buah roda 4, 75 buah roda 2	34.125.000	34.125.000	
			Penyediaan jasa kebersihan kantor	SKPD			Jumlah peralatan kebersihan yang terbeli 16 jenis	16 jenis	97.437.000	97.437.000	
			Penyediaan alat tulis kantor	SKPD			Jumlah alat tulis kantor yang dibeli 27 jenis	27 jenis	10.498.402	10.498.402	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	SKPD			Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan dan penjiilidan 235 cetak, 20588 lembar fotocopy,25jilid	235 cetak, 20588 lembar fotocopy,25jilid	12.502.000	12.502.000	
			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	SKPD			Jumlah surat kabar yang dibeli 24 eks	24 eks	2.520.000	2.520.000	
			Penyediaan makanan dan minuman	SKPD			Jumlah makanan dan minuman rapat, makanan dan minuman tamu selama1 tahun 900 kotak	900 kotak	9.375.000	9.375.000	
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	SKPD			Terlaksana rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 12 bulan	12 bulan	195.667.760	195.667.760	
			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	SKPD			Terbelinya jumlah lampu penerang 5 jenis	5 jenis	2.852.500	2.852.500	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penyediaan jasa administrasi keuangan	SKPD			Jumlah honorarium pengelola keuangan dan jumlah materai yang terbeli 225 lembar materai	225 lembar materai	48.580.000	48.580.000	
			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	SKPD			Jumlah pembayaran rekening telepon, internet, air dan listrik 12 bulan	12 bulan	74.000.000	74.000.000	
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	SKPD			Gaji dan Tunjangan 0	0	4.584.771.614	-	
			Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan dan Pelayanan SKPD		Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	3 Nilai					Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Pelaksanaan kegiatan Pameran Pembangunan	SKPD			Jumlah kegiatan pameran pembangunan yang diikuti 1 kali	1 kali	15.000.000	15.000.000	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Indeks Kepuasan Masyarakat	0 Nilai					Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penyediaan jasa surat menyurat	SKPD			tersedianya penyediaan jasa surat menyurat 12 bulan	12 bulan	8.100.000	8.100.000	
			Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	SKPD			tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor 17 jenis	17 jenis	55.800.000	55.800.000	
			Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Kabupaten , SKPD			terbayarnya jasa jaminan barang milik daerah 2 orang	2 orang	48.600.000	48.600.000	
			Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kabupaten , SKPD			terlaksananya pembayaran KIR kendaraan dinas 1 buah terlaksananya pembayaran pajak kendaraan dinas 29 buah	1 buah 29 buah	18.500.000	18.500.000	
			Penyediaan jasa kebersihan kantor	Kabupaten , SKPD			Terbayarnya jasa kebersihan kantor 2 orang	2 orang	62.410.000	62.410.000	
			Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Kabupaten , SKPD			Terealisasinya perbaikan peralatan kerja 4 jenis	4 jenis	19.300.000	19.300.000	
			Penyediaan alat tulis kantor	Kabupaten , SKPD			Tersedianya alat tulis kantor 35 jenis	35 jenis	26.242.636	26.242.636	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kabupaten , SKPD			Tersedianya cetakan dan penggandaan 16 jenis	16 jenis	120.150.000	120.150.000	
			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kabupaten , SKPD			tersedianya bahan bacaan 3 ekslempar	3 ekslempar	5.400.000	5.400.000	
			Penyediaan makanan dan minuman	SKPD			Jumlah terbayarnya makan dan minum rapat 0 Bulan	0 Bulan	75.000.000	75.000.000	
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Luar Daerah			terlaksananya rapat rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah 12 bulan	12 bulan	198.022.000	198.022.000	
			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kabupaten , SKPD			tersedianya ,komponen instalasi listrik penerangan 16 jenis	16 jenis	19.315.000	19.315.000	
			Penyediaan jasa administrasi keuangan	Kabupaten , SKPD			Terbayarnya honorarium pegawai tidak tetap 5 orang Terbayarnya asuransi kesehatan 88 orang	5 orang 88 orang	242.807.850	242.807.850	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kabupaten , SKPD			Terbayarnya rekening tv kabel 8 bulan Terbayarnya rekening air 8 bulan Terbayarnya rekening telpon dan internet 8 bulan Terbayarnya rekening listrik 8 bulan	8 bulan 8 bulan 8 bulan 8 bulan	98.640.000	98.640.000	
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten , SKPD			Terbayarnya gaji dan tunjangan bulanan, gaji 13 &Gaji THR ASN 14 kali Tambahan penghasilan kepegawaian berbasis kinerja pada lingkup Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Perdagangan 0 kali	14 kali 0 kali	7.067.850.968	7.067.850.968	
			Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan dan Pelayanan SKPD		Indeks Kepuasan Masyarakat	0 Nilai					Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan
			Pelaksanaan kegiatan Pameran Pembangunan	Kabupaten , SKPD			Jumlah rapat evaluasi 2 kali	2 kali	18.252.000	18.252.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100 %					Dinas Kesehatan RSUD H. Boejasin Pelaihari
			Penyediaan jasa surat menyurat	Kabupaten , Pelaihari			Jumlah penyediaan jasa surat menyurat 12 bulan	12 bulan	493.600	-	
			Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Kabupaten , Pelaihari			jumlah penyediaan jasa Barang Milik Daerah 12 bulan	12 bulan	843.600.000	-	
			Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kabupaten , Pelaihari			Jumlah penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas 12 bulan	12 bulan	85.600.000	-	
			Penyediaan jasa kebersihan kantor	Kabupaten , Pelaihari, Angsau			jumlah penyediaan jasa kebersihan kantor 1 jenis	1 jenis	1.333.284.000	-	
			Penyediaan alat tulis kantor	Kabupaten , Pelaihari			Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor 1 paket	1 paket	320.000.000	-	
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kabupaten , Pelaihari			Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan 90 jenis	90 jenis	150.368.288	-	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kabupaten , Pelaihari			Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan 12 bulan	12 bulan	4.000.000	-	
			Penyediaan makanan dan minuman	Kabupaten , Pelaihari, Angsau			Jumlah Penyediaan makanan dan minuman 12 bulan	12 bulan	273.632.000	-	
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kabupaten , Pelaihari, Angsau			Jumlah Penyediaan rapat-rapat, konsultasi, dan koordinasi 12 bulan	12 bulan	280.000.000	-	
			Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kabupaten , Pelaihari			Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1 paket	1 paket	27.000.000	-	
			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kabupaten , Pelaihari			Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor 1 jenis	1 jenis	79.440.000	-	
			Penyediaan jasa administrasi keuangan	Kabupaten , Pelaihari, Angsau			jumlah penyediaan jasa administrasi keuangan 12 bulan	12 bulan	1.777.000.000	-	



No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kabupaten , Pelaihari, Angsau			Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 5 Jenis	5 Jenis	3.340.000.000	-	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	1 Nilai					Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
			Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	SKPD			Jumlah Bulan 12 Bulan	12 Bulan	17.400.000	20.000.000	
			Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	SKPD			Jumlah jasa perizinan kendaraan dinas operasional yg terbayar 30 Buah	30 Buah	678.395.000	700.000.000	
			Penyediaan jasa kebersihan kantor	SKPD			Jumlah Orang 1 Orang	1 Orang	46.212.000	50.000.000	
			Penyediaan alat tulis kantor	SKPD			Jumlah Jenis 24 Jenis	24 Jenis	69.756.600	70.000.000	
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	SKPD			Jumlah Bulan 12 Bulan	12 Bulan	35.750.000	40.000.000	
			Penyediaan bahan logistik kantor	SKPD			Jumlah Item 13 Item	13 Item	18.592.000	20.000.000	
			Penyediaan makanan dan minuman	Kabupaten , SKPD			Jumlah penyediaan makanan dan minuman 12 Bulan	12 Bulan	21.100.000	25.000.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	SKPD			Jumlah komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor pada Satpol PP dan Damkar 9 Item	9 Item	6.079.000	7.000.000	
			Penyediaan jasa administrasi keuangan	SKPD			Jasa administrasi keuangan yang terbayar 12 Bulan	12 Bulan	7.150.000	7.500.000	
			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	SKPD			Jumlah tagihan rek. listrik, telepon, internet dan pdam Satpol PP dan Damkar yg terbayar 12 Bulan	12 Bulan	112.000.000	125.000.000	
			Penyediaan rapat-rapat, konsultasi, dan koordinasi	Luar Daerah, Kabupaten , SKPD			Jumlah jenis 1 Jenis	1 Jenis	250.000.000	300.000.000	
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	SKPD			jumlah gaji yg terbayar 14 bulan	14 bulan	6.993.077.572	7.000.000.000	
			Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan dan Pelayanan SKPD		Indeks Kepuasan Masyarakat	1 Nilai					Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
			Pelaksanaan kegiatan Pameran Pembangunan	SKPD			Jumlah Event 2 Event	2 Event	27.750.000	30.000.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	0 75					Sekretariat DPRD
			Penyediaan jasa surat menyurat	SKPD			400 lbr materai	400 lbr materai	2.400.000	2.760.000	
			Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	SKPD			1 Tahun	1 Tahun	94.100.000	108.215.000	
			Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	SKPD			30 unit	30 unit	286.770.000	329.785.500	
			Penyediaan jasa kebersihan kantor	SKPD			8 org PTT	8 org PTT	144.000.000	165.600.000	
			Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	SKPD			6 Jenis	6 Jenis	16.700.000	19.205.000	
			Penyediaan alat tulis kantor	SKPD			25 Jenis	25 Jenis	14.133.000	16.252.950	
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	SKPD			17 brg cetakan	17 brg cetakan	30.820.000	35.443.000	
			Penyediaan makanan dan minuman	SKPD			710 snack 710 makan	710 snack 710 makan	35.000.000	40.250.000	
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	SKPD			1.400 sppd	1.400 sppd	750.000.000	862.500.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD	
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)					
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	SKPD			14 jenis	14 jenis	24.590.300	28.279.000		
			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	SKPD			15 jenis	15 jenis	11.327.500	13.027.000		
			Penyediaan jasa administrasi keuangan	SKPD			120 Dokumen	120 Dokumen	10.843.000	12.469.000		
			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	SKPD			1 tahun	1 tahun	226.000.000	259.900.000		
			Penyediaan Kelompok pakar dan tim ahli	SKPD			300 jam	300 jam	241.450.000	277.667.500		
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	SKPD			1 thn	1 thn	5.133.989.156	5.904.088.000		
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	SKPD			26 org PTT	26 org PTT	495.905.600	570.292.000		
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			IKM	3 Nilai					Dinas Perpustakaan dan kearsipan
				Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	SKPD			Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional roda 4 dan roda 2 yang terbayar 5 Buah	5 Buah	3.550.000	3.727.500	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penyediaan jasa kebersihan kantor	SKPD			Jumlah honor 78 OB Jumlah pembelian bahan pembersih dan alat kebersihan 28 Buah	78 OB 28 Buah	168.412.700	179.973.570	
			Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	SKPD			Jumlah jasa perbaikan 5 Buah	5 Buah	9.350.000	10.710.000	
			Penyediaan alat tulis kantor	SKPD			Jumlah pembelian jenis 39 Jenis	39 Jenis	30.153.400	50.099.805	
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	SKPD			Jumlah penyediaan 12 Jenis	12 Jenis	23.372.000	34.003.200	
			Penyediaan makanan dan minuman	SKPD			Jumlah makanan dan minuman 1.000 Porsi makan 1.000 Porsi snack	1.000 Porsi makan 1.000 Porsi snack	34.000.000	47.775.000	
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Luar Daerah, Kabupaten , SKPD			Jumlah koordinasi 1 Tahun	1 Tahun	200.000.000	264.395.180	
			Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	SKPD			Jumlah jenis 6 Jenis	6 Jenis	154.504.000	218.800.050	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	SKPD			Jumlah jenis 8 Jenis	8 Jenis	11.329.000	17.400.600	
			Penyediaan jasa administrasi keuangan	SKPD			Jumlah honor 48 OB Jumlah materai 800 Lembar Jumlah buku cek 3 Buah Transaksi keuangan yang diabayar 1 Tahun	48 OB 800 Lembar 3 Buah 1 Tahun	108.105.000	114.455.250	
			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	SKPD			Jumlah pembayaran rekening listrik dan kawat/faksimili/ internet 24 Bulan	24 Bulan	108.000.000	113.400.000	
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	SKPD			Jumlah PNS yang terbayar 26 Orang	26 Orang	4.990.126.218	500.000.000	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		IKM	0					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Kabupaten , SKPD			Terbayarnya honor PTT 1 orang	1 orang	24.999.996	-	
			Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kabupaten , SKPD			Jumlah Unit 15 unit	15 unit	143.523.500	-	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penyediaan jasa kebersihan kantor	Kabupaten , SKPD			Terbayarnya honor PTT 2 orang Jumlah pembelian alat dan bahan kebersihan 31 jenis	2 orang 31 jenis	59.781.292	-	
			Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Kabupaten , SKPD			Jumlah jasa pemeliharaan/perbaikan peralatan kerja 44 unit	44 unit	16.450.000	-	
			Penyediaan alat tulis kantor	Kabupaten , SKPD			Jumlah tersedianya alat tulis kantor 62 jenis	62 jenis	23.112.700	-	
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kabupaten , SKPD			Terpenuhinya penyediaan penggandaan 20.000 lembar Terpenuhinya penyediaan barang cetak 9 jenis	20.000 lembar 9 jenis	22.660.000	-	
			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kabupaten , SKPD			Penyediaan bahan bacaan 12 bulan	12 bulan	1.772.400	-	
			Penyediaan makanan dan minuman	Kabupaten , SKPD			Terpenuhinya penyediaan makanan dan minuman untuk rapat dan tamu 1.520 kotak	1.520 kotak	34.500.000	-	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kabupaten , SKPD			Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor 13 jenis	13 jenis	32.653.100	-	
			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kabupaten , SKPD			Tersedianya komponen listrik/Penerangan bangunan kantor 9 jenis	9 jenis	8.615.500	-	
			Penyediaan jasa administrasi keuangan	Kabupaten , SKPD			Terbayarnya honor PTT 1 orang	1 orang	27.639.996	-	
			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kabupaten , SKPD			Terbayarnya rekening Air 12 bulan Terbayarnya rekening Internet 12 bulan Terbayarnya honor PTT 2 orang Terbayarnya rekening Listrik 12 bulan Terbayarnya rekening Telepon 12 bulan	12 bulan 12 bulan 2 orang 12 bulan 12 bulan	130.999.992	-	
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Luar Daerah, Kabupaten			Jumlah SPPD 250 SPPD	250 SPPD	200.000.000	-	



No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten , SKPD			Tambahan Penghasilan Pegawai Berbasis Kinerja pada Lingkup Badan Kesbangpol Kabupaten Tanah Laut 14 kali Terbayarnya Gaji dan Tunjangan Bulanan, Gaji ke 13 dan Gaji THR ASN 14 kali	14 kali 14 kali	5.304.111.780	-	
			Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan dan Pelayanan SKPD		IKM	0					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Pelaksanaan kegiatan Pameran Pembangunan	Kabupaten , SKPD			Jumlah Event 2 event	2 event	25.000.000	-	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Indeks Kepuasan Masyarakat	3,3 Indeks					Dinas Kesehatan

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	SKPD			Jumlah terbayarnya Premi Asuransi BPJS, Keselamatan Kerja & Kematian 12 bulan Jumlah jasa transfer rekening antar bank 12 bulan Jumlah Pegawai PTT yang terbayar 11 orang	12 bulan 12 bulan 11 orang	266.691.600	-	
			Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	SKPD			Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 2 jenis	2 jenis	326.305.600	-	
			Penyediaan jasa kebersihan kantor	SKPD			Jumlah PTT yang terbayar 50 orang	50 orang	1.212.234.541	-	
			Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	SKPD			Jumlah Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 39 jenis	39 jenis	44.000.000	-	
			Penyediaan alat tulis kantor	SKPD			Jumlah Penyediaan Lat Tulis kantor 11 Jenis	11 Jenis	65.067.200	-	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kabupaten			Jumlah penyediaan barang ceakan dan penggandaan 26 Jenis	26 Jenis	67.868.000	-	
			Penyediaan komponen instalasi	SKPD			jumlah penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 2 jenis	2 jenis	16.800.000	-	
			Penyediaan peralatan rumah tangga				Jumlah Sarana Prasarana Kantor yang tersedia 0 macam Jumlah peyedian peralatan rumah tangga 26 jenis	0 macam 26 jenis	20.659.200	-	
			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kabupaten , SKPD			Jumlah Penyediaan bahan bacaan 0 buah Jumlah Penyediaan bahan bacaan dan perundang undangan 2 buah	0 buah 2 buah	6.480.000	-	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penyediaan makanan dan minuman	Kabupaten , SKPD			Jumlah Notulen/kesepakatan rapat yang dilaksanakan 0 dokumen Jumlah penyediaan makanan dan minuman 3 jenis	0 dokumen 3 jenis	43.800.000	-	
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Luar Daerah			jumlah sarana dan prasarana kantor tersedia (jumlah rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah) 12 bulan	12 bulan	600.000.000	-	
			Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	SKPD			Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor 7 jenis jumlah sarana dan prasarana fasilitas pelayanan kesehatan yang terpenuhi 0 buah	7 jenis 0 buah	259.200.000	-	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penyediaan jasa administrasi keuangan	SKPD			Jumlah terbayarnya premi asuransi BPJS, Keselamatan kerja dan kematian 12 bulan Jumlah pegawai PTT yang terbayar 9 orang Jumlah jasa transfer Rekening antar bank 12 bulan	12 bulan 9 orang 12 bulan	229.002.220	-	
			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kabupaten			Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3 jenis Jumlah rekening jasa telpon yang di terbayar, jumlah rekening jasa air yang terbayar, jumlah jasa rekening listrik yang terbayar, jumlah jasa internet yang terbayar 0 Bulan	3 jenis 0 Bulan	115.600.000	-	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten			Jumlah gaji ASN yang terbayar 881 orang Jumlah tambahan penghasilan tambahan ASN yang terbayar 12 bulan	881 orang 12 bulan	128.202.114.635	-	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Indeks Kepuasan Masyarakat	100 persen					Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Panyipatan
			Penyediaan alat tulis kantor	Panyipatan Kantor Panyipatan			Jumlah ATK yang terpenuhi 25 jenis	25 jenis	49.970.600	-	
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Panyipatan Kantor Panyipatan			Jumlah penyediaan barang cetakan 20 jenis	20 jenis	20.307.000	-	
			Penyediaan peralatan rumah tangga	Panyipatan Kantor Panyipatan			Jumlah sarana dan prasarana fasilitas pelayanan kesehatan yang terpenuhi (alat dan bahan pembersih) 14 jenis	14 jenis	18.712.600	-	
			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Panyipatan Kantor Panyipatan			jumlah penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan	2 jenis	9.500.000	-	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							kantor 2 jenis				
			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Panyipatan Kantor Panyipatan			Jumlah sarana dan prasarana fasilitas pelayanan kesehatan yang terpenuhi (komunikasi, air, listrik) 12 bulan	12 bulan	50.869.800	-	
			Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur		Indeks Kepuasan Masyarakat	100 persen					Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Panyipatan
			Pengadaan perlengkapan gedungkantor	Panyipatan Kantor Panyipatan			jumlah jenis pengadaan Perlengkapan Gedung 2 Jenis	2 Jenis	68.305.000	-	
			Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Panyipatan Kantor Panyipatan			Jumlah sarana dan prasarana pelayanan kesehatan yang dipelihara / diperbaiki 6 jenis	6 jenis	8.500.000	-	
			Pengadaan peralatan gedung kantor	Panyipatan Kantor Panyipatan			Jumlah Jenis Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 5 Jenis	5 Jenis	125.629.000	-	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Panyipatan Kantor Panyipatan			Jumlah pemeliharaan gedung kantor 2 jenis	2 jenis	21.250.000	-	
			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Panyipatan Kantor Panyipatan			Jumlah sarana dan prasarana pelayanan kesehatan yang dipelihara/ diperbaiki 2 jenis	2 jenis	27.750.000	-	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Indeks kepuasan masyarakat	0 jenis					Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Batakan
			Penyediaan alat tulis kantor				Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor 12 BULAN	12 BULAN	15.610.800	-	
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 12 BULAN	12 BULAN	10.580.000	-	
			Penyediaan peralatan rumah tangga				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1 PAKET	1 PAKET	4.263.600	-	
			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1 tahun	1 tahun	22.000.040	-	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Indeks Kepuasan Masyarakat	0 indeks					Dinas Kesehatan UPT Puskesmas



No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											Takisung
			Penyediaan alat tulis kantor	SKPD			Jumlah Alat Tulis Kantor 17 jenis	17 jenis	22.130.000	-	
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	SKPD			Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan 22 jenis	22 jenis	43.520.000	-	
			Penyediaan peralatan rumah tangga	SKPD			Jumlah Peralatan Rumah Tangga 13 jenis	13 jenis	9.173.500	-	
			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	SKPD			Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1 tahun	1 tahun	5.000.000	-	
			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	SKPD			Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1 tahun	1 tahun	53.000.000	-	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Indeks kepuasan masyarakat	0 indeks					Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Kurau

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penyediaan alat tulis kantor	SKPD, Kurau Kantor Kurau			jumlah alat tulis kantor yang tersedia untuk menunjang administrasi perkantoran 1 paket	1 paket	15.091.600	-	
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	SKPD, Kurau Kantor Kurau			jumlah sarana dan prasarana fasilitas pelayanan kesehatan yang terpenuhi 1 paket	1 paket	6.245.900	-	
			Penyediaan peralatan rumah tangga	SKPD, Kurau Kantor Kurau			jumlah peralatan kebersihan dan bahan pembersih 1 paket	1 paket	4.610.000	-	
			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	SKPD, Kurau Kantor Kurau			jumlah sarana dan prasarana fasilitas pelayanan kesehatan yang terpenuhi (air& listrik) 1 tahun	1 tahun	36.000.000	-	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Persentasi pelayanan adminitrasi perkantoran	100 persen					Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Padang Luas
			Penyediaan alat tulis kantor	Kurau Kantor Kurau			Jumlah penyediaan alat tulis kantor 25 jenis	25 jenis	13.958.500	-	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kurau Kantor Kurau			jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan 15 jenis	15 jenis	15.780.000	-	
			Penyediaan peralatan rumah tangga	Kurau Kantor Kurau			jumlah penyediaan peralatan rumah tangga 13 jenis	13 jenis	13.306.000	-	
			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kurau Kantor Kurau			Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 12 bulan	12 bulan	14.485.000	-	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Indeks Kepuasan Masyarakat	0 Indeks					Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Bati-Bati
			Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Bati-Bati Kantor Bati-Bati			Jumlah penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 4 jenis	4 jenis	7.906.500	-	
			Penyediaan jasa kebersihan kantor	Bati-Bati Kantor Bati-Bati			Jumlah penyediaan jasa kebersihan kantor 56 oh	56 oh	5.600.000	-	
			Penyediaan alat tulis kantor	Bati-Bati Kantor Bati-Bati			Jumlah jenis penyediaan alat tulis kantor 38 jenis	38 jenis	27.241.000	-	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Bati-Bati Kantor Bati-Bati			Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan 19 Jenis	19 Jenis	37.414.600	-	
			Penyediaan peralatan rumah tangga	Bati-Bati Kantor Bati-Bati			Jumlah penyediaan peralatan rumah tangga 18 Jenis	18 Jenis	13.982.900	-	
			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bati-Bati Kantor Bati-Bati			Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1 Tahun	1 Tahun	55.000.000	-	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Indeks kepuasan masyarakat	0 indeks					Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Kait-Kait
			Penyediaan alat tulis kantor	Bati-Bati Kantor Bati-Bati			Jumlah peyediaan alat tulis kantor 36 jenis	36 jenis	12.869.800	-	
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Bati-Bati Kantor Bati-Bati			Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan 17 jenis	17 jenis	40.590.400	-	
			Penyediaan komponen instalasi	Bati-Bati Kantor Bati-Bati			Jumlah peyediaan komponen instalasi 2 jenis	2 jenis	1.275.000	-	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penyediaan peralatan dan perlengkapan	Bati-Bati Kantor Bati-Bati			Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 2 jenis	2 jenis	9.660.900	-	
			Penyediaan peralatan rumah tangga	Bati-Bati Kantor Bati-Bati			Jumlah peyediaan peralatan rumah tangga 2 jenis	2 jenis	42.955.000	-	
			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bati-Bati Kantor Bati-Bati			Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 12 bulan	12 bulan	15.886.285	-	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Indeks Kepuasan Masyarakat	0 Indeks					Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Tambang Ulang
			Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional				Jumlah jenis penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional 2 jenis	2 jenis	5.500.000	-	
			Penyediaan jasa kebersihan kantor				Jumlah jenis penyediaan jasa kebersihan kantor 2 jenis	2 jenis	9.300.000	-	
			Penyediaan alat tulis kantor				Jumlah jenis penyediaan Alat Tulis Kantor 35 jenis	35 jenis	37.530.300	-	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan				Jumlah jenis penyediaan barang cetakan dan penggandaan 25 jenis	25 jenis	75.094.000	-	
			Penyediaan komponen instalasi				jumlah jenis penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 5 jenis	5 jenis	8.987.500	-	
			Penyediaan peralatan dan perlengkapan				jumlah jenis penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 5 jenis	5 jenis	55.530.000	-	
			Penyediaan peralatan rumah tangga				Jumlah jenis penyediaan peralatan rumah tangga 10 jenis	10 jenis	26.618.600	-	
			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				Jumlah kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya dan listrik di Puskesmas dan jaringannya 12 bulan	12 bulan	36.000.000	-	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			Indeks kepuasan masyarakat	0 indeks				

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											Pelaihari
			Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Pelaihari			Jumlah Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 1 tahun	1 tahun	18.650.000	-	
			Penyediaan alat tulis kantor	Pelaihari			Jumlah Alat Tulis Kantor 51 jenis	51 jenis	47.189.000	-	
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Pelaihari			Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan 58 jenis	58 jenis	32.172.300	-	
			Penyediaan peralatan dan perlengkapan	Pelaihari			Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor 6 jenis	6 jenis	27.800.000	-	
			Penyediaan peralatan rumah tangga	Pelaihari			Jumlah Peralatan Rumah Tangga 9 jenis	9 jenis	34.444.000	-	
			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Pelaihari			Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1 tahun	1 tahun	97.003.098	-	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Indeks Kepuasan Masyarakat	0 indeks					Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Sungai Riam

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Pelaihari			Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3 Jenis	3 Jenis	9.595.000	-	
			Penyediaan alat tulis kantor	Pelaihari			Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor 7 Jenis	7 Jenis	14.400.000	-	
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Pelaihari			Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 3 Jenis	3 Jenis	6.925.000	-	
			Penyediaan komponen instalasi	Pelaihari			Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1 Jenis	1 Jenis	1.300.000	-	
			Penyediaan peralatan rumah tangga	Pelaihari			Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 12 Bulan	12 Bulan	5.538.000	-	
			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Pelaihari			Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 12 bulan	12 bulan	7.200.000	-	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Indeks Kepuasan Masyarakat	0 indeks					Dinas Kesehatan UPT Puskesmas



No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											Tirta Jaya
			Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	SKPD			Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 12 bulan	12 bulan	10.790.000	-	
			Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	SKPD			Penyediaan Jasa Perbaikan Perlatan kerja 0	0	2.500.000	-	
			Penyediaan alat tulis kantor	SKPD			Penyediaan Alat Tulis kantor 0	0	9.710.500	-	
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	SKPD			Jumlah Penyediaan Cetakan Dan Penggandaan 0	0	6.745.000	-	
			Penyediaan peralatan dan perlengkapan	SKPD			Jumlah penyediaan dan perlengkapan kantor 0	0	2.000.000	-	
			Penyediaan peralatan rumah tangga	SKPD			Jumlah penyediaan perlatan rumah tangga 0	0	1.500.000	-	
			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	SKPD			Jumlah Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan	0	1.000.000	-	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							kantor 0				
			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	SKPD			Jumlah penyediaan jasa komunikasi,sumber air dan listrik 0	0	18.805.000	-	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Indeks Kepuasan Masyarakat	0 indeks					Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Tanjung Habulu
			Penyediaan alat tulis kantor	Bajuin Kantor Bajuin			Jumlah Penyediaan alat tulis kantor 17 jenis	17 jenis	19.915.000	-	
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Bajuin Kantor Bajuin			Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan yang terpenuhi 8 jenis	8 jenis	18.580.000	-	
			Penyediaan peralatan rumah tangga	Bajuin Kantor Bajuin			Jumlah peralatan rumah tangga (alat dan bahan pembersih yang terpenuhi) 2 jenis	2 jenis	6.830.000	-	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD	
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)					
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bajuin Kantor Bajuin			Jumlah penyediaan jasa komonikasi sumber daya air dan listrik 1 tahun	1 tahun	18.200.000	-		
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Persentase pelayanan administrasi perkantoran	100 %					Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Tajau Pecah	
			Penyediaan alat tulis kantor	Batu Ampar Kantor Batu Ampar			Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor 21 Jenis	21 Jenis	17.858.000	-		
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Batu Ampar Kantor Batu Ampar			Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan 9 Jenis	9 Jenis	42.550.800	-		
			Penyediaan peralatan rumah tangga	Batu Ampar Kantor Batu Ampar			Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 26 Jenis	26 Jenis	14.438.000	-		
			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Batu Ampar Kantor Batu Ampar			Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 12 bulan	12 bulan	35.000.000	116.167.000		
			Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			FALSE	FALSE					Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Tajau Pecah

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Batu Ampar Kantor Batu Ampar			jumlah jenis Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 4 Jenis	4 Jenis	3.800.000	-	
			Pengadaan peralatan gedung kantor	Batu Ampar Kantor Batu Ampar			Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 6 Jenis	6 Jenis	56.050.000	-	
			Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Batu Ampar Kantor Batu Ampar			Jumlah jenis Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1 Paket	1 Paket	6.502.000	-	
			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Batu Ampar Kantor Batu Ampar			Jumlah jenis Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasio nal 3 Jenis	3 Jenis	34.880.000	-	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Indeks Kepuasan Masyarakat	0 indeks					Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Jorong
			Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jorong Kantor Jorong			Jumlah penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 6 jenis	6 jenis	9.115.000	-	
			Penyediaan alat tulis kantor	Jorong Kantor Jorong			Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor 36 jenis	36 jenis	10.556.800	-	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jorong Kantor Jorong			Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan 32 jenis	32 jenis	23.280.800	-	
			Penyediaan peralatan rumah tangga	Jorong Kantor Jorong			Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 27 Jenis	27 Jenis	12.375.400	-	
			Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jorong Kantor Jorong			Jumlah jenis pengadaan perlengkapan kantor 2 jenis	2 jenis	4.500.000	-	
			Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jorong Kantor Jorong			Jumlah Jenis Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 10 jenis	10 jenis	33.600.000	-	
			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jorong Kantor Jorong			Jumlah penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2 Jenis	2 Jenis	1.775.000	-	
			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jorong Kantor Jorong			Jumlah Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 12 bulan	12 bulan	26.600.000	-	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	0 indeks					Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Asam Asam

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jorong Kantor Jorong			Jumlah penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 0 5 jenis	0 5 jenis	25.000.000	-	
			Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jorong Kantor Jorong			jumlah penyedia jasa kebersihan kantor 0 1 tahun	0 1 tahun	1.500.000	-	
			Penyediaan alat tulis kantor	Jorong Kantor Jorong			jumlah penyediaan ATK 0 18 jenis	0 18 jenis	16.781.500	-	
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jorong Kantor Jorong			Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0 3 jenis	0 3 jenis	18.170.000	-	
			Penyediaan peralatan dan perlengkapan	Jorong Kantor Jorong			jumlah penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 0 3 jenis	0 3 jenis	22.000.000	-	
			Penyediaan peralatan rumah tangga	Jorong Kantor Jorong			jumlah penyediaan peralatan rumah tangga 0 23 jenis	0 23 jenis	12.461.000	-	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jorong Kantor Jorong			jumlah penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0 27 buah	0 27 buah	4.050.000	-	
			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jorong Kantor Jorong			Jumlah Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 12 Jenis	12 Jenis	40.000.000	-	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Indeks Kepuasan Masyarakat	0 indeks					Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Kintap
			Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Kintap Kantor Kintap			Jumlah penyediaan jasa peralatan dan perlengkap[an kantor 12 bulan	12 bulan	2.100.000	-	
			Penyediaan alat tulis kantor	Kintap Kantor Kintap			Jumlah penyediaan alat tulis kantor 28 jenis	28 jenis	36.197.000	-	
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kintap Kantor Kintap			Jumlah peyediaan barang cetakan dan penggandaan 23 jenis	23 jenis	39.670.000	-	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penyediaan peralatan rumah tangga	Kintap Kantor Kintap			Jumlah penyediaan peralatan rumah tangga 22 jenis	22 jenis	29.225.000	-	
			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kintap Kantor Kintap			Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 12 bulan	12 bulan	85.750.000	-	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		indeks kepuasan masyarakat	0 indeks					Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Sungai Cuka
			Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Kintap Kantor Kintap			Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 6 jenis	6 jenis	5.441.300	-	
			Penyediaan alat tulis kantor	Kintap Kantor Kintap			Jumlah jenis Penyediaan Alat Tulis Kantor 6 jenis	6 jenis	42.266.000	-	
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kintap Kantor Kintap			Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 26 jenis	26 jenis	54.405.000	-	
			Penyediaan peralatan rumah tangga	Kintap Kantor Kintap			Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 36 jenis	36 jenis	37.537.500	-	



No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kintap Kantor Kintap			Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3 bulan	3 bulan	35.400.000	-	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Indeks Kepuasan Masyarakat	0 indeks					Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Angsau
			Penyediaan alat tulis kantor	Pelaihari, Angsau, Sarang Halang			Jumlah JenisPenyediaan Alat Tulis Kantor 40 Jenis	40 Jenis	41.287.500	-	
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Pelaihari, Sarang Halang, Angsau			Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 34 Jenis	34 Jenis	40.610.200	-	
			Penyediaan peralatan rumah tangga	Pelaihari, Angsau, Sarang Halang			Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 3 Jenis	3 Jenis	2.858.095	-	
			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Pelaihari, Angsau, Sarang Halang			Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1 Tahun	1 Tahun	49.600.000	-	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Indeks Kepuasan Masyarakat	3,3 indeks					Dinas Kesehatan Balai Laboratorium Kesehatan

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penyediaan alat tulis kantor	Kabupaten			jumlah penyediaan alat tulis kantor 30 jenis	30 jenis	4.338.952	-	
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kabupaten			jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan 2 jenis	2 jenis	1.856.800	-	
			Penyediaan peralatan rumah tangga	Kabupaten			Jumlah penyediaan peralatan rumah tangga 18 jenis	18 jenis	4.478.900	-	
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kabupaten			Jumlah rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 32 org/kali	32 org/kali	19.687.500	-	
			Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kabupaten			Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 7 jenis	7 jenis	2.982.800	-	
			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kabupaten			Jumlah jasa komunikasi,sum ber daya air dan listrik 12 bulan	12 bulan	25.200.000	-	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	0 %					Dinas Kesehatan Instalasi Farmasi

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penyediaan alat tulis kantor	Kabupaten			Jumlah jenis penyedia jasa Alat Tulis Kantor 18 jenis	18 jenis	7.767.200	8.543.920	
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kabupaten			Jumlah jenis penyedia barang cetakan dan penggandaan 5 jenis	5 jenis	6.094.000	6.703.400	
			Penyediaan peralatan dan perlengkapan	Kabupaten			Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor 5 jenis	5 jenis	20.700.000	22.770.000	
			Penyediaan peralatan rumah tangga	Kabupaten			Jumlah jenis penyedia Peralatan Rumah Tangga 9 jenis	9 jenis	2.169.300	2.386.230	
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Luar Daerah, Kabupaten			Jumlah Rapat-rapat,koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1 tahun	1 tahun	10.500.000	11.550.000	
			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kabupaten			Jumlah jasa komunikasi,sum ber daya air dan listrik 12 bulan	12 bulan	181.590.800	199.749.880	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	3 Kategori					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penyediaan jasa surat menyurat	SKPD			jumlah surat menyurat kantor 1 Tahun	1 Tahun	12.600.000	13.600.000	
			Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	SKPD			jumlah PTT kewanan dibayar 1 Tahun	1 Tahun	975.312.000	1.000.000.000	
			Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	SKPD			jumlah jasa pemeliharaan 1 Tahun	1 Tahun	395.802.000	402.000.000	
			Penyediaan jasa kebersihan kantor	SKPD			jumlah jasa kebersihan terbayar 1 Tahun	1 Tahun	214.151.000	321.000.000	
			Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	SKPD			jumlah jasa perbaikan terbayar 1 Tahun	1 Tahun	163.850.000	167.000.000	
			Penyediaan alat tulis kantor	SKPD			Jumlah alat tulis kantor 1 Tahun	1 Tahun	205.908.200	213.000.000	
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	SKPD			jumlah cetak dan penggandaan dibayar 1 Tahun	1 Tahun	145.100.000	147.000.000	
			Penyediaan makanan dan minuman	SKPD			jumlah makan minum di bayar 1 Tahun	1 Tahun	339.463.000	400.000.000	
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar	SKPD			Jumlah Perjalanan dinas dibayar 1 Tahun	1 Tahun	955.000.000	1.000.000.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			daerah								
			Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	SKPD			jumlah peralatan dan perlengkapan kantor 1 Tahun	1 Tahun	37.500.000	39.000.000	
			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	SKPD			jumlah komponen dan istalasi dibayar 1 Tahun	1 Tahun	173.943.300	183.000.000	
			Penyediaan jasa administrasi keuangan	SKPD			jumlah PTT kemandan dibayar 1 Tahun	1 Tahun	946.440.000	1.000.000.000	
			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	SKPD			jumlah listrik air telepon terbayar 1 Tahun	1 Tahun	328.200.000	350.000.000	
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	SKPD			jumlah gaji dan tunjangan di bayar 1 Tahun	1 Tahun	274.688.743.582	257.688.743.582	
			Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan dan Pelayanan SKPD		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	3 Kategori					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Pelaksanaan kegiatan Pameran Pembangunan	SKPD			JUmlah kegiatan 1 Kegiatan jumlah peserta 316	1 Kegiatan 316	425.000.000	25.000.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		IKM	0 Nilai					Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
			Penyediaan jasa surat menyurat	Kabupaten , SKPD			Jumlah jasa surat menyurat 10 Kali	10 Kali	500.000	500.000	
			Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Kabupaten , SKPD			Jumlah orang honorarium dan premi asuransi PTT petugas Jaga malam kantor, Puskesmas, UPT dinas yang dibayarkan 4 OB	4 OB	94.258.560	94.258.560	
			Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kabupaten , SKPD			Jumlah unit Perpanjangan STNK dibayarkan 20 Unit	20 Unit	15.000.000	15.000.000	
			Penyediaan jasa kebersihan kantor	Kabupaten , SKPD			Jumlah jenis bahan dan alat kebersihan yang di beli 25 Jenis Jumlah orang honorarium dan premi asuransi PTT petugas kebersihan kantor, Puskesmas dan UPT dinas yang dibayarkan 10 OB	25 Jenis 10 OB	260.946.400	260.946.400	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Kabupaten , SKPD			Jumlah Peralatan Kerja yang diperbaiki 5 Jenis	5 Jenis	10.000.000	10.000.000	
			Penyediaan alat tulis kantor	Kabupaten , SKPD			Jumlah jenis alat tulis kantor terbeli 40 Jenis	40 Jenis	40.000.000	40.000.000	
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kabupaten , SKPD			Jumlah Penggandaan 10.000 Lembar Jumlah barang cetakkan 15 Jenis	10.000 Lembar 15 Jenis	27.195.000	27.195.000	
			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kabupaten , SKPD			Ketersediaan pemenuhan kebutuhan bahan bacaan 2 Jenis	2 Jenis	2.400.000	2.400.000	
			Penyediaan makanan dan minuman	Kabupaten , SKPD			Jumlah Jenis rapat dan koordinasi yang dilaksanakan 4 Kegiatan	4 Kegiatan	58.150.000	58.150.000	
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Luar Daerah, Kabupaten			Jumlah jenis rapat dan koordinasi yang dilaksanakan 2 Jenis	2 Jenis	395.000.000	395.000.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penyediaan jasa penunjang kinerja SKPD	Kabupaten , SKPD			Jumlah honorarium TH yang dibayarkan beserta premi asuransi 0 Orang/12 Bulan Jumlah honorarium PTT yang dibayarkan beserta premi asuransi 0 Orang/12 Bulan	0 Orang/12 Bulan 0 Orang/12 Bulan	-	-	
			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kabupaten , SKPD			Jumlah Alat Listrik dan penerangan terbeli 20 Jenis	20 Jenis	14.992.000	14.992.000	
			Penyediaan jasa administrasi keuangan	Kabupaten , SKPD			Jumlah materai 3000 terbeli 100 Lembar Jumlah jenis jasa keuangan yang di bayarkan 2 Jenis Jumlah materai 6000 terbeli 150 Lembar	100 Lembar 2 Jenis 150 Lembar	2.400.000	2.400.000	
			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kabupaten , SKPD			Jumlah jenis rekening terbayarkan 5 Jenis	5 Jenis	107.760.000	107.760.000	



No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penyediaan rapat-rapat, konsultasi, dan koordinasi	Luar Daerah, Kabupaten , SKPD			Jumlah SPPD Luar Daerah (Orang) 40 Orang Jumlah SPPD Dalam Daerah (Orang) 500 Orang	40 Orang 500 Orang	-	-	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penyediaan jasa, bahan, peralatan dan perlengkapan perkantoran	Kabupaten , SKPD			Jenis Rekening Terbayar 5 Rek Jumlah KIR dan perizinan kendaraan dinas/operasional terbayar (Buah/Unit) 15 Buah/Unit Jumlah Jasa Surat Menyurat 20 kali Jumlah jasa transaksi keuangan terbayar (Kali) 20 Kali Jenis peralatan dan kelengkapan kebersihan yang dibeli 15 Jenis Jenis jasa cetak 12 Jenis Jumlah tersedianya jasa penggandaan (Lembar) 10.000 Lembar Jenis ATK terbeli 25 Jenis Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki (Buah/Unit) 30 Buah/Unit Jumlah Materai Terbeli (Lembar) 200 Lembar Jumlah makan dan minum rapat (Orang) 750 Orang Jumlah	5 Rek 15 Buah/Unit 20 kali 20 Kali 15 Jenis 12 Jenis 10.000 Lembar 25 Jenis 30 Buah/Unit 200 Lembar 750 Orang 1 Eksampler 5 Jenis 200 Liter	-	-	
Bappeda Kabupaten Tanah Laut											V - 82

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten , SKPD			Jumlah ASN yang di bayarkan gaji dan tunjangannya 48 Orang	48 Orang	7.880.590.225	7.880.590.225	
			Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan dan Pelayanan SKPD		IKM	0 NILAI					Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
			Pelaksanaan kegiatan Pameran Pembangunan	Luar Daerah, Kabupaten , SKPD			Jumlah Terikutinya Pameran Pembangunan 5 Kali	5 Kali	-	-	
			Pelaksanaan kegiatan Pameran Pembangunan	Kabupaten , SKPD			Jumlah jenis pameran/expo yang di ikuti (jenis) 2 Jenis	2 Jenis	28.400.000	28.400.000	
			Fasilitasi pemasaran produk unggulan daerah	Luar Daerah, Kabupaten , SKPD			Jumlah terlaksananya fasilitasi pemasaran produk peternakan daerah 1 Kali/Tahun	1 Kali/Tahun	-	-	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Indeks Kepuasan Masyarakat	0 Nilai					Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penyediaan jasa surat menyurat	SKPD			Jumlah Surat Menyurat Terbeli 3 Jenis Jumlah Honorarium Pegawai Tidak Tetap (PTT) terbayar 6 Orang/Bulan	3 Jenis 6 Orang/Bulan	175.206.400	-	
			Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	SKPD			JumlahDokumen tasi, Dekorasi, dan Publikasi Terbeli 2 Jenis Jumlah Personel Komputer Terbeli 2 Jenis Jumlah Kursi rapat Terbeli 30 Jenis Jumlah Meja Rapat Terbeli 5 Jenis	2 Jenis 2 Jenis 30 Jenis 5 Jenis	186.115.600	-	
			Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	SKPD			Jumlah Alat Tulis Kantor Terbeli 2 Jenis Jumlah Honorarium Pegawai Tidak Tetap terbayar 3 Orang/Bulan Jumlah Makanan dan Minuman Rapat Terlaksana 250 Orang/Kali	2 Jenis 3 Orang/Bulan 250 Orang/Kali	100.575.600	-	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	SKPD			Jumlah Kendaraan Dinas (Sepeda Motor Dinas) Terpelihara 35 Buah Jumlah Kendaraan Dinas (Mobil Dinas) Terpelihara 13 Buah	35 Buah 13 Buah	43.000.000	-	
			Penyediaan jasa kebersihan kantor	SKPD			Jumlah Honorarium Pegawai Tidak Tetap Terbayar 3 Orang/Bulan Jumlah Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Terbeli 12 Jenis	3 Orang/Bulan 12 Jenis	100.746.700	-	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	SKPD			JJumlah Printer Terpelihara 47 Unit/Tahun Jumlah Mesin Genset Terpelihara 2 Unit/Tahun Jumlah Komputer dan Laptop Terpelihara 51 Unit/Tahun Jumlah Mesin Fotocopy Terpelihara 1 Unit/Tahun Jumlah AC Terpelihara 27 Unit/Tahun Jumlah Server Terpelihara 1 Unit/Tahun	47 Unit/Tahun 2 Unit/Tahun 51 Unit/Tahun 1 Unit/Tahun 27 Unit/Tahun 1 Unit/Tahun	113.340.000	-	
			Penyediaan alat tulis kantor	SKPD			Jumlah Alat Tulis Kantor Terbeli 30 jenis	30 jenis	183.913.900	-	
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	SKPD			Jumlah Cetakan dan Penggandaan Terbayar 11 Jenis	11 Jenis	72.610.000	-	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	SKPD			Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Tersedia 3 Jenis Surat Kabar Harian	3 Jenis Surat Kabar Harian	8.496.000	-	
			Penyediaan bahan logistik kantor	SKPD			Jumlah Bahan Logistik Kantor Tersedia 12 Bulan	12 Bulan	305.007.050	-	
			Penyediaan makanan dan minuman	SKPD			Jumlah Makanan dan Minuman Rapat Terlaksana 6.704 Orang/Kali	6.704 Orang/Kali	301.680.000	-	
			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	SKPD			Jumlah Peralatan Listrik Terbeli 10 Jenis	10 Jenis	40.590.000	-	
			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	SKPD			Jumlah Rek. Air Terbayar 1 Tahun Jumlah Rek. Internet Terbayar 1 Tahun Jumlah Rek. Listrik Terbayar 1 Tahun Jumlah Rek. Telepon Terbayar 1	1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun	609.500.000	-	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Tahun				
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	SKPD			Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah Terlaksana 3.120 Ok Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Dalam Provinsi Terlaksana 1 Tahun Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Luar Provinsi Terlaksana 1 Tahun	3.120 Ok 1 Tahun 1 Tahun	2.205.875.000	-	



No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	SKPD			Jumlah tunjangan yang terbayar 14 kali Jumlah gaji yang terbayar 14 kali	14 kali 14 kali	13.494.400.000	-	
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	SKPD			Jumlah penggandaan terbayar 1.250 lembar	1.250 lembar	500.000	-	
			Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan dan Pelayanan SKPD		Indeks Kepuasan Masyarakat	0 Nilai					Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
			Pelaksanaan kegiatan Pameran Pembangunan	SKPD			Jumlah Informasi Pembangunan Daerah Terlaksana 1 Kegiatan	1 Kegiatan	41.265.000	-	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			Jumlah pembayaran rek. air, listrik, telpon dan internet dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan mengakses berbagai informasi	0 bulan				

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penyediaan jasa surat menyurat	SKPD			Terlaksananya Pelayanan Surat Menyurat di UPT Peralatan DPUPRP 12 bulan	12 bulan	58.768.800	-	
			Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	SKPD, Pelaihari, Pelaihari			Adanya Pemeliharaan kendaraan dinas dan alat berat 1 Tahun	1 Tahun	660.894.800	-	
			Penyediaan jasa kebersihan kantor	SKPD			Terwujudnya penyediaan jasa kebersihan kantor 12 bulan	12 bulan	60.824.300	-	
			Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	SKPD			Penyediaan Jasa perbaikan peralatan kerja 12 bulan	12 bulan	6.900.000	-	
			Penyediaan alat tulis kantor	SKPD			Jumlah alat tulis kantor tersedia 12 bulan	12 bulan	10.107.600	-	
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	SKPD			Terwujudnya Barang cetakan dan penggandaan 12 bulan	12 bulan	8.250.000	-	
			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	SKPD			Terwujudnya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan 12 bulan	12 bulan	1.080.000	-	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penyediaan makanan dan minuman	SKPD			Terwujudnya penyediaan makan minum 12 bulan	12 bulan	2.250.000	-	
			Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	SKPD			Terwujudnya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 12 bulan	12 bulan	26.792.500	-	
			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	SKPD			Terwujudnya penyediaan komponen alat listrik 12 bulan	12 bulan	7.650.000	-	
			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	SKPD			Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, air dan listrik di UPT Peralatan DPUPRP 12 bulan	12 bulan	53.800.000	-	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		IKM	1 Nilai					Sekretariat Daerah Bagian Umum
			Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	SKPD			Jumlah Jenis 2 Jenis	2 Jenis	1.037.436.700	1.141.180.370	
			Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	SKPD			Jumlah Jenis 3 Jenis	3 Jenis	613.471.200	674.818.320	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penyediaan jasa kebersihan kantor	SKPD			Jumlah Jenis 1 Jenis	1 Jenis	1.161.060.000	1.277.166.000	
			Penyediaan alat tulis kantor	SKPD			Jumlah Jenis 3 Jenis	3 Jenis	156.613.500	172.274.850	
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	SKPD			Jumlah Jenis 2 Jenis	2 Jenis	160.074.900	176.082.390	
			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	SKPD			Jumlah Bahan Bacaan 1 Jenis	1 Jenis	3.000.000	3.300.000	
			Penyediaan bahan logistik kantor	SKPD			Jumlah Jenis 7 Jenis	7 Jenis	263.871.800	290.258.980	
			Penyediaan makanan dan minuman	SKPD			Jumlah Orang 60.900 ok	60.900 ok	1.667.560.000	1.834.316.000	
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	SKPD			Jumlah SPPD 1.553 kali	1.553 kali	6.103.070.900	6.713.377.990	
			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	SKPD			Jumlah Jenis 1 Jenis	1 Jenis	113.640.950	125.005.045	
			Pelaksana kegiatan pameran pembangunan	SKPD			Jumlah Event Pameran Yang Diikuti 10 kali	10 kali	125.000.000	137.500.000	
			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	SKPD			Jumlah Jenis 4 Jenis	4 Jenis	1.920.000.000	2.112.000.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Fasilitasi Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian	SKPD			Jumlah Fasilitasi Pimpinan SKPD 9 Jenis	9 Jenis	798.650.000	878.515.000	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Indeks kepuasan masyarakat; Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	0 indeks; 34.446.572					Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Bumi Makmur
			Penyediaan jasa kebersihan kantor	SKPD, Bumi Makmur			Jumlah penyediaan jasa kebersihan kantor 6 kali	6 kali	900.000	-	
			Penyediaan alat tulis kantor	Bumi Makmur			Jumlah penyediaan alat tulis kantor 7 jenis	7 jenis	14.125.000	-	
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Bumi Makmur			Jumlah penyediaan cetakan 2 jenis	2 jenis	1.863.664	-	
			Penyediaan komponen instalasi				Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5 jenis	5 jenis	4.900.000	-	
			Penyediaan peralatan rumah tangga	Bumi Makmur			Jumlah penyediaan peralatan kebersihan kantor 7 jenis	7 jenis	8.137.082	-	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2 jenis	2 jenis	15.600.000	-	
			Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur		Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	5.187.600					Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Bumi Makmur
			Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor				Jumlah Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor 3 jenis	3 jenis	1.800.000	-	
			Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Bumi Makmur			Jumlah pemeliharaan perlatan gedung kantor 6 jenis	6 jenis	4.500.000	-	
			Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor				Jumlah Pemeliharaan Gedung Kantor 1 jenis	1 jenis	4.479.000	-	
			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Bumi Makmur			Jumlah pemeliharaan rutin kendaraan dinas operasional roda dua 1 unit	1 unit	13.725.480	-	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Persentase tersedianya fasilitas pelayanan administrasi perkantoran; Indeks Kepuasan Masyarakat	20 persen; 0					Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan UPT Laboratorium Dinas Pekerjaan Umum
			Penyediaan jasa surat menyurat	SKPD			Jumlah penyediaan materai 6000 50 Lembar Jumlah tenaga pembantu administrasi (PTT) 1 orang 12 Bulan Jumlah penyediaan materai 3000 30 Lembar	50 Lembar 12 Bulan 30 Lembar	28.424.400	34.109.280	
			Penyediaan jasa kebersihan kantor	SKPD			Jumlah tenaga kebersihan (PTT) 1 orang 1 Tahun Jumlah peralatan kebersihan dan bahan tersedia 12 bulan	1 Tahun 12 bulan	29.812.000	35.774.400	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	SKPD			Jumlah pemeliharaan komputer 3 unit/tahun Jumlah pemeliharaan Printer 3 unit/tahun Jumlah pemeliharaan AC 3 unit/tahun	3 unit/tahun 3 unit/tahun 3 unit/tahun	6.750.000	8.100.000	
			Penyediaan alat tulis kantor	SKPD			Jumlah penyediaan alat tulis kantor 1 Tahun	1 Tahun	6.823.180	8.187.800	
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	SKPD			Jumlah penyediaan penggandaan 10.000 lembar Jumlah penyediaan barang cetak spanduk 30 m2 Jumlah cetak brosur / leaflet 1.000 lembar	10.000 lembar 30 m2 1.000 lembar	13.264.800	15.917.760	
			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	SKPD			Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan terlaksana 12 bulan	12 bulan	1.440.000	2.440.000	



No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penyediaan makanan dan minuman	SKPD			Jumlah makanan dan minum pegawai (suplemen) tersedia 630 orang / hari Jumlah makan dan minum rapat tersedia 100 kotak/porsi	630 orang / hari 100 kotak/porsi	8.910.000	10.692.000	
			Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	SKPD			Jumlah penyediaan laptop 1 unit Jumlah penyediaan AC split 1 pk 1 unit Jumlah penyediaan lemari es 1 unit Jumlah penyediaan sarana teknologi informasi 1 Tahun	1 unit 1 unit 1 unit 1 Tahun	20.599.900	20.000.000	
			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	SKPD			Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor tersedia 1 Tahun	1 Tahun	12.102.500	14.523.000	
			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	SKPD			Jumlah penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 12	12 Bulan	22.800.000	27.360.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Bulan				
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Luar Daerah			Jumlah Penyediaan fasilitas Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 1 Tahun	1 Tahun	117.050.000	140.460.000	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Indeks Kepuasan Masyarakat	1 Nilai					Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian UPT Balai Latihan Kerja
			Penyediaan jasa surat menyurat	SKPD			Jumlah Orang 1 Orang Jumlah Surat Masuk dan Keluar 300 Surat	1 Orang 300 Surat	24.000.000	28.800.000	
			Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	SKPD			Jumlah Orang 3 Orang	3 Orang	72.000.000	86.400.000	
			Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	SKPD			Jumlah Orang 1 Orang Jumlah Jasa Penjaminan Barang Milik Daerah 1 Jenis	1 Orang 1 Jenis	24.000.000	28.800.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	SKPD			Jumlah Jasa/Unit Pemeliharaan dan Perizinan 5 Unit	5 Unit	7.500.000	10.000.000	
			Penyediaan jasa kebersihan kantor	SKPD			Jumlah Orang 2 Orang	2 Orang	48.000.000	57.600.000	
			Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	SKPD			Jumlah Jenis 4 Jenis	4 Jenis	20.600.000	25.600.000	
			Penyediaan alat tulis kantor	SKPD			Jumlah Jenis ATK 29 Jenis	29 Jenis	12.859.500	14.000.000	
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	SKPD			Jumlah Jenis Barang Cetakan dan Penggandaan 4 Jenis	4 Jenis	8.000.000	9.000.000	
			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	SKPD			Jumlah jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan 1 Jenis	1 Jenis	1.200.000	1.500.000	
			Penyediaan makanan dan minuman	SKPD			Jumlah Peserta Rapat dan Tamu 151 Kotak Jumlah Orang 90 Orang	151 Kotak 90 Orang	6.200.000	10.200.000	
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Luar Daerah			Jumlah Orang/Peserta Yang Mengikuti Rapat 74 Orang	74 Orang	176.440.000	185.000.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	SKPD			Jumlah Jenis Komponen Instalasi/ Penerangan Bangunan Kantor 8 Jenis	8 Jenis	6.533.000	7.500.000	
			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	SKPD			Jumlah Jenis 4 Jenis	4 Jenis	103.200.000	123.840.000	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Indeks Kepuasan Masyarakat	1 Nilai					Dinas Komunikasi dan Informatika
			Penyediaan jasa surat menyurat	SKPD			Jumlah tenaga pengadministrasi umum serta media komunikasi surat kabar 12 bulan	12 bulan	49.906.008	-	
			Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	SKPD			Jumlah honorarium tenaga keamanan untuk kantor 12 bulan	12 bulan	46.306.008	-	
			Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	SKPD			Jumlah biaya administrasi pajak kendaraan bermotor jabatan/operasional 12 bulan	12 bulan	6.400.000	-	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penyediaan jasa kebersihan kantor	SKPD			Jumlah penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih 0 jenis Jumlah peralatan kebersihan dan bahan pembersih yang terbayarkan 0 bulan Jumlah tenaga kebersihan kantor beserta peralatan kebersihannya 12 bulan	0 jenis 0 bulan 12 bulan	32.220.804	-	
			Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	SKPD			Jumlah peralatan yang diperbaiki 16 unit	16 unit	8.000.000	-	
			Penyediaan alat tulis kantor	SKPD			Jumlah alat tulis kantor yang terbayarkan 12 bulan Jumlah jenis alat tulis kantor yang disediakan 0 jenis	12 bulan 0 jenis	22.122.900	-	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	SKPD			Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan 7 jenis Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang terbayar 0 persen	7 jenis 0 persen	16.585.000	-	
			Penyediaan bahan logistik kantor	SKPD			Jumlah BBM untuk operasional kendaraan dan genset 12 bulan	12 bulan	55.640.000	-	
			Penyediaan makanan dan minuman	SKPD			Jumlah makanan dan minuman untuk rapat dan tamu 450 kotak	450 kotak	20.050.000	-	
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Luar Daerah, Kabupaten			Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang terbayarkan 0 bulan Jumlah SPPD rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0 SPPD Jumlah rapat-rapat koordinasi ke luar daerah 1 tahun	0 bulan 0 SPPD 1 tahun	463.999.580	-	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolak Ukur/Indikator	Target	Tolak Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penyediaan jasa penunjang kinerja SKPD	SKPD			Jumlah honorarium dan bpjs kesehatan dan ketenagakerjaan pegawai honorer / tidak tetap (PTT) yang terbayarkan 0 bulan Jumlah orang 0 orang	0 bulan 0 orang	-	-	
			Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	SKPD			Jumlah belanja alat listrik dan elektronik yang terbayarkan 0 bulan Jumlah alat yang tersedia 0 jenis Jumlah jenis peralatan sarana teknologi informasai kantor 11 jenis	0 bulan 0 jenis 11 jenis	13.449.700	-	
			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	SKPD			Jumlah bahan dan peralatan komponen listrik kantor 12 bulan	12 bulan	5.655.000	-	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penyediaan jasa administrasi keuangan	SKPD			Jumlah belanja perangkat, materai dan benda pos 500 buah Jumlah belanja jasa administrasi keuangan yang terbayarkan 0 bulan Jumlah materai 6000 dan 3000 yang tersedia 0 lembar	500 buah 0 bulan 0 lembar	2.400.000	-	
			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	SKPD			Jumlah belanja jasa rekening yang terbayar 12 bulan Jumlah jenis rekening yang terbayar 0 jenis	12 bulan 0 jenis	124.000.000	-	
			Penyediaan jasa, bahan, peralatan dan perlengkapan perkantoran	Kabupaten , SKPD, Pelaihari			Jumlah jenis 0 jenis	0 jenis	-	-	
			Penyediaan rapat-rapat, konsultasi, dan koordinasi	Luar Daerah, Kabupaten			Jumlah SPPD 0 SPPD	0 SPPD	-	-	
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	SKPD			Jumlah ASN Dinas Kominfo yang terbayarkan gaji dan tunjangan serta tamabahan	25 orang	4.017.535.931	-	



No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							penghasilannya 25 orang				
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Nilai IKM	1 Baik					Dinas Sosial
			Penyediaan jasa surat menyurat	SKPD			tersedianya jasa surat menyurat 0	0	3.750.000	-	
			Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	SKPD			jumlah jasa yang terpenuhi 0	0	50.252.928	-	
			Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	SKPD			tersedianya jasa perizinan kendaraan dinas/operasional 0	0	15.100.000	-	
			Penyediaan jasa kebersihan kantor	Kabupaten			Jumlah Pembelian Alat Kebersihan dan jasa petugas kebersihan 0 buah	0 buah	79.839.392	-	
			Penyediaan alat tulis kantor	Kabupaten			Jumlah Alat Tulis Kantor 0 macam	0 macam	48.360.000	-	
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kabupaten			Jumlah Cetak dan Penggandaan 0 Dokumen	0 Dokumen	12.375.000	-	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penyediaan bahan logistik kantor	Kabupaten			tersedianya bahan logistik kantor 0	0	124.200.000	-	
			Penyediaan makanan dan minuman	SKPD			Jumlah Makan dan Minum Rapat 0 orang	0 orang	33.800.000	-	
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Luar Daerah			Jumlah Laporan Hasil Rapat rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah 0 tahun	0 tahun	700.000.000	-	
			Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor				Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0 buah	0 buah	13.700.000	-	
			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	SKPD			Jumlah komponen alat listrik, dan elektronik 0 alat	0 alat	2.545.000	-	
			Penyediaan jasa administrasi keuangan	SKPD			Jumlah Dokumen penyusunan Renja SKPD, RKPS, RKA KL dan pelaksanaan kerjasama penyusunan bahan musyawarah pembangunan dan dokumen	0 tahun	50.252.928	-	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD	
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)					
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
							perencanaan 0 tahun					
			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kabupaten			Jumlah Pembayaran Telephone, Listrik, Internet dan Air 0 tahun	0 tahun	87.000.000	-		
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	SKPD			Tersedianya Gaji dan TPP PNS D 0	0	4.393.017.900	-		
			Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan dan Pelayanan SKPD		Nilai IKM	0 nilai					Dinas Sosial	
			Pelaksanaan kegiatan Pameran Pembangunan	SKPD					28.255.000	-		
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		IKM	0 Nilai					Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	
			Penyediaan jasa surat menyurat	SKPD				Jumlah jenis 1 Jenis	1 Jenis	1.125.000	-	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	SKPD			Jumlah orang 2 Orang	2 Orang	46.452.000	-	
			Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	SKPD			Jumlah unit 20 Unit	20 Unit	15.000.000	-	
			Penyediaan jasa kebersihan kantor	SKPD			Jumlah Jenis 11 Jenis Jumlah Orang 3 Orang	11 Jenis 3 Orang	73.145.000	-	
			Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	SKPD			Jumlah Unit 4 Unit	4 Unit	11.400.000	-	
			Penyediaan alat tulis kantor	SKPD			Jumlah Jenis 22 Jenis	22 Jenis	24.966.000	-	
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	SKPD			Jumlah Jenis 7 Jenis	7 Jenis	15.100.000	-	
			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	SKPD			Jumlah Jenis 1 Jenis	1 Jenis	2.880.000	-	
			Penyediaan makanan dan minuman	SKPD			Jumlah Kali 24 Kali	24 Kali	38.880.000	-	
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	SKPD			Jumlah SPPD 350 SPPD	350 SPPD	352.289.000	-	
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam daerah	SKPD			Jumlah SPPD 200 SPPD	200 SPPD	50.000.000	-	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	SKPD			Jumlah Unit 7 Unit	7 Unit	54.900.000	-	
			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	SKPD			Jumlah Jenis 4 Jenis	4 Jenis	6.128.000	-	
			Penyediaan jasa administrasi keuangan	SKPD			Jumlah Orang 1 Orang	1 Orang	23.226.000	-	
			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	SKPD			Jumlah Jenis 1 Jenis	1 Jenis	55.900.000	-	
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	SKPD			Jumlah Orang 34 Orang	34 Orang	5.945.089.502	-	
			Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan dan Pelayanan SKPD		IKM	0 Nilai					Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
			Pelaksanaan kegiatan Pameran Pembangunan	Kabupaten			Jumlah Event 2 Event	2 Event	25.000.000	-	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		indeks kepuasan masyarakat	0 nilai					Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
			Penyediaan jasa surat menyurat	SKPD				Jumlah Orang 2 Orang Jumlah Surat Masuk dan Keluar 1.500 Surat	2 Orang 1.500 Surat	74.800.000	86.020.000

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	SKPD			Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor 1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	6.000.000	6.900.000	
			Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	SKPD			Jumlah Orang 3 Orang Jumlah jasa penjaminan barang milik daerah 1 Jenis	3 Orang 1 Jenis	75.000.000	86.250.000	
			Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	SKPD			Jumlah Orang 1 Orang Jumlah / Jasa Unit pemeliharaan dan Perizinan kendaraan dinas / Operasional 2 Jenis	1 Orang 2 Jenis	31.735.600	36.495.940	
			Penyediaan jasa kebersihan kantor	SKPD			Jumlah jasa alat penujang kebersihan kantor 12 Jenis Jumlah Orang 1 Orang	12 Jenis 1 Orang	31.480.000	55.480.000	
			Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	SKPD			jumlah jenis 6 jenis	6 jenis	22.450.000	25.817.500	
			Penyediaan alat tulis kantor	SKPD			jumlah jenis ATK 21 jenis	21 jenis	22.308.500	25.654.775	
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	SKPD			Jumlah Jenis Barang catakan dan Penggandaan 4 Jenis	4 Jenis	10.950.000	12.592.500	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	SKPD			Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang undangan 2 Jenis	2 Jenis	7.160.000	8.234.000	
			Penyediaan makanan dan minuman	SKPD			Jumlah Peserta Rapat dan Tamu (Kotak) 1.200 Kotak	1.200 Kotak	23.200.000	26.680.000	
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kabupaten , Luar Daerah, SKPD			Jumlah Orang / Peserta yang mengikuti Rapat (Orang) 1.750 Orang	1.750 Orang	430.000.000	494.500.000	
			Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	SKPD			Jumlah Jenis peralatan dan perlengkapan kantor (Jenis) 8 jenis	8 jenis	20.000.000	23.000.000	
			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	SKPD			jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 182 Buah	182 Buah	12.320.000	14.168.000	
			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	SKPD			jumlah jenis 4 jenis	4 jenis	213.260.000	245.249.000	
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	SKPD			Jumlah ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangannya 50 Orang	50 Orang	8.632.506.574	8.848.319.238	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		IKM	0 baik					Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
			Penyediaan jasa surat menyurat	SKPD			Terlaksananya pengadaan jasa surat menyurat 12 bulan	12 bulan	7.182.000	7.900.200	
			Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	SKPD			Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 12 bulan	12 bulan	34.927.600	38.420.360	
			Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	SKPD			Terlaksananya penyediaan jasa pemeliharaan dan pembayaran pajak kendaraan bermotor roda dua, roda tiga, dan roda empat 12 bulan	12 bulan	7.500.000	8.250.000	
			Penyediaan jasa kebersihan kantor	SKPD			Terpenuhinya alat dan bahan pembersih kantor 12 bulan	12 bulan	58.275.000	64.102.500	
			Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	SKPD			Terlaksananya perbaikan komputer, laptop, printer dan ac 25 unit	25 unit	22.050.000	24.255.000	



No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penyediaan alat tulis kantor	SKPD			Terlaksananya pembelian alat tulis kantor 37 jenis	37 jenis	26.866.400	29.553.040	
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	SKPD			Terlaksananya penyediaan barang dan penggandaan 12 bulan	12 bulan	14.236.000	15.659.600	
			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	SKPD			Terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan berupa surat kabar 12 bulan	12 bulan	3.000.000	3.300.000	
			Penyediaan bahan logistik kantor	SKPD			Terlaksananya penyediaan logistik kantor bahan bakar minyak kendaraan dinas operasional 12 bulan	12 bulan	39.557.400	43.513.140	
			Penyediaan makanan dan minuman	SKPD			Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman untuk rapat internal dan external serta makan minuman tamu 12 bulan	12 bulan	57.948.000	63.742.800	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	SKPD			Terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah dan luar provinsi 12 bulan	12 bulan	500.000.000	550.000.000	
			Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	SKPD			Terlaksananya pengadaan UPS dan printer 6 unit	6 unit	12.000.000	13.200.000	
			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	SKPD			Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik atau penerangan bangunan kantor 8 jenis	8 jenis	9.406.100	10.346.710	
			Penyediaan jasa administrasi keuangan	SKPD			Terbayarnya premi asuransi pegawai tidak tetap/PTT 12 bulan	12 bulan	164.383.176	180.821.494	
			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	SKPD			Terlaksananya pembayaran rekening telepon, air, listrik dan internet 12 bulan	12 bulan	179.200.000	197.120.000	
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	SKPD			Tersedianya pemberdayaan gaji dan tunjangan ASN 1 tahun	1 tahun	3.655.499.830	4.021.049.813	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan dan Pelayanan SKPD		IKM	0 Baik					Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
			Pelaksanaan kegiatan Pameran Pembangunan	SKPD			Terlaksananya pameran pembangunan hari jadi kabupaten tanah laut 1 pameran	1 pameran	15.352.200	16.887.420	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		IKM	0 Nilai					Badan Pendapatan Daerah
			Penyediaan jasa surat menyurat	SKPD			Jumlah penyediaan paket pengiriman 10 Paket Jumlah terbayarnya honorarium PTT untuk tenaga administrasi umum 12 Bulan	10 Paket 12 Bulan	23.688.535	24.688.535	
			Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	SKPD			Jumlah laporan pengelolaan barang SKPD 2 Dokumen Jumlah terbayarnya honorarium PTT untuk petugas jaga malam 12 Bulan	2 Dokumen 12 Bulan	25.588.535	28.147.300	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penyediaan jasa kebersihan kantor	SKPD			Jumlah terbayarnya honorarium PTT untuk kebersihan kantor 12 Bulan Jumlah penyediaan bahan / peralatan kebersihan kantor 22 Jenis	12 Bulan 22 Jenis	31.396.355	34.535.900	
			Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	SKPD			Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki/dipelihara 5 Jenis	5 Jenis	15.625.000	17.187.500	
			Penyediaan alat tulis kantor	SKPD			Jumlah penyediaan alat tulis kantor 39 Jenis	39 Jenis	19.830.500	21.813.500	
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	SKPD			Jumlah penggandaan 10.000 Lembar Jumlah barang yang dicetak 12 Jenis	10.000 Lembar 12 Jenis	9.205.000	10.125.000	
			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	SKPD			Jumlah penyediaan bahan bacaan 2 SKH	2 SKH	2.880.000	4.880.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penyediaan makanan dan minuman	SKPD			Jumlah makanan dan minuman untuk rapat 5 Kali Rapat Jumlah makanan dan minuman untuk tamu 75 Orang Tamu	5 Kali Rapat 75 Orang Tamu	15.320.000	18.000.000	
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Luar Daerah			Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 100 Orang	100 Orang	375.000.000	400.000.000	
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam daerah	Jorong Kantor Jorong, Kintap Kantor Kintap, Kurau Kantor Kurau, Panyipatan Kantor Panyipatan , Pelaihari, Bajuin Kantor Bajuin, Bati-Bati Kantor Bati-Bati, Batu Ampar Kantor			Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam daerah 944 Orang	944 Orang	161.425.000	175.000.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Batu Ampar, Bumi Makmur							
			Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	SKPD			Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 7 jenis	7 jenis	54.450.000	59.895.000	
			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	SKPD			Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 18 Jenis	18 Jenis	12.080.100	13.288.100	
			Penyediaan jasa administrasi keuangan	SKPD			Jumlah terbayarnya honorarium PTT untuk pengelolaan administrasi keuangan 12 Bulan	12 Bulan	43.188.535	45.188.535	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	SKPD			Jumlah tagihan rekening telepon, air, listrik dan internet yang dibayarkan (4 rekening x 12) 48 Rekening	48 Rekening	303.527.774	310.500.000	
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	SKPD			Jumlah ASN yang menerima tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya 50 Orang Jumlah Gaji dan TPP PNS 14 Bulan	50 Orang 14 Bulan	7.875.622.952	10.375.622.952	
			Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan dan Pelayanan SKPD		Nilai IKM	0 Nilai					Badan Pendapatan Daerah
			Pelaksanaan kegiatan Pameran Pembangunan	Kabupaten			Jumlah laporan kinerja yang disusun 1 Dokumen Jumlah kegiatan pameran 2 Event	1 Dokumen 2 Event	25.000.000	30.000.000	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			IKM	1 Nilai				

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penyediaan jasa surat menyurat	SKPD			Jumlah Jenis 18 Jenis Paket Pengiriman	18 Jenis Paket Pengiriman	2.000.000	2.200.000	
			Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	SKPD			Jumlah Jenis 2 Jenis	2 Jenis	5.150.000	5.665.000	
			Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS	SKPD			Pembayaran BPJS JKK, JKM, ASN dan Pejabat Pemerintah kab. tanah Laut 5.004 orang	5.004 orang	30.779.062.987	30.779.062.987	
			Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	SKPD			Jumlah Jenia 2 Jenis	2 Jenis	22.450.000	24.695.000	
			Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	SKPD			Jumlah Jenis 30 Jenis Kend. Roda 2 dan Roda 4	30 Jenis Kend. Roda 2 dan Roda 4	22.400.000	24.640.000	
			Penyediaan jasa kebersihan kantor	SKPD			Jumlah Jenis 36 Bahan & Peralatan Kebersihan	36 Bahan & Peralatan Kebersihan	95.875.000	105.462.500	
			Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	SKPD			Jumlah Jenis 7 Jenis bahan & perlatan kerja	7 Jenis bahan & perlatan kerja	41.400.000	45.540.000	
			Penyediaan alat tulis kantor	SKPD			Jumlah Jenis 45 Jenis	45 Jenis	73.320.000	80.652.000	



No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	SKPD			Jumlah Jenis 3 Jenis	3 Jenis	59.350.000	65.285.000	
			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	SKPD			Jumlah Jenis 2 Jenis	2 Jenis	7.200.000	7.920.000	
			Penyediaan makanan dan minuman	SKPD			Jumlah Jenis 3.666 Kali rapat/ Org Tamu (Ktk)	3.666 Kali rapat/ Org Tamu (Ktk)	90.850.000	99.935.000	
			Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	SKPD			Jumlah Jenis 2 Jenis Perlatan/Perlengkapan Ktr	2 Jenis Perlatan/Perlengkapan Ktr	87.659.400	96.425.340	
			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	SKPD			Jumlah jenis 10 Jenis Komponen/Peralatan Listrik	10 Jenis Komponen/Peralatan Listrik	14.408.500	15.849.350	
			Penyediaan jasa administrasi keuangan	SKPD			Jumlah Jenis 2 Jenis	2 Jenis	93.756.000	103.131.600	
			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	SKPD			Jumlah Bulan 12 Bulan	12 Bulan	324.350.000	356.785.000	
			Penyediaan rapat-rapat, konsultasi, dan koordinasi	SKPD			Jumlah jenis 5 Jenis	5 Jenis	700.000.000	770.000.000	
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	SKPD			Pembayaran Gaji dan Tunjangan 14	14 Bulan	8.960.443.406	8.960.443.406	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Bulan				
			Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan dan Pelayanan SKPD		IKM	1 Nilai					Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
			Pelaksanaan kegiatan Pameran Pembangunan	SKPD			Jumlah 2 Event	2 Event	24.994.700	27.494.000	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Nilai IKM	80 Nilai					Sekretariat Daerah Bagian Tata Usaha dan Keuangan
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	SKPD			Jumlah Pejabat Negara 2 orang Jumlah ASN 145 orang	2 orang 145 orang	26.927.126.994	28.273.483.344	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		IKM	1 Nilai					Dinas Pariwisata
			Penyediaan jasa surat menyurat	SKPD			Jumlah pembelian materai 700 lembar Terpenuhinya kebutuhan materai dan terbayarnya honorarium PTT 1 orang PTT	700 lembar 1 orang PTT	26.317.634	26.317.634	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	SKPD			Jumlah Jenis spanduk/dekorasi/baliho Dinas Pariwisata & UPT OW Pantai Takisung 8 Jenis	8 Jenis	14.325.000	14.325.000	
			Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	SKPD			Jumlah PTT Dinas Pariwisata & UPT OW Takisung (Keamanan) 2 orang PTT	2 orang PTT	61.335.268	61.335.268	
			Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	SKPD			Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional 18 Buah Jumlah PTT pengemudi 1 orang PTT	18 Buah 1 orang PTT	34.367.634	34.367.634	
			Penyediaan jasa kebersihan kantor	SKPD			jumlah jenis alat dan bahan kebersihan kantor 7 Jenis Jumlah PTT kebersihan Dinas Pariwisata & UPT OW Pantai Takisung 9 Orang PTT	7 Jenis 9 Orang PTT	260.021.707	260.021.707	
			Penyediaan alat tulis kantor	SKPD			Jumlah Jenis ATK Dinas & UPT OW Pantai Takisung 2 Jenis	2 Jenis	40.589.300	40.589.300	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	SKPD			Jumlah Jenis Barang Cetak dan Penggandaan Dinas & UPT OW Pantai Takisung 2 Jenis	2 Jenis	63.705.000	63.705.000	
			Penyediaan komponen instalasi	SKPD			Jumlah Jenis instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Dinas & UPT OW Pantai Takisung 16 Jenis	16 Jenis	14.396.000	14.396.000	
			Penyediaan peralatan dan perlengkapan	SKPD			Jumlah Jenis Peralatan dan perlengkapan kantor Dinas & UPT OW Pantai Takisung 4 jenis	4 jenis	116.000.000	116.000.000	
			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	SKPD			Jumlah jenis surat kabar 2 jenis	2 jenis	6.000.000	6.000.000	
			Penyediaan makanan dan minuman	SKPD			Jumlah jenis rapat Dinas & UPT OW Pantai Takisung 3 jenis	3 jenis	62.700.000	62.700.000	
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	SKPD			Jumlah Jenis SPPD Dinas Pariwisata & UPT OW Pantai Takisung 2 jenis	2 jenis	507.800.000	507.800.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penyediaan jasa administrasi keuangan	SKPD			Jumlah PTT Tenaga Administrasi Keuangan 3 orang PTT	3 orang PTT	74.502.902	74.502.902	
			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	SKPD			Jumlah Jenis iuran listrik, air, internet kantor Dinas Pariwisata & Kantor UPT OW Pantai Takisung 3 Jenis	3 Jenis	231.974.455	231.974.455	
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	SKPD			Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN 30 orang	30 orang	5.232.550.000	5.232.550.000	
			Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan dan Pelayanan SKPD		IKM	0 pelaporan					Dinas Pariwisata
			Pelaksanaan kegiatan Pameran Pembangunan	SKPD			Jumlah dokumen Monitoring dan Evaluasi perencanaan dan keuangan 1 dokumen	1 dokumen	23.000.000	23.000.000	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Indeks Kepuasan Masyarakat	0 Indeks					Dinas Kesehatan RSUD Kintap
			Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	SKPD			Jumlah Penyediaan jasa barang milik daerah 11 orang	11 orang	266.691.599	-	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kintap Kantor Kintap			Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 1 tahun	1 tahun	9.600.000	10.560.000	
			Penyediaan jasa kebersihan kantor	SKPD, Kintap Kantor Kintap			Jumlah penyediaan jasa kebersihan kantor 13 orang	13 orang	339.180.981	26.400.000	
			Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Kintap Kantor Kintap			jumlah jenis Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 2 jenis	2 jenis	12.000.000	13.200.000	
			Penyediaan alat tulis kantor	Kintap Kantor Kintap			Jumlah jenis Penyediaan Alat Tulis Kantor 62 jenis	62 jenis	126.400.000	139.040.000	
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kintap Kantor Kintap			Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 19 jenis	19 jenis	216.000.000	237.600.000	
			Penyediaan peralatan rumah tangga	Kintap Kantor Kintap			Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 18 jenis	18 jenis	112.000.000	123.200.000	
			Penyediaan bahan logistik kantor	Kintap Kantor Kintap			Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor 1 tahun	1 tahun	1.436.624.016	1.580.286.418	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penyediaan makanan dan minuman	Kintap Kantor Kintap			jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman 1 tahun	1 tahun	120.000.000	132.000.000	
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Luar Daerah, Kintap Kantor Kintap			jumlah Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 1 tahun	1 tahun	96.000.000	105.600.000	
			Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kintap Kantor Kintap			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 8 jenis	8 jenis	124.000.000	136.400.000	
			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kintap Kantor Kintap			jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 9 jenis	9 jenis	40.000.000	44.000.000	
			Penyediaan jasa administrasi keuangan	SKPD			Penyediaan jasa administrasi keuangan 3 orang	3 orang	76.334.073	-	
			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kintap Kantor Kintap			Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1 tahun	1 tahun	504.000.000	554.400.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pembuatan dan Pemeliharaan Sistem Informasi SKPD	Kintap Kantor Kintap			persentasi penyelenggaraa n sistem informasi kesehatan secara terpadu 100 persen tersedianya pengelolaan sistem informasi kesehatan 1 tahun	100 persen 1 tahun	116.000.000	127.600.000	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		IKM	1 Nilai					Kurau Kantor Kurau
			Penyediaan jasa surat menyurat	Kurau Kantor Kurau			Jumlah Orang 2 Orang	2 Orang	41.928.000	46.120.800	
			Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Kurau Kantor Kurau			Jumlah Orang 1 Orang	1 Orang	21.864.000	24.864.000	
			Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kurau Kantor Kurau			Jumlah Kendaraan yang dipelihara 12 Unit	12 Unit	3.700.000	4.700.000	
			Penyediaan jasa kebersihan kantor	Kurau Kantor Kurau			Jumlah Jenis Alat Kebersihan Kantor 24 Jenis Jumlah Orang 2 Orang	24 Jenis 2 Orang	54.758.000	60.233.800	
			Penyediaan alat tulis kantor	Kurau Kantor Kurau			Jumlah Jenis 45 Jenis	45 Jenis	19.190.300	21.218.230	



No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kurau Kantor Kurau			Jenis Penggandaan 11 Jenis	11 Jenis	800.000	900.000	
			Penyediaan peralatan dan perlengkapan	Kurau Kantor Kurau			Jumlah Jenis 3 Jenis	3 Jenis	2.580.000	2.838.000	
			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kurau Kantor Kurau			Jumlah Eksemplar 2 Eksemplar	2 Eksemplar	2.040.000	2.244.000	
			Penyediaan bahan logistik kantor	Kurau Kantor Kurau			Jumlah Jenis 2 Jenis	2 Jenis	45.890.000	50.556.000	
			Penyediaan makanan dan minuman	Kurau Kantor Kurau			Jumlah Orang 595 orang	595 orang	20.775.000	2.283.500	
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kurau Kantor Kurau			Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah Dalam Provinsi dan Luar Provinsi 12 Bulan	12 Bulan	86.050.000	93.700.000	
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam daerah	Kurau Kantor Kurau			Jumlah SPPD Dalam Daerah 12 SPPD	12 SPPD	54.600.000	60.700.000	
			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kurau Kantor Kurau			Jumlah Jenis 22 Jenis	22 Jenis	2.619.280	3.168.000	
			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air				Jumlah Jenis 3 Jenis	3 Jenis	33.320.000	36.652.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			dan listrik								
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kurau Kantor Kurau			Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN Kecamatan 25 orang	25 orang	3.685.803.212	4.054.383.533	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		ikm	3 nilai					Bajuin Kantor Bajuin
			Penyediaan jasa surat menyurat	Bajuin Kantor Bajuin			terlaksananya jasa surat menyurat 1 tahun	1 tahun	86.105.520	-	
			Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Bajuin Kantor Bajuin			Terlaksananya jasa jaminan barang milik daerah 1 tahun	1 tahun	43.052.760	-	
			Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Bajuin Kantor Bajuin			Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional empat dan roda dua 1 tahun	1 tahun	33.300.000	-	
			Penyediaan jasa kebersihan kantor	Bajuin Kantor Bajuin			terlaksananya penyediaan jasa kebersihan kantor 1 tahun	1 tahun	46.496.260	-	
			Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Bajuin Kantor Bajuin			terlaksananya penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 1 tahun	1 tahun	6.650.000	-	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penyediaan alat tulis kantor	Bajuin Kantor Bajuin			Tersedianya alat tulis kantor 1 tahun	1 tahun	25.747.000	-	
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Bajuin Kantor Bajuin			tersedia nya penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1 tahun	1 tahun	3.741.000	-	
			Penyediaan peralatan dan perlengkapan	Bajuin Kantor Bajuin			tersedianya peralatan dan perlengkapan untuk rumah jabatan/dinas 1 tahun	1 tahun	14.800.000	-	
			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Bajuin Kantor Bajuin			terbayarnya bahan bacaan (koran) 1 tahun	1 tahun	2.700.000	-	
			Penyediaan bahan logistik kantor	Bajuin Kantor Bajuin			tersedianya BBM dan Pelumas kendaraan dinas serta isi ulang tabung 1 tahun	1 tahun	50.670.760	-	
			Penyediaan makanan dan minuman	Bajuin Kantor Bajuin			Tersedianya penyediaan makanan dan minuman 1 tahun	1 tahun	16.200.000	-	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Bajuin Kantor Bajuin			Terlaksananya rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1 tahun	1 tahun	117.810.000	-	
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam daerah	Bajuin Kantor Bajuin			Terlaksananya rapat dan koordinasi dalam daerah 1 tahun	1 tahun	46.225.000	-	
			Penyediaan jasa penunjang kinerja SKPD				jumlah orang 8 orang	8 orang	-	128.000.000	
			Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Bajuin Kantor Bajuin			Tersedianya pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor 1 tahun	1 tahun	42.090.000	-	
			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Bajuin Kantor Bajuin			Tersedianya penyediaan komponen intalasi listrik 1 tahun	1 tahun	2.660.000	-	
			Penyediaan jasa administrasi keuangan	Bajuin Kantor Bajuin			Tersedianya jasa administrasi keuangan 1 tahun	1 tahun	2.275.000	-	
			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bajuin Kantor Bajuin			terlaksanya pembayaran rekening dan voucher listrik 1 tahun	1 tahun	17.000.000	-	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penyediaan jasa, bahan, peralatan dan perlengkapan perkantoran	Bajuin Kantor Bajuin			jumlah jenis 0 jenis	0 jenis	-	76.490.000	
			Penyediaan rapat-rapat, konsultasi, dan koordinasi				jumlah orang 22 orang	22 orang	-	160.000.000	
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Bajuin Kantor Bajuin			Terbayarnya Gaji, Tunjangan dan TPP 1 Tahun	1 Tahun	2.438.296.172	-	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		IKM	0 Nilai					Jorong Kantor Jorong
			Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Jorong Kantor Jorong			Tersedianya Jasa Jaminan Keamanan Barang Milik Daerah 1 Tahun	1 Tahun	18.621.176	22.021.176	
			Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jorong Kantor Jorong			Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 7 unit	7 unit	4.500.000	6.420.000	
			Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jorong Kantor Jorong			Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor 1 Tahun	1 Tahun	70.254.528	70.254.528	
			Penyediaan alat tulis kantor	Jorong Kantor Jorong			Tersedianya Alat Tulis Kantor 20 Jenis	20 Jenis	10.992.400	10.992.400	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jorong Kantor Jorong			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan 2 Jenis	2 Jenis	8.576.000	8.576.000	
			Penyediaan bahan logistik kantor	Jorong Kantor Jorong			Tersedianya Bahan Logistik Kantor 2 Jenis	2 Jenis	41.150.000	41.150.000	
			Penyediaan makanan dan minuman	Jorong Kantor Jorong			Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat 12 bulan	12 bulan	23.880.000	23.880.000	
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jorong Kantor Jorong			Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Dalam Daerah dan Ke Luar Daerah 1 Tahun	1 Tahun	147.010.000	152.120.000	
			Penyediaan jasa penunjang kinerja SKPD				Jumlah orang 0 orang	0 orang	-	-	
			Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jorong Kantor Jorong			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4 Jenis	4 Jenis	15.188.400	15.188.400	
			Penyediaan jasa administrasi keuangan				Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan 1 Tahun	1 Tahun	23.876.176	25.576.176	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jorong Kantor Jorong			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 12 bulan	12 bulan	27.600.000	27.600.000	
			Penyediaan jasa, bahan, peralatan dan perlengkapan perkantoran				Jumlah jenis 47 jenis	47 jenis	-	-	
			Penyediaan rapat-rapat, konsultasi, dan koordinasi				Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi 1 Tahun	1 Tahun	-	-	
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jorong Kantor Jorong			Terbayaran Gaji dan Tunjangan Serta Tambahan Penghasilan ASN 1 Tahun	1 Tahun	3.519.820.806	3.519.820.806	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			IKM	441.847.834 jumlah jenis, orang, transaksi keuangan, contoh				Batu Ampar Kantor Batu Ampar
			Penyediaan jasa surat menyurat					Jumlah terbayarnya jasa pengadministrasi umum 3 orang	3 orang	64.800.000	64.800.000

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS				Jumlah terbayarnya jasa premi petugas kebersihan, jaga malam, pengadministrasi umum dan sopir 6 orang	6 orang	5.935.680	6.000.000	
			Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah				Jumlah terbayarnya jasa penjaga malam kantor 1 orang	1 orang	21.600.000	25.000.000	
			Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional				Jumlah terbayarnya pajak/ganti plat kendaraan dinas operasional kantor 11 unit	11 unit	8.500.000	9.500.000	
			Penyediaan jasa kebersihan kantor				Terbelinya Alat dan Bahan Kebersihan 15 Jenis Terbayarnya honor Petugas Kebersihan 1 Orang	15 Jenis 1 Orang	28.485.000	30.000.000	
			Penyediaan alat tulis kantor				Jumlah terbelinya alat tulis kantor 36 jenis	36 jenis	17.064.320	20.500.000	
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan				Jumlah terlaksananya pencetakan, penggandaan dan penjiilidan 9	9 jenis	9.820.000	12.000.000	



No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							jenis				
			Penyediaan peralatan rumah tangga				Jumlah terbelinya penyediaan peralatan rumah dinas 3 jenis	3 jenis	28.000.000	30.000.000	
			Penyediaan bahan logistik kantor				Jumlah terlaksananya penyediaan bahan bakar minyak/gas dan pelumas 1 tahun	1 tahun	75.110.000	80.000.000	
			Penyediaan makanan dan minuman				Jumlah terlaksananya penyediaan makanan dan minuman rapat dan tamu 51 ok	51 ok	10.700.000	12.000.000	
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah				Jumlah terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dalam provinsi dan luar provinsi 1 Tahun	1 Tahun	80.000.000	95.000.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam daerah				Jumlah terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 1 tahun	1 tahun	65.000.000	80.000.000	
			Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor				Jumlah terbelinya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1 jenis	1 jenis	15.000.000	35.000.000	
			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				Jumlah terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 3 jenis	3 jenis	5.450.000	7.500.000	
			Penyediaan jasa administrasi keuangan				Jumlah terbayarnya jasa transaksi keuangan dan pembelian materai 1 Tahun	1 Tahun	5.300.000	6.500.000	
			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				jumlah terbayarnya jasa komonikasi kantor, sumber daya air dan listrik 3 jenis	3 jenis	28.200.000	30.000.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				Jumlah terbayarnya Gaji dan Tunjangan PNS Kec. Batu Ampar 16 orang	16 orang	3.049.174.392	3.075.000.000	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Indeks kepuasan masyarakat	3 Nilai					Panyipatan Kantor Panyipatan
			Penyediaan jasa surat menyurat	Panyipatan Kantor Panyipatan			Jumlah meterai 350 lembar Jumlah buku cek 6 buah	350 lembar 6 buah	107.298.000	118.027.800	
			Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Panyipatan Kantor Panyipatan			pajak dan STNK yang terbayarkan 1 tahun	1 tahun	10.000.000	11.000.000	
			Penyediaan jasa kebersihan kantor	Panyipatan Kantor Panyipatan			Jumlah jenis alat kebersihan 17 jenis	17 jenis	51.349.300	56.484.230	
			Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Panyipatan Kantor Panyipatan			Jumlah peralatan kerja yang di servis 30 unit	30 unit	59.809.200	65.790.120	
			Penyediaan alat tulis kantor	Panyipatan Kantor Panyipatan			Jumlah ATK yang dibeli 41 jenis	41 jenis	15.350.300	16.885.330	
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Panyipatan Kantor Panyipatan			Jumlah spanduk 15 buah Jumlah amplop kop 2 pak Jumlah map kop	15 buah 2 pak 50 buah	3.140.000	3.450.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							50 buah				
			Penyediaan bahan logistik kantor	Panyipatan Kantor Panyipatan			jumlah logistik yang tersedia 1 tahun	1 tahun	52.000.000	57.200.000	
			Penyediaan makanan dan minuman	Panyipatan Kantor Panyipatan			Jumlah makan minum rapat 18 kali	18 kali	12.870.000	14.157.000	
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Panyipatan Kantor Panyipatan			Rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang terfasilitasi 12 bulan	12 bulan	82.000.000	90.200.000	
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam daerah	Panyipatan Kantor Panyipatan			rapat koordinasi 12 bulan	12 bulan	71.550.000	78.705.000	
			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Panyipatan Kantor Panyipatan			Jumlah yang terbeli 14 jenis	14 jenis	5.785.600	6.364.160	
			Penyediaan jasa administrasi keuangan	Panyipatan Kantor Panyipatan			terbayarnya honorarium ptt 2 orang 12 bulan	12 bulan	39.859.200	43.845.120	
			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Panyipatan Kantor Panyipatan			Jumlah bulan pembayaran 12 bulan	12 bulan	32.400.000	35.640.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Panyipatan Kantor Panyipatan			Gaji dan Tunjangan 12 bulan	12 bulan	2.555.981.110	2.811.579.221	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Indeks Kepuasan Masyarakat	0 Nilai					Pelaihari
			Penyediaan jasa surat menyurat	Pelaihari			Jumlah belanja jasa surat menyurat 12 bulan	12 bulan	70.812.000	77.893.200	
			Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Pelaihari			Jumlah terbelinya penyediaan kelengkapan kantor 9 jenis	9 jenis	19.046.600	20.951.260	
			Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Pelaihari			Jumlah belanja jasa jaminan barang milik daerah 12 bulan	12 bulan	23.604.100	25.964.510	
			Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Pelaihari			Jumlah terlaksananya pembayaran pajak 2 unit kendaraan dinas/ operasional roda 4 dan 5 unit roda 2 7 unit	7 unit	7.200.000	7.920.000	
			Penyediaan jasa kebersihan kantor	Pelaihari			Jumlah terbelinya alat pembersih dan bahan pembersih kantor 12 bulan	12 bulan	55.012.000	60.513.200	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Pelaihari			Jumlah pemeliharaan peralatan kerja 17 unit	17 unit	4.600.000	5.060.000	
			Penyediaan alat tulis kantor	Pelaihari			Terlaksananya pembelian alat tulis kantor 12 bulan	12 bulan	17.608.700	19.369.570	
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Pelaihari			Jumlah terlaksananya penyediaan barang cetakan dan fotocopy 12 bulan	12 bulan	7.152.400	7.867.640	
			Penyediaan bahan logistik kantor	Pelaihari			Jumlah pembelian bahan logistik kantor 6 unit	6 unit	18.146.700	19.961.370	
			Penyediaan makanan dan minuman	Pelaihari			Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman rapat dan tamu 12 bulan	12 bulan	33.975.000	37.372.500	
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Pelaihari			Jumlah SPPD rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah 25 orang	25 orang	147.995.000	162.794.500	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Pelaihari			Terlaksannya penyediaan komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor 12 bulan	12 bulan	2.617.200	2.878.920	
			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Pelaihari			Jumlah Terlaksananya pembayaran jasa telpon, internet, air dan listrik 12 bulan	12 bulan	36.050.000	39.655.000	
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pelaihari			Jumlah terbayarkannya gaji dan tunjangan ASN Kecamatan Pelaihari 12 bulan	12 bulan	9.910.479.983	10.901.527.981	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Terlaksananya barang cetak dan penggandaan; Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi,sum ber daya air dan listrik; Terlaksananya penyediaan jasa administrasi keuangan; Terlaksananya penyediaan jasa kebersihan; Terlaksananya penyediaan ATK; Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor; Terlaksananya penyediaan bacaan dan peraturan perundangan; Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman; Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah;	10 jenis; 3 jenis; 430 jenis; 17 jenis; 27 jenis; 6 jenis; 24 eksemplar ; 650 orang; 19 orang; 19 orang; 5 orang; 0 jenis; 0 kali					Tambang Ulang Kantor Tambang Ulang
Bappeda Kabupaten Tanah Laut											V - 144
					Terlaksananya rapat-rapat koordinasi konsultasi ke dalam daerah; Terlaksananya						



No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penyediaan jasa surat menyurat	Tambang Ulang Kantor Tambang Ulang			Jumlah Orang 1 Orang	1 Orang	18.500.000	-	
			Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah				Jumalah Orang 1 Orang 0	1 Orang 0	20.760.000	-	
			Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional				Jumlah Kendaraan Roda 2, dan 4 (Buah) 11 Buah	11 Buah	5.100.000	-	
			Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tambang Ulang Kantor Tambang Ulang			Jumlah Orang 2 Orang Jumlah Jenis peralatan kebersihan 23 Jenis	2 Orang 23 Jenis	55.000.000	-	
			Penyediaan alat tulis kantor				Jumlah Jenis alat tulis kantor 1 Tahun	1 Tahun	22.000.000	-	
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan				Tersedianya barang cetak dan penggandaan 1 Tahun	1 Tahun	6.000.000	-	
			Penyediaan peralatan rumah tangga	Tambang Ulang Kantor Tambang Ulang			Terpenuhinya peralatan rumah tangga 1 Tahun	1 Tahun	25.000.000	-	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tambang Ulang Kantor Tambang Ulang			Terlaksananya pembayaran bahanbacaan dan peraturan perundang-undangan 1 Tahun	1 Tahun	2.700.000	-	
			Penyediaan bahan logistik kantor				Terpenuhinya Bahan Logistik Kantor 1 Tahun	1 Tahun	65.355.000	-	
			Penyediaan makanan dan minuman				Terbayarnya penyediaan makanan dan minuman rapat 0 Tahun	0 Tahun	27.000.000	-	
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah				Terlaksananya rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 1 Tahun	1 Tahun	60.000.000	-	
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam daerah				Terlaksananya rapat rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 1 Tahun	1 Tahun	70.000.000	-	
			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tambang Ulang Kantor Tambang Ulang			Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1 Tahun	1 Tahun	4.400.000	-	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penyediaan jasa administrasi keuangan				Terlaksananya pembayaran dan pembelian materai dan belanja jasa transaksi keuangan 1 Tahun	1 Tahun	10.000.000	-	
			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tambang Ulang Kantor Tambang Ulang			Terlaksananya pembayaran rekening listrik dan internet 0 Tahun	0 Tahun	44.000.000	-	
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tambang Ulang Kantor Tambang Ulang			Jumlah Asn yang dibayar 25 orang	25 orang	3.423.470.000	-	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		IKM	0 Nilai					Bati-Bati Kantor Bati-Bati
			Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah				jumlah bulan 12 bulan	12 bulan	23.160.000	-	
			Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional				Jumlah Unit 10 Unit	10 Unit	87.620.000	-	
			Penyediaan jasa kebersihan kantor				Jumlah Jenis 12 bulan	12 bulan	73.961.500	-	
			Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja				Jumlah unit/Kali 42 Unit/Kali	42 Unit/Kali	11.050.000	-	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penyediaan alat tulis kantor				Jumlah Jenis 29 Jenis	29 Jenis	8.570.000	-	
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan				Jumlah Jenis 5 Jenis	5 Jenis	4.200.000	-	
			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan				Jumlah Jenis 2 Jenis	2 Jenis	3.000.000	-	
			Penyediaan makanan dan minuman				Jumlah Bulan 12 Bulan	12 Bulan	25.650.000	-	
			Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor				Jumlah Jenis 2 Jenis	2 Jenis	17.000.000	-	
			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				Jumlah Jenis 5 Jenis	5 Jenis	3.200.000	-	
			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bati-Bati Kantor Bati-Bati			Jumlah Bulan 12 Bulan	12 Bulan	61.500.000	-	
			Penyediaan rapat-rapat, konsultasi, dan koordinasi	Luar Daerah, Kabupaten			jumlah rapat/perjalanan dinas 12 bulan	12 bulan	115.500.000	-	
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Bati-Bati Kantor Bati-Bati			jumlah bulan 12 bulan	12 bulan	4.350.787.441	-	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			IKM	0				

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penyediaan jasa surat menyurat	Bumi Makmur			Terbayarnya jasa surat menyurat 3 Orang	3 Orang	67.200.000	77.840.000	
			Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS	Bumi Makmur			terpenuhinya Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan Kesehatan PNS / terlaksananya Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan Kesehatan PNS 7 orang 12 jumlah bulan	12 jumlah bulan	12.188.400	13.407.240	
			Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Bumi Makmur			Terpenuhinya Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah / terlaksananya Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 1 orang 12 jumlah bulan	12 jumlah bulan	22.800.000	24.280.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Bumi Makmur			terpenuhinya penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/opersional/terlaksananya penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 8 unit kendaraan bermotor 12 jumlah bulan	12 jumlah bulan	3.900.000	4.290.000	
			Penyediaan jasa kebersihan kantor	Bumi Makmur			Terlaksananya pembelian keperluan peralatan kebersihan dan bahan pembersih 70 jenis dan terbayarnya jasa 2 orang petugas kebersihan kantor 12 Bulan	12 Bulan	47.809.100	48.800.000	
			Penyediaan alat tulis kantor	Bumi Makmur			Terpenuhinya keperluan persediaan alat tulis kantor 70 jenis	70 jenis	17.724.400	19.496.840	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Bumi Makmur			terpenuhinya penyediaan barang cetakan dan penggandaan / terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan 4 jenis	4 jenis	3.683.200	4.051.520	
			Penyediaan bahan logistik kantor				tersedianya Bahan Bakar Minyak 0 liter	0 liter	39.060.000	40.046.000	
			Penyediaan makanan dan minuman	Bumi Makmur			Terpenuhinya makan minum rapat / terlaksananya makan minum rapat 10 kali rapat	10 kali rapat	10.500.000	11.550.000	
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah				Terpenuhinya rapat-rapat, konsultasi dan koordinasi ke Luar Daerah / terlaksananya rapat-rapat, konsultasi dan koordinasi ke Luar Daerah 10 SPPD 12 Bulan	12 Bulan	142.000.000	145.840.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam daerah	Bumi Makmur			Terpenuhinya rapat-rapat, konsultasi dan koordinasi ke dalam Daerah / terlaksananya rapat-rapat, konsultasi dan koordinasi ke dalam Daerah 12 bulan	12 bulan	77.600.000	85.360.000	
			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Bumi Makmur			terpenuhinya penyediaan komponen instalasi listrik/Penerangan bangunan kantor / terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik/Penerangan bangunan kantor 12 Bulan	12 Bulan	1.921.400	2.113.540	
			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bumi Makmur			Terpenuhinya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik / Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 12 Bulan	12 Bulan	35.649.600	39.214.560	



No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Bumi Makmur			tersedianya gaji dan tunjangan ASN/terlaksananya penyedia gaji dan tunjangan ASN 12 Bulan	12 Bulan	2.422.240.658	2.664.464.724	
			Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur		FALSE	FALSE					Bumi Makmur
			Pengadaan perlengkapan gedungkantor	Bumi Makmur			Terpenuhinya pengadaan Perlengkapan gedung kantor/ terlaksananya pengadaan Perlengkapan gedung kantor 0	0	800.000	880.000	
			Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Bumi Makmur			Terpenuhinya Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor / Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor 0	0	6.400.000	7.040.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan				Terpenuhinya Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan / Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan 12 jumlah bulan	12 jumlah bulan	31.555.400	42.630.940	
			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Bumi Makmur			Terpenuhinya Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional / Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional 0	0	5.950.800	6.545.880	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		IKM	1 nilai					Kintap Kantor Kintap
			Penyediaan jasa surat menyurat	Kintap Kantor Kintap			Jumlah Tenaga Administrasi dan Petugas Operator Komputer 2 Orang	2 Orang	51.928.000	-	
			Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Kintap Kantor Kintap			Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3 jenis	3 jenis	11.300.000	-	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional				Jumlah Kendaraan yang dipelihara 6 Unit	6 Unit	2.700.000	-	
			Penyediaan jasa kebersihan kantor	Kintap Kantor Kintap			Jumlah Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih yang di beli 24 Jenis	24 Jenis	52.094.000	-	
			Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Kintap Kantor Kintap			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor 5 Jenis	5 Jenis	4.300.000	-	
			Penyediaan alat tulis kantor	Kintap Kantor Kintap			Terbelinya Alat Tulis Kantor 30 Jenis	30 Jenis	44.553.300	-	
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kintap Kantor Kintap			Terlaksananya Belanja Barang Cetak 13 Jenis	13 Jenis	1.630.000	-	
			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kintap Kantor Kintap			Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 2 Jenis	2 Jenis	2.300.000	-	
			Penyediaan makanan dan minuman	Kintap Kantor Kintap			Terlaksananya Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat, Rapat Koordinasi ,Tamu dan	12 Rapat	37.140.000	-	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Makan Minum Harian Pegawai 12 Rapat				
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Luar Daerah			Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah Dalam dan Luar Provinsi 21 Pegawai	21 Pegawai	85.565.000	-	
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam daerah	Kabupaten			Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Dalam Provinsi 21 Pegawai	21 Pegawai	88.950.000	-	
			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kintap Kantor Kintap			Terlaksananya Penyediaan Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 22 Jenis	22 Jenis	6.772.900	-	
			Penyediaan jasa administrasi keuangan	Kintap Kantor Kintap			Terlaksananya jasa transaksi keuangan 1 Tahun	1 Tahun	1.000.000	-	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kintap Kantor Kintap			Terbayarnya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3 Jenis	3 Jenis	29.000.000	-	
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kintap Kantor Kintap			Jumlah Bulan 14 Bulan	14 Bulan	2.785.342.053	-	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Indek Kepuasan Masyarakat	3 Nilai					Takisung Kantor Takisung
			Penyediaan jasa surat menyurat				Jumlah terbayarnya penyediaan jasa surat menyurat 12	12	25.596.000	-	
			Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Takisung Kantor Takisung			Jumlah terlaksananya jasa peralatan dan peralatan kantor 3	3	8.137.400	-	
			Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Takisung Kantor Takisung			Jumlah terbayarnya penyediaan jasa jaminan barang milik daerah 12 bulan	12 bulan	31.096.000	-	
			Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Takisung Kantor Takisung			Jumlah terbayarnya penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas 12 bulan	12 bulan	28.546.000	-	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penyediaan jasa kebersihan kantor	Takisung Kantor Takisung			Jumlah terbayarnya pembelian peralatan kebersihan dan bahan pembersih bagi gedung kantor 18 Jenis	18 Jenis	29.156.500	-	
			Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Takisung Kantor Takisung			Jumlah terbayarnya jasa perbaikan peralatan kerja 6 Jenis	6 Jenis	10.900.000	-	
			Penyediaan alat tulis kantor	Takisung Kantor Takisung			Jumlah terbayarnya alat tulis kantor 31 Jenis	31 Jenis	18.014.200	-	
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Takisung Kantor Takisung			Jumlah terbayar bahan cetakan, jilid dan penggandaan 5 Jenis	5 Jenis	8.045.000	-	
			Penyediaan bahan logistik kantor	Takisung Kantor Takisung			Jumlah terbayarnya penyediaan bahan logistik kantor 12 bulan	12 bulan	14.850.000	-	
			Penyediaan makanan dan minuman	Takisung Kantor Takisung			Jumlah terbayarnya makanan dan minuman 1.200 Orang	1.200 Orang	57.500.000	-	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Luar Daerah			Terlaksananya rapat rapat, konsultasi dan koordinasi luar daerah 20 SPPD	20 SPPD	100.391.240	-	
			Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Takisung Kantor Takisung			Jumlah terbayarnya peralatan dan perlengkapan kantor 6 Jenis	6 Jenis	19.023.800	-	
			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Takisung Kantor Takisung			Jumlah terbayarnya BBM Genset, komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor 7 Jenis	7 Jenis	10.784.900	-	
			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Takisung Kantor Takisung			Jumlah terbayarnya rekening listrik, rekening telepon dan internet 3 Jenis	3 Jenis	42.900.000	-	
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Takisung Kantor Takisung			Jumlah terbayarnya penyediaan gaji dan tunjangan ASN 12 bulan	12 bulan	2.774.849.338	-	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			IKM	1 nilai				

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Angsau			Jumlah honorarium Petugas Keamanan Yang dibayar 12 bulan	12 bulan	23.280.000	25.608.000	
			Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Angsau			Jumlah Kendaraan Dinas Yang dipelihara dan diurus perizinannya 1 unit	1 unit	2.260.000	2.486.000	
			Penyediaan jasa kebersihan kantor	Angsau			Jumlah peralatan kebersihan dan bahan pembersih, serta petugas kebersihan 12 bulan	12 bulan	59.041.000	64.945.100	
			Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Angsau			jumlah pemeliharaan AC, komputer PC, Laptop, Printer dan AC 4 jenis	4 jenis	4.650.000	5.115.000	
			Penyediaan alat tulis kantor	Angsau			Jumlah pembelian Alat Tulis Kantor 27 jenis	27 jenis	12.356.000	13.591.600	
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Angsau			Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1 tahun	1 tahun	4.675.000	5.142.500	



No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolak Ukur/Indikator	Target	Tolak Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Angsau			Jumlah penyediaan bahan bacaan, buku, majalah dan peraturan perundang-undangan 12 bulan	12 bulan	1.920.000	2.112.000	
			Penyediaan bahan logistik kantor	Angsau			Jumlah bahan bakar minyak/ gas/ dan pelumas 2 jenis	2 jenis	3.240.000	3.564.000	
			Penyediaan makanan dan minuman	Angsau			Jumlah Makanan dan Minuman Pelaksanaan Rapat 1 Tahun	1 Tahun	32.400.000	35.640.000	
			Penyediaan jasa penunjang kinerja SKPD	Angsau			jumlah pembayaran jasa penunjang kinerja kelurahan 3 orang	3 orang	-	-	
			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Angsau			Jumlah Pembelian Alat Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor 4 jenis	4 jenis	830.000	913.000	
			Penyediaan jasa administrasi keuangan	Angsau			Jumlah Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 1 tahun	1 tahun	2.550.000	2.805.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Angsau			Jumlah Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 12 bulan	12 bulan	16.300.000	17.930.000	
			Penyediaan jasa, bahan, peralatan dan perlengkapan perkantoran	Angsau			jumlah pembayaran jasa, bahan, peralatan dan perlengkapan perkantoran 12 bulan	12 bulan	-	-	
			Penyediaan rapat-rapat, konsultasi, dan koordinasi	Angsau			jumlah sppd 1 Tahun	1 Tahun	85.000.000	93.500.000	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		IKM	1 NILAI					Karang Taruna
			Penyediaan jasa surat menyurat	Karang Taruna			Jumlah pembelian materai 12 Bulan	12 Bulan	1.530.000	-	
			Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Karang Taruna			Jumlah jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 3 Unit	3 Unit	12.000.000	-	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penyediaan jasa kebersihan kantor	Karang Taruna			Jumlah Terlaksananya Pembayaran Honorarium Pegawai Tidak Tetap 2 Orang 12 Bulan Jumlah pembelian bahan dan alat pembersih dan bahan kimia 1 Tahun	12 Bulan 1 Tahun	43.201.900	-	
			Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Karang Taruna			Jumlah pemeliharaan komputer,, laptop, printer dan AC 1 Tahun	1 Tahun	6.850.000	-	
			Penyediaan alat tulis kantor	Karang Taruna			Jumlah pembelian alat tulis kantor 1 Tahun	1 Tahun	14.217.300	-	
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Karang Taruna			Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1 Tahun	1 Tahun	3.125.000	-	
			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Karang Taruna			Jumlah majalah 12 Bulan	12 Bulan	1.800.000	-	
			Penyediaan makanan dan minuman	Karang Taruna			Jumlah pelaksanaan rapat 250 Orang	250 Orang	10.000.000	-	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Karang Taruna			Jumlah pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1 Tahun	1 Tahun	80.000.000	-	
			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Karang Taruna			Jumlah pembelian alat listrik dan elektronik 1 Tahun	1 Tahun	543.800	-	
			Penyediaan jasa administrasi keuangan	Karang Taruna			Jumlah Pembayaran Honor PTT Jaga Malam (1 Orang x 12 Bulan) 12 Bulan	12 Bulan	23.460.000	-	
			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Karang Taruna			Jumlah rekening telepon, air, listrik, internet dan tv berlangganan 12 Bulan/Rekening	12 Bulan/Rekening	21.600.000	-	
			Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur		Terpeliharanya Kantor Representatif untuk Bekerja	100 %					Karang Taruna
			Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Karang Taruna				Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 0 Tahun	0 Tahun	3.542.000	-

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pengadaan peralatan gedung kantor	Karang Taruna			Jumlah Pembelian Kendaraan Dinas Roda Dua 1 Unit Jumlah Pembelian Tripod Screen dan Projector 1 Tahun Jumlah Pembelian Printer 4 Unit Jumlah PC/Komputer 3 Unit	1 Unit 1 Tahun 4 Unit 3 Unit	115.717.200	-	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		IKM	0 Nilai					Pabahanan
			Penyediaan jasa surat menyurat	Pabahanan			Jumlah pembelian materai 12 bulan	12 bulan	1.434.000	-	
			Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Pabahanan			Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor 12 bulan	12 bulan	6.717.000	-	
			Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Pabahanan			Jumlah honor PTT jaga malam 10 bulan	10 bulan	19.621.174	-	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Pabahana n			Jumlah pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 12 bulan	12 bulan	300.000	-	
			Penyediaan jasa kebersihan kantor	Pabahana n			Jumlah honor PTT kebersihan kantor 10 bulan	10 bulan	41.767.449	-	
			Penyediaan alat tulis kantor	Pabahana n			Jumlah pembelian ATK 26 jenis	26 jenis	11.749.300	-	
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Pabahana n			Jumlah barang cetakan dan penggandaan 12 bulan	12 bulan	4.200.000	-	
			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Pabahana n			Jumlah majalah 12 bulan	12 bulan	1.800.000	-	
			Penyediaan bahan logistik kantor	Pabahana n			Jumlah penyediaan bahan logistik 12 bulan	12 bulan	9.250.000	-	
			Penyediaan makanan dan minuman	Pabahana n			Jumlah pelaksanaan rapat 4 kali	4 kali	7.920.000	-	
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Pabahana n			Jumlah SPPD 13 SPPD	13 SPPD	78.000.000	-	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD	
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)					
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Penyediaan jasa penunjang kinerja SKPD	Pabahana n			jumlah pembayaran jasa penunjang kerja kelurahan 3 orang	3 orang	-	-		
			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Pabahana n			Jumlah pembelian instalasi listrik untuk penerangan kantor 3 jenis	3 jenis	2.000.000	-		
			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Pabahana n			Jumlah rekening telepon, air, listrik dan internet 12 bulan	12 bulan	13.210.377	-		
			Penyediaan jasa, bahan, peralatan dan perlengkapan perkantoran	Pabahana n			jumlah pembayaran jasa,bahan, peralatan dan perlengkapan perkantoran 12 bulan	12 bulan	-	-		
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			IKM	1 nilai					Pelaihari
			Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Pelaihari				Jumlah penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor 12 bulan	12 bulan	1.726.200	2.000.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Pelaihari			Jumlah pembayaran Petugas Jaga Malam 12 bulan	12 bulan	21.600.000	24.000.000	
			Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Pelaihari			Jumlah jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas roda dua 12 bulan	12 bulan	200.000	250.000	
			Penyediaan jasa kebersihan kantor	Pelaihari			Jumlah peralatan kebersihan dan bahan pembersih 12 bulan	12 bulan	50.137.500	5.100.000	
			Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Pelaihari			Jumlah pemeliharaan komputer, laptop, printer, AC 12 bulan	12 bulan	2.850.000	3.000.000	
			Penyediaan alat tulis kantor	Pelaihari			Jumlah penyediaan Alat Tulis Kantor 12 bulan	12 bulan	15.872.000	-	
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Pelaihari			Jumlah Pembayaran Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 12 bulan	12 bulan	6.540.000	-	



No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penyediaan peralatan dan perlengkapan	Pelaihari			Jumlah peralatan perlengkapan perkantoran 3 jenis	3 jenis	40.000.000	-	
			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Pelaihari			Jumlah rekening surat kabar 12 bulan	12 bulan	1.680.000	-	
			Penyediaan bahan logistik kantor	Pelaihari			Jumlah Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 12 bulan	12 bulan	2.750.000	-	
			Penyediaan makanan dan minuman	Pelaihari			Jumlah pelaksanaan rapat 2 kali	2 kali	4.400.000	-	
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Pelaihari			Jumlah SPPD 12 bulan	12 bulan	75.000.000	75.000.000	
			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Pelaihari			Jumlah Komponen Listrik 12 bulan	12 bulan	4.250.300	-	
			Penyediaan jasa administrasi keuangan	Pelaihari			Jumlah penyediaan jasa administrasi keuangan 12 bulan	12 bulan	2.700.000	-	
			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Pelaihari			Jumlah rekening Air, listrik dan internet 12 bulan	12 bulan	10.081.600	-	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		IKM	0 NILAI					Sarang Halang
			Penyediaan jasa surat menyurat	Sarang Halang			Terlaksananya Pengadaan jasa surat menyurat 12 Bulan	12 Bulan	3.600.000	3.960.000	
			Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Sarang Halang			Terbayarnya Honorium Petugas Keamanan yang di bayar 12 Bulan	12 Bulan	23.580.000	25.938.000	
			Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Sarang Halang			Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas Roda Dua 12 Bulan	12 Bulan	1.710.000	1.881.000	
			Penyediaan jasa kebersihan kantor	Sarang Halang			Terbayarnya honorarium Petugas Kebersihan 12 Bulan Terpenuhinya Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 12 Bulan	12 Bulan 12 Bulan	39.781.000	43.759.100	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Sarang Halang			Terlaksananya Perbaikan Peralatan Kerja yang Diperbaiki / Dipelihara 4 Unit	4 Unit	6.400.000	7.040.000	
			Penyediaan alat tulis kantor	Sarang Halang			Terlaksananya Pembelian Alat Tulis Kantor 15 Jenis	15 Jenis	13.006.200	14.306.820	
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Sarang Halang			Terlaksananya Penyediaan Barang dan Penggandaan 12 Bulan	12 Bulan	11.200.000	12.320.000	
			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Sarang Halang			Terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan berupa surat kabar surat kabar 12 Bulan	12 Bulan	3.360.000	3.696.000	
			Penyediaan bahan logistik kantor	Sarang Halang			Terlaksananya penyediaan logistik kantor Bahan Bakar Minyak Kendaraan dinas operasional 12 Bulan	12 Bulan	2.200.000	2.420.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penyediaan makanan dan minuman	Sarang Halang			Terlaksananya penyediaan makan dan minum untuk Rapat dan eksternal serta makan minim tamu 12 Bulan	12 Bulan	21.610.800	23.771.880	
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Sarang Halang			Terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah dan luar provinsi 12 Bulan	12 Bulan	85.000.000	93.500.000	
			Penyediaan jasa penunjang kinerja SKPD	Sarang Halang			0	0	-	-	
			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Sarang Halang			Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor 4 Jenis	4 Jenis	3.042.000	3.346.200	
			Penyediaan jasa administrasi keuangan	Sarang Halang			Terbayarnya premi asuransi pegawai tidak tetap/ PTT 12 Bulan	12 Bulan	23.830.000	26.213.000	
			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Sarang Halang			Jumlah Pembayaran Rekening Air, Listrik, dan Internet 12 Bulan	12 Bulan	22.400.000	24.640.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD	
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)					
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Penyediaan jasa, bahan, peralatan dan perlengkapan perkantoran	Sarang Halang					-	-		
			Pendidikan									
	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun		Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	88,52 %					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
			Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah	SKPD			Jumlah sekolah 1 sekolah	1 sekolah	243.863.000	243.863.000		
			Pembinaan, pengembangan kurikulum dan penilaian pendidikan dasar	SKPD			jumlah peserta 466 siswa	466 siswa	770.882.168	120.000.000		
			Penyelenggaraan ujian nasional pendidikan dasar	SKPD			jumlah siswa 5.000 siswa	5.000 siswa	1.779.470.676	4.400.000.000		
			Pembinaan peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan dasar	SKPD			jumlah lomba 5 lomba	5 lomba	697.762.000	930.000.000		
			Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah	SKPD			jumlah sekolah 7 sekolah	7 sekolah	1.503.561.000	1.503.561.000		
			Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	SKPD			jumlah sekolah 10 sekolah	10 sekolah	4.199.844.000	4.199.844.000		

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	SKPD			jumlah sekolah 237 sekolah	237 sekolah	31.657.013.201	3.962.905.000	
			Penambahan Ruang Kelas Baru (SD)	SKPD			Jumlah sekolah 6 sekolah	6 sekolah	2.723.699.000	2.723.699.000	
			Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU (SD)	SKPD			Jumlah sekolah 8 sekolah	8 sekolah	2.280.416.000	2.280.416.000	
			Pembangunan Perpustakaan Sekolah (SD)	SKPD			Jumlah sekolah 1 sekolah	1 sekolah	240.967.000	240.967.000	
			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (SD)	SKPD			jumlah sekolah 26 sekolah	26 sekolah	5.202.645.000	5.202.645.000	
			Pengadaan Mebeluer Sekolah (SD)	SKPD			Jumlah Meja Kursi 2.000 set	2.000 set	3.025.813.000	3.025.813.000	
			Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	SKPD			jumlah peserta 242 siswa	242 siswa	312.235.676	312.235.676	
			Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi	SKPD			Jumlah guru 1.878 guru Jumlah guru 1.878 guru	1.878 guru 1.878 guru	8.064.343.200	8.064.343.200	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Satuan Pendidikan Sekolah Dasr								
			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah (SD)	SKPD			jumlah kegiatan 1 Kegiatan	1 Kegiatan	350.000.000	350.000.000	
			Pembangunan Laboratorium (SMP)	SKPD			Jumlah sekolah 1 sekolah	1 sekolah	470.566.000	480.000.000	
			Pembangunan Perpustakaan Sekolah (SMP)	SKPD			Jumlah sekolah 1 sekolah	1 sekolah	268.186.000	270.000.000	
			Pembangunan Sarana, Prasana dan Utilitas Sekolah (SMP)	SKPD			Jumlah sekolah 7 sekolah	7 sekolah	1.351.757.000	1.400.000.000	
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	SKPD			Jumlah sekolah 4 sekolah	4 sekolah	770.813.000	770.813.000	
			Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium (SMP)	SKPD			jumlah sekolah 3 sekolah	3 sekolah	687.353.000	687.353.000	
			Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah (SMP)	SKPD			jumlah sekolah 4 sekolah	4 sekolah	808.313.000	808.313.000	
			Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	SKPD			Jumlah sekolah 3 sekolah	3 sekolah	539.513.000	539.513.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pengadaan Mebeluer Sekolah (SMP)	SKPD			jumlah meja kursi 2.000 set	2.000 set	3.022.073.000	3.022.073.000	
			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	SKPD			jumlah sekolah 49 sekolah	49 sekolah	11.211.185.000	2.547.185.000	
			Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	SKPD			jumlah peserta 392 Peserta	392 Peserta	486.859.876	486.859.876	
			Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	SKPD			Jumlah guru 264 guru	264 guru	2.219.408.000	2.219.408.000	
			Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	SKPD			jumlah PTK 107 PTK	107 PTK	385.000.000	385.000.000	
			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah (SMP)	SKPD			jumlah kegiatan 1 kegiatan	1 kegiatan	300.000.000	300.000.000	
			Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik (SMP)	SKPD			Jumlah siswa 5.000 siswa	5.000 siswa	503.732.868	503.732.868	



No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU (SMP)	SKPD			Jumlah sekolah 3 sekolah	3 sekolah	1.070.317.000	1.200.000.000	
			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa (SMP)	SKPD			jumlah lomba 5 lomba	5 lomba	635.355.000	635.355.000	
			Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	SKPD			Jumlah guru 182 orang	182 orang	936.775.000	936.775.000	
			Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal		Angka Partisipasi Kasar (APK)	35 %					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Pembinaan, Pengembangan kurikulum dan penilaian PAUD dan PNF	SKPD			jumlah PTK 232 PTK	232 PTK	439.691.000	250.000.000	
			Penyediaan biaya operasional pendidikan daerah BOP kesetaraan	SKPD			Jumlah PKBM 11 PKBM JUmlah sekolah 1 SPNF	11 PKBM 1 SPNF	60.000.000	70.000.000	
			Penyelenggaraan Ujian Nasional Kesetaraan Paket A, Paket B, Paket C	SKPD			jumlah pokjar 120 pokjar	120 pokjar	3.250.000.000	1.000.000.000	
			Pembinaan Kelembagaan dan pengembangan sarana prasarana PAUD dan PNF	SKPD			jumlah sekolah 1 TKN jumlah sekolah 16 TKS	1 TKN 16 TKS	3.875.000.000	3.800.000.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penyediaan biaya operasional Pendidikan daerah BOP PAUD	SKPD			jumlah sekolah 327 TK	327 TK	60.000.000	70.000.000	
			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	SKPD			jumlah sekolah 7 TKN jumlah sekolah 8 TKS	7 TKN 8 TKS	2.210.164.000	2.210.164.000	
			Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	SKPD			jumlah sekolah 1 TKN jumlah sekolah 8 TKS	1 TKN 8 TKS	903.744.000	903.744.000	
			Pengadaan Mebeluer PAUD	SKPD			Jumlah sekolah 3 TK	3 TK	50.000.000	50.000.000	
			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	SKPD			jumlah sekolah 2 TK	2 TK	62.500.000	62.500.000	
			Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	SKPD			Jumlah anak 500 anak Jumlah desa 11 desa	500 anak 11 desa	845.464.000	845.464.000	
			Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	SKPD			jumlah PTK 106 ptk	106 ptk	80.021.000	80.021.000	
			Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan PAUD	SKPD			jumlah guru 863 guru	863 guru	6.770.853.600	6.770.853.600	
			Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada	SKPD			jumlah peserta 390 orang	390 orang	502.169.800	502.169.800	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Satuan Pendidikan PAUD								
			Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	SKPD			jumlah sekolah 1 SPNF	1 SPNF	225.000.000	225.000.000	
			Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	SKPD			Jumlah sekolah 1 SPNF	1 SPNF	140.000.000	140.000.000	
			Pengadaan Alat Praktik dan Praga Siswa Nonformal/Kesetaraan	SKPD			Jumlah sekolah 1 SPNF	1 SPNF	208.000.000	208.000.000	
			Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	SKPD			Jumlah sekolah 10 TKN	10 TKN	225.000.000	225.000.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Program Peningkatan Mutu Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Tenaga Kebudayaan		Pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualifikasi pendidikan minimal S1/lebih SMP; Pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualifikasi pendidikan minimal S1/lebih SD; Pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualifikasi pendidikan minimal S1/lebih PAUD	83 %; 77,58 %; 60 %					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Pembinaan peningkatan mutu tenaga kebudayaan	SKPD			Jumlah peserta 140 orang	140 orang	200.000.000	210.000.000	
			Pembinaan peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan dasar	SKPD			jumlah dokumen 3.401 dokumen	3.401 dokumen	151.225.000	1.600.000.000	
			Kesehatan								

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata		Persentase pemenuhan kebutuhan operasional fasilitas pelayanan kesehatan	100 %					Dinas Kesehatan RSUD H. Boejasin Pelaihari
			Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit	Kabupaten , Pelaihari, Angsau			jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan 1 jenis	1 jenis	879.704.003	-	
			Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata		Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit	100 %					Dinas Kesehatan RSUD H. Boejasin Pelaihari
			Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kabupaten , Pelaihari			Jumlah pemeliharaan rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 161 jenis	161 jenis	320.000.000	-	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan		Persentase pemenuhan kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	100 %					Dinas Kesehatan RSUD H. Boejasin Pelaihari
			Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat	Kabupaten , Pelaihari, Angsau			jumlah dokumen indeks kepuasan pelanggan rumah sakit 1 dokumen	1 dokumen	90.124.000	-	
			Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD		Persentase pemenuhan kebutuhan mutu pelayanan kesehatan	100 %					Dinas Kesehatan RSUD H. Boejasin Pelaihari
			Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Kabupaten , Pelaihari, Angsau			jumlah kesembuhan pasien rawat inap 14.367 orang	14.367 orang	50.594.192.059	-	
			Program Pembinaan, Pemberdayaan dan Promosi Kesehatan Keluarga, Masyarakat dan Lingkungan		Persentase penurunan AKI	0 %					Dinas Kesehatan RSUD H. Boejasin Pelaihari
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kabupaten , Pelaihari			jumlah pengawasan kualitas lingkungan rumah sakit 12 dokumen	12 dokumen	88.000.000	-	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Program Pembinaan dan Pelayanan Kesehatan Primer, Pelayanan Kesehatan Rujukan, Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan		Persentase Peserta JKN	0 %					Dinas Kesehatan RSUD H. Boejasin Pelaihari
			Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan	Kabupaten , Pelaihari, Angsau			Jumlah evaluasi pelayanan kesehatan 48 kali	48 kali	176.002.750	-	
			Pembinaan, Pelayanan Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan	Kabupaten , Pelaihari, Angsau			Jumlah pelayanan gratis pasien kelas III (Jamkesda) 9.120 jiwa	9.120 jiwa	10.000.000.000	-	
			Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Kesehatan (Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Manusia Kesehatan)		Persentase kepuasan pelanggan pada Rumah Sakit	0 %					Dinas Kesehatan RSUD H. Boejasin Pelaihari

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Kabupaten , Pelaihari, Angsau			Jumlah pembuatan dokumen audit keperawatan, mutu dan keselamatan pasien di rawat inap dan rawat jalan 2 dokumen	2 dokumen	160.000.000	-	
			Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Kabupaten , Pelaihari, Angsau			Jumlah pelatihan/ bimtek bagi karyawan 87 orang	87 orang	200.000.000	-	
			Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Kabupaten , Pelaihari			Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar 327 orang	327 orang	6.069.571.845	-	
			Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kabupaten , Pelaihari			jumlah Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan 1 jenis	1 jenis	687.071.480	-	
			Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kabupaten , Pelaihari			jumlah Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan 1 jenis	1 jenis	117.320.000	-	



No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Program Informasi Kesehatan Medik		Persentase peningkatan kepuasan pelanggan pada rumah sakit	0 %					Dinas Kesehatan RSUD H. Boejasin Pelaihari
			Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi Rekam Medik	Kabupaten , Pelaihari, Angsau			Jumlah dokumen informasi rumah sakit 1 dokumen	1 dokumen	307.028.000	-	
			Program Pembinaan, Pemberdayaan dan Promosi Kesehatan Keluarga, Masyarakat dan Lingkungan		AKI	0 1100.000 Kelahiran Hidup					Dinas Kesehatan
			Pembinaan, Pengembangan dan Pemberdayaan Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat	SKPD			Jumlah Pembinaan kader pendamping keluarga sadar gizi dan kinerja bidan desa 19 kader Jumlah peta informasi masyarakat kurang gizi 19 Puskesmas Jumlah Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 6.650 bumil Jumlah Pelayanan	19 kader 19 Puskesmas 6.650 bumil 0	124.200.000	-	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Kesehatan Balita 0				

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pembinaan, Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	SKPD			Jumlah penyediaan media Promosi Kesehatan 0 macam Jumlah Rumah Tangga berPHBS 0 Rumah Tangga Jumlah pembinaan kemitraan dan Koordinasi dengan UKBM 0 kali Jumlah Pembinaan Kegiatan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 0 Puskesmas Jumlah saka bhakti husada yang dibina 5 pangkalan Jumlah posyandu yang dibina 19	0 macam 0 Rumah Tangga 0 kali 0 Puskesmas 5 pangkalan 19	97.956.000	-	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pembinaan dan Pemberdayaan Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga	SKPD			Jumlah dokumen kerjasama pengelolaan limbah medis 1 dokumen Jumlah pembinaan kesehatan lingkungan, TTU 19 Puskesmas Menyelenggarakan kabupaten kota sehat 1 SK Jumlah desa STBM 122 desa	1 dokumen 19 Puskesmas 1 SK 122 desa	47.280.000	-	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Kabupaten , SKPD			Jumlah Ibu bersalin yang dilayani sesuai standar 6.650 bulin Jumlah pembinaan kinerja bidan desa 19 puskesmas	6.650 bulin 19 puskesmas	37.350.176	-	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Kabupaten , SKPD			Jumlah pertemuan peningkatan kapasitas bidan dalam penanganan risiko ibu dan bayi 1 kali Jumlah bayi baru lahir yang dilayani sesuai	1 kali 6.254 bayi	73.904.000	-	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							standar 6.254 bayi				
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Kabupaten , SKPD			Jumlah balita yang dilayani sesuai standar 27.000 balita Jumlah balita gizi buruk/kurang yang mendapat PMT 100 balita	27.000 balita 100 balita	93.296.000	-	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kabupaten , SKPD			Jumlah ibu hamil KEK yang mendapat PMT 1.450	1.450	92.418.175	-	
			Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Kabupaten , SKPD			Jumlah jenis penyediaan media promosi kesehatan 8 media	8 media	537.548.000	-	
			Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Kabupaten , SKPD			Jumlah desa yang melaksanakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat 78 desa	78 desa	51.760.000	-	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Kabupaten , SKPD			Jumlah anak Usia Pendidikan dasar yang mendapat pelayanan (UKS) sesuai standar 146.136	146.136	57.980.000	-	
			Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Kabupaten , SKPD			Jumlah puskesmas yang aktif melaporkan kegiatan promosi kesehatan 19 puskesmas	19 puskesmas	15.444.000	-	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kabupaten , SKPD			Jumlah desa yang melaksanakan STBM 125 desa Jumlah TTU yang memenuhi persyaratan kesehatan 200 TTU	125 desa 200 TTU	256.620.000	-	
			Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Kabupaten , SKPD			Jumlah penyelenggaraa n kabupaten/kota sehat 1 SK	1 SK	38.456.000	-	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain jasa boga, rumah makan/restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Kabupaten , SKPD			Jumlah Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) 100 sertifikat	100 sertifikat	24.840.000	-	
			Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Kabupaten			Jumlah Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan 50 stiker	50 stiker	9.040.000	-	
			Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Kabupaten , SKPD			Jumlah Pemeriksaan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga 100 kali	100 kali	7.496.000	-	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Kabupaten , SKPD			Jumlah industri rumah tangga yang mempunyai sertifikat PIRT 1.000 IRT	1.000 IRT	8.520.000	-	
			Program Pembinaan dan Pelayanan Kesehatan Primer, Pelayanan Kesehatan Rujukan, Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan		Persentase Puskesmas yang terakreditasi Utama	0 %					Dinas Kesehatan



No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolak Ukur/Indikator	Target	Tolak Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pembinaan, Pelayanan Kesehatan Primer dan Kesehatan Tradisional	SKPD			Jumlah Pelayanan Kesehatan Tanggap Bencana Bagi Masyarakat 0 kali Jumlah Pembinaan program Pelayanan Kesehatan Primer dan Kesehatan Tradisional 0 Puskesmas Jumlah lokasi pelayanan kesehatan tanggap bencana bagi masyarakat 10 lokasi Jumlah keluarga mendapat pelayanan kesehatan melalui pendekatan keluarga 0 keluarga Jumlah Kelompok Asuhan Masyarakat Taman Obat Keluarga (AKMAN TOGA) di Desa 55 kelompok Jumlah keluarga yang di data dalam pendataan	0 kali 0 Puskesmas 10 lokasi 0 keluarga 55 kelompok 77.775 KK 31.555 KK	-	-	V - 193

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pembinaan, Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Standarisasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan	SKPD			Jumlah fasilitas Kesehatan yang reakreditasi 6 buah Jumlah Pembinaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Rujukan dan standarisasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan 48 Puskesmas Jumlah Pengawasan Rumah Sakit dan Rujukan 5 buah	6 buah 48 Puskesmas 5 buah	317.599.200	-	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pembinaan, Pelayanan Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan	SKPD			Jumlah Pembinaan Kegiatan Pelayanan Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan 0 Puskesmas Jumlah kepesertaan JKN 0 orang Jumlah pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin 0 orang Jumlah Keluarga Miskin yang menjadi Peserta JKN 349.826 Jiwa Jumlah Puskesmas yang aktif dalam pencatatan dan pelaporan pada Aplikasi P-Care 19 Puskesmas Jumlah Rumah Sakit yang bekerjasama dalam Jaminan Kesehatan Daerah /Pelayanan Kesehtan Gratis 6 Rumah Sakit	0 Puskesmas 0 orang 0 orang 349.826 Jiwa 19 Puskesmas 6 Rumah Sakit	38.883.072.255	56.005.501.312	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Peningkatan Kapasitas Pelayanan Krisis Kesehatan dan SPGDT PCS 199	SKPD			Jumlah Penanganan Krisis Kesehatan dan Public Service Center (PSC) 119 (termasuk pelayanan on call) 100 kasus	100 kasus	418.000.000	600.000.000	
			Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Kabupaten , SKPD			Jumlah pembinaan dan pengawasan pelayanan kesehatan rujukan 5 rumah sakit	5 rumah sakit	54.172.000	-	
			Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten , SKPD			Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang mempunyai izin operasional 44 fasyankes	44 fasyankes	25.000.000	-	
			Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Kabupaten , SKPD			Jumlah izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal, usaha mikro obat tradisional (UMOT) 34 fasilitas	34 fasilitas	20.936.000	-	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	SKPD			Jumlah lokasi pelayanan kesehatan tanggap bencana bagi masyarakat 10 lokasi	10 lokasi	28.088.000	50.000.000	
			Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Kabupaten , SKPD			Jumlah keluarga yang di data dalam pendataan Keluarga Sehat. 77.775 KK Jumlah Keluarga yang bermasalah kesehatan mendapat intervensi pelayanan Kesehatan 31.555 KK	77.775 KK 31.555 KK	138.596.000	200.000.000	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri da Tradisional Lainnya	Kabupaten , SKPD			Jumlah kelompok asuhan mandiri taman obat keluarga (ASMAN TOGA) di desa 55 kelompok	55 kelompok	55.776.691	-	
			Program Pencegahan, Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit		Cakupan Desa UCI	0 %					Dinas Kesehatan

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Peningkatan Imunisasi, Surveillance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah	Kabupaten			Jumlah pembinaan kegiatan peningkatan imunisasi, surveillance epidemiologi dan penaggulangan wabah 0 Puskesmas Jumlah desa UCI 0 Desa Jumlah desa KLB yang ditanggulangi 120 Kali Jumlah desa KLB yang di PE 0 Kali Jumlah kematian di masyarakat didata 0 Kematian Jumlah jemaah haji yang memenuhi syarat kesehatan JH 300 JH Jumlah bimbingan teknis surveilans 6 kali Jumlah Puskesmas yang	0 Puskesmas 0 Desa 120 Kali 0 Kali 0 Kematian 300 JH 6 kali 19 puskesmas 90 orang	80.000.000	-	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							aktif melaporkan kegiatan surveilans 19 puskesmas Jumlah review surveilans penyakit menular 90 orang				

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pencegahan, Penanggulangan dan Pengendalian Penyakit Menular	SKPD			Jumlah pembinaan kegiatan pencegahan, penanggulangan dan pengendalian penyakit menular 0 kasus Jumlah penemuan penderita penyakit menular langsung (TBC) 0 kasus Jumlah foging fokus 0 fokus Jumlah desa yang bebas KLB 0 desa Jumlah Pelayanan Kesehatan orang dengan Risiko terinfeksi HIV 0 kasus Jumlah orang terduga TBC yang di periksa dan dilayani sesuai standar 4.898	0 kasus 0 kasus 0 fokus 0 desa 0 kasus 4.898	53.760.000	-	



No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular	Kabupaten , SKPD			Jumlah pelayanan pada usia produktif 228.908 orang Jumlah pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa 0 orang JUmlah pelayanan kesehatan orang dengan ketergantungan nafza 0 orang Jumlah deteksi dini RF PTM ( HT, DM, IVA, Sadanis ) 0 orang Jumlah pembinaan kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular 0 Puskesmas Jumlah pelayanan orang dengan penyakit hipertensi 0 orang Jumlah pelayanan pada usila 0 orang	228.908 orang 0 orang 0 orang 0 Puskesmas 0 orang 0 orang 0 orang	450.144.000	550.000.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah pelayanan orang dengan penyakit DM 0 orang				
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Kabupaten , SKPD			Jumlah Lansia yang dilayani sesuai standar 28.614 orang	28.614 orang	88.000.000	-	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Kabupaten , SKPD			Jumlah penderita hipertensi yang mendapat pelayanan sesuai standar 39.401 orang	39.401 orang	121.098.400	-	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Kabupaten , SKPD			Jumlah penderita diabetes yang mendapat pelayanan sesuai standar 17.769 orang	17.769 orang	56.360.000	-	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Kabupaten , SKPD			Jumlah Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat yang mendapat pelayanan sesuai standar 500 orang	500 orang	31.824.000	-	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Kabupaten , SKPD			Jumlah Orang dengan Gangguan Jiwa dan Napza yang mendapat pelayanan sesuai standar 2.284	2.284	72.900.000	-	
			Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kabupaten , SKPD			Jumlah Penderita Penyakit menular langsung, Penyakit Tular vektor dan zoonosis yang dilayani sesuai standar 265	265	40.440.800	-	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV	Kabupaten , SKPD			Jumlah orang yang berisiko terkena HIV dan IMS 6.618	6.618	28.395.200	-	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Kabupaten , SKPD			Jumlah Fosing Fokus 80 fokus Jumlah Desa yang bebas KLB penyakit menular 120 desa	80 fokus 120 desa	136.164.800	-	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional	Kabupaten , SKPD			Jumlah pengambilan spesimen 30 spesimen Jumlah pertemuan teknis pengambilan spesimen 19 orang Jumlah kasus/KLB/wabah 100 kasus Jumlah pengiriman spesimen 30 orang	30 spesimen 19 orang 100 kasus 30 orang	13.720.000	-	
			Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Kabupaten , SKPD			Jumlah pemeliharaan cold chain 19 unit Jumlah bimbingan teknis imunisasi 6 kali Jumlah monev imunisasi 60 orang Jumlah penanggulangan KIP 5 KIP Jumlah pemantau BIAS 98 SD	19 unit 6 kali 60 orang 5 KIP 98 SD	218.280.000	-	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Kabupaten			Jumlah monev SKDR 30 orang Jumlah PE 30 kali Jumlah bimbingan SKDR 3 kali Jumlah penanggulangan kasus/KLB 30 kali	30 orang 30 kali 3 kali 30 kali	24.000.000	-	
			Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Kesehatan (Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Manusia Kesehatan)		Indeks Kepuasan Masyarakat	0 indeks					Dinas Kesehatan

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Kegiatan Pembinaan, Pengembangan Kefarmasian dan Alat Kesehatan	SKPD			Jumlah jenis obat dan perbekalan 5 jenis Jumlah jenis penyediaan alat kesehatan UPT 5 Jenis Jumlah Jenis Pengadaan Alat Kesehatan sesuai standar 5 jenis Jumlah jenis alat yang dipelihara atau dikalibrasi 21 jenis Jumlah Puskesmas dengan alat yang sesuai standar 19 puskesmas	5 jenis 5 Jenis 5 jenis 21 jenis 19 puskesmas	540.000.000	4.115.744.776	
			Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Kabupaten , SKPD			Jumlah jenis alat kesehatan yang dikalibrasi 5 jenis	5 jenis	76.000.000	-	
			Pengadaan Obat, Vaksin	Kabupaten , SKPD			Jumlah dan jenis obat obatan dan Vaksin 154 jenis	154 jenis	1.650.520.000	-	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pengadaan Bahan Habis Pakai	Kabupaten , SKPD			Jumlah dan jenis Bahan Medis Habis Pakai( BMHP) 50 jenis	50 jenis	1.129.650.160	-	
			Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kabupaten , SKPD			Jumlah jenis alat kesehatan yang dilakukan pemeliharaan 4 jenis	4 jenis	72.800.000	-	
			Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Kabupaten , SKPD			Jumlah Pengawasan Produksi Alkes kelas 1 tertentu dan PKRT kelas 1 tertentu 11 kecamatan	11 kecamatan	20.000.000	-	
			Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Kabupaten , SKPD			Jumlah SDM Kesehatan yang memiliki SIP yang dibina 150 orang Jumlah Puskesmas yang Dibina 19 puskesmas	150 orang 19 puskesmas	25.624.000	-	
			Pelatihan dan Uji Kompetensi Tenaga Kesehatan	Kabupaten , SKPD			Jumlah SDM Kesehatan memenuhi kompetensi yang dibina 150 orang	150 orang	18.381.697	-	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Kabupaten , SKPD			Jumlah SDM Kesehatan yang telah mengikuti diklat yang dibina 150 orang	150 orang	13.560.000	-	
			Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Kabupaten , SKPD			Jumlah Puskesmas yang sudah terdistribusi SDM Kesehatan 19 puskesmas	19 puskesmas	10.400.000	-	
			Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Kabupaten , SKPD			Jumlah pemenuhan Kebutuhan SDMK sesuai standar (belanja honorarium/gaji h pegawai tidak tetap) 306 orang	306 orang	8.628.696.630	-	
			Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Kabupaten , SKPD			Jumlah Rumpun Tenaga Kesehatan yang mengikuti Uji Kompetensi dan Mengikuti seleksi Tenaga Kesehatan Teladan 9 orang	9 orang	152.000.000	-	
			Sertifikasi Tenaga Kesehatan	Kabupaten , SKPD			Jumlah Tenaga Kesehatan yang mengikuti Diklat bersertifikat 50 ok	50 ok	45.864.360	-	



No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pengelolaan Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	SKPD			Jumlah Puskesmas yang mengelola dan mengupdate data pada Aplikasi SI-SDMK dan Aplikasi Renbut SDMK yang dibina 19 puskesmas	19 puskesmas	5.912.000	-	
			Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	SKPD			Jumlah Pembangunan Fasilitas Kesehatan 4 buah	4 buah	1.765.707.000	-	
			Pengembangan Puskesmas	SKPD			Jumlah Pengembangan Puskesmas (Aula Puskesmas/ Gudang Obat) 3 buah	3 buah	1.397.050.000	-	
			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	SKPD			Jumlah Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan (Poskesdes/Polindes/Pustu) 7 buah	7 buah	1.585.006.250	-	
			Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	SKPD			Jumlah Jenis Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan 11 jenis	11 jenis	885.165.310	-	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	SKPD			Jumlah belanja Hibah 1 badan Jumlah Jenis Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan 6 Jenis	1 badan 6 Jenis	1.539.135.200	-	
			Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD		Persentase pemenuhan kebutuhan mutu pelayanan kesehatan	100 %					Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Panyipatan
			Peningkatan mutu pelayanan dan pendukung pelayanan	Panyipatan Kantor Panyipatan			jumlah penyediaan dukungan operasional puskesmas 12 bulan Jumlah Peserta JKN 8.018 orang	12 bulan 8.018 orang	615.104.720	-	
			Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD		Persentase pemenuhan kebutuhan mutu pelayanan kesehatan	100 %					Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Batakan
			Peningkatan mutu pelayanan dan pendukung pelayanan	Panyipatan Kantor Panyipatan			jumlah peserta JKN 7.871 orang	7.871 orang	630.368.197	-	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Program Pembinaan dan Pelayanan Kesehatan Primer, Pelayanan Kesehatan Rujukan, Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan		Persentase Peserta JKN	0 Persen					Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Batakan
			Pembinaan, Pelayanan Kesehatan Primer dan Kesehatan Tradisional	Panyipatan Kantor Panyipatan			Jumlah pelayanan upaya kesehatan masyarakat 0 kali	0 kali	88.668.555	-	
			Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD		Persentase pemenuhan kebutuhan mutu pelayanan kesehatan	100 %					Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Takisung
			Peningkatan mutu pelayanan dan pendukung pelayanan	SKPD, Takisung Kantor Takisung			Jumlah penyediaan dukungan operasional Puskesmas 12 bulan Jumlah Pelayanan Kesehatan Dasar (Peserta JKN) 8.243 peserta	12 bulan 8.243 peserta	829.723.453	-	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Program Pembinaan dan Pelayanan Kesehatan Primer, Pelayanan Kesehatan Rujukan, Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan		Persentase peserta JKN	0 %					Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Takisung
			Pembinaan, Pelayanan Kesehatan Primer dan Kesehatan Tradisional	Takisung Kantor Takisung			Jumlah pelayanan upaya kesehatan masyarakat 2.423 ok	2.423 ok	65.950.000	-	
			Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD		Persentase pemenuhan kebutuhan mutu pelayanan kesehatan	100 %					Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Kurau
			Peningkatan mutu pelayanan dan pendukung pelayanan	SKPD, Kurau Kantor Kurau			Jumlah kesembuhan pasien rawat inap 100 persen	100 persen	653.039.860	-	
			Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD		Persentase pemenuhan kebutuhan mutu pelayanan kesehatan	100 %					Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Padang Luas

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Peningkatan mutu pelayanan dan pendukung pelayanan	Kurau Kantor Kurau			jumlah peserta JKN yang dilayani 6.658 peserta jumlah penyediaan dukungan operasional puskesmas 12 bulan	6.658 peserta 12 bulan	463.631.270	533.175.961	
			Program Pembinaan dan Pelayanan Kesehatan Primer, Pelayanan Kesehatan Rujukan, Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan		Jumlah peserta JKN	100 persen					Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Padang Luas
			Pembinaan, Pelayanan Kesehatan Primer dan Kesehatan Tradisional	Kurau Kantor Kurau			jumlah pelayanan upaya kesehatan masyarakat 800 ok	800 ok	51.466.070	-	
			Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD		Persentase pemenuhan kebutuhan mutu pelayanan kesehatan	100 %					Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Bati-Bati
			Peningkatan mutu pelayanan dan pendukung pelayanan	Bati-Bati Kantor Bati-Bati			Peningkatan mutu pelayanan dan pendukung pelayanan 1 tahun	1 tahun	1.638.537.500	-	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Program Pembinaan dan Pelayanan Kesehatan Primer, Pelayanan Kesehatan Rujukan, Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan		Persentase Peserta JKN	0 %					Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Bati-Bati
			Pembinaan, Pelayanan Kesehatan Primer dan Kesehatan Tradisional	Bati-Bati Kantor Bati-Bati			Jumlah Pelayanan Upaya Kesehatan Masyarakat 6.050 ok	6.050 ok	150.357.500	-	
			Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD		Persentase pemenuhan kebutuhan mutu pelayanan kesehatan	100 %					Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Kait-Kait
			Peningkatan mutu pelayanan dan pendukung pelayanan	Bati-Bati Kantor Bati-Bati			Jumlah Penyediaan Dukungan Oprasional Puskesmas 12 bulan	12 bulan	326.864.361	-	
			Program Pembinaan dan Pelayanan Kesehatan Primer, Pelayanan Kesehatan Rujukan, Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan		Persentase peserta JKN; Persentase Keluarga Sehat	0 persen; 0 persen					Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Kait-Kait

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pembinaan, Pelayanan Kesehatan Primer dan Kesehatan Tradisional	Bati-Bati Kantor Bati-Bati			Jumlah Pelayanan Upaya Kesehatan Masyarakat 6 Kegiatan	6 Kegiatan	51.983.362	-	
			Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD		Persentase pemenuhan kebutuhan mutu pelayanan kesehatan	100 %					Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Tambang Ulang
			Peningkatan mutu pelayanan dan pendukung pelayanan				Jumlah penyediaan dukungan operasional puskesmas 12 bulan Jumlah peserta JKN yang dilayani 12.557 orang	12 bulan 12.557 orang	903.696.960	-	
			Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD		Persentase pemenuhan kebutuhan mutu pelayanan kesehatan	100 %					Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Pelaihari
			Peningkatan mutu pelayanan dan pendukung pelayanan	Pelaihari			Jumlah peserta JKN yang dilayani 23.577 orang Jumlah penyediaan dukungan operasional Puskesmas 12 Bulan	23.577 orang 12 Bulan	1.631.141.868	-	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD		Persentase pemenuhan kebutuhan mutu pelayanan kesehatan	100 %					Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Sungai Riam
			Peningkatan mutu pelayanan dan pendukung pelayanan	Pelaihari			Jumlah penyediaan dukungan operasional Puskesmas 12 Bulan Jumlah peserta JKN yang dilayani 2.134 orang	12 Bulan 2.134 orang	336.461.624	-	
			Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD		Persentase pemenuhan kebutuhan mutu pelayanan kesehatan	100 %					Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Tirta Jaya
			Peningkatan mutu pelayanan dan pendukung pelayanan	Bajuin Kantor Bajuin			Jumlah penyediaan dukungan operasional Puskesmas 12 bulan	12 bulan	443.961.500	-	
			Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD		Persentase pemenuhan kebutuhan mutu pelayanan kesehatan	100 %					Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Tanjung Habulu
			Peningkatan mutu pelayanan dan pendukung pelayanan	Bajuin Kantor Bajuin			Jumlah penyediaan dukungan operasional puskesmas 12 bulan	12 bulan	276.271.354	-	



No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Program Pembinaan dan Pelayanan Kesehatan Primer, Pelayanan Kesehatan Rujukan, Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan		Persentase Keluarga Sehat; Persentase Peserta JKN	0 persen; 0 persen					Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Tanjung Habulu
			Pembinaan, Pelayanan Kesehatan Primer dan Kesehatan Tradisional	Bajuin Kantor Bajuin			Jumlah pelayanan Upaya Kesehatan Masyarakat 1.875 ok	1.875 ok	119.547.072	-	
			Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD		Persentase pemenuhan kebutuhan mutu pelayanan kesehatan	100 %					Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Tajau Pecah
			Peningkatan mutu pelayanan dan pendukung pelayanan	Batu Ampar Kantor Batu Ampar			Jumlah peserta JKN yang dilayani 13.692 orang Jumlah penyediaan dukungan operasional Puskesmas 12 bulan	13.692 orang 12 bulan	595.023.675	-	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Program Pembinaan dan Pelayanan Kesehatan Primer, Pelayanan Kesehatan Rujukan, Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan		Persentase pelayanan kesehatan primer,pelayanan kesehatan rujukan, pembiayaan dan jaminan kesehatan	0 %					Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Tajau Pecah
			Pembinaan, Pelayanan Kesehatan Primer dan Kesehatan Tradisional	Batu Ampar Kantor Batu Ampar			Jumlah pelayanan upaya kesehatan masyarakat 3.960 kali	3.960 kali	328.343.547	424.463.000	
			Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD		Persentase pemenuhan kebutuhan mutu pelayanan kesehatan	100 %					Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Jorong
			Peningkatan mutu pelayanan dan pendukung pelayanan	Jorong Kantor Jorong			Jumlah peserta JKN yang dilayani 6.200 orang jumlah penyediaan dukungan operasional puskesmas 12 bulan	6.200 orang 12 bulan	420.516.665	-	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Program Pembinaan dan Pelayanan Kesehatan Primer, Pelayanan Kesehatan Rujukan, Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan		Persentase Peserta JKN	0 %					Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Jorong
			Pembinaan, Pelayanan Kesehatan Primer dan Kesehatan Tradisional	Jorong Kantor Jorong			Jumlah pelayanan upaya kesehatan masyarakat 0 kali Jumlah pelayanan 6.200 orang	0 kali 6.200 orang	231.521.815	-	
			Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD		Persentase pemenuhan kebutuhan mutu pelayanan kesehatan	100 %					Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Asam Asam
			Peningkatan mutu pelayanan dan pendukung pelayanan	Jorong Kantor Jorong			Jumlah penyediaan dukungan operasional Puskesmas 12 bulan	12 bulan	1.055.664.500	-	
			Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD		Persentase pemenuhan kebutuhan mutu pelayanan kesehatan	100 %					Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Kintap

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Peningkatan mutu pelayanan dan pendukung pelayanan	Kintap Kantor Kintap			Jumlah peserta JKN yang dilayani 18.000 orang Jumlah penyediaan dukungan operasional Puskesmas 12 bulan	18.000 orang 12 bulan	1.332.085.275	-	
			Program Pembinaan dan Pelayanan Kesehatan Primer, Pelayanan Kesehatan Rujukan, Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan		Persentase Keluarga Sehat; Persentase Peserta JKN	0 persen; 0 persen					Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Kintap
			Pembinaan, Pelayanan Kesehatan Primer dan Kesehatan Tradisional	Kintap Kantor Kintap			Jumlah Pelayanan Upaya Kesehatan Masyarakat 8.500 kali	8.500 kali	94.931.625	-	
			Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD		Persentase pemenuhan kebutuhan mutu pelayanan kesehatan	100 %					Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Sungai Cuka
			Peningkatan mutu pelayanan dan pendukung pelayanan	Kintap Kantor Kintap			Jumlah peserta JKN yang dilayani 1 tahun	1 tahun	690.532.480	-	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Program Pembinaan dan Pelayanan Kesehatan Primer, Pelayanan Kesehatan Rujukan, Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan		Persentase peserta JKN	0 %					Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Sungai Cuka
			Pembinaan, Pelayanan Kesehatan Primer dan Kesehatan Tradisional	Kintap Kantor Kintap			jumlah pelayanan upaya kesehatan masyarakat 5.200 ok	5.200 ok	93.225.864	-	
			Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD		Persentase pemenuhan kebutuhan mutu pelayanan kesehatan	100 %					Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Angsau
			Peningkatan mutu pelayanan dan pendukung pelayanan	Pelaihari, Angsau, Sarang Halang			Jumlah kesembuhan pasien rawat inap 0 orang	0 orang	744.862.083	-	
			Program Upaya Kesehatan Masyarakat		Persentase Keluarga sehat	25 %					Dinas Kesehatan Balai Laboratorium Kesehatan
			Pemeriksaan dan Pengujian Laboratorium Kesehatan	Kabupaten			jumlah pengujian laboratorium kesehatan yg dilaksanakan 1.000 sampel	1.000 sampel	189.496.010	-	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Program Obat dan Perbekalan Kesehatan		Persentase Pemenuhan obat dan perbekalan kesehatan	0 %					Dinas Kesehatan Instalasi Farmasi
			Pembinaan, Distribusi Obat dan Perbekalan Kesehatan	Kabupaten			Jumlah pembinaan dan distribusi obat dan perbekalan kesehatan 12 bulan	12 bulan	54.211.738	59.632.912	
			Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD		Persentase pemenuhan kebutuhan mutu pelayanan kesehatan	100 %					Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Bumi Makmur
			Peningkatan mutu pelayanan dan pendukung pelayanan				Jumlah peserta JKN yang dilayani 7.708 orang Jumlah penyediaan dukungan operasional puskesmas 12 bulan	7.708 orang 12 bulan	471.352.010	-	
			Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata			FALSE	FALSE				Dinas Kesehatan RSUD Kintap

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit	Kintap Kantor Kintap			jumlah jenis pengadaan alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas kesehatan 7 jenis	7 jenis	480.000.000	528.000.000	
			Pengadaan obat-obatan rumah sakit	Kintap Kantor Kintap			jumlah jenis Pengadaan Obat, Vaksin 1 tahun	1 tahun	800.000.000	880.000.000	
			Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit	Kintap Kantor Kintap			Jumlah jenis pengadaan sarana fasilitas pelayanan kesehatan 1 jenis	1 jenis	72.000.000	79.200.000	
			Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit	Kintap Kantor Kintap			jumlah jenis Pengadaan Bahan Habis Pakai 1 tahun	1 tahun	520.000.000	572.000.000	
			Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata		Indeks Kepuasan Masyarakat	0 Indeks					Dinas Kesehatan RSUD Kintap

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit	Kintap Kantor Kintap			persentasi Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 100 persen Operasional Pelayanan rumah sakit 1 tahun	100 persen 1 tahun	120.000.000	132.000.000	
			Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit	Kintap Kantor Kintap			jumlah jenis Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 13 jenis	13 jenis	48.000.000	52.800.000	
			Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kintap Kantor Kintap			jumlah jenisPengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi 17 jenis	17 jenis	48.000.000	52.800.000	
			Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD		Persentase pemenuhan kebutuhan mutu pelayanan kesehatan	100 %					Dinas Kesehatan RSUD Kintap



No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Peningkatan mutu pelayanan dan pendukung pelayanan	Kintap Kantor Kintap			Persentase pemenuhan kebutuhan mutu pelayanan kesehatan 100 persen Jumlah pemenuhan kebutuhan mutu pelayanan kesehatan 1 tahun	100 persen 1 tahun	1.600.000.000	1.760.000.000	
			Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Kesehatan (Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Manusia Kesehatan)		Indeks Kepuasan Masyarakat	0 Indeks					Dinas Kesehatan RSUD Kintap
			Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	SKPD			Jumlah pemenuhan kebutuhan SDM sesuai standar 108 orang	108 orang	3.558.026.609	-	
			Pekerjaan Umum								
	pembangunan infrastruktur yang berkualitas	Meningkatnya pelayanan infrastuktur	Program Perencanaan, Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, Operasional dan		Terlaksananya Pemberdayaan Petani Pemakai Air (P3A); Terlaksananya Perencanaan,	0 Pertemuan; 0 Dokumen; 0 Paket; 0					Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pemeliharaan Sumber Daya Air		Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, Operasional dan Pemeliharaan Sumber Daya Air; Terlaksananya Pembangunan Irigasi, Normalisasi Sungai, Rawa, Pantai, Jalan Usaha Tani, Jembatan Pertanian dan Embung; Terlaksananya Peningkatan, Rehabilitasi, Operasi dan Pemeliharaan Irigasi, Normalisasi Sungai, Rawa, Pantai, Jalan Usaha Tani, Jembatan Pertanian dan Embung; Terlaksananya Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi (DAK)	Paket					

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Perencanaan Sumber Daya Air	Kabupaten			Jumlah Dokumen Perencanaan SDA untuk Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Irigasi Lainnya tersusun 3 Dokumen	3 Dokumen	515.127.300	-	
			Pembangunan Irigasi, Normalisasi Sungai, Rawa, Pantai, Jalan Usaha Tani, Jembatan Pertanian dan Embung	Kabupaten			Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang dibangun 10 Unit	10 Unit	406.229.500	-	
			Peningkatan, Rehabilitasi, Operasi dan Pemeliharaan Irigasi, Normalisasi Sungai, Rawa, Pantai, Jalan Usaha Tani, Jembatan Pertanian dan Embung	Kabupaten			Jumlah Dokumen Inventarisasi, IKSI, AKNOP dan Laporan OP Sungai 1 Dokumen Panjang Tanggul/ Bantaran/ Tebing Sungai yang dipelihara 100 Meter	1 Dokumen 100 Meter	588.870.800	-	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pemberdayaan Petani Pemakai Air (P3A)	Kabupaten			Jumlah Pembinaan/ Pertemuan Kelembagaan Pengelolaan SDA 5 Kali Jumlah Pelatihan Kelembagaan Pengelolaan SDA 1 Kali	5 Kali 1 Kali	326.808.000	-	
			Rehabilitasi Embung dan Penampungan dan Air lainnya	Kabupaten			Panjang Embung dan Penampungan Air Lainnya Yang Direhabilitasi 2 Buah	2 Buah	8.175.800	-	
			Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing	Kabupaten			Panjang Bangunan Perkuatan Tebing Yang Dibangun 3.120 Meter	3.120 Meter	-	-	
			Rehabilitasi Bendung Irigasi	Kabupaten			Jumlah Bendung Irigasi Yang Direhabilitasi 2 Buah	2 Buah	1.953.965.300	-	
			Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa	Kabupaten			Jumlah Bangunan Jaringan Irigasi Rawa Yang Direhabilitasi 2 Buah	2 Buah	414.081.500	-	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penyusunan Rencan Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup Untuk Kontruksi Pengendali Banjir,Lahar,Drainase Utama Perkotaan dan Pengamanan Panteng	Kabupaten			Jumlah Dokumen Rencana teknis dan Dokumen lingkungan Hidup Untuk Kontruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya 5 Dokumen	5 Dokumen	824.393.100	-	
			Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten			Jumlah Dokumen Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota 2 Dokumen	2 Dokumen	2.077.997.700	-	
			Evaluasi dan Rekomendasi dan Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten			Jumlah Dokumen Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota 1 Dokumen	1 Dokumen	146.866.600	-	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing				Panjang Bangunan Perkuatan Tebing Yang Dibangun 1.420 Meter	1.420 Meter	1.217.841.400	-	
			Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya				Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya Yang Dibangun 200 Meter	200 Meter	171.910.100	-	
			Normalisasi/Restorasi/Pemeliharaan Sungai	Kabupaten			Panjang Sungai yang dinormalisasi/di restorasi/dipelihara 13.700 Meter	13.700 Meter	993.178.900	-	
			Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Kabupaten			Jumlah Bangunan Jaringan Irigasi Rawa Yang Dibangun 5 Meter	5 Meter	23.756.300	-	
			Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa	Kabupaten			Jumlah Bangunan Jaringan Irigasi Rawa Yang Dibangun 15 unit	15 unit	2.540.466.300	-	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Kabupaten			Jumlah Dokumen Inventarisasi, IKSI, AKNOP dan Laporan OP Irigasi Permukaan 5 Dokumen Panjang Saluran Irigasi yang dipelihara 250 Meter Jumlah Bangunan Irigasi yang dipelihara 2 Buah	5 Dokumen 250 Meter 2 Buah	851.256.900	-	
			Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	Kabupaten			Jumlah Bendung yang dipelihara 2 Buah Jumlah Dokumen Inventarisasi, IKSI, AKNOP dan Laporan OP Bendung 0 Dokumen	2 Buah 0 Dokumen	204.308.800	-	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigrasi Rawa	Kabupaten			Jumlah Bangunan Irigasi Rawa yang dipelihara 5 Buah Jumlah Dokumen Inventarisasi, IKSI, AKNOP dan Laporan OP Irigasi Rawa 5 Dokumen Panjang Saluran Irigasi Rawa yang dipelihara 3.000 Meter	5 Buah 5 Dokumen 3.000 Meter	542.210.200	-	
			Operasional Unit Pengelola Irigrasi	Kabupaten			Jumlah Pelatihan Petugas OP 0 Kali Jumlah Pembinaan/ Pertemuan Petugas OP 30 Kali	0 Kali 30 Kali	1.671.531.500	-	
			Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup Untuk Kontruksi Irigasi dan Rawa	Kabupaten			Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa 16 Dokumen	16 Dokumen	2.035.615.300	-	



No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Kabupaten			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan Yang Direhabilitasi 600 Meter	600 Meter	1.327.858.400	-	
			Program Keciptakaryaan dan Pengaturan Jasa Konstruksi		Proporsi populasi yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun; Cakupan rumah tangga dengan air bersih layak; Cakupan penduduk berakses air minum sehat; Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak; Cakupan pembangunan gedung/bangunan fasilitas lainnya yang sesuai standar konstruksi yang ditetapkan;	0 ; 0 persen; 0 persen; 0 persen; 0 persen; 0 Persen					Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Persentase rumah tangga yang memiliki sanitasi yang baik; Cakupan penyatuan kantor layanan publik, SKPD Koordinasi dan Kantor Bupati						
			Pendamping Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)	Kabupaten			Pemberdayaan masyarakat dalam penataan Bangunan dan lingkungan 5 Kelurahan	5 Kelurahan	100.000.000	-	
			Penyusunan Standar Satuan Harga Kabupaten	Kabupaten			Koordinasi dan Penyusunan standar harga berdasarkan jenis dan tipe barang 1 dok	1 dok	-	-	
			Penyediaan prasarana dan sarana air minum	Kabupaten			Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan teknis SPAM 1 Jaringan	1 Jaringan	95.000.000	-	
			Penyediaan prasarana dan sarana air limbah	Kabupaten			Tercapainya kinerja Pengelolaan air limbah yang baik 6 desa	6 desa	1.047.891.200	-	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pengembangan sistem penyediaan air minum dan pengelolaan sanitasi (Pendamping PAMSIMAS)	Kabupaten			Jumlah rumah tangga yang mendapat akses air minum yang aman 1.500 SR	1.500 SR	4.700.000.000	-	
			Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan /Perbaikan SPAM	Kabupaten			Jumlah tercapainya pembangunan SPAM 1 Jaringan	1 Jaringan	185.000.000	-	
			Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Kabupaten			Penyusunan Rencana,Kebijakan,Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan 1 Dok	1 Dok	386.880.307	-	
			Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan dan Lingkungan	Kabupaten			Jumlah Drainase yang layak 5.000 m1	5.000 m1	-	-	
			Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Rehabilitasi, Renovasi, Ubahsuai, serta Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten			Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan, Rehabilitasi, Renovasi, Ubahsuai, serta Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung daerah Kabupaten/Kota 20 Paket	20 Paket	6.441.644.663	-	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Kabupaten			Jumlah bimbingan teknis 100 orang	100 orang	100.000.000	-	
			Pemantauan dan Evaluasi IUJK Nasional yang telah diterbitkan	Kabupaten			Jumlah IUJK yang terbit 100 Dok	100 Dok	19.370.000	-	
			Pembangunan SPAM di Kawasan Perdesaan	Kabupaten			Jumlah Terbangunnya SPAM diperdesaan 1 Jaringan	1 Jaringan	1.360.000.000	-	
			Perluasan SPAM di Kawasan Perkotaan	Kabupaten			Jumlah SPAM yang terbangun di perkotaan 1 Jaringan	1 Jaringan	84.081.600	-	
			Penyusunan Outline Plan pada Kawasan Genangang	Kabupaten			Jumlah Drainase yang tergenang 1 Dok	1 Dok	-	-	
			Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan dan Lingkungan	Kabupaten			Jumlah Drainase yang Layak 1 Dok	1 Dok	253.063.112	-	
			Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan dan Lingkungan	Kabupaten			Jumlah Drainase yang terbangun diperkotaan 5.290 m1	5.290 m1	4.450.000.000	-	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan adan Lingkungan	Kabupaten			Jumlah drainase yang layak 5.000 m	5.000 m	908.000.000	-	
			penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi	Kabupaten			Jumlah Kegiatan Pengaturan Jasa Konstruksi 160 orang	160 orang	259.687.100	-	
			Pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa kontruksi	Kabupaten			Tercapainya Pengawasan tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraa n dan tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi 2 kali	2 kali	120.942.900	-	
			<b>Program Pembangunan Jalan, Pembangunan Jembatan dan Rehabilitasi/Pemeli haraan Jalan dan Jembatan</b>		Terlaksananya Pembangunan/R ehailitasi/Pemeli haraan Jalan dan Jembatan di Kabupaten Tanah Laut	0 Persen					Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
			Perencanaan Rehabilitasi/Pemeli haraan Jalan	Kabupaten			Jumlah Dokumen Perencanaan 18 Dokumen	18 Dokumen	1.940.384.180	-	
			Rehabilitasi Jalan	Kabupaten			Jumlah Rehabilitasi Jalan 16.421 m	16.421 m	13.338.678.124	-	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pemeliharaan Rutin Jalan	Kabupaten			Jumlah Pemeliharaan Rutin Jalan 12 bulan	12 bulan	550.000.000	-	
			Pelebaran Jalan Menuju Standar	Kabupaten			Jumlah pelebaran jalan standar 1.961 m	1.961 m	1.752.112.380	-	
			Pembangunan Jalan	Kabupaten			Jumlah pembangunan jalan 16.332 m	16.332 m	7.790.641.480	-	
			Rekonstruksi Jalan	Kabupaten			Jumlah Rekonstruksi Jalan 12.984 m	12.984 m	13.214.146.580	-	
			Pembangunan Jembatan	Kabupaten			Jumlah pembangunan jembatan 2 Unit	2 Unit	2.681.046.580	-	
			Penggantian jembatan	Kabupaten			Jumlah penggantian jembatan 16 Unit	16 Unit	5.036.504.443	-	
			Rehabilitas Jembatan	Kabupaten			Jumlah rehabilitasi jembatan 2 Unit	2 Unit	335.158.480	-	
			Pemeliharaan Rutin Jembatan	Kabupaten			Jumlah Pemeliharaan Rutin Jembatan 12 Bulan	12 Bulan	551.550.000	-	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Program Pengembangan Teknologi Konstruksi dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Peralatan Laboratorium		Persentase Teknologi Konstruksi yang diaplikasikan dalam pembangunan	0 %					Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan UPT Laboratorium Dinas Pekerjaan Umum
			Identifikasi dan Informasi teknik konstruksi	SKPD			Jumlah peralatan pendukung layanan Uji material Konstruksi 11 alat	11 alat	-	120.000.000	
			Optimalisasi laboratorium pengujian	SKPD			Jumlah operasional layanan Uji material Konstruksi dan peningkatan SDM yang berkompeten 1 Tahun Jumlah tenaga pembantu Petugas laboratorium/PT T 1 orang 12 Bulan	1 Tahun 12 Bulan	223.034.550	300.000.000	
				Perumahan Rakyat							

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD	
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)					
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Program Penanganan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		Jumlah rumah rakyat layak huni yang dibangun	100 Rumah					Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	
			Perencanaan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Pelaihari			Jumlah Dokumen untuk Perencanaan Bidang Perumahan Dan Permukiman 2 Dokumen	2 Dokumen	461.648.614	-		
			Pemanfaatan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Pelaihari			Jumlah Rumah yang di berikan Hibah 200 Buah Jumlah Ruas Jalan Lingkungan 10 Paket	200 Buah 10 Paket	7.399.928.463	-		
			Penataan Ruang									
		Meningkatnya pengendalian pemanfaatan ruang	Program Perencanaan, Pemanfaatan, dan Pengendalian Tata Ruang		Persentase tingkat capaian perwujudan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang yang baik dan tertib	0 Dokumen					Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	



Bappeda Kabupaten Tanah Laut

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Kegiatan Pemanfaatan Tata Ruang	Kabupaten			Jumlah Pelaksanaan Pembinaan dan Koordinasi terhadap Pemanfaatan Ruang 1 Dokumen	1 Dokumen	290.069.200	-	
			Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Kabupaten			Jumlah Dokumen RDTR yang mendapat persetujuan substansi dari Kementerian 1 Dokumen Jumlah pelaksanaan GCP dan Pembuatan Data dan Peta Dasar yang tersusun 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen	1.228.590.100	-	
			Sistem Informasi Penataan Ruang	Kabupaten			Jumlah Pelaksanaan Pembinaan dan Koordinasi terhadap Pemanfaatan Ruang 1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	
			Sosial								

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pengurangan Kemiskinan dan Transformasi Ekonomi	menurunnya Angka Kemiskinan	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya		Persentase PMKS yang menjadi mandiri	100 persen					Dinas Sosial
			Verifikasi dan Validasi Basis Data Terpadu	Kabupaten			ketersediaan basis data terpadu dan data kemiskinan 100 persen	100 persen	500.000.000	810.000.000	
			Kegiatan Pembinaan Pendampingan, Bantuan Stimulant dan Penataan Lingkungan	Kabupaten			cakupan PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya 30 persen	30 persen	375.000.000	1.000.000.000	
			Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial		Jumlah PMKS penerima program pelayanan rehabilitasisosial yang tertangani	65 orang					Dinas Sosial

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	Kabupaten			Jumlah Penerima Bantuan Sosial Teerencana dan Tidak Terencana dan Jumlah Warga terdampak bencana alam dan sosial 0	0	1.063.900.000	-	
			Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar Kerja Bagi Anak Terlantar Termasuk Anak Jalanan	Kabupaten			jumlah anak terlantar yang mendapat bantuan dan pelatihan 40 anak	40 anak	80.150.000	80.150.000	
			Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	SKPD			Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang mendapat pendidikan dan pelatihan luar panti 0	0	-	-	
			Pemberian Layanan Rujukan	Kabupaten			0	0	82.500.000	-	
			Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi				Jumlah warga terdampak bencana alam dan sosial yang mendapat tempat penampungan 0	0	67.000.000	-	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pelayanan Dukungan Psikososial	Kabupaten			Jumlah warga terdampak bencana dan sosial yang dilayani 0	0	70.755.000	-	
			Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma		Jumlah penyandang cacat dan eks trauma yang mendapat pembinaan	134 orang					Dinas Sosial
			Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma	Kabupaten			jumlah penyandang cacat dan eks trauma yang mengikuti pendidikan dan keterampilan 15 orang	15 orang	64.875.000	150.000.000	
			Pemenuhan kebutuhan dasar bagi penyandang cacat	Kabupaten			jumlah penyandang cacat yang terpenuhi kebutuhan dasarnya 368 orang	368 orang	441.600.000	350.000.000	
			Program pembinaan panti asuhan /panti jompo		Jumlah lanjut usia yang mendapat pembinaan dalam panti dan luar panti	252 orang					Dinas Sosial
			Pemenuhan kebutuhan dasar lanjut usia terlanter	Kabupaten			jumlah lut yang terpenuhinya kebutuhan dasarnya 2.754 orang	2.754 orang	3.304.800.000	550.000.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)		Jumlah eks penyandang penyakit sosial yang mendapat pelayanan sosial	40 orang					Dinas Sosial
			Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial	Kabupaten			jumlah tuna sosial dan eks napi yang telah diberikan pendidikan dan keterampilan 80 orang	80 orang	107.230.000	170.000.000	
			Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial		Jumlah Lembaga kesejahteraan sosial yang tumbuh dan aktif melaksanakan usaha kesejahteraan sosial	3 lembaga					Dinas Sosial
			Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat	Kabupaten			jumlah TKSK,PSM,Penyuluh Sosial dan relawan sosial lainnya yang meningkat kemampuannya dan melaksanakan usaha kesejahteraan sosial 155 orang	155 orang	95.500.000	695.590.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pelestarian Nilai - Nilai kepahlawanan, keberintisan dan kesetiakawanan sosial	Kabupaten , Luar Daerah			cakupan kegiatan sarasehan tentang nilai-nilai kepahlawanan dan keberintisan serta taman makam pahlawan dan situs perjuangan 100 persen	100 persen	8.395.000	275.000.000	
			Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota				Jumlah TKSK yang meningkat kemampuannya dan melaksanakan usaha kesejahteraan sosial 0	0	115.000.000	-	
			Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten			Jumlah Penyuluh sosial dan relawan sosial lainnya yang meningkat kemampuannya dan melaksanakan usaha kesejahteraan sosial 0	0	448.763.000	-	
			Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kabupaten			Jumlah taman makam pahlawan yang dipelihara 0	0	93.236.000	-	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kabupaten			Jumlah petugas pengamanan makam pahlawan 0	0	28.313.512	-	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Kabupaten			Jumlah dokumen penerbitan izin undian gratis 0	0	6.180.000	-	
			Program Pembinaan, Pengembangan, Pelayanan Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Jaminan Sosial		Persentase PMKS Penerima Program Pelayanan Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Jaminan Sosial	100 persen					Dinas Sosial
			Penunjang Program Keluarga Harapan	Kabupaten			cakupan penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) yang tepat syarat 0 persen	0 persen	265.326.240	500.000.000	
			Penjangkauan Anak-Anak Terlantar				Jumlah anak terlantar yang didata 0	0	31.260.000	-	
			Rujukan Anak-Anak Terlantar				Jumlah anak terlantar yang mendapatkan rujukan 0	0	29.750.000	-	



No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD	
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)					
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar				Jumlah anak terlantar yang terpelihara 0	0	31.465.000	-		
			Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri									
	Tata kelola birokrasi Pemerintahan	Meningkatnya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	Program pembinaan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Persentase Penyelesaian Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100 %					Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
			Pengamanan Kegiatan Pemerintah Daerah	SKPD			pengamanan 144 kali	144 kali	1.120.308.000	1.200.000.000		
			Pembinaan, Pengendalian dan penindakan Kamtrantibmas	SKPD			12 bulan	12 bulan	572.365.000	600.000.000		
			Meningkatnya kedisiplinan, ketertiban, dan kehidupan bermasyarakat yang kondusif	program pencegahan dan Penanggulangan Bencana		Persentase penanganan bencana	100 Persen				Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
				Pengendalian dan Penanganan Darurat Bencana	Kabupaten			Jumlah penanganan bencana 11 kecamatan	11 kecamatan	517.113.784	568.825.162	
				Pebinaan di Wilayah Pasca Bencana	Kabupaten			Jumlah desa 4 Desa	4 Desa	123.120.544	135.432.598	
				Pencegahan dan Pengendalian Risiko Bencana	Kabupaten			Jumlah bencana 245 kali	245 kali	33.228.600	36.551.460	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Bajuin Kantor Bajuin, Bati-Bati Kantor Bati-Bati, Batu Ampar Kantor Batu Ampar			Jumlah Logistik 572 dos/botol	572 dos/botol	157.560.500	173.316.550	
			Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Bajuin Kantor Bajuin			Jumlah Pelatihan 11 Kecamatan	11 Kecamatan	809.286.572	890.215.229	
			Program Pembinaan, Pengamanan dan Penegakan Perda		Persentase penuntasan pelanggaran Perda dan Perkada	0 %					Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
			penyelidikan, penyidikan Perda, pelayan dan pembinaan PPNS	SKPD			Jumlah Pelanggaran Perda dan kebijakan kepala daerah yang ditangani 185 Pelanggaran	185 Pelanggaran	129.985.000	150.000.000	
			Pembinaan, pengawasan dan penyuluhan Perda/ Perkada	Kabupaten , SKPD			Jumlah binwasluh peraturan perundang undangan daerah dan kebijakan kepala daerah 12 Bulan	12 Bulan	87.216.600	100.000.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Program Pembinaan, Kesiapsiagaan dan kedaruratan Pemadaman Kebakaran		Persentase tingkat waktu tanggap (response time rate) kejadian kebakaran	100 %					Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
			Deteksi Dini, Pencegahan dan Kesiapsiagaan Kebakaran	Kabupaten , SKPD			Jumlah deteksi dini, pencegahan kebakaran yang dilaksanakan 8 Item	8 Item	179.330.000	200.000.000	
			Tanggap Darurat dan Pengendalian Kebakaran	Kabupaten , SKPD			Jumlah lap. kebakaran pemukiman yang ditangani 39 Laporan	39 Laporan	174.835.000	200.000.000	
			Program Pembinaan Aparatur dan Perlindungan Masyarakat		Rasio PolPP per 10.000 penduduk	127 Orang					Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
			Pembinaan dan Pengawasan Aparatur	Kabupaten , SKPD			Jumlah Orang 161 Orang	161 Orang	4.617.584.800	4.700.000.000	
			Pembinaan Satlinmas	Kabupaten , SKPD			Jumlah Orang 12 Bulan	12 Bulan	78.541.000	100.000.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Program Pembinaan dan Penyuluhan Pendidikan Politik Kabupaten dan Masyarakat		Tingkat Fasilitasi dan Tertib Administrasi Partai Politik (%), Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu & Pemilukada (%) dan Jumlah Desa Sadar Politik	0 %					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Pembinaan dan pengembangan penyusunan formulasi, implementasi, monitoring dan evaluasi politik	Kabupaten , SKPD			Jumlah Sosialisasi di Kecamatan 9 kali Jumlah Sosialisasi di Desa 3 kali	9 kali 3 kali	258.999.796	-	
			Pembinaan partai politik dan penyelenggaraan pemilu di segala tingkatan	Kabupaten , SKPD			Jumlah rapat 4 kali Jumlah sosialisasi 1 kali Tersalurkannya Hibah Keuangan 10 parpol	4 kali 1 kali 10 parpol	1.565.698.550	-	
			Program pengembangan kewaspadaan nasional		Tercapainya Program Pengembangan Kewaspadaan Nasional	0 %					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pembinaan pengendalian dan pengawasan orang asing dan lembaga	Kabupaten , SKPD			Terlaksananya Pengawasan dan Pembinaan terhadap orang asing dan lembaga asing di Kabupaten Tanah Laut 12 bulan	12 bulan	83.244.996	-	
			Penyelenggaraan kewaspadaan dini pemerintah daerah	Kabupaten , SKPD			Terlaksananya Sub Kegiatan Kerjasama dengan Aparat bersama Tim KDPD, FKDM dan TNI AL dalam melaksanakan pengamanan, pemeliharaan ketertiban dan pencegahan kejahatan laut dan pesisir 12 bulan	12 bulan	434.852.000	-	
			Penanganan/menghimpun, mengarahkan penyelesaian konflik	Kabupaten , SKPD			Desa Sadar Konflik 1 Desa Terlaksananya tugas Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial 12 bulan	1 Desa 12 bulan	171.175.400	-	
			Program Pembinaan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan		Pembinaan dan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	0 %					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pembinaan dan pengembangan ideologi negara	Kabupaten , SKPD			Jumlah Sosialisasi 3 kali	3 kali	133.778.800	-	
			Pembinaan dan pengembangan wawasan kebangsaan	Kabupaten , SKPD			Jumlah Penyuluhan 8 kegiatan Jumlah Seminar 2 kegiatan	8 kegiatan 2 kegiatan	228.272.900	-	
			Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Seni Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi		Cakupan Fasilitasi Pembinaan Terhadap LSM, Ormas dan OKP(%), Jumlah Lembaga Keagamaan yang aktif dalam peningkatan produktifitas umat (lembaga), jumlah konflik intern dan antar umat beragama (kasus), jumlah desa peduli toleransi	0 %					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Pembinaan dan pengembangan ketahanan seni budaya	Kabupaten , SKPD			Jumlah Laporan 2 laporan	2 laporan	84.999.800	-	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pembinaan dan pengembangan ketahanan agama	Kabupaten , SKPD			Terlaksananya penyuluhan pembinaan dan pengembangan ketahanan agama 3 kegiatan Terlaksananya pembinaan Desa Toleransi 2 kegiatan	3 kegiatan 2 kegiatan	140.417.820	-	
			Pembinaan dan pengawasan Ormas dan LSM	Kabupaten , SKPD			Jumlah Penyuluhan 2 kegiatan Jumlah Monev 4 kegiatan Jumlah Sosialisasi 2 kegiatan Tersalurkannya Hibah Keuangan/ Bansos 3 ormas/pemerintah pusat	2 kegiatan 4 kegiatan 2 kegiatan 3 ormas/pemerintah pusat	667.237.060	-	
			Penghimpunan data, fakta, keterangan dan informasi tentang ketahanan ekonomi masyarakat	Kabupaten , SKPD			Terlaksananya penyuluhan tentang ketahanan ekonomi masyarakat 1 kegiatan	1 kegiatan	46.712.080	-	
			Program pengembangan wawasan kebangsaan		Pelaksanaan HUT RI dan Pelaksanaan Hari Jadi Kabupaten tanah Laut	2 Kali					Sekretariat Daerah Bagian Tata Pemerintahan

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Kabupaten , SKPD			Jumlah Dokumen 3 Dokumen	3 Dokumen	141.642.300	145.000.000	
			Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat								
			Program Koordinasi dan fasilitasi Ketentraman dan ketertiban umum masyarakat		IKM	0 Nilai					Kurau Kantor Kurau
			Pembinaan Perlindungan Masyarakat	Kurau Kantor Kurau			Jumlah Orang 140 Orang	140 Orang	12.310.000	13.541.000	
			Koordinasi dan Fasilitasi Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat	Kurau Kantor Kurau			Jumlah Orang 35 Orang	35 Orang	5.355.000	5.890.500	
			Program Koordinasi dan fasilitasi Ketentraman dan ketertiban umum masyarakat		FALSE	FALSE					Jorong Kantor Jorong
			Pembinaan Perlindungan Masyarakat	Jorong Kantor Jorong			Terlaksananya Sosialisasi Pembinaan dan Perlindungan Masyarakat 2 Kali	2 Kali	10.393.200	12.000.000	



No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Koordinasi dan Fasilitasi Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat	Jorong Kantor Jorong			Terlaksananya Pelatihan Aggota Linmas 1 Kali Terlaksananya Seleksi Peserta Paskibra dan Terlaksananya Peringatan HUT RI di Tingkat Keccamatan 1 Kali	1 Kali 1 Kali	32.607.600	43.130.000	
			Pendidikan dan Pelatihan Kepemudaan						-	-	
			Program Koordinasi dan fasilitasi Ketentraman dan ketertiban umum masyarakat		IKM	0 Nilai					Batu Ampar Kantor Batu Ampar
			Koordinasi dan Fasilitasi Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat				Jumlah rapat koordinasi antara aparat kec. bersama salpol PP Kab., Polsek dan Pos Ramil dalam pencegahan kejahatan dan Pekat 5 kali /kegiatan	5 kali /kegiatan	42.210.000	45.500.000	
			Program Koordinasi dan fasilitasi Ketentraman dan ketertiban umum masyarakat			Indeks Kepuasan Masyarakat	0 nilai				

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Koordinasi dan Fasilitasi Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat	Pelaihari			Jumlah koordinasi dan fasiitasi 8 kali	8 kali	30.480.000	33.528.000	
			<b>Program Koordinasi dan fasilitasi Ketentraman dan ketertiban umum masyarakat</b>		Terlaksananya kegiatan koordinasi dan fasilitasi,pembinaan, ketentraman dan ketertiban umum masyarakat; Terlaksananya kegiatan pembinaan perlindungan masyarakat	0 kali; 0 orang					Tambang Ulang Kantor Tambang Ulang
			Pembinaan Perlindungan Masyarakat	Tambang Ulang Kantor Tambang Ulang			Terlaksananya kegiatan perlindungan masyarakat 40 orang	40 orang	-	15.000.000	
			Koordinasi dan Fasilitasi Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat	Tambang Ulang Kantor Tambang Ulang			Terlaksananya kegiatan koordinasi dan fasilitasi pembinaan dsan ketertiban umum masyarakat 9 Kali	9 Kali	25.000.000	30.000.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Program Koordinasi dan fasilitasi Ketentraman dan ketertiban umum masyarakat		IKM	0 Nilai					Bati-Bati Kantor Bati-Bati
			Koordinasi dan Fasilitasi Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat				Jumlah Sosialisasi 1 kali	1 kali	9.233.000	-	
			Program Koordinasi dan fasilitasi Ketentraman dan ketertiban umum masyarakat		IKM	0 NLAi					Bumi Makmur
			Koordinasi dan Fasilitasi Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat				Terbentuknya Sinegritas dengan kepolisian NKRI, TNI dan instansi Vertikal di wilayah kecamatan / tercapai dan terbinanya fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah kecamatan 33 orang	33 orang	22.000.000	23.300.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Program Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Kelurahan		IKM	1 nilai					Angsau
			Sosialisasi Pertanahan	Angsau			Jumlah peserta kegiatan sosialisasi pertanahan 40 orang	40 orang	6.660.000	7.326.000	
			Penyusunan dan pengumpulan data statistik kelurahan	Angsau			jumlah dokumen data statistik kelurahan (profil kelurahan) 1 Tahun	1 Tahun	31.833.000	35.016.300	
			pengendalian keamanan, ketertiban dan kenyamanan lingkungan	Angsau			jumlah peserta sosialisasi pengendalian keamanan, ketertiban dan kenyamanan lingkungan 1 Tahun	1 Tahun	6.610.000	7.271.000	
			Program Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Kelurahan		IKM	1 NILAI					Karang Taruna
			Penyusunan dan pengumpulan data statistik kelurahan	Karang Taruna			Jumlah dokumen data statistik kelurahan ( Profil Kelurahan) 1 Dokumen	1 Dokumen	64.300.000	-	
			Program Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Kelurahan		IKM	0 Nilai					Pabahanan

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Sosialisasi Pertanahan	Pabahana n			Jumlah peserta kegiatan sosialisasi pertanahan 45 orang	45 orang	8.484.000	-	
			Penyusunan dan pengumpulan data statistik kelurahan	Pabahana n			Jumlah Dokumen Data Statistik kelurahan (Profil Kelurahan) 1 dokumen	1 dokumen	89.050.000	-	
			pengendalian keamanan, ketertiban dan kenyamanan lingkungan	Pabahana n			jumlah peserta sosialisasi pengendalian keamanan,keter tiban,dan kenyamanan lingkungan 1 kali	1 kali	10.000.000	-	
			Program Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Kelurahan		IKM	1 nilai					Pelaihari
			Sosialisasi Pertanahan	Pelaihari			Jumlah peserta 45 orang	45 orang	8.560.000	8.580.000	
			Penyusunan dan pengumpulan data statistik kelurahan	Pelaihari			Jumlah dokumen 1 dokumen	1 dokumen	15.000.000	16.500.000	
			pengendalian keamanan, ketertiban dan kenyamanan lingkungan	Pelaihari			Jumlah peserta 45 orang	45 orang	8.052.500	8.100.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Program Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Kelurahan		IKM	0 NILAI					Sarang Halang
			Sosialisasi Pertanahan	Sarang Halang			Jumlah peserta kegiatan pertanahan 45 orang	45 orang	7.500.000	8.250.000	
			Penyusunan dan pengumpulan data statistik kelurahan	Sarang Halang			Jumlah Dokumen data statistik Kelurahan (propil Kelurahan) 1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000	22.000.000	
			pengendalian keamanan, ketertiban dan kenyamanan lingkungan	Sarang Halang			Jumlah peserta sosialisasi pengendalian keamanan,ketertiban dan kenyamanan lingkungan 45 orang	45 orang	7.500.000	8.250.000	
			Perhubungan								
	pembangunan infrastruktur yang berkualitas	Meningkatnya pelayanan infrastuktur	Pogram peningkatan pelayanan angkutan		Presentase layanan angkutan darat	40,7 %					Dinas Perhubungan
			Peningkatan pengelolaan dan penataan terminal angkutan darat & Perparkiran	SKPD			Jumlah terminal 1 Terminal Jumlah lokasi parkir 42 Lokasi	1 Terminal 42 Lokasi	825.729.000	285.000.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor		Nilai IKM	0 Nilai					Dinas Perhubungan
			Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	SKPD			Jumlah Sarana Prasarana PKB Terpelihara 12 Unit	12 Unit	74.800.000	75.000.000	
			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	SKPD			Jumlah Kendaraan Laik Jalan 5.400 Unit	5.400 Unit	204.859.700	205.000.000	
			Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	SKPD			Jumlah Tanda Bukti Lulus Uji 1.800 Set	1.800 Set	70.500.000	75.000.000	
			Program peningkatan layanan angkutan, Sarana dan Fasilitas Perhubungan Darat		Jumlah Fasilitas Jalan	0 Unit					Dinas Perhubungan
			Kegiatan peningkatan, operasional dan Pengawasan disiplin lalu lintas angkutan jalan	SKPD			Jumlah uji petik 28 kali	28 kali	55.900.000	687.000.000	
			Kegiatan pengembangan sarana prasarana dan tekhnologi	SKPD			Jumlah dokumen 2 Dokumen	2 Dokumen	721.000.000	788.000.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			perhubungan darat								
			Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	SKPD			Jumlah Fasilitas Jalan 73 Unit	73 Unit	13.230.000	15.000.000	
			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	SKPD			Jumlah Prasarana Jalan Terpelihara 11 Unit	11 Unit	66.180.000	67.000.000	
			Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	SKPD			Jumlah Fasilitas Jalan 100 Unit	100 Unit	86.400.000	90.000.000	
			Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	SKPD			Jumlah Fasilitas Jalan 100 Unit	100 Unit	138.495.000	150.000.000	
			Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	SKPD			Jumlah Pengawasan 12 kali	12 kali	300.475.000	300.500.000	
			Program pengembangan sektor Perhubungan laut,		Jumlah pelabuhan dan Dermaga penyeberangan	0 Buah					Dinas Perhubungan



No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD	
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)					
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			sungai dan penyeberangan									
			Monitoring dan pengembangan sektor angkutan laut dan kepelabuhanan	Kabupaten			Jumlah pelabuhan 1 Pelabuhan jumlah dokumen 2 Dokumen	1 Pelabuhan 2 Dokumen	543.660.000	245.900.000		
			Pengembangan sektor angkutan sungai, danau dan penyeberangan	SKPD			Jumlah dermaga penyeberangan 2 Dermaga 0	2 Dermaga 0	27.375.000	375.000.000		
			Pengelolaan sarana Navigasi dan pengembangan Teknologi Perhubungan Laut dan sungai	SKPD			Jumlah sarana navigasi 20 buah	20 buah	85.959.000	425.000.000		
			Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Penyeberangan		Jumlah Dermaga Penyeberangan	0 buah					Dinas Perhubungan	
			Pengelolaan Angkutan Penyeberangan	Kabupaten			Jumlah orang melalui dermaga per tahun 4.600 orang	4.600 orang	265.476.960	169.000.000		
				Lingkungan Hidup								

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Meningkatnya pengelolaan kualitas lingkungan hidup	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup		Pemantauan Lingkungan Hidup; Indeks Kualitas Air; Indeks Kualitas Udara	100 %; 50,25 Skor; 81 Skor					Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
			Pemantauan Kualitas Lingkungan	Kabupaten			Laporan Pemantauan Kualitas Udara Ambient 2 Dokumen Laporan Pemantauan Kualitas Air 2 Dokumen	2 Dokumen 2 Dokumen	243.000.000	-	
			Pengendalian Kerusakan Lingkungan	Kabupaten			Terdokumentasi nya Informasi status Kerusakan Lahan untuk Produksi Biomasa di Kabupaten Tanah Laut 1 Dokumen	1 Dokumen	145.000.000	-	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pengendalian Pencemaran Lingkungan	Kabupaten			Laporan Kadar Polusi Limbah Cair 2 Dokumen Laporan Uji Emisi/ Polusi Udara Akibat Aktivitas Industri 1 Dokumen	2 Dokumen 1 Dokumen	232.000.000	-	
			Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan		FALSE	FALSE					Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
			Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	SKPD			Jumlah Bank Sampah Terbentuk dan Terkelola 12 Bulan	12 Bulan	219.576.712	-	
			Program Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup		Cakupan penanganan penyelesaian kasus lingkungan hidup (%)	100 %					Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
			Pengawasan Sanksi Administrasi dan Penegakan Hukum Lingkungan	Kabupaten			Jumlah Pengawasan 65 Perusahaan	65 Perusahaan	162.610.105	-	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pengelolaan Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup	Kabupaten			Jumlah Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup 5 Pengaduan	5 Pengaduan	123.173.103	-	
			Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengendalian Lingkungan Hidup	Pelaihari			Terlaksananya penilaian kinerja Kelompok Masyarakat 12 Bulan	12 Bulan	63.028.104	-	
			Program Tata Lingkungan		Target IKLH Kab. Tanah Laut	60.208 %					Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
			Pengendalian Perubahan Iklim	Kabupaten				Terlaksananya Program Kampung Iklim (PROKLIM) 6 desa yang didaftarkan Proklam Terlaksananya Inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK) 1 buah dokumen	6 desa yang didaftarkan Proklam 1 buah dokumen	186.623.103	-

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Verifikasi Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk Kegiatan dan/ atau usaha	SKPD			Tercapainya verifikasi izin PPLH 17 Berita Acara Verifikasi Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun untuk Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan IPLC bagi kegiatan dan/atau usaha yang telah memiliki Izin Lingkungan	17 Berita Acara Verifikasi Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun untuk Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan IPLC bagi kegiatan dan/atau usaha yang telah memiliki Izin Lingkungan	42.609.500	-	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Inventarisasi data dan Informasi Lingkungan Hidup	Kabupaten			Tersusunnya Lembar Hasil Uji Kualitas Air hujan Tahun 2021 12 LHU Tersusunnya Dokumen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 1 dokumen IKLH Tersusunnya Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD) 1 dokumen IKPLHD ,	12 LHU 1 dokumen IKLH 1 dokumen IKPLHD ,	190.690.500	-	
			Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan	SKPD			Terfasilitasinya Izin Lingkungan dan Izin PPLH 90 SPPL Terfasilitasinya Izin Lingkungan dan Izin PPLH 17 Pertek Izin PPLH Terfasilitasinya Izin Lingkungan dan Izin PPLH 1 SKKL Terfasilitasinya Izin Lingkungan dan Izin PPLH	90 SPPL 17 Pertek Izin PPLH 1 SKKL 18 Rekomendasi UKL UPL	238.250.000	-	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							18 Rekomendasi UKL UPL				
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Kabupaten			Jumlah Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan dan penerapan sanksi upaya dan rencana PPLH 5 Sanksi Administratif	5 Sanksi Administratif	60.561.300	-	
			Program Tata Kota dan Kebersihan		Luasan RTH Publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan (unit RTH); Jumlah timbunan sampah di TPA Bakunci yang dapat di kurangi (Ton)	1 RTH; 3.650 Ton					Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penerangan Jalan Umum	Kabupaten			Jumlah Kecamatan yang mendapat pemeliharaan jaringan dan penerangan jalan umum 11 Kecamatan Jumlah Kecamatan yang dibayar tagihan rekening listrik untuk penerangan jalan umum 11 Kecamatan Jumlah Kecamatan yang terpasang jaringan dan penerangan jalan umum 11 Kecamatan	11 Kecamatan 11 Kecamatan 11 Kecamatan	9.151.030.980	-	
			Pertamanan dan Ruang Terbuka Hijau	Kabupaten			Jumlah Tugu, Gerbang dan Bangunan taman terpelihara 1 Tahun	1 Tahun	1.072.981.380	-	
			Kebersihan dan Limbah	Kabupaten			Tersedianya fasilitas penanganan sampah dan sistem penanggulangan volume sampah 1 Tahun	1 Tahun	8.736.740.919	-	



No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Program Penelitian dan Pengembangan Kualitas Lingkungan dan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan (K3)		Persentase penyelesaian pengujian tepat waktu di laboratorium lingkungan (%)	100 %					Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup UPT Laboratorium Lingkungan
			Pengembangan Laboratorium Lingkungan	Kabupaten			Jumlah Laporan 1 buah Laporan	1 buah Laporan	207.100.000	-	
			Pengujian dan Pelayanan Laboratorium Lingkungan	Kabupaten			Terlaksananya Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dengan adanya Kegiatan Pengujian dan Pelayanan Laboratorium Lingkungan 50 Parameter Terlaksananya Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dengan adanya Kegiatan Pengujian dan Pelayanan	50 Parameter 30 kali Pengujian 6 Jenis Sampel	926.457.931	-	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD	
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)					
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
							Laboratorium Lingkungan 30 kali Pengujian Terlaksananya Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dengan adanya Kegiatan Pengujian dan Pelayanan Laboratorium Lingkungan 6 Jenis Sampel					
			Pertanahan									
		Meningkatnya pengendalian pemanfaatan ruang	Program Administrasi Tata Guna Tanah dan Fasilitas umum		Terlaksananya pelayanan tata guna tanah dan fasilitas umum di wilayah kabupaten tanah laut	0 Dokumen					Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	
			Kegiatan Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Kabupaten			Jumlah Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan yang terlaksana 3 Dokumen	3 Dokumen	55.250.000	-		
			Kegiatan Inventarisasi Tanah Pemerintah Daerah dan Fasilitas Umum	Kabupaten			Jumlah Dokumen Konsolidasi Tanah Kabupaten Tanah Laut 2	2 Dokumen	82.549.600	-		

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Dokumen				
			Kegiatan Fasilitas Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan	Kabupaten			Jumlah Dokumen Inventarisasi Data Sengketa Konflik 3 Dokumen	3 Dokumen	71.734.400	-	
			Kegiatan Toponomi/Penamaan rupa unsur administrasi pemerintahan	Kabupaten			Jumlah Kegiatan izin lokasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten Tanah Laut 6 Kegiatan	6 Kegiatan	50.466.000	-	
			Kependudukan dan Catatan Sipil								
	Tata kelola birokrasi Pemerintahan	Meningkatnya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	Program Penataan Administrasi Kependudukan		FALSE	FALSE					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Pengembangan sistem administrasi kependudukan (SAK) terpadu (DAK)							-	-

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Koordinasi Antarlembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Administrasi Kependudukan						-	-	
			Sosialisasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan						-	-	
			Pembinaan, pengembangan dan pelayanan data dan informasi administrasi kependudukan		Cakupan pengelolaan dan pengembangan SIAK; Dokumen profil Kependudukan; Inovasi pelayanan administrasi kependudukan; Kerjasama pemanfaatan data yang ditindak lanjuti	100 %; 100 %; 100 %; 100 %					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pengembangan dan pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukan	SKPD, Kurau Kantor Kurau, Panyipatan Kantor Panyipatan , Bajuin Kantor Bajuin, Bati-Bati Kantor Bati-Bati, Batu Ampar Kantor Batu Ampar, Bumi Makmur, Pelaihari, Jorong Kantor Jorong, Takisung Kantor Takisung, Tambang Ulang Kantor Tambang Ulang, Kintap Kantor Kintap			Jumlah jaringan 14 Tower/2 Repeater Terbayarnya honor PTT,asuransi kesehatan,JKK dan JKM 20 orang 12 bulan	14 Tower/2 Repeater 20 orang 12 bulan	851.956.520	293.000.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pengembangan, pengolahan dan penyajian data kependudukan	Kabupaten			Terlaksananya monitoring database kependudukan 12 bulan	12 bulan	20.976.000	17.500.000	
			Pengembangan kerjasama dan inovasi pelayanan	Kabupaten			Jumlah PKS 12 Bulan	12 Bulan	10.925.000	134.090.000	
			Pelaksanaan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Sipil Peristiwa Penting	Kabupaten			Jumlah pelaksanaan pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting 12 bulan Jumlah inovasi layanan 2 inovasi Jumlah aplikasi inovasi layanan 1 buah	12 bulan 2 inovasi 1 buah	111.885.000	-	
			Program pendataan dan pelayanan pencatatan sipil		Cakupan penerbitan akta kelahiran; Rasio bayi berakta kelahiran; Rasio pasangan berakta nikah	100 %; 0,94 ; 0,09					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Pembinaan, pengembangan dan pelayanan perkawinan dan perceraian	Kabupaten			Jumlah pasangan kawin 45 pasang	45 pasang	14.245.000	45.000.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Kabupaten , SKPD			Jumlah penerbitan akta kelahiran 17.000 dokumen	17.000 dokumen	141.871.000	-	
			Program pendataan dan pelayanan pendaftaran penduduk		Cakupan penerbitan KTP elektronik; Rasio penduduk ber KTP persatuan penduduk; Cakupan pelayanan administrasi migrasi; Cakupan penduduk rentan administrasi kependudukan; Desa sadar administrasi kependudukan	100 %; 1 ; 100 %; 100 %; 100 %					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Pembinaan, pengembangan dan pelayanan identitas dan pendaftaran penduduk	Kabupaten			Terbayarnya honor PTT,asuransi kesehatan,JKK dan JKM 5 orang 12 bulan Jumlah KTP-el 30.000 dokumen Jumlah KIA 19.000 dokumen Jumlah KK 35.000 dokumen	5 orang 12 bulan 30.000 dokumen 19.000 dokumen 35.000 dokumen	362.346.880	386.000.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Kabupaten , SKPD			Jumlah desa 8 desa	8 desa	192.917.500	100	
			Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak								
	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	100 skor					Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	SKPD			Jumlah peserta FAD 40 Orang	40 Orang	34.702.800	-	
			Program Peningkatan Kualitas Hidup & perlindungan Perempuan dan Anak		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	81.427.600 skor					Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan	SKPD			Jumlah kasus kekerasan perempuan 10 kasus	10 kasus	71.658.600	71.658.600	



No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Kewenangan Kabupaten/Kota								
			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	SKPD			Jumlah kasus kekerasan anak 40 kasus	40 kasus	133.422.210	133.422.210	
	Tata kelola birokrasi Pemerintahan	Meningkatnya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	<b>Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan</b>		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	139.929.552 skor					Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Kegiatan pembinaan organisasi perempuan	SKPD			Jumlah kegiatan, pelatihan, seminar, pembinaan, kegiatan lomba-lomba, pertemuan organisasi perempuan 3 Organisasi	3 Organisasi	578.117.980	-	
			Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera								

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Program Advokasi dan Pengendalian Penduduk		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	507.463.55 %					Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Advokasi dan KIE Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)	SKPD			Jumlah Advokasi pelayanan komunikasi, informasi dan edukatif melalui media 4 media	4 media	54.452.838	60.000.000	
			Monev dan Pendataan Keluarga	SKPD			Jumlah peserta orientasi pembekalan pendataan keluarga di 11 kecamatan 310 kaorang	310 kaorang	54.533.800	60.000.000	
			Pengelolaan Sistem Informasi manajemen Pengendalian Penduduk, KB,PP&PA	SKPD			Jumlah pembinaan dan Pengawasan sistem informasi keluarga 11 Balai	11 Balai	17.295.000	17.295.000	
			Penyediaan dan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBK	SKPD			Jumlah sarana KIE yang disitribusikan 3.000 buah leaflet	3.000 buah leaflet	38.026.100	38.026.100	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui media Masa cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang	SKPD			jumlah media promosi dan KIE program KKBPK melalui media cetak dan elektronik serta media luar ruangan 4 media	4 media	70.094.800	70.094.800	
			Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	SKPD			Jumlah peserta sosialisasi pencatatan dan pengumpulan data keluarga 310 orang	310 orang	52.838.200	52.838.200	
			Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	SKPD			Jumlah sekolah yang dibentuk SSK 6 sekolah	6 sekolah	42.313.000	46.000.000	
			Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain	SKPD			Jumlah rumah data kependudukan dibentuk di desa kampung KB 4 buah	4 buah	42.995.280	45.000.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK)	SKPD			Jumlah peserta pertemuan penyerasian kebijakan pembangunan daerah kabupaten/kota terhadap Program KKBPK 11 kecamatan	11 kecamatan	26.124.700	29.000.000	
			Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera		Indeks Kepuasan Masyarakat	3 Nilai					Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Pembinaan Masyarakat Peduli KB dan Kesehatan Reproduksi	SKPD			Jumlah peserta KB yang terlayani alat kontrasepsi 900 implat	900 implat	27.748.880	30.000.000	
			Monev Pelayanan KB dan Pengelolaan Alkon	SKPD			Jumlah Monev Pelayanan KB dan Pengelolaan Alkon 12 bulan	12 bulan	385.556.608	385.556.608	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	SKPD			Jumlah peserta orientasi pemberdayaan ekonomi bagi kelompok UPPKS dan lomba UPPKS 40 orang	40 orang	62.414.795	64.000.000	
			Pembinaan Kelompok Bina Keluarga Sejahtera (BKS)	SKPD			Jumlah kelompok BKS yang dibina 50 kelompok	50 kelompok	1.437.788.880	1.437.788.880	
			Pelaksanaan Hari Keluarga Nasional (Harganas)	SKPD			Jumlah pelaksanaan pameran dalam rangka Harganas 2 kegiatan	2 kegiatan	39.983.080	42.000.000	
			Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, KR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	, SKPD()			Jumlah pembinaan program ketahanan keluarga di kecamatan 11 kecamatan	11 kecamatan	64.164.787	70.000.000	
			Ketenagakerjaan								
	Pengurangan Kemiskinan dan Transformasi Ekonomi	Menurunnya Angka Pengangguran	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja		presentase peserta latih yang berkompeten	50 %					Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
			Pelatihan Tenaga Kerja Siap Pakai	Kabupaten , Luar			jumlah orang 500 orang	500 orang	400.000.000	550.000.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Daerah, SKPD							
			Peningkatan Produktivitas kerja dan peningkatan kapasitas lembaga pelatihan kerja	Kabupaten , Luar Daerah, SKPD			jumlah orang 10 orang	10 orang	95.852.800	150.000.000	
			Pengembangan Sistem Pelatihan Kerja	Luar Daerah, Kabupaten , SKPD			jumlah orang 70 orang jumlah dokumen 1 dokumen	70 orang 1 dokumen	150.430.000	250.000.000	
			Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Luar Daerah, Kabupaten , SKPD			Jumlah Pembinaan 20 Orang	20 Orang	95.097.800	120.862.470	
			Program Peningkatan Kesempatan Kerja		tingkat kesempatan kerja	3 %					Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
			Pelayanan ketenagakerjaan, penyusunan database tenaga kerja dan penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja	Luar Daerah, Kabupaten , SKPD			jumlah dokumen 1 dokumen	1 dokumen	50.000.000	-	
			Fasilitasi perluasan kesempatan kerja	Kabupaten , Luar Daerah, SKPD			jumlah orang 160 orang	160 orang	170.000.000	250.000.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pelayanan antar kerja	Luar Daerah, Kabupaten , SKPD			Jumlah pencaker yang ditempatkan 80 Pencaker	80 Pencaker	198.000.000	230.000.000	
			Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Kabupaten , Luar Daerah, SKPD			Jumlah Pencaker yang mendapatkan bimbingan 100 Pencaker	100 Pencaker	50.000.000	75.000.000	
			Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Luar Daerah, Kabupaten , SKPD			Jumlah monitoring kegiatan LPTKS 4 Kali	4 Kali	3.037.100	3.492.665	
			Job Fair/Bursa Kerja	Luar Daerah, Kabupaten , SKPD			Jumlah Job Fair Terlaksana 1 Kali	1 Kali	121.440.500	228.265.915	
			Pemberdayaan Pkerja Migran Indonesia Puma Penempatan	Luar Daerah, Kabupaten , SKPD			Jumlah PMI / Keluarga yang mendapatkan 40 Orang	40 Orang	50.000.000	60.000.000	
			Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Harmonisasi Hubungan Industrial		cakupan sengketa perusahaan pekerja yang diselesaikan	22,5 %					Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
			Fasilitasi Pelayanan Persyaratan Tenaga Kerja	Luar Daerah, Kabupaten , SKPD			jumlah orang 800 orang	800 orang	62.500.000	65.000.000	
			Fasilitasi Pelayanan Sistem Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga kerja	Luar Daerah, Kabupaten , SKPD			jumlah orang 16.000 orang	16.000 orang	32.500.000	50.000.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD	
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)					
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten , Luar Daerah, SKPD			Jumlah Kasus 9 Kasus	9 Kasus	99.000.000	115.000.000		
			Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah									
			Program Peningkatan Kualitas Pengembangan Koperasi dan UMK		koperasi aktif	90 Unit					Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan	
			Fasilitasi Pengembangan Koperasi dan UKM	Kabupaten , SKPD				terlaksananya fasilitasi kemitraan bagi pelaku usaha mikro 1 kali	1 kali	27.581.000	27.581.000	
			Pembinaan, Pengawasan dan manajemen pengelolaan koperasi	Kabupaten , SKPD				terlaksananya sosialisasi permodalan 1 Kali terlaksananya pameran promosi produk UMKM 1 kali	1 Kali 1 kali	77.858.500	77.858.500	



No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Peningkatan kapasitas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (DAK Non Fisik)	Kabupaten , SKPD			terlaksananya sosialisasi sistem pengendalian internal (SPI) bagi pengawas koperasi 1 kali	1 kali	69.703.800	69.703.800	
			Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Kabupaten , SKPD			terlaksananya pelatihan kewirausahaan 1 kali	1 kali	29.620.500	29.620.500	
			Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Kabupaten , SKPD			Terlaksananya pendataan potensi usha mikro se kabupaten tanah laut 2 kali	2 kali	39.940.000	39.940.000	
			Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi		koperasi aktif	90 Unit					Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan
			Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (DAK Non Fisik)	Kabupaten , SKPD			terlaksananya pendampingan / pembinaan kelembagaan kopoerasi 12 bulan	12 bulan	68.500.000	68.500.000	
			Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi	Kabupaten , SKPD			terlaksananya pengawasan koperasi 1 kali	1 kali	36.796.200	36.796.200	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD	
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)					
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Kewenangan Kabupaten/Kota									
			Penanaman Modal									
			program peningkatan realisasi perijinan dan non perijinan pelaku jenis non usaha		Indek Kepuasan Masyarakat	80,25 Baik					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
			penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan jenis non usaha	SKPD			Jumlah perizinan dan non perizinan Non Usaha 456 izin	456 izin	70.000.000	70.000.000		
			Koordinasi antar tim teknis dalam penyelenggaraan perizinan dan non perizinan jenis non usaha	SKPD			Jumlah rapat koordinasi antar Tim Teknis 6 kali	6 kali	8.000.000	8.000.000		
			program peningkatan realisasi perijinan dan non perijinan pelaku jenis usaha		Indek Kepuasan Masyarakat	80,25 Baik					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan jasa usaha	SKPD			Jumlah Perizinan dan Non Perizinan Jasa Usaha 2.757 izin	2.757 izin	65.000.000	65.000.000	
			Koordinasi antar tim teknis dalam penyelenggaraan perizinan dan non perizinan jenis usaha	SKPD			Jumlah rapat koordinasi antar Tim Teknis 6 kali	6 kali	8.000.000	8.000.000	
			program pengembangan investasi daerah		Jumlah Realisasi Investasi	845.192.000.000 Rupiah					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Peningkatan Promosi dan kerjasama investasi	SKPD			Jumlah Forum Koordinasi Investasi bagi UKM/IKM 3 Kali Jumlah Promosi Potensi Investasi di dalam dan luar provinsi 3 Kali	3 Kali 3 Kali	180.000.000	180.000.000	
			penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal	SKPD			Jumlah Kesepakatan 6 Kesepakatan Jumlah Perizinan Penanaman Modal Yang Baru 210 Izin	6 Kesepakatan 210 Izin	63.000.000	63.000.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD	
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)					
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Monitoring, evaluasi dan pelaporan	SKPD			Jumlah Kecamatan 5 Kecamatan	5 Kecamatan	63.000.000	63.000.000		
			Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	SKPD			Jumlah Kecamatan 5 Kecamatan	5 Kecamatan	63.000.000	63.000.000		
			Pembuatan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian/Insentif dan Kemudahn Penanaman Modal	SKPD			Jumlah Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen	120.000.000	-		
			Program peningkatan pelayanan perijinan dan non perijinan		Indek Kepuasan Masyarakat	80,25 Baik					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
			Pengembangan sistem pelayanan dan inovasi pelayanan perijinan dan non perijinan	SKPD				Jumlah Sistem Aplikasi yang terpelihara 1 Sistem	1 Sistem	15.000.000	25.000.000	
			Penyusunan/revisi standar operasional prosedur	SKPD				Jumlah Pembuatan/Revisi SOP perizinan dan non perizian 1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000	20.000.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penyusunan data dan bahan pelaporan penyelenggaraan perijinan dan non perijinan	SKPD			Jumlah Dokumen data dan bahan pelaporan perizinan dan non perizinan 1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000	10.000.000	
			Penyebarluasan informasi pelayanan publik	SKPD			Jumlah jenis media penyebarluasan informasi 4 Jenis	4 Jenis	80.000.200	90.000.000	
			Survey kepuasan masyarakat	SKPD			Survey Indeks Kepuasan Masyarakat 1 Dokumen	1 Dokumen	19.525.900	17.500.000	
			Peningkatan peforma pelayanan perizinan dan non perizinan	SKPD			Jumlah orang yang mengikuti bintek pelayanan 25 orang	25 orang	-	75.000.000	
			Kebudayaan								
	Tata kelola birokrasi Pemerintahan	Meningkatnya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	Program Pengembangan Pelestarian Adat Dan Kebudayaan Daerah		% Budaya lokal yang dilestarikan	100 %					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Pembinaan pengembangan pelestarian cagar budaya daerah	SKPD			jumlah makam 3 makam keramat	3 makam keramat	561.665.000	130.000.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD	
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)					
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Pembinaan pengembangan pelestarian sejarah dan tradisi budaya daerah	SKPD			jumlah kecamatan 10 kecamatan	10 kecamatan	426.895.000	130.000.000		
			Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	SKPD			jumlah lomba 9 lomba jumlah even 45 even	9 lomba 45 even	1.400.335.600	1.400.335.600		
			Kepemudaan dan Olahraga									
			Program Pembinaan dan Pengembangan Olah Raga		jumlah cabang olahraga dan atlet berprestasi	0 jumlah 30 cabang olahraga dan 68 atlet berprestasi					Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	
			Pembinaan dan Pengembangan Olah Raga Pendidikan dan Olah Raga Prestasi	SKPD				Terlaksananya penyelenggaraa n kejuaraan olahraga multi event dan sigle event tingkat kabupaten/kota 5 cabor	5 cabor	1.157.864.100	1.273.650.510	
			Pembinaan dan Pengembangan Olah raga Rekreasi	SKPD				Terfasilitasi kebugaran olahraga rekreasi untuk meningkatkan kesehatan, kesenangan, tantangan dan	8 cabor	401.338.600	441.472.460	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							hubungan sosial 8 cabor				
			Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kab/Kota	SKPD			Terlaksananya penyelenggaraa n kejuaraan dan pekan olahraga tingkat kabupaten/kota 10 cabor	10 cabor	727.173.100	799.890.410	
			Seleksi Atlet Daerah	SKPD			Terlaksananya seleksi atlet daerah 160 orang	160 orang	52.388.000	57.626.800	
			Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	SKPD			Terlaksananya pemusatan latihan daerah, ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan (sport science) 140 orang	140 orang	73.500.000	80.850.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kab/Kota	SKPD			Terlaksananya pembinaan dan pengembangan atlet berprestasi kabupaten/kota 20 alat olahraga Terlaksananya pembinaan dan pengembangan atlet berprestasi kabupaten/kota 10 pakaian tanding	20 alat olahraga 10 pakaian tanding	102.586.400	112.845.040	
			Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Kabupaten			terbinanya pengembangan olahraga organisasi KONI, NPC, dan PERSETALA 3 organisasi	3 organisasi	5.190.000.000	5.709.000.000	
			Penyediaan Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	SKPD, Bumi Makmur, Jorong Kantor Jorong			Tersedianya dan terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga 8 sarpras	8 sarpras	1.741.182.826	1.915.301.109	



No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penyelenggaraan Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	SKPD			Terfasilitasi kebugaran olahraga rekreasi untuk meningkatkan kesehatan, lesenangan, tantangan dan hubungan sosial 2 cabor	2 cabor	107.031.200	117.734.320	
			Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	SKPD			Terfasilitasi kebugaran olahraga rekreasi untuk meningkatkan kesehatan, kesenangan, tantangan dan hubungan sosial 8 cabor	8 cabor	538.217.200	592.038.920	
			Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	SKPD			Terfasilitasi kebugaran olahraga rekreasi untuk meningkatkan kesehatan, kesenangan, tantangan dan hubungan sosial 5 sosial	5 sosial	165.136.500	181.650.150	
			Program Peningkatan Pembinaan Kepemudaan			jumlah organisasi pemuda aktif	0 jumlah 5 OKP dan 5 Wirausaha				

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	SKPD			Jumlah pemuda kader 25 orang	25 orang	117.615.500	129.377.050	
			Pengembangan Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda	SKPD			Jumlah pemuda yang mengikuti kemitraan dengan dunia usaha 200 orang	200 orang	171.421.600	188.563.760	
			Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Kabupaten			terbinanya organisasi kepemudaan KNPI 1 organisasi	1 organisasi	750.000.000	825.000.000	
			Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	SKPD			Jumlah peserta pemuda dan organisasi kepemudaan 20 PSP3 Jumlah peserta pemuda dan organisasi kepemudaan 15 OKP Jumlah peserta pemuda dan organisasi kepemudaan 100 pemuda	20 PSP3 15 OKP 100 pemuda	751.148.000	826.262.800	
			Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana	SKPD			Jumlah prasarana dan sarana 1 sarpras	1 sarpras	143.378.300	157.716.130	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD	
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)					
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Kepemudaan Kab/Kota									
			Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	SKPD			Terbentuknya pasukan paskibraka kabupaten tanah laut tahun 2020 45 orang	45 orang	1.286.400.000	1.415.040.000		
			Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	SKPD			Jumlah organisasi kepramukaan 10 saka	10 saka	104.432.200	114.875.420		
		Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian										
			Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia		Nilai IKM	3 Nilai					Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	SKPD			Terlaksanannya pembelian Alat Kantor 10 Jenis	10 Jenis	85.600.000	-		
			Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	SKPD			Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional 12 Bulan	12 Bulan	168.350.000	-		
			Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor	SKPD			Jumlah Gedung 1 Gedung	1 Gedung	190.000.000	-		

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Peningkatan Kemampuan Teknis Aparatur	SKPD			Terlaksananya peningkatan kemampuan teknis aparatur 25 Orang	25 Orang	95.004.026	-	
			Pengadaan Mebeleur	SKPD			Terlaksananya Pembelian Alata Rumah Tangga 4 Jenis	4 Jenis	86.500.000	-	
			Program Mutasi, Data dan Informasi		Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi Pada Instansi Pemerintah; Jumlah Jabatan Administrasi Pada Instansi Pemerintah; Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu pada Instansi Pemerintah	0 Orang; 0 Orang; 0 Orang					Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
			Pembinaan, Penanganan Disiplin, dan Penghargaan ASN	SKPD			Jumlah Dokumen 150 SK Pensiun Jumlah Orang 150 Orang	150 SK Pensiun 150 Orang	7.480.790	-	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penyusunan Rencana Pembinaan dan Pengembangan Karier ASN	SKPD			Jumlah Mutasi ASN Dalam Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional 600 Orang Jumlah Mutasi dan Promosi Jabatan Bagi ASN Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrasi, dan Fungsional 350 Orang	600 Orang 350 Orang	286.904.060	-	
			Pembangunan, Pengembangan, dan Pelayanan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah	SKPD			Jumlah Dokumen Pelayanan Publikasi dan Informasi Kepegawaian 5 Dokumen	5 Dokumen	167.280.760	-	
			Pengelolaan Mutasi ASN	SKPD			Jumlah Mutasi ASN Keluar Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut 15 Orang Jumlah Mutasi ASN Masuk Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut 15 Orang	15 Orang 15 Orang 150 Orang	10.836.000	-	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Orang 150 Orang				
			Pengelolaan Penempatan dalam Jabatan ASN	SKPD			Promosi Jabatan ASN Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi 5 Orang	5 Orang	157.447.160	-	
			Pengelolaan Data Kepegawaian	SKPD			Jumlah Arsip Konvensional ASN Kabupaten Tanah Laut 500 Arsip Konvensional	500 Arsip Konvensional	61.085.300	-	
			Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	SKPD			Pembaharuan Aplikasi Pelayanan Publikasi dan Informasi Kepegawaian 5 Aplikasi Kepegawaian	5 Aplikasi Kepegawaian	448.000.000	-	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	SKPD			Jumlah Surat Keputusan Bupati Tentang Kenaikan Gaji Berkala 1.500 Orang Jumlah Surat Keputusan Bupati Tentang Kenaikan Pangkat ASN 1.200 Orang	1.500 Orang 1.200 Orang	282.796.900	-	
			Program Pembinaan, Pengembangan dan Formasi Aparatur		Rata - Rata Lama Pegawai Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan; Persentase ASN Yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal; Persentase Pejabat ASN Yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural; Persentase Pejabat ASN Yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural	0 Jam; 0 %; 0 %; 0 %					Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pembinaan dan Pengembangan Kediklatan Aparatur	SKPD			Jumlah Peserta Pelatihan Dasar Calon ASN 82 Orang Jumlah Peserta Diklat Fungsional 0 Orang Jumlah Peserta Diklat Teknis 50 Orang Jumlah Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tk. II 2 Orang Jumlah Peserta Pelatihan Kepemimpinan Pengawas 0 Orang Jumlah Peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator 4 Orang	82 Orang 0 Orang 50 Orang 2 Orang 0 Orang 4 Orang	1.630.490.100	-	
			Pembinaan, Pengembangan Formasi, dan Pengadaan ASN	SKPD			Jumlah Dokumen Formasi Kepegawaian 1 Dokumen Terlaksananya Kegiatan Seleksi Calon ASN Formasi Tahun 2020 250 Orang	1 Dokumen 250 Orang	489.799.700	-	



No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pembinaan, Penjenjangan Karier, dan Fasilitasi Profesi Aparatur	SKPD			Jumlah ASN Yang Mengikuti Asesment 91 Orang	91 Orang	668.475.000	-	
			Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	SKPD			Jumlah ASN Yang Menerima Bantuan Biaya Pendidikan Tugas Belajar 10 Orang Jumlah ASN Yang Menerima Bantuan Biaya Penyusunan Tugas Akhir / Skripsi / Tesis / Disertasi 72 Orang Jumlah ASN Yang Menerima Bantuan Biaya Penyertaan Ujian Dinas 50 Orang Jumlah ASN Yang Menerima Bantuan Biaya Penyertaan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah 25 Orang	10 Orang 72 Orang 50 Orang 25 Orang	598.000.000	-	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia		IKM	0 Baik					Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	SKPD			Jumlah Jenis 2 Jenis	2 Jenis	-	-	
			Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	SKPD			Jumlah Jenis Bahan Baku Bangunan 18 Jenis Upah Tukang Dalam Rangka Pemeliharaan / Perbaikan Bangunan, Instalasi Air, Pengecetan Gedung, Pengecetan Pagar, dan Pemotongan Ranting / Dahan Pohon Pada Kantor BKPSDM dan Asrama Diklat Loka Bina Praja 80 Orang / Kali Upah Tukang Dalam Rangka Pemeliharaan / Perbaikan Instalasi Listrik	18 Jenis 80 Orang / Kali 20 Titik	29.722.200	-	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Pada Kantor BKPSDM Dan Asrama Diklat Loka Bina Praja 20 Titik				
			Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	SKPD			Jumlahg Baju Batik / Sasirangan 50 Stell	50 Stell	20.000.000	-	
			Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia		IKM	0 Nilai					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	SKPD			Terlaksananya perawatan kendaraan dinas dan pembelian BBM kendaraan bemotor roda 4 4 Unit Terlaksananya perawatan kendaraan dinas dan pembelian BBM kendaraan bemotor roda 2 15 Unit	4 Unit 15 Unit	223.850.000	223.850.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor	SKPD			Terlaksananya rehabilitasi sedang gedung kantor (atap, plafon, pengecatan gedung/pagar, parkir, ruang arsip & halaman) 12 Bulan	12 Bulan	239.900.000	250.000.000	
			Peningkatan Kemampuan Teknis Aparatur	SKPD			Terikutinya bimtek, workshop dan sejenisnya yang diikuti 50 ASN	50 ASN	75.000.000	100.000.000	
			Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Gedung Kantor	SKPD			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor 12 bulan	12 bulan	25.000.000	30.000.000	
			Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia		Nilai IKM	78,28					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Peningkatan Kemampuan Teknis Aparatur	Luar Daerah, Kabupaten			Jumlah orang 20 orang	20 orang	-	-	
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	SKPD			Jumlah orang 57 stell	57 stell	-	-	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD	
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)					
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	SKPD			Jumlah peralatan kantor 6 macam	6 macam	45.984.400	-		
			Pengadaan Mebeleur	SKPD			Jumlah mebeleur yang terbeli 5 jenis	5 jenis	16.000.000	120.000.000		
			Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Gedung Kantor	SKPD			Jumlah peralatan kantor yang terpelihara 5 macam	5 macam	65.837.000	245.520.000		
			Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	SKPD			Jumlah kendaraan roda 2 dan roda 4 yang terpelihara 12 buah	12 buah	87.580.500	31.464.000		
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	SKPD			Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor 1 buah	1 buah	5.800.000	-		
			Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia			Nilai IKM	0 Nilai					Dinas Perhubungan
			Pengadaan Mebeleur	SKPD				Jumlah Mebeluer 12 Unit	12 Unit	17.153.152	18.000.000	
			Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	SKPD				Jumlah Kendaraan Dinas terpelihara 31 Unit	31 Unit	94.605.000	95.000.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD	
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)					
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia		Indeks Kepuasan Masyarakat	0 Nilai					Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	
			Peningkatan Kemampuan Teknis Aparatur	SKPD			Jumlah orang 20 orang	20 orang	65.000.000	-		
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	SKPD			Jumlah orang 220 Orang	220 Orang	66.000.000	-		
			Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Gedung Kantor	SKPD			Jumlah unit 2 unit	2 unit	75.000.000	-		
			Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	SKPD			Jumlah unit 2 unit	2 unit	356.460.000	-		
			Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH			Persentase temuan yang bersifat material pada obrik	50 %					Inspektorat Kabupaten
			Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala	SKPD				Jumlah Obrik yang diaudit 120 obyek	120 obyek	612.279.400	622.279.400	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Laporan harta kekayaan aparatur sipil negara (LHKASN)	SKPD			Jumlah Pelaksanaan Asistensi Pendampingan pengisian LHKSN 2 Kali	2 Kali	35.580.936	37.580.936	
			Review Kinerja dan Keuangan	Kabupaten			Jumlah Obyek yang direview 12 obyek	12 obyek	112.071.700	114.000.000	
			Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	SKPD			Jumlah Monitoring TLHP 120 obrik	120 Obrik	441.250.400	451.250.400	
			Audit Kinerja dan Keuangan	Kabupaten			Jumlah Obrik yang diaudit dengan tujuan tertentu 5 Obrik	5 Obrik	191.102.200	194.000.000	
			Program peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (GG)		Level Maturitas SKPD	3,2					Inspektorat Kabupaten
			Evaluasi Reformasi Birokrasi	SKPD			Jumlah laporan RB SKPD Lingkup Pemkab Tanah Laut 1 Dokumen	1 Dokumen	38.291.526	38.291.526	
			Pengawasan Pelaksanaan Zona Integritas menuju wilayah bebas korupsi (ZI-WBK)	SKPD			Jumlah laporan hasil reuiu ZI-WBK SKPD Lingkup Pemkab Tanah Laut 1 Dokumen	1 Dokumen	119.370.016	119.370.016	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Sistem pengendalian intern pemerintahan (SPIP)	SKPD			Jumlah Pelaksanaan Asistensi Pendampingan dan money SPIP 29 SKPD	29 SKPD	62.628.045	62.628.045	
			Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja SKPD (SAKIP)	SKPD			Jumlah laporan hasil penilaian SAKIP SKPD Lingkup Pemkab Tanah Laut 40 SKPD	40 SKPD	38.291.527	40.291.527	
			Sinergitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan	SKPD			Jumlah rapat Sinergitas wilayah bebas Korupsi 6 Kali	6 Kali	162.344.300	182.344.300	
			Saber Pungli	SKPD			Jumlah pelaksanaan fasilitasi Rapat Tim Saber Pungli 10 Kali	10 Kali	217.887.948	220.887.948	
			Evaluasi Kapabilitas APIP	SKPD			Jumlah Pelaksanaan pendampingan penilaian kapasitas APIP 4 Kali	4 Kali	12.988.700	14.287.570	
			Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia			Prosentase pemenuhan sarana, prasarana dan kompetensi SDM APIP	90 %				



No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor	SKPD			Jumlah rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 1 Paket	1 Paket	100.000.000	-	
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	SKPD			Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya 50 stel	50 stel	25.000.000	-	
			Peningkatan kemampuan teknis aparat pengawasan	SKPD			Jumlah aparat pengawasan/auditor yang mengikuti diklat atau Bimtek 26 orang	26 orang	238.211.300	338.063.565	
			Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	SKPD			Jumlah Pengadaan Pc dan Laptop 2 Jenis	2 Jenis	118.075.000	118.075.000	
			Pemeliharaan Rutin Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	SKPD			Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 6 Jenis alat	6 Jenis alat	64.600.000	67.830.000	
			Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	SKPD			Jumlah Pemenuhan Pemeliharaan BBM dan Pelumas kendaraan Dinas 12 Bulan	12 Bulan	176.294.200	208.790.610	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia		Indek Kepuasan Masyarakat	80,25 Baik					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Peningkatan Kemampuan Teknis Aparatur	SKPD			Jumlah orang yang mengikuti bintek Pelayanan 25 orang	25 orang	75.000.000	75.000.000	
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	SKPD			Tersedianya Pakaian Dinas Harian 33 stel Jumlah Sepatu Septy untuk tinnjau Lapangan 10 Pasan	33 stel 10 Pasan	28.950.000	30.150.000	
			Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	SKPD			Jumlah Jenis Kendaraan Roda 4 yang dipelihara 3 Buah Jumlah Jenis Kendaraan Roda 2 Yang dipelihara 7 Buah Jumlah Orang PTT yang Terbayar Honorinya 1 Orang	3 Buah 7 Buah 1 Orang	48.400.000	50.000.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia		Jumlah Unit	1					Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			Peningkatan Kemampuan Teknis Aparatur	SKPD			Jumlah orang 10 orang	10 orang	50.000.000	55.000.000	
			Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia		Nilai IKM	0 Baik					Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	SKPD			Jumlah Stel pakaian dinas beserta perlengkapannya 36 Stel	36 Stel	38.940.100	-	
			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	SKPD			Jumlah Jenis yang diadakan 9 jenis	9 jenis	86.557.200	-	
			Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	SKPD			Jumlah Pakaian Khusus hari hari tertentu 52 buah	52 buah	10.400.000	-	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia		Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	3 Nilai					Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	SKPD			Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara 7 unit, honor PTT 2 orang	7 unit, honor PTT 2 orang	116.280.000	116.280.000	
			Pengadaan Mebeleur	SKPD			Jumlah kursi rapat yang terbeli 50 buah	50 buah	22.500.000	22.500.000	
			Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	SKPD			Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara 21 unit	21 unit	11.100.000	11.100.000	
			Pengadaan peralatan gedung kantor	SKPD			Jumlah peralatan gedung kantor yang terbeli 3 unit, 5 unit, 4 unit	3 unit, 5 unit, 4 unit	26.650.000	26.650.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	SKPD			Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara 1 unit	1 unit	39.000.000	39.000.000	
			Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia		Indeks kepuasan masyarakat	0 Nilai					Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan
			Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Kabupaten , SKPD			Tersedianya sarana dan prasarana operasional kegiatan 1 buah	1 buah	250.000.000	250.000.000	
			Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Kabupaten , SKPD			Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya 3 jenis	3 jenis	21.000.000	21.000.000	
			Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Luar Daerah, SKPD			Terlaksananya kegiatan bimbingan teknis implementasi peraturan perundangan 6 orang	6 orang	76.107.000	76.107.000	
			Pengadaan perlengkapan gedungkantor	Kabupaten , SKPD			Tersedianya prasarana perlengkapan gedung kantor 8 jenis	8 jenis	30.000.000	30.000.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pengadaan Mebeleur	Kabupaten , SKPD			terlaksananya kegiatan pengadaan mebelier 7 jenis	7 jenis	14.000.000	14.000.000	
			Pengadaan peralatan gedung kantor	Kabupaten , SKPD			Tersedianya prasarana peralatan gedung kantor 3 jenis	3 jenis	18.000.000	18.000.000	
			Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kabupaten , SKPD			terlaksananya pemeliharaan rutin berkala gedung kantor 1 jenis	1 jenis	25.000.000	25.000.000	
			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kabupaten , SKPD			Terwujudnya pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas 28 buah	28 buah	122.790.000	122.790.000	
			Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia		Persentase kepuasan pelanggan pada rumah sakit	0 %					Dinas Kesehatan RSUD H. Boejasin Pelaihari
			Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Kabupaten , Pelaihari			Jumlah jenis Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 8 buah	8 buah	160.000.000	-	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Kabupaten , Pelaihari			Jumlah jenis Pengadaan dan penyediaan sarana dan prsarana perkantoran 9 jenis	9 jenis	1.002.626.960	-	
			Pengadaan Mebeleur	Kabupaten , Pelaihari			Jumlah jenis Pengadaan mebeuler 6 jenis	6 jenis	212.480.000	-	
			Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Kabupaten , Pelaihari			Jumlah jenis pakaian kerja lapangan 400 stel	400 stel	144.000.000	-	
			Pemeliharaan Rutin Berkala Mobil Jabatan	Kabupaten , Pelaihari			Jumlah pemeliharaan mobil jabatan 2 jenis	2 jenis	40.000.000	-	
			Pemeliharaan Rutin Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Kabupaten , Pelaihari			Jumlah pemeliharaan perlengkapan gedung kantor 11 jenis	11 jenis	467.707.855	-	
			Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Kabupaten , Pelaihari			Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas 3 jenis	3 jenis	407.840.160	-	
			Pengadaan Mobil Jabatan	Kabupaten , Pelaihari			Jumlah jenis Pengadaan Mobil Jabatan 1 buah	1 buah	200.000.000	-	
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kabupaten , Pelaihari			Jumlah pemeliharaan gedung kantor 4 jenis	4 jenis	181.860.000	-	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	1 Nilai					Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
			Peningkatan Kemampuan Teknis Aparatur	SKPD			Jumlah Orang 6 Orang	6 Orang	84.000.000	90.000.000	
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	SKPD			Jumlah Stell 190 stell	190 stell	256.500.000	300.000.000	
			Pengadaan Mebeleur	SKPD			Jumlah Item 13 Item	13 Item	73.430.000	75.000.000	
			Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah		IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	0 75					Sekretariat DPRD
			Fasilitasi Rapat-Rapat Kegiatan DPRD	SKPD			255 Rapat	255 Rapat	405.596.200	466.436.000	
			Fasilitas Bimbingan Teknis DPRD	SKPD			Jumlah kegiatan 3 Kali	3 Kali	1.081.448.200	1.243.665.000	
			Pembahasan rancangan peraturan daerah	SKPD			15 Dokumen	15 Dokumen	2.775.500.000	3.191.825.000	
			Penyediaan Fasilitas Fraksi DPRD	SKPD			8 fraksi	8 fraksi	29.664.600	34.114.000	



No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan Lain yang terkait dengan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	SKPD			4 Dokumen	4 Dokumen	8.300.000	9.545.000	
			Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	SKPD			1 Tahun	1 Tahun	22.857.352.220	26.285.955.000	
			Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	SKPD			35 org	35 org	70.000.000	80.500.000	
			Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	SKPD			183 Stell	183 Stell	455.650.000	523.997.500	
			Penyusunan Tenaga Ahli Fraksi	SKPD			8 org	8 org	299.638.000	344.584.000	
			Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	SKPD			1 Dokumen	1 Dokumen	6.558.900	7.543.000	
			Penyusunan Program Kerja DPRD	SKPD			1 Dokumen	1 Dokumen	3.528.000	4.057.000	
			Kunjungan Kerja Dalam Daerah	SKPD			350 SPPD	350 SPPD	555.350.000	638.655.000	
			Pelaksanaan Reses	SKPD			3 kali reses	3 kali reses	1.526.160.600	1.755.085.000	
			Penyusunan Kode Etik	SKPD			1 Dokumen	1 Dokumen	267.134.000	307.204.000	
			Pengawasan Kode Etik	SKPD			1 Dokumen	1 Dokumen	961.000	1.106.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Fasilitas, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	SKPD			4 Dokumen	4 Dokumen	317.992.000	265.690.000	
			Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	SKPD			1.000 SPPD	1.000 SPPD	9.490.040.600	10.913.547.000	
			Penyusunan Laporan Kinerja Pimpinan DPRD	SKPD			4 Dokumen	4 Dokumen	1.360.000	1.564.000	
			Pelaksanaan Undangan DPRD	SKPD			2.500 undangan	2.500 undangan	30.200.000	34.730.000	
			Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	SKPD			1 Dokumen Propemperda	1 Dokumen Propemperda	233.561.000	268.595.000	
			Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	SKPD			6 Dokumen	6 Dokumen	21.550.000	24.783.000	
			Fasilitas Penyusunan Naskah Akademik	SKPD			3 Dokumen	3 Dokumen	608.114.000	699.330.000	
			Penyusunan Tata Tertib DPRD	SKPD			1 Dokumen	1 Dokumen	266.309.000	306.255.000	
			Pembahasan Laporan Semester	SKPD			1 Dokumen	1 Dokumen	1.858.100	2.137.000	
			Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	SKPD			1 Dokumen	1 Dokumen	9.617.100	11.060.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD	
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)					
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		FALSE	FALSE					Sekretariat DPRD	
			Pendidikan dan pelatihan formal	SKPD			Jumlah Orang 12 Orang	12 Orang	80.000.000	92.000.000		
			Program Pengelolaan Informasi, Humas, Keprotokolan dan Perlengkapan DPRD		IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	0 75					Sekretariat DPRD	
			Pelayanan Informasi, Kehumasan dan Publikasi kegiatan DPRD	SKPD			3 Dokumen, 250 kali keg DPRD	3 Dokumen, 250 kali keg DPRD	320.600.000	368.690.000		
			Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	SKPD			5 jenis	5 jenis	87.500.000	100.625.000		
			Penyusunan bahan Komunikasi dan Publikasi	SKPD			4 Media	4 Media	50.890.000	58.523.500		
			Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia		IKM	0 75					Sekretariat DPRD	
			Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional	SKPD				2 unit	2 unit	12.500.000	14.375.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	SKPD			3 bh Desain RAB	3 bh Desain RAB	150.000.000	1.500.000.000	
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	SKPD			35 stell	35 stell	29.750.000	34.212.500	
			Pengadaan perlengkapan gedungkantor	SKPD			Jumlah Jenis 8 Jenis	8 Jenis	35.400.000	40.710.000	
			Pengadaan Mebeleur	SKPD			5 Jenis barang	5 Jenis barang	184.000.000	211.600.000	
			Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	SKPD			3 item	3 item	24.400.000	28.060.000	
			Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	SKPD			6 jenis	6 jenis	31.700.000	36.455.000	
			Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	SKPD			3 item	3 item	72.000.000	82.800.000	
			Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	SKPD			4 Unit (1 thn )	4 Unit (1 thn )	40.000.000	46.000.000	
			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	SKPD			26 unit	26 unit	30.600.000	35.190.000	
				Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya		Nilai IKM	0 Nilai				

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Manusia								
			Pendidikan dan pelatihan formal	SKPD			Jumlah pendidikan 1 Tahun	1 Tahun	36.000.000	39.690.000	
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	SKPD			Jumlah stel pakaian dinas 22 Stel	22 Stel	8.800.000	8.800.000	
			Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	SKPD			Jumlah pemeliharaan 2 Buah	2 Buah	91.655.000	112.350.000	
			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	SKPD			Jumlah pemeliharaan 5 Buah	5 Buah	72.342.480	98.866.845	
			Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia		Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana dan Prasarana Aparatur, Serta Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0 %					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Kabupaten , SKPD			jumlah pakaian batik tradisional ( sasirangan ) bagi ASN yang diadakan 36 set	36 set	12.600.000	-	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia		Indeks Kepuasan Masyarakat	0 indeks					Dinas Kesehatan
			Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Kabupaten , SKPD			Jumlah sosialisasi peraturan perundang-undangan 1 tahun	1 tahun	50.312.000	-	
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	SKPD			Jumlah pengadaan pakaian dinas dan perlengkapannya 100 buah	100 buah	48.000.000	-	
			Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	SKPD			Jumlah pengadaan perlengkapan kantor 3 jenis	3 jenis	231.600.000	-	
			Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	SKPD			Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor 3 jenis	3 jenis	164.049.320	-	
			Pengadaan Mebeleur	SKPD			Jumlah pengadaan mebeleur 2 jenis	2 jenis	121.600.000	-	
			Pengadaan Pakaian Kerja Korpri	SKPD			Jumlah pengadaan pakaian korpri 100 buah	100 buah	30.000.000	-	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	SKPD			Jumlah bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 1 tahun	1 tahun	28.160.000	-	
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	SKPD			Jumlah peningkatan mutu gedung kantor 1 buah	1 buah	106.560.000	-	
			Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia		Indeks Kepuasan Masyarakat	0 Jenis					Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Batakan
			Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Panyipatan Kantor Panyipatan			Jumlah jenis pemeliharaan sarana prasarana perkantoran 0 Jenis Jumlah pemeliharaan rutin kendaraan dinas/operasional 2 jenis	0 Jenis 2 jenis	27.100.000	-	
			Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor				Jumlah jenis pengadaan perlengkapan Gedung 0	0	23.598.000	-	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pengadaan Peralatan Gedung Kantor				Jumlah jenis Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 0	0	86.617.000	-	
			Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Gedung Kantor				Jumlah Pemeliharaan Gedung Kantor 0	0	500.000	-	
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor				Jumlah Pemeliharaan Gedung Kantor 0	0	8.353.400	-	
			Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia		Indeks kepuasan masyarakat	0 indeks					Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Kurau
			Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	SKPD, Kurau Kantor Kurau			1 Paket	1 Paket	7.655.000	-	
			Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Gedung Kantor	SKPD, Kurau Kantor Kurau			1 paket	1 paket	18.850.000	-	
			Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	SKPD, Kurau Kantor Kurau			2 jenis	2 jenis	31.945.000	-	
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	SKPD, Kurau Kantor Kurau			1 paket	1 paket	870.000	-	



No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia		Persentasi pemenuhan peningkatan sarana /prasarana kerja dan kualitas sumber daya	100 persen					Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Padang Luas
			Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Kurau Kantor Kurau			Jumlah jenis pengadaan perlengkapan gedung kantor 4 jenis	4 jenis	16.408.000	-	
			Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Kurau Kantor Kurau			jumlah jenis pengadaan peralatan gedung kantor 3 jenis	3 jenis	38.000.000	-	
			Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Gedung Kantor	Kurau Kantor Kurau			jumlah pemeliharaan peralatan gedung kantor 5 jenis	5 jenis	8.200.000	-	
			Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Kurau Kantor Kurau			Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/operasional 12 buah	12 buah	21.795.000	-	
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kurau Kantor Kurau			Jumlah pemeliharaan rutin gedung kantor 1 paket	1 paket	8.640.000	-	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia		Indeks Kepuasan Masyarakat	0 indeks					Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Bati-Bati
			Pengadaan Mebeleur	Bati-Bati Kantor Bati-Bati			Pengadaan Meubeuler 3 Jenis	3 Jenis	28.000.000	-	
			Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Gedung Kantor	Bati-Bati Kantor Bati-Bati			Jumlah Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor 6 Jenis	6 Jenis	9.450.000	-	
			Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Bati-Bati Kantor Bati-Bati			Jumlah Jenis Pemeliharaan Kendaraan Dinas /Operasional 1 Tahun	1 Tahun	39.400.000	-	
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Bati-Bati Kantor Bati-Bati			Jumlah Pemeliharaan Gedung Kantor 1 Tahun	1 Tahun	3.050.000	-	
			Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia		Indeks kepuasan masyarakat	0 indeks					Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Kait-Kait

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Bati-Bati Kantor Bati-Bati			Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor 6 jenis	6 jenis	42.700.000	-	
			Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Bati-Bati Kantor Bati-Bati			Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/operasional 3 jenis	3 jenis	5.900.000	-	
			Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia		Indeks Kepuasan Masyarakat	0 Indeks					Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Tambang Ulang
			Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor				Jumlah jenis pengadaan perlengkapan gedung 1 jenis	1 jenis	27.200.000	-	
			Pengadaan Mebeleur				Jumlah jenis pengadaan mebeleur 2 jenis	2 jenis	9.500.000	-	
			Pemeliharaan Rutin Berkala Perlengkapan Gedung Kantor				Jumlah pemeliharaan perlengkapan gedung kantor 3 jenis	3 jenis	3.400.000	-	
			Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Gedung Kantor				Jumlah pemeliharaan peralatan gedung kantor 4 jenis	4 jenis	16.050.000	-	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional				Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/operasional 6 jenis	6 jenis	15.200.000	-	
			<b>Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia</b>		Indeks kepuasan masyarakat	0 indeks					Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Pelaihari
			Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Pelaihari			Jumlah Peralatan Gedung Kantor 4 jenis	4 jenis	46.800.000	-	
			Pemeliharaan Rutin Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Pelaihari			Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 1 tahun	1 tahun	6.000.000	-	
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pelaihari			Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1 tahun	1 tahun	10.000.000	-	
			<b>Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia</b>		Indeks Kepuasan Masyarakat	0 indeks					Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Sungai Riam

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Pelaihari			Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor 3 jenis	3 jenis	14.400.000	-	
			Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Gedung Kantor	Pelaihari			Jumlah pemelihraan peralatan gedung kantor 12 bulan	12 bulan	3.900.000	-	
			Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Pelaihari			Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/operasion al 4 jenis	4 jenis	34.602.000	-	
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pelaihari			Jumlah pemeliharaan gedung kantor 2 jenis	2 jenis	12.725.000	-	
			Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia		Indeks Kepuasan Masyarakat	0 indeks					Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Tirta Jaya
			Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Bajuin Kantor Bajuin			Jumah jenis pemeliharaan sarana prasarana perkantoran 0 jenis Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/operasion al 5 buah	0 jenis 5 buah	2.500.000	-	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD	
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)					
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Bajuin Kantor Bajuin			Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor 5 buah	5 buah	2.250.000	-		
			Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Bajuin Kantor Bajuin			Jumlah jenis Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 5 jenis	5 jenis	1.650.000	-		
			Pemeliharaan Rutin Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Bajuin Kantor Bajuin			Jumlah Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor 5 buah	5 buah	500.000	-		
			Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Gedung Kantor	Bajuin Kantor Bajuin			Jumlah Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor 2 buah	2 buah	5.850.000	-		
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Bajuin Kantor Bajuin			Jumlah Pemeliharaan Gedung Kantor 2 buah	2 buah	5.000.000	-		
			Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia		Indeks Kepuasan Masyarakat	0 indeks					Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Tanjung Habulu	
			Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor					jumlah jenis pengadaan dan perlengkapan gedung kantor 3 jenis	3 jenis	12.000.000	-	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pemeliharaan Rutin Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Bajuin Kantor Bajuin			jumlah jenis pemeliharaan rutin /berkala perlengkapan gedung kantor 2 jenis	2 jenis	13.800.000	-	
			Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Bajuin Kantor Bajuin			jumlah jenis pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 5 jenis	5 jenis	36.155.000	-	
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor				jumlah jenis pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor 1 jenis	1 jenis	5.365.000	-	
			Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia		Indeks Kepuasan Masyarakat	0 indeks					Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Jorong
			Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jorong Kantor Jorong			Jumlah pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 14 jenis Jumlah pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran 0 Jenis	14 jenis 0 Jenis	56.700.000	-	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jorong Kantor Jorong			Jumlah pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 6 jenis	6 jenis	10.100.000	-	
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jorong Kantor Jorong			Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1 paket	1 paket	5.000.000	-	
			Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia		Indeks Kepuasan Masyarakat	0 indeks					Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Asam Asam
			Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jorong Kantor Jorong			jumlah pemeliharaan gedung kantor 0 8 jenis	0 8 jenis	5.000.000	-	
			Pemeliharaan Rutin Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jorong Kantor Jorong			jumlah pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0 7 jenis	0 7 jenis	2.816.000	-	
			Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jorong Kantor Jorong			jumlah pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor 0 6 jenis	0 6 jenis	2.600.000	-	



No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Jorong Kantor Jorong			jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/operasional 0 4 jenis	0 4 jenis	19.334.000	-	
			Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia		Indeks Kepuasan Masyarakat	0 indeks					Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Kintap
			Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Kintap Kantor Kintap			Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor 6 jenis	6 jenis	48.200.000	-	
			Pemeliharaan Rutin Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Kintap Kantor Kintap			Jumlah pemeliharaan perlengkapan gedung kantor 4 jenis	4 jenis	6.500.000	-	
			Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Gedung Kantor				Jumlah pemeliharaan gedung kantor 1 jenis	1 jenis	17.620.000	-	
			Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Kintap Kantor Kintap			Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas 2 jenis	2 jenis	27.380.000	-	
			Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia		indeks kepuasan masyarakat	0 indeks					Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Sungai Cuka

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Kintap Kantor Kintap			Jumlah jenis pengadaan perlengkapan gedung kantor 3 jenis	3 jenis	17.590.000	-	
			Pengadaan Mebeleur	Kintap Kantor Kintap			Jumlah pengadaan mebelair 3 jenis	3 jenis	8.500.000	-	
			Pemeliharaan Rutin Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Kintap Kantor Kintap			Jumlah jenis pemeliharaan perlengkapan gedung kantor 3 jenis	3 jenis	8.230.000	-	
			Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Gedung Kantor	Kintap Kantor Kintap			Jumlah pemeliharaan peralatan gedung kantor 6 jenis	6 jenis	9.372.400	-	
			Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Kintap Kantor Kintap			Jumlah jenis pemeliharaan kendaraan dinas/operasional 1 tahun	1 tahun	45.850.000	-	
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kintap Kantor Kintap			Jumlah pemeliharaan gedung kantor 1 tahun	1 tahun	17.090.000	-	
			Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia		Indeks Kepuasan Masyarakat	0 indeks					Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Angsau

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Pelaihari, Angsau, Sarang Halang			Jumlah Jenis Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 3 Jenis	3 Jenis	3.800.000	-	
			Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Gedung Kantor	Pelaihari, Angsau, Sarang Halang			Jumlah Jenis Pemeliharaan sarana prasarana perkantoran 4 jenis	4 jenis	6.200.000	-	
			Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Pelaihari, Angsau, Sarang Halang			Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasio nal 12 Bulan	12 Bulan	6.400.000	-	
			Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia		Indeks Kesehatan Masyarakat	0 indeks					Dinas Kesehatan Balai Laboratorium Kesehatan
			Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Kabupaten			Jumlah jenis pemeliharaan kendaraan dinas/operation al 1 jenis Jumlah Pemeliharaan fasilitas pelayanan kesehatan yang terpenuhi (Kendaraan	1 jenis 0 jenis	745.000	-	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							operasional, peralatan/perengkapan gedung kantor) 0 jenis				
			Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Pelaihari, Angsau			Jumlah pemeliharaan peralatan gedung kantor 3 jenis	3 jenis	4.450.000	-	
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pelaihari, Angsau			Jumlah jenis pemeliharaan perlengkapan gedung kantor 1 jenis	1 jenis	1.600.000	-	
			Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia		Persentase Pemenuhan Peningkatan Sarana /prasarana kerja dan kualitas Sumber Daya manusia	0 %					Dinas Kesehatan Instalasi Farmasi
			Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Pelaihari, Angsau			Jumlah pemeliharaan sarana perkantoran 5 unit	5 unit	20.200.000	22.220.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Kabupaten			Jumlah pemeliharaan sarana perkantoran 0 unit Jumlah sarana dan prasarana pelayanan kesehatan yang dipelihara/diperbaiki (kendaraan dinas) 3 unit	0 unit 3 unit	12.600.000	13.860.000	
			Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	3 Kategori					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	SKPD			jumlah kendaraan roda 4 1 Tahun	1 Tahun	550.000.000	572.800.000	
			Peningkatan Kemampuan Teknis Aparatur				jumlah pelatihan terbayar 1 Tahun	1 Tahun	400.000.000	500.000.000	
			Pengadaan perlengkapan gedungkantor	SKPD			jumlah peralatan dibayar 1 Tahun	1 Tahun	134.112.400	135.000.000	
			Rehabilitasi sedang/berat Gedung Kantor	SKPD			jumlah gedung dibayar 1 Tahun	1 Tahun	681.900.000	681.900.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia		IKM	0 Nilai					Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Luar Daerah, Kabupaten , SKPD			Jumlah Pengadaan Mebeuler 10 Buah Jumlah terbelinya kendaraan Dinas/Operasional 1 %/Unit Roda 2/Roda 4/Unit Jenis Perlengkapan Gedung Kantor 5 Jenis Jenis peralatan dan perlengkapan kantor terbeli 10 Jenis	10 Buah 1 %/Unit Roda 2/Roda 4/Unit 5 Jenis 10 Jenis	-	-	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Kabupaten , SKPD			Jenis Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional 3 Jenis/Buah/Unit Jenis pemeliharaan gedung kantor 2 Jenis Jumlah perbaikan peralatan kerja 15 Buah/Unit	3 Jenis/Buah/Unit 2 Jenis 15 Buah/Unit	-	-	
			Pembangunan Gedung Kantor	Kabupaten , SKPD			umlah jenis gedung bangunan yang dibangun 4 Jenis	4 Jenis	-	-	
			Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor	Kabupaten , SKPD			Jumlah Jenis rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 4 Jenis	4 Jenis	-	-	
			Peningkatan Kemampuan Teknis Aparatur	Luar Daerah, Kabupaten , SKPD			Jumlah ASN 3 (Orang)	3 (Orang)	-	-	
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Kabupaten , SKPD			Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu terbeli 72 Steel Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapanny	72 Steel 72 Steel	-	-	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							a 72 Steel				
			Pengadaan perlengkapan gedungkantor	Kabupaten , SKPD			Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor terbeli 10 Jenis	10 Jenis	59.350.000	59.350.000	
			Pengadaan Mebeleur	Kabupaten , SKPD			Jumlah jenis mebeleur terbeli 4 Jenis	4 Jenis	13.000.000	13.000.000	
			Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Kabupaten , SKPD			Jumlah jenis peralatan dan mesin yang dirawat 5 Jenis	5 Jenis	8.700.000	8.700.000	
			Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kabupaten , SKPD			Terlaksananya pemeliharaan rutin gedung dan bangunan 4 Jenis	4 Jenis	34.997.000	34.997.000	
			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kabupaten , SKPD			Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dirawat 6 Unit Jumlah orang honorarium dan premi asuransi PTT driver dinas yang dibayarkan	6 Unit 1 OB	142.970.640	142.970.640	



No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							1 OB				
			Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia		Indeks Kepuasan Masyarakat ; Indeks Kepuasan Masyarakat	0 Nilai; 0 Nilai					Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
			Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor	SKPD			Jumlah Pengecatan Kantor Terlaksana 4.000 m2	4.000 m2	344.541.700	-	
			Peningkatan Kemampuan Teknis Aparatur	SKPD			Jumlah Kemampuan Teknis Aparatur Terkendali 30 Orang	30 Orang	120.000.000	-	
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	SKPD			Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya tersedia 110 orang/ stel	110 orang/ stel	214.500.000	-	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	SKPD			Jumlah Kendaraan Dinas (Mobil Dinas ) Terpelihara 13 Unit/Tahun Jumlah Kendaraan Dinas (Sepeda Motor Dinas ) Terpelihara 35 Unit/Tahun	13 Unit/Tahun 35 Unit/Tahun	613.540.700	-	
			Program Fasilitas Produk Hukum Daerah, Bantuan Hukum dan HAM, Dokumentasi Hukum		Terfasilitasinya penyusunan produk hukum daerah/ lainnya/ bantuan hukum dan HAM, publikasi produk hukum daerah	100 %					Sekretariat Daerah Bagian Hukum
			Fasilitasi Produk Hukum Daerah	Kabupaten , SKPD			Jumlah Dokumen 200 Dokumen	200 Dokumen	311.533.000	342.686.300	
			Fasilitasi Bantuan Hukum dan HAM Pemerintah Daerah	Kabupaten , Luar Daerah, SKPD			Jumlah Fasilitas Bantuan Hukum 4 Fasilitas Penanganan	4 Fasilitas Penanganan	207.702.000	228.472.200	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Fasilitasi Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum	Kabupaten , SKPD			Jumlah Dokumen 350 Eksemplar Jumlah Dokumen 800 Dokumen Penyuluhan/ Sosialisasi Hukum 5 Kali	350 Eksemplar 800 Dokumen 5 Kali	280.765.000	308.841.500	
			Program Kerjasama Informasi dan Mass Media		Media Informasi	0 4 Media					Sekretariat Daerah Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol
			Penyebarluasan informasi pembangunan daerah	Luar Daerah, Kabupaten , SKPD			Jumlah kegiatan pimpinan yang terekspose ke media 2.400 Kegiatan Jumlah naskah pidato pimpinan yang telah tersusun dan dibuat 1.000 Naskah Jumlah terbit tabloid tuntung pandang 3 Kali	2.400 Kegiatan 1.000 Naskah 3 Kali	1.623.551.200	1.867.083.880	
			Program Pembinaan, Pengembangan, Fasilitasi Hubungan Masyarakat dan Keprotokolan		Nilai IKM (Indikator Kepuasan Masyarakat)	0 Baik					Sekretariat Daerah Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pengembangan hubungan masyarakat	Luar Daerah, Kabupaten , SKPD			Jumlah kegiatan Pemerintah Daerah yang Terdokumentasi melalui spanduk dan baliho 1.687 Meter Jumlah Kegiatan Pemerintah Daerah yang Terdokumentasi melalui Paper Bag 275 Buah	1.687 Meter 275 Buah	461.497.300	530.721.895	
			Fasilitasi dan pelayanan protokoler pemerintah daerah	Luar Daerah, Kabupaten , SKPD			Jumlah Terlaksananya Pelayanan Keprotokolan Pejabat Daerah 720 Kali	720 Kali	414.951.500	477.194.225	
			Program Pembinaan, Pengembangan dan Pemberdayaan Kesejahteraan Rakyat		Nilai IKM	0 Nilai					Sekretariat Daerah Bagian Kesejahteraan Rakyat
			Pembinaan, Pengembangan, Pemberdayaan Sosial dan Kebudayaan	Kabupaten , SKPD			Jumlah Organisasi 55 Organisasi	55 Organisasi	8.040.000.000	302.500.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pembinaan, Pengembangan, Pemberdayaan Kemasyaratan dan kesejahteraan rakyat	Kabupaten , SKPD			Jumlah kegiatan Batamat Al-Quran 1 kegiatan Jumlah Guru Honorarium TKA/TPA, Madin/MIS,Ponpes dan PAH 3.090 Orang	1 kegiatan 3.090 Orang	13.000.000.000	20.128.000.000	
			Pembinaan, pegembangan dan pemberdayaan pendidikan dan agama	Kabupaten , SKPD			Jumlah kegiatan keagamaan 8 Event	8 Event	3.700.000.000	3.950.000.000	
			<b>Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia</b>		Persentase Peningkatan kualitas aparatur dan pemeliharaan sarpras kantor	0 persen					Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan UPT Peralatan Dinas Pekerjaan Umum
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	SKPD			PTT Operator dan mekanin 196.240.800 tahun	196.240.800 tahun	-	-	
			Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor	Kabupaten , SKPD			Peningkatan Pelayanan administrasi dan operasional Perkantoran, Rehab Gedung Kantor 465.000.000	465.000.000	15.000.000	-	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Peningkatan Kemampuan Teknis Aparatur	Kabupaten , SKPD			Terlaksananya Diklat Teknis Alat Berat dan Administrasi, 23 orang 242.632.000 OK	242.632.000 OK	242.632.000	-	
			Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	SKPD, Pelaihari, Pelaihari			Jumlah Pakaian Kerja/lapangan tersedia 8.050.000 Stel	8.050.000 Stel	8.050.000	-	
			Program Fasilitas Kegiatan dan Kebijakan KDH dan WKDH		IKM	1 Nilai					Sekretariat Daerah Bagian Umum
			Penyediaan makanan dan minuman rumah jabatan	SKPD			Jumlah Orang 28.972 ok	28.972 ok	1.194.560.000	1.314.016.000	
			Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia		IKM	0 Nilai					Sekretariat Daerah Bagian Umum
			Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional	SKPD			Jumlah Jenis 1 Jenis	1 Jenis	127.500.000	140.250.000	
			Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	SKPD			Jumlah Gedung 2 Gedung	2 Gedung	29.264.700	32.191.170	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	SKPD			Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 250 Stel	250 Stel	128.125.000	140.937.500	
			Pengadaan perlengkapan gedungkantor	SKPD			Jumlah Jenis 6 Jenis	6 Jenis	206.413.800	227.055.180	
			Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	SKPD			Jumlah Gedung 2 Gedung	2 Gedung	291.011.300	320.112.430	
			Pemeliharaan Rutin Berkala Rumah Jabatan/Dinas	SKPD			Jumlah Gedung 2 Gedung	2 Gedung	380.051.000	418.056.100	
			Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	SKPD			Jumlah Jenis 7 Jenis	7 Jenis	335.930.000	369.523.000	
			Pengadaan peralatan gedung kantor	SKPD			Jumlah Jenis 7 Jenis	7 Jenis	178.237.666	196.061.433	
			Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	SKPD			Jumlah Jenis 7 Jeniis	7 Jeniis	484.703.440	533.173.784	
			Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	SKPD			Jumlah Jenis 8 Jenis	8 Jenis	155.960.000	171.556.000	
			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	SKPD			Jumlah Jenis 3 Jenis	3 Jenis	1.571.049.044	1.728.153.948	
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	SKPD			Jumlah Pendidikan dan Pelatihan 17 kali	17 kali	225.000.000	247.500.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	SKPD			Jumlah Jenis 1 Jenis	1 Jenis	21.250.000	23.375.000	
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	SKPD			Jumlah Jenis 2 Gedung	2 Gedung	102.340.000	112.574.000	
			Program Pembinaan Pemerintahan Umum, Otonomi Daerah dan Kerjasama Antar Pemerintahan		Peningkatan Nilai LPPD	3,06 Persentase					Sekretariat Daerah Bagian Tata Pemerintahan
			Pembinaan dan Pengembangan Otonomi Daerah dan Pengamanan Batas Daerah	Kabupaten , Panyipatan Kantor Panyipatan , Pelaihari, Bajuin Kantor Bajuin, Takisung Kantor Takisung, Bati-Bati Kantor Bati-Bati, Tambang Ulang Kantor Tambang Ulang, Batu Ampar			Jumlah Rapat Koordinasi 11 Kali	11 Kali	160.122.200	162.000.000	



No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Kantor Batu Ampar, Bumi Makmur, Jorong Kantor Jorong, Kintap Kantor Kintap, Kurau Kantor Kurau, Sarang Halang, Angsau, Karang Taruna, Pabahana n, Pelaihari							
			Pembinaan dan Tata Kelola Pemerintahan Umum	Luar Daerah, Kabupaten , SKPD			Jumlah Rapat 40 kali	40 kali	372.308.600	2.400.000.000	
			Pembinaan dan Pengembangan Kerjasama Daerah	Luar Daerah, Kabupaten , SKPD			Jumlah Dokumen 4 Dokumen	4 Dokumen	125.926.900	127.000.000	
			Program Pembinaan, Pengembangan, Penataan Kelembagaan, Penataan Ketatalaksanaan, Penataan Aparatur		INDEKS NILAI REFORMASI BIROKRASI`	1 NILAI REFORMASI BIROKRASI					Sekretariat Daerah Bagian Organisasi

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			dan Analisa Formasi Jabatan								
			Pengembangan dan penataan Kelembagaan Perangkat Daerah	SKPD			Jumlah Perangkat Daerah yang memiliki SOTK dan Uraian Tugas yang telah di evaluasi sesuai aturan. 40 SKPD	40 SKPD	58.771.900	150.000.000	
			Pengembangan dan Penataan Aparatur dan Analisa Formasi Jabatan	SKPD			, SKPDJumlah Perangkat Daerah yang memiliki Informasi Jabatan, Evaluasi Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Standart Kopetensi Jabatan 40 SKPD	40 SKPD	250.599.100	330.000.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pengembangan dan Penataan Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik	SKPD			Jumlah Dokumen SOP 4 Dokumen Jumlah unit pelayanan publik yang melaksanakan standar pelayanan publik 3 Unit Kerja Jumlah SKPD yang telah diberikan pembinaan tentang Inovasi Pelayanan Publik 40 SKPD Jumlah Regulasi standarisasi pedoman kerja 2 Dokumen	4 Dokumen 3 Unit Kerja 40 SKPD 2 Dokumen	136.427.200	100.000.000	
			Pembuatan ID Card Pegawai	SKPD			Jumlah ID Card 1.000 Buah	1.000 Buah	72.673.800	53.700.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Penetapan Kinerja	SKPD			Laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun sesuai Pemenpan 53 Tahun 2014 1 Dokumen Jumlah SKPD yang di diasistensi terkait laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah 40 SKPD	1 Dokumen 40 SKPD	168.290.500	200.000.000	
			Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah	SKPD			Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 1 Dokumen Jumlah SKPD yang dibina terkait pelaksanaan reformasi birokrasi 40 SKPD	1 Dokumen 40 SKPD	113.237.500	170.000.000	
			Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia		Indeks kepuasan masyarakat	0 persen					Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Bumi Makmur

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Bumi Makmur			Jumlah jenis pengadaan dan penyediaan sarana prasarana perkantoran 0 jenis	0 jenis	5.000.000	-	
			Pengadaan Mebeleur	Bumi Makmur			Jumlah jenis pengadaan mebelair 2 jenis	2 jenis	13.500.000	-	
			Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia		Indeks Kepuasan Masyarakat	0					Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan UPT Laboratorium Dinas Pekerjaan Umum
			Peningkatan Kemampuan Teknis Aparatur	SKPD			Jumlah peserta yang mengikuti Bimbingan Teknis dan Sertifikasi Uji Material Konstruksi 6 orang	6 orang	96.000.000	100.000.000	
			Pengadaan Mebeleur	SKPD			Jumlah pengadaan sofa untuk ruang tamu 1 Set	1 Set	-	10.000.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia		Indeks Kepuasan Masyarakat	1 Nilai					Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian UPT Balai Latihan Kerja
			Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	SKPD			Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional 5 Kendaraan Roda 4 Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional 2 Kendaraan Roda 2	5 Kendaraan Roda 4 2 Kendaraan Roda 2	56.067.500	66.067.500	
			Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	SKPD			Jumlah Unit Gedung 1 Unit	1 Unit	23.000.000	200.000.000	
			Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor				Jumlah Perlengkapan 1 Jenis	1 Jenis	22.500.000	30.000.000	
			Pengadaan Mebeleur	SKPD			Jumlah Meubelair 11 Meja Jumlah Meubelair 5 Lemari Jumlah Meubelair 9 Jenis Jumlah Meubelair 70	11 Meja 5 Lemari 9 Jenis 70 Kursi	101.900.000	201.900.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Kursi				
			Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Gedung Kantor	SKPD			Jumlah Peralatan Gedung/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 6 Jurusan	6 Jurusan	10.000.000	13.030.000	
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	SKPD			Jumlah Gedung Kantor 3 Gedung Kantor Jumlah Gedung Kantor 1 Jaringan	3 Gedung Kantor 1 Jaringan	102.000.000	302.000.000	
			Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia		Indeks Kepuasan Masyarakat	1 Nilai					Dinas Komunikasi dan Informatika
			Pendidikan dan pelatihan formal	Luar Daerah, Kabupaten			Jumlah kepesertaan untuk pendidikan dan pelatihan formal 4 orang	4 orang	30.000.000	-	
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	SKPD			Jumlah pakaian dinas yang tersedia 48 stel	48 stel	33.450.000	-	
			Pengadaan Mebeleur	Kabupaten , SKPD			Jumlah sarana perkantoran alat rumah tangga 12 bulan	12 bulan	63.500.000	-	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Kabupaten , SKPD			Jumlah sarana dan prasarana yang dipelihara 12 bulan	12 bulan	6.000.000	-	
			Pengadaan peralatan gedung kantor	Kabupaten			Jumlah sarana perkantoran alat rumah tangga 12 bulan	12 bulan	20.000.000	-	
			Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Kabupaten , SKPD			Jumlah mobil jabatan yang dipelihara 12 bulan	12 bulan	17.000.000	-	
			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kabupaten , SKPD			Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara 12 bulan	12 bulan	60.000.000	-	
			<b>Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia</b>		Nilai IKM	0 nilai					Dinas Sosial
			Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor	SKPD			jumlah unit 1 unit	1 unit	36.000.000	8.230.000	
			Peningkatan Kemampuan Teknis Aparatur	SKPD			Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan 0 orang	0 orang	9.000.000	-	
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta	SKPD			jumlah stel 50 stel	50 stel	55.250.000	22.000.000	



No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD	
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)					
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Perengkapannya									
			Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Kabupaten			Jumlah Kendaraan Dinas 0 Buah	0 Buah	40.000.000	-		
			Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	SKPD			Tersedianya perlengkapan gedung kantor 0 tahun	0 tahun	48.400.000	-		
			Pemeliharaan Rutin Berkala Mobil Jabatan	SKPD			Terpeliharanya mobil jabatan 0 tahun	0 tahun	11.000.000	-		
			Pemeliharaan Rutin Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	SKPD			terpeliharanya perlengkapan gedung kantor 0 tahun	0 tahun	41.295.000	-		
			Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Gedung Kantor	SKPD			terpeliharanya peralatan gedung kantor 0 tahun	0 tahun	14.000.000	-		
			Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia			IKM	0 Nilai				Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	
			Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	SKPD				Jumlah Unit 1 Unit	1 Unit	25.000.000	-	
			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan	SKPD				Jumlah Unit 20 Unit	20 Unit	53.500.000	-	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			dinas/operasional								
			Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia		indeks kepuasan masyarakat	0 huruf					Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
			Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	SKPD			Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional 10 Unit	10 Unit	78.770.000	81.000.000	
			Pembangunan Gedung Kantor	SKPD			jumlah gedung kantor 1 gedung	1 gedung	-	623.000.000	
			Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor	SKPD			jumlah gedung kantor 1 gedung	1 gedung	86.348.100	100.000.000	
			Peningkatan Kemampuan Teknis Aparatur	Kabupaten , SKPD			jumlah orang 8 orang	8 orang	40.000.000	50.000.000	
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	SKPD			jumlah stell 66 stel pakaian	66 stel pakaian	39.600.000	40.200.000	
			Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	SKPD			Jumlah Perlengkapan Gedung kantor 6 Unit	6 Unit	13.750.000	15.000.000	
			Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	SKPD			Jumlah Peralatan Gedung Kantor 9 Unit	9 Unit	83.000.000	100.000.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pengadaan Mebeleur	SKPD			Jumlah Mebeleur 13 Unit	13 Unit	12.500.000	15.000.000	
			Pemeliharaan Rutin Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	SKPD			Jumlah Perlengkapan Gedung / Berkala 28 Buah	28 Buah	8.500.000	10.000.000	
			Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Gedung Kantor	SKPD			Jumlah Peralatan Gedung/ berkala 35 Buah	35 Buah	11.750.000	13.000.000	
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	SKPD			Jumlah Gedung 1 Gedung	1 Gedung	17.000.000	20.000.000	
			Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia		IKM	0 Baik					Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
			Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	SKPD			Tersedianya penyediaan alat pendingin, sound system dan UPS 2 jenis 0	2 jenis 0	84.000.000	92.400.000	
			Pengadaan Mebeleur	SKPD			Terlaksananya penyediaan gordyn 1 jenis	1 jenis	12.250.000	13.475.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	SKPD			Terlaksananya penyediaan jasa pemeliharaan kendaraan bermotor roda dua, roda tiga, dan roda empat 12 bulan	12 bulan	120.600.000	132.660.000	
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	SKPD			Terlaksananya pemeliharaan, peningkatan sarana/prasarana kerja dan kualitas sumber daya manusia 1 paket	1 paket	100.000.000	110.000.000	
			Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan pajak daerah		Pertumbuhan penerimaan pajak daerah	0 %					Badan Pendapatan Daerah
			Intensifikasi dan ekstensifikasi perhitungan dan penetapan pajak daerah	SKPD			Jumlah perhitungan dan penetapan pajak daerah tahun 2021 2.000 Ketetapan Jumlah kebijakan terkait pelayanan pajak daerah 1 Dokumen	2.000 Ketetapan 1 Dokumen	120.790.904	132.869.994	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Intensifikasi dan ekstensifikasi pendataan, pendaftaran dan keberatan pajak daerah	Kabupaten , SKPD			Jumlah kebijakan terkait data dan informasi pajak daerah 1 Dokumen Jumlah data informasi yang disosialisasikan /disebarluaskan /didata 9 Jenis Pajak Daerah	1 Dokumen 9 Jenis Pajak Daerah	177.083.900	194.792.290	
			Intensifikasi dan ekstensifikasi penagihan pajak daerah	Kabupaten , SKPD			Jumlah nilai pemeriksaan dan penagihan pajak daerah ditahun berjalan 24.540.000.000 Rupiah	24.540.000.000 Rupiah	243.188.535	267.507.388	
			Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan PBB dan BPHTB		Pertumbuhan penerimaan PBB-P2 dan BPHTB	0 %					Badan Pendapatan Daerah
			Intensifikasi dan ekstensifikasi pendataan, pendaftaran dan keberatan PBB-P2 dan BPHTB	Kabupaten , SKPD			Jumlah penyelesaian keberatan PBB-P2 dan BPHTB yang difasilitasi 50 Wajib Pajak Jumlah data PBB-P2 dan BPHTB yang berhasil divalidasi dan diverifikasi 10.000 Wajib	50 Wajib Pajak 10.000 Wajib Pajak	594.223.232	653.645.555	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Pajak				
			Intensifikasi dan ekstensifikasi penagihan PBB-P2 dan BPHTB	Kabupaten , SKPD			Jumlah penerimaan atas pungutan PBB-P2 yang termonev pada tahun berjalan 4.750.000.000 Rupiah Jumlah penerimaan atas pungutan BPHTB yang termonev pada tahun berjalan 3.925.000.000 Rupiah	4.750.000.000 Rupiah 3.925.000.000 Rupiah	649.067.260	713.973.986	
			Intensifikasi dan ekstensifikasi perhitungan dan penetapan PBB-P2 dan BPHTB	Kabupaten , SKPD			Jumlah tersampainya informasi SSPD BPHTB 800 SSPD Jumlah tersampainya informasi SPPT PBB-P2	800 SSPD 130.000 SPPT	302.453.000	332.698.300	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							130.000 SPPT				
			program peningkatan dan pengembangan pengelolaan pendapatan lain-lain, Retribusi Daerah dan Pelaporan		Persentase pertumbuhan penerimaan pendapatan lain-lain; Persentasi pertumbuhan retribusi daerah	0 %; 0 %					Badan Pendapatan Daerah
			Intensifikasi dan ekstensifikasi retribusi daerah	Kabupaten , SKPD			Jumlah kebijakan tentang intensifikasi retribusi daerah yang disusun 1 Dokumen Jumlah pendapataan dari retribusi daerah di tahun berjalan 7.548.980.000 Rupiah	1 Dokumen 7.548.980.000 Rupiah	150.280.000	165.308.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan lain-lain, dan perencanaan pendapatan daerah	Luar Daerah, Kabupaten , SKPD			Jumlah kegiatan terkait data penerimaan pendapatan daerah 2 Kali Jumlah SKPD penghasil pendapatan yang di monev 25 SKPD Jumlah dokumen kebijakan perencanaan pendapatan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku 2 Dokumen Jumlah penerimaan pendapatan lain-lain di tahun berjalan 1.451.000.000.000 Rupiah	2 Kali 25 SKPD 2 Dokumen 1.451.000.000.000 Rupiah	81.452.500	89.597.750	
			Peningkatan administrasi dan pembinaan penatausahaan pendapatan daerah	SKPD			Jumlah kebijakan tentang sistem administrasi pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah yang disusun 2 Dokumen	2 Dokumen	92.910.500	102.201.550	



No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia		IKM	0 Nilai					Badan Pendapatan Daerah
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	SKPD			Jumlah pengadaan kendaraan dinas/operasional roda 4 (empat) 1 Unit	1 Unit	155.000.000	-	
			Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	SKPD			Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas roda 2 14 Unit Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 6 Unit	14 Unit 6 Unit	124.228.535	135.000.000	
			Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor	SKPD			Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi 1 Unit	1 Unit	6.990.000	20.000.000	
			Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	SKPD			Jumlah pengadaan gorden untuk kelengkapan gedung kantor 65 Lembar	65 Lembar	13.000.000	15.000.000	
			Pengadaan Mebeleur	SKPD			Jumlah pengadaan mebeleur kantor 6 Jenis	6 Jenis	58.500.000	75.000.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD	
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)					
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Luar Daerah, Kabupaten			Jumlah aparatur yang mengikuti bimtek peraturan perundang-undangan 3 Orang	3 Orang	20.000.000	30.000.000		
			Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	SKPD			Jumlah pengadaan pakaian khusus pada hari-hari tertentu 50 Stell	50 Stell	20.000.000	25.000.000		
			Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Gedung Kantor	SKPD			Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara 5 Jenis	5 Jenis	13.150.000	17.500.000		
			pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	SKPD			Jumlah pemeliharaan mebeleur 6 Jenis	6 Jenis	11.500.000	15.000.000		
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	SKPD			Jumlah gedung kantor yang dipelihara 1 Gedung/Unit	1 Gedung/Unit	15.226.300	18.000.000		
			Program Peningkatan Pelayanan Pengelolaan Keuangan Daerah			Opini BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Opini					Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
			Peningkatan Administrasi Penatausahaan Keuangan Daerah	SKPD				Jumlah dokumen 10.189 Dokumen	10.189 Dokumen	85.474.900	94.022.390	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Peningkatan administrasi Pembiayaan Daerah	SKPD			Jumlah dokumen 2 Dokumen	2 Dokumen	287.661.400	316.427.540	
			Penyusunan Raperda dan Raperbup tentang APBD dan Perubahan APBD	SKPD			Jumlah dokumen 2 Dokumen	2 Dokumen	35.202.300	38.722.530	
			Koordinasi Pelaksanaan dan Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP dan SPM, Pemberian Pembebanan Rincian Penggunaan Atas Pengesahan SPJ Gaji, Serta Penerbitan SKPP	SKPD			Jumlah Dokumen 2 Dokumen	2 Dokumen	28.010.300	30.811.330	
			Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D Dengan Instansi Terkait	SKPD			Jumlah 4 Kali (Triwulanan)	4 Kali (Triwulanan)	14.864.700	16.351.170	
			Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan	SKPD			Jumlah Jenis 9 Jenis	9 Jenis	43.874.700	48.262.170	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pertanggungjawaban (SPJ)								
			Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Kabupaten , SKPD			Jumlah Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000.000	10.000.000.000	
			Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Utang Daerah Sebagai Optimalisasi Kas	Kabupaten , SKPD			Jumlah Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen	57.887.600	63.676.360	
			Penyusunan KUA dan PPAS	SKPD			Jumlah Dokumen 2 Dokumen	2 Dokumen	-	-	
			Penyusunan Peraturan KUA dan Perubahan PPAS	Kabupaten , SKPD			Jumlah Dokumen 2 Dokumen	2 Dokumen	25.506.900	28.057.590	
			Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	SKPD			Jumlah Dokumen 3 Dokumen	3 Dokumen	224.049.300	246.454.230	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	SKPD			Jumlah Dokumen 3 Dokumen	3 Dokumen	176.774.300	194.451.730	
			Penyusunan Peraturan Kepala Daerah tentang Teknis Penyusunan Anggaran SKPD	Kabupaten , SKPD			Jumlah Dokumen 2 Dokumen	2 Dokumen	12.351.800	13.586.980	
			Penyusunan Regulasi Bidang Anggaran	Kabupaten , SKPD			Jumlah Dokumen 7 Dokumen	7 Dokumen	8.950.800	9.845.880	
			Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Kabupaten , SKPD			Jumlah Dokumen 750 Dokumen	750 Dokumen	55.980.300	61.578.330	
			Pelaksanaan Alokasi dan Penyaluran Bantuan Keuangan Khusus	SKPD			Jumlah Desa 130 Desa	130 Desa	254.661.124.250	290.000.000.000	
			Program Peningkatan Penertiban Penatausahaan dan Pengelolaan Aset Daerah		Opini BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Opini					Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
			penyusunan tabulasi data asset tetap	SKPD			Jumlah dokumen 22 Dokumen	22 Dokumen	270.011.900	297.013.090	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan asset daerah	SKPD			Jumlah dokumen 3 Dokumen	3 Dokumen	1.158.800	1.274.680	
			Inventarisasi Barang Milik Daerah	Kabupaten , SKPD			Jumlah Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen	6.064.300	6.670.730	
			Konsolidasi Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah dari SKPD	Kabupaten , SKPD			Jumlah Dokumen 8 Dokumen	8 Dokumen	49.528.400	54.481.240	
			Koordinasi dan Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kabupaten , SKPD			Jumlah Dokumen 1 Dokumen Jumlah Kegiatan 1 Kegiatan	1 Dokumen 1 Kegiatan	68.235.100	75.058.610	
			Koordinasi, Pengawasan dan Pengendalian atas Pemindahtanganan Barang Milik Daerah	Kabupaten , SKPD			Jumlah Dokumen 2 Dokumen	2 Dokumen	126.289.200	138.918.120	
			program peningkatan penerapan akuntansi dan pelaporan		Opini BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Opini					Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
			Penyusunan Raperda dan Raperbup tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	SKPD			Jumlah dokumen 6 Dokumen	6 Dokumen	169.042.120	185.946.332	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD, laporan keuangan semesteran dan prognosis realisasi anggaran serta laporan keuangan akhir tahun	SKPD			Jumlah dokumen 8 Dokumen	8 Dokumen	155.176.400	170.694.040	
			pengembangan dan pengelolaan sistem informasi keuangan daerah	SKPD			Jumlah dokumen 2 Dokumen	2 Dokumen	257.727.360	283.500.095	
			pengelolaan akuntansi pendapatan dan piutang	SKPD			Jumlah dokumen 7 Dokumen	7 Dokumen	131.017.400	144.119.140	
			pengelolaan akuntansi belanja dan beban	SKPD			Jumlah dokumen 4 Dokumen	4 Dokumen	106.423.000	117.065.300	
			Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntanasi Pemerintah Daerah	Kabupaten , SKPD			Jumlah Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen	15.109.020	16.619.922	
			Pelaksanaan Pembinaan dan Sosialisasi Tentang Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Sesuai Sistem	Kabupaten , SKPD			Jumlah Kegiatan 3 Kegiatan	3 Kegiatan	79.893.320	87.882.652	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Akuntansi Pemerintah Daerah								
			Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Kabupaten , SKPD			Jumlah Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen	2.415.200	2.656.720	
			Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Kabupaten , SKPD			Jumlah Dokumen 12 Dokumen	12 Dokumen	46.822.000	51.504.200	
			Program peningkatan pemanfaatan dan pengendalian Aset Daerah		Opini BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Opini					Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
			peningkatan manajemen asset/barang daerah	SKPD			Jumlah Unit 9 Unit Kendaraan bermotor Jumlah Unit 5 Unit Rumah Dinas	9 Unit Kendaraan bermotor 5 Unit Rumah Dinas	81.707.885	89.878.674	
			perencanaan dan pengadaan asset daerah	SKPD			Jumlah dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen	45.394.400	49.933.840	



No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pengelolaan pemanfaatan asset daerah	SKPD			Jumlah dokumen 6 Dokumen	6 Dokumen	185.226.800	203.749.480	
			Koordinasi Pelaksanaan Pengamanan Fisik, Administrasi dan Hukum Barang Milik Daerah	Kabupaten , SKPD			Jumlah Dokumen 47 Dokumen Permohonan	47 Dokumen Permohonan	854.246.200	939.670.820	
			Koordinasi dan Penyusunan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Kabupaten , SKPD			Jumlah Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen	127.777.800	14.055.580	
			Koordinasi dan Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Kabupaten , SKPD			Jumlah Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen	31.780.000	34.958.000	
			Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia		IKM	1 Nilai					Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	SKPD			Jumlah jenis 1 Jenis	1 Jenis	140.000.000	154.000.000	
			Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	SKPD			Jumlah jenis 2 Jenis	2 Jenis	126.300.000	138.930.000	
			Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor	SKPD			Jumlah Gedung 1 Gedung	1 Gedung	-	-	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD	
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)					
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Peningkatan Kemampuan Teknis Aparatur	SKPD			Jumlah ASN 5 ASN	5 ASN	25.000.000	27.500.000		
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	SKPD			Jumlah Stel 55 Stel	55 Stel	28.875.000	31.762.500		
			Pengadaan Mebeleur	SKPD			Jumlah jenis 1 jenis	1 jenis	25.000.000	27.500.000		
			Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	SKPD			Jumlah ASN/Stel 55 ASN/Stel	55 ASN/Stel	19.250.000	21.175.000		
			Pemeliharaan Rutin Berkala Mobil Jabatan	SKPD			Jumlah Unit 1 Unit	1 Unit	18.200.000	20.020.000		
			Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Gedung Kantor	SKPD			Jumlah jenis 1 Jenis	1 Jenis	4.750.000	5.225.000		
			pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	SKPD			Jumlah Jenis 1 Jenis	1 Jenis	10.000.000	11.000.000		
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	SKPD			Jumlah Jenis 1 Jenis	1 Jenis	77.000.000	84.700.000		
			Program Pembinaan, Pengembangan dan Fasilitas Perekonomian Pembangunan Daerah			Cakupan Pembinaan dan Pengembangan Potensi Perekonomian Daerah	20 %					Sekretariat Daerah Bagian Perekonomian Pembangunan
			Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Kabupaten				Laporan Kebijakan Pengendalian Perekonomian 1 dokumen	1 dokumen	89.774.280	95.500.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Kabupaten			Laporan Pembinaan LPUK 1 dokumen Laporan Promosi Daerah 1 dokumen Laporan Monev Gapura Karomah 1 dokumen	1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen	445.443.280	449.500.000	
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Kabupaten			Laporan Fasilitas Pembinaan BLUD 1 Dokumen Laporan Fasilitas Pembinaan BUMD 1 dokumen	1 Dokumen 1 dokumen	82.817.520	235.500.000	
			Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Kabupaten			Laporan Pengendalian Inflasi Daerah 1 dokumen Fasilitas Pengendalian Program pembangunan 100 % Laporan pengawasan KUR 1 Dokumen	1 dokumen 100 % 1 Dokumen	181.964.880	205.500.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia		IKM	0 Pelaporan					Dinas Pariwisata
			Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	SKPD			Jumlah Jenis kendaraan dinas yang terpelihara Dinas Pariwisata dan UPT OW Pantai Takisung 13 buah	13 buah	59.180.000	59.180.000	
			Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor	SKPD					-	-	
			Peningkatan Kemampuan Teknis Aparatur	SKPD			Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek/diklat 6 orang	6 orang	30.000.000	30.000.000	
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	SKPD			Jumlah pakaian dinas & pakaian Kerja lapangan Dinas Pariwisata dan UPT OW Pantai Takisung 50 stell	50 stell	39.355.000	39.355.000	
			Pengadaan kendaraan dinas/operasional	SKPD			Jumlah Kendaraan dinas 3 unit	3 unit	60.000.000	60.000.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pengadaan Mebeleur	SKPD			Jenis Pengadaan Mebeleur 3 jenis	3 jenis	63.534.000	63.534.000	
			Pemeliharaan Rutin Berkala Mobil Jabatan	SKPD			Jumlah Mobil Jabatan yang di pelihara 3 buah	3 buah	67.760.000	67.760.000	
			Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Gedung Kantor	SKPD			Jumlah Jenis Pemeliharaan Dinas Pariwisata dan UPT OW Pantai Takisung 14 jenis	14 jenis	19.365.000	19.365.000	
			Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	SKPD			Jumlah Jenis kendaraan dinas yang terpelihara Dinas Pariwisata dan UPT OW Pantai Takisung 13 buah	13 buah	-	-	
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	SKPD			Jumlah Pemeliharaan kantor Dinas Pariwisata dan kantor UPT OW Pantai Takisung 2 kegiatan	2 kegiatan	26.750.000	26.750.000	
			Program Pembinaan, Pengelolaan, Pelayanan Pengadaan Barang / Jasa			Persentase permohonan pelayanan publik berbasis teknologi informas yang ditindak lanjuti oleh SKPD	100 %				

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pembinaan, Pengelolaan dan layanan pengadaan secara elektronik	Kabupaten , SKPD			Jumlah fasilitas layanan LPSE 150 Paket	150 Paket	294.327.500	250.000.000	
			Pembinaan dan fasilitasi pengadaan barang/jasa pemerintah	Kabupaten , SKPD			Jumlah paket tender yang selesai dan sesuai dengan peraturan yang berlaku 150 Paket	150 Paket	175.405.380	250.000.000	
			Pembinaan kompetensi dan evaluasi pelaporan	Kabupaten , SKPD			Jumlah fasilitasi pengelolaan personil Bagian Pengadaan Barang/Jasa 25 Orang Jumlah fasilitasi pembinaan SKPD dalam pengadaan barang/jasa pemerintah 40 SKPD	25 Orang 40 SKPD	330.266.800	380.000.000	
			Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia		Indeks Kepuasan Masyarakat	0 Indeks					Dinas Kesehatan RSUD Kintap

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Kintap Kantor Kintap			jumlah pengadaan prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan 2 jenis	2 jenis	120.000.000	132.000.000	
			Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Kintap Kantor Kintap			Jumlah sarana dan parasarana fasilitas pelayanan kesehatan yang dipelihara /diperbaiki 0 Jenis Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1 tahun	0 Jenis 1 tahun	444.000.000	488.400.000	
			Peningkatan Kemampuan Teknis Aparatur	Kintap Kantor Kintap			Jumlah jenis Penyelenggaraa n pelatihan untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan 5 jenis	5 jenis	78.400.000	86.240.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Kintap Kantor Kintap			Persentasi Peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur 100 persen Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 2 jenis	100 persen 2 jenis	120.000.000	132.000.000	
			Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Kintap Kantor Kintap			Jumlah jenis penngadaan peralatan gedung kantor 4 jenis	4 jenis	212.800.000	234.080.000	
			Pengadaan Mebeleur	Kintap Kantor Kintap			Pengadaan mebeleur 3 jenis	3 jenis	128.000.000	140.800.000	
			Pemeliharaan Rutin Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Kintap Kantor Kintap			Jumlah jenis pemeliharaan perlengkapan gedung kantor 5 jenis	5 jenis	48.000.000	52.800.000	
			Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Gedung Kantor	Kintap Kantor Kintap			Jumlah pemeliharaan peralatan gedung kantor 6 jenis	6 jenis	40.000.000	44.000.000	
			pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Kintap Kantor Kintap			Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur 6 jenis	6 jenis	48.000.000	52.800.000	



No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kintap Kantor Kintap			Jumlah pemeliharaan gedung kantor 1 tahun	1 tahun	120.000.000	132.000.000	
			Pemeliharaan Prasana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kintap Kantor Kintap			Jumlah sarana dan prasarana fasilitas pelayanan kesehatan yang dipelihara/diperbaiki 6 jenis	6 jenis	96.000.000	105.600.000	
			Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat		IKM	0 Nilai					Kurau Kantor Kurau
			Penyelenggaraan Pelayanan Masyarakat	Kurau Kantor Kurau			Jumlah Orang 1 Orang Jumlah dokumen IKM 10 Dokumen	1 Orang 10 Dokumen	27.402.000	30.142.200	
			Program perencanaan pembangunan Kecamatan		IKM	0 Nilai					Kurau Kantor Kurau
			Perencanaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan musyawarah desa	Kurau Kantor Kurau			Jumlah Desa 11 Desa	11 Desa	20.109.000	22.119.900	
			Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Kurau Kantor Kurau			Jumlah Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen	10.478.000	11.525.800	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Program Koordinasi dan fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Pemerintahan Desa		IKM	0 Nilai					Kurau Kantor Kurau
			Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Kurau Kantor Kurau			Jumlah Desa 3 Desa	3 Desa	10.328.000	11.360.800	
			Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Kurau Kantor Kurau			Jumlah Orang 36 Orang	36 Orang	40.311.000	44.342.100	
			Program Fasilitasi dan koordinasi kegiatan keagamaan, sosial dan kebudayaan di masyarakat		IKM	0 Nilai					Kurau Kantor Kurau
			Pentas seni, budaya, festival, lomba cipta dan kompetisi olah raga	Kurau Kantor Kurau			Jumlah Kegiatan 3 Kegiatan	3 Kegiatan	267.000.000	293.700.000	
			Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial di kalangan masyarakat	Kurau Kantor Kurau			Jumlah Ormas 11 Ormas	11 Ormas	870.000.000	957.000.000	
			Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia		IKM	0 Nilai					Kurau Kantor Kurau

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD	
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)					
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Kurau Kantor Kurau			Jumlah Unit 10 Unit	10 Unit	15.860.000	20.000.000		
			Peningkatan Kemampuan Teknis Aparatur	Kurau Kantor Kurau			Jumlah Orang 2 Orang	2 Orang	10.000.000	11.000.000		
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Kurau Kantor Kurau			Jumlah orang 1 Orang	1 Orang	700.000	770.000		
			Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Kurau Kantor Kurau			Jenis Pengadaan (Jenis) 1 Jenis	1 Jenis	2.000.000	-		
			Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Kurau Kantor Kurau			Jenis Pengadaan (Jenis) 6 Jenis	6 Jenis	15.882.000	17.470.200		
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kurau Kantor Kurau			Jumlah Pemeliharaan (Unit) 5 Unit	5 Unit	4.190.000	4.609.000		
			Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat			ikm	3 nilai				Bajuin Kantor Bajuin	
			Penyelenggaraan Pelayanan Masyarakat	Bajuin Kantor Bajuin				jumlah dokumen 1 dokumen	1 dokumen	6.750.000	17.500.000	
			Program perencanaan pembangunan Kecamatan			ikm	3 nilai					Bajuin Kantor Bajuin
			Penyelenggaraan Musrenbang	Bajuin Kantor				Jumlah Kegiatan 2 kali	2 kali	12.867.500	-	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Kecamatan	Bajuin							
			Program Koordinasi dan fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Pemerintahan Desa		ikm	3 nilai					Bajuin Kantor Bajuin
			Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan				Jumlah Peserta 34 peserta	34 peserta	70.890.000	-	
			Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Bajuin Kantor Bajuin			jumlah kegiatan 2 kali	2 kali	14.208.000	28.000.000	
			Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Bajuin Kantor Bajuin			jumlah kegiatan 1 kali	1 kali	9.882.400	27.130.000	
			Program Fasilitasi dan koordinasi kegiatan keagamaan, sosial dan kebudayaan di masyarakat		IKM	0 nilai					Bajuin Kantor Bajuin
			Pentas seni, budaya, festival, lomba cipta dan kompetisi olah raga	Bajuin Kantor Bajuin			jumlah kegiatan 9 kegiatan	9 kegiatan	648.239.200	275.000.000	
			Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial di kalangan masvarakat	Bajuin Kantor Bajuin			jumlah kegiatan 1 kali	1 kali	38.250.000	50.000.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Koordinasi dan Fasilitasi Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan	Bajuin Kantor Bajuin			jumlah kegiatan 1 kali	1 kali	9.430.000	16.000.000	
			Pembinaan organisasi perempuan	Bajuin Kantor Bajuin			jumlah pembinaan 9 desa	9 desa	14.483.600	14.000.000	
			Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia		IKM	3 nilai					Bajuin Kantor Bajuin
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Bajuin Kantor Bajuin			jumlah orang 23 orang	23 orang	9.200.000	9.900.000	
			Pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor	Bajuin Kantor Bajuin			jumlah jenis 2 unit	2 unit	31.381.000	-	
			Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat		IKM	0 Nilai					Jorong Kantor Jorong
			Penyelenggaraan Pelayanan Masyarakat	Jorong Kantor Jorong			Terlaksananya Penyelenggaraa n Pelayanan Masyarakat di Kecamatan 1 Tahun	1 Tahun	35.320.976	39.079.175	
			Program perencanaan pembangunan Kecamatan		IKM	0 Nilai					Jorong Kantor Jorong

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Jorong Kantor Jorong			Terlaksananya Musrenbang Tingkat Kecamatan 1 Kali	1 Kali	20.825.200	22.050.000	
			Program Koordinasi dan fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Pemerintahan Desa		IKM	0 Nilai					Jorong Kantor Jorong
			Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Jorong Kantor Jorong			Terlaksananya Koordinasi Fasilitasi Penyelenggara n Pemerintahan Desa 1 kali	1 kali	4.071.000	28.000.000	
			Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Jorong Kantor Jorong			Terlaksananya Evaluasi APBDesa 1 kali	1 kali	22.436.000	27.130.000	
			Program Fasilitasi dan koordinasi kegiatan keagamaan, sosial dan kebudayaan di masyarakat		IKM	0 Nilai					Jorong Kantor Jorong

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pentas seni, budaya, festival, lomba cipta dan kompetisi olah raga	Jorong Kantor Jorong			Terlaksananya Kegiatan MTQ Tingkat Kabupaten 50 Orang Terlaksananya Kegiatan MTQ Tingkat Kecamatan 50 Orang Terlaksananya Kegiatan Tabligh Akbar 1 Kali Terlaksananya Kegiatan Penyaluran Hibah Bantuan Sosial 16 Penerima Terlaksananya Kegiatan Safari Ramadhan (kali) 1 Kali Terlaksananya Kegiatan Zikir Bersama Masyarakat 1 Kali	50 Orang 50 Orang 1 Kali 16 Penerima 1 Kali 1 Kali	1.279.248.500	1.325.000.000	
			Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial di kalangan masyarakat				Terlaksananya Kegiatan Safari Ramadhan 1 kali	1 kali	-	-	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pembinaan organisasi perempuan				Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan 0 Kali	0 Kali	-	-	
			Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia		IKM	0 Nilai					Jorong Kantor Jorong
			Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jorong Kantor Jorong			Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional Secara Rutin/Berkala 3 Unit	3 Unit	8.770.000	8.770.000	
			Program Koordinasi dan fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Pemerintahan Desa		IKM	0 Nilai					Batu Ampar Kantor Batu Ampar
			pendidikan dan pelatihan kepemudaan	Batu Ampar Kantor Batu Ampar			Jumlah pelatihan paskibra 31 orang	31 orang	86.800.000	90.000.000	



No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Kegiatan fasilitasi penyelenggaraan administrasi desa	Batu Ampar Kantor Batu Ampar			Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDesa sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku 30.000.000 desa	30.000.000 desa	30.000.000	35.000.000	
			Program Fasilitasi dan koordinasi kegiatan keagamaan, sosial dan kebudayaan di masyarakat		IKM	0 3					Batu Ampar Kantor Batu Ampar
			Pentas seni, budaya, festival, lomba cipta dan kompetisi olah raga	Batu Ampar Kantor Batu Ampar			Jumlah kegiatan STQ/MTQ, senam dan jalan sehat 4 kegiatan	4 kegiatan	125.830.000	150.000.000	
			Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial di kalangan masyarakat				Jumlah Ormas Bansos 9 Ormas	9 Ormas	786.075.000	900.500.000	
			Peningkatan Silaturahmi antar instansi dan masyarakat (Safari Ramadhan)				jumlah kegiatan safari ramadhan 1 kegiatan	1 kegiatan	30.575.000	40.000.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia		IKM	0 Nilai					Batu Ampar Kantor Batu Ampar
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya				jumlah jenis pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapanya 22 pasang	22 pasang	13.200.000	15.000.000	
			Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Gedung Kantor	Batu Ampar Kantor Batu Ampar			Jumlah terlaksananya pemeliharaan komputer, scanner, UPS, printer , AC dan Genset 7 jenis	7 jenis	13.000.000	15.000.000	
			Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Batu Ampar Kantor Batu Ampar			Jumlah terlaksananya pembayaran jasa service dan penggantian suku cadang 11 unit	11 unit	42.220.000	50.000.000	
			Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat		Indeks kepuasan masyarakat	3 Nilai					Panyipatan Kantor Panyipatan
			Peningkatan kualitas pelayanan, informasi dan penanganan pengaduan	Panyipatan Kantor Panyipatan			Jumlah orang 50 orang	50 orang	3.034.400	3.337.840	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Program perencanaan pembangunan Kecamatan		Indeks kepuasan masyarakat	3 Nilai					Panyipatan Kantor Panyipatan
			Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Panyipatan Kantor Panyipatan			Jumlah musrenbang 1 kali	1 kali	20.080.000	22.088.000	
			Program Koordinasi dan fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Pemerintahan Desa		Indeks kepuasan masyarakat	3 Nilai					Panyipatan Kantor Panyipatan
			Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan	Panyipatan Kantor Panyipatan			Jumlah peserta yang dilatih Paskibra 17 orang	17 orang	40.299.700	44.329.670	
			Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan	Panyipatan Kantor Panyipatan			Laporan informasi kependudukan yang tersusun 12 bulan	12 bulan	6.588.000	7.246.800	
			Program Fasilitasi dan koordinasi kegiatan keagamaan, sosial dan kebudayaan di masyarakat		Indeks kepuasan masyarakat	3 Nilai					Panyipatan Kantor Panyipatan
			Pentas seni, budaya, festival, lomba cipta dan kompetisi olah raga	Panyipatan Kantor Panyipatan			bantuan hibah berupa uang 16 proposal	16 proposal	910.963.950	1.000.000.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD	
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)					
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Pentas seni, budaya, festival, lomba cipta dan kompetisi olah raga	Panyipatan Kantor Panyipatan			Jumlah jenis kegiatan keagamaan, seni, sosial/ budaya, dan olahraga 2 jenis	2 jenis	155.993.400	171.592.740		
			Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial di kalangan masyarakat	Panyipatan Kantor Panyipatan			Jumlah kegiatan safari ramadhan 1 kali	1 kali	30.055.000	30.355.500		
			Program Koordinasi dan Fasilitasi ketenteraman dan ketertiban Umum Masyarakat		Indeks kepuasan masyarakat	3 Nilai					Panyipatan Kantor Panyipatan	
			Pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda	Panyipatan Kantor Panyipatan			jumlah peserta penyuluhan 60	60	10.367.500	11.404.250		
			Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia		Indeks kepuasan masyarakat	3 Nilai					Panyipatan Kantor Panyipatan	
			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Panyipatan Kantor Panyipatan			Jumlah Kendaraan Dinas yang terpelihara 13 unit	13 unit	50.500.000	-		
			Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat			Persentasi peningkatan pelayanan masyarakat	100 %					Pelaihari

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pengelolaan survei kepuasan masyarakat	Pelaihari			Jumlah dokumen pengelolaan survei kepuasan masyarakat 1 dokumen	1 dokumen	13.150.000	14.465.000	
			Program perencanaan pembangunan Kecamatan		Indeks Kepuasan Masyarakat	0 nilai					Pelaihari
			Perencanaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan musyawarah desa	Pelaihari			Jumlah Musyawarah perencanaan pembangunan di Desa 3 kali	3 kali	25.550.000	28.105.000	
			Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Pelaihari			Jumlah Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 2 kali	2 kali	13.440.000	14.784.000	
			Program Koordinasi dan fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Pemerintahan Desa		Indeks Kepuasan Masyarakat	0 nilai					Pelaihari
			Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Pelaihari			Jumlah Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang	1 kali	7.157.500	7.873.250	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							pemerintahan desa 1 kali				
			Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Pelaihari			Jumlah Terlaksananya penyuluhan pembinaan kebangsaan dan ketahanan nasional 1 kali	1 kali	8.047.500	8.852.250	
			Program Fasilitasi dan koordinasi kegiatan keagamaan, sosial dan kebudayaan di masyarakat		Indeks Kepuasan Masyarakat	0 nilai					Pelaihari
			Pentas seni, budaya, festival, lomba cipta dan kompetisi olah raga	Pelaihari			Jumlah terlaksananya STQ Tingkat Kecamatan Pelaihari 1 kali Jumlah terkirimnya Kafilah/Official dalam kegiatan STQ/MTQ Tingkat Kabupaten Tanah Laut 125 orang Jumlah terlaksananya buka	1 kali 125 orang 1 kali	1.383.342.400	1.521.676.640	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							bersama/safari ramadhan Bupati, Wakil Bupati, Pejabat Pemkab dengan masyarakat 1 kali				
			Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia		Indeks Kepuasan Masyarakat	0 nilai					Pelaihari
			Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Pelaihari			Jumlah terlaksananya pembayaran jasa service, penggantian suku cadang, BBM mobil Jabatan 2 unit	2 unit	29.153.600	32.067.300	
			Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat		Terlaksananya penyelenggaraan pelayanan masyarakat	0 dokumen					Tambang Ulang Kantor Tambang Ulang

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penyelenggaraan Pelayanan Masyarakat				Terbayarnya Jasa PTT Pelayanan 1 Tahun Terlaksananya kegiatan penyelenggaraa n pelayanan masyarakat 1 Dokumen	1 Tahun 1 Dokumen	29.500.000	13.000.000	
			Program perencanaan pembangunan Kecamatan		Terlaksananya kegiatan perencanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan musyawarah desa; Terselenggaranya kegiatan penyenggaraan musrenbang kecamatan	0 dokumen; 0 dokumen					Tambang Ulang Kantor Tambang Ulang
			Perencanaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan musyawarah desa				Terlaksananya kegiatan perencanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan musyawarah desa 9 dokumen	9 dokumen	7.000.000	7.000.000	
			Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan				Terlaksananya Musrenbang Kecamatan 9 dokumen	9 dokumen	12.000.000	12.000.000	



No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Program Koordinasi dan fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Pemerintahan Desa		Terlaksananya kegiatan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintah desa; Terlaksananya kegiatan fasilitasi pemilihan dan pelantikan kepala desa; Terlaksananya pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan (Paskibraka); Terlaksananya kegiatan fasilitasi penyelenggaraan administrasi desa	0 dokumen; 0 kali kegiatan; 0 jumlah orang; 0 dokumen					Tambang Ulang Kantor Tambang Ulang
			pendidikan dan pelatihan kepemudaan	Tambang Ulang Kantor Tambang Ulang			Terlaksananya kegiatan pendidikan dan pelatihan kepemudaan 1 Kegiatan	1 Kegiatan	45.000.000	45.000.000	
			Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Tambang Ulang Kantor Tambang Ulang			Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraa n pemerintah desa 9 dokumen	9 dokumen	5.000.000	23.000.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Kegiatan fasilitasi penyelenggaraan administrasi desa				Jumlah Dokumen 2 Dokumen	2 Dokumen	7.000.000	-	
			Fasilitasi dan Pelantikan Kepala Desa				Terlaksananya fasilitasi dan pelantikan kepala desa 1 kali kegiatan	1 kali kegiatan	-	-	
			Program Fasilitasi dan koordinasi kegiatan keagamaan, sosial dan kebudayaan di masyarakat		Terlaksananya kegiatan pentas seni,budaya ,festival ,lomba cipta dan kompetisi olahraga; Terlaksananya kegiatan peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat; Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi penanggulangan kemiskinan dikecamatan	0 orang; 0 orang; 0 orang					Tambang Ulang Kantor Tambang Ulang
			Pentas seni, budaya, festival, lomba cipta dan kompetisi olah raga				Terlaksananya kegiatan pentas seni,budaya,festival,lomba cipta dan kompetisi olahraga 2.500 orang	2.500 orang	709.415.000	445.140.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial di kalangan masyarakat				Terlaksananya peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial di kalangan masyarakat 400 orang	400 orang	20.000.000	26.000.000	
			Koordinasi dan Fasilitasi Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan	Tambang Ulang Kantor Tambang Ulang			Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi penanggulangan kemiskinan di kecamatan 24 orang	24 orang	-	6.000.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia		Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran; Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana perkantoran; Terlaksananya pembangunan gedung kantor; Terlaksananya rehabilitasi sedang/berat gedung kantor; Terlaksananya peningkatan kemampuan teknis aparatur; Terlaksananya pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	0 Unit; 0 jenis; 0 unit; 0 orang; 0 orang					Tambang Ulang Kantor Tambang Ulang
			Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran				Jumlah Jenis Mobil / Kendaraan Dinas Operasional 1 Tahun	1 Tahun	22.000.000	-	
			Peningkatan Kemampuan Teknis Aparatur				Jumlah Orang 3 Orang	3 Orang	-	-	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD	
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)					
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tambang Ulang Kantor Tambang Ulang			Jumlah Peralatan Gedung Kantor 3 Jenis	3 Jenis	45.000.000	-		
			Pengadaan Mebeleur				0 Jumlah Jenis 1 Jenis	0 1 Jenis	6.000.000	-		
			Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Gedung Kantor				Jumlah Jenis 1 Tahun	1 Tahun	6.500.000	-		
			Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat		IKM	0 Nilai					Bati-Bati Kantor Bati-Bati	
			Penyelenggaraan Pelayanan Masyarakat				jumlah dokumen 1 dokumen	1 dokumen	15.000.000	-		
			Program perencanaan pembangunan Kecamatan		IKM	0 Nilai					Bati-Bati Kantor Bati-Bati	
			Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan				jumlah dokumen 1 dokumen	1 dokumen	12.821.000	-		
			Program Koordinasi dan fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Pemerintahan Desa		IKM	0 Nilai					Bati-Bati Kantor Bati-Bati	
			Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDesa					Jumlah Dokumen 14 Dokumen	14 Dokumen	16.000.000	-	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD	
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)					
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa				jumlah desa 14 desa	14 desa	20.400.000	-		
			Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum				jumlah orang 32 orang	32 orang	44.124.000	-		
			Program Fasilitasi dan koordinasi kegiatan keagamaan, sosial dan kebudayaan di masyarakat		IKM	0 Nilai					Bati-Bati Kantor Bati-Bati	
			Pentas seni, budaya, festival, lomba cipta dan kompetisi olah raga				jumlah orang 0 orang	0 orang	227.840.000	-		
			Pentas seni, budaya, festival, lomba cipta dan kompetisi olah raga				jumlah organisasi 14 organisasi	14 organisasi	993.000.000	-		
			Peningkatan Silaturahmi antar instansi dan masyarakat (Safari Ramadhan)				jumlah orang 0 orang	0 orang	27.000.000	-		
			Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia			IKM	0 Nilai					Bati-Bati Kantor Bati-Bati

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya				Jumlah Orang/Set 30 Set	30 Set	18.000.000	-	
			Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat		IKM	0 NILAI					Bumi Makmur
			Penyelenggaraan Pelayanan Masyarakat				terfasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah kecamatan / terlaksananya fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah kecamatan 1 dokumen	1 dokumen	20.071.000	21.000.000	
			Program perencanaan pembangunan Kecamatan			IKM	0 NILAI				

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Perencanaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan musyawarah desa	Bumi Makmur			Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa / terlaksananya peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa 11 jumlah desa	11 jumlah desa	5.643.500	6.207.850	
			Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Bumi Makmur			Terfasilitasinya Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan pembangunan desa / terlaksananya Musrenbang Kecamatan 1 Dokumen	1 Dokumen	26.432.800	29.076.080	
			Program Koordinasi dan fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Pemerintahan Desa		IKM	0 NILAI					Bumi Makmur



No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Bumi Makmur			terfasilitasinya adminstrasi tata pemerintahan desa / terlaksananya penilaian lomba desa 33 dokumen	33 dokumen	50.000.000	55.000.000	
			Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Bumi Makmur			Terbinanya Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila, pelaksanaan undang - undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, pelstarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan negara kesatuan republik indonesia / terlaksananya Pembinaan wawasan	83 orang	40.000.000	4.400.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila, pelaksanaan undang - undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, pelstarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan negara kesatuan republik indonesia 83 orang				
			PROGRAM KOORDINASI DAN FASILITASI KEGIATAN KEAGAMAAN, SOSIAL DAN KEBUDAYAAN DI MASYARAKAT		IKM	0 NILAI					Bumi Makmur

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pentas seni, budaya, festival, lomba cipta dan kompetisi olahraga				terbinanya kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, ras dan golongan / tercapai dan terbinanya kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, ras dan golongan 8 kegiatan	8 kegiatan	760.000.000	1.000.000.000	
			Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat	Bumi Makmur			terbinanya kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, ras dan golongan / tercapai dan terbinanya kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, ras dan golongan 0	0	239.801.200	263.781.320	
			Program perencanaan pembangunan Kecamatan		jumlah dokumen	0 nilai					Kintap Kantor Kintap
			Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Kintap Kantor Kintap			jumlah dokumen 1 dokumen	1 dokumen	15.000.000	-	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Program Koordinasi dan fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Pemerintahan Desa		IKM	1 nilai					Kintap Kantor Kintap
			Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDesa				0	0	-	-	
			Pendampingan pengelolaan keuangan desa				Terdampinginya Pengelolaan Keuangan Desa 14 Desa	14 Desa	46.520.000	-	
			Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Kintap Kantor Kintap			jumlah orang 33 orang	33 orang	86.696.000	-	
			Program Fasilitasi dan koordinasi kegiatan keagamaan, sosial dan kebudayaan di masyarakat		IKM	1 nilai					Kintap Kantor Kintap
			Pentas seni, budaya, festival, lomba cipta dan kompetisi olah raga				jumlah kegiatan 7 kali	7 kali	930.000.000	-	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD	
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)					
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial di kalangan masyarakat	Kintap Kantor Kintap			Terlaksananya Kegiatan STQ dan Pembinaan / Fasilitas Calon Kafilah MTQ di Kecamatan Kintap dalam rangka pengiriman Kafilah Kecamatan Kintap untuk mengikuti MTQ Tk. Kabupaten 1 Kali	1 Kali	104.373.000	-		
			Program Koordinasi dan Fasilitas ketenteraman dan ketertiban Umum Masyarakat		IKM	1 nilai					Kintap Kantor Kintap	
			Koordinasi dan fasilitasi pembinaan dan ketertiban umum Msarakat	Kintap Kantor Kintap				Terlaksananya Koordinasi dan fasilitas Ketentrman dan Ketertiban umum Masyarakat 1 Tahun	1 Tahun	15.000.000	-	
			Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia		IKM	1 nilai						Kintap Kantor Kintap

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Kintap Kantor Kintap			Jumlah Kendaraan yang dipelihara 6 unit	6 unit	59.944.000	-	
			Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Kintap Kantor Kintap			jumlah pemeliharaan 2 Jenis	2 Jenis	64.469.800	-	
			Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Kintap Kantor Kintap			Jumlah Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas 5 Jenis	5 Jenis	5.000.000	-	
			Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Kintap Kantor Kintap			Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 6 Jenis	6 Jenis	30.000.000	-	
			Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat		Indek Kepuasan Masyarakat	3 Nilai					Takisung Kantor Takisung
			Penyelenggaraan Pelayanan Masyarakat	Takisung Kantor Takisung			Jumlah Dokumen IKM 1 Dokumen	1 Dokumen	50.541.805	22.172.850	
			Program perencanaan pembangunan Kecamatan		Indek Kepuasan Masyarakat	3 Nilai					Takisung Kantor Takisung
			Perencanaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan musyawarah desa	Takisung Kantor Takisung			Jumlah Dokumen Hasil Musdes 12 Dokumen	12 Dokumen	4.455.000	4.677.750	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Takisung Kantor Takisung			Jumlah Dokumen hasil Musrenbang 1 Dokumen	1 Dokumen	18.046.000	17.603.040	
			Program Koordinasi dan fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Pemerintahan Desa		Indek Kepuasan Masyarakat	1 Nilai					Takisung Kantor Takisung
			Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa				Jumlah Dokumen Administrasi desa yang difasilitasi 12 Dokumen	12 Dokumen	26.831.100	24.081.200	
			Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Takisung Kantor Takisung			Jumlah peserta paskibra dan peserta Rapat Korrdinasi 90 Orang	90 Orang	2.750.000	77.445.700	
			Fasilitasi dan Pelantikan Kepala Desa				Jumlah desa terfasilitasi pemilihan kepala desa 3 desa	3 desa	-	-	
			Program Fasilitasi dan koordinasi kegiatan keagamaan, sosial dan kebudayaan di masyarakat		Indek Kepuasan Masyarakat	3 Nilai					Takisung Kantor Takisung

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pentas seni, budaya, festival, lomba cipta dan kompetisi olah raga	Takisung Kantor Takisung			Jumlah Orang yang mengikuti kegiatan pentas seni, budaya, festival, lomba cipta dan kompetisi olahraga 4.250 Orang	4.250 Orang	1.695.116.155	355.479.835	
			Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial di kalangan masyarakat	Takisung Kantor Takisung			Jumlah Peserta Safari Ramadhan 600 orang	600 orang	21.295.000	22.360.012	
			Program Koordinasi dan Fasilitasi ketenteraman dan ketertiban Umum Masyarakat		Indek Kepuasan Masyarakat	3 Nilai					Takisung Kantor Takisung
			Koordinasi dan fasilitasi pembinaan dan ketertiban umum Msarakat	Takisung Kantor Takisung			Jumlah Koordinasi dan fasilitasi ketentraman dan ketertiban umum masyarakat 12 Kali	12 Kali	5.569.700	3.748.500	
			Pembinaan perlindungan masyarakat	Takisung Kantor Takisung			Jumlah orang yang mengikuti Pelatihan 36 Orang	36 Orang	7.129.700	7.489.650	



No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia		Indek Kepuasan Masyarakat	3 Nilai					Takisung Kantor Takisung
			Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran				Jumlah terpeliharanya kendaraan Dinas 7 Unit	7 Unit	17.049.300	-	
			Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia		IKM	1 nilai					Angsau
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Angsau			jumlah pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 2 jenis	2 jenis	5.600.000	6.160.000	
			Pengadaan perlengkapan gedungkantor	Angsau			Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 2 jenis	2 jenis	5.900.000	6.490.000	
			Pengadaan peralatan gedung kantor	Angsau			Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung kantor 6 jenis	6 jenis	60.695.000	66.764.500	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Angsau			Jumlah Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor 1 Tahun	1 Tahun	8.570.000	94.270.000	
			Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pengembangan ekonomi		IKM	1 nilai					Angsau
			Kegiatan pelaksanaan Musyawarah pembangunan desa/kelurahan	Angsau			jumlah peserta musyawarah pembangunan desa/ kelurahan 1 Tahun	1 Tahun	9.840.000	10.824.000	
			Program Pembangunan Sarana & Prasarana Kelurahan & Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		IKM	1 nilai					Angsau
			Kegiatan Pembangunan Sarana & Prasarana Kelurahan	Angsau			Jumlah kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan 3 kegiatan	3 kegiatan	665.850.000	732.435.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (DAU)	Angsau			Jumlah kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 16 kegiatan	16 kagiatan	154.315.000	169.746.500	
			Pemeliharaan Kendaraan Operasional Pemadam Kebakaran dan Persampahan (DAU Tambahan)	Angsau			Terpeliharanya kendaraan operasional pemadam kebakaran dan persampahan 2 unit	2 unit	73.625.000	80.987.500	
			Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia		IKM	1 NILAI					Karang Taruna
			Peningkatan Kemampuan Teknis Aparatur	Karang Taruna			Jumlah peningkatan kemampuan teknis aparatur 1 Tahun	1 Tahun	25.000.000	-	
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Karang Taruna			Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 12 Orang	12 Orang	12.540.000	-	
			Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pengembangan			IKM	1 NILAI				

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ekonomi								
			Kegiatan penyelenggaraan promosi produk usaha mikro kecil menengah	Karang Taruna			Jumlah pengembangan saran promosi dan hasil produksi 1 Kali	1 Kali	17.000.000	-	
			Kegiatan pelaksanaan Musyawarah pembangunan desa/kelurahan	Karang Taruna			Jumlah peserta Musyawarah pembangunan desa/kelurahan 5 Dokumen Musrenbang	5 Dokumen Musrenbang	7.208.000	-	
			Kegiatan Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Karang Taruna			Jumlah pelaksanaan kegiatan gotong royong di kelurahan dan lomba kebersihan 22 RT	22 RT	7.700.000	-	
			Program Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat		IKM	1 NILAI					Karang Taruna

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Kegiatan Fasilitasi pembinaan dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	Karang Taruna			Jumlah Pelaksanaan kegiatan fasilitasi pembinaan dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan 8 Kegiatan	8 Kegiatan	144.106.600	-	
			Program Pembangunan Sarana & Prasarana Kelurahan & Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		IKM	1 NILAI					Karang Taruna
			Kegiatan Pembangunan Sarana & Prasarana Kelurahan	Karang Taruna			Jumlah pembangunan sarana dan prasarana di kelurahan 6 Kegiatan	6 Kegiatan	662.438.200	-	
			Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (DAU)	Karang Taruna			Jumlah tersedianya pemberian Makanan Tambahan Bagi Balita dan Lansia 180 Orang	180 Orang	15.120.000	-	
			Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia			IKM	0 Nilai				

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Pabahanan			Jumlah Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran 10 Unit	10 Unit	-	-	
			Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor	Pabahanan			Jumlah rehab sedang/berat rumah gedung kantor 1 paket	1 paket	50.000.000	-	
			Peningkatan Kemampuan Teknis Aparatur	Pabahanan			Jumlah peserta yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal 5 orang	5 orang	25.000.000	-	
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Pabahanan			jumlah pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 10 stel	10 stel	4.000.000	-	
			Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Pabahanan			Jumlah pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran 10 unit	10 unit	10.800.000	-	
			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Pabahanan			Jumlah pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 12 bulan	12 bulan	1.600.000	-	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pengembangan ekonomi		IKM	0 Nilai					Pabahanan
			Kegiatan penyelenggaraan promosi produk usaha mikro kecil menengah	Pabahanan			jumlah pengembangan sarana promosi dan hasil produksi 1 kali	1 kali	16.997.000	-	
			Kegiatan pelaksanaan Musyawarah pembangunan desa/kelurahan	Pabahanan			Jumlah peserta yang mengikuti musrenbang RKPD tingkat Kelurahan 50 orang	50 orang	8.500.000	-	
			Kegiatan Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Pabahanan			jumlah pelaksanaan kegiatan gotong royong dikelurahan 12 kali	12 kali	9.432.000	-	
			Program Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat		IKM	0 Nilai					Pabahanan
			Kegiatan Fasilitas pembinaan dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	Pabahanan			Jumlah pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan lembaga masyarakat di kelurahan 10 kali	10 kali	259.367.700	-	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Kegiatan pembinaan organisasi perempuan	Pabahanan			Jumlah pertemuan dalam rangka pembinaan organisasi kemasyarakatan 10 kali	10 kali	233.700.000	-	
			Program Pembangunan Sarana & Prasarana Kelurahan & Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		IKM	1 Nilai					Pabahanan
			Kegiatan Pembangunan Sarana & Prasarana Kelurahan	Pabahanan			Jumlah pembangunan sarana dan prasarana di kelurahan 4 Kegiatan	4 Kegiatan	366.000.000	-	
			Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia		IKM	1 nilai					Pelaihari
			Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Pelaihari			Jumlah jasa pemeliharaan kendaraan dinas roda 2 11 bulan	11 bulan	2.019.700	10.000.000	
			Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Pelaihari			Jumlah peralatan 2 jenis	2 jenis	20.000.000	-	



No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pelaihari			Jumlah pemeliharaan 1 gedung	1 gedung	50.000.000	-	
			Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pengembangan ekonomi		IKM	1 nilai					Pelaihari
			Kegiatan pelaksanaan Musyawarah pembangunan desa/kelurahan	Pelaihari			Jumlah orang 55 orang	55 orang	9.000.000	9.500.000	
			Program Pembangunan Sarana & Prasarana Kelurahan & Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		IKM	1 nilai					Pelaihari
			Kegiatan Pembangunan Sarana & Prasarana Kelurahan	Pelaihari			Jumlah Kegiatan 3 kegiatan	3 kegiatan	331.443.000	357.772.800	
			Kegiatan Pembangunan Sarana & Prasarana Kelurahan	Pelaihari			Jumlah pembangunan prasarana dan sarana 5 Kegiatan	5 Kegiatan	112.000.000	-	
			Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (DAU)	Pelaihari			Jumlah Kegiatan 10 kegiatan	10 kegiatan	226.130.200	-	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (DAU)	Pelaihari			jumlah pelaksanaan sosialisasi/pelatihan/bimtek masyarakat 3 kali	3 kali	192.680.000	-	
			Pemeliharaan Kendaraan Operasional Pemadam Kebakaran dan Persampahan (DAU Tambahan)	Pelaihari			Terpeliharanya kendaraan operasional pemadam kebakaran dan persampahan 2 unit	2 unit	61.320.000	-	
			Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia		IKM	1 NILAI					Sarang Halang
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Sarang Halang			0	0	-	-	
			Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Sarang Halang			0	0	-	-	
			Pembangunan Gedung Kantor	Sarang Halang			Jumlah Bangunan Kantor (Garasi) 1 Buah	1 Buah	80.000.000	88.000.000	
			Peningkatan Kemampuan Teknis Aparatur	Sarang Halang			Jumlah Peningkatan Kemampuan teknis Aparatur 12 Bulan	12 Bulan	30.000.000	33.000.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Sarang Halang			Sepatu Kerja 10 Buah Terlaksananya Penyediaan Baju PDH Coklat dan Perlengkapannya 10 Stel	10 Buah 10 Stel	6.500.000	7.150.000	
			Pengadaan perlengkapan gedungkantor	Sarang Halang			Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor 7 Jenis	7 Jenis	36.000.000	39.600.000	
			Pengadaan peralatan gedung kantor	Sarang Halang			Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang Dibeli 4 Jenis	4 Jenis	40.400.000	44.440.000	
			Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Sarang Halang			Jumlah Gedung Kantor yang Dipelihara 1 Unit	1 Unit	9.500.000	10.450.000	
			Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pengembangan ekonomi		IKM	0 BAIK					Sarang Halang
			Kegiatan pelaksanaan Musyawarah pembangunan desa/kelurahan	Sarang Halang				Jumlah Peserta Musyawarah pembangunan desa/kelurahan 50 Orang	50 Orang	16.000.000	17.600.000

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Kegiatan Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Sarang Halang			Jumlah Pelaksanaan kegiatan gotong royong di kelurahan dan lomba kebersihan 17 Kali	17 Kali	40.580.000	44.638.000	
			Program Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat		IKM	0 NILAI					Sarang Halang
			Kegiatan pembinaan organisasi perempuan	Sarang Halang			Jumlah Pertemuan Dalam Rangka Pembinaan Organisasi Perempuan 8 Kali	8 Kali	107.300.000	118.030.000	
			Kegiatan Fasillitasi pembinaan dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	Sarang Halang			Jumlah Pelaksanaan kegiatan fasilitas pembinaan dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan 15 kali	15 kali	230.000.000	253.000.000	
			Program Pembangunan Sarana & Prasarana Kelurahan & Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		IKM	0 NILAI					Sarang Halang

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD	
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)					
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Kegiatan Pembangunan Sarana & Prasarana Kelurahan	Sarang Halang			Jumlah Kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana di kelurahan 4 Kegiatan	4 Kegiatan	200.000.000	220.000.000		
			Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (DAU)	Sarang Halang			Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi/ Pelatihan/Bimtek Masyarakat 10 Kegiatan	10 Kegiatan	166.000.000	182.600.000		
			Pemberdayaan Masyarakat dan Desa									
			Program Pembinaan, Pemberdayaan, Tata Kelola Aparatur dan Administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan		Cakupan kinerja Bina Pemerintahan Desa	0 %					Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
			Evaluasi Tingkat Perkembangan Desa	Kabupaten			Jumlah aparatur pemerintahan desa yang dibina 11 desa	11 desa	550.000.000	-		
			Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	SKPD			Jumlah Aparatur Pemdes yang dibina 130 orang	130 orang	35.563.800	-		

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Program Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat		Cakupan kinerja program aksi membangun bersama masyarakat	0 %					Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Bappeda Kabupaten Tanah Laut

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Peningkatan Kapasitas Kelembagaan	SKPD			: Jumlah pelaksanaan kegiatan pembinaan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) 1 desa : Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Manunggal Tuntung Pandang 23 desa : Jumlah Pelaksanaan Jambore Kader Posyandu 1 kali Kegiatan : Jumlah Pelaksanaan Peringatan HKG PKK 1 kali HKG PKK : Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Pola Asuh Anak dan Remaja 1 kali Sosialisasi : Jumlah Pelaksanaan Workshop LP3 Organisasi Wanita 1 kali Workshop	1 desa 23 desa 1 kali Kegiatan 1 kali HKG PKK 1 kali Sosialisasi 1 kali Workshop 1 kali Rakon	1.513.991.123	-	



No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							: Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi PKK 1 kali Rakon				
			Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	SKPD			Jumlah Terealisasinya pembuatan program revisi database PUEM 1 Program database JUmlah Kecamatan yang melakukan pemetaan usaha ekonomi desa 2 kecamatan	1 Program database 2 kecamatan	89.595.848	-	
			Program Pembinaan, Pendataan dan Pengembangan Kawasan Perdesaan		Cakupan ketersediaan data terkini profile dan potensi desa	0 %					Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pembinaan, pengelolaan data dan profil desa	Kabupaten			Jumlah dokumen updating data profile desa 130 dokumen Jumlah Desa Berciri Khas Yang Dibina 5 Desa Jumlah Desa dan Kelurahan yang dievaluasi 0 desa/kelurahan	130 dokumen 5 Desa 0 desa/kelurahan	812.156.818	-	
			Pembinaan, pemberdayaan dan pelestarian adat dan budaya	SKPD			Jumlah Pengurus LAD yang diberdayakan dan didayagunakan melalui pembinaan 10 LAD	10 LAD	94.272.652	-	
			Pembinaan, fasilitasi, perencanaan dan pengembangan kawasan ekonomi perdesaan	SKPD			Jumlah Sosialisasi Pembentukan BUMDesa bersama dan jumlah binaan Badan Kerjasama Antar Desa 0 Kec/BKAD	0 Kec/BKAD	126.471.100	-	
			Fasilitas Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	SKPD			Jumlah aparatur Pemdes yang dibina 130 orang	130 orang	332.377.500	-	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Desa	SKPD			Jumlah aparatur Pemdes yang dibina 130 orang	130 orang	45.625.000	-	
			Fasilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa	SKPD			Jumlah aparatur Pemdes yang dibina, Tim Evaluasi Raperdes tentang APBDes Kecamatan 1.560 orang	1.560 orang	2.782.215.868	-	
			Peningkatan Fasilitas Pemerintahan Desa dan BPD	SKPD			Jumlah Pengembangan Kapasitas paratur Pemdes dan BPD 7 angkatan	7 angkatan	685.394.356	-	
			Fasilitas Penyelenggaraan Musyawarah Desa	SKPD			Jumlah Pembinaan dalam MusDes 130 desa	130 desa	25.547.400	-	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	SKPD			Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Yang Aktif 5 BUMDesa Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) yang Terbentuk 90 BUMDesa Jumlah Pelaksanaan Bursa Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) 1 kali Jumlah Pelatihan Peningkatan Kapasitas Pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) 1 kali	5 BUMDesa 90 BUMDesa 1 kali 1 kali	283.095.428	-	
			Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	SKPD			Terpilih dan dilantiknya kepala desa 26 desa	26 desa	10.000.000	-	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Fasilitasi Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga				Jumlah Sosialisasi IPL dan Laporan Inventarisasi kepemilikan Lahan 2 desa ekstrasnmigrasi	2 desa ekstrasnmigrasi	150.513.500	-	
			Program Pemberdayaan Masyarakat		IKM	0 Nilai					Kurau Kantor Kurau
			Fasilitasi Pengembangan Sarana Promosi dan Hasil Produksi	Kurau Kantor Kurau			Jumlah Pameran 2 Pameran	2 Pameran	20.870.000	22.957.000	
			Pembinaan dan Pelatihan Masyarakat Desa	Kurau Kantor Kurau			Jumlah Orang 70 Orang	70 Orang	15.138.000	16.651.800	
			Program Pemberdayaan Masyarakat		ikm	3 nilai					Bajuin Kantor Bajuin
			Fasilitasi Pengembangan Sarana Promosi dan Hasil Produksi	Bajuin Kantor Bajuin			Jumlah Kegiatan 1 Kegiatan	1 Kegiatan	17.200.000	40.000.000	
			Pemberian Stimulan Pembangunan Desa	Bajuin Kantor Bajuin			jumlah desa 9 desa	9 desa	7.700.000	27.690.000	
			Program Pemberdayaan Masyarakat		IKM	0 Nilai					Jorong Kantor Jorong

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Fasilitasi Pengembangan Sarana Promosi dan Hasil Produksi	Kabupaten			Terlaksananya Promosi hasil Produksi UKM 5 UKM Terlaksananya Festival Anggrek 1 Kali Terlaksananya Kegiatan TTG 1 Kali	5 UKM 1 Kali 1 Kali	38.249.800	40.000.000	
			Pembinaan dan Pelatihan Masyarakat Desa	Jorong Kantor Jorong			Terlaksananya Kegiatan Pemberian Stimulan Pembangunan Desa 11 Desa Terlaksananya Kegiatan Pembinaan dan Pelatihan Masyarakat Desa 1 Kali Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan 1 Kali	11 Desa 1 Kali 1 Kali	52.439.000	53.439.000	
			Pemberian Stimulan Pembangunan Desa				Terlaksananya Kegiatan Pemberian Stimulan Pembangunan Desa 0 desa	0 desa	-	-	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Program Pemberdayaan Masyarakat		IKM	0 Nilai					Batu Ampar Kantor Batu Ampar
			Fasilitasi Pengembangan Sarana Promosi dan Hasil Produksi				Jumlah terlaksananya UMKM yang difasilitasi kegiatan Pameran 5 UMKM	5 UMKM	20.000.000	27.500.000	
			Program Pemberdayaan Masyarakat		Indeks kepuasan masyarakat	3 Nilai					Panyipatan Kantor Panyipatan
			Fasilitasi Pengembangan Sarana Promosi dan Hasil Produksi	Panyipatan Kantor Panyipatan			Jumlah pameran/ expo yang terikuti 1 kali	1 kali	15.530.400	17.083.440	
			Kegiatan pembinaan organisasi perempuan	Panyipatan Kantor Panyipatan			Pertemuan dan fasilitasi penanganan masalah-masalah kesejahteraan keluarga 12 bulan	12 bulan	20.950.000	23.045.000	
			Program Pemberdayaan Masyarakat		Indeks Kepuasan Masyarakat	0 nilai					Pelaihari
			Fasilitasi Pengembangan Sarana Promosi dan Hasil Produksi	Pelaihari					42.536.000	46.789.600	
			Pembinaan dan Pelatihan Masyarakat Desa	Pelaihari					40.955.000	45.050.500	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Program Pemberdayaan Masyarakat		Terlaksananya fasilitasi pengembangan sarana promosi hasil produksi; Terlaksananya pemberian stimulan pembangunan desa; Terlaksananya kegiatan pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta kesetaraan gender	0 kegiatan; 0 desa; 0 kegiatan					Tambang Ulang Kantor Tambang Ulang
			Fasilitasi Pengembangan Sarana Promosi dan Hasil Produksi	Tambang Ulang Kantor Tambang Ulang			Terlaksananya kegiatan fasilitasi pengembangan sarana promosi dan hasil produksi 2 kegiatan	2 kegiatan	20.000.000	22.000.000	
			Pemberian Stimulan Pembangunan Desa	Tambang Ulang Kantor Tambang Ulang			Terlaksananya kegiatan stimulan pembangunan desa 0 desa	0 desa	-	28.000.000	



No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Kegiatan Pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta kesetaraan gender	Tambang Ulang Kantor Tambang Ulang			Terlaksananya pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta kesetaraan gender 3 kegiatan	3 kegiatan	12.000.000	25.000.000	
			Program Pemberdayaan Masyarakat		IKM	0 Nilai					Bati-Bati Kantor Bati-Bati
			Fasilitasi Pengembangan Sarana Promosi dan Hasil Produksi				jumlah kepesertaan pameran 2 kali	2 kali	18.540.000	-	
			Pemberian Stimulan Pembangunan Desa				jumlah kegiatan 1 kali	1 kali	18.400.000	-	
			Kegiatan Pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta kesetaraan gender				Jumlah Kali 4 Kali	4 Kali	11.995.000	-	
			Program Pemberdayaan Masyarakat			IKM	0 NILAI				

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Fasilitasi Pengembangan Sarana Promosi dan Hasil Produksi	Bumi Makmur			Terpenuhinya Sinkronisasi Program Kerja dan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan / terlaksananya Sinkronisasi Program Kerja dan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan (terlaksananya Pameran hasil produksi daerah) 1 Pameran	1 Pameran	17.000.000	18.700.000	
			Pembinaan dan Pelatihan Masyarakat Desa	Bumi Makmur			Terlaksananya Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan / terbinanya Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan ( terlaksananya pembinaan dan	40 orang	13.000.000	14.300.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							pelatihan Masyarakat Desa ) 40 orang				
			Kegiatan Pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta kesetaraan gender	Bumi Makmur			Terpenuhinya Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan / Terbinanya Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 0	0	20.000.000	22.000.000	
			Program Pemberdayaan Masyarakat		IKM	1 nilai					Kintap Kantor Kintap
			Fasilitasi Pengembangan Sarana Promosi dan Hasil Produksi	Kabupaten			jumlah pameran 1 pameran	1 pameran	17.000.000	-	
			Program Pemberdayaan Masyarakat		Indek Kepuasan Masyarakat	3 Nilai					Takisung Kantor Takisung
			Fasilitasi Pengembangan Sarana Promosi dan Hasil Produksi	Takisung Kantor Takisung			Jumlah Pameran 1 kali	1 kali	20.070.000	21.073.500	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD	
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)					
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Pembinaan dan Pelatihan Masyarakat Desa	Takisung Kantor Takisung			Jumlah Peserta Pelatihan 120 orang	120 orang	28.987.000	30.436.350		
			Pemberian Stimulan Pembangunan Desa	Takisung Kantor Takisung			Jumlah peserta kegiatan pemberian stimulan 300 Orang	300 Orang	23.694.000	24.878.700		
			Kearsipan									
			Program Pengembangan dan Tata Kelola Kearsipan		Tingkat tertib administrasi kearsipan daerah	0 Persen					Dinas Perpustakaan dan kearsipan	
				Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	SKPD			Jumlah berkas 1.000 Berkas	1.000 Berkas	10.000.000	10.000.000	
				Pembinaan dan tata kelola layanan informasi arsip	SKPD			Jumlah Laporan 1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000	15.590.000	
				Tata Kelola dan Pemeliharaan Arsip	Kabupaten , SKPD			Jumlah dokumen/berkas arsip 2.100 Dokumen/Berkas	2.100 Dokumen/Be rkas	29.997.800	32.000.000	
				Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	SKPD			Jumlah Pendampingan Kearsipan 16 Kecamatan dan SKPD	16 Kecamatan dan SKPD	61.340.000	65.000.000	
				Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	SKPD			Jumlah Arsip Statis 600 Berkas	600 Berkas	24.995.000	28.000.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD	
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)					
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	SKPD			Jumlah Laporan 1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000	30.000.000		
			Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	SKPD			Jumlah SKPD yang dibina 40 SKPD	40 SKPD	75.060.000	80.000.000		
			Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	SKPD			Jumlah Laporan 1 Dokumen	1 Dokumen	23.590.000	23.590.000		
			Komunikasi dan Informatika									
			Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa		Persentase SKPD yang menerapkan e-government	8,9 Persen					Dinas Komunikasi dan Informatika	
			Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Kabupaten , SKPD			Jumlah SKPD yang terintegrasi dalam jaringan intra Pemerintah Daerah 4 SKPD	4 SKPD	850.000.000	-		
			Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Kabupaten , SKPD			Jumlah rapat sinkronisasi rencana induk penunjang SPBE 3 kali	3 kali	25.000.000	-		

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Kabupaten , SKPD			Jumlah pengelolaan Pusat Data 1 kegiatan	1 kegiatan	24.000.000	-	
			Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Kabupaten , SKPD			Jumlah aplikasi penunjang e-government yang dikembangkan 4 aplikasi	4 aplikasi	110.000.000	-	
			Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Kabupaten , SKPD			Jumlah kebijakan tata kelola TIK 1 dokumen	1 dokumen	20.000.000	-	
			Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi		Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah	0 Persen					Dinas Komunikasi dan Informatika
			Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten , SKPD			Jumlah layanan keamanan informasi pemerintah daerah 1 layanan	1 layanan	50.000.000	-	
			Program Pengelolaan Komunikasi Publik		Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat	0 Persen					Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Kecamatan						
			Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat	Kabupaten , SKPD			Jumlah sebaran data informasi 100 data	100 data	380.000.000	-	
			Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Kabupaten , Luar Daerah			Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat 3 Kelompok	3 Kelompok	40.000.000	-	
			Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Kabupaten , SKPD			Jumlah pengaduan kepada instansi terkait 10 aduan	10 aduan	21.000.000	-	
			Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Kabupaten , SKPD			Jumlah bahan informasi bagi masyarakat/publik yang disebarluaskan melalui media komunikasi publik 300 informasi	300 informasi	200.000.000	-	
			Pengelolaan Media Komunikasi publik	Kabupaten , SKPD			Jumlah informasi yang disebarluaskan melalui media komunikasi publik 300 informasi	300 informasi	50.000.000	-	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD	
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)					
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Perpustakaan									
			Program Pembinaan, Pengembangan dan Tata Kelola Layanan Perpustakaan		Nilai IKM	0 Nilai					Dinas Perpustakaan dan kearsipan	
			Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat	Kabupaten , SKPD			Jumlah unit perpustakaan 56 Unit perpustakaan	56 Unit perpustakaan	56.213.000	60.804.200		
			Pengembangan dan Tata Kelola Layanan, Alih Media dan Otomasi Perpustakaan	Kabupaten , SKPD			Jumlah Kunjungan Pemustaka ke Perpustakaan 7.800 Pemustaka	7.800 Pemustaka	291.818.620	102.159.000		
			Pengembangan Koleksi, Pengolahan dan Konservasi Bahan Perpustakaan	SKPD			Jumlah Pengolahan dan pemeliharaan bahan pustaka 1.300 Eksemplar	1.300 Eksemplar	191.600.000	209.077.000		
			Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	SKPD			Jumlah updating data aplikasi 10.000 updating koleksi buku	10.000 updating koleksi buku	19.965.000	18.235.000		



No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten , SKPD			Jumlah Bimtek Perpustakaan, Lomba Pustakawan dan Rakor Perpustakaan 56 Unit Perpustakaan	56 Unit Perpustakaan	42.476.000	42.751.000	
			Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	SKPD			Jumlah Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen	21.725.000	22.000.000	
			Sosialisasi Budaya Baca dan Literatur pada Satuan Pendidikan Dasar, Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Kabupaten , SKPD			Jumlah Sosialisasi Budaya Baca 56 Unit Perpustakaan	56 Unit Perpustakaan	25.086.000	21.226.800	
			Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Kabupaten , SKPD			Jumlah Penghargaan Pemustaka Aktif 3 Orang	3 Orang	4.710.000	5.000.000	
			Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Kabupaten , SKPD			Jumlah Kelompok Inklusi Masyarakat 1 Kelompok Masyarakat	1 Kelompok Masyarakat	12.000.000	12.000.000	
			Ketahanan Pangan								

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pengurangan Kemiskinan dan Transformasi Ekonomi	Menurunnya Angka Pengangguran	Program Peningkatan Prodoksi Tanaman Pangan		Produksi padi; Produksi kedelai; Produksi jagung	0 Ton; 0 Ton; 0 Ton					Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
			Perlindungan dan pengendalian hama penyakit tanaman pangan	Kabupaten			jumlah luas lahan pengendalian opt 94.000 Ha	94.000 Ha	100.000.000	332.750.000	
			Pengembangan perbenihan dan pembibitan tanaman pangan	Kabupaten			jumlah luas lahan penangkar 60 Ha	60 Ha	110.000.000	181.500.000	
			Peningkatan produksi dan produktivitas Tanaman pangan	Kabupaten			Jumlah luas taman 66.000 Ha	66.000 Ha	175.000.000	484.000.000	
			Pengolahan dan pemasaran hasil pertanian tanaman pangan	Kabupaten			Jumlah produk 3 Produk	3 Produk	125.000.000	795.750.000	
			Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Kabupaten			Jumlah Luas lahan 60 Ha	60 Ha	50.000.000	-	
				Program Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan		Produksi kelapa sawit; Produksi karet	0 Ton; 0 Ton				

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Perlindungan dan pengendalian hama penyakit tanaman perkebunan	Kabupaten			jumlah luas lahan pengendalian opt 28.206 Ha	28.206 Ha	100.000.000	189.955.722	
			Pengembangan perbenihan dan pembibitan tanaman perkebunan	Kabupaten			Jumlah lahan penangkaran 15 Ha	15 Ha	110.000.000	121.000.000	
			Peningkatan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan	Kabupaten			Jumlah tanam 28.206 Ha	28.206 Ha	200.000.000	139.719.789	
			Pengolahan dan pemasaran hasil tanaman perkebunan	Kabupaten			Jumlah produk 3 Produk	3 Produk	107.311.801	205.130.000	
			Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Kabupaten			Jumlah produk 3 produk	3 produk	100.000.000	-	
			Program Ketersediaan dan distribusi pangan		Meningkatnya ketersediaan dan distribusi pangan masyarakat	0 persentase					Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
			Ketersediaan dan Kerawanan Pangan	Kabupaten			Jumlah Unit 4 Unit	4 Unit	495.000.000	-	
			Distribusi dan Cadangan Pangan	SKPD			Jumlah Jenis 3 Jenis	3 Jenis	60.263.000	-	
			Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan	SKPD			Jumlah Kelompok 5 Kelompok	5 Kelompok	47.381.000	-	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Masyarakat dan Toko Tani di Indonesia								
			Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	SKPD			Jumlah Jenis 1 Jenis	1 Jenis	81.000.000	-	
			Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	SKPD			Jumlah Jenis 1 Jenis	1 Jenis	122.856.980	-	
			Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur				0	0	-	-	
			Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Kabupaten			Jumlah Jenis 1 Jenis	1 Jenis	56.780.000	-	
			Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	SKPD			Jumlah Jenis 1 Jenis	1 Jenis	72.441.000	-	
			Koordinasi dan Sinkronisasi penanganan kerawanan pangan kabupaten/Kota	SKPD			Jumlah Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen	75.966.000	-	
			Program Konsumsi dan Keamanan Pangan		meningkatnya Skor PPH	0 Nilai					Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
			Percepatan Penganekaragaman Konsumsi pangan	SKPD			Jumlah Skor 84 Skor	84 Skor	18.908.400	-	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD	
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)					
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Peningkatan mutu konsumsi dan keamanan pangan	Kabupaten			Jumlah Jenis 3 Jenis	3 Jenis	28.873.000	-		
			Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal	Kabupaten			Jumlah Kelompok 5 Kelompok	5 Kelompok	223.096.800	-		
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Perkapita Per Tahun	Kabupaten			Jumlah Kelompok 5 Kelompok	5 Kelompok	41.384.500	-		
			Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten			Jumlah sosialisasi 3 Kali	3 Kali	132.581.800	-		
			Pertanian									
			Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian		Peningkatan SDM Penyuluh	0 Orang					Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	
			Peningkatan Kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan	Kabupaten , Tambang Ulang Kantor Tambang Ulang				Jumlah penyuluh 10 Orang	10 Orang	698.000.000	317.943.669	
			Penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana	Kabupaten				Jumlah penyuluh 10 orang	10 orang	100.000.000	-	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			penyuluhan pertanian								
			Program Penyediaan Prasarana dan Sarana Pertanian		Cakupan penyediaan prasarana dan sarana pertanian	0 Persen					Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
			Fasilitasi sarana pertanian	Kabupaten			Jumlah alsintan 5 Unit	5 Unit	125.000.000	222.028.950	
			Fasilitasi pembangunan / rehabilitasi infrastruktur pertanian	Kabupaten , Takisung Kantor Takisung, Kurau Kantor Kurau, Bumi Makmur			Jumlah JUT, JP, dan Embung 25 Unit	25 Unit	4.000.000.000	6.016.097.822	
			Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Kabupaten			Jumlah jenis 3 jenis	3 jenis	90.000.000	-	
			Program Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura		Produksi Cabai; Produksi bawang merah	0 Kwintal; 0 Kwintal					Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
			perlindungan dan pengendalian hama penyakit tanaman hortikultura	Kabupaten			jumlah luas lahan pengendalian opt 1.250 Ha	1.250 Ha	100.000.000	234.130.342	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pengembangan pembenihan dan pembibitan tanaman hortikultura	Kabupaten			Jumlah luas lahan penangkar 7 Ha	7 Ha	191.980.000	756.250.000	
			penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian tanaman hortikultura	Kabupaten			Jumlah produk 2 Produk	2 Produk	110.000.000	248.050.000	
			peningkatan produksi dan produktifitas tanaman hortikultura	Kabupaten			Jumlah tanam 1.250 Ha	1.250 Ha	90.000.000	316.656.831	
			pembinaan dan pengembangan desa produksi tanaman hortikultura	Kabupaten			Jumlah desa 2 Desa	2 Desa	211.510.000	363.000.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Program Peningkatan Populasi dan Produksi Hasil Peternakan		peningkatan populasi ternak sapi potong; peningkatan populasi ternak sapi perah; peningkatan populasi ternak kerbau; peningkatan populasi ternak kambing; peningkatan populasi ternak ayam buras; peningkatan populasi ternak ayam ras petelur; peningkatan populasi ternak ayam ras pedaging; peningkatan populasi ternak ayam ras pedaging; peningkatan populasi ternak itik	87.000 ekor; 30 ekor; 3.787 ekor; 22.079 ekor; 2.663.279 ekor; 7.269.441 ekor; 54.447.52 8 ekor; 54.447.52 8 ekor; 198.103 ekor					Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan



No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pendistribusian bibit ternak Kepada masyarakat	Kabupaten , SKPD			Jumlah pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat itik 2.700 Ekor Jumlah pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat Sapi Potong 22 Ekor	2.700 Ekor 22 Ekor	987.727.050	987.727.050	
			Pendistribusian semen bibit ternak unggul dan pelaksanan inseminasi buatan	Luar Daerah, Kabupaten , SKPD			Jumlah Laporan Kegiatan 1 Dok Jumlah dosis bahan inseminasi terbeli dan terdistribusinya semen bibit sapi unggul 10.000 Dosis Jumlah orang honorarium dan premi asuransi PTT petugas Inseminator dinas yang dibayarkan 4 OB	1 Dok 10.000 Dosis 4 OB	100.000.000	100.000.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penelitian,Pengolahan dan pengembangan pakan ternak	Kabupaten , SKPD			Jumlah sampel pakan ternak yang layak 15 Sampel Jumlah pemeliharaan demplot pakan 2 Ha Jumlah penyebaran bibit rumput 1 Ha	15 Sampel 2 Ha 1 Ha	35.370.750	35.370.750	
			Pembinaan dan pengembangan desa produksi ternak	Kabupaten , SKPD			Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Desa Produksi Ternak Sapi Potong 1 Desa Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Desa Produksi Ternak Kerbau Rawa 1 Desa Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Desa Produksi Ternak Kambing 1 Desa Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Desa Produksi Ternak Itik 1 Desa	1 Desa 1 Desa 1 Desa 1 Desa	-	-	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Kabupaten , SKPD			Jumlah Aset Ternak Daerah yang telah terverifikasi 826 Ekor Jumlah ternak pemerintah yang di awasi 2.053 Ekor Jumlah laporan kegiatan 1 Dok	826 Ekor 2.053 Ekor 1 Dok	36.599.200	36.599.200	
			Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	Kabupaten , SKPD			Jumlah penyebaran dan perawatan bibit HPT yang berkualitas 1 Demplot Jumlah Wilayah pengawasan peredaran HPT 11 Kec Jumlah Laporan Kegiatan 1 Dok	1 Demplot 11 Kec 1 Dok	30.570.000	30.570.000	
			Program Kelembagaan Usaha Prasarana dan Sarana		Persentase pelaku usaha binaan bermitra dengan pihak lain; Persentase poktan yang dapat mengembangkan usahanya ; Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana peternakan	0 %; 0 %; 0 %					Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Peningkatan SDM dan Kemampuan Lembaga Petani Ternak	Kabupaten , SKPD			Jumlah Penilaian Kelompok Tani berprestasi 11 Kecamatan Jumlah Petani dan Peternak terlatih 140 Orang	11 Kecamatan 140 Orang	45.999.850	45.999.850	
			Pengembangan data dan Informasi	Kabupaten , SKPD			Jumlah Terkelolanya data dan informasi sektor peternakan 1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	
			Usaha agribisnis dan Promosi hasil produksi peternakan unggulan daerah	Kabupaten , SKPD			Jumlah produksi peternakan yang dapat dipasarkan 5 Produk Jenis informasi pasar atas hasil produksi peternakan yang akurat dan dapat diakses 12 Informasi Jumlah kontes ternak terlaksana 1 Kali Jumlah Pelaku Usaha yang bermitra dengan pihak lain 6 Orang/kelompok /BUMD	5 Produk 12 Informasi 1 Kali 6 Orang/kelompok/BUMD 75 Ekor 12 OB	83.999.800	83.999.800	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Petani yang mengikuti Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K) 75 Ekor Jumlah orang honorarium dan premi asuransi PTT Pulahta Promosi Pemasaran dan Sumber Daya yang dibayarkan 12 OB				

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penyediaan Prasarana dan sarana Peternakan	Luar Daerah, Kabupaten , SKPD			Jenis pengadaan sarana dan prasarana peternakan 5 Paket/Unit Jumlah wilayah pengawasan penggunaan teknologi sarana peternakan 11 Wilayah Jumlah alat penepung pakan ternak yang terbeli 1 Buah Jumlah mesin tetas terbeli 2 Unit Jumlah laporan kegiatan 1 Dok Jumlah jenis alat klinik yang terbeli 5 Jenis Jumlah jenis pemeliharaan sarana dan prasarana peralatan 3 Jenis	5 Paket/Unit 11 Wilayah 1 Buah 2 Unit 1 Dok 5 Jenis 3 Jenis	155.000.000	155.000.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Kabupaten , SKPD			Jumlah wilayah Kelompok Tani yang dinilai 11 Wilayah Jumlah Laporan Kegiatan 1 Dok Jumlah data sektor peternakan yang dapat di akses 1 Dok	11 Wilayah 1 Dok 1 Dok	39.999.750	39.999.750	
			Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Kabupaten , SKPD			Jumlah wilayah kelompok yang di dampingi 11 Wilayah Jumlah laporan kegiatan 1 Dok	11 Wilayah 1 Dok	30.000.000	30.000.000	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Kabupaten , SKPD			Jumlah wilayah koordinasi dan sinkronisasi prasarana pendukung peternakan 2 Wilayah Jumlah laporan kegiatan 1 Dok	2 Wilayah 1 Dok	15.000.000	15.000.000	
			Program Kesehatan Hewan ,Kesehatan Masyarakat Veteriner		Persentase Penurunan Angka kematian ternak ayam buras; Persentase Penurunan Angka kematian ternak kambing;	3 %; 3 %; 1 %; 0 %; 5 %; 3 %; 5 %; 7 %; 100 %; 65 %					Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Persentase Penurunan Angka kematian ternak sapi potong; Persentase Penurunan Angka kematian ternak sapi potong perah; Persentase Penurunan Angka kematian ternak kerbau; Persentase Penurunan Angka kematian ternak ayam petelur; Persentase Penurunan Angka kematian ternak ayam ras pedaging; Persentase Penurunan Angka kematian ternak itik; Persentase produk hasil ternak yang sehat; Persentase pelayanan kesehatan hewan						



No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit ternak	Kabupaten , SKPD			Jumlah Pengobatan Ternak Sapi 3.300 ekor Jumlah Vaksinasi Ternak Unggas 2.800 ekor Jumlah vaksinasi ternak sapi 3.300 ekor	3.300 ekor 2.800 ekor 3.300 ekor	271.000.000	271.000.000	
			Penyidikan dan Pemeriksaan Penyakit Ternak	Kabupaten , SKPD			Jumlah penyidikan dan pemeriksaan specemen/ sampel ulas darah 200 sampel Jumlah penyidikan dan pemeriksaan specemen/ sampel feses 400 sampel Jumlah penyidikan dan pemeriksaan specemen/ sampel organ 8 sampel Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program/Kegiatan 1 Dok Terlaksananya	200 sampel 400 sampel 8 sampel 1 Dok 1 Dok 400 sampel	-	-	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Pemetaan Penyakit Hewan di Kab. Tanah Laut 1 Dok Jumlah penyidikan dan pemeriksaan specemen/ sampel serum 400 sampel				

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pengendalian Penyakit Zoonasa dan Pengawasan Produksi asal Hewan	Kabupaten , SKPD, Pabahana n			Jumlah dokumen laporan monitoring dan evaluasi Pasar Hewan dan RPH 1 Dok Jumlah pengambilan specimen sampel produksi hasil ternak (daging ayam) 100 Sampel Jumlah honor PTT Juru Sembelih 12 OB Jumlah Pengawasan Hewan Qurban 11 Kecamatan Jumlah Sosialisasi NKV 3 Kali Jumlah pengambilan specimen sampel produksi hasil ternak (daging sapi) 25 Sampel Jumlah Vaksinasi Rabies 650 Dosis/Ekor	1 Dok 100 Sampel 12 OB 11 Kecamatan 3 Kali 25 Sampel 650 Dosis/Ekor	96.559.000	96.559.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten , SKPD			Jumlah pemeriksaan kesehatan hewan dan produk hewan yang dilaksanakan 5 Kali Jumlah laporan kegiatan 1 Dok	5 Kali 1 Dok	15.240.000	15.240.000	
			Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan		Jumlah Pengembangan dan Peningkatan Mutu serta Kualitas Produksi hasil Peternakan	1 Produk					Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
			Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil peternakan	Kabupaten , SKPD			Jumlah produk pasca panen hasil peternakan yang dapat dikembangkan 6 Produk Jumlah produk hasil peternakan yang kualitasnya meningkat 6 Produk	6 Produk 6 Produk	-	-	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Kabupaten , SKPD			Jumlah Kelompok yang di dampingi pada unit usaha hewan dan produk hewan 3 Klp Jumlah Laporan Kegiatan 1 Dok Jumlah orang honorarium dan premi asuransi PTT petugas Petugas Fasilitator Usaha dan Pengolahan Hasil yang dibayarkan 12 OB	3 Klp 1 Dok 12 OB	45.000.000	45.000.000	
			Pariwisata								
			Program Pengembangan Destinasi Pariwisata		Jumlah Wisatawan	280.000 Orang					Dinas Pariwisata
			Pengembangan daerah tujuan wisata	SKPD			Jumlah potensi wisata baru yang di gali, jumlah kajian pengembangan wisata 6 Dokumen	6 Dokumen	70.717.600	70.717.600	
			Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	SKPD			Jumlah pengembangan sarana wisata 2 Sarpras	2 Sarpras	128.567.900	128.567.900	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	SKPD			Laporan bulanan, laporan triwulan progres Fisik 16 laporan	16 laporan	38.512.900	38.512.900	
			Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	SKPD			Jumlah dokumen perencanaan 1 dokumen	1 dokumen	82.377.900	82.377.900	
			Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	SKPD			Jumlah pembangunan sarana dan prasarana pariwisata 10 Sarpras	10 Sarpras	2.832.411.794	2.832.411.794	
			Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	SKPD			Jumlah daya tarik wisata yang dikembangkan 6 OW	6 OW	94.665.400	94.665.400	
			Program Pengembangan Kemitraan		Jumlah Wisatawan	280.000 Orang					Dinas Pariwisata

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pengendalian dan Pengawasan Usaha Jasa Kepariwisata	SKPD			Jumlah Orang Kegiatan Pelatihan Rescue 40 Orang Jumlah Anggota Pokdarwis yang Mengikuti Kegiatan Jambore Pokdarwis 200 Orang Jumlah Orang Kegiatan Pelatihan Tour Guide 40 Orang	40 Orang 200 Orang 40 Orang	241.509.833	241.509.833	
			Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata	SKPD			Jumlah peserta Pelatihan Ekonomi Kreatif 30 Orang	30 Orang	258.489.133	258.489.133	
			Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata dan Kerjasama Promosi Pariwisata		Jumlah Wisatawan	0 Orang					Dinas Pariwisata
			Penyediaan dan penyampaian data dan informasi pariwisata	SKPD			Jumlah Jenis Media Informasi 9 Jenis	9 Jenis	171.372.899	171.372.899	
			Pengembangan jaringan kerjasama promosi pariwisata	SKPD			Jumlah event 4 Event	4 Event	1.100.000.000	1.150.000.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD	
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)					
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi baik dalam dan luar negeri	SKPD			Jumlah Pameran 2 kali pameran Jumlah Pos Pelayanan 2 Pos Pelayanan	2 kali pameran 2 Pos Pelayanan	123.626.900	123.627.000		
			Fasilitas Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri bagi Industri Pariwisata Kabupaten/Kota	SKPD			Jumlah Jenis Fasilitas Kegiatan 2 jenis	2 jenis	105.000.000	74.000.000		
		Kelautan dan Perikanan										
			Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan		Persentase olahan hasil produksi kelautan dan perikanan	0 persentase					Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	
			Pembinaan/ peningkatan mutu diverifikasi produk kelautan dan perikanan	Kabupaten			Jumlah Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen	25.572.500	-		
			Pelaksanaan promosi hasil perikanan dan peningkatan konsumsi ikan masyarakat	Kabupaten			Jumlah Kali 2 Kali	2 Kali	151.185.500	-		
			Program Pengembangan Perikanan Tangkap		Produksi perikanan tangkap	0 ton					Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	



No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Fasilitasi peningkatan kompetensi dan Pemberdayaan nelayan perikanan tangkap	Kabupaten			Jumlah Sosialisasi 2 Kali	2 Kali	120.296.000	-	
			Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Perikanan	Kabupaten			Jumlah Pengawasan 6 Kali	6 Kali	248.333.000	-	
			Fasilitasi dan Penyediaan Prasaran dan Sarana Perikanan Tangkap	SKPD			Jumlah Kegiatan 12 Kali	12 Kali	72.951.000	-	
			Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Kabupaten			Jumlah pembinaan KUB 6 Kecamatan	6 Kecamatan	45.083.000	-	
			Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya		Produksi perikanan budidaya	0 Ton					Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
			Fasilitasi pengelolaan dan pengembangan teknologi perikanan Budidaya	Kabupaten			Jumlah Pelatihan 1 Kali	1 Kali	30.000.000	-	
			Sarana Prasarana Budidaya Perikanan	SKPD			Jumlah Dokumen 50 Dokumen	50 Dokumen	45.275.000	-	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pelayanan penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya an Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	SKPD			Jumlah Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen	58.307.900	-	
			Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam Satu Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten			Jumlah Kelompok 4 Kelompok	4 Kelompok	228.484.700	-	
		Perdagangan									
			Program pengelolaan pasar daerah		Pengelolaan pasar rakyat	11 Kecamatan					Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan
			Penyediaan sarana dan prasarana pasar daerah	Kabupaten , SKPD			terlaksananya rehabilitasi toko / los penerangan dan pos retribusi pasar batakan Kecamatan Panyipatan 1 Paket Terlaksananya pembangunan wc / toilet pasar kecamatan 6 buah	1 Paket 6 buah	550.492.955	550.492.955	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Intensifikasi pendataan, penagihan,dan pelaporan pendapatan pasar	Kabupaten			Jumlah pasar 21 Pasar Jumlah terbayarnya honorarium PTT 12 bulan Tersedianya aplikasi database untuk meningkatkan penerimaan daerah 1 paket sosialisasi regulasi pasar 11 pasar	21 Pasar 12 bulan 1 paket 11 pasar	712.384.200	712.384.200	
			Pembinaan kebersihan ketertiban dan keamanan pasar daerah	Kabupaten , SKPD			Jumlah pengamanan dan penertiban serta petugas keamanan pasar 25 Kali	25 Kali	118.083.625	118.083.625	
			Penataan tempat berusaha bagi pedagang kakilima dan asongan	Kabupaten , SKPD			Terbayarnya honorarium pegawai tidak tetap 48 orang Jumlah terpeliharanya kebersihan lingkungan pasar 12 pasar Jumlah terbelinya alat kebersihan 1.124 buah	48 orang 12 pasar 1.124 buah	1.075.268.490	1.075.268.490	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Peningkatan Perdagangan,Pelaksanaan dan Pengawasan Kemetrolagian		Indeks Kepuasan Masyarakat	0 Nilai					Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan
			Pameran Promosi produk unggulan daerah	Kabupaten , SKPD			Terlaksananya pameran pembangunan 1 kali	1 kali	72.000.000	72.000.000	
			Fasilitasi pelaksanaan dan pengawasan Kemetrolagian	Kabupaten , SKPD			terlaksananya pelayanan kemetrolagian 11 kecamatan	11 kecamatan	112.800.000	112.800.000	
			Pembangunan/revitalisasi pasar dan distribusi barang/produk	Kabupaten , SKPD			terlaksananya operasi pasar reguler dan pasar khusus yang berdampak dalam 1 (satu ) kabupaten / kota 12 kali	12 kali	175.815.000	175.815.000	
			Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Kabupaten , SKPD			terlaksananya sosialisasi dan pengawasan kecamatan 6 kecamatan	6 kecamatan	71.998.200	71.998.200	
			Pameran Dagang Nasional	Luar Daerah			terlaksananya keikutsertaan pameran APKASI 1 kali	1 kali	72.000.000	72.000.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan atau Lanjutan Waralaba (STPW) dalam Negeri Terintegrasi secara elektronik	Kabupaten , SKPD			terlaksananya sosialisasi ijin khusus pedagang waralaba 1 kali Terlaksananya survey sebelum di rekomendasi ijin khusus pedagang waralaba 11 kecamatan	1 kali 11 kecamatan	69.191.000	69.191.000	
			Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1(Satu) Kabupaten/Kota	Kabupaten , SKPD			terlaksananya pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha distribusi barang dalam 1 (satu) kabupaten / kota 11 kecamatan	11 kecamatan	55.877.000	55.877.000	
			Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Kabupaten , SKPD			terlaksannya pengawasan penyaluran dan penggunaan pupuk dan pestisida bersubsidi 11 kecamatan	11 kecamatan	67.365.000	67.365.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD	
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)					
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Fasilitasi Penerbitan Tanda Gudang	Kabupaten , SKPD			terlaksananya sosialisasi SIUP dan TDG 1 kali terlaksananya survey sebelum diberi rekomendasi SIUP dan TDG 11 kecamatan	1 kali 11 kecamatan	55.909.000	55.909.000		
			Industri									
			Program Pembangunan Sumberdaya Industri		presentase IKM yang mengembangkan inovasi dan kreatifitas industri	0 %					Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	
			Pembinaan Industri Kecil dan Menengah terhadap Pemanfaatan Sumber Daya Industri	Luar Daerah, Kabupaten , SKPD			jumlah orang 146 orang	146 orang	365.502.900	420.328.335		
			Program Pemberdayaan Industri Unggulan Daerah		Presentase IKM unggulan	0 %					Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	
			Peningkatan kerjasama ,Promosi dan investasi Industri	Luar Daerah, Kabupaten , SKPD			jumlah pameran 4 pameran	4 pameran	345.515.000	397.342.250		
			Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Luar Daerah, Kabupaten , SKPD			Jumlah Laporan 2 Dokumen	2 Dokumen	8.485.000	8.611.750		

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Industri		cakupan fasilitasi tahapan pengembangan kawasan peruntukan industri	0 %					Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
			Penyediaan sarana dan prasarana klaster industri	Kabupaten , Luar Daerah, SKPD			Jumlah Kebijakan Industri Kabupaten 1 Kebijakan Industri	1 Kebijakan Industri	76.000.000	87.400.000	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan dan anaalisis Data Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Luar Daerah, Kabupaten , SKPD			Julmah Industri Menengah dan IKM 3.300 IKM	3.300 IKM	125.000.000	143.750.000	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Kabupaten , Luar Daerah, SKPD			Jumlah Klaster Industri 4 Klaster Industri	4 Klaster Industri	99.000.000	113.850.000	
			Perencanaan Pembangunan								
	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya pelestarian/pe ngembangan budaya dan prestasi generasi muda	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Prosentase capaian dalam mendukung WTP	100 %					Inspektorat Kabupaten

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	SKPD			Jumlah Laporan akuntabilitas kinerja SKPD 3 dokumen 12 Laporan	3 dokumen 12 Laporan	2.583.500	2.583.500	
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Persentase tingkat capaian kinerja organisasi	100 %					Dinas Kesehatan RSUD H. Boejasin Pelaihari
			Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Kabupaten , Pelaihari			Jumlah Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 2 dokumen	2 dokumen	11.067.508	-	
	Tata kelola birokrasi Pemerintahan	Meningkatnya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD		Nilai LAKIP perangkat daerah (Kategori)	71 Nilai					Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
			Penyusunan laporan keuangan	SKPD			Jumlah Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen	103.813.600	-	
			Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	SKPD			Jumlah Dokumen Perencanaan 100 %	100%	39.886.603	-	



No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	SKPD			Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran 12 Dokumen	12 Dokumen	34.498.500	-	
			Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	SKPD			Tersusunnya Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 1 Dokumen	1 Dokumen	29.136.050	-	
			Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	SKPD			Jumlah Dokumen Perencanaan 100 %	100%	16.880.000	-	
			Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	SKPD			Jumlah Dokumen Perencanaan 100 %	100%	68.691.014	-	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	SKPD			Jumlah Dokumen Perencanaan 100 %	100%	27.020.000	-	
			Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD			IKM	0 Baik				

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penyusunan perencanaan dan kinerja SKPD	SKPD			Jumlah Dokumen RENJA 2 Dokumen Jumlah Dokumen RENSTRA 1 Dokumen	2 Dokumen 1 Dokumen	4.546.200	-	
			Penyusunan laporan keuangan	SKPD			Jumlah Dokumen Laporan Bulanan Keuangan 1 Dokumen Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen	9.460.000	-	
			Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja	SKPD			Jumlah Dokumen LAKIP 1 Dokumen Jumlah Dokumen LPPD / LKPJ 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen	2.340.900	-	
			Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	SKPD			Jumlah Dokumen RKA / RKA-P 2 Dokumen Jumlah Dokumen DPA / DPA-P 2 Dokumen	2 Dokumen 2 Dokumen	10.483.100	-	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	SKPD			Jumlah Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen	3.636.600	-	
			Penyiapan Bahan Pelaksana Verifikasi	SKPD			Jumlah Verifikasi 2 Verifikasi	2 Verifikasi	3.816.800	-	
			Program Perencanaan Pembangunan Daerah		IKM	0 Nilai					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Penyusunan RKPD	SKPD			Tersusunnya Dokumen RKPD Tahun 2022 yang mengacu pada Dokumen Perencanaan dan tahapan perencanaan sesuai ketentuan yang berlaku, Jumlah tersusunnya Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2021 sesuai ketentuan yang berlaku 1 Dok	1 Dok	1.113.473.140	1.113.473.140	
			Sinkronisasi, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan	SKPD			Jumlah Dokumen 1 Dok	1 Dok	270.854.200	270.854.200	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Program Perencanaan Sosial dan Budaya		IKM	3 Nilai					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Penanggulangan Kemiskinan Daerah	SKPD			Jumlah monitoring terhadap pelaksanaan program/kegiatan bidang Kesejahteraan Masyarakat 11 Kecamatan Jumlah rapat koordinasi penanganan Kesejahteraan Masyarakat (Rakor TKPKD) 3 Kali Dokumen LP2KD 1 Dokumen Jumlah rapat fasilitasi perencanaan bidang Kesejahteraan Masyarakat 3 Kali	11 Kecamatan 3 Kali 1 Dokumen 3 Kali	53.396.000	53.396.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Perencanaan Pembangunan sub Bidang Politik dan Pemerintahan	SKPD			Terlaksananya Assistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Subbidang politik dan Pemerintahan 3 Kali	3 Kali	9.083.300	9.083.300	
			Perencanaan Pembangunan Sub Bidang SDM	SKPD			Jumlah rapat asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan (RKPD) Bidang Pembangunan Manusia 4 Kali	4 Kali	10.000.000	10.000.000	
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pemerintahan	SKPD			Terbayarnya Jasa Petugas penunjang kegiatan kantor 1 orang 12 Bulan Terlaksananya Rapat Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Subbidang politik dan Pemerintahan 3 Kali	12 Bulan 3 Kali	32.679.700	32.679.700	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pemerintahan	SKPD			Terlaksananya monitoring dan evaluasi Subbidang politik dan Pemerintahan 11 Kecamatan	11 Kecamatan	26.419.100	26.419.100	
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pembangunan Manusia	SKPD			Jumlah monitoring terhadap pelaksanaan program/kegiatan bidang Pembangunan Manusia 11 Kecamatan Jumlah rapat internal bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 12 Kali Jumlah rapat koordinasi perencanaan bidang Pembangunan Manusia 4 Kali	11 Kecamatan 12 Kali 4 Kali	25.000.000	25.000.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pembangunan Manusia	SKPD			Jumlah rapat koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan (RKPD) Bidang Pembangunan Manusia 3 Kali	3 Kali	10.000.000	10.000.000	
			Program Penelitian dan Pengembangan		IKM	3 Nilai					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Penelitian dan Pengembangan Serta Review Hasil Penelitian Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya	SKPD			Jumlah dok 1 Dok	1 Dok	356.298.000	356.298.000	
			Penelitian dan Pengembangan Serta Review Hasil Penelitian Bidang Infrastruktur	SKPD			Jumlah Dokumen 1 Dok	1 Dok	313.811.500	313.811.500	
			Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	SKPD			Jumlah Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen	-	254.890.500	
			Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Sumber Daya Alam		IKM	3 Nilai					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Perencanaan Pemabangunan Sub Bidang SDA, Pengembangan Usaha, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	SKPD			Jumlah monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan bidang pariwisata dan ekonomi kreatif 4 Kali Jumlah rapat fasilitasi perencanaan bidang pariwisata dan ekonomi kreatif 4 Kali	4 Kali 4 Kali	50.000.000	50.000.000	



No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Perekonomian	SKPD			Jumlah rapat internal bidang ekonomi dan SDA 12 Kali Jumlah pendampingan / narasumber penyusunan dokumen perencanaan bidang perekonomian 3 Kali Jumlah rapat fasilitasi lintas SKPD untuk perencanaan bidang perekonomian 6 Kali Jumlah rapat fasilitasi perencanaan bidang perekonomian 4 Kali Jumlah monitoring terhadap pelaksanaan program/kegiatan bidang perekonomian 2 Kali	12 Kali 3 Kali 6 Kali 4 Kali 2 Kali	83.352.000	83.352.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Perekonomian	SKPD			Jumlah rapat koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan (RKPD) bidang perekonomian 4 Kali	4 Kali	25.000.000	25.000.000	
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Perekonomian	SKPD			Jumlah rapat koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan (RKPD) bidang perekonomian 5 Kali	5 Kali	25.000.000	25.000.000	
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Alam	SKPD			Jumlah rapat koordinasi, fasilitasi dan monev kegiatan bidang Sumber Daya Alam 5 Kali	5 Kali	36.319.800	36.319.800	
			Program Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah		IKM	3 Nilai					

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Keciptakarya dan Kewilayahan	SKPD			Monitoring dan evaluasi dalam penyusunan dokumen pembangunan (RKPD) bidang keciptakarya dan kewilayahan 1 Dokumen	1 Dokumen	52.172.200	52.172.200	
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup	SKPD			Jumlah monitoring terhadap pelaksanaan program/kegiatan Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup 40 Kali Jumlah rapat perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan 10 Kali	40 Kali 10 Kali	77.454.900	77.454.900	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan	SKPD			Jumlah monitoring terhadap pelaksanaan program/kegiatan Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup 40 Kali Jumlah rapat perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan 10 Kali	40 Kali 10 Kali	72.306.100	72.306.100	
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Keciptakaryaan dan Kewilayahan	SKPD			Jumlah Rapat koordinasi penyusunan dokumen pembangunan (RKPD) bidang keciptakaryaan dan kewilayahan 1 Dokumen masalah lingkungan perumahan sehat melalui peningkaTerlaksananya koordinasi air minum dan sanitasi dasar pada Kelompok Kerja perumahan permukiman, air minum dan	1 Dokumen 8 Kali Rapat	71.576.000	71.576.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							sanitasi ( Pokja PPAS) 8 Kali Rapat				
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup	SKPD			Jumlah rapat koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan (RPJPD, RPJMD,RKPD) Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup 6 Kali	6 Kali	14.390.000	14.390.000	
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan	SKPD			Jumlah rapat koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan (RKPD) Bidang Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan 6 Kali	6 Kali	14.357.000	14.357.000	
			Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD		IKM	3 Nilai					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penyusunan laporan keuangan	SKPD			Tersusunnya laporan pajak bulanan dan Tahunan 12 Dokumen Tersusunnya laporan keuangan (bend. pengeluaran) 15 Dokumen laporan barang milik daerah 12 Dokumen Tersusunnya laporan barang (pengelola barang) 10 Dokumen	12 Dokumen 15 Dokumen 12 Dokumen 10 Dokumen	14.086.600	20.000.000	
			Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	SKPD			Tersusunnya laporan perencanaan dan kinerja SKPD 5 Laporan	5 Laporan	9.984.800	9.984.800	
			Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	SKPD			Tersusunnya laporan perencanaan dan kinerja SKPD 5 Laporan Terbayarnya honorarium administrasi umum 1 Tahun 12 Bulan	5 Laporan 12 Bulan	31.157.600	31.157.600	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD		Nilai LAKIP	68,35					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Penyusunan perencanaan dan kinerja SKPD	SKPD			Jumlah Dokumen,Renstr a,Renja Awal,Renja akhir,DPA 7 dokumen Nilai Lakip 71	7 dokumen 71	6.404.600	6.000.000	
			Penyusunan laporan keuangan	SKPD			Nilai Lakip 71 Jumlah dokumen 3 dokumen	71 3 dokumen	5.696.900	2.000.000	
			Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja				Jumlah dokumen 2 dokumen Nilai Lakip 71	2 dokumen 71	4.285.900	-	
			Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	SKPD			Honor PTT,asuransi kesehatan,JKK dan JKM (orang 12 bulan) 1 org 12 bulan	1 org 12 bulan	26.726.936	-	
			Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD			Nilai SAKIP	0 Nilai				

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	SKPD			Jumlah Laporan 25 Laporan	25 Laporan	35.150.000	36.000.000	
			Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	SKPD			Juimlah Dokumen 3 Dokumen	3 Dokumen	24.200.000	25.000.000	
			Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD		Nilai SAKIP	0 Nilai					Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
			Penyusunan perencanaan dan kinerja SKPD	SKPD			Jumlah dokumen 2 Dokumen	2 Dokumen	12.000.000	7.700.000	
			Penyusunan laporan keuangan	SKPD			Jumlah dokumen 1 dokumen	1 dokumen	41.740.000	-	
			Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	SKPD			Jumlah dokumen 15 dokumen	15 dokumen	37.710.000	-	
			Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	SKPD			Jumlah dokumen 2 dokumen	2 dokumen	45.914.800	-	



No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	SKPD			Jumlah dokumen 14 dokumen	14 dokumen	37.710.000	-	
			Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	SKPD			Jumlah dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen	37.710.000	7.700.000	
			Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	SKPD			Jumlah dokumen 1 dokumen	1 dokumen	33.060.000	-	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	SKPD			Jumlah dokumen 1 dokumen	1 dokumen	72.370.000	-	
			Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD		Nilai Sakip SKPD Inspektorat	75					Inspektorat Kabupaten
			Penyusunan perencanaan dan kinerja SKPD	SKPD			Jumlah penyusunan Renja SKPD 1 Dokumen	1 Dokumen	6.492.600	7.141.860	
			Penyusunan laporan keuangan	SKPD			Jumlah Pembayaran gaji PTT bidang keuangan 12 bulan Jumlah penyusunan laporan akuntansi dan pelaporan keuangan 19 Laporan	12 bulan 19 Laporan	25.335.500	27.048.315	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja	SKPD			Jumlah penyusunan LAKIP SKPD Inspektorat 1 Dokumen	1 Dokumen	29.653.600	29.827.600	
			Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD		Nilai Sakip	0 Baik					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Penyusunan perencanaan dan kinerja SKPD	SKPD			Jumlah Dokumen Renja 2 Dokumen	2 Dokumen	6.417.300	6.500.000	
			Penyusunan laporan keuangan	SKPD			Terlaksananya penyusunan akuntansi dan pelaporan keuangan 1 Tahun	1 Tahun	2.100.000	2.100.000	
			Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	SKPD			Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ihtisar Realisasi Kinerja SKPD 36 Dokumen	36 Dokumen	827.800	1.000.000	
			Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	SKPD			Jumlah Laporan Keuangan SKPD 48 Dokumen	48 Dokumen	4.550.000	4.600.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	SKPD			Jumlah Dokumen SKPD Akhir Tahun 5 Dokumen	5 Dokumen	1.145.000	1.200.000	
			Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	SKPD			Jumlah Dokumen evaluasi Perangkat Daerah 4 Dokumen	4 Dokumen	12.862.300	12.500.000	
			Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD		Nilai SAKIP	0 Baik					Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	SKPD			Jumlah Dokumen 4 dokumen	4 dokumen	16.768.600	-	
			Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	SKPD			Jumlah Dokumen 4 dokumen	4 dokumen	35.155.628	-	
			Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	SKPD			Jumlah Dokumen 3 dokumen	3 dokumen	7.076.000	-	
			Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	SKPD			Jumlah Dokumen 1 dokumen	1 dokumen	1.633.400	-	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	SKPD			Jumlah Dokumen 3 dokumen	3 dokumen	9.136.300	-	
			Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD		Nilai Sakip	0 Nilai					Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan
			Penyusunan laporan keuangan	Kabupaten , SKPD			Jumlah laporan 6 dokumen	6 dokumen	12.435.000	12.435.000	
			Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Kabupaten , SKPD			jumlah dokumen 8 dokumen	8 dokumen	76.875.000	76.875.000	
			Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Kabupaten , SKPD			jumlah dokumen 2 dokumen	2 dokumen	25.100.600	25.100.600	
			Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD		Persentase nilai akuntabilitas kinerja pemerintah	0 %					Dinas Kesehatan RSUD H. Boejasin Pelaihari
			Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Kabupaten , Pelaihari			Jumlah dokumen perencanaan 10 dokumen	10 dokumen	8.371.920	-	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD		Nilai SAKIP	1 Nilai					Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
			Penyusunan perencanaan dan kinerja SKPD	SKPD			Jumlah Dokumen 2 Dokumen	2 Dokumen	4.000.000	4.500.000	
			Penyusunan laporan keuangan	SKPD			12 bulan	12 bulan	690.000	700.000	
			Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja	SKPD			Jumlah Dokumen 6 Dokumen	6 Dokumen	4.000.000	4.000.000	
			Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	SKPD			Jumlah Bulan 12 bulan	12 bulan	575.000	600.000	
			Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	SKPD			Jumlah Dokumen 4 dokumen	4 dokumen	4.000.000	4.500.000	
			Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	SKPD			Terpenuhinya penyusunan laporan bulanan dan semester 12 bulan	12 bulan	3.714.000	4.000.000	
			Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	SKPD			Jumlah Dokumen 10 dokumen	10 dokumen	610.000	650.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	SKPD			Terselenggaranya Pameran 12 bulan	12 bulan	14.043.200	15.000.000	
			Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	SKPD			Jumlah bulan 12 bulan	12 bulan	2.781.800	3.000.000	
			Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	SKPD			Jumlah Bulan 12 bulan	12 bulan	1.295.500	1.500.000	
			Program Perencanaan Pembangunan Daerah		FALSE	FALSE					Sekretariat DPRD
			Pembahasan KUA & PPAS	SKPD			1 Dokumen	1 Dokumen	8.025.400	9.229.000	
			Pembahasan KUA & PPAS Perubahan	SKPD			1 Dokumen	1 Dokumen	6.083.700	6.996.000	
			Pembahasan APBD	SKPD			1 Dokumen	1 Dokumen	6.825.400	7.849.000	
			Pembahasan APBD Perubahan	SKPD			1 Dokumen	1 Dokumen	6.203.700	7.134.000	
			Pengawasan Urusan Pemerintah Bidang Pemerintah dan Hukum	SKPD			1 Dokumen	1 Dokumen	67.953.000	78.146.000	
			Pengawasan Urusan Pemerintah Bidang Infrastruktur	SKPD			1 Dokumen	1 Dokumen	67.988.000	78.186.000	
			Pengawasan Urusan Pemerintah Bidang	SKPD			1 Dokumen	1 Dokumen	67.518.000	77.646.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Kesejahteraan Rakyat								
			Pengawasan Urusan Pemerintah Bidang Perekonomian	SKPD			1 Dokumen	1 Dokumen	67.318.000	77.416.000	
			Pengawasan Urusan Pemerintah Bidang Sumber Daya Alam	SKPD			1 Dokumen	1 Dokumen	67.918.000	78.105.000	
			Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan	SKPD			1 Dokumen	1 Dokumen	3.160.500	3.634.500	
			Pengawasan Penggunaan Anggaran	SKPD			1 Dokumen	1 Dokumen	1.377.600	1.584.000	
			Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD		Nilai SAKIP	0 75					Sekretariat DPRD
			Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	SKPD, Pelaihari			240 dokumen	240 dokumen	13.921.000	16.000.000	
			Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Pelaihari			160 dokumen	160 dokumen	15.893.400	18.277.000	
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	SKPD, Pelaihari			20 dokumen	20 dokumen	7.494.200	8.618.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	SKPD, Pelaihari			20 dokumen	20 dokumen	2.803.500	3.224.000	
			Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	SKPD			88 dokumen	88 dokumen	26.140.300	30.062.000	
			Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	SKPD, Pelaihari			20 dokumen	20 dokumen	5.922.600	6.810.000	
			Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	SKPD, Pelaihari			120 dokumen	120 dokumen	16.070.800	18.481.000	
			Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	SKPD, Pelaihari			5 Dokumen	5 Dokumen	3.890.000	4.473.500	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	SKPD, Pelaihari			50 dokumen	50 dokumen	12.117.100	13.935.000	
			Penyiapan Bahan Pelaksana Verifikasi	SKPD			81 kali SPP, SPM	81 kali SPP, SPM	19.612.100	22.554.000	
			Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	SKPD			37 dokumen	37 dokumen	3.891.400	4.475.000	
			Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	SKPD			20 dokumen	20 dokumen	2.401.600	2.762.000	



No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD	
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)					
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD		Nilai LAKIP	0 Nilai					Dinas Perpustakaan dan kearsipan	
			Penyusunan perencanaan dan kinerja SKPD	SKPD			Jumlah Dokumen perencanaan SKPD yang tersusun 1 Dokumen	1 Dokumen	2.850.000	3.800.000		
			Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	SKPD			Jumlah dokumen 6 Dokumen	6 Dokumen	2.000.000	2.000.000		
			Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD		Nilai LAKIP	0					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
			Penyusunan laporan keuangan	Kabupaten , SKPD			Jumlah Dokumen 4 dokumen	4 dokumen	30.000.000	-		
			Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Kabupaten , SKPD			Jumlah Dokumen 5 dokumen	5 dokumen	25.000.000	-		
			Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Kabupaten , SKPD			Jumlah Dokumen 3 dokumen	3 dokumen	25.000.000	-		
			Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja			Nilai Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	0					Dinas Kesehatan

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			SKPD								
			Penyusunan laporan keuangan	SKPD			Jumlah monitoring/bimtek pemutakhiran data keuangan 2 dokumen Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun sesuai standar 1 dokumen Jumlah monitoring/bimtek pemutakhiran data aset dan pendistribusian aset 3 dokumen Jumlah dokumen pelaporan yang sesuai standar 0 dokumen Jumlah laporan keuangan dan aset bulanan dan semesteran 30 dokumen	2 dokumen 1 dokumen 3 dokumen 0 dokumen 30 dokumen	100.000.000	-	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	SKPD			jumlah dokumen perencanaan sesuai standar 4 dokumen	4 dokumen	42.256.000	-	
			Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	SKPD			Jumlah dokumen Perencanaan sesuai standar 3 dokumen	3 dokumen	65.732.000	-	
			Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD		Nilai LAKIP Perangkat Daerah (Kategori)	5 Kategori					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Penyusunan perencanaan dan kinerja SKPD	SKPD			jumlah dokumen 3 dokumen	3 dokumen	100.000.000	150.000.000	
			Pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kinerja	SKPD			jumlah dokumen 4 dokumen	4 dokumen	250.000.000	300.000.000	
			Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	SKPD			jumlah dokumen 1 dokumen	1 dokumen	100.000.000	300.000.000	
			Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	SKPD			jumlah dokumen 1 dokumen	1 dokumen	50.000.000	60.000.000	
			Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	SKPD			jumlah dokumen 1 Tahun	1 Tahun	100.000.000	100.000.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD		Nilai SAKIP	0 Nilai					Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
			Penyusunan perencanaan dan kinerja SKPD	Kabupaten , SKPD			Jumlah Tersusunnya Dokumen Perencanaan (Dok) 7 Dok	7 Dok	-	-	
			Penyusunan laporan keuangan	Kabupaten , SKPD			Penyusunan laporan keuangan 1 Dok	1 Dok	-	-	
			Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kabupaten , SKPD			Jumlah penyusunan sistem pelaporan kinerja yang akuntabel (Dok) 16 Dok Jumlah Aset BMD tercatat (Dok) 24 Dok	16 Dok 24 Dok	8.505.000	8.505.000	
			Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Kabupaten , SKPD			Jumlah Dokumen Laporan yang dibuat 14 Dok	14 Dok	7.425.000	7.425.000	
			Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Kabupaten , SKPD			Jumlah Dokumen Renstra dan renja SKPD (dok) 6 Dok	6 Dok	8.500.000	8.500.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Kabupaten , SKPD			Jumlah dokumen evaluasi (Lakip, LPPD, LKPJ, RB Zona Integritas) 5 Dok	5 Dok	7.525.000	7.525.000	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Luar Daerah, Kabupaten , SKPD			umlah jenis kegiatan koordinasi dan sinkronisasi yang di laksanakan (Jenis/keg) 3 Jenis	3 Jenis	68.960.000	68.960.000	
			Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD		Nilai Sakip	71 NILAI					Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
			Penyusunan perencanaan dan kinerja SKPD	SKPD			Jumlah Dokumen Perencanaan Tersusun 3 Dokumen	3 Dokumen	40.500.000	-	
			Penyusunan laporan keuangan	SKPD			Jumlah Laporan Triwulan tersusun 16 dokumen Jumlah Honorarium Pegawai Tidak Tetap terbayar 12 orang bulan	16 dokumen 12 orang bulan	29.284.100	-	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja	SKPD			Jumlah Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan tersusun 3 Dokumen	3 Dokumen	37.100.200	-	
			Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	SKPD			Jumlah program dan kegiatan tersusun 1 Dokumen	1 Dokumen	55.800.200	-	
			Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	SKPD			Jumlah Makanan dan Minuman Rapat terlaksana 272 orang kali Jumlah Honorarium Pegawai Tidak Tetap terbayar 12 orang bulan Jumlah Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan tersusun 48 dokumen	272 orang kali 12 orang bulan 48 dokumen	44.366.900	-	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	SKPD			Jumlah Laporan Bulanan Keuangan tersusun 24 dokumen Jumlah Laporan Triwulan Keuangan tersusun 8 dokumen Jumlah Laporan Semesteran Keuangan tersusun 4 dokumen Jumlah Makanan dan Minuman Rapat terlaksana 272 orang kali	24 dokumen 8 dokumen 4 dokumen 272 orang kali	13.652.000	-	
			Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	SKPD			Jumlah Laporan Akhir Tahun tersusun 6 dokumen	6 dokumen	500.000	-	
			Penyiapan Bahan Pelaksana Verifikasi	SKPD			Jumlah alat tulis kantor terbeli 12 bulan	12 bulan	2.675.600	-	
			Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	SKPD			Jumlah penggandaan terbayar 2.981 lembar	2.981 lembar	1.499.800	-	
			Program Pengembangan Data/Informasi		Buku "Satu Data Kabupaten Tanah Laut"	1 Ada/Tidak Ada					Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penyusunan profile daerah	Kabupaten , SKPD			Jumlah dokumen statistik sektoral daerah 0 dokumen	0 dokumen	75.000.000	-	
			Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD		Nilai SAKIP	1 Nilai					Dinas Komunikasi dan Informatika
			penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	SKPD			Jumlah dokumen akhir tahun 2 dokumen	2 dokumen	500.000	-	
			Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	SKPD			Jumlah dokumen RKA/DPA/DPPA 4 dokumen	4 dokumen	10.000.000	-	
			Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	SKPD			Jumlah dokumen realisasi kinerja SKPD 4 dokumen Jumlah dokumen capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 0 dokumen Jumlah dokumen laporan keuangan 0 dokumen	4 dokumen 0 dokumen 0 dokumen	3.440.000	-	



No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD	
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)					
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	SKPD			Jumlah dokumen laporan evaluasi kinerja per triwulan 4 dokumen	4 dokumen	35.335.000	-		
			Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	SKPD			Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan, triwulan dan semesteran 38 dokumen	38 dokumen	1.140.000	-		
			Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	SKPD			Jumlah dokumen UP/GU/LS 32 dokumen	32 dokumen	2.900.000	-		
			Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	SKPD			Jumlah dokumen rencana kerja perangkat daerah 1 dokumen	1 dokumen	5.000.000	-		
			Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD			nilai saki	0 nilai					Dinas Sosial
			Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	SKPD				Jumlah Dokumen 0	0	7.336.000	-	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD	
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)					
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	SKPD			Jumlah Dokumen 0	0	4.072.000	-		
			Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	SKPD			Jumlah Dokumen 0	0	3.682.000	-		
			Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	SKPD			Jumlah dokumen 1 dokumen	1 dokumen	6.217.000	-		
			Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	SKPD			Jumlah Dokumen 0	0	6.902.000	-		
			Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	SKPD			Jumlah Dokumen 0	0	9.782.000	-		
			Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	SKPD			Jumlah Dokumen 0	0	43.035.000	-		
			Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD			Nilai Sakip	0 Nilai					Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
			Penyusunan laporan keuangan	SKPD				Jumlah Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen	51.625.000	-	
			Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen	SKPD				Jumlah Dokumen 2 Dokumen	2 Dokumen	7.000.000	-	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Perencanaan								
			Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	SKPD			Jumlah Dokumen 2 Dokumen	2 Dokumen	44.326.000	-	
			Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	SKPD			Jumlah Laporan 5 Laporan Jumlah Dokumen 2 Dokumen	5 Laporan 2 Dokumen	14.010.800	-	
			Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	SKPD			Jumlah Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen	11.126.000	-	
			Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD		nilai sakip	0 nilai					Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
			Penyusunan perencanaan dan kinerja SKPD	SKPD			jumlah dokumen 2 dokumen	2 dokumen	10.000.000	11.500.000	
			Penyusunan laporan keuangan	SKPD			Jumlah Laporan 7 Laporan jumlah Dokumen 1 dokumen	7 Laporan 1 dokumen	33.000.000	37.950.000	
			Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja	SKPD			jumlah Dokumen 3 dokumen Jumlah Laporan 2 Laporan	3 dokumen 2 Laporan	35.000.000	40.250.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten , SKPD			Jumlah Kegiatan 2 Pameran	2 Pameran	26.756.700	30.770.205	
			Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD		Nilai SAKIP	0 Baik					Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
			Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	SKPD			Tersusunnya pelaporan prognosis realisasi anggaran 2 laporan	2 laporan	4.756.700	5.232.370	
			Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	SKPD			Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 12 laporan	12 laporan	5.196.600	5.716.260	
			Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	SKPD			Tersusunnya laporan keuangan bulanan/semesteran 12 laporan	12 laporan	8.184.000	9.002.400	
			Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	SKPD			Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun 1 dokumen	1 dokumen	4.383.300	4.821.630	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	SKPD			Tersusunnya dokumen resntra dan renja SKPD 2 dokumen	2 dokumen	8.657.400	9.523.140	
			Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	SKPD			tersusunnya dokumen LAKIP dan LKPJ/LPPD 2 Dokumen	2 Dokumen	4.225.400	4.647.940	
			Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD		Nilai SAKIP	0 Nilai					Badan Pendapatan Daerah
			Penyusunan perencanaan dan kinerja SKPD	SKPD			Jumlah dokumen perencanaan yang disusun 3 Dokumen	3 Dokumen	8.250.000	9.075.000	
			Penyusunan laporan keuangan	SKPD			Jumlah laporan keuangan yang disusun 12 Dokumen	12 Dokumen	6.000.000	6.600.000	
			Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja	SKPD			Jumlah laporan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah 3 Dokumen	3 Dokumen	9.000.000	9.900.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	SKPD			Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang disusun 8 Laporan	8 Laporan	3.900.000	4.290.000	
			Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	SKPD			Jumlah laporan keuangan bulanan, triwulanan dan semesteran yang disusun 18 Laporan	18 Laporan	3.100.000	3.500.000	
			Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	SKPD			Jumlah laporan akhir tahun yang disusun 1 Dokumen	1 Dokumen	2.500.000	3.000.000	
			Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD		Nilai SAKIP	1 Nilai					Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
			Penyusunan perencanaan dan kinerja SKPD	SKPD			Jumlah dokumen 2 Dokumen	2 Dokumen	4.027.600	4.430.360	
			Penyusunan laporan keuangan	SKPD			Jumlah dokumen 75 Dokumen	75 Dokumen	32.259.000	35.484.900	
			Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja	SKPD			Jumlah dokumen 9 Dokumen	9 Dokumen	4.913.200	5.404.520	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	SKPD			Jumlah Dokumen 6 Dokumen	6 Dokumen	10.701.200	11.771.320	
			Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	SKPD			Jumlah Dokumen 12 Dokument	12 Dokument	7.078.000	7.785.800	
			Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	SKPD			Jumlah Dokument 14 Dokument	14 Dokument	5.352.000	5.887.200	
			Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	SKPD			Jumlah Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen	4.615.000	5.076.500	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	SKPD			Jumlah Jenis 2 Jenis	2 Jenis	23.415.000	25.756.500	
			Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD		Tingkat Maturitas SPIP	0 Level					Sekretariat Daerah Bagian Tata Usaha dan Keuangan
			Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	SKPD				Jumlah dokumen capaian kinerja dan realisasi yang disampaikan 1 dokumen	1 dokumen	11.352.500	12.487.750

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	SKPD			Jumlah dokumen perencanaan SKPD 2 dokumen	2 dokumen	26.949.600	29.644.560	
			Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	SKPD			Jumlah dokumen laporan keuangan yang tersusun 3 dokumen	3 dokumen	98.759.700	108.635.670	
			Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	SKPD			Jumlah dokumen Calk yang disampaikan 1 dokumen	1 dokumen	30.776.400	33.854.040	
			Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	SKPD			Jumlah dokumen renstra dan renja yang disampaikan 2 dokumen	2 dokumen	61.378.600	67.516.460	
			Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	SKPD			Jumlah dokumen evaluasi kinerja yang disampaikan 4 dokumen	4 dokumen	15.937.300	17.531.030	
			Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD			Nilai SAKIP	0 persen				



No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	SKPD			Jumlah dokumen 4 dokumen	4 dokumen	23.806.100	23.806.100	
			Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	SKPD			Jumlah Laporan Keuangan 2 dokumen	2 dokumen	7.198.900	7.198.900	
			Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	SKPD			Jumlah dokumen 3 dokumen	3 dokumen	11.595.100	11.595.100	
			Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	SKPD			Jumlah dokumen 4 dokumen	4 dokumen	38.766.000	38.766.000	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	SKPD			Jumlah dokumen 1 dokumen	1 dokumen	15.655.000	15.655.000	
			Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD		Nilai LAKIP	0 Nilai					Kurau Kantor Kurau
			Penyusunan perencanaan dan kinerja SKPD	Kurau Kantor Kurau			Jumlah Dokumen 4 Dokumen	4 Dokumen	6.280.380	6.908.418	
			Penyusunan laporan keuangan	Kurau Kantor Kurau			Jumlah Dokumen 5 Dokumen	5 Dokumen	18.235.000	20.058.500	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja	Kurau Kantor Kurau			Jumlah Dokumen 2 Dokumen	2 Dokumen	7.308.040	8.038.844	
			Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD		Nilai Sakip	1 nilai					Bajuin Kantor Bajuin
			Penyusunan perencanaan dan kinerja SKPD	Bajuin Kantor Bajuin			jumlah dokumen 7 dok	7 dok	1.500.000	2.000.000	
			Penyusunan laporan keuangan	Bajuin Kantor Bajuin			jumlah dokumen 7 dok	7 dok	2.777.000	2.500.000	
			Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja	Bajuin Kantor Bajuin			jumlah dokumen 6 dok	6 dok	1.958.000	1.500.000	
			Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD		IKM	0 Nilai					Jorong Kantor Jorong
			Penyusunan perencanaan dan kinerja SKPD	Jorong Kantor Jorong			Tersusunnya Renstra dan Renja Perangkat Daerah 2 dokumen	2 dokumen	990.000	2.000.000	
			Penyusunan laporan keuangan	Jorong Kantor Jorong			Tersusnya Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 2 dokumen	2 dokumen	1.300.000	2.000.000	
			Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja	Jorong Kantor Jorong			Tersusunnya LKPJ dan LPPD 1 dokumen	1 dokumen	750.000	750.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jorong Kantor Jorong			Tersusunnya Laporan Kinerja SKPD 1 Dokumen	1 Dokumen	750.000	750.000	
			Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jorong Kantor Jorong			Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun 1 Dokumen	1 Dokumen	200.000	500.000	
			Program Perencanaan Pembangunan Daerah		IKM	10.302.650 jumlah kegiatan					Batu Ampar Kantor Batu Ampar
			Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan				Jumlah musyawarah rencana pembangunan tingkat kecamatan 1 kali	1 kali	22.000.000	25.000.000	
			Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD		Nilai Sakip	0 nilai					Batu Ampar Kantor Batu Ampar
			Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				Jumlah dokumen perencanaan dan kinerja SKPD 11 dokumen	11 dokumen	5.200.000	7.500.000	
			Program Perencanaan Pembangunan Daerah		Indeks kepuasan masyarakat	3 Nilai					Panyipatan Kantor Panyipatan

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penyusunan rencana strategis (renstra) dan rencana kerja (renja) SKPD	Panyipatan Kantor Panyipatan			Jumlah dokumen Renja dan Renstra 3 Dokumen	3 Dokumen	-	-	
			Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD		Indeks kepuasan masyarakat	3 Nilai					Panyipatan Kantor Panyipatan
			Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Panyipatan Kantor Panyipatan			dokumen renja dan renstra 3	3	3.190.000	-	
			Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD		SAKIP	0 nilai					Pelaihari
			Penyusunan perencanaan dan kinerja SKPD	Pelaihari			Jumlah dokumen perencanaan 9 dokumen	9 dokumen	3.200.000	3.520.000	
			Penyusunan laporan keuangan	Pelaihari			Jumlah dokumen keuangan 9 dokumen	9 dokumen	58.528.000	64.380.800	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD		Terlaksananya pengendalian,evaluasi dan laporan kinerja; Terlaksananya penyusunan perencanaan dan kinerja SKPD; Terlaksananya penyusunan laporan keuangan	0 dokumen; 0 dokumen; 0 dokumen					Tambang Ulang Kantor Tambang Ulang
			Penyusunan perencanaan dan kinerja SKPD				Terlaksananya kegiatan perencanaan , pengendalian dan evaluasi kinerja SKPD 7 dokumen	7 dokumen	4.000.000	3.000.000	
			Penyusunan laporan keuangan				Jumlah Dokumen 12 Dokumen	12 Dokumen	2.500.000	-	
			Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja				Terlaksananya pengendalian,evaluasi dan laporan kinerja 2 dokumen	2 dokumen	2.000.000	-	
			Penyusunan LKPJ dan LPPD serta LAKIP				Jumlah Dokumen 9 Dokumen	9 Dokumen	-	-	
			Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran				Tersusunnya dokumen laporan keuangan 18 Dokumen	18 Dokumen	1.500.000	-	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan				Jumlah Orang 2 Orang	2 Orang	41.060.000	-	
			Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Tambang Ulang Kantor Tambang Ulang			Tersusunnya dokumen renstra dan renja 8 Dokumen	8 Dokumen	1.500.000	-	
			Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD		Nilai Lakip	0 Nilai					Bati-Bati Kantor Bati-Bati
			Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan				jumlah bulan 12 bulan	12 bulan	26.235.500	-	
			Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD		NILAI LAKIP; ???	0 NILAI; 0					Bumi Makmur
			Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Bumi Makmur				Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD / Terlaksananya Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	0	3.180.000	3.498.000

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							SKPD 0				
			Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Bumi Makmur			tersusunnya Akuntansi dan Pelaporan Keuangan / Terlaksananya Penyusunan Akuntansi dan pelaporan Keuangan 0	0	2.010.000	2.211.000	
			Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Bumi Makmur			Tersusunnya Pelaporan Keuangan Akhir Tahun / Terlaksananya Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 0	0	2.120.000	2.332.000	
			Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Bumi Makmur			Tersusunnya Renstra dan Renja Perangkat Daerah / Terlaksananya Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat	0	6.670.000	7.337.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Daerah 0				
			Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD		Nilai Lakip	1 nilai					Kintap Kantor Kintap
			Penyusunan perencanaan dan kinerja SKPD	Kintap Kantor Kintap			Jumlah penyusunan dokumen laporan keuangan 2 dokumen	2 dokumen	27.964.000	-	
			Penyusunan laporan keuangan	Kintap Kantor Kintap			jumlah dokumen 5 dokumen	5 dokumen	5.000.000	-	
			Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja	Kintap Kantor Kintap			jumlah dokumen 4 dokumen	4 dokumen	5.000.000	-	
			Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD		Nilai Lakip	3 Nilai					Takisung Kantor Takisung
			Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Takisung Kantor Takisung			Jumlah tersusunnya dokumen program dan kegiatan SKPD 4 dokumen	4 dokumen	4.264.100	-	



No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Takisung Kantor Takisung			Jumlah tersusunnya dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja SKPD 2 dokumen	2 dokumen	1.092.800	-	
			Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Takisung Kantor Takisung			Jumlah tersusunnya dokumen laporan keuangan bulanan/semesteran 14 dokumen	14 dokumen	5.195.700	-	
			Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Takisung Kantor Takisung			Jumlah tersusunnya dokumen laporan keuangan akhir tahun 1 dokumen	1 dokumen	1.841.100	-	
			Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Takisung Kantor Takisung			Jumlah tersusunnya dokumen renstra dan renja SKPD 2 dokumen	2 dokumen	1.130.500	-	
			Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD			SAKIP	1 nilai				

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD	
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)					
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Penyusunan perencanaan dan kinerja SKPD	Angsau			jumlah dokumen penyusunan perencanaan dan kinerja skpd 1 Tahun	1 Tahun	2.500.000	2.750.000		
			Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja	Angsau			jumlah dokumen pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja 1 Kali	1 Kali	15.000.000	16.500.000		
			Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Angsau			Jumlah Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 1 Tahun	1 Tahun	2.500.000	2.750.000		
			Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Angsau			Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah 1 Tahun	1 Tahun	2.000.000	2.200.000		
			Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD			SAKIP	1 NILAI					Karang Taruna
			Penyusunan perencanaan dan kinerja SKPD	Karang Taruna				Jumlah dokumen penyusunan dan kinerja SKPD 4 Dokumen	4 Dokumen	2.500.000	-	
			Penyusunan laporan keuangan	Karang Taruna				Jumlah Dokumen Penyusunan laporan keuangan 4	4 Dokumen	2.500.000	-	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Dokumen				
			Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja	Karang Taruna			Jumlah dokumen pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja 4 Dokumen	4 Dokumen	2.000.000	-	
			Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD		SAKIP	0 Nilai					Pabahanan
			Penyusunan perencanaan dan kinerja SKPD	Pabahana n			Jumlah Dokumen Penyusun Perencanaan dan Kinerja SKPD 4 Dokumen	4 Dokumen	3.700.000	-	
			Penyusunan laporan keuangan	Pabahana n			Jumlah Dokumen Penyusunan laporan keuangan 4 Dokumen	4 Dokumen	2.700.000	-	
			Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja	Pabahana n			Jumlah Dokumen pengendalian evaluasi dan pelaporan kinerja 4 Dokumen	4 Dokumen	2.700.000	-	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD		SAKIP	1 nilai					Pelaihari
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pelaihari			Jumlah pelaksanaan promosi produk UMKM 1 kali	1 kali	17.000.000	-	
			Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Pelaihari			Jumlah Dokumen 4 dokumen	4 dokumen	1.305.000	-	
			Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Pelaihari			Jumlah Dokumen 2 dokumen	2 dokumen	1.195.000	-	
			Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Pelaihari			Jumlah Dokumen 4 dokumen	4 dokumen	2.505.000	-	
			Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Pelaihari			Jumlah Dokumen 4 dokumen	4 dokumen	2.002.000	-	
			Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD			SAKIP	0 NILAI				Sarang Halang
			Penyusunan perencanaan dan kinerja SKPD	Sarang Halang			Jumlah Dokumen Penyusunan perencanaan dan Kinerja	4 Dokumen	17.500.000	18.750.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2021 (N)	Rencana Tahun 2022 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							SKPD 4 Dokumen				
			Penyusunan laporan keuangan	Sarang Halang			Jumlah Dokumen Penyusunan Laporan Keuangan 4 Dokumen	4 Dokumen	2.500.000	2.750.000	
			Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja	Sarang Halang			Jumlah Dokumen Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja 4 Dokumen	4 Dokumen	2.000.000	2.200.000	
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sarang Halang			Jumlah Pengembangan sarana promosi dan hasil produksi 1 Tahun	1 Tahun	20.000.000	22.000.000	
	TOTAL								1.686.273.104.811	1.127.849.313.463	



**BAB VI**  
**KINERJA PENYELENGGARAAN**  
**PEMERINTAHAN DAERAH**

Pemerintah daerah melakukan refocusing dan realokasi anggaran untuk penanganan Covid-19 dalam rangka penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi terutama menjaga agar dunia usaha daerah masing-masing tetap hidup, dan penyediaan jaring pengaman sosial (social safety net). Untuk mendukung pemulihan ekonomi dan reformasi sosial pada tahun 2021 diharapkan ada beberapa langkah yang harus dilakukan dengan mengikuti program nasional dalam rangka : percepatan pemulihan industri, investasi dan pariwisata, mereformasi system kesehatan, reformasi system sosial dan reformasi ketahanan bencana. Sehingga prioritas daerah dalam RKPD Kabupaten Tanah Laut agar target RPJMD yang ditetapkan dapat tercapai. Yang harus dilakukan adalah memperkuat ketahanan ekonomi daerah untuk mencapai pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan walau target tingginya pertumbuhan agak sulit tercapai. Selanjutnya langkah mengembangkan pembangunan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan daerah kabupaten Tanah Laut. Pencapaian target RPJM dalam dalam RKPD tahun 2021 harus didukung oleh prioritas peningkatan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing, memperkuat infrastruktur daerah, tetap menjaga keseimbangan lingkungan hidup dan menjaga stabilitas politik, pertahanan, keamanan dan prioritas transportasi pelayanan public yang lebih baik melalui good government. Yang tidak kalah pentingnya tetap menjaga persatuan dan kesatuan dengan masyarakat yang berkebudayaan.

RKPD Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2021 harus mengantisipasi dampak pandemi terhadap terjadinya penurunan produksi dalam hal ini PDRB sehingga berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi dan juga antisipasi terhadap kemungkinan dampaknya pada tenaga kerja dengan terjadinya kemungkinan peningkatan pengangguran dan berkurangnya peluang usaha. Kabupaten Tanah Laut yang memiliki potensi pariwisata yang baik dan sektor pertanian yang dominan dalam PDRB nya harus menjaga agar pandemi covid 19 ini dapat diantisipasi pengaruhnya terhadap perekonomian daerah dan pencapaian target RPJMD. Sedangkan sektor perdagangan dan

industry walaupun termasuk yang rentan terhadap pandemic covid 19 namun karena tidak dominan masih dapat diantisipasi lebih ringan, namun yang menjadi permasalahan adalah sektor pertambangan yang ada akan terjadi penurunan kontribusinya karena pasat tujuan ekspornya dan penjualan dalam negeri dalam kondisi harga yang menurun dibandingkan tahun lalu dan demand yang juga menurun.

Dengan terjadinya penurunan pada sisi produksi yaitu turunnya pertanian dan pertambangan, menurunnya sisi pengeluaran konsumsi masyarakat, menurunnya pengeluaran pemerintah, rendahnya Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan menurunnya realisasi ekspor menyebabkan pertumbuhan ekonomi akan melambat, hal ini menyebabkan target pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan di RPJMD dan target RKPD tahun 2021 akan lebih sulit tercapai. Namun dengan upaya refocusing anggaran melalui Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara yang tepat dan produktif maka akan bisa mengurangi tidak tercapainya target yang ditetapkan.

Dampak pada target indikator makro yang tidak tercapai diprediksi dengan adanya peningkatan pengangguran terbuka sehingga prioritas pembangunan harus berbasis padat karya yang dapat menyerap tenaga kerja, pentingnya kegiatan pembangunan yang dilakukan dari belanja daerah berupa belanja modal dan pembangunan akan bisa menyerap tenaga kerja dan meningkatkan daya beli masyarakat serta mendorong multiflier efek bagi pembangunan daerah.

Nilai tukar petani harus bisa dijaga agar daya beli masyarakat tidak menimbulkan peningkatan kemiskinan dimasyarakat karena kalangan petani tidak mampu memehuni kebutuhannya. Kemandirian fiskal daerah Kabupaten Tanah Laut masih perlu ditingkatkan karena masuk dalam kategori sedang, realiasi PAD masih belum optimal sehingga perlu program yang lebih mampu mendorong peningkatan PAD dengan pengawasan yang ketat agar penggunaan anggaran tepat sasaran efisien dan efektif. Pemerintah daerah selain melakukan pengawasan perlu juga adanya spending rivew agar tidak terjadi inefisiensi, dan evaluasi target dan sasaran yang lebih realistis.

Pengeluaran belanja pegawai betul-betul dioptimalkan sesuai kinerja pemerintah daerah dan mendorong kinerja yang lebih produktif, sehingga tunjangan kinerja



diperlukan agar semangat kerja tetap terjaga dan efesiensi kerja juga tercapai. Pemerintah daerah perlu melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap desa agar terjadi pemberdayaan desa yang lebih baik, lebih produktif dan mandiri dengan mengoptimalkan penggunaan dana desa. Memastikan agar dana desa selain pembangunan fisik juga memperhatikan pembangunan sosial ekonomi dan pemberdayaan masyarakat. Pembangunan perdesaan dan daerah tertinggal perlu ditingkatkan, namun pembangunan perkotaan dan penataannya juga harus lebih baik lagi sebagai etalase daerah. Pemerintah daerah juga tetap menjaga agar tingkat kriminalitas menurun dan terkendali, kesejahteraan bisa meningkat sehingga kemiskinan bisa ditekan dan berkurang jumlahnya. Pelayanan bidang kesehatan dan pendidikan dalam rangka menyiapkan SDM yang berkualitas harus ditingkatkan dengan meningkatnya IPM kabupaten Tanah Laut.

Indikator kinerja daerah sebagai alat untuk menilai keberhasilan pembangunan yang mencerminkan capaian indikator kinerja program (*outcome*) dari kegiatan (*output*). Indikator kinerja daerah memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan bagi suatu tahun perencanaan yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak. Indikator kinerja akan dapat dijadikan sebagai media perantara untuk memberikan gambaran tentang capaian prestasi organisasi. Target pencapaian indikator kinerja daerah pada tahun 2021 ini yang terdiri dari Target Indikator Makro (lihat tabel 6.1) dan Target Indikator Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (lihat tabel 6.2) di bawah ini.

**Tabel 6.1 Target Indikator Makro Tahun 2021**

NO	INDIKATOR	TARGET
1.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	<b>69,59</b>
2.	Angka rata-rata lama sekolah (tahun)	9,0
3.	Angka Harapan Hidup	69,3
4.	Indeks kepuasan masyarakat	76,5 (Baik)
5.	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate) (%)	1,38
6.	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Catatan Sipil (%)	100,00
7.	Cakupan Kinerja Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) (%)	100,00
8.	Cakupan Pelestarian dan Pengembangan Budaya daerah (%)	100,00
9.	Jumlah Atlet yang berprestasi provinsi dan nasional	1
10.	Persentase permohonan pelayanan publik berbasis teknologi informasi yang ditindaklanjuti oleh SKPD (%)	100,00

NO	INDIKATOR	TARGET
11.	Jumlah penghargaan inovasi public	1 penghargaan
12.	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik yang didaftarkan	2 inovasi
13.	Jumlah Industri Kreatif yang memberi nilai tambah terhadap perekonomian	15Unit Usaha
14.	Jumlah Industri Kreatif yang tumbuh dan berkembang (unit)	15 Unit Usaha
15.	Indeks Reformasi Birokrasi	6,2 (Baik)
16.	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Daerah (kategori)	BB
17.	Opini Pengawas Eksternal (BPK) terhadap Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah (opini)	WTP
18.	Indeks keterbukaan informasi public	70,00
19.	Perangkat daerah yang memiliki layanan Pengelola Informasi dan Dokumentasi (SKPD)	40
20.	Persentase tingkat kerukunan antar umat beragama	100
21.	Jumlah konflik intern dan antarumat beragama (kasus)	0
22.	Jumlah konflik sosial (kasus)	0
24.	Angka Kemiskinan (%)	4,6
25.	Pertumbuhan Ekonomi	3,50
26.	Indeks Gini (skor)	0,22
27.	Indeks Pembangunan Gender (skor)	88,75
28.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,0
29.	Indeks Resiko Bencana Daerah (skor)	130 (Sedang)
30.	Persentase Penyelesaian Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100,00
31.	Persentase PMKS yang menjadi mandiri (%)	20,0
32.	Indeks Pembangunan Infrastruktur	70,75
33.	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik (%)	93,00
34.	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak perkotaan (%)	95,00
35.	Persentase Pertumbuhan sector unggulan daerah	5.03
36.	Pertumbuhan sektor Pertanian	3,52
37.	Pertumbuhan sektor Industri olahan	7,58
38.	Jumlah kunjungan wisatawan di objek wisata yang dikembangkan pemerintah (orang)	290.000
39.	Skor PPH Ketersediaan (nilai)	95,00
40.	Desa Berketahanan Pangan (%)	100,00
41.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (skor)	60,96
42.	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW Kabupaten (%)	65,00
43.	Indeks Desa Membangun (skor)	0,750 (Maju)
44.	Cakupan desa yang tata kelola pemerintahannya baik (%)	100,00
45.	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan (%)	10,00
46.	Luasan RTH publik kota (Ha)	110,50

Secara umum indikator yang akan dicapai untuk memenuhi arah Permendagri terlihat dalam tabel 6.2 berikut ini.

**Tabel 6.2 Target Indikator Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2021**

NO	INDIKATOR	TARGET
<b>1</b>	<b>ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT</b>	
<b>1.1</b>	<b>Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi</b>	
1.1.1	Laju pertumbuhan ekonomi dengan migas (%)	<b>3,50</b>
	Laju pertumbuhan ekonomi tanpa migas (%)	<b>3,50</b>
1.1.2	Tingkat Inflasi Daerah (%)	5,00
1.1.3	PDRB per kapita atas dasar harga konstan (Rp Juta)	11,6
1.1.4	Indeks Gini (skor)	<b>0,22</b>
1.1.5	Penduduk miskin (orang)	14.705
	Persentase Penduduk Miskin (%)	4,37
	Indeks Pembangunan Manusia (skor)	<b>69,59</b>
<b>1.2</b>	<b>Fokus Kesejahteraan Sosial</b>	
1.2.1	Angka melek huruf (%)	99,90
1.2.2	Angka rata-rata lama sekolah (tahun)	8,00
1.2.3	Harapan lama sekolah (tahun)	13,14
1.2.4	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A/ sederajat (%)	100,00
1.2.5	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B/ sederajat (%)	79,00
1.2.6	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A/ sederajat (%)	88,58
1.2.7	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B/ sederajat (%)	65,00
1.2.8	Angka harapan hidup (tahun)	69,30
1.2.9	Persentase balita gizi buruk (%)	1,00
1.2.10	Persentase balita gizi kurang (%)	5,00
1.2.11	Cakupan desa siaga aktif (%)	100,00
1.2.12	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	71,00
1.2.13	Rasio penduduk yang bekerja (%)	67,40
1.2.14	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja (%)	7,00
1.2.15	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera 1	5,00
1.2.16	Indeks kepuasan masyarakat	76,5 (Baik)
1.2.17	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah (%)	11,00
1.2.18	Opini Pengawas Eksternal (BPK) terhadap Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah (opini)	WTP
1.2.19	Skor PPH Ketersediaan (kg/kapita/tahun)	95,00
1.2.20	Skor PPH Konsumsi (kg/kapita/tahun)	91,57
1.2.21	Desa Berketahanan Pangan (%)	100,00
1.2.22	Pertumbuhan sub-sektor tanaman pangan (%)	3,00
1.2.23	Pertumbuhan sub-sektor tanaman hortikultura (%)	3,00
1.2.24	Pertumbuhan sub-sektor perkebunan (%)	5,00
1.2.25	Pertumbuhan sub-sektor peternakan (%)	3,00

NO	INDIKATOR	TARGET
1.2.26	Pertumbuhan sub-sektor perikanan (%)	3,00
1.2.27	Pertumbuhan sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor (%)	7,00
1.2.28	Pertumbuhan sektor industri pengolahan (%)	6,00
<b>1.3</b>	<b>Fokus Seni Budaya dan Olah Raga</b>	
1.3.1	Jumlah grup kesenian	10
1.3.2	Jumlah gedung kesenian	1
1.3.3	Jumlah gedung olahraga	2
<b>2</b>	<b>ASPEK PELAYANAN UMUM</b>	
	<b>Urusan Wajib Pelayanan Dasar</b>	
<b>2.1</b>	<b>Pendidikan</b>	
2.1.1	Angka melek huruf (%)	99,90
2.1.2	Angka rata-rata lama sekolah (tahun)	8,00
2.1.3	Harapan lama sekolah (tahun)	13,14
2.1.4	Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Anak Usia Dini (%)	60,00
2.1.5	Rasio Murid-Guru PAUD (rasio)	1 : 8
2.1.6	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A/ sederajat (%)	100
2.1.7	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B/ sederajat (%)	79,00
2.1.8	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A/ sederajat (%)	88,58
2.1.9	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B/ sederajat (%)	65,00
2.1.10	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A/ sederajat (%)	99,90
2.1.11	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B/ sederajat (%)	95,00
2.1.12	Angka Putus Sekolah SD/MI/Paket A/ sederajat (%)	0,30
2.1.13	Angka Putus Sekolah SMP/MTs/Paket B/ sederajat (%)	0,08
2.1.14	Angka Kelulusan UN (AL) SD/MI (%)	100,00
2.1.15	Angka Kelulusan UN (AL) SMP/MTs (%)	100,00
2.1.16	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs (%)	99,70
2.1.17	Cakupan sekolah pendidikan SD/MI dengan kondisi bangunan baik	87,00
2.1.18	Cakupan sekolah pendidikan SMP/MTs dengan kondisi bangunan baik (%)	77,00
2.1.19	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar	1 : 95
2.1.20	Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar (rasio)	1 : 20
2.1.21	Rasio guru/murid per kelas rata-rata pendidikan dasar	1 : 20
2.1.22	Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar (%)	100,00
2.1.23	Cakupan siswa SD yang memperoleh pembiayaan pendidikan (%)	100,00
2.1.24	Cakupan siswa SMP yang memperoleh pembiayaan pendidikan (%)	100,00
2.1.25	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B (%)	75,00
2.1.26	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B (%)	57,50
2.1.27	Persentase peserta pendidikan kecakapan hidup yang meningkat keterampilannya (%)	100,00

NO	INDIKATOR	TARGET
2.1.28	Persentase Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV (%)	100,00
2.1.29	Persentase guru TK yang bersertifikat pendidik (%)	100,00
2.1.31	Persentase guru SD yang bersertifikat pendidik (%)	100,00
2.1.31	Persentase guru SMP yang bersertifikat pendidik (%)	100,00
2.1.32	Rata-rata Nilai Uji Kompetensi Guru (UKG) SD (skor)	63,00
2.1.33	Rata-rata Nilai Uji Kompetensi Guru (UKG) SMP (skor)	68,00
2.1.34	Proporsi sekolah (SD/SMP) dengan akses listrik (%)	100,00
2.1.35	Proporsi sekolah (SD/SMP) dengan akses internet untuk tujuan pengajaran (%)	12,00
2.1.36	Proporsi sekolah (SD/SMP) dengan akses komputer untuk tujuan pengajaran (%)	35,00
2.1.37	Proporsi sekolah (SD/SMP) dengan akses air minum layak	45,00
2.1.38	Proporsi sekolah (SD/SMP) dengan akses fasilitas dasar per jenis kelamin (%)	45,00
2.1.39	Proporsi sekolah (SD/SMP) dengan akses fasilitas cuci tangan (%)	100,00
2.1.40	Capaian Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan (%)	95,00
2.1.41	Jumlah Desa yang memiliki PKBM aktif (desa)	10
2.1.42	Rata-rata nilai ujian SD/MI	61,89
2.1.43	Rata-rata nilai ujian SD/Mts	58,21
<b>2.2</b>	<b>Kesehatan</b>	
2.2.1	Angka harapan hidup (tahun)	69,30
2.2.2	Cakupan kinerja pelayanan kesehatan <i>on call</i> (prog. unggulan 5) (%)	100,00
2.2.3	Persentase balita gizi buruk (%)	1,00
2.2.4	Persentase pemenuhan obat publik dan perbekalan kesehatan (%)	100,00
2.2.5	Cakupan <i>buffer stock</i> obat Kabupaten Tanah Laut (%)	100,00
2.2.6	Persentase Instalasi farmasi kabupaten yang melakukan manajemen pengelolaan obat dan vaksin sesuai standar (%)	100,00
2.2.7	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas (%)	70,00
2.2.8	Cakupan kecamatan yang sudah memiliki puskesmas (%)	100,00
2.2.9	Cakupan puskesmas terakreditasi (%)	90,00
2.2.10	Jumlah tema pesan dalam komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat (tema)	5,00
2.2.11	Prevalensi tekanan darah tinggi (%)	22,50
2.2.12	Prevalensi obesitas pada penduduk umur $\geq 18$ tahun (%)	14,00
2.2.13	Persentase perempuan umur 30-50 tahun yang dideteksi dini kanker serviks dan payudara (%)	8,00
2.2.14	Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum (standar yang digunakan Indonesia 2.100 Kkal/kapita/hari)	3,00
2.2.15	Cakupan masyarakat teridentifikasi kurang gizi (%)	1,00
2.2.16	Cakupan gizi buruk dan gizi kurang yang dapat ditangani (%)	100,00
2.2.17	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24	80,00

NO	INDIKATOR	TARGET
	bulan keluarga miskin (%)	
2.2.18	Angka kematian akibat keracunan (kasus)	10
2.2.19	Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air (%)	100,00
2.2.20	Kasus Malaria (AMI) per 1.000 penduduk (kasus)	5
2.2.21	Tingkat kematian akibat malaria (kasus)	1
2.2.22	Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	40
2.2.23	Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS (%)	100,00
2.2.24	Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	25
2.2.25	Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS (%)	100,00
2.2.26	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD (%)	100,00
2.2.27	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	100,00
2.2.28	Insiden Hepatitis B per 100.000 penduduk	40
2.2.29	Angka pencapaian pengobatan Penyakit Filariasis (%)	100,00
2.2.30	Proporsi kasus Kusta yang ditemukan dan diobati	100,00
2.2.31	Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk	1
2.2.32	Penderita diare yang ditangani (%)	100,00
2.2.33	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi (%)	0,20
2.2.34	Angka infeksi baru HIV per 1.000 populasi tidak terinfeksi HIV	1
2.2.35	Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS (%)	80,00
2.2.36	Jumlah Lembaga Mitra Pembangunan Kesehatan (lembaga)	5
2.2.37	Persentase penyalahgunaan narkoba yang mengakses layanan rehabilitasi di fasilitas pelayanan kesehatan (%)	100,00
2.2.38	Persentase penyalahgunaan narkoba yang menyelesaikan program rehabilitasi di fasilitas pelayanan kesehatan (%)	100,00
2.2.39	Persentase penyalahgunaan narkoba yang mengakses layanan pasca rehabilitasi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (%)	100,00
2.2.40	Prevalensi penyalahgunaan narkoba (%)	1,00
2.2.41	Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur $\geq 15$ tahun dalam satu tahun terakhir	0,10
2.2.42	<i>Unmet need</i> pelayanan kesehatan (%)	4,00
2.2.43	Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat (%)	100,00
2.2.44	Bidan yang Kompeten PPIA (%)	100,00
2.2.45	Cakupan perawatan balita gizi buruk (%)	100,00
2.2.46	Persentase anak berusia 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap (%)	100,00
2.2.47	Prevalensi kekurangan gizi ( <i>underweight</i> ) pada anak balita (%)	2,00
2.2.48	Prevalensi <i>stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita (%)	22
2.2.49	Prevalensi <i>stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah	2,00

NO	INDIKATOR	TARGET
	dua tahun/baduta (%)	
2.2.50	Prevalensi Malnutrisi ( <i>wasting/obesitas</i> ) pada anak balita (%)	2,00
2.2.51	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif (%)	100,00
2.2.52	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1.000 kelahiran hidup	5,00
2.2.53	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup	9,6
2.2.54	Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup	13,00
2.2.55	Rasio posyandu per satuan balita (per 100 balita)	40,00
2.2.56	Cakupan balita pneumonia yang ditangani (%)	100,00
2.2.57	Cakupan penanganan kesehatan bayi (%)	100,00
2.2.58	Cakupan pelayanan kesehatan anak balita (%)	100,00
2.2.59	Angka kelangsungan hidup bayi (per 1.000 kelahiran hidup)	988,00
2.2.60	Angka Kematian Neonatal per 1.000 kelahiran hidup	5
2.2.61	Persentase perempuan pernah kawin berusia 15-49 tahun yang proses kelahiran terakhirnya di fasilitas kesehatan (%)	100,00
2.2.62	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses kelahiran terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih (%)	100,00
2.2.63	Prevalensi anemia pada ibu hamil (%)	25,00
2.2.64	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4 (%)	100,00
2.2.65	Cakupan pelayanan nifas (%)	100,00
2.2.66	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani (%)	100,00
2.2.67	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani (%)	100,00
2.2.68	Proporsi penduduk penerima bantuan iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS) (%)	10,00
2.2.69	Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	100,00
2.2.70	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1.000 penduduk	575
2.2.71	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin (%)	100,00
2.2.72	Cakupan Puskesmas yang memiliki minimal 5 jenis tenaga sesuai standar (%)	100,00
2.2.73	Cakupan SDM kesehatan yang terakreditasi (%)	100,00
2.2.74	Rasio puskesmas per 100.000 penduduk	1 : 4000
2.2.75	Rasio rumah sakit per 100.000 penduduk	1 : 30.000
2.2.76	Rasio Dokter per 100.000 penduduk	1 : 1.000
2.2.77	Rasio Tenaga kesehatan per 100.000 penduduk	1 : 110
2.2.78	Cakupan kecukupan laboratorium dalam mendukung pelayanan kesehatan (%)	100,00
2.2.79	Cakupan masyarakat yang mendapat pengobatan jiwa (%)	100,00
2.2.80	Angka kematian dari percobaan bunuh diri (kasus)	5
2.2.81	Cakupan Rumah sakit yang sudah terakreditasi (%)	100,00
2.2.82	Persentase merokok pada penduduk umur $\leq 18$ tahun (%)	15,00
2.2.83	Indeks Kinerja Pelayanan RSUD dan Pelayanan Puskesmas (kategori)	Kategori: Baik



NO	INDIKATOR	TARGET
2.2.84	Nilai Capaian SPM Kesehatan (%)	100,00
2.2.85	Cakupan desa siaga aktif (%)	100,00
2.2.86	Jumlah desa yang memiliki kelompok Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM)	10
2.2.87	Cakupan Kelurahan/Desa <i>Universal Child Immunization</i> (UCI)	98,00
2.2.88	Persentase desa yang memiliki rumah tangga berPHBS (%)	100,00
2.2.89	Persentase desa ODF	30,00
2.2.90	Persentase desa STBM	52,00
2.2.91	Persentase jenis obat yang memenuhi standar mutu khasiat dan keamanan (%)	100,00
2.2.92	Jumlah inovasi pelayanan di bidang kesehatan	1
2.2.93	Indeks kepatuhan terhadap standar (area klinis)	100,00
2.2.94	Indeks tingkat pengendalian infeksi di rumah sakit (area klinis)	100,00
2.2.95	Indeks prosedur penanganan uji sampel (area klinis)	100,00
2.2.96	Indeks pengendalian mutu (area klinis)	100,00
2.2.97	Indeks keuangan (area managerial)	100,00
2.2.98	Indeks utilisasi (area managerial)	100,00
2.2.99	Indeks kepuasan pelanggan (area managerial)	100,00
2.2.100	Indeks ketepatan waktu pelayanan (area managerial)	100,00
2.2.101	Indeks temuan yang ditindaklanjuti (area managerial)	100,00
2.2.102	Indeks tingkat kehandalan sumber daya (area managerial)	100,00
2.2.103	Indeks sumber daya manusia (area managerial)	100,00
2.2.104	Indeks pendidikan (area managerial)	100,00
2.2.105	Indeks sarana dan prasarana (area managerial)	100,00
2.2.106	Cakupan penyediaan alat kesehatan rumah sakit (%)	100,00
2.2.107	Cakupan pemeliharaan alat kesehatan rumah sakit (%)	100,00
2.2.108	Indeks promotif dan preventif (area managerial)	100,00
2.2.109	Indeks capaian indikator medik (area klinis)	100,00
2.2.110	Indeks level IT	100,00
2.2.111	Cakupan penyediaan administrasi rumah sakit (%)	100,00
2.2.112	Jumlah inovasi pelayanan di rumah sakit	1
2.2.113	Cakupan desa yang mendapatkan pendampingan kesehatan di area kerja puskesmas (%)	100,00
2.2.114	Persentase puskesmas yang berkinerja baik	100,00
2.2.115	Jumlah inovasi pelayanan di masing- masing Puskesmas	100,00
<b>2.3</b>	<b>Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	
2.3.1.	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	64
2.3.2	Persentase terhubungnya antar wilayah kecamatan melalui transportasi darat (%)	100,00
2.3.3	Panjang jalan kabupaten yang dibangun (km)	10
2.3.4	Persentase panjang jalan kabupaten yang ditingkatnya kualitasnya (%)	10,00



NO	INDIKATOR	TARGET
2.3.5	Persentase jalan yang dipelihara (%)	100,00
2.3.6	Persentase jembatan kabupaten dengan kualitas baik (%)	100,00
2.3.7	Panjang jalan di Kota Pelaihari yang dilebarkan (km)	2,50
2.3.8	Cakupan pengerasan dan pengaspalan Jalan Swarangan (%)	-
2.3.9	Persentase rumah tangga yang memiliki sanitasi yang baik (%)	35,00
2.3.10	Persentase panjang drainase dalam kondisi baik yang terbangun di tingkat kabupaten	100,00
2.3.11	Proporsi populasi yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun	45,00
2.3.12	Cakupan rumah tangga dengan air bersih layak (%)	61,5
2.3.13	Cakupan penduduk berakses air minum sehat (%)	75,00
2.3.14	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan (%)	95,00
2.3.15	Cakupan pembangunan Kantor Bupati (%)	70,00
2.3.16	Cakupan pembinaan badan usaha jasa konstruksi	100,00
2.3.17	Tersedianya standar satuan harga jasa konstruksi	Ada
2.3.18	Cakupan pembangunan gedung/bangunan/fasilitas lainnya yang sesuai standar konstruksi yang ditetapkan (%)	100,00
2.3.19	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik (%)	93,00
2.3.20	Persentase panjang saluran irigasi kabupaten yang direhabilitasi (%)	10,00
2.3.21	Persentase beton/ bronjong /pasangan batu penahan abrasi yang dibangun sesuai standar (%)	100,00
2.3.22	Panjang sungai yang dinormalisasi (km)	1,00
2.3.23	Persentase kasus pelanggaran tata ruang yang dilaporkan dan ditangani (%)	100,00
2.3.24	Jumlah Kebijakan tata ruang yang telah disusun (kebijakan)	-
2.3.25	Cakupan kecamatan yang sudah memiliki RDTR (%)	55,00
2.3.26	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW Kabupaten (%)	65,00
2.3.27	Persentase kesesuaian rencana pembangunan (pola dan struktur ruang) dengan RTRW Kabupaten	65,00
2.3.28	Persentase pengawasan dalam pembangunan jalan desa (%)	100,00
2.3.29	Persentase pembangunan jalan desa yang dibangun sesuai standar konstruksi (%)	100,00
2.3.30	Jumlah inovasi pelayanan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang	1
2.3.31	Persentase teknologi konstruksi terbaru yang diaplikasikan dalam pembangunan (%)	30,00
2.3.32	Cakupan pemeliharaan alat-alat konstruksi yang dimiliki (%)	100,00
<b>2.4</b>	<b>Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman</b>	
2.4.1	Jumlah rumah rakyat layak huni yang dibangun (rumah)	10
2.4.2	Cakupan penataan lingkungan permukiman kumuh (%)	7,00

NO	INDIKATOR	TARGET
2.4.3	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau (%)	65,00
2.4.4	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan (%)	7,00
2.4.5	Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan (%)	5,00
2.4.6	Cakupan pembangunan rumah pasca bencana (%)	100,00
2.4.7	Jumlah kawasan pengembangan rumah komersil yang dibangun (kawasan)	2
2.4.8	Luasan RTH publik kota (Ha)	110,5
2.4.9	Cakupan rumah tangga yang memiliki akses terhadap persampahan (%)	40,00
<b>2.5</b>	<b>Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat</b>	
2.5.1	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) (skor)	72,0 (sedang)
2.5.2	Jumlah konflik intern dan antarumat beragama (kasus)	0
2.5.3	Jumlah lembaga keagamaan yang aktif dalam peningkatan produktivitas umat (lembaga)	25 lembaga
2.5.4	Jumlah konflik sosial (kasus)	0
2.5.5	Persentase Forum Pembinaan Kebangsaan (FPK) kabupaten (%)	100,00
2.5.6	Cakupan pembinaan wawasan kebangsaan bagi remaja usia sekolah (%)	12,00
2.5.7	Cakupan pengawasan orang asing dan lembaga asing kabupaten (%)	100,00
2.5.8	Cakupan fasilitasi pembinaan FKUB (%)	100,00
2.5.9	Persentase rekomendasi FKDM yang ditindaklanjuti pihak terkait (%)	100,00
2.5.10	Tingkat fasilitasi Forkopimda (%)	100,00
2.5.11	Cakupan fasilitasi pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP (%)	100,00
2.5.12	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) (%)	100,00
2.5.13	Cakupan fasilitasi pembinaan seni budaya daerah bagi remaja usia sekolah (%)	12,00
2.5.14	Cakupan fasilitasi pengelolaan ekonomi rumah tangga bagi masyarakat miskin (%)	10,00
2.5.15	Tingkat fasilitasi dan tertib administrasi partai politik (%)	100,00
2.5.16	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu dan pemilukada (%)	70,00
2.5.17	Jumlah Desa sadar politik (desa)	5
2.5.18	Jumlah Desa Peduli Toleransi	5
2.5.19	Persentase Penyelesaian Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (%)	100
2.5.20	Risiko penduduk terkena tindak pidana (per 100.000 orang)	80
2.5.21	Persentase pelanggaran Perda yang ditindak (%)	100,00
2.5.22	Cakupan penanganan penyakit masyarakat (%)	100,00
2.5.23	Jumlah tindak pidana (kasus)	100
2.5.24	Cakupan patroli petugas Satpol PP di lokasi prioritas (%)	100,00
2.5.25	Rasio Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	1:3000

NO	INDIKATOR	TARGET
2.5.26	Rasio petugas linmas per 10.000 penduduk	1:70
2.5.27	Rasio Poskamling per jumlah desa/kelurahan	1:5
2.5.28	Cakupan ketersediaan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) pada objek strategis pemerintahan	100,00
2.5.29	Persentase tingkat waktu tanggap (response time rate) kejadian kebakaran	100,00
2.5.30	Desa Bebas Penyakit Masyarakat (desa)	15
<b>2.6</b>	<b>Sosial</b>	
2.6.1	Persentase PMKS yang menjadi mandiri (%)	20
2.6.2	Ketersediaan basis data terpadu PMKS dan kemiskinan (%)	100,00
2.6.3	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial (%)	100,00
2.6.4	Persentase PMKS yang tertangani (%)	100,00
2.6.5	Persentase PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya (%)	100,00
2.6.6	Tingkat fasilitasi pembangunan KAT (%)	100,00
2.6.7	Persentase WKBSM yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial (%)	100,00
2.6.8	Jumlah lembaga kesejahteraan sosial yang aktif yang Aktif	9
2.6.9	Cakupan peningkatan SDM kesejahteraan sosial (%)	100,00
2.6.10	Cakupan pembinaan dan pelayanan rehabilitasi sosial (%)	100,00
2.6.11	Cakupan penerima bantuan Program Keluarga Harapan yang tepat syarat	100,00
2.6.12	Persentase izin pengumpulan dana yang terbit dari permohonan tepat syarat	100,00
2.6.13	Cakupan pemulihan trauma bencana alam dan sosial tepat syarat	100,00
2.6.14	Indeks Resiko Bencana Daerah (skor)	130 (Sedang)
2.6.15	Cakupan fasilitasi Forum PRB tingkat kabupaten (%)	100,00
2.6.16	Persentase ASN siaga dan tangguh bencana (%)	50,00
2.6.17	Persentase kesiapsiagaan penanganan bencana (%)	100,00
2.6.18	Ketersediaan rencana kontigensi bencana daerah (Ada/Tidak)	Ada
2.6.19	Cakupan Pelayanan Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana (%)	100,00
2.6.20	Cakupan Pelayanan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penanggulangan Bencana (%)	100,00
2.6.21	Cakupan fasilitasi penanganan pasca bencana (%)	100,00
2.6.22	Cakupan fasilitasi pemberdayaan masyarakat pasca bencana (%)	100,00
2.6.23	Desa tangguh bencana (desa)	8
2.6.24	Angka Kemiskinan (%)	4,37
	<b>Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar</b>	

NO	INDIKATOR	TARGET
<b>2.7</b>	<b>Tenaga Kerja</b>	
2.7.1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	71,00
2.7.2	Rasio penduduk yang bekerja (%)	67,40
2.7.3	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja (%)	7,00
2.7.4	Persentase Tenaga Kerja Siap Kerja	100,00
2.7.5	Tingkat Pengangguran (%)	<b>4,0</b>
2.7.6	Cakupan fasilitasi keselamatan dan perlindungan tenaga kerja (%)	100,00
2.7.7	Fasilitasi Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah (%)	100,00
2.7.8	Cakupan sengketa perusahaan-pekerja yang diselesaikan	30
2.7.9	Persentase pekerja/buruh yang menjadi peserta BPJS ketenagakerjaan	46,00
2.7.10	Penetapan UMK (Ada/Tidak)	Ada
2.7.11	Persentase pekerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	100,00
2.7.12	Persentase pekerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kewirausahaan (%)	100,00
2.7.13	Persentase tenaga kerja yang diserap oleh perusahaan setelah mendapatkan pelatihan (%)	100,00
2.7.14	Jumlah tenaga kerja yang dilatih keterampilan di BLK	500
<b>2.8</b>	<b>Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak</b>	
2.8.1	Indeks Pemberdayaan Gender (skor)	130 (Sedang)
2.8.2	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD Kabupaten Tanah Laut (%)	30,00
2.8.3	Proporsi kursi perempuan yang berasal dari Kabupaten Tanah Laut di DPRD Kalimantan Selatan	30,00
2.8.4	Persentase perempuan di yang menduduki jabatan pimpinan perangkat daerah (Kepala SKPD dan Kepala Bidang) di Kabupaten Tanah Laut (%)	45,00
2.8.5	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	50,76
2.8.6	Rasio APM perempuan dibandingkan laki-laki pada jenjang pendidikan SD	100,00
2.8.7	Rasio APM perempuan dibandingkan laki-laki pada jenjang pendidikan SMP	100,00
2.8.8	Rasio APM perempuan dibandingkan laki-laki pada jenjang pendidikan SMA	100,00
2.8.9	Rasio APM perempuan dibandingkan laki-laki pada jenjang pendidikan PT	100,00
2.8.10	Rasio angka melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada usia 15-24 tahun	100,00
2.8.11	Jumlah kelompok usaha mandiri perempuan (unit)	6
2.8.12	Kabupaten Layak Anak (kategori)	Madya
2.8.13	Ketersediaan pusat penanganan terpadu perlindungan perempuan dan anak (Ada/Tidak)	Ada

NO	INDIKATOR	TARGET
2.8.14	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan yang ditindaklanjuti (%)	100,00
2.8.15	Persentase jumlah tenaga kerja di bawah umur (%)	5,00
2.8.16	Cakupan perlindungan tenaga kerja anak (%)	100,00
2.8.17	Rasio KDRT (rasio)	1 : 1000
2.8.18	Desa peduli perempuan dan anak (desa)	2
<b>2.9</b>	<b>Pangan</b>	
2.9.1	Skor PPH Ketersediaan (kg/kapita/tahun)	95,00
2.9.2	Skor PPH Konsumsi (kg/kapita/tahun)	91,57
2.9.3	Cakupan ketersediaan data harga pangan (%)	100,00
2.9.4	Cakupan pengawasan mutu dan keamanan pangan (%)	100,00
2.9.5	Cakupan pemantauan distribusi pangan di pintu masuk utama kabupaten (%)	100,00
2.9.6	Persentase Desa Rentan Pangan (%)	0
2.9.7	Desa Berketahanan Pangan (%)	100,00
2.9.8	Meningkatnya Ketersediaan pangan masyarakat	134.377
<b>2.10</b>	<b>Pertanahan</b>	
2.10.1	Cakupan fasilitas penyediaan tanah untuk kawasan industri Jorong	40,00
2.10.2	Cakupan penyelesaian konflik tanah	100,00
2.10.3	Cakupan inventarisasi tanah yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Tanah Laut	100,00
2.10.4	Persentase tanah yang bersertifikat di Kabupaten Tanah Laut	80,00
<b>2.11</b>	<b>Lingkungan Hidup</b>	
2.11.1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (skor)	75,00
2.11.2	Indeks Kualitas Udara (skor)	85,00
2.11.3	Indeks Kualitas Air (skor)	75,00
2.11.4	Kinerja Pelayanan Pengelolaan Limbah dan Sampah (%)	100,00
2.11.5	Cakupan pengamatan dan pengukuran tingkat kerusakan lingkungan hidup (%)	100,00
2.11.6	Cakupan ketersediaan data lingkungan hidup Kabupaten Tanah Laut (%)	100,00
2.11.7	Persentase sungai yang dipantau baku mutunya (%)	100,00
2.11.8	Rasio kualitas udara yang dipantau pada titik pengamatan (%)	100,00
2.11.9	Cakupan pengawasan terhadap AMDAL (%)	100,00
2.11.10	Persentase SDM yang mengikuti pelatihan AMDAL (%)	100,00
2.11.11	Cakupan Pengembangan SDM Bidang lingkungan hidup (%)	100,00
2.11.12	Cakupan penanganan penyelesaian kasus lingkungan hidup (%)	100,00
2.11.13	Persentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya kegiatan perusakan lingkungan yang ditindaklanjuti	100,00

NO	INDIKATOR	TARGET
2.11.14	Persentase penyelesaian pengujian tepat waktu di laboratorium lingkungan (%)	100,00
2.11.15	Cakupan penyediaan alat-alat laboratorium prioritas (%)	100,00
<b>2.12</b>	<b>Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil</b>	
2.12.1	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Catatan Sipil (%)	100,00
2.12.2	Cakupan pelayanan pendataan dan pendaftaran penduduk (%)	100,00
2.12.3	Cakupan pelayanan administrasi migrasi penduduk (%)	100,00
2.12.4	Rasio Cakupan Penduduk ber KTP (%)	100,00
2.12.5	Cakupan ketersediaan pelaporan dan data kependudukan (%)	100,00
2.12.6	Rasio Kepemilikan Akte Kelahiran (%)	100,00
2.12.7	Rasio pasangan berakte nikah (%)	100,00
2.12.8	Persentase kepemilikan KK (%)	100,00
2.12.9	Cakupan pembinaan dan pengembangan sistem administrasi kependudukan (%)	100,00
2.12.10	Dokumen profil kependudukan kabupaten (Ada/Tidak)	Ada
2.12.11	Cakupan kerjasama administrasi kependudukan yang ditindaklanjuti	100,00
2.12.12	Desa sadar administrasi kependudukan (desa)	20
<b>2.13</b>	<b>Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</b>	
2.13.1	Indeks Desa Membangun (skor)	0,750 (Maju)
2.13.2	Cakupan desa yang tata kelola pemerintahannya baik (%)	100,00
2.13.3	Cakupan ketersediaan data terkini profil dan potensi desa (%)	100,00
2.13.4	Cakupan pendampingan penyusunan RPJM Desa (%)	100,00
2.13.5	Cakupan pendampingan evaluasi kinerja RPJM Desa (%)	100,00
2.13.6	Jumlah desa yang melestarikan dan mengembangkan adat dan budaya	5
2.13.7	Jumlah BUMDES yang berkembang (unit)	5
2.13.8	Cakupan pembinaan lembaga pemberdayaan masyarakat (%)	100,00
2.13.9	Persentase LPM berprestasi (%)	7,00
2.13.10	Cakupan pembinaan kelompok PKK (%)	100,00
2.13.11	Persentase PKK aktif (%)	55,00
2.13.12	Persentase pemeliharaan sarana pasca program pemberdayaan masyarakat	100,00
2.13.13	Cakupan pembinaan peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa (%)	100,00
2.13.14	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	100,00
2.13.15	Cakupan desa yang tertib administrasi pemerintahan (%)	100,00
2.13.16	Cakupan desa yang tertib administrasi tata kelola keuangan dan aset desa (%)	100,00

NO	INDIKATOR	TARGET
<b>2.14</b>	<b>Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</b>	
2.14.1	Rata-rata jumlah anak per keluarga (anak)	2
2.14.2	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate) (%)	1,38
2.14.3	Ketersediaan pusat informasi dan konseling remaja/mahasiswa (Ada/Tidak)	Ada
2.14.4	Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data parameter dan proyeksi penduduk untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	5
2.14.5	Ketersediaan regulasi pengendalian penduduk (Ada/Tidak)	Ada
2.14.6	Laju pertumbuhan penduduk (%)	0,50
2.14.7	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera 1 (%)	5,00
2.14.8	Persentase peserta KB aktif terhadap pasangan usia subur (%)	83,59
2.14.9	Peserta anggota Bina Keluarga Balita (BKB) yang mengikuti KB (%)	60,00
2.14.10	Persentase anggota Bina Keluarga (BKR) Berstatus Ber-KB (%)	75,00
2.14.11	Persentase anggota keluarga UPPKS yang Ber-KB (%)	80,00
2.14.12	Persentase PUS yang mendapat KIE (%)	45,00
2.14.13	Unmeet need KB pada pasangan usia subur (%)	5,00
2.14.14	Desa sadar KB (desa)	5
<b>2.15</b>	<b>Perhubungan</b>	
2.15.1	Jumlah kasus kecelakaan (kasus)	20
2.15.2	Cakupan revitalisasi terminal yang dikelola kabupaten (%)	25,00
2.15.3	Penerimaan retribusi parkir tepi jalan umum (Rp Juta)	18,45
2.15.4	Penerimaan retribusi pengelolaan terminal (Rp Juta)	134,98
2.15.5	Persentase angkutan umum yang layak digunakan di terminal (%)	100,00
2.15.6	Cakupan pemasangan rambu-rambu yang memadai di ruas prioritas jalan kabupaten (%)	100,00
2.15.7	Cakupan pemasangan petunjuk jalan di ruas jalan kabupaten (%)	100,00
2.15.8	Persentase aksesibilitas antar wilayah kecamatan yang terhubung sarana transportasi umum (%)	100,00
2.15.9	Cakupan penegakan pelanggaran lalu lintas (%)	100,00
2.15.10	Cakupan kesiapsiagaan manajemen dan rekayasa lalu lintas dalam acara prioritas (%)	100,00
2.15.11	Pertumbuhan arus penumpang angkutan darat (%)	2,00
2.15.12	Pertumbuhan barang yang terangkut angkutan darat (%)	5,00
2.15.13	Pertumbuhan PRDB sub-kategori angkutan darat (%)	5,00
2.15.14	Cakupan monitoring sarana pehubungan laut, sungai, dan penyeberangan (%)	100,00
2.15.15	Pertumbuhan arus penumpang angkutan laut (%)	1,00
2.15.16	Pertumbuhan barang yang melalui dermaga pelabuhan	10,00
2.15.17	Cakupan ketersediaan sarana navigasi angkutan laut, sungai, dan penyeberangan	100,00

NO	INDIKATOR	TARGET
2.15.18	Pertumbuhan PRDB sub-kategori angkutan laut (%)	6,00
2.15.19	Cakupan ketersediaan alat untuk pengujian kendaraan bermotor (%)	100,00
2.15.20	Persentase pelayanan tepat waktu dalam pengujian kendaraan bermotor (%)	100,00
2.15.21	Penerimaan retribusi pengujian kendaraan bermotor (Rp Juta)	527,35
<b>2.16</b>	<b>Komunikasi dan Informatika</b>	
2.16.1	Persentase permohonan pelayanan publik berbasis teknologi informasi yang ditindaklanjuti oleh SKPD (%)	100,00
2.16.2	Cakupan penyebaran informasi pembangunan daerah melalui situs resmi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut (%)	100,00
2.16.3	Cakupan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi (%)	100,00
2.16.4	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon (%)	70,00
2.16.5	Persentase penduduk yang mengakses internet (%)	55,00
2.16.6	Cakupan fasilitasi pembangunan BTS di Kabupaten Tanah Laut	100,00
2.16.7	Cakupan ketersediaan sistem informasi pembangunan daerah berbasis teknologi informasi (%)	100,00
2.16.8	Cakupan pengembangan sistem aplikasi e-Government di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut (%)	100,00
2.16.9	Persentase SKPD yang mempublikasikan kinerjanya dalam sistem informasi pembangunan daerah (%)	100,00
2.16.10	Persentase SKPD di Kabupaten Tanah Laut yang menerapkan dan terhubung sistem e-Government (%)	100,00
2.16.11	Persentase SKPD yang sudah menerapkan Keterbukaan Informasi Publik (%)	100,00
2.16.12	Persentase layanan pengaduan masyarakat secara online yang ditindaklanjuti tepat waktu dan tepat syarat	100,00
2.16.13	Cakupan desa yang dapat mengakses layanan telekomunikasi (%)	70,00
<b>2.17</b>	<b>Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah</b>	
2.17.1	Jumlah UMKM yang berkembang (unit)	2
2.17.2	Jumlah UMKM baru yang terbentuk (unit)	5
2.17.3	Cakupan pembinaan UMKM dalam manajemen usaha dan pemasaran	20,00
2.17.4	Cakupan fasilitasi pemasaran produk UMKM unggulan daerah (%)	100,00
2.17.5	Cakupan penerbitan izin UKM yang tepat syarat dan tepat waktu (%)	100,00
2.17.6	Jumlah koperasi baru yang terbentuk (unit)	4
2.17.7	Persentase koperasi aktif (%)	80,00
2.17.8	Persentase koperasi maju (%)	4,00
2.17.9	Cakupan pembinaan koperasi terkait manajemen dan pengembangan usaha koperasi (%)	20,00
2.17.10	Desa koperasi (desa)	2
2.17.11	Desa tematik UKM (desa)	1



NO	INDIKATOR	TARGET
2.17.12	Koperasi Aktif	100
<b>2.18</b>	<b>Penanaman Modal</b>	
2.18.1	Capaian realisasi kesepakatan pelaku investasi (kesepakatan)	6
2.18.2	Realisasi Investasi (Rp miliar)	931.824
2.18.3	Tingkat pertumbuhan nilai investasi sektor unggulan (%)	5,00
2.18.4	Jumlah investor berskala nasional (PMDN)	2
2.18.5	Jumlah investor berskala nasional (PMA)	1
2.18.6	Persentase UMKMK yang bermitra dengan PMA/ PMDN (%)	4,00
2.18.7	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN) (Rp miliar)	698.868
2.18.8	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMA) - (Rp miliar)	232.956
2.18.8	Ketersediaan dokumen regulasi pada sektor penanaman modal (Ada/Tidak)	Ada
2.18.10	Cakupan pemantauan kinerja realisasi penanaman modal (%)	100,00
2.18.11	Ketersediaan SOP dalam pengurusan izin investasi (Ada/Tidak)	Ada
2.18.12	Persentase permohonan perizinan jasa usaha yang diverifikasi dan divalidasi sesuai dengan SOP/tepat waktu dan tepat syarat(%)	100,00
2.18.13	Persentase permohonan perizinan non usaha yang diverifikasi dan divalidasi sesuai dengan SOP/tepat waktu dan tepat syarat (%)	100,00
2.18.14	Persentase pelaku usaha yang taat dalam melaksanakan kewajiban sesuai dengan UU (%)	100,00
2.18.15	Persentase penyelesaian pengaduan pelayanan perizinan dan non perizinan yang ditindaklanjuti (%)	100,00
2.18.16	Persentase pelayanan permohonan perizinan dan perizinan sesuai dengan SOP/tepat waktu dan tepat syarat (%)	100,00
2.18.17	Cakupan ketersediaan data investasi, perizinan, dan non perizinan (%)	100,00
<b>2.19</b>	<b>Kepemudaan dan Olah Raga</b>	
2.19.1	Persentase Wirausaha Muda (%)	70,00
2.19.2	Organisasi pemuda aktif (%)	95,00
2.19.3	Jumlah kelompok pemuda yang berprestasi (kelompok)	2
2.19.4	Cakupan pembinaan organisasi pemuda (%)	100,00
2.19.5	Cakupan pemberian kepada pemuda berprestasi Kabupaten Tanah Laut (%)	100,00
2.19.6	Jumlah pemuda berprestasi yang menerapkan teknologi tepat guna (pemuda)	2
2.19.7	Cakupan organisasi pemuda yang mendapatkan pembinaan bahaya narkoba dan obat-obat terlarang (%)	100,00
2.19.8	Persentase sarana dan prasarana olahraga milik Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang berfungsi dengan baik (%)	80,00
2.19.9	Persentase cabang olahraga yang dibina (%)	50,00
2.19.10	Persentase masyarakat yang rutin berolahraga rekreasi dan tradisional	14,00
2.19.11	Cakupan pemberian penghargaan kepada insan olahraga Kabupaten	100,00

NO	INDIKATOR	TARGET
	Tanah Laut (%)	
2.19.12	Kejuaraan cabang olah raga antar desa tingkat kabupaten (ada/tidak)	Ada
2.19.13	Jumlah atlet berprestasi di tingkat provinsi dan nasional (%)	1
2.19.14	Persentase perolehan medali di tingkat nasional dan provinsi (%)	100,00
<b>2.20</b>	<b>Statistik</b>	
2.20.1	Persentase ketersediaan data indikator makro daerah tahunan di tingkat kabupaten (%)	100,00
2.20.2	Ketersediaan Buku Kabupaten Dalam Angka (Ada/Tidak)	Ada
2.20.3	Ketersediaan Buku PDRB Kabupaten (Ada/Tidak)	Ada
2.20.4	Ketersediaan Buku Indikator Kesejahteraan Rakyat (Ada/Tidak)	Ada
2.20.5	Ketersediaan Buku Indeks Pembangunan Manusia (Ada/Tidak)	Ada
2.20.6	Ketersediaan Buku Statistik Daerah (Ada/Tidak)	Ada
2.20.7	Persentase data SKPD yang dimuat dalam database satu data (%)	100,00
2.20.8	Ketersediaan data kinerja sektoral dalam SIPD (%)	100,00
<b>2.21</b>	<b>Kebudayaan</b>	
2.21.1	Cakupan Pelestarian dan Pengembangan Budaya daerah (%)	100,00
2.21.2	Cakupan pelestarian dan pengembangan cagar budaya daerah (%)	100,00
2.21.3	Cakupan pelestarian dan pengembangan sejarah dan tradisi daerah (%)	100,00
2.21.4	Cakupan pelestarian dan pengembangan kesenian daerah (%)	100,00
2.21.5	Jumlah even budaya tingkat kabupaten yang diselenggarakan (kali)	2
2.21.6	Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya (unit)	1
2.21.7	Cakupan pembinaan organisasi budaya daerah (%)	100,00
2.21.8	Cakupan fasilitasi sanggar seni dalam festival budaya di tingkat provinsi dan nasional (%)	100,00
2.21.9	Jumlah Desa Peduli Kesenian Daerah (desa)	2
<b>2.22</b>	<b>Perpustakaan</b>	
2.22.1	Pertumbuhan pengunjung perpustakaan (%)	5,00
2.22.2	Cakupan desa yang dikunjungi perpustakaan keliling (%)	20,00
2.22.3	Cakupan pembinaan perpustakaan sekolah (%)	100,00
2.22.4	Cakupan pemenuhan kebutuhan pustakawan (%)	100,00
2.22.5	Desa Gemar Membaca (desa)	2
<b>2.23</b>	<b>Kearsipan</b>	
2.23.1	Tingkat tertib administrasi kearsipan daerah (%)	100,00
2.23.2	Pengelolaan arsip secara baku di tingkat SKPD (%)	40,00
2.23.3	Cakupan pemenuhan kebutuhan pengolahan dan penyimpanan arsip	100,00
2.23.4	Cakupan pemeliharaan arsip daerah (%)	100,00
2.23.5	Cakupan pemenuhan kebutuhan arsiparis (%)	100,00

NO	INDIKATOR	TARGET
2.23.6	Persentase arsip daerah yang telah terdigitalisasi (%)	15,00
	<b>Urusan Pilihan</b>	
<b>2.24</b>	<b>Kelautan dan Perikanan</b>	
2.24.1	Pertumbuhan sub-sektor perikanan (%)	3,00
2.24.2	Produksi perikanan budidaya (ton)	1.162
2.24.3	Nilai tukar pembudidaya ikan (skor)	107,69
2.24.4	Cakupan pelaku usaha perikanan budidaya yang dibina (%)	20,00
2.24.5	Jumlah sentra produksi perikanan budidaya yang dikembangkan	1
2.24.6	Produksi perikanan tangkap (ton)	56.708
2.24.7	Nilai tukar nelayan (skor)	104,57
2.24.8	Persentase kepatuhan pelaku usaha perikanan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan (%)	100,00
2.24.9	Cakupan pelaku usaha perikanan tangkap yang dibina (%)	20,00
2.24.10	Produksi olahan hasil perikanan (ton)	1.379,60
2.24.11	Konsumsi ikan (kg/kapita/orang/tahun)	47,06
2.24.12	Cakupan pelaku usaha pengolah dan pemasar ikan yang dibina (%)	20,00
2.24.13	Jumlah sentra produksi olahan produk ikan yang dikembangkan	2
<b>2.25</b>	<b>Pariwisata</b>	
2.25.1	Jumlah kunjungan wisatawan di objek wisata yang dikembangkan pemerintah (orang)	290.000
2.25.2	PAD sektor pariwisata (Rp Juta)	674,22
2.25.3	Cakupan pengembangan destinasi wisata baru (yang ada dikembangkan/destinasi baru) (%)	100,00
2.25.4	Cakupan pemeliharaan dan pengembangan sarana dan prasarana pariwisata yang difasilitasi pemerintah daerah (%)	100,00
2.25.5	Cakupan pembinaan masyarakat yang terlibat dalam sektor kepariwisataan (%)	20,00
2.25.6	Kelompok sadar wisata yang berkembang (unit)	2
2.25.7	Cakupan pengendalian dan pengawasan usaha jasa kepariwisataan (%)	100,00
2.25.8	Jumlah event pariwisata yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut (kali)	2
2.25.9	Cakupan ketersediaan informasi pariwisata dalam situs pariwisata Kabupaten Tanah Laut (%)	100,00
2.25.10	Cakupan ketersediaan data profil pariwisata Kabupaten Tanah Laut	100,00
<b>2.26</b>	<b>Pertanian</b>	
2.26.1	Pertumbuhan sub-sektor tanaman pangan (%)	3,00
2.26.2	Produksi padi (ton)	248.563
2.26.3	Produksi jagung (ton)	201.588
2.26.4	Produksi kedelai (ton)	1.021

NO	INDIKATOR	TARGET
2.26.5	Produksi kacang tanah (ton)	2.283
2.26.6	Produksi kacang hijau (ton)	189
2.26.7	Produksi ubi kayu (ton)	21.504
2.26.8	Produksi ubi jalar (ton)	3.603
2.26.9	Cakupan fasilitasi penyediaan benih unggul komoditas tanaman pangan (%)	100,00
2.26.10	Cakupan fasilitasi perlindungan komoditas tanaman pangan (%)	100,00
2.26.11	Cakupan pemberian bantuan sarana pasca panen kepada petani tanaman pangan secara tepat syarat dan aturan (%)	100,00
2.26.12	NTP Tanaman Pangan (skor)	106,12
2.26.13	Pertumbuhan sub-sektor tanaman hortikultura (%)	3,00
2.26.14	Produksi cabai (kuintal)	14.165
2.26.15	Produksi tomat (ton)	6.167
2.26.16	Produksi bawang merah (ton)	4.960
2.26.17	Produksi buah naga (ton)	410
2.26.18	Cakupan fasilitasi penyediaan benih unggul komoditas hortikultura unggulan daerah (%)	100,00
2.26.19	Cakupan fasilitasi perlindungan komoditas tanaman hortikultura (%)	100,00
2.26.20	Cakupan pemberian bantuan sarana pasca panen kepada petani tanaman hortikultura secara tepat syarat dan aturan (%)	100,00
2.26.21	NTP Hortikultura (skor)	109,27
2.26.22	Pertumbuhan sub-sektor perkebunan (%)	5,00
2.26.23	Produksi karet (ton)	8.817
2.26.24	Produksi kelapa sawit (ton)	19.914
2.26.25	Cakupan fasilitasi pengembangan dan peremajaan komoditas perkebunan unggulan daerah (%)	100,00
2.26.26	Cakupan pemberian bantuan sarana pasca panen kepada petani tanaman perkebunan secara tepat syarat dan aturan (%)	100,00
2.26.27	Cakupan fasilitasi perlindungan komoditas tanaman perkebunan (%)	100,00
2.26.28	NTP Tanaman Perkebunan	110,87
2.26.29	Cakupan petani yang meningkat keterampilan dan mantap dalam manajemen usaha setelah mendapatkan penyuluhan (%)	100,00
2.26.30	Gapoktan yang memiliki lembaga keuangan mikro (unit)	6
2.26.31	Jumlah kelompok tani yang menerapkan teknologi produksi pertanian terbaru (unit)	4
2.26.32	Penerapan Demplot teknologi pertanian (lokasi)	16
2.26.33	Jumlah kelompok tani baru (pemula) (unit)	70
2.26.34	Jumlah kelompok yang naik kelas lembaganya dari Pemula - Lanjut (unit)	79
2.26.35	Jumlah kelompok yang naik kelas lembaganya dari Lanjut - Madya (unit)	6
2.26.36	Jumlah kelompok yang naik kelas lembaganya dari Madya - Utama (unit)	1

NO	INDIKATOR	TARGET
2.26.37	Jumlah kunjungan penyuluh ke kelompok tani (kali per tahun)	21.160
2.26.38	Cakupan pengadaan sarana dan alat mesin pertanian sesuai prosedur yang berlaku dan tepat syarat (%)	100,00
2.26.39	Cakupan pemberian saran dan alat mesin pertanian kepada petani secara tepat syarat dan aturan (%)	100,00
2.26.40	Fasilitasi pengembangan percontaan sawah/ perluasan area tanam (Ha)	2.755
2.26.41	Fasilitasi pengembangan/pembuatan jalan usaha tani (km)	20
2.26.42	Fasilitasi pengembangan/pembuatan jalan produksi (km)	20
2.26.43	Fasilitasi pengembangan/pembuatan embung (unit)	3
2.26.44	Fasilitasi pengembangan jaringan irigasi (ha)	300
2.26.45	Fasilitasi optimalisasi pengelolaan lahan (Ha)	400
2.26.46	Pertumbuhan sub-sektor peternakan (%)	3,00
2.26.47	Cakupan peternak yang meningkat keterampilan dan mantap dalam manajemen usaha setelah mendapatkan penyuluhan (%)	100,00
2.26.48	Persentase kelompok peternak yang dapat mengembangkan usahanya	18,00
2.26.49	Cakupan ketersediaan data profil dan potensi pengembangan peternakan (%)	100,00
2.26.50	Persentase pelaku usaha peternakan binaan yang bermitra dengan pihak lain	15,00
2.26.51	Realisasi investasi sektor peternakan (Rp miliar)	10,00
2.26.52	Cakupan pengadaan sarana dan prasarana peternakan sesuai prosedur yang berlaku dan tepat syarat (%)	100,00
2.26.53	Cakupan pemberian sarana dan prasarana peternakan kepada petani secara tepat syarat dan aturan (%)	100,00
2.26.54	Produksi daging sapi (kg)	285.065
2.26.55	Produksi daging kerbau (kg)	52.242
2.26.56	Produksi daging kambing (kg)	13.120
2.26.57	Produksi daging domba (kg)	425
2.26.58	Produksi daging ayam ras petelur (kg)	1.352.001
2.26.59	Produksi daging ayam ras pedaging (kg)	8.024.081
2.26.60	Produksi daging ayam ras buras (kg)	552.775
2.26.61	Produksi daging itik (kg)	76.807
2.26.62	Produksi telur ayam ras (kg)	77.932.034
2.26.63	Produksi telur ayam buras (kg)	2.224.149
2.26.64	Produksi telur itik (kg)	1.427.570
2.26.65	Cakupan fasilitasi pendistribusian bibit ternak unggul kepada masyarakat tepat syarat (%)	100,00
2.26.66	Cakupan fasilitasi pengembangan pakan ternak unggul bagi peternak	100,00
2.26.67	Cakupan fasilitasi pendistribusian semen bibit ternak unggul (%)	100,00
2.26.68	Cakupan fasilitasi pelaksanaan inseminasi buatan (%)	100,00
2.26.69	Jumlah Desa Lumbung Ternak (desa)	5
2.26.70	Cakupan fasilitasi pencegahan penyakit ternak (%)	100,00

NO	INDIKATOR	TARGET
2.26.71	Cakupan fasilitasi pemeriksaan penyakit ternak (%)	100,00
2.26.72	Cakupan pengawasan produk asal hewan di wilayah prioritas (%)	100,00
2.26.73	Persentase jaminan pangan asal hewan yang ASUH (%)	100,00
2.26.74	Cakupan fasilitasi penanganan pasca panen dan pengolahan hasil peternakan (%)	100,00
2.26.75	Cakupan pembinaan kelompok pengolah hasil peternakan (%)	100,00
2.26.76	Cakupan fasilitasi pemasaran produk pasca panen hasil peternakan	100,00
2.26.77	NTP Peternakan (skor)	112,49
<b>2.27</b>	<b>Perdagangan</b>	
2.27.1	Pertumbuhan sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor (%)	7,00
2.27.2	Cakupan rekomendasi TPID yang ditindaklanjuti (%)	100,00
2.27.3	Persentase penyelesaian keluhan konsumen yang ditindaklanjuti (%)	100,00
2.27.4	Cakupan monitoring ketersediaan stok dan harga barang (%)	100,00
2.27.5	Cakupan rekomendasi pengurangan hambatan perdagangan dan pengawasan perdagangan yang ditindaklanjuti (%)	100,00
2.27.6	Cakupan fasilitasi peningkatan pemasaran komoditas unggulan Kabupaten Tanah Laut (%)	100,00
2.27.7	Cakupan fasilitasi peningkatan perlindungan konsumen di seluruh kabupaten (%)	100,00
2.27.8	Cakupan pengembangan BPPMB (%)	100,00
2.27.9	Cakupan pengawasan barang Ber-SNI wajib dan Jasa Daerah (%)	100,00
2.27.10	Cakupan pelayanan kemetrolagian daerah (%)	100,00
2.27.11	Cakupan standarisasi UTTP bidang perdagangan (%)	100,00
2.27.12	Cakupan pembinaan bagi pedagang kakilima dan asongan (%)	100,00
2.27.13	Cakupan pembinaan ketertiban dan keindahan pasar daerah (%)	100,00
2.27.14	Cakupan pemeliharaan sarana prasarana pasar daerah (%)	100,00
2.27.15	Cakupan ketersediaan sarana prasarana pasar daerah (%)	100,00
2.27.16	Penerimaan retribusi pelayanan pasar (Rp)	1.204.759.442
2.27.17	Cakupan ketersediaan data profil pasar daerah (%)	100,00
<b>2.28</b>	<b>Perindustrian</b>	
2.28.1	Pertumbuhan sektor industri pengolahan (%)	6,00
2.28.2	Pertumbuhan jumlah IKM	2,00
2.28.3	Jumlah IKM berkembang	5
2.28.4	Jumlah IKM yang menerapkan teknologi tepat guna	2
2.28.5	Jumlah sentra industri rakyat	2
2.28.6	Persentase IKM yang memiliki sertifikasi mutu barang	12,00
2.28.7	Persentase usaha industri dan kawasan industri yang beroperasi sesuai dengan NSPK (%)	100,00
2.28.8	Jumlah Industri Kreatif yang memberi nilai tambah terhadap	15 Unit Usaha

NO	INDIKATOR	TARGET
	perekonomian	
2.28.9	Jumlah usaha dan kelompok masyarakat pengguna teknologi inovatif yang berkembang (unit)	5 Unit Usaha
2.28.10	Jumlah Industri Kreatif yang tumbuh dan berkembang (unit)	15 Unit Usaha
2.28.11	Cakupan fasilitasi rencana pengembangan Kawasan Industri Jorong	100,00
2.28.12	Jumlah IKM	60
2.28.13	Jumlah IKM Unggulan	25
	<b>Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang</b>	
<b>2.29.</b>	<b>Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan</b>	
2.29.1	Cakupan penyepakatan batas antar kelurahan (%)	75,00
2.29.2	Cakupan penyepakatan batas wilayah Kabupaten Tanah Laut (%)	100,00
2.29.3	Cakupan Kinerja Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN Plus) (%)	100,00
2.29.4	Peringkat LPPD (skor)	3,1000 (sangat tinggi)
2.29.5	Skor EKPPD terhadap LPPD Kabupaten Tanah laut (kategori)	Sangat Tinggi
2.29.6	Cakupan penyepakatan kerjasama pemerintah daerah yang ditindaklanjuti (%)	100
2.29.7	Ketepatan waktu penyampaian LKPI dan LPPD	Tepat Waktu
2.29.8	Cakupan Fasilitasi pelimpahan urusan pemerintahan Kabupaten dan Kecamatan (kecamatan)	11
2.29.9	Cakupan pemenuhan IKK (%)	100,00
2.29.10	Persentase SKPD Tertib Administrasi Pembangunan Daerah yang bersumber APBN (%)	100,00
2.29.11	Persentase SKPD Tertib Administrasi Pembangunan Daerah yang bersumber APBD (%)	100,00
2.29.12	Persentase produk hukum daerah/naskah perjanjian daerah/naskah keperdataan lainnya yang harmonis, menjamin kepastian hukum dan mengayomi kepentingan daerah dan masyarakat	100,00
2.29.13	Persentase produk hukum daerah yang dibatalkan oleh Kemendagri dan Gubernur (%)	0
2.29.14	Cakupan penanganan masalah hukum non litigasi (%)	100,00
2.29.15	Persentase pelayanan bantuan hukum/konsultasi/advokasi hukum bagi aparatur, masyarakat dan pemerintah desa (%)	100,00
2.29.16	Persentase pelayanan advokasi hukum bidang tindak pidana bagi masyarakat melalui bantuan hukum bagi masyarakat miskin (%)	100,00
2.29.17	Persentase terpublikasikannya produk hukum daerah (%)	100,00
2.29.18	Ketersediaan mekanisme penyusunan produk hukum (%)	100,00
2.29.19	Persentase Raperda yang disetujui DPRD dalam Prolegda (%)	100,00
2.29.20	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Daerah (kategori)	BB (77,00)
2.29.21	Indeks Reformasi Birokrasi (skor)	6,2(Baik)

NO	INDIKATOR	TARGET
2.29.22	Indeks kepuasan masyarakat (skor)	76,5 (Baik)
2.29.23	Penghargaan inovasi publik (jumlah)	1 penghargaan
2.29.24	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik yang didaftarkan	2
2.29.25	Indeks keterbukaan informasi publik (skor)	70,00
2.29.26	Perangkat daerah yang memiliki layanan Pengelola Informasi dan Dokumentasi (SKPD) (%)	15 SKPD
2.29.27	Cakupan pemenuhan dokumen ketatalaksanaan (%)	100,00
2.29.28	Persentase kelembagaan Pemerintah Daerah yang tepat fungsi, dan tepat struktur (%)	100,00
2.29.29	Cakupan SKPD Kabupaten Tanah laut yang sudah dilakukan analisis dan/atau evaluasi jabatan (%)	100,00
2.29.30	Persentase Rekomendasi dari ABK yang ditindaklanjuti (%)	100,00
2.29.31	Cakupan Pembinaan Lembaga Pembiayaan Usaha Kecil (LPUK) (%)	100,00
2.29.32	Cakupan Pengawasan dan Pembinaan Manajemen BUMD (Jumlah BUMD yang memenuhi kewajiban minimalnya (%)	100,00
2.29.33	Cakupan Monitoring dan evaluasi bidang ekonomi yang terlaksana	100,00
2.29.34	Persentase Rekomendasi dari TPID yang ditindaklanjuti (%)	100,00
2.29.35	Tingkat Inflasi Daerah (%)	5,00
2.29.36	Cakupan komoditas strategis yang dikembangkan (%)	100,00
2.29.37	BUMD yang berkembang dan menghasilkan keuntungan (%)	100,00
2.29.38	Cakupan monitoring dan evaluasi perekonomian pembangunan (%)	100,00
2.29.39	Persentase SKPD yang melaksanakan Pengadaan Barang dan Jasa melalui LPSE (%)	100,00
2.29.40	Persentase pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah Kabupaten Tanah Laut secara elektronik (E- Procurement) sesuai standar (%)	100,00
2.29.41	Tingkat pelanggaran pengadaan barang dan jasa (%)	0
2.29.42	Tersusunnya laporan pengadaan barang dan jasa (dokumen)	1
2.29.43	Cakupan fasilitasi Prasarana Peribadatan, Lembaga Sosial Keagamaan dan Lembaga Keagamaan yang memadai (%)	100,00
2.29.44	Persentase fasilitasi kegiatan Peringatan Hari-Hari Besar Keagamaan	100,00
2.29.45	Cakupan Fasilitasi kegiatan Syariah Keagamaan (%)	100,00
2.29.46	Persentase Permohonan Bantuan Hibah yang terlaksana secara tepat syarat (%)	100,00
2.29.47	Jumlah Guru TPA, Madin, Ponpes dan PAH yang aktif (orang)	3.072
2.29.48	Cakupan ketersediaan informasi pembangunan daerah kepada masyarakat (%)	100,00
2.29.49	Cakupan pemberitaan kegiatan pembangunan Pemerintah Daerah yang terekspos ke media	100,00
2.29.50	Cakupan kegiatan keprotokolan KDH/ WKDH/ Kepada SKPD /tamu	100,00



NO	INDIKATOR	TARGET
	Daerah sesuai jadwal secara tepat sasaran (%)	
2.29.51	Cakupan pengaduan masyarakat yang diterima dan ditindaklanjuti (%)	100,00
2.29.52	Cakupan publikasi kegiatan Bupati dan Wakil Bupati (%)	100,00
2.29.53	Cakupan fasilitasi penyediaan jasa perkantoran (makanan dan minuman, komunikasi, air, listrik, kendaraan dinas/operasional, dan perlengkapan) untuk kantor dan rumah jabatan (%)	100,00
2.29.54	Cakupan fasilitasi penyediaan dan pemeliharaan kantor dan rumah jabatan (%)	100,00
2.29.55	Persentase kelancaran pelayanan rumah tangga pimpinan (%)	100,00
2.29.5	Cakupan pengelolaan sarana dan prasarana /aset milik Sekretariat Daerah yang terkelola dengan baik (%)	100,00
2.29.57	Cakupan BMD yang telah diappraisal (%)	100,00
2.29.58	Tingkat kapasitas SDM pengelola barang milik daerah (kategori)	Baik
2.29.59	Persentase SKPD yang mengimplementasikan buku pedoman pelaksanaan APBD dan standar barang (%)	100,00
2.29.60	Tersedianya Dokumen Inventaris Barang Milik Daerah Kabupaten Tanah Laut (Ada/Tidak)	Ada
2.29.61	Tersedianya Kodefikasi Barang Milik Daerah se-Kabupaten Tanah Laut (Ada/Tidak)	Ada
2.29.62	Tersusunnya Regulasi Pengelolaan Barang Milik Daerah (Ada/Tidak)	Ada
2.29.63	Cakupan fasilitasi penyediaan jasa, bahan, peralatan dan perlengkapan perkantoran, rapat-rapat, koordinasi, konsultasi, penunjang SKPD, dan administrasi keuangan (%)	100,00
2.29.64	Cakupan ketersediaan dan kelayakan sarana dan prasarana aparatur, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia (%)	100,00
2.29.65	Tersedianya dokumen Renstra Perangkat Daerah yang selaras dengan RPJMD (dokumen)	-
2.29.66	Tersedianya dokumen Renja Perangkat Daerah yang selaras dengan Renstra dan RKPD (dokumen)	1 dokumen
2.29.67	Nilai LAKIP perangkat daerah (kategori)	BB
2.29.68	Opini pemeriksa terhadap laporan keuangan (kategori)	WTP
2.29.69	Survei kepuasan masyarakat (kategori)	Baik
2.29.70	Cakupan administrasi kepegawaian yang dikelola dengan tertib (%)	100,00
2.29.71	Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan Perda, dan fungsi anggaran dalam RPJMD maupun RKPD (%)	100,00
2.29.72	Cakupan ketersediaan Rencana Kerja Tahunan pada setiap Kelengkapan (%)	100,00
2.29.73	Terintegrasinya program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda, dan anggaran ke dalam dokumen perencanaan dan dokumen anggaran Setwan DPRD (%)	100,00

NO	INDIKATOR	TARGET
2.29.74	Persentase Perda yang ditetapkan sesuai Prolegda (%)	100,00
2.29.75	Persentase rekomendasi DPRD dari LKPj yang dilaksanakan (%)	100,00
2.29.76	Persentase rekomendasi DPRD dari RDP yang dilaksanakan ((%)	100,00
2.29.77	Cakupan fasilitasi pembahasan rancangan peraturan daerah (%)	100,00
2.29.78	Cakupan fasilitasi rapat-rapat kegiatan DPRD (%)	100,00
2.29.79	Cakupan fasilitasi kegiatan reses dan penyusunan pokok pikiran DPRD (%)	100,00
2.29.80	Cakupan fasilitasi kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD (%)	100,00
2.29.81	Cakupan fasilitasi peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	100,00
2.29.82	Cakupan informasi parlemen yang terdokumentasi dan dipublikasikan kepada Masyarakat (%)	100,00
2.29.83	Cakupan fasilitasi keprotokolan pimpinan dan anggota DPRD (%)	100,00
2.29.84	Cakupan ketersediaan capaian kinerja perangkat daerah dalam SIPD	100,00
2.29.85	Cakupan ketersediaan kinerja perangkat daerah dalam laman resmi perangkat daerah (%)	100,00
2.29.86	Cakupan penyediaan kelengkapan dan jasa bagi pimpinan dan anggota DPRD (%)	100,00
2.29.87	Cakupan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintah desa dan pemerintahan umum di kecamatan (%)	100,00
2.29.88	Cakupan koorinasi dan fasilitasi pembinaan ketentraman dan ketertiban umum lingkup kecamatan (%)	100,00
2.29.89	Cakupan perwakilan desa yang mengikuti kegiatan pembinaan dan pelatihan di kecamatan (%)	100,00
2.29.90	Cakupan penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan (%)	100,00
2.29.91	Cakupan monitoring dan evaluasi hasil Musrenbang Desa (%)	100,00
2.29.92	Cakupan Kinerja Program Aksi Keagamaan dan Sosial lingkup Kecamatan (Program Unggulan #3) (jumlah)	11 Kecamatan
2.29.93	Cakupan pelayanan yang diberikan kecamatan kepada masyarakat sesuai dengan SOP (%)	100,00
2.29.94	Cakupan ketersediaan profil yang berisi data potensi pengembangan kelurahan (%)	100,00
2.29.95	Cakupan koordinasi dan fasilitasi pembinaan ketentraman dan ketertiban umum lingkup kelurahan (%)	100,00
2.29.96	Cakupan RW yang mengikuti kegiatan pembinaan dan pelatihan pengembangan ekonomi di lingkup kelurahan (%)	100,00
2.29.97	Cakupan penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan (%)	100,00
2.29.98	Cakupan fasilitasi pembinaan dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan lingkup kelurahan (%)	100,00
<b>2.30</b>	<b>Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan Pembangunan</b>	
2.30.1	Indeks Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah (kategori)	Baik
2.30.2	Cakupan realisasi perencanaan program pembangunan ekonomi dan	100,00

NO	INDIKATOR	TARGET
	sumber daya alam (%)	
2.30.3	Cakupan ketersediaan bahan kebijakan perencanaan pembangunan ekonomi dan sumber daya alam (%)	100,00
2.30.4	Cakupan monitoring evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan ekonomi dan sumber daya alam (%)	100,00
2.30.5	Cakupan realisasi perencanaan program pembangunan sosial dan budaya (%)	100,00
2.30.6	Cakupan ketersediaan bahan kebijakan perencanaan pembangunan sosial dan budaya (%)	100,00
2.30.7	Cakupan monitoring evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan sosial dan budaya (%)	100,00
2.30.8	Indeks kinerja TKPKD Kabupaten Tanah Laut (kategori)	Baik
2.30.9	Cakupan realisasi perencanaan program pembangunan bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah (%)	100,00
2.30.10	Cakupan bahan kebijakan perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah	100,00
2.30.11	Cakupan monitoring evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah (%)	100,00
2.30.12	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan Perda (Ada/Tidak)	Ada
2.30.13	Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda (Ada/Tidak)	Ada
2.30.14	Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan Perkada (ada/Tidak)	Ada
2.30.15	Persentase penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD	100,00
2.30.16	Persentase penjabaran konsistensi program RKPD ke dalam APBD	100,00
2.30.17	Persentase penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam Renstra SKPD (%)	100,00
2.30.18	Cakupan partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan (%)	100,00
<b>2.31</b>	<b>Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Penelitian dan Pengembangan</b>	
2.31.1	Cakupan kajian kelitbangan yang disusun menjadi rekomendasi kebijakan daerah (%)	70,00
2.31.2	Persentase kajian yang dipublikasikan dalam jurnal atau bulletin (%)	10,00
2.31.3	Cakupan pemanfaatan hasil kajian kelitbangan (%)	100,00
<b>2.32.</b>	<b>Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan</b>	
2.32.1	Cakupan pegawai yang memiliki sertifikat diklat kompetensi manajerial (%)	100,00
2.32.2	Cakupan pegawai yang memiliki sertifikat diklat kompetensi teknis	100,00
2.32.3	Persentase jabatan yang diisi sesuai dengan kompetensi (%)	100,00
2.32.4	Tingkat Penurunan Pelanggaran Disiplin Pegawai (%)	0
2.32.5	Persentase peserta ujian dinas yang lulus (%)	100,00

NO	INDIKATOR	TARGET
2.32.6	Penerapan Merit System dalam manajemen kepegawaian (%)	100,00
2.32.7	Cakupan pegawai yang mengikuti pendidikan penjenjangan struktural secara tepat syarat (%)	100,00
2.32.8	Jumlah pegawai yang mengikuti tugas belajar dan ikatan dinas (orang)	50
2.32.9	Cakupan pelayanan pindah pegawai dan purna tugas (%)	100,00
2.32.10	Cakupan ketersediaan sistem administrasi kepegawaian secara online	90,00
2.32.11	Cakupan ketersediaan data aparatur Pemerintah Kabupaten Tanah Laut (%)	100,00
2.32.12	Cakupan ketersediaan pembinaan dan pengembangan karir PNS (%)	100,00
<b>2.33.</b>	<b>Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan</b>	
2.33.1	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah (%)	11,00
2.33.2	Pertumbuhan PAD (%)	12,70
2.33.3	Persentase pelanggaran wajib pajak daerah (%)	5,00
2.33.4	Pertumbuhan penerimaan pajak daerah (%)	20,00
2.33.5	Cakupan ketersediaan sistem informasi pajak daerah (%)	100,00
2.33.6	Ketersediaan data wajib pajak dan potensi penerimaan pajak daerah	100,00
2.33.7	Pertumbuhan penerimaan PBB dan BPHTB (%)	7,00
2.33.8	Pertumbuhan penerimaan retribusi daerah (%)	20,00
2.33.9	Cakupan ketersediaan sistem informasi retribusi daerah (%)	100,00
2.33.10	Ketersediaan data potensi penerimaan retribusi daerah (%)	100,00
2.33.11	Opini Pengawas Eksternal (BPK) terhadap Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah (opini)	WTP
2.33.12	Penetapan APBD dan Perubahan APBD Tepat Waktu dan Sesuai Aturan Berlaku (%)	100,00
2.33.13	Penetapan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang tepat waktu dan sesuai aturan (%)	100,00
2.33.14	Persentase SILPA terhadap Belanja APBD (%)	10,00
	Persentase program/kegiatan yang tidak terlaksana (%)	10,00
2.33.15	Persentase belanja pendidikan 20%	19,62
2.33.16	Persentase belanja kesehatan 10%	11,5
2.33.17	Perbandingan antara belanja langsung dengan tidak langsung	55:45
2.33.18	Persentase SKPD yang menerapkan Laporan Keuangan yang berbasis Akrua (%)	100,00
2.33.19	Persentase BMD yang sudah dilengkapi persyaratan untuk dipelihara dan dimanfaatkan (%)	90,00
2.33.20	Persentase BMD yang dicatat dengan akurat (%)	100,00
2.33.21	Cakupan penertiban BMD (%)	100,00
<b>2.34</b>	<b>Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Pengawasan</b>	
2.34.1	Tingkat Maturitas Penerapan SPIP (skor)	3,4 (Berkembang)

NO	INDIKATOR	TARGET
<b>3.</b>	<b>ASPEK DAYA SAING</b>	
<b>3.1.</b>	<b>Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah</b>	
	<b>Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Umum, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian</b>	
3.1.1.	Pengeluaran per kapita penduduk per tahun (Rp)	11.825,57
3.1.2.	Persentase pengeluaran konsumsi makanan (%)	52,14
<b>3.2</b>	<b>Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur</b>	
3.2.1	NTP Tanaman Pangan (skor)	106,12
3.2.2	NTP Hortikultura (skor)	109,27
3.2.3	NTP Tanaman Perkebunan	110,87
3.2.4	NTP Peternakan (skor)	112,49
3.2.5	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan (rasio)	1 : 250
3.2.6	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW Kabupaten (%)	65,00
3.2.7	Kawasan industri yang dikembangkan (kawasan)	1
3.2.8	Jumlah hotel (unit)	4
3.2.9	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon (%)	70,00
<b>3.3</b>	<b>Fokus Iklim Berinvestasi</b>	
3.3.1	Angka kriminalitas yang tertangani (%)	100,00
3.3.2	Jumlah demo	2
3.3.3	Persentase pelayanan permohonan perizinan dan perizinan sesuai dengan SOP/tepat waktu dan tepat syarat (%)	100,00
3.3.4	Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah	2 (25)
3.3.5	Cakupan Perda yang mendukung iklim usaha (%)	100,00
<b>3.4</b>	<b>Fokus Sumber Daya Manusia</b>	
3.4.1.	Rasio lulusan S1/S2/S3 (%)	40,00
3.4.2.	Rasio ketergantungan (%)	47,00

## **BAB VII**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah. Proses penyusunan RKPD Tahun 2021 berlandaskan pada prioritas pembangunan yang mendukung pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021, RKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021, dan RPJMD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018 – 2023. RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi makro daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rancangan kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1(satu) tahun.

Dokumen RKPD ini menjadi pedoman kepala daerah dalam menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Nota kesepakatan KUA dan PPAS akan digunakan sebagai dasar penyusunan RAPBD. Kemudian fungsi RKPD lainnya adalah sebagai bahan evaluasi RAPBD untuk memastikan APBD telah disusun berlandaskan pada RKPD dan dokumen RKPD dijadikan sebagai acuan/pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyusun dan melaksanakan tugas dan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan.

Agar program dan kegiatan masing-masing OPD dapat berjalan sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan dan dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi alokasi sumberdaya serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan program pembangunan, maka diperlukan instrumen pengendalian, monitoring dan evaluasi. Adapun instrumen pengendalian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dalam tata cara pengendalian tersebut dapat disajikan program dan kegiatan yang sudah direncanakan dengan target-target tertentu dan bagaimana pelaksanaan program dan kegiatan tersebut

oleh masing-masing OPD dan yang dievaluasi tidak hanya kesesuaian antara rencana dengan pelaksanaan saja, akan tetapi mencakup juga tingkat capaian kinerja pada setiap tahapan pelaksanaannya. Pada tata cara pengendalian tersebut menempatkan OPD pada posisi strategis, dimana OPD mempunyai kewenangan untuk melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan sendiri dan diharapkan apabila terjadi tidak kesesuaian dapat segera diambil langkah tindak lanjut sebagai upaya preventif dan korektif sebelum pelaksanaan program dan kegiatan tersebut menyimpang.

Kemudian RKPD ini disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta digunakan sebagai pedoman pemerintah daerah dalam menyelenggarakan kegiatan pembangunan tahunan agar bisa berjalan dengan baik. Jika pelaksanaan tahun berjalan RKPD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan atau tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah serta rencana program dan kegiatan, akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian dalam bentuk RKPD Perubahan dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pelaihari, Juli 2020

BUPATI TANAH LAUT,

H. SUKAMTA